PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
Jln. Jend. Sudirman No. 5 Kisaran
www.asahankab.go.id



LAMBANG BERBENTUK PERISAI ATAU TAMENG MENGGAMBARKAN KESIAPSIAGAAN RAKYAT ASAHAN DALAM MELINDUNGI DAERAH DAN TANAH AIR DARI SERANGAN MUSUH.

SUDUT-SUDUT BERSEGI LIMA, WARNA KUNING EMAS, MELAMBANGKAN KEHIDUPAN PANCASILA DI ASAHAN TUJUH BELAS BUAH PADI DAN 8 BUAH KAPAS DAN 45 HELAI DAUN SIRIH TERSUSUN ADALAH MELAMBANGKAN CIRI KHAS JIWA DAN SEMANGAT PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945.

LINGKARAN PADI, BUNGA KAPAS DAN DAUN SIRIH BERBENTUK TANDUK KERBAU ADALAH MENGGAMBARKAN KERUKUNAN HIDUP SUKU-SUKU YANG BERDIAM DI ASAHAN.

SERUMPUN RUMPUT ASAHAN YANG SPESIFIK MENCERMINKAN ADANYA SUKU-SUKU BANGSA DI ASAHAN.

EMPAT BUAH BUKIT-BUKIT PEGUNUNGAN ADALAH TEMPAT RAKYAT BERGERILYA DIMASA PERANG KEMERDEKAAN MEMPERTAHANKAN REPUBLIK INDONESIA DI ASAHAN DAN PERLAMBANG KEHIDUPAN DAERAH ASAHAN DENGAN 4 TETANGGA KABUPATEN.

RANTAI BERANGKAI 5 ADALAH DASAR PERIKEMANUSIAAN DAN PERSATUAN RAKYAT ASAHAN.

RODA BERGIGI 5 MELAMBANGKAN RAKYAT ASAHAN MEMPUNYAI KETERAMPILAN KERJA DIBIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PEMBANGUNAN DAERAHNYA.

LAUT BIRU YANG BERGARIS 3 GELOMBANG OMBAK MELAMBANGKAN DAERAH ASAHAN TERDIRI DARI DATARAN TINGGI, DATARAN RENDAH DAN PANTAI SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN RAKYAT ASAHAN.

IKAN DAN KELAPA ADALAH SUMBER PENGHASILAN POKOK RAKYAT DAERAH ASAHAN DAN PEMBINAAN HARI DEPANNYA.

PITA SELENDANG ASAHAN MELAMBANGKAN KEINDAHAN, KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT ASAHAN YANG SPESIFIK.

TUGU DALAM BENTUK BAMBU RUNCING DAN KOLAM MELAMBANGKAN PERJUANGAN RAKYAT ASAHAN DALAM MEMPERTAHANKAN DAN MENGISI KEMERDEKAAN RI PANCASILA.

KERANG DI PANGKAL TUGU MELAMBANGKAN KEHIDUPAN KENELAYANAN PENGORBANAN DAN KEMASYHURANNYA.

BAGIAN ATAS LAMBANG DILETAKKAN SEMBOYAN "RAMBATE RATA RAYA" ARTINYA KERJA KERAS BERSAMA UNTUK MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR.



H. SURYA, B.SC

BUPATI ASAHAN

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

WAKIL BUPATI ASAHAN

SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Asahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Iman dan Taqwa selanjutnya disebut dengan IMTAQ adalah Keyakinan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk tetap taat melaksanakan perintah dan menjauhi segala laranganNya.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman bagi:

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD; dan/atau

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-SKPD.

Pasal 4

(1) BAPPEDA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX : PENUTUP

Pasal 7

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.

(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran

Pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

Ttd

JHON HARDI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (3-88/2021)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021-2026

I. PENJELASAN UMUM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana amanat undang-undang, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menyusun RPJMD sesuai periode kepemimpinannya RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD yang disusun hasil perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga harus memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi. RPJMD merupakan salah satu produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakan isi rencana tersebut. Sementara itu, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainnya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dimaksud melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR .....

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT , karena dengan rahmat dan hidayat-Nya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Sesuai ketentuan Pasal 263 dan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Selanjutnya pada Pasal 264 ayat 1 dan ayat 4 dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, maka penyusunan RPJMD di Kabupaten Asahan telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD dan penetapan RPJMD, Konsultasi dengan Gubernur Sumatera Utara serta pembahasan dengan DPRD Kabupaten Asahan dan penetapannya menjadi Peraturan Daerah. Semua proses telah dilalui bersama dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 disusun dalam 9 (sembilan) bab. Bab 1 membahas tentang Pendahuluan, Bab 2 membahas tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab 3 membahas tentang Gambaran Keuangan Daerah, Bab 4 membahas Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, Bab 5 membahas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Bab 6 membahas tentang strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah, Bab 7 membahas tentang kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, Bab 8 membahas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Bab 9 Penutup.

RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2026. Indikasi rencana program yang termuat dalam RPJMD akan diimplementasikan Perangkat Daerah melalui kegiatan setiap tahunnya untuk mewujudkan Visi, "**MASYARAKAT ASAHAN SEJAHTERA YANG RELIGIUS DAN BERKARAKTER".**

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD ini, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga aktivitas yang kita laksanakan senantiasa mendapat petunjuk dan ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Kisaran, Agustus 2021

BUPATI ASAHAN,

H. SURYA B,Sc.

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	iii
	DAFTAR TABEL	viii
	DAFTAR GAMBAR	xiii
	BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum	I-4
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.3.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025	I-7
1.3.2	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	I-12
1.3.3	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	I-14
1.3.4	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Asahan 2013-2033	I-17
1.3.5	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Asahan 2021-2026	I-18
1.3.5.1	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	I-18
1.3.5,2	Kesepakatan Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	I-20
1.3.5,3	Skenario Pembangunan Berkelanjutan	I-20
1.4	Maksud dan Tujuan	I-20
1.4.1	Maksud	I-21
1.4.2	Tujuan	I-21
1.5	Sistematika Penulisan	I-21
	BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1	Kondisi Administrasi	II-1
2.1.1.2	Iklim	II-4
2.1.1.3	Topografi	II-5
2.1.1.4	Geologi	II-6
2.1.1.5	Hidrologi	II-7
2.1.1.6	Penggunaan Lahan	II-8
2.1.2	Kondisi Demografi	II-11
2.1.3	Potensi Pengembangan Wilayah	II-15
2.1.3.1	Posisi Strategis Kabupaten Asahan pada Konstelasi Regional	II-15
2.1.3.2	Proyeksi Pengembangan Sistem Perkotaan di Kabupaten Asahan	II-19
2.1.4	Wilayah Rawan Bencana	II-25
2.1.5	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-28
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-49
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-49
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	II-49
2.2.1.2	Struktur Ekonomi	II-53
2.2.1.3	Laju Inflasi	II-55
2.2.1.4	Pendapatan Per Kapita	II-56
2.2.1.5	Indeks Gini	II-58
2.2.1.6	Kemiskinan	II-59
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial/Masyarakat	II-69

2.2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	II-69
2.2.2.2	Angka Melek Huruf	II-72
2.2.2.3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-72
2.2.2.4	Angka Usia Harapan Hidup	II-74
2.2.2.5	Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	II-76
2.2.2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-80
2.2.2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-82
2.2.2.8	Rasio Penduduk yang Bekerja	II-84
2.2.2.9	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	II-85
2.2.2.10	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	II-86
2.2.2.11	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	II-87
2.2.2.12	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	II-88
2.2.2.13	Persentase PAD terhadap Pendapatan	II-90
2.2.2.14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	II-92
2.2.2.15	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	II-93
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-95
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-98
2.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-98
2.3.1.1	Pendidikan	II-98
2.3.1.2	Kesehatan	II-114
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-123
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II-134
2.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	II-143
2.3.1.6	Sosial	II-146
2.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-148
2.3.2.1	Tenaga Kerja	II-148
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-153
2.3.2.3	Pangan	II-160
2.3.2.4	Pertanahan	II-168
2.3.2.5	Lingkungan Hidup	II-170
2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-171
2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	II-172
2.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-173
2.3.2.9	Perhubungan	II-176
2.3.2.10	Komunikasi dan Informatika	II-179
2.3.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-181
2.3.2.12	Penanaman Modal	II-184
2.3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	II-186
2.3.2.14	Statistik	II-188
2.3.2.15	Persandian	II-189
2.3.2.16	Kebudayaan	II-190
2.3.2.17	Perpustakaan	II-191
2.3.2.18	Kearsipan	II-192
2.3.3	Urusan Pelayanan Pilihan	II-192
2.3.3.1	Kelautan dan Perikanan	II-192
2.3.3.2	Pariwisata	II-197
2.3.3.3	Pertanian	II-198
2.3.3.4	Perdagangan	II-206
2.3.3.5	Perindustrian	II-207
2.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-211
2.3.4.1	Sekretariat Daerah	II-211
2.3.4.2	Sekretariat DPRD	II-215
2.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-216

2.3.5.1	Perencanaan	II-216
2.3.5.2	Keuangan	II-219
2.3.5.3	Kepegawaian	II-223
2.3.5.4	Pendidikan dan Pelatihan	II-224
2.3.5.5	Penelitian dan Pengembangan	II-226
2.3.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-227
2.3.6.1	Inspektorat	II-227
2.3.7	Unsur Pemerintahan Umum	II-228
2.3.7.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	II-228
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-229
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-229
2.4.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-229
2.4.1.2	Nilai Tukar Petani	II-230
2.4.1.3	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	II-232
2.4.1.4	Produktivitas Total Daerah	II-233
2.4.1.5	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita	II-235
2.4.1.6	Persentase Pengeluaran untuk Konsumsi Menurut Golongan Pengeluaran	II-236
2.4.1.7	Kemajuan dan Kemandirian Desa	II-237
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-240
2.4.2.1	Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan	II-240
2.4.2.2	Ketaatan terhadap Ketentuan Penataan Ruang	II-244
2.4.2.3	Luas Kawasan Industri	II-245
2.4.2.4	Kawasan Perkotaan	II-245
2.4.2.5	Jumlah Restoran/Rumah Makan	II-245
2.4.2.6	Jumlah Penginapan/Hotel	II-247
2.4.2.7	Presentase Pengguna Air Bersih PDAM	II-249
2.4.2.8	Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	II-250
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-252
2.4.3.1	Angka Kriminalitas	II-252
2.4.3.2	Jumlah Demonstrasi	II-254
2.4.3.3	Kemudahan Perizinan dan Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	II-255
2.4.3.4	Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah	II-255
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-256
2.4.4.1	Kualitas Tenaga Kerja	II-256
2.4.4.2	Rasio Ketergantungan	II-257
	BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2016-2020	III-2
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020	III-2
3.1.1.1	Pendapatan Daerah	III-4
3.1.1.2	Belanja Daerah	III-9
3.1.1.3	Pembiayaan Daerah	III-13
3.2	Analisis Keuangan Daerah	III-15
3.2.1	Ruang Fiskal Daerah	III-15
3.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	III-18
3.2.2	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah	III-19
3.2.3	Analisis Pembiayaan	III-20
3.2.4	Neraca Daerah	III-22
3.3	Kerangka Pendanaan: Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-31
	BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1

4.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-13
4.2.1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	IV-13
4.2.1.1	Urusan Pendidikan	IV-13
4.2.1.2	Urusan Kesehatan	IV-14
4.2.1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-14
4.2.1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-15
4.2.1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	IV-15
4.2.1.6	Urusan Sosial	IV-15
4.2.2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV-16
4.2.2.1	Urusan Tenaga Kerja	IV-16
4.2.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-16
4.2.2.3	Urusan Pangan	IV-16
4.2.2.4	Urusan Pertanahan	IV-17
4.2.2.5	Urusan Lingkungan Hidup	IV-17
4.2.2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV-17
4.2.2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-17
4.2.2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV-18
4.2.2.9	Urusan Perhubungan	IV-18
4.2.2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-19
4.2.2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	IV-19
4.2.2.12	Urusan Penanaman Modal	IV-19
4.2.2.13	Urusan Kepemudaan, dan Olahraga	IV-19
4.2.2.14	Urusan Statistik	IV-20
4.2.2.15	Urusan Persandian	IV-20
4.2.2.16	Urusan Kebudayaan	IV-20
4.2.2.17	Urusan Perpustakaan	IV-20
4.2.2.18	Urusan Kearsipan	IV-21
4.2.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	IV-21
4.2.3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan	IV-21
4.2.3.2	Urusan Pariwisata	IV-21
4.2.3.3	Urusan Pertanian	IV-21
4.2.3.4	Urusan Pekerbunan	IV-21
4.2.3.5	Urusan Peternakan	IV-22
4.2.3.6	Urusan Perdagangan;	IV-22
4.2.3.7	Urusan Perindustrian	IV-22
4.2.4	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	IV-22
4.2.4.1	Sekretariat Daerah	IV-22
4.2.4.2	Sekretariat DPRD	IV-23
4.2.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	IV-23
4.2.5.1	Perencanaan Pembangunan Daerah	IV-23
4.2.5.2	Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	IV-24
4.2.5.3	Pendapatan Daerah	IV-24
4.2.5.4	Kepegawaian Daerah	IV-24
4.2.5.5	Penanggulangan Bencana Daerah	IV-25
4.2.6	Fungsi Penunjang Lainnya	IV-25
4.2.6.1	Inspektorat	IV-25
4.2.6.2	Kecamatan	IV-25
4.3	Isu Strategis Daerah	IV-25
4.3.1	Isu Strategis Global/Internasional	IV-26
4.3.1.1	Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-26
4.3.1.2	Masyarakat Ekonomi ASEAN	IV-42
4.3.2	Isu Strategis Nasional	IV-45
4.3.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	IV-45

4.3.2.2	Penanganan Pandemi COVID-19	IV-48
4.3.3	Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara	IV-52
4.3.4	Isu Strategis Kabupaten Asahan	IV-53
4.3.5	Penelaahan RPJPD Kabupaten Asahan 2005-2025	IV-57
4.3.6	Penelaahan RTRW Kabupaten Asahan 2013-2033	IV-58
4.3.7	Penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026	IV-59
4.3.8	Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya	IV-63
	BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-2
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-3
5.3.1	Tujuan dan Sasaran pada Misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	V-3
5.3.2	Tujuan dan Sasaran pada Misi Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka Mendorong Perekonomian Daerah	V-4
5.3.3	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi	V-4
5.3.4	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Menciptakan Iklim yang Kondusif dan Kemudahan Investasi Bagi Pengembangan Usaha dalam Menciptakan Lapangan Kerja	V-5
5.3.5	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Meningkatkan Akurasi Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APBD yang Transparan dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat	V-5
5.3.6	Tujuan dan Sasaran pada Misi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Menumbuhkan Partispasi Masyarakat dalam Memelihara Kesehatan	V-5
5.3.7	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Daya Dukung Generasi Muda yang Melek Teknologi dan Budaya literasi tinggi	V-5
5.3.8	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Mendorong Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat	V-6
5.3.9	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berorientasi Mendukung Produktivitas dan Pengembangan Kawasan Strategis	V-6
5.3.10	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas, Berkelanjutan dan Bernilai Ekonomis	V-6
5.3.11	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong	V-7
5.3.12	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Meningkatkan Perlindungan dan Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan yang Berbasis pada Kompetensi Sumberdaya Manusia	V-7
	BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
6.2	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Asahan	VI-21
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-25
6.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-133
	BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
	BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
	BAB 9 PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Visi RPJMN 2020-2024 dengan Visi RPMD Kabupaten Asahan 2021-2026	I-10
Tabel 1. 2 Perbandingan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan Visi RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026	I-12
Tabel 2.1 Kecamatan berdasarkan Jumlah Desa/Kelurahan, Luas Wilayah dan Jarak terhadap Ibukota Kabupaten	II-1
Tabel 2.2 Jarak Ibukota Kabupaten Asahan terhadap Ibukota Kabupaten Lain	II-3
Tabel 2.3 Rata-Rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Asahan 2016-2020	II-4
Tabel 2.4 Kondisi Ketinggian Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan	II-5
Tabel 2.5 Daftar Luas DAS di Kabupaten Asahan	II-8
Tabel 2.6 Rincian Penggunaan Lahan Sawah berdasarkan Wilayah Kecamatan	II-9
Tabel 2.7 Hierarki Sistem Perkotaan di Kabupaten Asahan	II-21
Tabel 2.8 Nilai Indeks Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara 2016-2020	II-27
Tabel 2.9 Capaian Indikator TPB dan Kondisi Muatan KLHS	II-30
Tabel 2.10 Kaitan Indikator TPB dan Kondisi Muatan KLHS	II-31
Tabel 2.11 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020 (persen)	II-51
Tabel 2.12 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020 (persen)	II-53
Tabel 2.13 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Asahan (persen), 2016-2020	II-54
Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Kabupaten Asahan, 2016-2020 (Rupiah)	II-57
Tabel 2.15 Indikator TPB Mengenai Kemiskinan Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	II-63
Tabel 2.16 Indikator TPB Mengenai Kemiskinan Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	II-66
Tabel 2.17 Komponen IPM Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-72
Tabel 2.18 Bayi yang Mengalami Stunting di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-78
Tabel 2.19 Jumlah Bayi yang Mengalami Masalah Gizi di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-78
Tabel 2.20 Angka Kematian Bayi dan Ibu di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-79
Tabel 2.21 Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-79
Tabel 2.22 Jenis Kegiatan Utama Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-81
Tabel 2.23 Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Asahan, 2015-2020	II-83
Tabel 2.24 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor di Kabupaten Asahan (Jiwa), 2015-2020	II-85
Tabel 2.25 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja di Kabupaten Asahan, 2015-2020	II-86
Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kabupaten Asahan, 2015-2020	II-86
Tabel 2.27 Jumlah Pekerja berdasarkan Status Utama Pekerjaan di Kabupaten Asahan, 2015-2020	II-87
Tabel 2.28 Jumlah dan Klasifikasi Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-89
Tabel 2.29 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik TK Menurut Kecamatan, 2020	II-100

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-105
Tabel 2.31 Jumlah Sekolah di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-106
Tabel 2.32 Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-108
Tabel 2.33 Guru yang Bersertifikat Pendidik dan Memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-109
Tabel 2.34 Capaian TPB dalam Bidang Pendidikan Yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional	II-110
Tabel 2.35 Capaian TPB dalam Bidang Pendidikan Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	II-112
Tabel 2.36 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Tiap Kecamatan 2016-2020	II-116
Tabel 2.37 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-118
Tabel 2.38 Rasio Puskesmas dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-119
Tabel 2.39 Rasio Puskesmas, Polikilinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-120
Tabel 2.40 Rasio Dokter dan Tenaga Medis per 1.000 Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-120
Tabel 2.41 Jumlah Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-121
Tabel 2.42 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Lainnya di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-122
Tabel 2.43 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-122
Tabel 2.44 Panjang Jalan menurut Jenis Jalan di Kabupaten Asahan, 2020	II-124
Tabel 2.45 Perkembangan Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Asahan, 2015-2019	II-127
Tabel 2.46 Banyaknya Pelanggan PDAM menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-129
Tabel 2.47 Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen, 2016-2020	II-130
Tabel 2.48 Realisasi Program Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Drainase, 2016-2020	II-133
Tabel 2.49 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-133
Tabel 2.50 Rasio Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah Kota di Kabupaten Asahan, 2015-2018	II-133
Tabel 2.51 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Asahan, 2015-2018	II-134
Tabel 2.52 Karakteristik Perumahan di Kabupaten Asahan	II-135
Tabel 2.53 Karakteristik Permukiman di Kabupaten Asahan	II-137
Tabel 2.54 Penghitungan Backlog Rumah di Kabupaten Asahan, 2018	II-138
Tabel 2.55 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Asahan, 2015-2019	II-140
Tabel 2.56 Data Jumlah RTLH di Kabupaten Asahan, 2020	II-140
Tabel 2.57 Data Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Asahan, 2017-2018	II-142
Tabel 2.58 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-143
Tabel 2.59 Rasio Pos Kamling per Jumlah Dusun/Lingkungan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-145
Tabel 2.60 Cakupan Penegakan Peratuan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-145
Tabel 2.61 Persentase Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Asahan, 2015-2018	II-147
Tabel 2.62 Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2017-2020	II-164

Tabel 2.63 Ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Asahan Tahun 2016-2019	II-166
Tabel 2.64 Lumbung Pangan di Kabupaten Asahan Tahun 2020	II-168
Tabel 2.65 Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-169
Tabel 2.66 Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Asahan, 2014-2019	II-170
Tabel 2.67 Penanganan Sampah dan Limbah di Kabupaten Asahan 2016-2019	II-170
Tabel 2.68 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan 2016-2019	II-171
Tabel 2.69 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan 2016-2019	II-172
Tabel 2.70 Perkembangan Banyaknya Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu Pembina Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Kabupaten Asahan, 2015-2019	II-174
Tabel 2.71 Laporan Kinerja Aspek Pelayanan Umum Bidang Perhubungan Kabupaten Asahan, 2016-2019	II-178
Tabel 2.72 Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan Tahun 2018-2020	II-180
Tabel 2.73 Jumlah Investor di Kabupaten Asahan, 2015-2020	II-185
Tabel 2.74 Jumlah Investasi PMDN dan PMA, 2015-2020	II-186
Tabel 2.75 Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-186
Tabel 2.76 Indikator Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Asahan, 2019	II-188
Tabel 2.77 Indikator Capaian Urusan Statistik di Kabupaten Asahan, 2019	II-189
Tabel 2.78 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, Benda Situs, Kawasan Cagar Budaya, dan Jumlah Organisasi Etnis di Kabupaten Asahan, 2015-2018	II-190
Tabel 2.79 Data Urusan Perpustakaan di Kabupaten Asahan 2016-2020	II-191
Tabel 2.80 Data Urusan Kearsipan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-192
Tabel 2.81 Data dan Informasi Urusan Pariwisata di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-197
Tabel 2.82 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Asahan, 2020	II-201
Tabel 2.83 Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Asahan, 2020	II-203
Tabel 2.84 Produksi Daging dan Telur di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-206
Tabel 2.85 Indikator Capaian Sektor Perdagangan di Kabupaten Asahan, 2015-2018	II-207
Tabel 2.86 Persebaran Industri Besar/Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan, 2020	II-208
Tabel 2.87 Jumlah Tenaga Kerja Terserap Menurut KLBU, 2020	II-210
Tabel 2.88 Capaian Kinerja Indikator Bagian Organisasi Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-212
Tabel 2.89 Capaian Kinerja Indikator Bagian Pemerintahan Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-213
Tabel 2.90 Capaian Kinerja Indikator Bagian Perlengkapan dan RT Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-214
Tabel 2.91 Capaian Kinerja Indikator Bagian Hukum Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-214
Tabel 2.92 Capaian Kinerja Indikator Bagian Perekonomian Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-215
Tabel 2.93 Capaian Kinerja Indikator Bagian Pembangunan Kabupaten Asahan, 2016-2018	II-215

Tabel 2.94 Capaian Kinerja Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, 2017-2020	II-216
Tabel 2.95 Capaian Kinerja Indikator Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan, 2016-2020	II-218
Tabel 2.96 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-220
Tabel 2.97 Perkembangan Indikator Kinerja Keuangan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-222
Tabel 2.98 Capaian Kinerja Indikator Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan, 2018-2019	II-226
Tabel 2.99 Capaian Kinerja Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, 2016-2020	II-227
Tabel 2.100 Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi 2016-2020	II-228
Tabel 2.101 Capaian Kinerja Indikator Unsur Pemerintahan Umum, 2018-2019	II-229
Tabel 2.102 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2016-2020 Kabupaten Asahan	II-230
Tabel 2. 103 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016-2020 Provinsi Sumatera Utara	II-231
Tabel 2.104 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2016-2020 Kabupaten Asahan	II-232
Tabel 2.105 Produksi dan Produktivitas Data Angka Tetap dan Angka Sementara Tanaman Pangan dan Hortukultura 2016-2020 Kabupaten Asahan	II-234
Tabel 2.106 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2016-2020 Kabupaten Asahan	II-235
Tabel 2.107 Persentase Pengeluaran untuk Konsumsi Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2016-2020 Kabupaten Asahan	II-236
Tabel 2.108 Indikator TPB Mengenai Kemajuan dan Kemandirian Desa Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	II-238
Tabel 2.109 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Asahan, 2016 - 2020	II-240
Tabel 2.110 Persentase Pengurangan Sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Tahun 2016-2020	II-243
Tabel 2.111 Data Jumlah Restoran di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-246
Tabel 2.112 Data Jumlah Hotel di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-248
Tabel 2.113 Banyaknya Rumah Tangga Pelanggan PDAM di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-249
Tabel 2.114 Cakupan Pengguna Air Bersih PDAM di Kabupaten Asahan, 2016-2018	II-250
Tabel 2.115 Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung, Jumlah KWH Terjual dan Penjualan Listrik PT. PLN (Persero) Rayon Kisaran Menurut Jenis Tarif di Kabupaten Asahan, 2014-2020	II-250
Tabel 2.116 Jumlah Energi Listrik yang Diproduksi, Dibeli, Diterima, Susut dan Dijual PT. PLN (Persero) Rayon Kisaran (MWH) di Kabupaten Asahan, 2014 - 2020	II-251
Tabel 2.117 Jumlah Kriminalitas di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-253
Tabel 2.118 Persentase Tingkat Pengendalian Penanganan Konflik SARA 2016-2020	II-254
Tabel 2.119 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-254
Tabel 2.120 Lama Perizinan dan Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha, 2016-2020	II-255
Tabel 2.121 Rasio Lulusan Sarjana terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Asahan, 2014-2019	II-257
Tabel 2.122 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-257

Tabel 3. 1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)	III-3
Tabel 3. 2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)	III-5
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020	III-8
Tabel 3. 4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)	III-11
Tabel 3. 5 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020	III-12
Tabel 3. 6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)	III-14
Tabel 3. 7 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)	III-17
Tabel 3. 8 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020	III-20
Tabel 3. 9 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Asahan, 2016-2020 (Rp juta)	III-20
Tabel 3. 10 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Asahan, 2016-2020 (Rp juta)	III-21
Tabel 3. 11 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020	III-24
Tabel 3. 12 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020 (Rp juta)	III-29
Tabel 3. 13 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, 2021-2026 (Rupiah, juta)	III-32
Tabel 3. 14 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Asahan, 2021-2026 (Rupiah, juta)	III-34
Tabel 3. 15 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Asahan, 2021-2025 (Rupiah, juta)	III-35
Tabel 3. 16 Proyeksi Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Asahan, 2021-2026 (Rupiah, juta)	III-38
Tabel 4. 1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Asahan	IV-2
Tabel 4. 2 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)	IV-29
Tabel 4. 3 Isu Strategis Pembangunan Skala Global-Regional	IV-43
Tabel 4. 4 Isu Strategis Pembangunan Nasional	IV-50
Tabel 4. 5 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	IV-52
Tabel 4. 6 Identifikasi Kebijakan RPJMD Lain	IV-63
Tabel 5. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026	V-8
Tabel 6. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026	VI-2
Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Asahan	VI-21
Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026	VI-26
Tabel 6. 4 Target Program Prioritas Tahun 2021-2026	VI-136
Tabel 7. 1 Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Asahan	VII-2
Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asahan	VIII-2
Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya	I-6
Gambar 2.1 Peta Jumlah Desa Pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Asahan	II-2
Gambar 2.2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Asahan	II-3
Gambar 2.3 Grafik Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan	II-6
Gambar 2.4 Persentase Luas Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Asahan	II-9
Gambar 2.5 Perbandingan Persentase Lahan Non-Pertanian dan Lahan Pertanian di Setiap Kecamatan	II-11
Gambar 2.6 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-12
Gambar 2.7 Distribusi Penduduk di Kabupaten Asahan (%) Tahun 2020	II-13
Gambar 2.8 Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Asahan (%) Tahun 2019	II-14
Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Asahan tahun 2016 dan 2020	II-15
Gambar 2.10 Posisi Kabupaten Asahan di Konstelasi Regional Provinsi Sumatera Utara	II-17
Gambar 2.11 Konstelasi Kawasan IMT-GT	II-19
Gambar 2.12 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Asahan	II-26
Gambar 2.13 Peta Indeks Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara	II-28
Gambar 2.14 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-50
Gambar 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020	II-51
Gambar 2.16 Laju Inflasi Tahunan Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional, 2016-2020	II-56
Gambar 2.17 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020 (dalam juta rupiah)	II-57
Gambar 2.18 Indeks Gini Kabupaten Asahan dan Provinsi Sumatera Utara, 2016-2020	II-58
Gambar 2.19 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-59
Gambar 2.20 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-60
Gambar 2.21 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-61
Gambar 2.22 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-70
Gambar 2.23 IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020	II-71
Gambar 2.24 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Asahan dan Provinsi Sumatera Utara, 2016-2020	II-73
Gambar 2.25 Capaian Regional Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara, 2020	II-74
Gambar 2.26 Angka Harapan Hidup Kabupaten Asahan dan Provinsi Sumatera Utara, 2016-2020	II-75
Gambar 2.27 Capaian Regional Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara, 2020	II-76
Gambar 2.28 Proporsi Stunting pada Balita Menurut Provinsi, 2019	II-77
Gambar 2.29 Persentase Bayi Gizi Buruk dan Bayi Gizi Kurang terhadap Jumlah Bayi Lahir di Kabupaten Asahan, 2015-2019	II-79
Gambar 2.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Asahan, 2015-2020	II-82

Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Asahan, 2015-2020	II-83
Gambar 2.32 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-84
Gambar 2.33 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-87
Gambar 2.34 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja di Kabupaten Asahan, 2015-2020	II-88
Gambar 2.35 Penerimaan Daerah menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Asahan (Miliar Rupiah), 2016-2020	II-91
Gambar 2.36 Persentase PAD terhadap Total pendapatan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-91
Gambar 2.37 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-93
Gambar 2.38 Capaian Regional Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Sumatera Utara, 2019	II-94
Gambar 2.39 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Asahan, 2016-2020 Per Pilar, 2016-2020	II-95
Gambar 2.40 Jumlah Fokus Kebudayaan di Kabupaten Asahan, 2014-2015	II-96
Gambar 2.41 Jumlah Fokus Keolahragaan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-97
Gambar 2.42 Jumlah Fokus Kepemudaan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-98
Gambar 2.43 Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa TK di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-99
Gambar 2.44 Peta Jumlah dan Persebaran Guru dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) Kabupaten Asahan Tahun 2020	II-101
Gambar 2.45 Peta Persebaran Taman Kanak-kanak (TK) Kabupaten Asahan Tahun 2020	II-101
Gambar 2.46 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-103
Gambar 2.47 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-104
Gambar 2. 48 Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Asahan (%), 2016-2020	II-107
Gambar 2.49 Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Asahan 2016-2020	II-114
Gambar 2.50 Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan Kabupaten Asahan Tahun 2020	II-118
Gambar 2.51 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2019	II-123
Gambar 2.52 Panjang Jalan berdasarkan Konstruksi Permukaan, 2016-2020	II-125
Gambar 2.53 Panjang Jalan berdasarkan Kondisi, 2016-2020	II-127
Gambar 2.54 Grafik Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-129
Gambar 2.55 Grafik Perkembangan Jumlah Air Minum yang Disalurkan PDAM di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-130
Gambar 2.56 Rasio Petugas Linmas per 10.000 Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-144
Gambar 2.57 Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-145
Gambar 2.58 Angka Kriminalitas di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-146
Gambar 2.59 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-147
Gambar 2.60 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Bantuan Sosial di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-148
Gambar 2.61 Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-149

Gambar 2.62 Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Asahan (Jiwa), 2016-2020	II-150
Gambar 2.63 Rasio Penempatan Tenaga Kerja dalam Persen di Kabupaten Asahan 2016-2020	II-151
Gambar 2.64 Terciptanya Tenaga Kerja Terampil dan Mandiri di Kabupaten Asahan (Jiwa), 2016-2019	II-151
Gambar 2.65 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Asahan (%), 2016-2020	II-152
Gambar 2.66 Jumlah Perusahaan yang Dibina di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-153
Gambar 2.67 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta di Kabupaten Asahan, 2015-2019	II-154
Gambar 2.68 Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Asahan, 2015-2019	II-155
Gambar 2.69 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Asahan (%), 2015-2019	II-155
Gambar 2.70 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terlaporkan Terselesaikan di Kabupaten Asahan (Kasus), 2015-2018	II-156
Gambar 2.71 Jumlah Lembaga yang Terbina di Kabupaten Asahan, 2015-2018	II-157
Gambar 2.72 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Asahan, 2016-2019	II-157
Gambar 2.73 Jumlah Kelompok Kegiatan Keluarga dan Kelompok Usaha Keluarga di Kabupaten Asahan, 2015-2019	II-158
Gambar 2.74 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Asahan, 2017-2020	II-159
Gambar 2.75 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Asahan, 2017-2020	II-160
Gambar 2.76 Ketersediaan Pangan Utama dan Kebutuhan Konsumsi Penduduk di Kabupaten Asahan (Ton), 2016-2020	II-161
Gambar 2.77 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-163
Gambar 2.78 Angka Rawan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2020	II-164
Gambar 2.79 Jumlah Penyuluh Lapangan dalam Jiwa di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-167
Gambar 2.80 Rasio Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluh di Kabupaten Asahan, 2015-2018	II-168
Gambar 2.81 Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah di Kabupaten Asahan, 2014-2019	II-169
Gambar 2.82 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Asahan, 2015-2019	II-174
Gambar 2.83 Target dan Realisasi Rasio Akseptor KB	II-175
Gambar 2.84 Stasiun Kereta Api di Kabupaten Asahan	II-177
Gambar 2.85 Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-181
Gambar 2.86 Presentase Koperasi Menurut Jenis, 2019	II-182
Gambar 2.87 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-183
Gambar 2.88 Perkembangan Volume Usaha Koperasi di Kabupaten Asahan, 2015-2019 (Juta Rupiah), 2016-2020	II-184
Gambar 2.89 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-194
Gambar 2.90 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Ikan Perairan Umum dan Budi Daya di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-195
Gambar 2.91 Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-196
Gambar 2.92 Produksi Benih Ikan (ekor) di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-196

Gambar 2.93 Tingkat Kunjungan ke Tempat Wisata (orang) di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-197
Gambar 2.94 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB di Kabupaten Asahan, 2015-2019	II-199
Gambar 2.95 Produksi Padi di Kabupaten Asahan (ton), 2016-2020	II-200
Gambar 2.96 Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Asahan (ton), 2016-2020	II-202
Gambar 2.97 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Selain Kelapa Sawit di Kabupaten Asahan (ton), 2016-2020	II-203
Gambar 2.98 Populasi Hewan Ternak Besar dan Kecil (ekor) di Kabupaten Asahan, 2017-2020	II-204
Gambar 2.99 Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis (ribuan ekor) di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-205
Gambar 2.100 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Asahan, 2015-2019	II-206
Gambar 2.101 Perkembangan Jumlah Industri Besar/Sedang di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-207
Gambar 2.102 Jumlah Persebaran Industri Besar dan Sedang Kabupaten Asahan, 2020	II-209
Gambar 2.103 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, 2020	II-210
Gambar 2.104 Jumlah Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Asahan, 2015-2018	II-211
Gambar 2.105 Persentase SILPA, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-221
Gambar 2.106 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-224
Gambar 2.107 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-225
Gambar 2.108 Perkembangan jumlah PNS yang Pensiun dan PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-226
Gambar 2.109 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2016-2020 di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-230
Gambar 2.110 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016-2020 Provinsi Sumatera Utara	II-232
Gambar 2.111 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2016-2020 Kabupaten Asahan	II-233
Gambar 2.112 Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah Kabupaten Asahan, 2016-2021	II-239
Gambar 2.113 Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah Kabupaten Asahan, 2016-2021	II-241
Gambar 2.114 Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-241
Gambar 2.115 Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-242
Gambar 2.116 Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah, Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk, Serta Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-243
Gambar 2.117 Grafik Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-249
Gambar 2.118 Angka Kriminalitas di Kabupaten Asahan, 2016-2020	II-253
Gambar 2.119 Macam Pajak Retribusi Daerah dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Asahan, 2015-2018	II-256
Gambar 3. 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020	III-7

Gambar 3. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan,	III-9
Gambar 3. 3 Komposisi Belanja Kabupaten Asahan, 2016-2020 323	III-12
Gambar 3. 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020	III-13
Gambar 3. 5 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020	III-19
Gambar 3. 6 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah Kabupaten Asahan 2016-2020	III-20
Gambar 4. 1 Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen	IV-27





BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

"Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter", demikian Visi Bupati dan Wakil Bupati Asahan terpilih 2021-2026. Visi yang telah dikampanyekan sejak masa pilkada serentak tahun 2020 ini diturunkan dalam 12 Misi yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun mendatang. Tugas berikutnya adalah mewujudkan apa yang dijanjikan semasa kampanye menjadi program-program pemerintahan selama periode kepemimpinan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Asahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari konteks, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD akan memandu segenap *stakeholders* daerah dalam menuju suatu cita-cita yang diinginkan selama jangka waktu 5 tahun di bawah

satu kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang *legitimate* serta dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

Pada Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Berikutnya, pada Pasal 263 Undang-Undang tersebut secara jelas mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten dan RTRW.

RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan lima tahun yang menjabarkan visi, misi dan program yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Asahan periode tahun 2021-2026. Keduanya telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 di Aula Tengku Rizal Nurdin Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman No. 41, Medan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Pelantikan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12354, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang menetapkan H. Surya, B.Sc. dan Taufik Zainal Abidin, S. Sos, M. Si. sebagai Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Asahan, dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta disusun dengan berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

b. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
c. Pendekatan Politis, pendekatan ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD.
d. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas, pendekatan ini merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 meliputi Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPJMD, Penyusunan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, Pembahasan Ranperda RPJMD, Pelaksanaan Evaluasi Ranperda RPJMD dan Penetapan RPJMD. Berikutnya, RPJMD Kabupaten Asahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum daerah, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakan isi RPJMD tersebut. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka visi dan misi dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa arah kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan dan kaidah pelaksanaannya.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten

Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

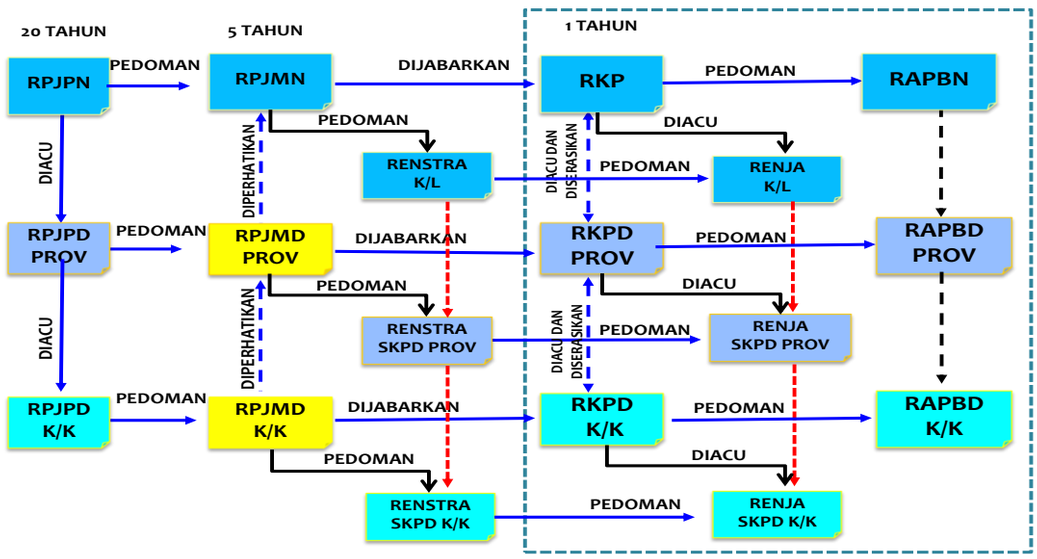

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Sumber: Penulis, 2021

Selain dalam keterkaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain, dokumen RPJMD juga terkait dengan dokumen anggaran. Hubungan antar dokumen perencanaan dan kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
b. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
c. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannnya.

1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"** yang dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pemerintah merumuskan 7 (tujuh) agenda pembangunan 2020-2024 yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan lintas instansi, diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas

anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan wilayah Sumatera didalam RPJMN diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tujuh agenda pembangunan yakni ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, kualitas SDM, revolusi mental, memperkuat infrastruktur serta pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan terakhir memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,7-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,0–7,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 3,6-4,3 persen, dan Gini ratio mencapai 0,360-0,374.

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pembangunan wilayah Sumatera akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut: Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sumatera akan mencakup kegiatan prioritas diantaranya Pengembangan Sektor Unggulan, yaitu karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya. Prioritas selanjutnya yaitu Pengembangan Kawasan Strategis, diantaranya:

1. Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri kedirgantaraan, di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK/KI Sei Mangke, Kawasan Industri (KI) Kuala Tanjung.
2. Pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Danau Toba.
3. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; konektivitas melalui Tol Trans Sumatera, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Akses DPP Danau Toba, Pembangunan KA Trans Sumatera (Batas Sumut – Duri – Pekanbaru).
4. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
5. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja.

Selanjutnya yang menjadi prioritas adalah Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan, diantaranya:

1. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
3. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 6,83 persen di Provinsi Sumatera Utara.

Didalam RPJMN yang menjadi prioritas juga mencakup Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah diantaranya perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Langkat, Kabupaten Medan, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhan

Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas).

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis *(major project)* adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba;
2. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera: Aceh-Lampung;
3. Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sumatera Utara;
4. Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kuala Tanjung;
5. Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di Sumatera Utara; dan
6. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sumatera Utara.

Tabel 1.1 Perbandingan Visi RPJMN 2020-2024 dengan Visi RPMD Kabupaten Asahan 2021-2026

VISI RPJMN TAHUN 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"		**VISI RPJMD KABUPATEN ASAHAN 2021-2026** "Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius Dan Berkarakter"	
MISI NO	**MISI RPJMN 2020-2024**	**MISI NO**	**MISI KABUPATEN ASAHAN 2021-2026**
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	**6**	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Menumbuhkan Partispasi Masyarakat Dalam Memelihara Kesehatan
		7	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi
		12	Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumberdaya manusia
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	**2**	Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah
		3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi

		4	Menciptakan Iklim Yang Kondusif Dan Kemudahan Investasi Bagi Pengembangan Usaha Dalam Menciptakan Lapangan Kerja
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	**9**	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berorientasi mendukung Produktivitas dan Pengembangan Kawasan Strategis
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	**10**	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas, Berkelanjutan Dan Bernilai Ekonomis
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	**2**	Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah
		7	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi
		11	Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong.
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	**1**	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	**8**	Mendorong Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	**1**	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel
		5	Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	**8**	Mendorong Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat

1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa Penyusunan RPJMD harus memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, hal itu dikarenakan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Arah kebijakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 selama kurun waktu lima tahun adalah:

1. Tahun pertama difokuskan pada upaya mewujudkan reformasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good government)* dan tata pemerintahan yang bersih *(clean government)*, serta menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan infrastruktur dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan serta lingkungan dan peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata.
2. Tahun kedua difokuskan pada percepatan pembangunan di kabupaten/kota khususnya di daerah kumuh, perdesaan, terpencil dan kepulauan untuk mengatasi ketimpangan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta penciptaan kesempatan kerja dan berusaha.
3. Tahun ketiga difokuskan untuk melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan.
4. Tahun keempat difokuskan pada upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat.
5. Tahun kelima difokuskan pada akselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat.

Tabel 1.2 Perbandingan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan Visi RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026

VISI RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023 "Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat"		**VISI RPJMD KABUPATEN ASAHAN 2021-2026** "Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius Dan Berkarakter"	
MISI NO	**MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA 2019-2023**	**MISI NO**	**MISI RPJMD KABUPATEN ASAHAN 2021-2026**
1	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang	**2**	Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah

	layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	**3**	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi
		4	Menciptakan Iklim Yang Kondusif Dan Kemudahan Investisi Bagi Pengembangan Usaha Dalam Menciptakan Lapangan Kerja
		6	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Menumbuhkan Partispasi Masyarakat Dalam Memelihara Kesehatan
		7	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi
		9	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berorientasi mendukung Produktivitas dan Pengembangan Kawasan Strategis
		11	Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong
2	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	**1**	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel
		5	Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat
		12	Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumberdaya manusia
3	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri	**7**	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi
4	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi,	**8**	Mendorong Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat

	narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	**11**	Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong.
5	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab	**10**	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas, Berkelanjutan Dan Bernilai Ekonomis

RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung Program Prioritas daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing sektor agraris;
6. Peningkatan daya saing sektor pariwisata;
7. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga;
8. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun dengan memperhatikan RPJMN, memuat gambaran kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program OPD dan lintas OPD serta program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Asahan.

RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD periode ke-4 dari RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025. RPJMD periode ke-4 ditujukan untuk Mewujudkan Asahan yang Religius, Sejahtera dan Mandiri melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Asahan pada periode akhir RPJMD ini meliputi:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Asahan, baik pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin demi mencapai kehidupan yang lebih baik yang ditandai tiga nilai inti pembangunan, yaitu: kecukupan, harga diri, serta kebebasan. Ketiganya merupakan tujuan yang harus dicapai dari suatu pembangunan karena berkaitan secara langsung dengan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Ketiga tujuan inti pembangunan tersebut mengandung makna, sebagai berikut: a) kecukupan diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Kebutuhan dasar ini menyangkut sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan ketentraman serta kenyamanan. Pembangunan di suatu daerah atau negara dianggap berhasil jika mampu memenuhi kebutuhan dasar dari setiap masyarakatnya; b) harga diri yang diartikan sebagai menjadi manusia seutuhnya. Konsep ini menganggap kehidupan yang lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri serta merasa diri pantas dan layak untuk memperjuangkan sesuatu. Adanya dorongan dari diri sendiri diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik, karena setiap individu merasa diri pantas dan layak untuk mengejar apa yang dicita-citakan dan jauh dari sikap berputus asa; dan c) kebebasan dari sikap menghamba yang diartikan sebagai kemampuan untuk memilih atau yang disebut konsep kemerdekaan manusia. Kemerdekaan disini diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak untuk mengejar aspek material semata. Pembangunan diharapkan meningkatkan ketersediaan kebutuhan hidup pokok, peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan ekonomi dan sosial.
2. Terciptanya kelembagaan politik dan hukum yang kuat merupakan perwujudan tujuan pembangunan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia sehingga mendorong terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat Asahan yang bersumber pada nilai-nilai agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral.
4. Terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri

5. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh. Hal ini didukung dengan mantapnya sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkatnya moral masyarakat, meningkat dan meratanya akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan daerah, sumber daya manusia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan nilai-nilai agama dan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
6. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, serta sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan ilmu pengatahuan dan teknologi yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan iklim investasi daerah dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah lain, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi sejahtera didukung daerah yang maju dengan terselenggaranya jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Asahan; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana

pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud wilayah kecamatan tanpa permukiman kumuh.

7. Pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.
8. Terwujudnya kemandirian daerah tercermin, melalui: ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya.
9. Daerah mandiri akan mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat masyarakatnya dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian daerah, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Asahan 2013-2033

Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Pengintegrasian ini bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana tata ruang dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Dengan demikian penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan merujuk kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033. Perencanaan yang disusun mengikuti rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah RTRW. Ketaatan pelaksanaan pembangunan sesuai RTRW akan menciptakan pemerataan pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 merujuk kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033. Perencanaan yang disusun mengikuti rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah. Ketaatan pelaksanaan pembangunan sesuai RTRW akan menciptakan pemerataan pembangunan.

Struktur ruang wilayah Kabupaten Asahan terdiri dari:

a. Rencana sistem perkotaan meliputi pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan dan pusat kegiatan lokal promosi.
b. Rencana Sistem Perdesaan meliputi pengembangan kawasan permukiman pedesaan, pengembangan sistem transportasi pedesaan, pengembangan sarana dan prasarana permukiman pedesaan.
c. Rencana sistem jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan sistem transpotasi, rencana jaringan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan sumberdaya air, rencana pengelolaan air limbah, dan rencana pengelolaan persampahan.

Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten Asahan terdiri dari :

a. Rencana Kawasan Lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan lindung setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam.
b. Rencana Kawasan Budidaya meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan konversi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan/tanaman tahunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan, kawasan industri, pariwisata, perumahan dan permukiman, kawasan pertahanan keamanan, kawasan pesisir dan laut, pengembangan hutan kota, dan pengembangan kawasan perkotaan.
   Keterkaitan RPJMD Kabupaten Asahan dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan kabuptaen/kota lainnya.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Asahan 2021-2026

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan 2021-2026 telah disusun dan disimpulkan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1.3.5.1 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Hasil analisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menemukan bahwa masih banyak indikator yang harus dilakukan untuk memenuhi

target nasional secara keseluruhan. Dari 208 indikator TPB, jumlah indikator yang telah mencapai target nasional lebih banyak dari yang belum mencapai target nasional, yaitu : 87 indikator yang telah mencapai target dibandingkan dengan 46 indikator yang belum tercapai. Akan tetapi, banyak indikator yang belum dikumpulkan, yaitu sebanyak 75 indikator, yang terdiri 28 indikator yang belum ada, dan 47 indikator memang belum dikerjakan.

Indikator TPB yang paling banyak telah mencapai target nasional adalah :

- TPB 3—Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (14 indikator);
- TPB 16—Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (11 indikator);

Sedangkan, indikator TPB yang belum mencapai target nasional adalah :

- TPB 1—Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (9 indikator);
- TPB 4—Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (7 indikator); dan
- TPB 8— Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (7 indikator).

Dari sisi keempat pilar pembangunan, yang telah mencapai target nasional terbanyak adalah Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola sebanyak 34 indikator dan Pilar Pembangunan Ekonomi sebanyak 31 indikator. Begitu juga, yang belum mencapai target nasional terbanyak: Pilar Hukum dan Tata Kelola sebanyak 24 indikator dan Pilar Ekonomi 12 indikator. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terkait dengan TPB, muatan KLHS yang terkait dengan indikator paling banyak yang telah mencapai target nasional adalah: daya dukung penyediaan air dan kemampuan lahan permukiman, dan terkait dengan indikator paling banyak yang belum mencapai target nasional adalah daya dukung penyediaan air bersih.

Kontribusi peran para pihak dalam rangka pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Asahan berasal dari perusahaan dan militer. Kontribusi para pihak ini hampir mencakup seluruh TPB, kecuali terkait Kesetaraan Gender; Infrastruktur, Industri dan Inovasi; dan Perubahan Iklim dan Dampaknya. TPB yang paling banyak didukung para pihak adalah : Kota dan Permukiman Inklusif, Aman,

Tangguh dan Berkelanjutan; dan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan.

1.3.5.2 Kesepakatan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil pencapaian TPB di atas, kebutuhan perkembangan kabupaten, dan kondisi lingkungan hidup (daya dukung dan daya tampung lingkungan), disepakati beberapa isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Asahan, meliputi:

1. Kemiskinan dan pengangguran
2. Pola hidup sehat ibu dan anak
3. Jangkauan dan Kualitas pelayanan pendidikan
4. Jangkauan dan kualitas pelayanan air bersih
5. Pengelolaan sanitasi dan limbah
6. Pengembangan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
7. Pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik
8. Penanganan pencegahan dan penanggulangan bencana alam

1.3.5.3 Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka penanganan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Asahan hingga tahun 2026, maka dirumuskan dalam tiga skenario, yaitu :

1. Skenario Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, yang mencakup terhadap indikator TPB yang Tanpa Upaya Tambahan, sebanyak 18 indikator dan indikator TPB yang Dengan Upaya Tambahan sebanyak 36 indikator;
2. Skenario Dengan Upaya Tambahan, sebanyak 42 indikator; dan
3. Skenario Tanpa Upaya Tambahan, sebanyak 59 indikator.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) untuk membuat kebijakan pembangunan selama lima tahun yang dapat diimplementasikan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Asahan terpilih.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dan program prioritas yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam waktu lima tahun kedepan.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan atau dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), dan perencanaan penganggarannya.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun.

Memberikan tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap OPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi umum kondisi daerah yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; kerangka pendanaan yang mencakup analisis

pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah Tahun 2021-2026.

BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional, provinsi maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Asahan.

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menuangkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021–2026 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama lima tahun kedepan.

BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menerangkan hubungan antara kerangka pendanaan beserta proyeksi ke depan dan program prioritas beserta target capaian indikator kinerja *outcome* yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu lima tahun.

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan indikator-indikator beserta target capaiannya yang akan dijadikan alat ukur oleh Pemerintah Kabupaten Asahan selama lima tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB 9 PENUTUP

Bab terakhir ini menjelaskan Kaidah Pelaksanaan dan Kaidah Transisi dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.





BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Kondisi Administrasi

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Berdasakan data yang disajikan secara rinci pada Tabel 2.1. dan Gambar 2.1, dapat dilihat bahwa Kabupaten Asahan memiliki luas wilayah sebesar 3.732,97 km^2 yang terbagi dalam 25 wilayah kecamatan, 27 kelurahan, 177 desa, dan 1.538 dusun/lingkungan. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu sebesar 713,63 km^2 atau sekitar 19,11 persen dari total luas Kabupaten Asahan. Sebaliknya, kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kisaran Timur dengan luas 30,16 km^2 atau sekitar 0,80 persen dari total luas wilayah Kabupaten Asahan.

Tabel 2.1 Kecamatan berdasarkan Jumlah Desa/Kelurahan, Luas Wilayah dan Jarak terhadap Ibukota Kabupaten

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km^2)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	B. P. Mandoge	9	713,6321	46
2	Bandar Pulau	10	268,4124	60
3	Aek Songsongan	9	282,2056	70
4	Rahuning	7	195,7978	42
5	Pulau Rakyat	12	213,6475	44
6	Aek Kuasan	7	143,1331	52
7	Aek Ledong	7	85,1169	64
8	Sei Kepayang	6	370,6919	38
9	Sei Kepayang Barat	6	49,1921	30
10	Sei Kepayang Timur	5	100,6452	35
11	Tanjung Balai	8	88,6836	36
12	Simpang Empat	8	135,7699	13
13	Teluk Dalam	6	117,0128	26
14	Air Batu	12	117,1454	22
15	Sei Dadap	10	82,7819	10
16	Buntu Pane	9	153,3986	10
17	Tinggi Raja	7	107,8977	22
18	Setia Janji	5	62,3702	15

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)
19	Meranti	7	45,3276	15
20	Pulo Bandring	10	86,9936	5
21	Rawang Panca Arga	7	67,3702	9
22	Air Joman	7	98,0944	10
23	Silau Laut	5	84,6758	25
24	Kisaran Barat	13	32,8052	5
25	Kisaran Timur	12	30,1678	3
JUMLAH		**204**	**3.732,97**	**-**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

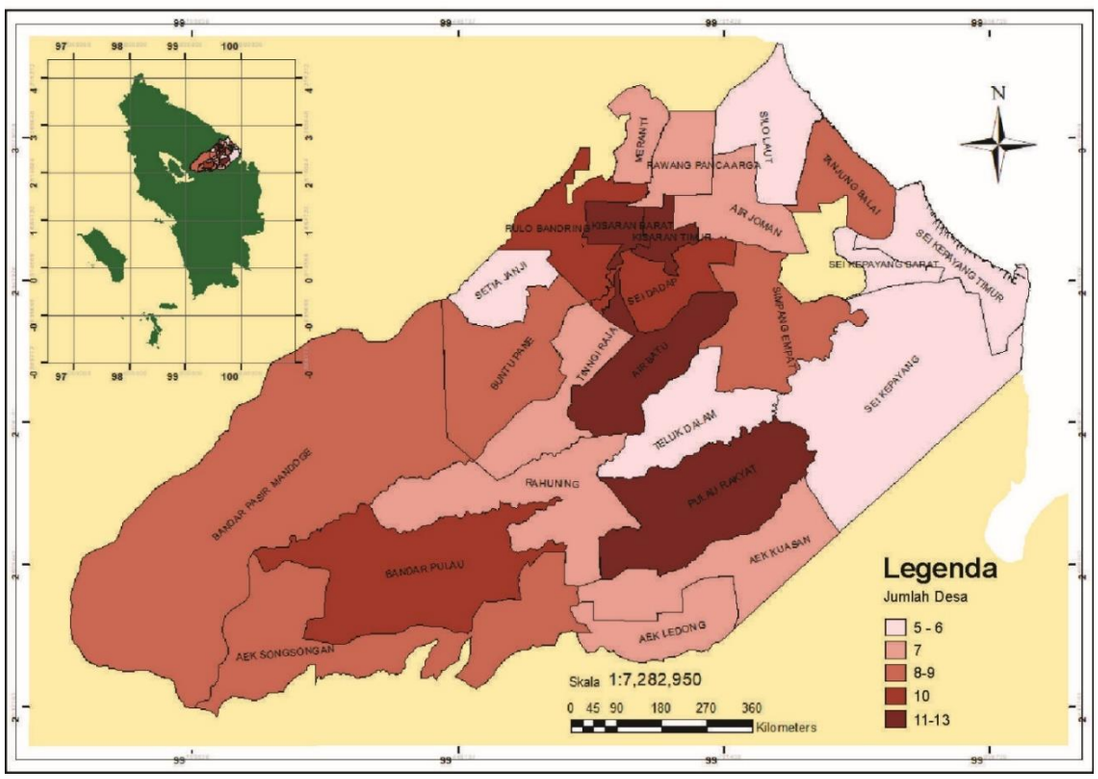

Gambar 2.1 Peta Jumlah Desa Pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Asahan

Sumber: BPS Kabupaten Asahan 2021

Kabupaten Asahan berbatasan dengan empat wilayah kabupaten seperti terlihat pada Gambar 2.2, dengan rincian batas administratif pada setiap sisi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Batubara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Labuhan Batu Utara dan Kab. Toba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Simalungun.

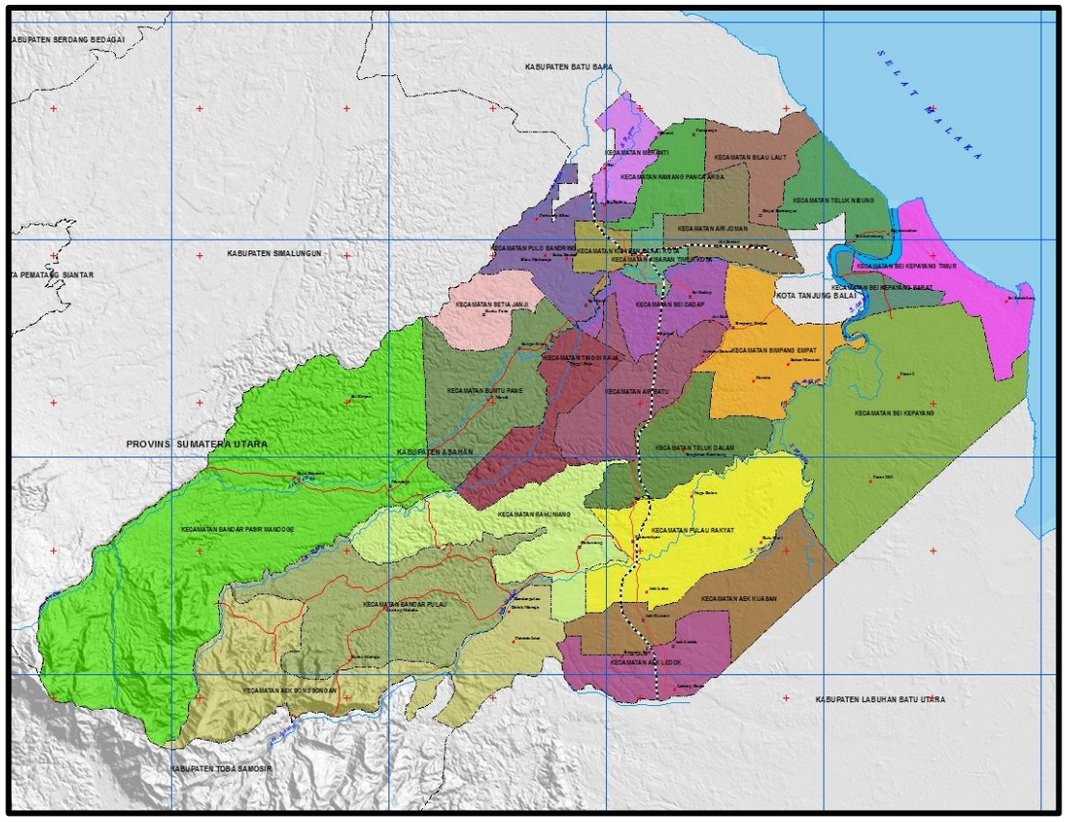

Gambar 2.2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Asahan

Sumber: BPS Kabupaten Asahan 2021

Dalam hal jarak terhadap wilayah ibukota kabupaten/kota lain di sekitar Kabupaten Asahan, tercatat bahwa jarak terdekat dengan Ibukota Kabupaten Asahan di Kisaran adalah Ibukota Kota Tanjung Balai yaitu sejauh 27 km. Jarak ibukota Kabupaten Asahan terhadap ibukota kabupaten lain dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jarak Ibukota Kabupaten Asahan terhadap Ibukota Kabupaten Lain

Ibukota Kabupaten Asahan	Ibukota Kota/Kabupaten	Jarak (Km)
Kisaran	Lima Puluh	50
Kisaran	Tebing Tinggi	80
Kisaran	Sei Rampah	110
Kisaran	Lubuk Pakam	130
Kisaran	Medan	158
Kisaran	Binjai	182
Kisaran	Stabat	200
Kisaran	Pematang Siantar	102
Kisaran	Kabanjahe	195
Kisaran	Sidikalang	227
Kisaran	Parapat	154
Kisaran	Balige	203
Kisaran	Tarutung	258
Kisaran	Sibolga	324
Kisaran	Tanjung Balai	27
Kisaran	Rantau Prapat	127

Ibukota Kabupaten Asahan	Ibukota Kota/Kabupaten	Jarak (Km)
Kisaran	Padangsidimpuan	322
Kisaran	Panyabungan	393

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Lokasi Kabupaten Asahan masuk dalam kawasan Pantai Timur wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak pada koordinat geografis antara 2°03'00" - 3°10'00" Lintang Utara dan 99°01' - 100°00' Bujur Timur, serta berada pada ketinggian 0 – 1000 m dpl.

Wilayah Kabupaten Asahan sebahagian besar berada di kawasan dataran rendah antara 0-1.000 m dpl sehingga terdapat desa pesisir atau desa pantai sebanyak 16 desa yang terdiri Kecamatan Sei Kepayang sebanyak 4 desa, di Kecamatan Sei Kepayang Timur sebanyak 5 desa, Kecamatan Tanjung Balai sebanyak 6 desa dan Kecamatan Silau Laut sebanyak 1 desa.

2.1.1.2 Iklim

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Asahan termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

Menurut catatan Stasiun Klimatologi PTPN III Kebun Sei Dadap seperti tertuang dalam Tabel 2.3, pada tahun 2020 terdapat 143 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 3.821 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Juli yaitu 677 mm dengan hari hujan sebanyak 20 hari. Sedangkan curah hujan paling kecil terjadi pada bulan Maret sebesar 43 mm dengan hari hujan sebanyak 3 hari.

Tabel 2.3 Rata-Rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Asahan 2016-2020

Tahun/Bulan	Jumlah Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
2016	119	2.070
2017	140	1.750
2018	116	1.942
2019	122	1.680
2020	143	3.821
Januari	8	156
Februari	8	76
Maret	3	43
April	8	161
Mei	10	215
Juni	13	448

Tahun/Bulan	Jumlah Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
Juli	20	677
Agustus	11	389
September	12	395
Oktober	17	372
Nopember	19	551
Desember	14	338

Sumber: PTPN III Persero Kebun Sei Dadap dalam BPS Kabupaten Asahan, 2021

2.1.1.3 Topografi

Kondisi topografi di Kabupaten Asahan sebahagian besar berupa dataran rendah dengan ketinggian yang relatif bervariasi berkisar antara 0–1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan daerah tertinggi di Kabupaten Asahan dengan ketinggian mencapai 157 mdpl sedangkan wilayah Kecamatan Sei Kepayang Timur merupakan daerah terendah dengan ketinggian sekitar 1 mdpl. Ketinggian wilayah setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kondisi Ketinggian Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (Mdpl)
1	B. P. Mandoge	157
2	Bandar Pulau	113
3	Aek Songsongan	44
4	Rahuning	31
5	Pulau Rakyat	20
6	Aek Kuasan	34
7	Aek Ledong	82
8	Sei Kepayang	12
9	Sei Kepayang Barat	5
10	Sei Kepayang Timur	1
11	Tanjung Balai	2
12	Simpang Empat	8
13	Teluk Dalam	31
14	Air Batu	31
15	Sei Dadap	38
16	Buntu Pane	34
17	Tinggi Raja	58
18	Setia Janji	37
19	Meranti	9
20	Pulo Bandring	18
21	Rawang Panca Arga	11
22	Air Joman	10
23	Silau Laut	2
24	Kisaran Barat	17
25	Kisaran Timur	14

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Penggambaran lebih mudah ke dalam grafik terkait ketinggian wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Asahan dapat dilihat pada Gambar 2.3

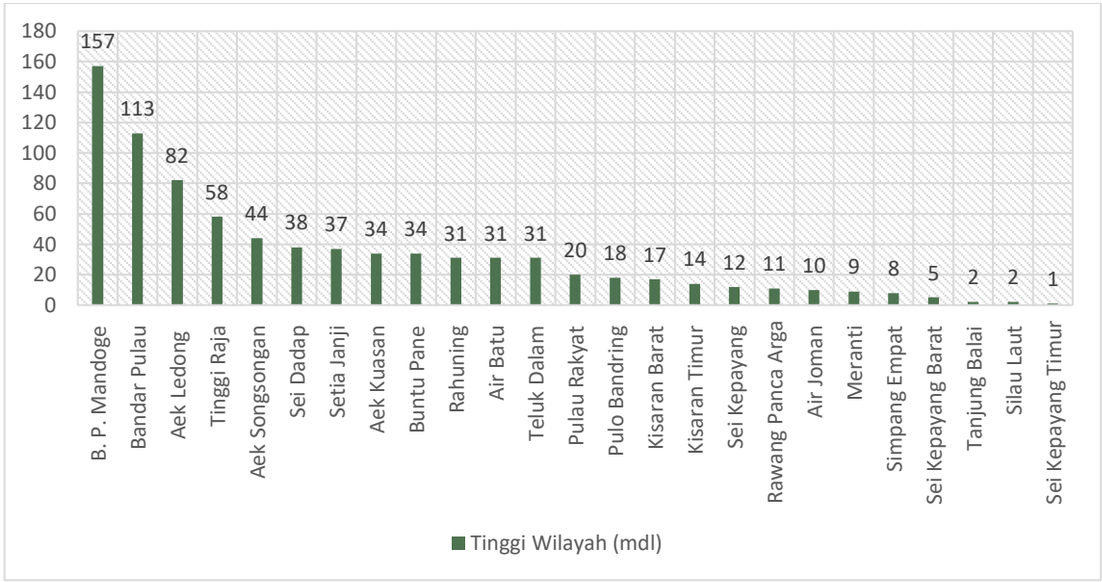

Gambar 2.3 Grafik Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

2.1.1.4 Geologi

Pada umumnya formasi geologi yang membentuk wilayah Kabupaten Asahan adalah formasi kwartier. Satuan batuan induk yang menyusun wilayah Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

1. Satuan batuan tufliparit, dimana pada zaman kwartier terjadi kegiatan vulkanis sebagai hasil peletusan Gunung Toba. Luas wilayah pada jenis batuan adalah 140.201 Ha (30,32%) dari total luas wilayah yang berada pada Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pulau, Kecamatan Buntu Pane dan Kecamatan Air Batu. Jenis batuan ini secara umum berada pada kemiringan 0-8%; 8-15% dan sebahagian kecil dengan kemiringan di atas 15% serta ditunjukkan pada kontur spasi renggang. Jenis batuan ini mengandung bahan-bahan mineral seperti kaolin. Pelapukan dari batuan ini menghasilkan jenis tanah podsolik cokelat. Keberuntungan dari jenis tanah ini adalah unsur haranya terutama unsur K dengan tebal maksimum 3 meter. Pada wilayah datar dengan kemiringan 0-8% pada jenis tanah ini dapat dikembangkan untuk pemukiman dan persawahan, sedangkan kemiringan 8-15% diarahkan untuk lahan tanaman perkebunan dan yang berada di atas 30% dianjurkan untuk hutan produksi.
2. Satuan batuan alluvium yang terbentuk pada zaman tertier dan kwartier. Satuan batuan ini lebih dominan terdapat pada Kabupaten Asahan, dimana satuan batuan alluvium terdiri dari lempung dan pasir baik merupakan hasil endapan alluvial sungai, laut maupun erosi vulkanik Gunung Toba. Satuan batuan alluvium tersebut pada umumnya terdistribusi di seluruh kecamatan dengan luas 302.195 Ha (65,35%) dari total luas Kabupaten Asahan. Morfologinya berupa suatu dataran 0-8% dan 8-15% dengan pola kontur pada sebahagian wilayah sangat jarang sekali, bahkan pada kawasan pantai

kontur sudah tidak kelihatan lagi, kedalaman efektif antara 0-125 cm. Pada umumnya jenis tanah alluvial terdapat disepanjang aliran sungai dan sangat subur serta mengandung cukup banyak hara tanaman, dan tergantung daerah asal sungai tersebut. Namun demikian karena Kabupaten Asahan merupakan suatu daerah yang sering dilanda banjir terutama pada wilayah dekat pantai, maka tanah alluvial ini mengalami perkembangan karena baru saja terbentuk dari hasil pengendapan kemudian terus mendapat endapan yang baru lagi. Jenis tanah alluvial di Kabupaten Asahan masih dapat dibagi lagi secara garis besar, yaitu:

a. Tanah alluvial
b. Tanah glayhumus
c. Tanah regosol
d. Podsolik merah kuning

3. Disamping keadaan kedua jenis geologi di atas masih dijumpai batuan induk granit diorite seluas 10.436 Ha (2,5%), batuan induk trias seluas 6.547 Ha (1,42%) yang terdapat hanya pada Kecamatan Bandar Pasir Mandoge serta batuan induk formasi kapur seluas 1.103 Ha (0,24%) di Kecamatan Bandar Pulau.

2.1.1.5 Hidrologi

Wilayah pesisir Asahan merupakan pesisir di laut pedalaman, berbatasan dengan Selat Malaka. Arus laut mengalir di sepanjang pantai dari Utara ke Selatan atau sebaliknya, bukan merupakan arus yang tegak lurus pantai. Karena itu, daya kikis yang dimiliki air laut tidak begitu kuat. Sementara bentuk dataran yang sangat landai dan sungai-sungai tua yang lebar menunjukkan bahwa wilayah Asahan sangat dipengaruhi oleh pengikisan dan pengendapan aliran sungai dibanding arus laut.

Pada umumnya sungai yang terdapat di wilayah pesisir Asahan mempunyai pola dendritik. Hal ini disebabkan oleh bentuk wilayahnya yang melereng dari arah Barat Daya ke Timur Laut. Sungai-sungai muda terdapat di bagian Barat Laut yang mengalir seperti cabang-cabang pohon ke induk sungainya. Induk-induk sungai tersebut mengalami proses pengikisan dan pengendapan dan beralih menjadi sungai dewasa dan tua di sebelah Timur Laut.

Sesuai dengan topografi Kabupaten Asahan yang relatif datar dan berbatasan dengan pantai, maka Kabupaten Asahan merupakan muara dari sungai yang mengalir dari dataran tinggi di sebelah baratnya. Di Kabupaten Asahan terdapat 21 sungai dan semuanya mengalir ke pantai timur yang terbagi dalam 3 DAS pada sungai utama yang ada, yaitu: DAS Asahan

dengan luas 1.498 Km^2, DAS Silau dengan panjang 114,8 Km^2 dan DAS Bunut dengan panjang 164,5 Km^2. Daftar luas DAS di Kabupaten Asahan dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Daftar Luas DAS di Kabupaten Asahan

No	Nama Sungai	Luas Das (Km^2)	Debit Air (m^3/Detik)
1	Sungai Asahan	1.498	274
2	Sei Silau	114,8	147
	- Sei Piasa	72	55
	- Sungai Ambalutu	54,8	20
3	Sei Bunut	164,5	30
	- Sei Beluru	-	15
	- Sei Sikasim	-	10
	- Sei Serani	-	12

Sumber: UPT PSDA Prov. Sumatera Utara

Dari 21 sungai tersebut, Sungai Asahan merupakan sungai terbesar di Kabupaten Asahan dan sekaligus masuk dalam wilayah Sungai Strategis Nasional (WS Toba-Asahan dan WS Bah Bolon). Sungai ini memiliki meanders besar, banyak endapan di tengah sungai, hampir tanpa kecepatan, gradien kecil, dan lembah sungai yang lebar, yaitu sampai ± 1 km di daerah muaranya. Sungai ini sering mengakibatkan banjir karena mengalir di daerah datar dan memiliki banyak pertemuan dengan sungai dewasa dan sungai tua lain yang mengalir sebagai anak sungainya, sehingga membentuk delta sungai yang merupakan dataran banjir dan rawa di wilayah pertemuan sungai tersebut dengan laut.

Dengan topografi yang relatif datar membuat daerah ini sering dilanda banjir yang merupakan banjir kiriman dari daerah hulu sehingga berdampak pada meluapnya sungai-sungai yang ada karena sebagian besar alirannya terkonsentrasi pada sungai besar, seperti Sungai Asahan, Sungai Silau dan Sungai Bunut. Kondisi banjir tersebut terjadi terutama saat masuk pada musim penghujan.

Di sisi lain, keberadaan sungai-sungai tersebut juga dimanfaatkan sebagai sistem jaringan irigasi teknis mempertimbangkan kondisi dan potensi fisiografi wilayah yang sangat mendukung untuk tanaman pangan lahan basah.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Asahan secara umum terdiri dari lahan pertanian basah (sawah), lahan pertanian kering (bukan sawah), dan lahan non-pertanian. Dirinci berdasarkan masing-masing jenis penggunaan lahan, maka:

a. lahan pertanian basah (sawah), terdiri dari: sawah irigasi, sawah tadah hujan, rawa pasang surut, dan rawa lebak;

b. lahan pertanian kering (bukan sawah), terdiri dari: perkebunan, tegalan/kebun, ladang/huma, hutan rakyat, lahan tidak diusahakan, dan penggunaan lainnya (tambak/kolam/empang/hutan negara); dan
c. lahan non-pertanian, terdiri dari: jalan, area permukiman, perkantoran, sungai, dan penggunaan lain sejenis.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan luasan dari masing-masing jenis seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.4, dominasi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Asahan adalah lahan untuk pertanian bukan sawah yang mencapai 243.247,9 hektar atau sekitar 65%, diikuti lahan non-pertanian dengan luas keseluruhan 121.464,1 hektar atau sekitar 33%, dan terakhir lahan pertanian sawah seluas 8.586 hektar atau sekitar 2% dari luas wilayah keseluruhan.

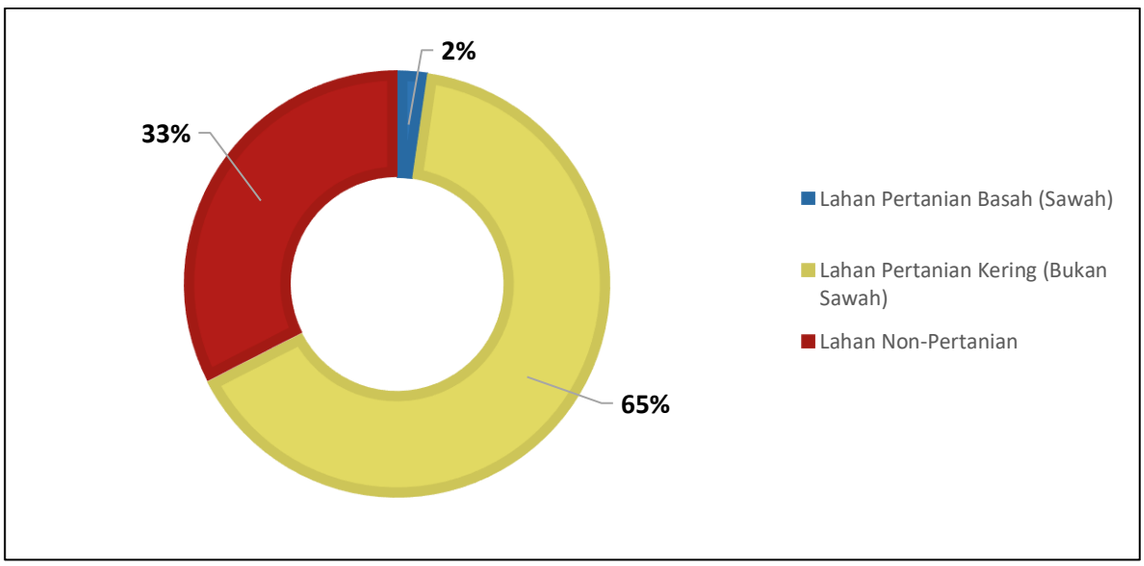

Gambar 2.4 Persentase Luas Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Asahan

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Ditinjau dari segi lokasi administrasinya, sebagian besar lahan sawah di Kabupaten Asahan terletak di Kecamatan Rawang Panca Arga, yaitu hampir mencapai 33% dari luas sawah keseluruhan. Untuk lahan pertanian bukan sawah cenderung tersebar merata dengan lokasi terluas di Kecamatan B. P. Mandoge. Sedangkan lahan non-pertanian terbesar terletak di wilayah Kecamatan Sei Kepayang. Rincian penggunaan lahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Asahan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Rincian Penggunaan Lahan Sawah berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Lahan Pertanian Basah /Sawah (Ha)	Lahan Pertanian Kering/ Bukan Sawah (Ha)	Lahan Non-Pertanian (Ha)	Total (Ha)
1	B. P. Mandoge	-	55.826,5	15.536,5	71.363
2	Bandar Pulau	-	25.795,0	1.046,0	26.841

No	Kecamatan	Lahan Pertanian Basah /Sawah (Ha)	Lahan Pertanian Kering/ Bukan Sawah (Ha)	Lahan Non-Pertanian (Ha)	Total (Ha)
3	Aek Songsongan	41	12.948,6	15.231,4	28.221
4	Rahuning	-	17.884,2	1.695,8	19.580
5	Pulau Rakyat	60	9.401,0	11.904,0	21.365
6	Aek Kuasan	-	13.320,0	993,0	14.313
7	Aek Ledong	-	1.968,9	6.543,1	8.512
8	Sei Kepayang	2.620	15.252,5	19.196,5	37.069
9	Sei Kepayang Barat	-	1.944,0	2.975,0	4.919
10	Sei Kepayang Timur	10	7.264,4	2.790,6	10.065
11	Tanjung Balai	-	4.863,2	4.004,8	8.868
12	Simpang Empat	113	5.155,8	8.308,2	13.577
13	Teluk Dalam	-	8.661,0	3.040,0	11.701
14	Air Batu	-	10.405,0	1.310,0	11.715
15	Sei Dadap	-	5.671,9	2.606,1	8.278
16	Buntu Pane	-	10.077,7	5.262,3	15.340
17	Tinggi Raja	-	8.907,6	1.882,4	10.790
18	Setia Janji	455	4.721,0	1.061,0	6.237
19	Meranti	2.122	1.199,0	1.212,0	4.533
20	Pulo Bandring	268	4.871,0	3.560,0	8.699
21	Rawang Panca Arga	2.779	3.079,6	878,4	6.737
22	Air Joman	26	3.844,0	5.939,0	9.809
23	Silau Laut	92	7.821,0	555,0	8.468
24	Kisaran Barat	-	2.041,0	1.240,0	3.281
25	Kisaran Timur	-	324,0	2.693,0	3.017
JUMLAH		**8.586**	**243.247,9**	**121.464,1**	**373.298**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Sementara itu, lahan kering di Kabupaten Asahan sebagian besar merupakan lahan yang saat ini difungsikan sebagai perkebunan seperti terlihat pada Gambar 2.5. Total keseluruhan wilayah perkebunan di Kabupaten Asahan mencapai seluas 104.580,85 hektar. Dari segi penguasan lahannya, area perkebunan di Kabupaten Asahan dapat diklasifikasikan menjadi lahan perkebunan rakyat dan perkebunan yang dikuasai perusahaan negara (BUMN/PTPN) maupun swasta nasional/asing (PBSN/PBSA). Banyaknya lahan perkebunan tersebut jelas memberikan dampak dalam perekonomian di Kabupaten Asahan, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, adanya potensi dampak negatif, terutama berkaitan dengan kesiapan infrastruktur serta pembuangan limbah pabrik perlu menjadi perhatian ke depan sehingga dapat diminimalisir.

Pada konteks lain, dengan mendasarkan pada data Tabel 2.6 maka dapat diketahui wilayah kecamatan mana saja yang saat ini telah menunjukkan karakter perkotaan mengacu pada perbandingan presentase lahan non-pertanian dengan lahan pertanian. Wilayah dengan luasan area non-pertanian lebih besar dibandingkan luas wilayah pertanian mengindikasikan potensi pengembangan ke depan sebagai kawasan perkotaan. Kecamatan

Kisaran Timur menjadi kecamatan dengan karakter perkotaan paling jelas dengan persentase lahan non-pertanian mencapai 89% dari luas wilayah kecamatannya. Presentase rinci pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2.5.

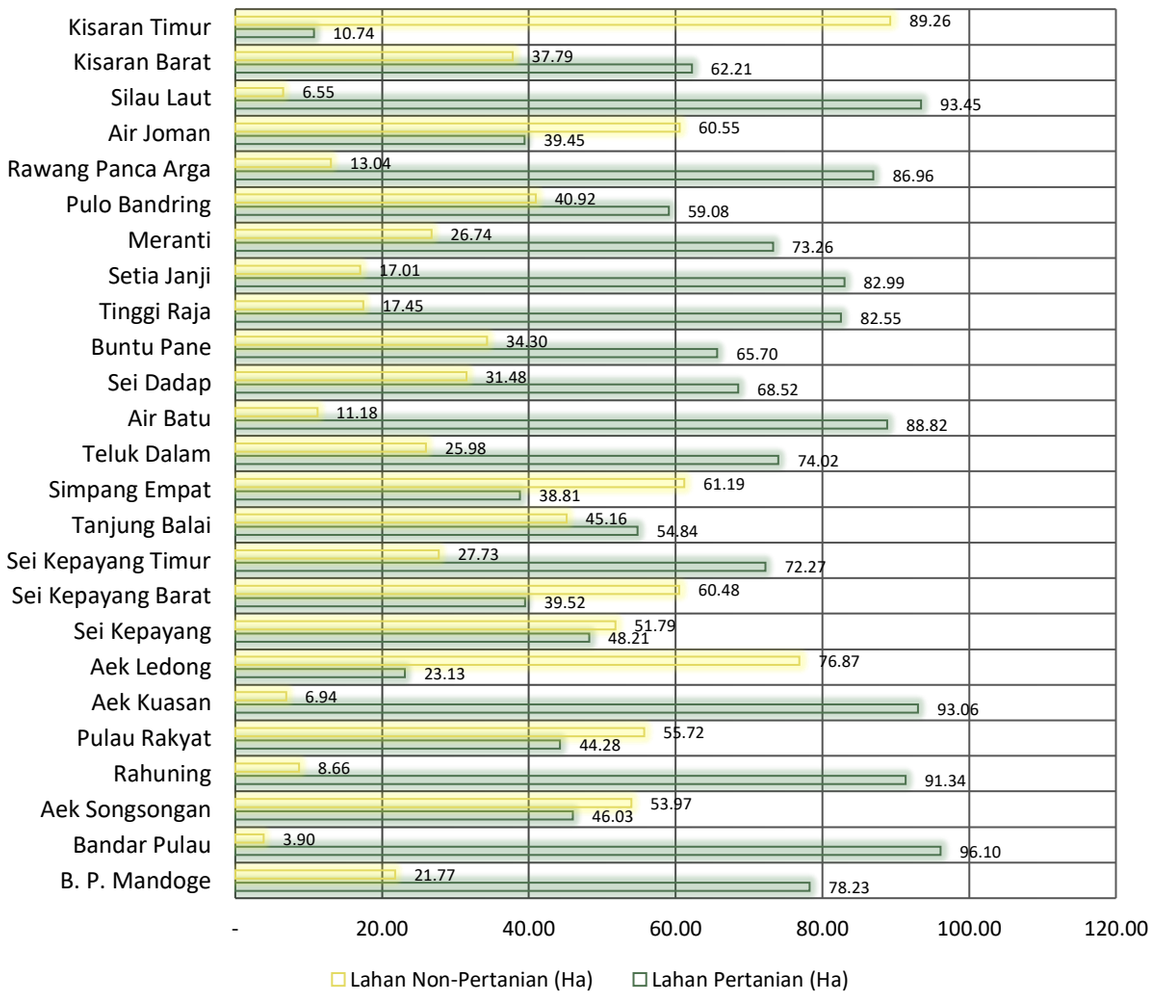

Gambar 2.5 Perbandingan Persentase Lahan Non-Pertanian dan Lahan Pertanian di Setiap Kecamatan

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

2.1.2 Kondisi Demografi

Selama periode tahun 2016-2020, jumlah penduduk Kabupaten Asahan selalu mengalami peningkatan seperti terlihat pada Gambar 2.6. Tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Asahan pada tahun 2016 sebanyak 712.684 jiwa kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi sebanyak 735.026 jiwa.

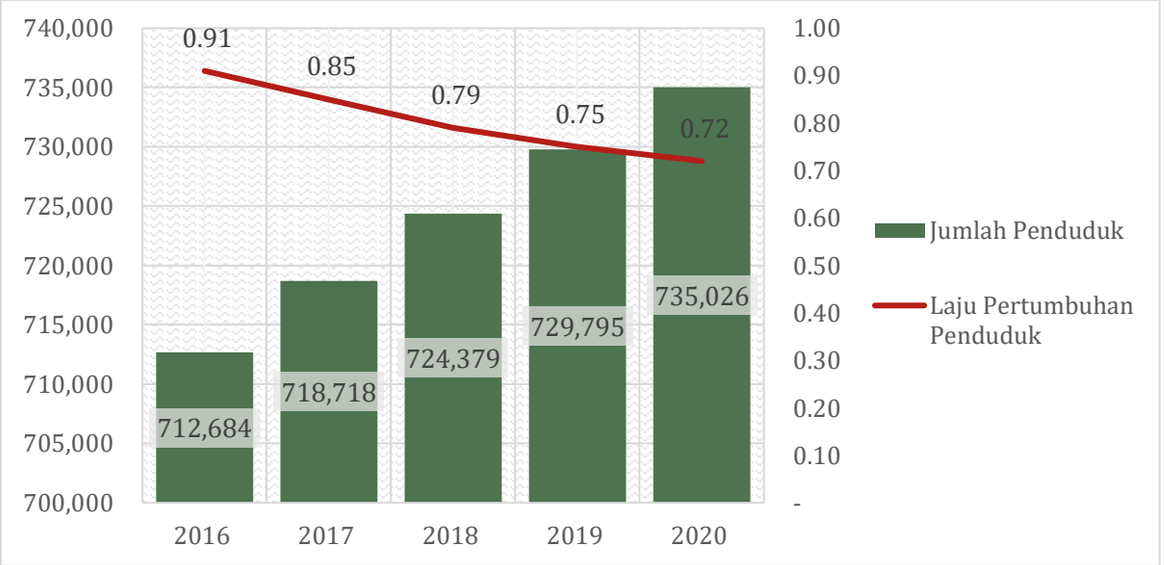

Gambar 2.6 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Sementara itu, meskipun jumlah penduduk secara keseluruhan meningkat, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya dalam periode 2016-2020. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,91 persen, kemudian menurun menjadi 0,72 persen pada tahun 2020. Penurunan ini salah satunya berkaitan dengan program KB, migrasi, dan juga angka mengenai fertilitas pada suatu daerah, penurunan tersebut akan memberikan dampak positif apabila diimbangi dengan pencapaian angka yang kemudian cenderung stagnan sehingga pembangunan manusia dapat dilakukan secara terkontrol.

Berdasarkan Gambar 2.7 yang menjabarkan tentang distribusi penduduk di Kabupaten Asahan, tercatat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Asahan paling banyak terdapat di Kecamatan Kisaran Timur, Kisaran Barat, dan Air Joman. Sedangkan, distribusi penduduk paling rendah berada di Kecamatan Sei Kepayang Timur, Setia Janji, dan Sei Kepayang Barat.

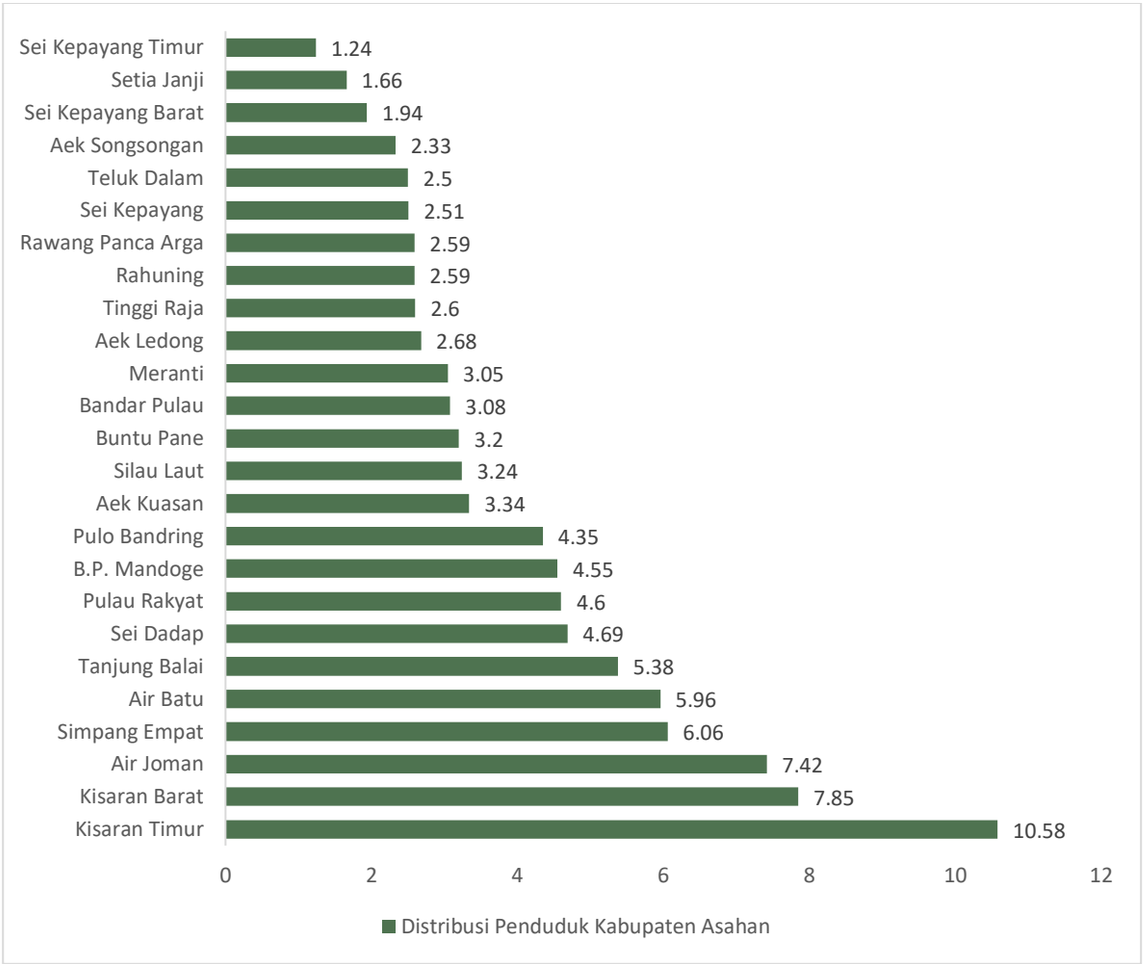

Gambar 2.7 Distribusi Penduduk di Kabupaten Asahan (%) Tahun 2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Hampir 25 persen penduduk Kabupaten Asahan terpusat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kisaran Timur, Kisaran Barat, dan Air Joman. Sebanyak 10,58 persen atau 81.487 jiwa penduduk berada di Kecamatan Kisaran Timur. Kemudian sebanyak 7,85 persen atau 60.428 jiwa berada di Kecamatan Kisaran Barat. Selanjutnya, sebanyak 57.127 jiwa atau 7,42 persen penduduk berada di Kecamatan Air Joman.

Seiring dengan terpusatnya distribusi penduduk di tiga kecamatan tersebut, kepadatan penduduk paling tinggi juga berada di Kecamatan Kisaran Timur, Kisaran Barat, dan Air Joman seperti pada Gambar 2.8. Kecamatan Kisaran Timur merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 2701,13 jiwa/km^2. Selanjutnya, Kecamatan Kisaran Barat merupakan kecamatan terpadat kedua dengan kepadatan penduduk sebesar 1842,03 jiwa/km^2. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kecamatan Air Joman adalah 582,37 jiwa/km^2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah B. P. Mandoge sebanyak 49,04 jiwa/km^2 dan Kecamatan Sei Kepayang sebanyak 52,08 jiwa/km^2. Terpusatnya penduduk pada tiga kecamatan tersebut akan berdampak pada penyediaan perencanaan kebutuhan infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan dan kawasan permukiman). Pembangunan

infrastruktur tersebut penting karena untuk pemerataan wilayah dan juga menghindari terpusatnya penduduk pada area tertentu.

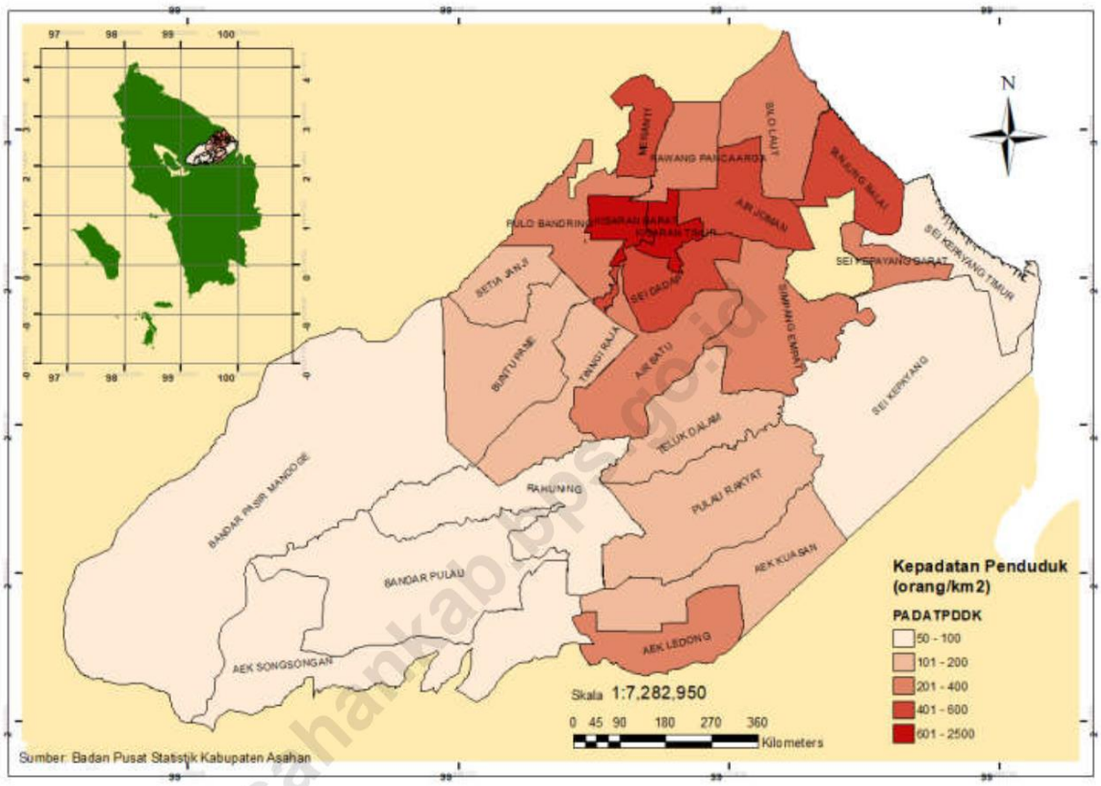

Gambar 2.8 Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Asahan (%) Tahun 2019

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis komposisi penduduk pada tahun 2016 hingga 2020, dapat disimpulkan bahwa komposisi penduduk tidak terlalu berubah. Jumlah penduduk didominasi penduduk usia muda yang ditunjukkan oleh piramida penduduk beberbentuk *expansive pyramid* seperti pada Gambar 2.9. Hal ini menunjukkan tingkat kelahiran cukup tinggi, sehingga jumlah penduduk pada usia muda cukup banyak. Banyaknya jumlah penduduk usia muda merupakan salah satu pemerintah agar dapat memusatkan perhatian kepada pendidikan usia dini, pelatihan, dan bekal pembelajaran sehingga dapat mencetak generasi yang siap untuk melakukan pembangunan dan mencegah terjadinya kemunduran suatu daerah, dapat dilakukan dengan cara pembangunan infrastruktur sekolah, lembaga pelatihan, wadah sosial kemasyarakatan, dan sebagainya.

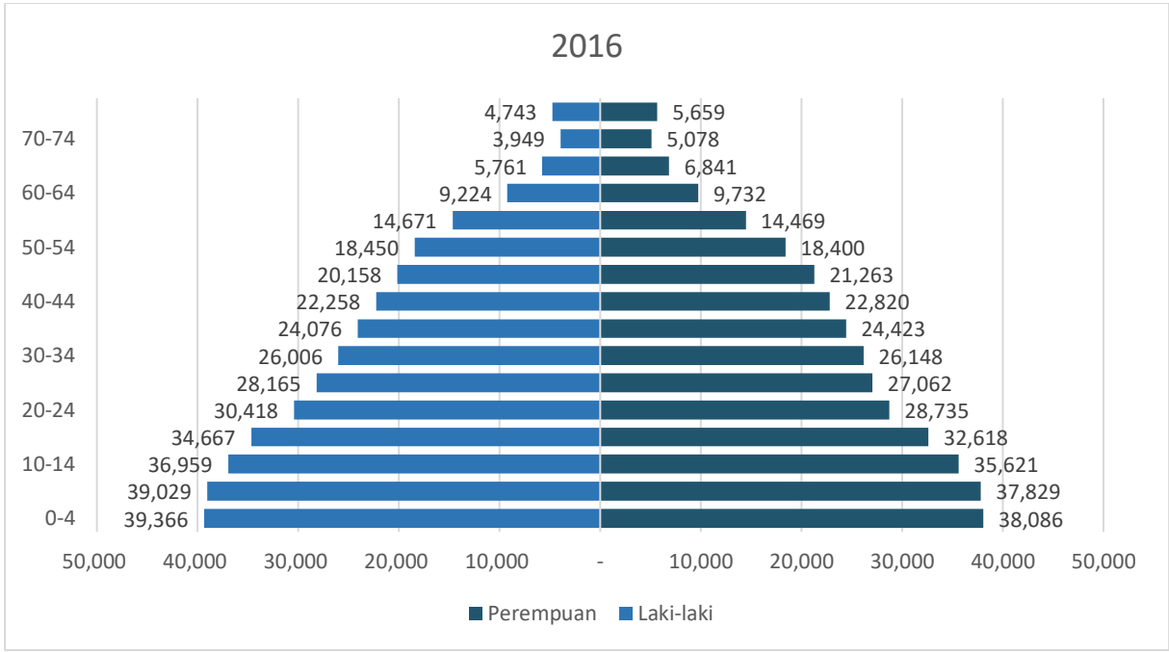

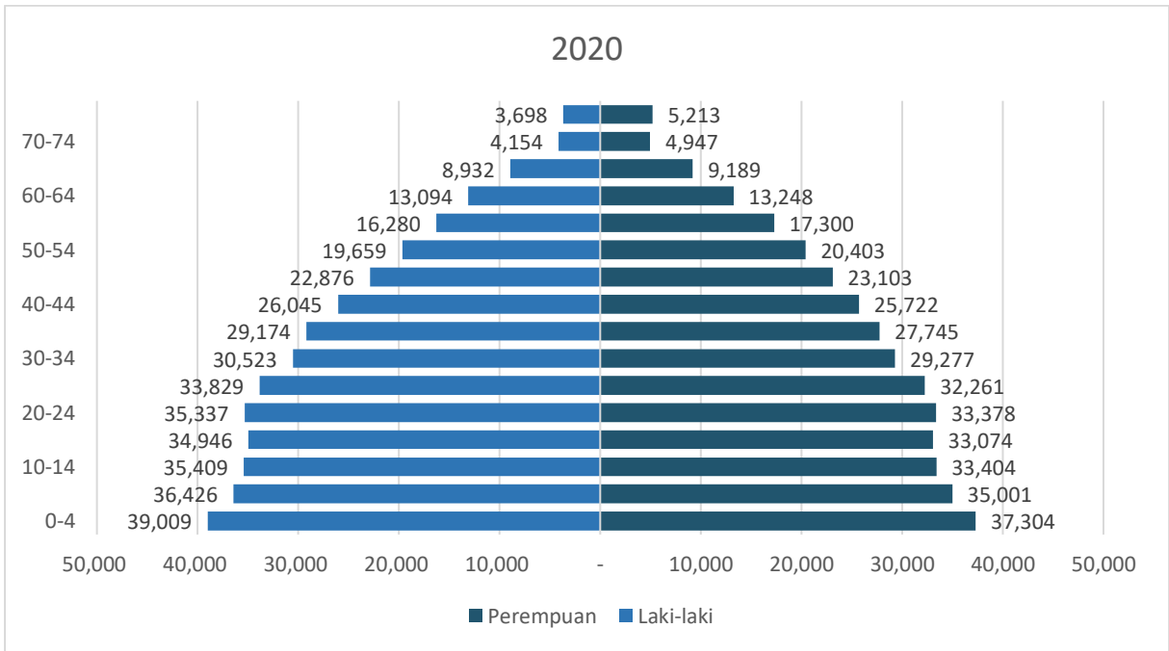

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Asahan tahun 2016 dan 2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.3.1 Posisi Strategis Kabupaten Asahan pada Konstelasi Regional

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037, terdapat dua lokasi di Kabupaten Asahan yang ditetapkan sebagai bagian dari sistem perkotaan ditingkat Provinsi. Lokasi pertama adalah Kota Kisaran, yang sekaligus Ibukota Kabupaten Asahan, yaitu ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi dan skala pelayanan kegiatan pada tingkat provinsi atau hingga melayani beberapa kabupaten/kota di sekitar. Lokasi kedua

adalah Kecamatan Simpang Empat, yang diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dengan orientasi fungsi menjadi pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi pada skala kabupaten atau melayani beberapa kecamatan.

Sesuai dengan penetapan bagian sistem perkotaan provinsi tersebut, maka wilayah Kota Kisaran saat ini sudah secara eksisting berkembang dengan karakter perkotaan, selaras dengan lekatan fungsi ibukota kabupaten, baik pada aspek lokasi pusat pemerintahan, maupun pusat pelayanan perekonomian. Sementara itu, wilayah Kecamatan Sumpang Empat yang diarahkan menjadi PKL masih dalam proses pengembangan sebagai perkotaan baru atau secara eksisting belum sepenuhnya menjadi kawasan perkotaan. Namun demikian, dua wilayah kecamatan tersebut sudah didominasi oleh penggunaan lahan non-pertanian, sehingga penetapan status perkotaan sudah sesuai dengan kondisi maupun potensi penggunaan lahan saat ini.

Penetapan wilayah di Kabupaten Asahan sebagai bagian utama dalam sistem perkotaan skala regional jelas mengindikasikan bahwa Kabupaten Asahan memiliki peran dan fungsi strategis, baik dari segi lokasi maupun pelayanan kegiatannya. Selain itu, terdapat beberapa orientasi pengembangan ke depan yang akan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara yang juga memposisikan Kabupaten Asahan sebagai bagian utama dalam konteks perencanaan struktur ruang tersebut, antara lain meliputi:

1. Rencana pengembangan jaringan kereta api, meliputi:
    a. Rencana pengembangan jalur kereta api antar kota di wilayah pantai timur, yang menghubungkan wilayah batas Aceh – Besitang – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Tebingtinggi – **Kisaran** – Rantauprapat – batas Riau;
    b. Rencana pengembangan jalur kereta api antar kota, yang salah satunya direncanakan pada jalur **Kisaran – Tanjungbalai;**
    c. Rencana pengembangan jalur kereta api, yang salah satunya mencakup jalur **Kisaran – Pelabuhan Tanjung Tiram**;
    d. Rencana pengembangan simpul kereta api, yang salah satunya direncanakan berada di Kota **Kisaran.**
2. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air minum berupa pengembangan SPAM regional lintas kabupaten yang salah satunya mencakup jaringan Kota Tebing Tinggi – Kabupaten Serdang Bedagai – Kota Tanjung Balai **– Kabupaten Asahan;**
3. Rencana pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan besar, yang salah satunya direncanakan berada di Kabupaten Asahan yaitu peternakan Sapi Potong dan Domba;

4. Rencana pengembangan untuk kawasan pertahanan dan keamanan skala nasional, yang salah satunya direncanakan di wilayah Kabupaten Asahan, meliputi lokasi markas strategi daerah Lantamal di Bagan Asahan;
5. Rencana pengembangan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang salah satunya ditetapkan pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – **Asahan,** salah satunya mencakup Kawasan Tanjung Balai – Asahan, yang dimana Kabupaten Asahan diharapkan sebagai Kabupaten penyokong utama bahan baku industri di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Peta konstelasi posisi Kabupaten Asahan terhadap kawasan regional Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.10.

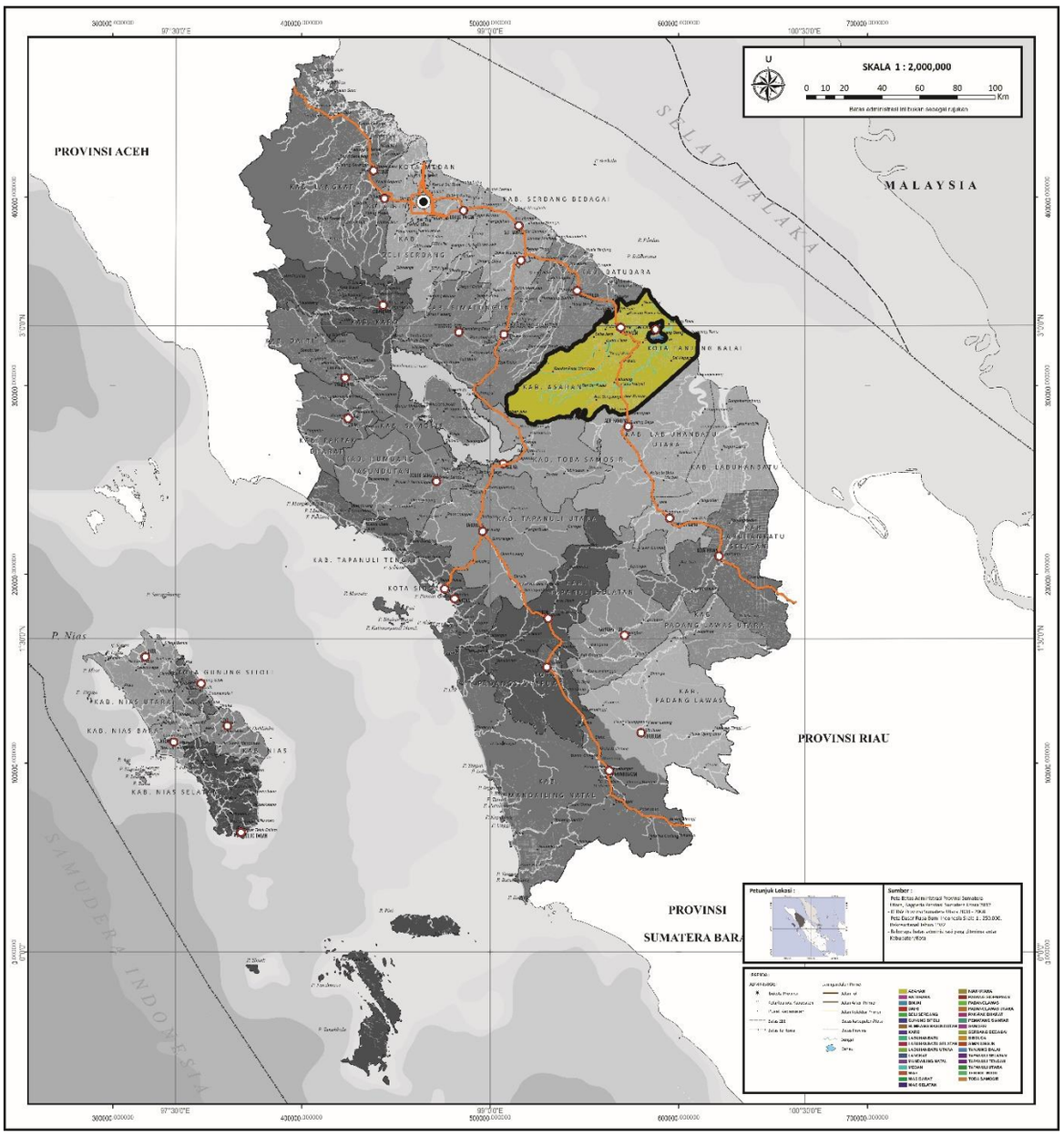

Gambar 2.10 Posisi Kabupaten Asahan di Konstelasi Regional Provinsi Sumatera Utara

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2019

Selain konteks pengembangan struktur ruang, Kabupaten Asahan juga perlu mengakomodir adanya kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya yang tertuang dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian orientasi pengembangan sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Asahan berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas 765 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 8.395 dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 26.045 Ha.
2. Lahan Pertanian di Kabupaten Asahan berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Lahan pertanian basah seluas 18.650 Ha dan lahan pertanian kering seluas 1.562 Ha.
3. Kawasan perkebunan di Kabupaten Asahan berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara seluas 248.221 Ha.
4. Rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan, yaitu:
   a. pemanfaatan lahan perikanan budidaya
   b. perikanan laut
   c. Rencana pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI), yaitu PPI Asahan Mati, PPI Sei bagan Asahan.
5. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Asahan berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara meliputi **kawasan** industri menengah dan industri besar yang berada Kawasan Bagan Asahan.
6. Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Asahan berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara meliputi **pariwisata alam dan pariwisata kebudayaan.**
7. Pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Asahan meliputi :
   a. Pembangunan Jalan Lingkar dengan Pemerintah Kota Tanjung Balai
   b. Mendukung pengembangan kawasan industri di Kuala Tanjung Kabupaten Batubara
   c. Melakukan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan melalui program Asahan irigasi dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara
   d. Melakukan kerjasama pengembangan wisata alam dan wisata olahraga arung jeram dengan Kabupaten Toba

Selain konteks pengembangan kawasan regional yang tertuang dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan juga memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program perwujudan kerjasama *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT). IMT-GT berdiri pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Langkawi, Malaysia, pada 20 Juli 1993. IMT-GT ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara IMT-GT. Kabupaten Asahan mempunyai posisi strategis dalam kosntelasi IMT-GT tersebut, terutama dalam kaitannya untuk mendukung Propinsi Sumatera Utara dalam

pengembangan potensi Kerjasama strategis, seperti dalam bidang perdagangan, ekonomi, konektivitas transportasi, investasi dan potensi-potensi lainnya, termasuk juga dalam hal kerjasama untuk konservasi keanekaragaman hayati dan keberlangsungan ekosistem. Dalam konstalasi IMT-GT disajikan pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11 Konstelasi Kawasan IMT-GT

Sumber: bigconnectivity.org

2.1.3.2 Proyeksi Pengembangan Sistem Perkotaan di Kabupaten Asahan

Salah satu strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Asahan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Asahan 2013-2033 dalam rangka menyelesaikan permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah atau pembangunan yang belum merata, terutama

di bagian wilayah hinterland dan wilayah yang dilewati jalan nasional, adalah melalui pembagian fungsi kawasan sebagai sistem perkotaan kabupaten. Pada konteks tesebut, maka peran wilayah-wilayah yang sudah relatif berkembang, seperti wilayah di sisi barat Kabupaten Asahan, diharapkan dapat sekaligus menjadi pendorong perkembangan wilayah di sisi lainnya. Dengan dasar tersebut maka perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Asahan perlu membuka dan meningkatkan fungsi pusat–pusat pertumbuhan dalam suatu kesatuan sistem yang terkoneksi secara baik.

Dalam menjalankan fungsi pengembangan wilayah, maka direncanakan adanya suatu sistem perkotaan di Kabupaten Asahan sebagai pusat dari wilayah pengembangan yang didukung oleh wilayah hinterlandnya masing-masing. Berdasarkan peran dan fungsi serta perkembangannya maka sistem perkotaan di Kabupaten Asahan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW di wilayah Kabupaten Asahan yaitu Kawasan perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan utama dari wilayah kabupaten yang berfungsi sebagai pusat Pemerintahan, pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, permukiman, Pariwisata, Pendidikan Tinggi, pusat transportasi antar wilayah dan internal wilayah serta pemasaran antar wilayah dan wilayah kabupaten lain dan provinsi. Adapun PKW yang dimaksud adalah Kota Kisaran.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di wilayah Kabupaten Asahan adalah wilayah Simpang Empat dengan fungsi kawasan sebagai Pusat permukiman perkotaan, perindustrian, perdagangan dan jasa dan kegiatan pertanian dan perikanan.
3. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK Kabupaten Asahan adalah wilayah-wilayah yang strategis, berbatasan dengan Kota atau Kabupaten Lain dan cenderung cepat berkembang.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL Kabupaten Asahan merupakan kawasan yang berkembang dan berpotensi berkembang dengan dukungan sumberdaya yang ada dan dukungan jaringan prasarana.
5. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKLp atau kawasan yang akan dipromosikan untuk menjadi PKL di wilayah Kabupaten Asahan adalah wilayah Tanjung Balai dengan fungsi kawasan sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian, permukiman perkotaan, perindustrian, perdagangan dan jasa dan kegiatan pertanian-

perikanan kawasan Tanjung Balai ini dinilai sangat strategis terutama bagi kegiatan ekonomi dengan keberadaan pelabuhan dan ketersediaan jaringan jalan pendukung membuat kawasan Tanjung Balai ini layak untuk dijadikan pusat kegiatan lokal. B. P. Mandoge sebagai daerah dengan kawasan lindung yang sangat besar diajukan menjadi PKLp di Kabupaten Asahan dengan fungsi yang diarahkan adalah daerah Konservasi/Lindung, selain itu juga Kawasan Minapolitan dan Agromarinpolitan di Sei Kepayang dan Sei Kepayang Timur dengan fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan perikanan dan pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa dan pariwisata, keberadaan kawasan minapolitan dan agromarinpolitan ini menjadi kawasan strategis kabupaten yang dapat membangkitkan Kabupaten Asahan.

Berdasarkan arahan pengembangan sistem perkotaan seperti dalam penjelasan sebelumnya, rincian hiearaki sistem perkotaan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Asahan 2013-2033 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Hierarki Sistem Perkotaan di Kabupaten Asahan

No	Hierarki	Kecamatan	Strategi	Fungsi Yang Diarahkan
1	PKW	Kisaran	Revitalisasi	- pusat pemerintahan; - pusat kegiatan industri; - perdagangan dan jasa; - permukiman; - pariwisata; - pendidikan tinggi; - pusat transportasi antar wilayah dan internal wilayah; - pusat pemasaran antar wilayah dan wilayah kabupaten lain dan provinsi.
	PKL	Simpang Empat	Pengembangan Baru	- pusat permukiman perkotaan; - perindustrian; - pertanian, perkebunan; peternakan, perikanan; - perdagangan dan jasa dan - kawasan lindung setempat.
	PKLp	Tanjung Balai	Pengembangan Baru	- pusat kegiatan perekonomian, permukiman perkotaan, perindustrian; - perdagangan dan jasa - kegiatan pertanian dan perikanan; - kawasan lindung; - kawasan pertahanan.

No	Hierarki	Kecamatan	Strategi	Fungsi Yang Diarahkan
		Sei Kepayang, Sei Kepayang Timur	Pengembangan Baru	- perikanan dan pertanian; - permukiman; - perdagangan dan jasa; - pariwisata; - industri pengolahan; - kawasan lindung.
		B.P. Mandoge, Aek Songsongan	*Urban Development Control*/ Pengendalian Pengembangan Kawasan	- kawasan lindung; - pertambangan; - pariwisata; - pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - industri pengolahan; - permukiman; - kawasan kehutanan.
	PPK	Meranti	*Urban Development Intensive*/ Pengembangan Kawasan	- pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - permukiman; - industri pengolahan;
		Setia Janji	*Urban Development Extensive*/ Ekstensifikasi Kawasan	- pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - industri pengolahan; - kawasan lindung setempat; - permukiman.
		Aek Ledong	*Urban Development Intensive*/ Pengembangan Kawasan	- pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - perdagangann dan jasa; - industri; - permukiman.
		Aek Kuasan	*Urban Development Intensive*/ Pengembangan Kawasan	- pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - kawasan lindung setempat; - kawasan kehutanan; - industri pengolahan; - permukiman.

No	Hierarki	Kecamatan	Strategi	Fungsi Yang Diarahkan
		Air Joman	*Urban Development Intensive*/ Pengembangan Kawasan	- perkebunan, peternakan dan pertanian; - pendidikan; - industri pengolahan; - agromarinepolitan; - permukiman; - kawasan lindung setempat; - perdagangan dan jasa.
	PPL	Air Batu	*Urban Development Extensive*/ Ekstensifikasi Kawasan	- pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - industri pengolahan; - permukiman.
		Buntu Pane	*Urban Development Extensive*/ Ekstensifikasi Kawasan	- pendidikan; - pertanian, peternakan, dan perkebunan; - kawasan lindung setempat; - pariwisata; - industri pengolahan; - permukiman.
		Sei Dadap	*Urban Development Intensive*/ Pengembangan Kawasan	- pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - industri pengolahan; - permukiman.
		Sei Kepayang Barat	*Urban Development Intensive*/ Pengembangan Kawasan	- perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - industri pengolahan; - kawasan lindung setempat; - pariwisata; - permukiman.
		Silau Laut	*Urban Development Intensive*/ Pengembangan Kawasan;	- perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - pariwisata; - kawasan pertahanan; - permukiman; - kawasan lindung.

No	Hierarki	Kecamatan	Strategi	Fungsi Yang Diarahkan
			Urban Development Control/ Pengendalian Pengembangan Kawasan	
		Rawang Panca	*Urban Development Intensive*/ Pengembangan Kawasan	- pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - industri pengolahan; - permukiman;
		Pulo Bandaring	*Urban Development Intensive*/ Pengembangan Kawasan	- pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - industri pengolahan; - industri rumah tangga; - permukiman; - pertambangan.
		Bandar Pulau	*Urban Development Intensive*/ Pengembangan Kawasan; dan *Urban Development Control*/ Pengendalian Pengembangan Kawasan	- kawasan pertanian, peternakan, dan perkebunan; - kawasan kehutanan; - kawasan lindung; - pariwisata; - industri pengolahan; - permukiman
		Rahuning	*Urban Development Extensive*/	- pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - kawasan lindung setempat; - industri pengolahan;

No	Hierarki	Kecamatan	Strategi	Fungsi Yang Diarahkan
			Ekstensifikasi Kawasan	- permukiman.
		Pulau Rakyat	*Urban Development Extensive*/ Ekstensifikasi Kawasan	- pertanian, peternakan, dan perkebunan; - kawasan kehutanan; - kawasan lindung setempat; - pariwisata; - pendidikan; - industri pengolahan; - permukiman.
		Teluk Dalam	*Urban Development Extensive*/ Ekstensifikasi Kawasan	- pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - kawasan lindung setempat; - pariwisata; - industri pengolahan; - permukiman.
		Tinggi Raja	*Urban Development Extensive*/ Ekstensifikasi Kawasan	- pertanian, peternakan, dan perkebunan; - pendidikan; - pariwisata; - kawasan lindung setempat; - industri; - permukiman.

Sumber: RTRW Kabupaten Asahan 2013-2033

2.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kabupaten Asahan merupakan daerah yang mempunyai kerawanan terhadap beberapa jenis bencana. Dalam Gambar 2.12 tentang kerawanan bencana di Kab. Asahan, dapat dilihat bahwa kerawanan bencana banjir terdapat dibeberapa daerah terutama di sisi timur pada dataran rendah dan pada daerah-daerah tepi pantai. Kerawanan banjir ini secara spasial terdistribusi pada beberapa daerah, terutama dengan topografi rendah, sepanjang sungai, kawasan meader sungai, pada daerah hilir sungai dan pada kawasan pesisir. Selain itu Kabupaten Asahan juga mempunyai kerawanan terhadap bencana gempa bumi. Ada tiga kelas kerawanan bencana gempa bumi di Kabupaten Asahan yaitu kelas MMI IV, V dan VI.

Kelas kerawanan gempa bumi yang lebih tinggi berkorelasi dengan daerah perbukitan yang terdapat daerah patahan, terutama sedikit daerah di bagian barat dan semakin ke timur kelas kerawanan bencana gempa bumi semakin kecil. Sementara itu Kawasan rawan longsor dengan kelas tinggi, sedang dan rendah. Kerawanan longsor tinggi terdapat pada beberapa daerah yang dicirikan dengan topografi berbukit, bergunung dan terutama berasosiasi dengan solum tanah dalam. Kerawanan longsor tinggi didominasi di Kawasan perbukitan di bagian barat dan semakin landau ke timur semakin kecil.

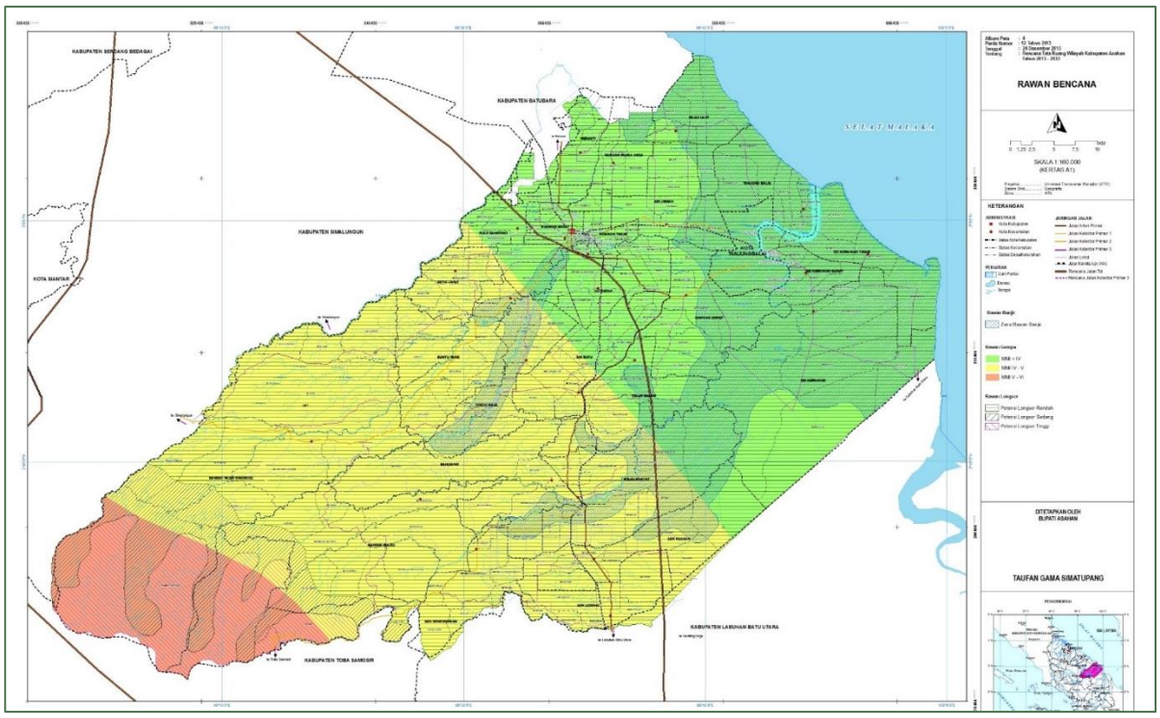

Gambar 2.12 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Asahan

Sumber: RTRW Kabupaten Asahan 2013-2033

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2019 yang disusun oleh BNPB seperti disajikan pada Tabel 2.8 dan dipetakan dalam Gambar 2.13, Kabupaten Asahan masuk dalam wilayah dengan risiko bencana tinggi. Ditinjau dari konteks regional Sumatera Utara, Kabupaten Asahan berada pada peringkat 9 kabupaten/kota dengan adanya potensi bencana yang ada. Jenis bencana alam yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Asahan meliputi:

1. Bencana banjir dengan tingkat risiko tinggi;
2. Bencana gempa bumi dengan tingkat risiko tinggi;
3. Bencana kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat risiko tinggi,
4. Benana tanah longsor dengan tingkat risiko tinggi,
5. Bencana gelombang ekstrem dan abrasi dengan tingkat risiko tinggi, dan
6. Bencana kekeringan dengan tingkat risiko sedang; dan

7. Bencana cuaca ekstrim dengan tingkat risiko tinggi.

Tabel 2.8 Nilai Indeks Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

NO	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	KELAS RISIKO 2019
1	Kota Gunungsitoli	215,60	215,60	215,60	216	215,6	Tinggi
2	Mandailing Natal	214,80	214,80	214,80	215	214,8	Tinggi
3	Nias	214,00	214,00	214,00	214	241,0	Tinggi
4	Nias Utara	214,00	214,00	214,00	214	214,0	Tinggi
5	Nias Barat	210,80	210,80	210,80	211	210,8	Tinggi
6	Nias Selatan	202,00	202,00	202,00	202	202,0	Tinggi
7	Tapanuli Tengah	191,20	191,20	191,20	191	191,2	Tinggi
8	Tapanuli Selatan	186,00	186,00	186,00	186	186,0	Tinggi
9	**Asahan**	**167,20**	**167,20**	**167,20**	**167**	**167,2**	**Tinggi**
10	Kota Sibolga	167,20	167,20	167,20	167	167,2	Tinggi
11	Labuhan Batu Utara	155,20	155,20	155,20	155	155,2	Tinggi
12	Langkat	148,50	143,54	140,68	155	138,6	Tinggi
13	Padang Lawas	154,00	154,00	154,00	154	154	Tinggi
14	Labuhan Batu	151,20	151,20	151,20	151	151,2	Tinggi
15	Kota Medan	103,55	100,61	93,77	155	93,8	Sedang
16	Deli Serdang	113,00	108,28	121,73	155	121,7	Sedang
17	Karo	136,71	125,24	120,99	154	121	Sedang
18	Batu Bara	143,20	143,20	143,20	143	143,2	Sedang
19	Serdang Bedagai	140,00	140,00	140,00	140	140	Sedang
20	Padang Lawas Utara	138,00	138,00	138,00	138	138	Sedang
21	Labuhan Batu Selatan	131,20	131,20	131,20	131	131,2	Sedang
22	Humbang Hasundutan	130,00	130,00	130,00	130	130,0	Sedang
23	Kota Padang Sidimpuan	128,00	128,00	128,00	128	128	Sedang
24	Dairi	127,60	127,60	127,60	128	127,6	Sedang
25	Tapanuli Utara	118,00	118,00	118,00	118	118	Sedang
26	Samosir	114,00	114,00	114,00	114	114	Sedang
27	Kota Tanjung Balai	114,00	114,00	114,00	114	114	Sedang
28	Pakpak Bharat	112,00	112,00	112,00	112	112	Sedang
29	Toba Samosir	107,20	107,20	107,20	107	107,2	Sedang
30	Kota Binjai	103,20	103,20	103,20	103	103,2	Sedang
31	Kota Tebing Tinggi	101,60	101,60	101,60	102	101,6	Sedang
32	Simalungun	75,03	73,59	73,59	95	75,6	Sedang
33	Kota Pematangsiantar	91,20	91,20	91,20	91	91,2	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, Februari 2021

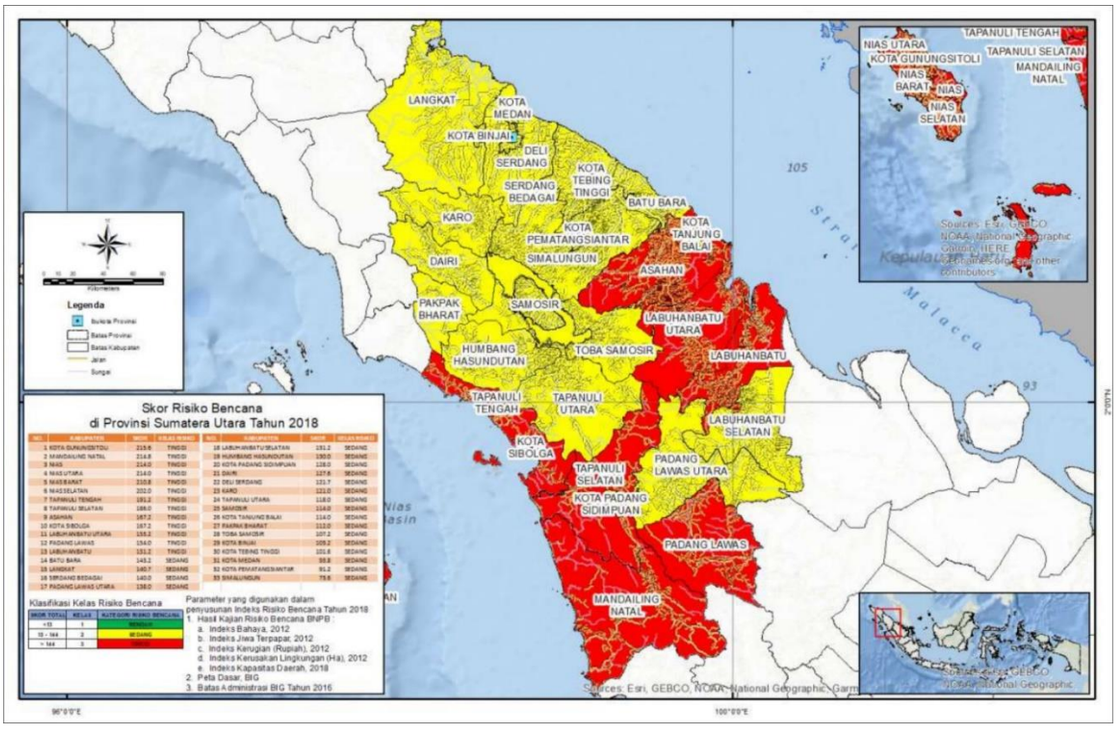

Gambar 2.13 Peta Indeks Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara

Sumber: BNPB, 2018

2.1.5 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan bertujuan untuk mengukur kemampuan ekosistem dalam mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuan berdasar kondisi yang ada. Kepentingan dari kajian ini adalah apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Pengukuran daya dukung dapat dilihat dari daya dukung tanah/kemampuan lahan, air, habitat spesies, dan sebagainya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media (air, tanah, udara) ketika menerima gangguan dari luar. Muatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis memperhatikan pertimbangan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), dimana terdapat 62 indikator TPB yang terkait dengan status DDDTLH di Kabupaten Asahan. Keberlangsungan ekosistem dan lingkungan berperan sebagai pengendali pembangunan untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah dan antar wilayah dalam suatu daerah agar mampu mencukupi dalam mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan Kondisi Muatan KLHS yang disusun berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terdapat kelompok dalam pembagian capaian, yaitu mengenai daya dukung lahan permukiman, daya dukung penyediaan pangan, daya dukung penyediaan air bersih, daya tampung limbah, risiko pencemaran, risiko bencana alam, kerentanan terhadap perubahan iklim, serta

potensi KEHATI. Pencapaian TPB berdasarkan Kondisi Muatan Lingkungan Hidup di Kabupaten Asahan dapat dilihat pada tabel 2.9 pada halaman selanjutnya.

Berdasarkan 62 indikator TPB yang berkaitan dengan status DDTLH di Kabupaten Asahan, 32 indikator telah dilaksanakan dan memenuhi target, 21 indikator telah dilaksanakan namun belum memenuhi target, dan 9 indikator tidak ada data. Total indikator yang seharusnya dilaksanakan adalah sebanyak 106, artinya, masih terdapat 44 indikator yang belum dilaksanakan dikarenakan disesuaikan dengan kondisi kabupaten. Persentase indikator TPB yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 51,61 persen, dilaksanakan namun belum memenuhi target sebesar 33,87 persen, dan tidak ada data sebesar 14,51 persen.

Tabel 2.9 Capaian Indikator TPB dan Kondisi Muatan KLHS

KONDISI MUATAN KLHS		Dilaksanakan, Telah Memenuhi Target	Dilaksanakan, Belum Memenuhi Target	Tidak Dilaksanakan	Belum Ada Data	Total
Muatan	**Status**					
Daya Dukung Lahan Permukiman	*Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,*	6	1			**7**
Daya Dukung Penyediaan Pangan	*Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit*	2	4	7		**13**
Daya Dukung Penyediaan Air Bersih	*Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.*	6	9	12	2	**29**
Daya Tampung Limbah	*Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)*	3	3	3		**9**
Risiko Pencemaran	*Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai*	4	3	6	1	**14**
Risiko Bencana Alam	*Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)*	5	1	9	4	**19**
Kerentanan thdp Perubahan Iklim	*Daya dukung defisit (meluas)*	5	0	5	2	**12**
Potensi KEHATI	*Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir*	1		2		**3**
TOTAL		**32**	**21**	**44**	**9**	**106**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Asahan 2020

Tabel 2.10 Kaitan Indikator TPB dan Kondisi Muatan KLHS

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	SB			Surplus					
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	SB			Surplus	Sedang	Permukiman Perkotaan, Industri			
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	SS						Defisit	Defisit	

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	TD						Defisit	Defisit	
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	B						Defisit	Defisit	
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	B						Defisit	Defisit	
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	TD						Defisit	Defisit	

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	TD		Defisit	Surplus					
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	SS		Defisit	Surplus					
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	TD		Defisit	Surplus					
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di	TD		Defisit	Surplus					

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
	bawah 1400 kkal/kapita/hari.									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	SB		Defisit	Surplus					
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	B		Defisit	Surplus					
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	B		Defisit	Surplus					

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	SB		Defisit	Surplus					
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	TD		Defisit	Surplus					
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	SS		Defisit	Surplus					
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	SS							Defisit	

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	B							Defisit	
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	SS			Surplus	Sedang	Permukiman Perkotaan, Industri			

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	SB			Surplus					
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	B			Surplus					
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	SB			Surplus					

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	B			Surplus					
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	SB			Surplus	Sedang	Permukiman Perkotaan, Industri			
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	SS			Surplus	Sedang	Permukiman Perkotaan, Industri			
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free	SS			Surplus	Sedang	Permukiman Perkotaan, Industri			

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
	(ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).									
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	TD			Surplus	Sedang	Permukiman Perkotaan, Industri			
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	TD			Surplus	Sedang	Permukiman Perkotaan, Industri			
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan	TD			Surplus	Sedang	Permukiman Perkotaan, Industri			

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
	pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).									
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	SB			Surplus	Sedang	Permukiman Perkotaan, Industri			
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	SS			Surplus			Defisit		
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	TD		Defisit	Surplus			Defisit		
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST)	TD			Surplus			Defisit		

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
	yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).									
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	TD			Surplus			Defisit		
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	TD			Surplus			Defisit		
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	TD			Surplus			Defisit		

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	SB		Defisit	Surplus			Defisit		
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	SS	Surplus							
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	SS	Surplus							
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	SB	Surplus							
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	SS	Surplus							
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam	SS	Surplus							

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
	proporsi terhadap total pekerja.									
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	SS	Surplus							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	SS						Defisit	Defisit	
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	TD						Defisit	Defisit	

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	TD						Defisit	Defisit	
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	B						Defisit	Defisit	
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	SB						Defisit	Defisit	
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	SS	Surplus						Defisit	
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko	TD						Defisit	Defisit	

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
	bencana (PRB) tingkat daerah.									
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	SS					Permukiman Perkotaan, Industri			
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	B					Permukiman Perkotaan			
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	SB					Permukiman Perkotaan, Industri			

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	SB					Permukiman Perkotaan, Industri			
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	TD					Permukiman Perkotaan, Industri			
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	TD						Defisit	Defisit	
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	SS						Defisit	Defisit	

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	SS						Defisit	Defisit	
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	SS		Defisit				Defisit	Defisit	Tinggi di perbukitan dan pesisir
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	TD								Tinggi di perbukitan dan pesisir

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KATEGORI PENCAPAIAN	Lahan Permukiman	Pangan	Air Bersih	Limbah	Pencemaran	Bencana	Kerentanan thdp Perubahan Iklim	Potensi KEHATI
			Ketersediaan lahan permukiman surplus, hanya defisit di Perbukitan Terjal dan Pesisir,	Daya dukung penyediaan pangan sudah defisit	Daya dukung penyediaan Air Permukaan dan Air Tanah debit tinggi.	Daya tampung limbah sedang. Pencemaran di S. Silau (TSS, BOD, COD), S. Bunut (TSS, DO, BOD, COD), dan S. Asahan (BOD, COD)	Potensi Sampah dan Limbah di permukiman Perkotaan dan sekitarnya, serta kawasan sekitar tepi sungai	Daya dukung defisit, hampir seluruh kecamatan (banjir, longsor dan anging puting beliung)	Daya dukung defisit (meluas)	Daya dukung KEHATI tinggi di perbukitan terjal dan pesisir
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	TD								Tinggi di perbukitan dan pesisir

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Asahan 2020

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penyelenggaraan aspek kesejahteraan masyarakat merupakan upaya paling mendasar yang harus dilakukan dari segala proses pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat disajikan dalam tiga fokus utama yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; fokus kesejahteraan sosial/masyarakat; serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan tidak hanya mencakup isu ekonomi. Kesejahteraan merupakan suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Selain itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat berdasarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi namun pemerataan ekonomi. Dengan pemerataan ekonomi maka ketimpangan yang terjadi di masyarakat dapat ditekan. Secara detail indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan per kapita, indeks gini, persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan indeks ketimpangan. Indikator-indikator tersebut penting untuk menilai hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan guna menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis melalui pertumbuhan Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto *(gross value added)* yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB Kabupaten Asahan ditunjukkan oleh gambar berikut.

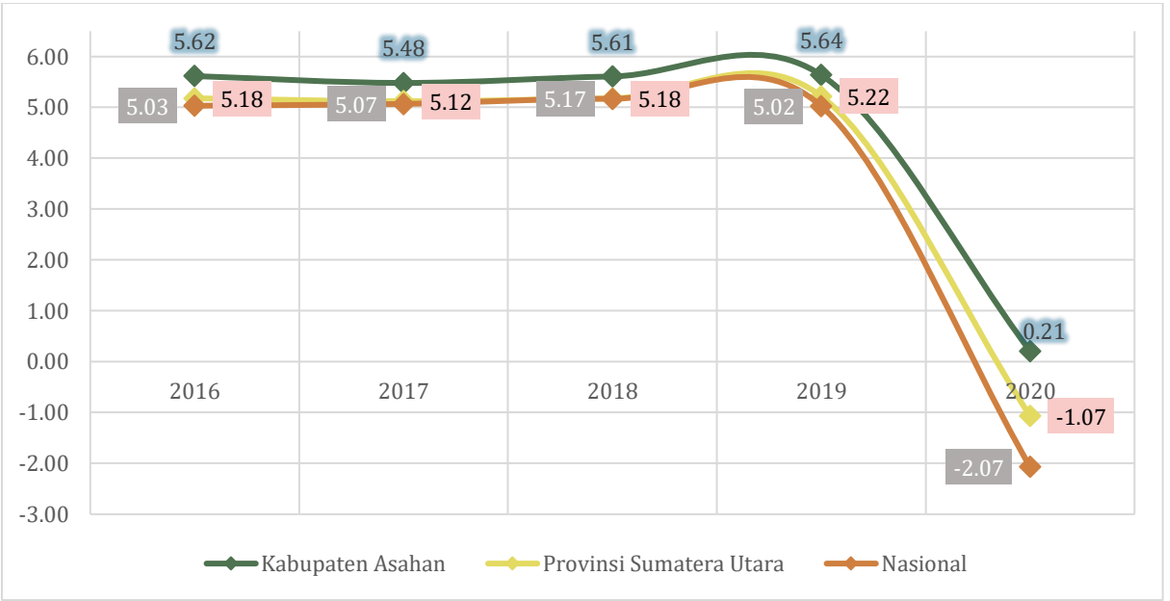

Gambar 2.14 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan pada tahun 2020 tumbuh sebesar 0,21 persen. Selama periode 2016-2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan cenderung mengalami fluktuasi, namun masih berada dikisaran 5,00 persen. Akan tetapi, situasi pandemi yang berlangsung sejak Februari 2020 menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam di tahun 2020. Laju pertumbuhan tersebut searah dengan laju pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Sumatera Utara yang pada tahun 2016 mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, lalu turun pada tahun 2017. Selanjutnya, pada 2018-2019 laju pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Namun turun tajam pada tahun 2020 karena dampak dari pandemi.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumater Utara dan Nasional, selama enam tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan lebih tinggi. Pada tahun 2020, baik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, maupun nasional mengalami penurunan yang tajam. Walaupun demikan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan masih menunjukkan pertumbuhan positif, sedangkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional turun hingga mencapai angka negatif yaitu masing-masing sebesar -1,07 untuk Provinsi Sumatera Utara dan -2,07 untuk Nasional. Pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa perkonomian Kabupaten Asahan mampu bertahan meski dalam kondisi krisis COVID-19, namun untuk percepatan pemulihan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan perlu melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian tersebut.

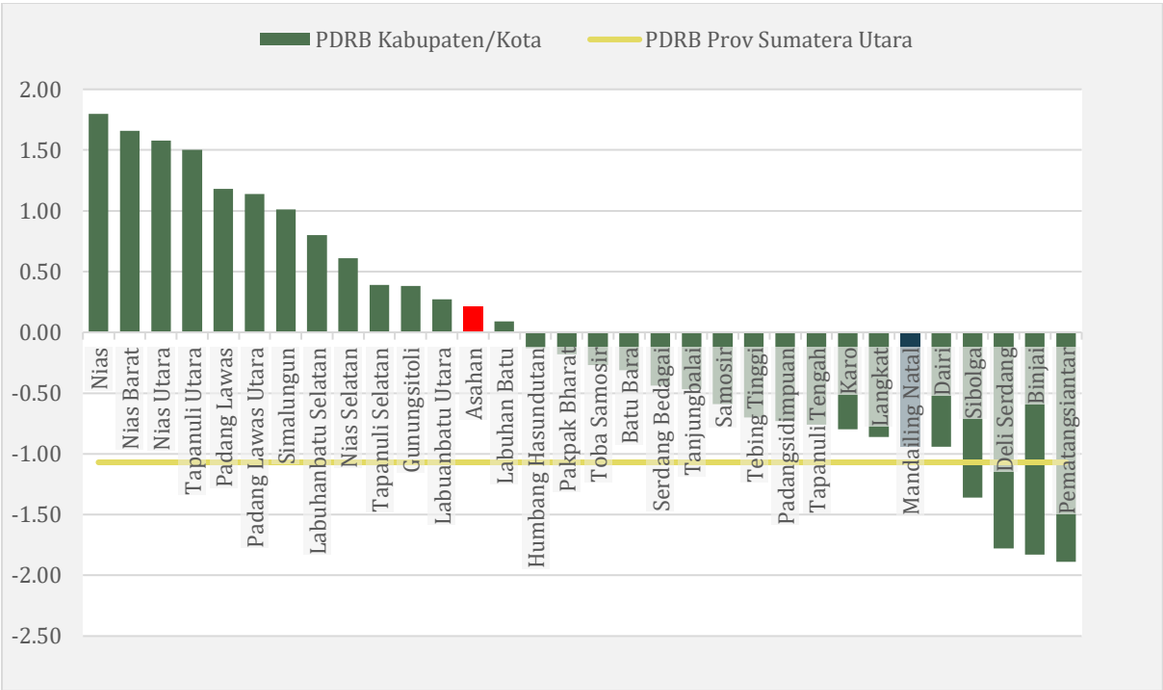

Gambar 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Berdasarkan gambar di atas, Kabupaten Asahan dibandingkan kabupaten dan kota lain di wilayah Provinsi Sumatera termasuk wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang positif di kondisi pandemi. Walaupun angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan berada di atas angka laju pertumbuhan ekonomi provinsi, namun posisinya menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berada di peringkat lima di antara kabupaten-kota lain di Sumatera Utara, pada tahun 2020 Kabupaten Asahan menempati peringkat ke-tiga belas. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi tahun 2020 tidak hanya dirasakan di daerah perkotaan tetapi juga dirasakan di daerah pedesaan.

Tabel 2.11 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020 (persen)

Sektor	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,65	5,22	6,04	5,78	1,76	4,89
Pertambangan dan Penggalian	5,23	6,26	6,18	5,88	-1,14	4,48
Industri Pengolahan	5,30	4,85	3,96	4,00	0,74	3,77
Pengadaan Listrik dan Gas	3,64	6,68	4,20	3,49	5,21	4,64
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,61	6,33	1,45	6,29	3,47	4,03
Konstruksi	5,51	5,24	5,48	6,15	-5,96	3,28

Sektor	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,16	6,57	6,67	6,88	-1,10	5,04
Transportasi dan Pergudangan	6,68	8,79	4,70	6,81	-4,20	4,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,81	6,64	6,22	6,66	-5,82	3,90
Informasi dan Komunikasi	6,02	7,03	7,09	8,06	8.36	7,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,96	2,74	3,71	3,04	0,38	2,97
Real Estate	6,68	6,93	6,10	5,33	2,55	5,52
Jasa Perusahaan	6,20	6,37	5,24	5,06	-1,34	4,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,83	3,78	6,17	6,25	-0,39	3,73
Jasa Pendidikan	5,29	5,23	6,30	4,17	0.93	4,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,10	7,03	6,16	5,01	-0,24	5,01
Jasa lainnya	7,14	7,27	7,08	7,79	-2,76	5,30
PDRB	**5,62**	**5,48**	**5,61**	**5,64**	**0,21**	**4,51**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2020 dan 2021

Jika dianalisis berdasarkan sektor, maka selama tahun 2016-2020, secara umum pertumbuhan masing-masing sektor komponen PDRB berfluktuasi. Bahkan pada tahun 2020 hampir di semua sektor mengalami penurunan hingga mencapai pertumbuhanan yang negatif. Sedangkan secara rata-rata, tiga sektor yang mengalami laju pertumbuhan paling tinggi selama periode tersebut adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 7,31 persen, Real Estate sebesar 5,52 persen, serta Jasa lainnya 5,30 persen. Sementara itu, tiga sektor yang mengalami laju pertumbuhan paling rendah adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,73 persen, Konstruksi sebesar 3,28 persen, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,97 persen. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa di situasi pandemi 2020 sektor Infromasi dan Komunikasi menjadi primadona karena mayoritas kegiatan fisik berubah menjadi kegiatan virtual, sehingga pertumbuhannya pun mengalami peningkatan. Sebaliknya kegiatan fisik dan pembangunan seperti konstruksi cenderung terhambat sehingga mengalami penurunan hingga mencapai pertumbuhan yang negatif.

2.2.1.2 Struktur Ekonomi

Secara sektoral, berdasarkan distribusi PDRB ADHK menurut lapangan usaha yang ditunjukkan oleh tabel berikut. Selama lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Asahan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Tabel 2.12 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020 (persen)

Kategori/Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,23	36,63	36,06	35,48	36,22	36.32
Pertambangan dan Penggalian	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0.20
Industri Pengolahan	23,05	23,75	23,41	22,95	23,24	23.28
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0.07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0.06
Konstruksi	6,89	6,89	7,13	3,28	6,84	6.21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,66	18,65	19,36	20,21	19,91	19.36
Transportasi dan Pergudangan	3,66	3,60	3,57	3,61	3,45	3.58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,86	0,85	0,85	0,85	0,78	0.84
Informasi dan Komunikasi	0,38	0,38	0,38	0,39	0,41	0.39
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,63	1,61	1,58	1,52	1,42	1.55
Real Estate	1,76	1,80	1,82	1,83	1,86	1.81
Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0.05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,49	3,48	3,45	3,46	3,42	3.46

Kategori/Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Jasa Pendidikan	0,79	0,76	0,77	0,76	0,76	0.77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,64	0,65	0,67	0,67	0.65
Jasa lainnya	0,57	0,58	0,59	0,61	0,59	0.59
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Asahan, 2021

Meskipun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan cenderung menurun hingga tahun 2019, namun meningkat di tahun 2020. Berbeda dengan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang cenderung meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2019, tetapi turun pada tahun 2020. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Asahan yaitu sebesar 37,23 persen pada tahun 2016 namun terus menurun hingga menjadi 36,32 persen pada tahun 2019, tetapi meningkat pada tahun 2020 menjadi 36,22 persen, dengan rata-rata pertahun sebesar 36,32 persen. Sektor industri pengolahan menyumbang kontribusi paling besar kedua yaitu sebesar 23,05 persen pada tahun 2016 menurun menjadi 22,95 persen pada tahun 2019, namun meningkat pada tahun 2020 menjadi 23,24 persen dengan rata-rata pertahun sebesar 23,28 persen. Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan penyumbang kontribusi terbesar ketiga yaitu sebesar 18,66 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 20,21 persen pada tahun 2019, namun turun menjadi 19,91 persen pada tahun 2020 dengan rata-rata pertahun sebesar 19,36 persen. Oleh karena itu, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan tidak terjadi pergeseran yang signifikan menurut lapangan usaha pada struktur ekonomi Kabupaten Asahan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.13 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Asahan (persen), 2016-2020

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	56,14	55,77	55,79	55,69	53,83	55,44
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,2	1,16	1,18	1,23	1,20	1,19
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,43	6,29	6,38	6,01	5,70	6,16

Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,21	28,01	27,90	28,00	27,72	27,97
Perubahan Inventori	1,18	0,96	1,20	1,20	1,47	1,20
Net Ekspor Barang dan Jasa	6,83	7,81	7,54	7,87	10,08	8,03
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Sementara itu, berdasarkan pengeluaran perekonomian Kabupaten Asahan selama lima tahun terakhir lebih dari separuhnya didorong oleh konsumsi rumah tangga. Walaupun demikian, nilai distribusi jenis pengeluaran tersebut cenderung menurun dari semula sebesar 56,14 persen pada tahun 2016, menjadi 53,83 persen pada tahun 2020 dengan rata-rata per tahun sebesar 55,44 persen. Selanjutnya, pengeluaran dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto memberikan kontribusi terbesar kedua dengan nilai rata-rata per tahun sebesar 27,97 persen. Pengeluaran konsumsi LNRT merupakan jenis pengeluaran terkecil dalam struktur ekonomi Kabupaten Asahan berdasarkan pengeluaran. Selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi jenis pengeluaran tersebut sebesar 1,19 persen.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Penghitungan nilai inflasi didapatkan dari perubahan IHK dari waktu ke waktu yang menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. IHK merupakan rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

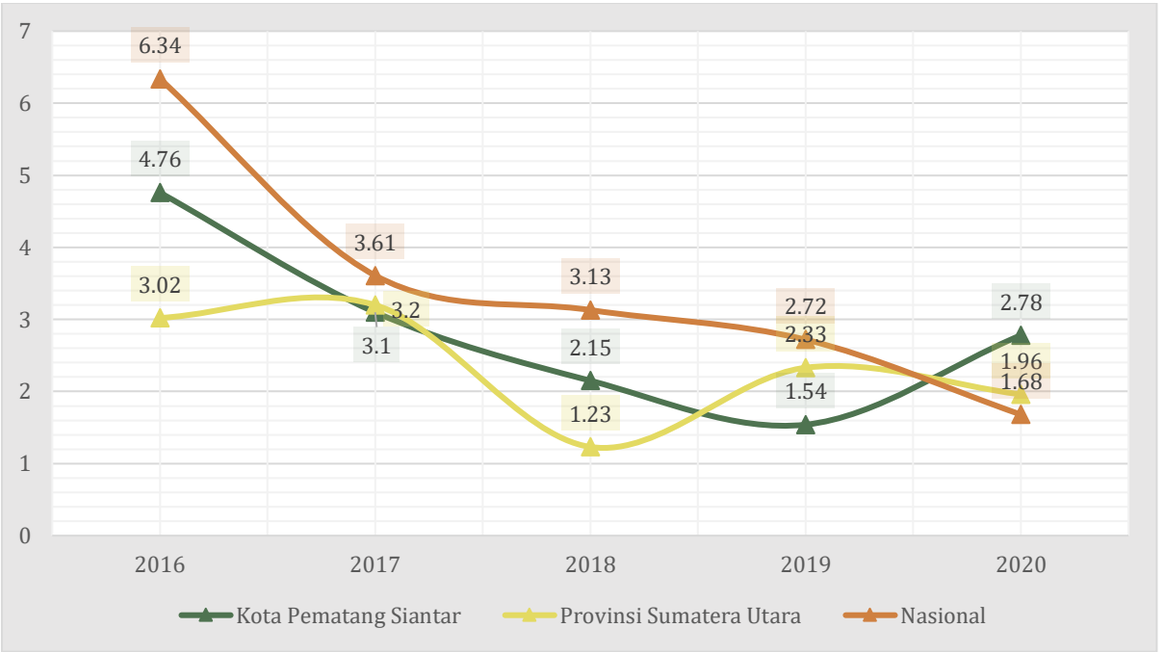

Gambar 2.16 Laju Inflasi Tahunan Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional, 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan, ukuran inflasi Kabupaten Asahan mengacu pada perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar. Gambaran inflasi Kota Pematangsiantar sebagai kota terdekat dengan wilayah Kabupaten Asahan dianggap dapat mewakili inflasi di Kabupaten Asahan. Selama lima tahun terakhir laju inflasi tahunan Kota Pematangsiantar cenderung menurun hingga tahun 2019, namun meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2016, laju inflasi Kota Pematangsiantar mencapai nilai tertinggi dalam lima tahun tersebut yaitu sebesar 4,76 persen. Kemudian selama tiga tahun berikutnya, terjadi penurunan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020 laju inflasi Kota Pematangsiantar meningkat hingga mencapai 1 jika dibandingkan, maka angka laju inflasi Kota Pematangsiantar pada tahun 2019 lebih rendah daripada Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

2.2.1.4 Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan perekonomian pada suatu wilayah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai PDRB suatu wilayah dengan jumlah punduduk wilayah tersebut. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Kabupaten Asahan, 2016-2020 (Rupiah)

Tahun	ADHB		ADHK (2010)	
	Nominal	Pertumbuhan (%)	Nominal	Pertumbuhan (%)
2016	40.981.226,68	9,13	31.293.953,56	4,67
2017	44.551.813,64	8,95	32.732.379,04	4,60
2018	47.854.662,61	7,41	34.298.164,36	4,78
2019	51.302.634,93	7,21	35.962.482,61	4,85
2020	52.640.071,59	2,61	35.780.462,19	-0.51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, 2021 (diolah)

PDRB per kapita ADHB Kabupaten Asahan pada periode 2016-2020 baik ADHB maupun ADHK cenderung mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Jika dilihat perkembangannya, pada tahun 2016 PDRB per kapita ADHB sebesar Rp 40.981.226,68 meningkat menjadi Rp 52.640.071,59 pada tahun 2020. Sementara itu, PDRB per kapita ADHK pada tahun 2016 bernilai Rp 31.293.953,56 lalu meningkat menjadi sebesar Rp35.780.462,19 pada tahun 2020. Namun demikian, PDRB per kapita ADHK tumbuh negatif pada tahun 2020 dikarenakan turunnya PDRB ADHK pada tahun tersebut. Temuan ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk merpercepat pemulihan ekonomi salah satunya dengan meningkatkan PDRB per kapita ADHK.

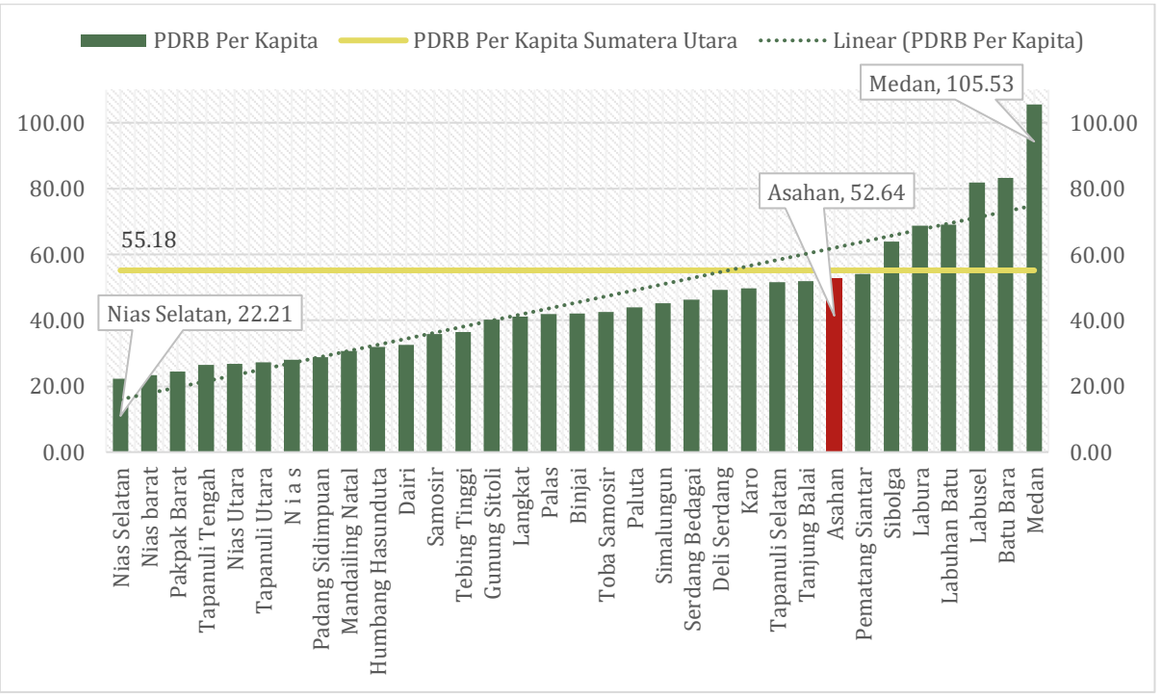

Gambar 2.17 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020 (dalam juta rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, PDRB per kapita Kabupaten Asahan masih berada di bawah PDRB Sumatera Utara yang sebesar 52,64 juta rupiah pada tahun 2020. Selain itu, di dalam Provinsi Sumatera Utara terjadi ketimpangan yang tinggi dengan jarak antara wilayah dengan PDRB terendah dan tertinggi yang cukup jauh. Wilayah dengan PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan dengan nilai sebesar 105,53 juta rupiah sedangkan wilayah dengan nilai PDRB terendah adalah Kabupaten Nias Selatan dengan nilai sebesar 22.21 juta rupiah. Sementara itu, Kabupaten Asahan menempati peringkat delapan dengan nilai PDRB per kapita tahun 2020 sebesar 52,64 juta rupiah.

2.2.1.5 Indeks Gini

Koefisien Gini merupakan indikator untuk menyatakan ketidakmerataan atau ketimpangan agregat dari distribusi pendapatan. Perhitungan koefisien gini diperoleh dengan menggunakan Kurva Lorenz. Koefisien gini ditentukan dengan menghitung nilai rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Nilai koefisien gini berkisar antara 0-1. Distribusi pendapatan semakin merata jika nilai koefisien gini mendekati nol. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai koefisien gininya semakin mendekati satu.

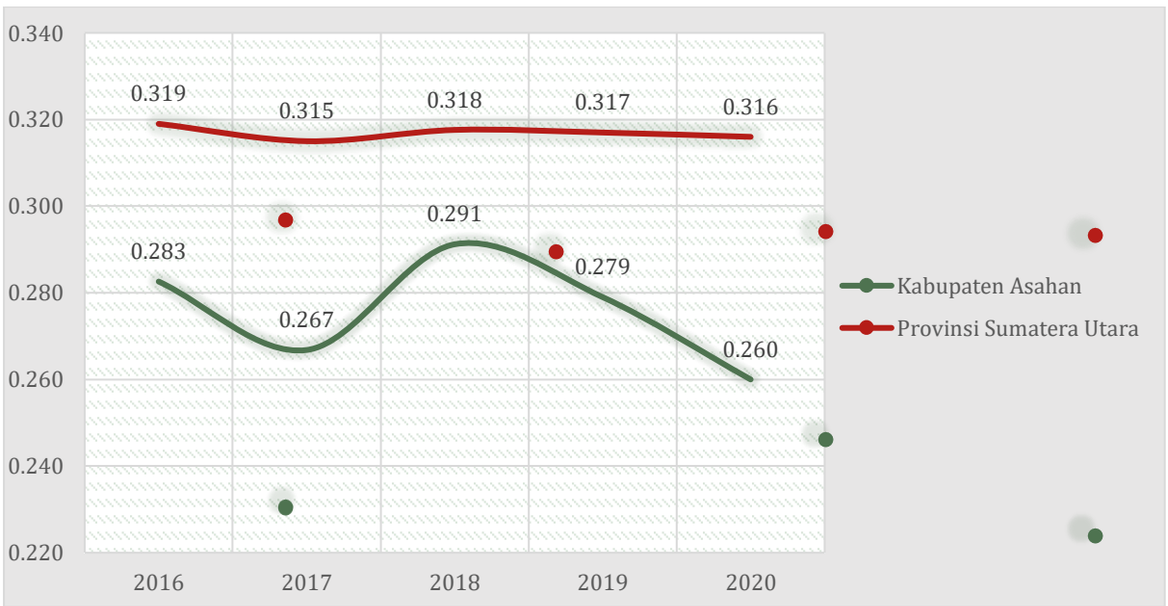

Gambar 2.18 Indeks Gini Kabupaten Asahan dan Provinsi Sumatera Utara, 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020

Perkembangan indeks gini Kabupaten Asahan cenderung fluktuatif selama tahun 2016-2020. Walaupun demikian, terjadi penurunan dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2019-2020. Pada periode tersebut, rata-rata indeks gini Kabupaten Asahan sebesar

0,276 dengan nilai terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 0,260 dan nilai tertinggi sebesar 0,291 pada tahun 2018. Indeks gini Kabupaten Asahan berada di bawah indeks gini Provinsi Sumatera Utara yang mencapai nilai rata-rata sebesar 0,317. Dengan nilai indeks gini kurang dari 0,3 dapat disimpulkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Asahan tergolong rendah, terlebih dengan trend menurun di tahun 2019-2020. Namun demikian, temuan tersebut perlu menjadi perhatian mengingat PDRB per kapita Kabupaten Asahan masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun tingkat pemerataan sudah lebih baik, namun pendapatan perkapita masyarakat relatif rendah, sehingga perlu untuk terus meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

2.2.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan di suatu daerah umumnya dilihat dari indikator jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri atas penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non-Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Asahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

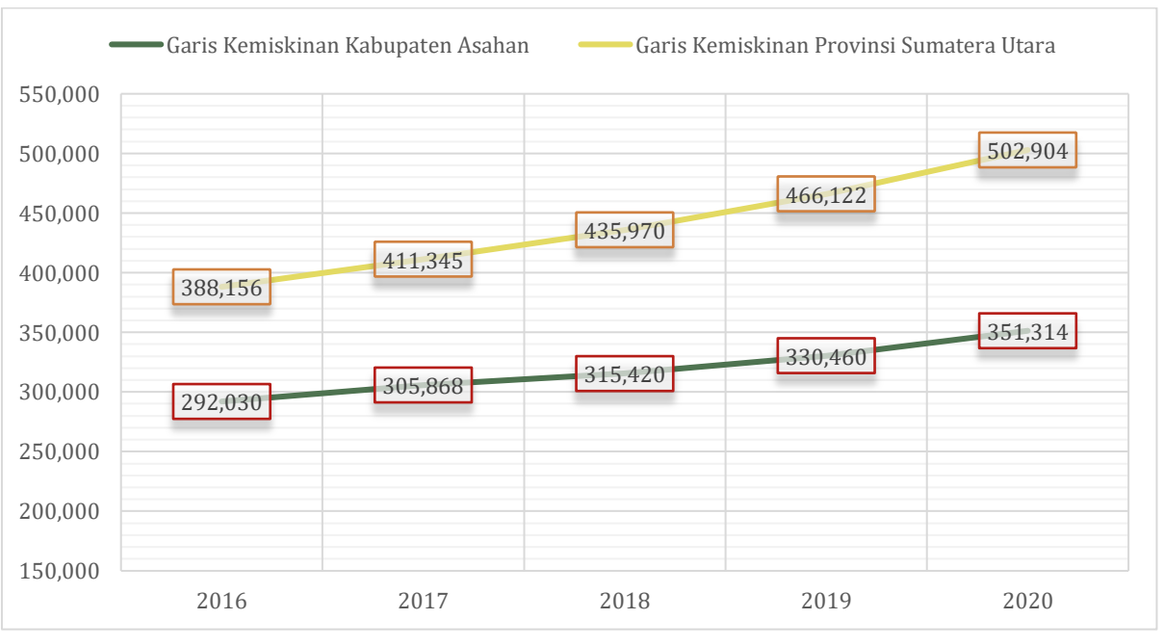

Gambar 2.19 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Garis kemiskinan Kabupaten Asahan selama lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan per tahunnya seiring dengan naiknya standar hidup layak. Angka garis kemiskinan

di Kabupaten Asahan berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai pada tahun 2020 sebesar 502.904 rupiah per kapita per bulan. Sementara itu pada tahun tersebut, angka garis kemiskinan Provinsi Sumatera Utara sebesar 502.904 rupiah per kapita per bulan. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, didapatkan jumlah penduduk miskin yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.

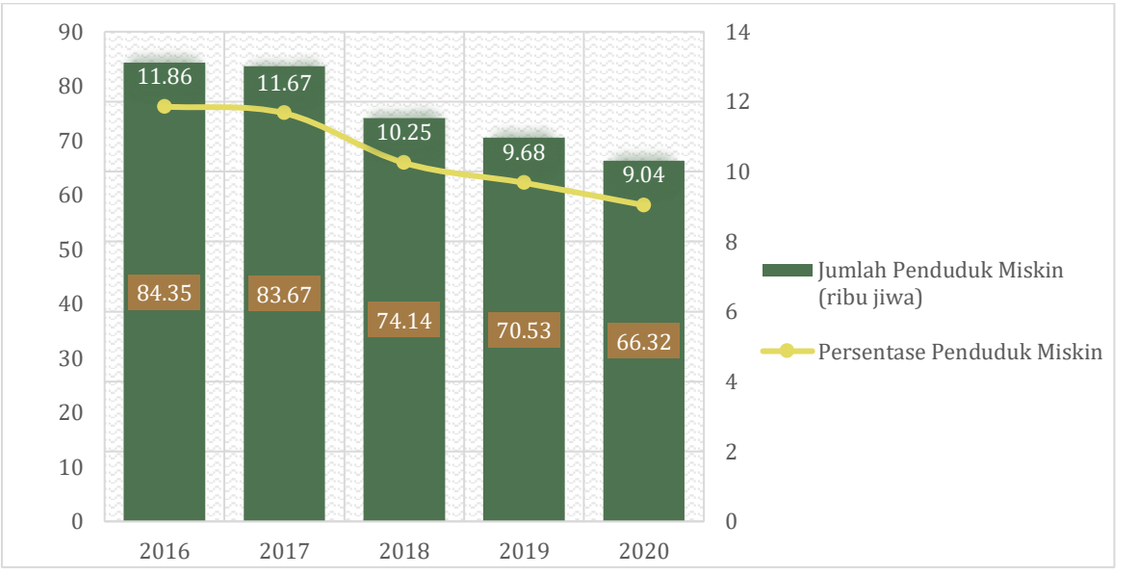

Gambar 2.20 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Kemiskinan di Kabupaten Asahan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebanyak 84,35 ribu jiwa dengan persentase peduduk miskin di Kabupaten Asahan sebesar 11,86 persen. Hingga pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun menjadi 66,32 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,04 persen. Sementara itu, laju penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Asahan cenderung fluktuatif dengan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2018, sebesar 1,42 persen. Walaupun demikian pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Asahan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara sebesar 9,14 persen.

Selain indikator jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lain yang penting dalam menganalisis kemiskinan di suatu daerah adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks tersebut, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

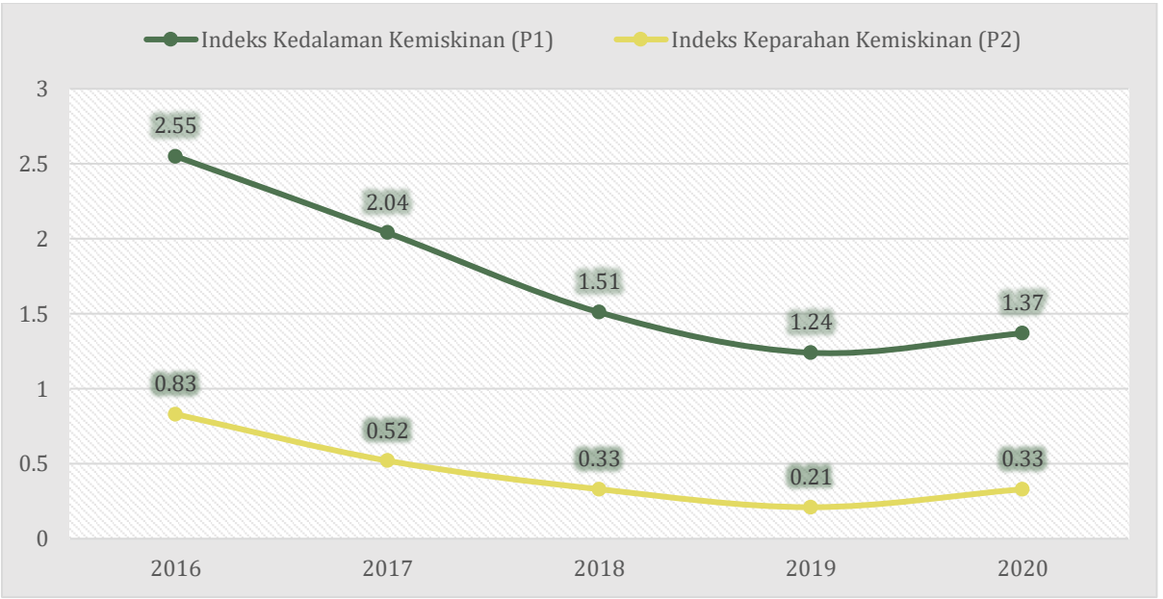

Gambar 2.21 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Selama lima tahun terakhir, perkembangan baik indeks kedalaman kemiskinan maupun keparahan kemiskinan menunjukkan arah yang sama. Tahun 2016 merupakan titik tertiggi selama lima tahun terakhir, kemudian terus turun hingga tahun 2019 indeks P1 mencapai 1,24, dan indeks P2 mencapai 0,21. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Namun demikian, pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi menyebabkan indeks P1 maupun P2 di Kabupaten Asahan meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2020 sebesar 1,37 yang berarti pendapatan orang miskin 1,37 kali lebih rendah dari garis kemiskinan. Sedangkan meningkatnya indeks keparahan kemiskinan menunjukkan peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, sehingga distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin tidak merata.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk serta upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan selama tahun 2016-2019 cukup menunjukkan hasil yang baik dengan terus menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin. Akan tetapi, pada situasi pandemi yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 juga mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam upaya peningkatan tersebut. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan dapat tergolong ke dalam wilayah yang cukup mampu bertahanan ditunjukkan dengan penurunan yang tidak sebesar wilayah lain. Dengan demikian, upaya yang saat ini dilakukan sudah

cukup baik namun perlu peningkatan efektifitas agar *outcome* yang didapatkan semakin maksimal.

Di sisi lain, meskipun indeks gini Kabupaten Asahan masih tergolong rendah, namun indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Asahan masih tergolong tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dengan pendapatan yang berada di sekitar garis kemiskinan cukup banyak. Kelompok masyarakat ini rawan untuk masuk ke dalam garis kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dari pemerintah daerah untuk melindungi kelompok masyarakat tersebut agar tidak jatuh ke dalam garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan sasaran pilar pembangunan ekonomi yang termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan tujuan untuk mengurangi penduduk yang hidup dalam kemiskinan, menjamin mobilisasi yang signifikan terkait dengan sumber daya dari berbagai sumber untuk melaksanakan program dan kebijakan dalam mengakhiri kemiskinan, serta menghapus kemiskinan. Pelaksanaan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD mengenai kemiskinan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Indikator TPB Mengenai Kemiskinan Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

NO	TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	TARGET RPJMN 2019
1	Mengakhiri Kemiskinan	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Orang	23,43	25,12	29,91	30,828	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal
1	Mengakhiri Kemiskinan	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Orang	35	39	61	19	Meningkat menjadi 17,12%
1	Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	88,19	91,81	79,08	79,71	Meningkat menjadi 65%

NO	TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	TARGET RPJMN 2019
1	Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Persen	99,01	99,10	99,39	99,97	Meningkat menjadi 94,78%
1	Mengakhiri Kemiskinan	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	jiwa	0	0	0	0	Menurun
1	Mengakhiri Kemiskinan	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	KK	18	2.091	1.396	187	Meningkat menjadi 151 ribu
1	Mengakhiri Kemiskinan	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jumlah	0	0	0	0	Meningkat menjadi 81,5 ribu
1	Mengakhiri Kemiskinan	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase	Persen	12%	12%	12%	12%	Meningkat

NO	TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	TARGET RPJMN 2019
			dari total belanja pemerintah.						
2	Menghilangkan Kelaparan	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	orang	438	350	350	273	Menurun menjadi 17%
2	Menghilangkan Kelaparan	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).		107.437	107.199	115.849		Meningkat

Mengenai target pembangunan berkelanjutan yang bersinggungan dengan kemiskinan, indikator yang sudah dijalankan namun belum memenuhi target capaian adalah mengenai pengurangan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional. Selain itu mengenai peserta jaminan sosial kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan. Selanjutnya adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai. Lebih lengkap mengenai penjabaran indikator tersebut tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.16 Indikator TPB Mengenai Kemiskinan Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

NO	TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	TARGET RPJMN2019	GAP 2019
1	Mengakhiri Kemiskinan	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	11,84	11,64	10,23	9,66	Menurun menjadi 7-8%	1,66
		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen				68,22	Meningkat menjadi 95%	(26,8)
		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	KPM	15,745	15,343	21,751	20,107	Menurun menjadi 2,8 juta	4,36

NO	TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	TARGET RPJMN2019	GAP 2019
		1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen				86	Meningkat menjadi 70%	(1,02)
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen		18,67	36,52	41,84	Meningkat menjadi 100%	(58,16)
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	55,90	49,80	93,00	94,50	Meningkat menjadi 100%	(5,50)
		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Persen	71,24	71,47	73,50	73,88	Meningkat menjadi 82,2%	(8,32)
		1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	75,74	75,74	69,51	70,12	Meningkat menjadi 77,4%.	(7,28)

NO	TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	TARGET RPJMN2019	GAP 2019
1	Mengakhiri Kemiskinan	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	kasus	116	113	112	116	Meningkat	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Asahan, 2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial/Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial/masyarakat dilakukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk, persentase balita gizi kurang, cakupan desa siaga aktif, persentase penduduk yang memiliki lahan, angkatan kerja, dan rasio penduduk yang bekerja.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Komponen IPM meliputi 3 dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; serta standar hidup layak. Dimensi tersebut terbagi menjadi beberapa indikator pembentuknya, yaitu Angka Harapan Hidup; Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah sebagai indeks pendidikan; serta pengeluaran riil per kapita.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dengan menyusun peringkat IPM maka dapat dilakukan analisi peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Data perkembangan IPM di Kabupaten Asahan ditunjukkan oleh gambar berikut.



Gambar 2.22 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

IPM Kabupaten Asahan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Asahan terus membaik setiap tahunnya. Pada tahun 2016, IPM Kabupaten Asahan sebesar 68,71 kemudian naik hingga mencapai 1,58 persen sehingga nilai IPM tahun 2020 menjadi 70,29. Nilai IPM tahun 2020 yang telah mencapai lebih dari 70 menjadikan IPM Kabupaten Asahan masuk ke dalam kategori tinggi, karena nilai IPM untuk mencapai kategori tinggi yaitu bernilai antara 70 sampai dengan 80, sementara IPM kategori sangat tinggi maka harus bernilai di atas 80. Perbandingan nilai IPM Kabupaten Asahan tahun 2020 dengan daerah lain ditunjukkan oleh gambar berikut.

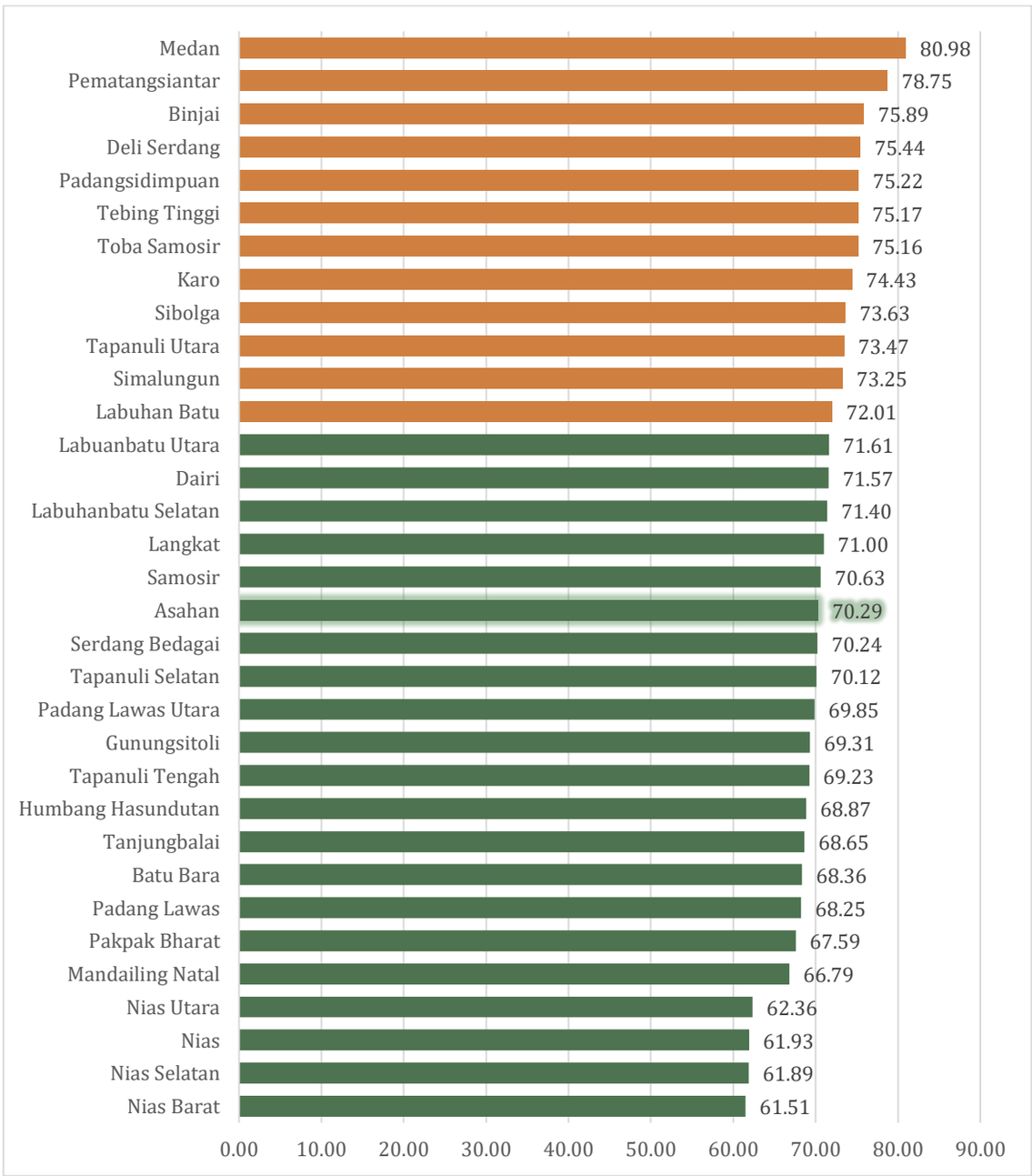

Gambar 2.23 IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara, hanya Kota Medan yang masuk dalam kategori IPM sangat tinggi dengan nilai IPM 80,98. Sementara itu, IPM Kabupaten Asahan berada dalam peringkat ke 18 dan masuk dalam kategori tinggi. Walaupun demikian, IPM Kabupaten Asahan masih dibawah IPM Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 71,77, dan juga masih di bawah nilai IPM Nasional yang sebesar 71,94.

Jika dilihat berdasarkan komponen pembentuk IPM, selama tahun 2016-2020 baik AHH, HLS, RLS, maupun pengeluaran riil per kapita selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara capaian komponen IPM tahun 2020 masih lebih tinggi dari komponen IPM Kabupaten Asahan, kecuali pengeluaran riil per kapita. Oleh karena itu, perencanaan Kabupaten Asahan perlu berupaya untuk melakukan peningkatan pada semua sektor, baik pendidikan, kesehatan maupun pendapatan masyarakat.

Tabel 2.17 Komponen IPM Kabupaten Asahan, 2016-2020

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	Provinsi Sumut 2020
AHH	67,47	67,57	67,79	68,11	68,26	69,10
HLS	12,52	12,53	12,56	12,59	12,60	13,23
RLS	8,33	8,46	8,47	8,49	8,79	9,54
Pengeluaran Riil Per Kapita	10.288	10.477	10.753	10.983	10.890	10.420
IPM	68,71	69,1	69,49	69,92	70,29	71,77
Laju Pertumbuhan IPM (%)	0,45	0,57	0,56	0,62	0,53	-

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

2.2.2.2 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kondisi literasi suatu masyarakat disuatu daerah. AMH dihitung berdasarkan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

2.2.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu komponen pembentuk dimensi pengetahuan dalam IPM adalah rata-rata lama sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidkan masyarakat pada suatu wilayah. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

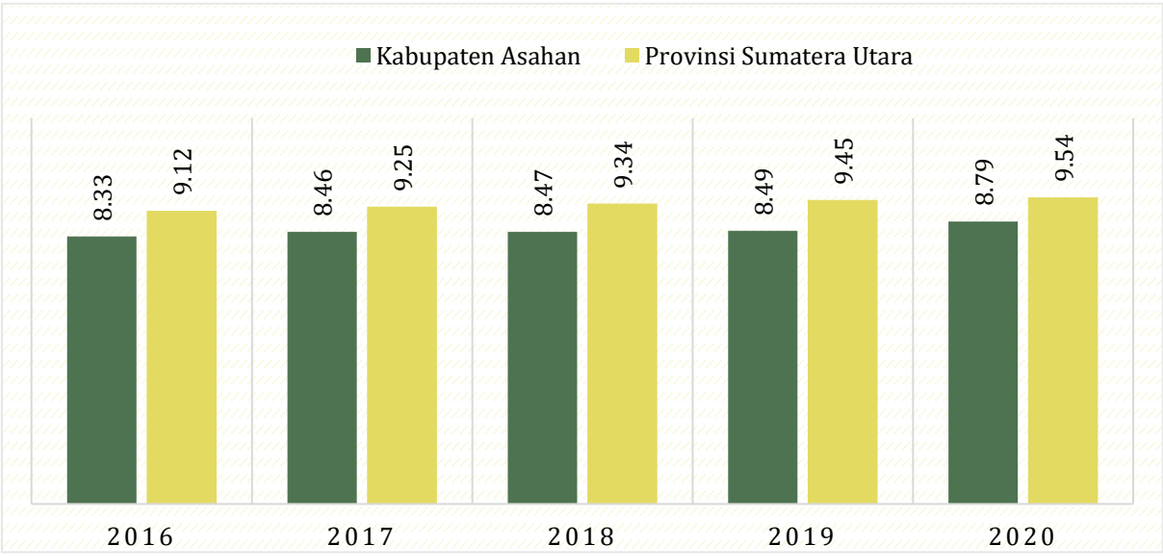

Gambar 2.24 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Asahan dan Provinsi Sumatera Utara, 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Angka RLS Kabupaten Asahan selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Pada tahun 2016, RLS Kabupaten Asahan sebesar 8,33 tahun kemudian naik menjadi 8,79 tahun pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 0,46 persen. Artinya, pada tahun 2020 rata-rata penduduk Kabupaten Asahan mengenyam pendidikan formal selama 8,79 tahun atau setara dengan jenjang kelas 3 sekolah menengah pertama. Jika dibandingkan dengan RLS Sumatera Utara, maka RLS Kabupaten Asahan masih di bawah dengan selisih 0,75 tahun pada tahun 2020.

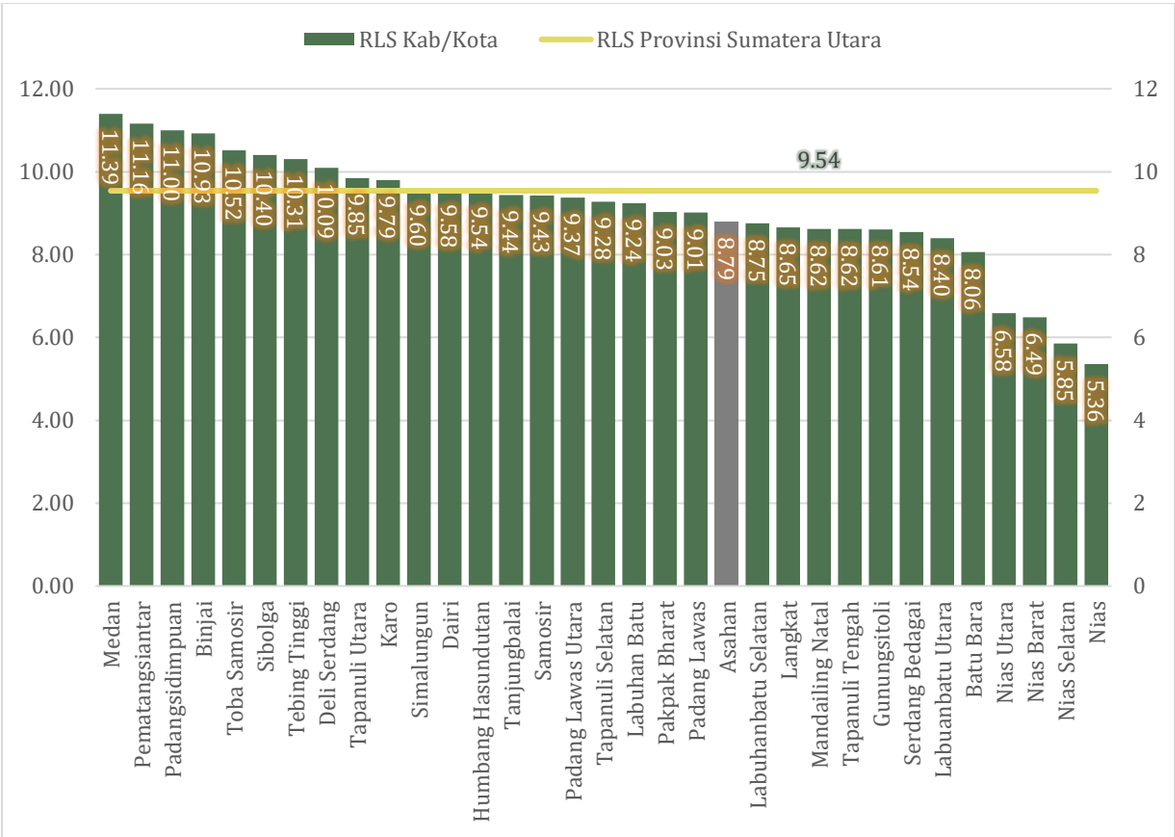

Gambar 2.25 Capaian Regional Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara, 2020

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka RLS Kabupaten Asahan termasuk dalam kategori rendah dengan peringkat ke-21. Di Sumatera Utara, RLS tertinggi dicapai oleh Kota Medan dengan nilai 11,39 tahun, sementara RLS terendah dicapai oleh Kabupaten Nias dengan nilai 5,36 tahun. Dalam level nasional RLS Indonesia pada tahun 2020 adalah 8,48 tahun, sehingga RLS Kabupaten Asahan sedikit di atas nilai nasional, namun masih berada di bawah RLS Provinsi Sumatera Utara.

2.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata ekspektasi usia bayi baru lahir jika pola kematian pada saat lahir konstan di masa depan. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. AHH merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Pada tahun 2020,

secara nasional AHH Indonesia adalah 71,47 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2020, memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,47 tahun.

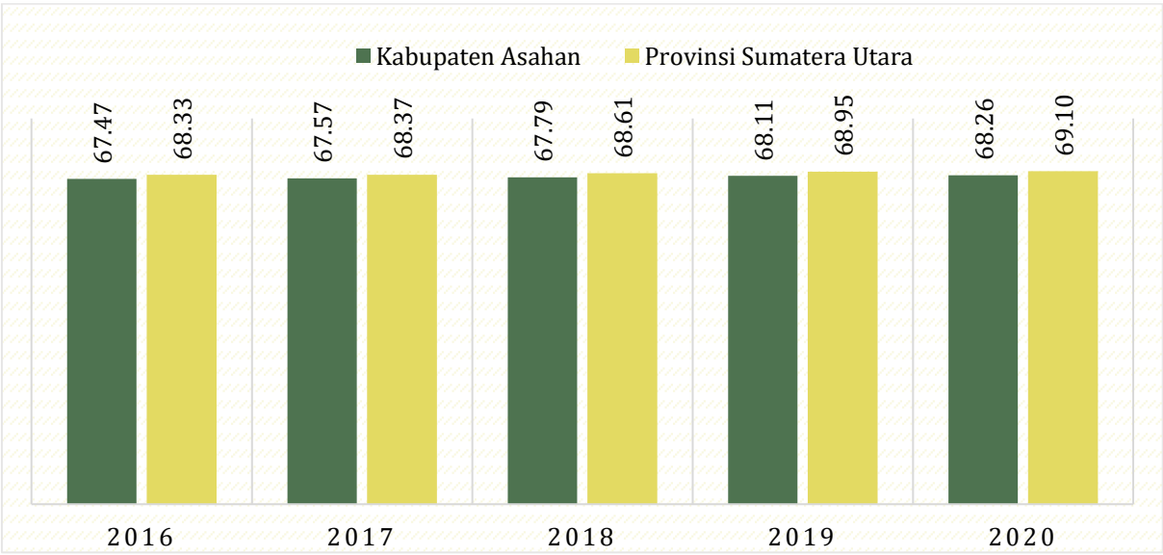

Gambar 2.26 Angka Harapan Hidup Kabupaten Asahan dan Provinsi Sumatera Utara, 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

AHH Kabupaten Asahan selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, AHH Kabupaten Asahan sebesar 67,47 tahun, kemudian terus meningkat menjadi 68,26 tahun pada 2020. Sehingga bayi yang lahir pada tahun 2020, memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,26 tahun. Akan tetapi, angka tersebut masih lebih rendah dari AHH Provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Pada tahun 2020, AHH Sumatera Utara mencapai 69,10 tahun atau selisih 0,84 tahun dengan AHH Kabupaten Asahan.

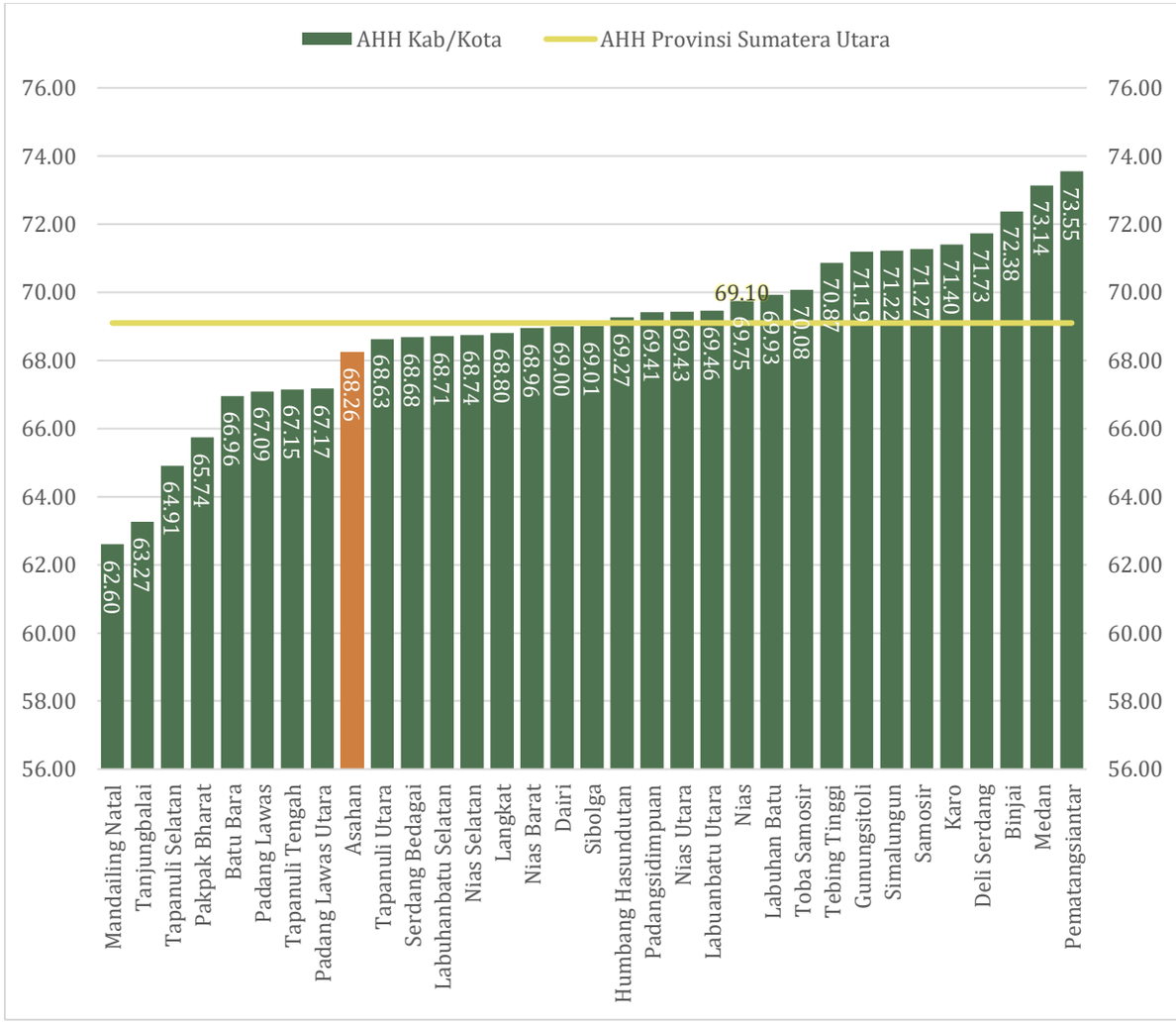

Gambar 2.27 Capaian Regional Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara, 2020

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka AHH Kabupaten Asahan termasuk dalam kategori rendah dengan peringkat ke-25. Di Sumatera Utara, AHH tertinggi dicapai oleh Kota Pematangsiantar dengan nilai 73,55 tahun, sementara AHH terendah dicapai oleh Kabupaten Mandailing Natal dengan nilai 62,60 tahun.

Berdasarkan data IPM beserta komponennya, angka RLS, dan angka AHH dapat disimpulkan bahwa capaian Kabupaten Asahan dalam indikator tersebut masih tergolong rendah baik dalam level nasional maupun regional dalam Provinsi Sumatera Utara, meskipun menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Asahan perlu melakukan upaya-upaya yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan nilai IPM sebagai indikator kesejahteraan rakyat.

2.2.2.5 Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Perlunya melaksanakan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) didasarkan pada kebutuhan peningkatan kualitas kesehatan pada balita. Kegiatan tersebut merupakan survei berkelanjutan untuk mengumpulkan data masalah gizi dan determinannya. Masalah gizi merupakan perhatian utama di berbagai negara, terutama masalah gizi ada balita. Salah satu masalah gizi yang menjadi indikator keberhasilan negara membangun masyarakatnya adalah stunting. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis. Masalah gizi tersebut disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak yang tercermin melalui tinggi badan anak yang lebih rendah (pendek/kerdil) dari standar usianya.

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, stunting di Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat 22 dari seluruh provinsi di Indonesia dengan skor 30,11. Skor tersebut berada di atas skor proporsi stunting nasional dalam rata-rata dengan angka sebesar 27,67. Urutan peringkat proporsi stunting secara nasional menurut provinsi disajikan sebagai berikut.

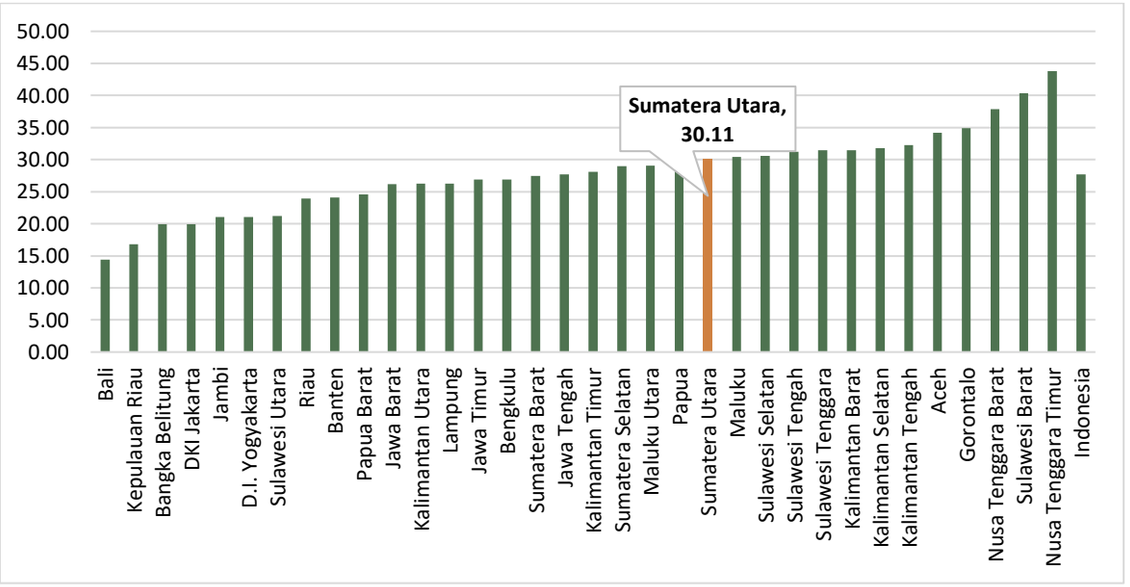

Gambar 2.28 Proporsi Stunting pada Balita Menurut Provinsi, 2019

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Kementerian Kesehatan, 2020

Menurut organisasi kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1999, jika prevalensi gizi di suatu wilayah berada pada angka di bawah 10 persen, maka wilayah tersebut masuk dalam kategori rendah; jika prevalensi gizi di suatu wilayah berada pada angka 10-19 persen, maka wilayah tersebut masuk dalam kategori sedang; apabila prevalensi gizi di suatu wilayah berkisar pada angka 20-29 persen, maka wilayah tersebut

masuk dalam kategori tinggi; dan apabila suatu wilayah memiliki prevalensi gizi di atas angka 30 persen, maka wilayah tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Persentase bayi di Kabupaten Asahan yang mengalami stunting pada tahun 2017 dan 2019 adalah sebesar 24,6 persen dan 28,58 persen. Adapun data prevalensi bayi yang mengalami stunting di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 dan 2019 sebesar 28,4 persen dan 30,7 persen. Artinya, data bayi stunting di Kabupaten Asahan lebih rendah dari data bayi stunting secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi, jika disandingkan dengan indikator WHO, maka angka stunting di Kabupaten Asahan tergolong dalam prevalensi stunting tinggi karena berada pada kisaran 20-29 persen. Pada tabel di bawah ini, juga menunjukkan bahwa bayi yang mengalami stunting di Kabupaten Asahan selama periode 2016-2019 terus mengalami peningkatan dari sebanyak 16.481 jiwa menjadi 21.264 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 20.980 jiwa. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk menangani kasus stunting di Kabupaten Asahan.

Tabel 2.18 Bayi yang Mengalami Stunting di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Asahan, 2016-2020

Stunting	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Sumatera Utara (%)	-	28,4	32,3	30,7	29,2
Kabupaten Asahan (jiwa)	16.481	19.060	19.898	21.264	20.980

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan (2016-2020)

Jumlah bayi penderita gizi buruk di Kabupaten Asahan pada kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan setiap tahun. Terdapat 136 bayi mengalami gizi buruk pada tahun 2016. Jumlah tersebut kemudian terus menurun menjadi 132 bayi (2017), 87 bayi (2018), 79 bayi (2019), dan menjadi 49 bayi (2020). Sebanding dengan bayi penderita gizi buruk, jumlah bayi penderita gizi kurang di Kabupaten Asahan pun juga cenderung mengalami penurunan selama 2016-2019. Terdapat 438 bayi mengalami gizi kurang pada tahun 2016 kemudian jumlah tersebut turun menjadi 350 bayi pada masing-masing tahun 2017 dan 2018 dan kembali mengalami penurunan menjadi 273 bayi pada tahun 2019.

Tabel 2.19 Jumlah Bayi yang Mengalami Masalah Gizi di Kabupaten Asahan, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Bayi gizi buruk (jiwa)	136	132	87	79	49
Bayi gizi kurang (jiwa)	438	350	350	273	-
Jumlah bayi ditimbang (jiwa)	60.661	60.140	55.102	57.049	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan (2016-2020)

Dari data yang telah disajikan, dapat diambil kesimpulan jika persentase bayi gizi buruk dan bayi gizi kurang terhadap jumlah bayi lahir di Kabupaten Asahan cenderung mengalami penurunan selama tahun 2015-2019. Persentase bayi gizi buruk terhadap bayi gizi lahir sebesar 0,19 persen pada tahun 2015, meningkat menjadi 0,22 persen pada tahun 2016 dan turun menjadi 0,20 persen pada tahun 2017. Tahun 2018, persentase tersebut kembali mengalami penurunan menjadi 0,16 persen dan tercatat menjadi 0,14 persen pada tahun 2019. Terdapat 0,69 persen bayi gizi kurang yang terdapat di Kabupaten Asahan pada tahun 2015 dibandingkan dengan jumlah bayi lahir. Angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 0,72 persen pada tahun 2016, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 pada angka 0,58 persen. Namun, tahun 2018 mencatat jika angka tersebut kembali naik menjadi 0,64 dan terjadi penurunan kembali menjadi 0,48 persen pada tahun 2019.

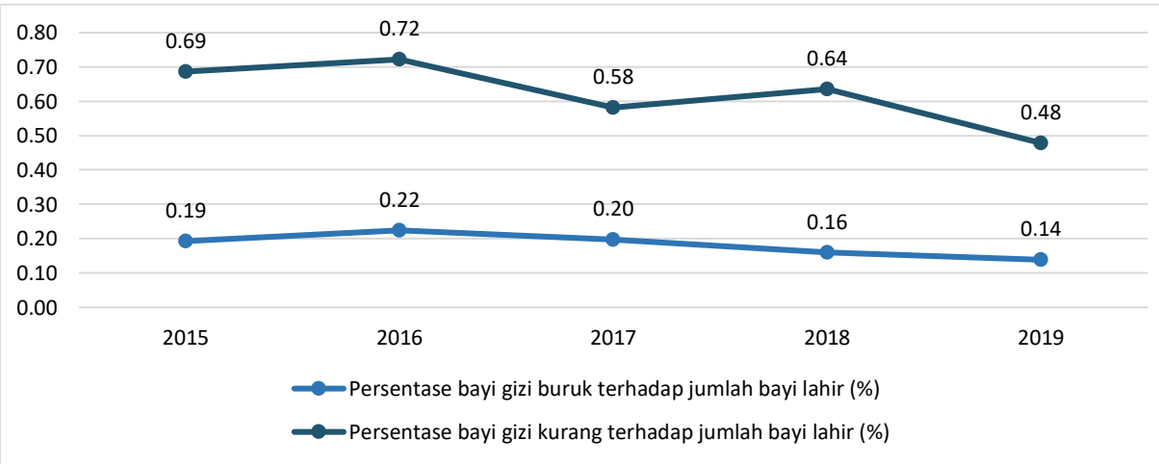

Gambar 2.29 Persentase Bayi Gizi Buruk dan Bayi Gizi Kurang terhadap Jumlah Bayi Lahir di Kabupaten Asahan, 2015-2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, 2015-2019

Tabel 2.20 Angka Kematian Bayi dan Ibu di Kabupaten Asahan, 2016-2020

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi	3,2	1,97	1,12	2	1
Angka Kematian Ibu	124,4	74,5	84,4	120,12	124

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan (2016-2020)

Dari data yang telah disajikan, dapat diambil kesimpulan angka kematian bayi cenderung mengalami penurunan selama tahun 2016-2020. Sedangkan angka kematian Ibu mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan karena keracunan kehamilan yang cukup tinggi.

Tabel 2.21 Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Asahan, 2016-2020

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Balita	47	28	17	24
Persentase	3%	2%	1%	1%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan (2016-2020)

Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan angka kematian balita cenderung mengalami penurunan selama tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 berjumlah 47 dan menurun ditahun 2019 menjadi 24 dengan persentase sebesar 1 persen.

2.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan menjadi salah satu indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian secara langsung di daerah tersebut. Data mengenai kondisi ketenagakerjaan, seperti persentase angkatan kerja dan distribusi lapangan pekerjaan, merupakan hal yang penting untuk melihat keadaan gerakan ekonomi suatu daerah. Jumlah penduduk yang bekerja tentu saja mempengaruhi tingkat ekonomi rumah tangga yang nantinya akan mempengaruhi ekonomi daerah tersebut secara keseluruhan. Angkatan kerja, dalam hal ini terbagi dalam dua kategori (bekerja dan pengangguran), merupakan penduduk usia bekerja atau bekerja namun sementara tidak bekerja dan meliputi pengangguran.

Pada kurun tahun 2016-2020, tercatat jika angkatan kerja di Kabupaten Asahan mengalami kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2016-2018 angkatan kerja cenderung

meningkat dari 315.518 menjadi 336.894, kemudian turun dua tahun berturut-turut menjadi 317.794 di tahun 2020. Pergerakan tersebut searah dengan pergerakan penduduk yang bekerja yang meningkat hingga tahun 2018 kemudian tarun hingga tahun 2020 menjadi 294.795 jiwa. Namun, terdapat juga peningkatan drastis pengangguran di Kabupaten Asahan terutama tahun 2019, mulai dari 18.759 jiwa pada tahun 2016 menjadi 22.999 jiwa pada tahun 2020. Tabel selanjutnya merangkum jumlah penduduk Kabupaten Asahan menurut kegiatan utama sepanjang tahun 2016-2020, terdiri dari penduduk bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Terlihat tren penurunan pada penduduk bersekolah di Kabupaten Asahan pada tahun 2016 sampai tahun 2019, namun meningkat cukup tajam pada tahun 2020. Pada tahun 2016-2020, jumlah penduduk bersekolah di Kabupaten Asahan berkisar antara 40.000 hingga 42.000 jiwa. Penduduk yang mengurus rumah tangga di Kabupaten Asahan cenderung fluktuatif karena sempat mengalami penurunan drastis dari tahun 2017 sebanyak 120.341 jiwa menjadi 99.124 jiwa pada tahun 2018, dan meningkat cukup tajam tahun 2020 dari 114.301 jiwa menjadi 151.724 jiwa.

Tabel 2.22 Jenis Kegiatan Utama Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Asahan, 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan kerja Kab. Asahan	315.518	315.518	336.894	327.216	317.794
Bekerja	296.759	296.759	319.167	304.775	294.795
Penganggur	18.759	18.759	17.727	22.441	22.999
Bukan angkatan kerja	177.441	177.441	161.284	176.645	215.252
Sekolah	40.359	40.359	42.020	40.399	42.351
Mengurus rumah tangga	120.341	120.341	99.124	114.301	151.724
Lainnya	16.741	16.741	20.140	21.945	21.177
Total	492.959	492.959	498.178	503.861	533.046

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Selama kurun waktu 2015-2020, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan hingga tahun 2018, tetapi kembali turun pada tahun 2019-2020. TPAK terendah selama kurun waktu tersebut terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 59.62. Hal ini disinyalir merupakan dampak dari pandemi yang menjadikan ibu rumah tangga memilih untuk mengurus rumah tangga, dan penduduk usia produktif

memilih untuk melanjutkan sekolah dibandingkan bekerja. Walaupun demikian, TPAK Provinsi Sumatera Utara cenderung fluktuatif ke arah menurun, namun setiap tahunnya angka TPAK Kabupaten Asahan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan TPAK nasional selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Asahan kecuali di tahun 2018. Informasi mengenai perbandingan TPAK Kabupaten Asahan, TPAK Provinsi Sumatera Utara, dan TPAK nasional pada tahun 2015-2020 terangkum pada gambar berikut.

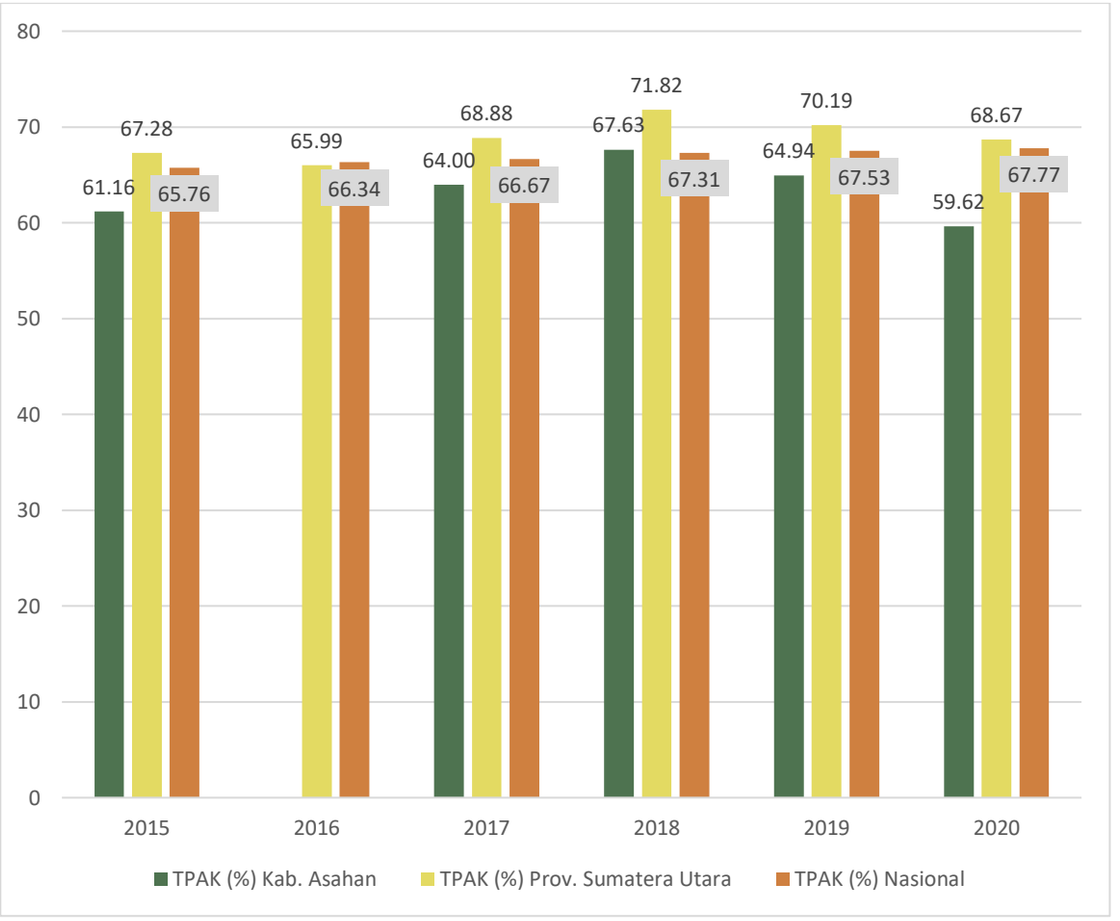

Gambar 2.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Asahan, 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021 dan BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

2.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Asahan juga mengalami kenaikan pada kurun waktu 2015-2020. Walaupun sempat turun pada tahun 2018, namun kemudian terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu mencapai angka 6,86 persen atau naik 1,6 persen. jika dibandingkan, TPT Kabupaten Asahan pada tahun 2015 dan 2018 lebih rendah dibandingkan dengan TPT Sumatera Utara (dengan tingkat 6,71 persen dan 5.56 persen) dan nasional (dengan tingkat 6,18 persen dan 5.50 persen). Namun, pada tahun

2017, 2019 dan 2020 TPT Kabupaten Asahan mengalami kenaikan dan angkanya melebihi TPT Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Bahkan, pada tahun 2020, TPT Kabupaten Asahan mencapai angka 7,24 persen, angka paling tinggi selama 2015-2020. Temuan tersebut perlu digaris bawahi, dan juga perlu adanya upaya penanganan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan, melalui pembangunan Balai Latihan Kerja, pelatihan wirausaha baru, dan pemberian bantuan modal usaha.

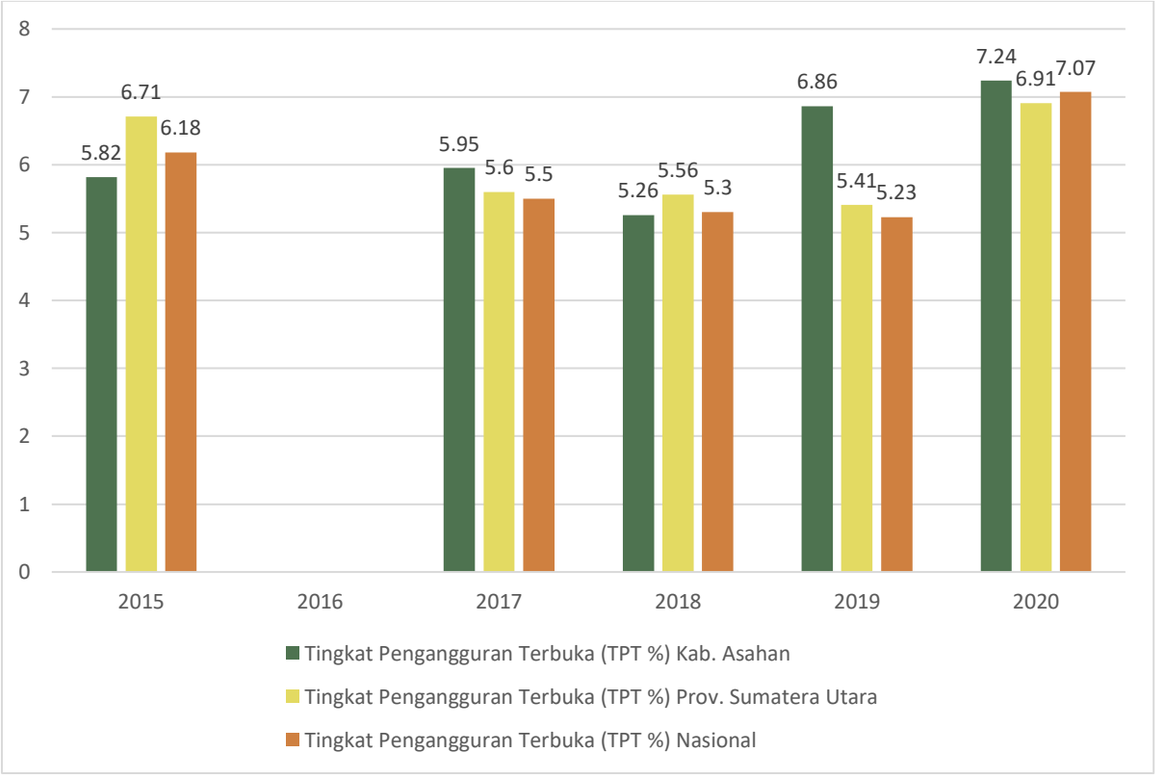

Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Asahan, 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021 dan BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Tabel 2.21 menunjukkan data jumlah pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Asahan pada tahun 2015-2020 menurut tingkat pendidikan. Dari tabel tersebut, terlihat jika pengangguran terbuka terbanyak berasal dari penduduk dengan tingkat pendidikan SMA sederajat. Setiap tahunnya, tingkat pengangguran terbuka dari penduduk lulusan SMA sederajat menyumbang angka tertinggi. Bahkan, pada tahun 2019, terdapat 13.045 penduduk lulusan SMA sederajat yang masuk dalam kategori pengangguran terbuka. Sedangkan penduduk dengan latar belakang pendidikan diploma dan universitas, hingga tahun 2018 memberikan kontribusi terkecil untuk angka pengangguran terbuka bagi Kabupaten Asahan, namun mengalami peningkatan tahun 2019-2020 menjadi 3.528 jiwa, dan melebihi angka pengangguran terbuka dari tingkat pendidikan SD ke bawah sederajat.

Jika dilihat secara keseluruhan, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori pengangguran terbuka cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari 17.120 jiwa pada tahun 2015 menjadi 22.999 jiwa pada tahun 2020.

Tabel 2.23 Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Asahan, 2015-2020

Jumlah pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan (jiwa)	2015	2017	2018	2019	2020
SD ke bawah, SD, dan sederajat	3.448	1.550	3.278	2.849	2.678
SMP dan sederajat	2.549	3.945	3.495	3.075	4.680
SMA dan sederajat	8.929	11.864	9.792	13.045	12.113
Diploma dan universitas	2.194	1.400	1.162	3.472	3.528
Total	**17.120**	**18.759**	**17.727**	**22.441**	**22.999**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

2.2.2.8 Rasio Penduduk yang Bekerja

Seperti diketahui, angkatan kerja di Kabupaten Asahan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2016-2020, meskipun turun pada tahun 2020. Demikian juga dengan jumlah penduduk yang bekerja selama kurun waktu tersebut juga cenderung mengalami peningkatan. Jika dilihat pada gambar selanjutnya, rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di Kabupaten Asahan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2018 dari sebesar 94,05 persen menjadi 94.74 persen, namun turun pada tahun 2019 menjadi 93,14 persen dan pada tahun turun menjadi 2020 menjadi 92,76 persen. Jika dibandingkan, rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Asahan sendiri lebih rendah dibandingkan dengan rasio penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Utara maupun nasional (kecuali tahun 2018). Walaupun begitu, Kabupaten Asahan berhasil mencatatkan lebih dari 90 persen setiap tahunnya untuk rasio penduduk yang bekerja. Hal ini menunjukkan jika jumlah angkatan kerja di Kabupaten Asahan memiliki persentase yang lebih tinggi diserap di lapangan pekerjaan dengan selisih yang tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara dan nasional secara keseluruhan.



Gambar 2.32 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021 dan BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Jika dilihat dari sektor pekerjaan, selama periode 2015-2020 persentase penduduk yang bekerja di Kabupaten Asahan paling tinggi terserap di sektor jasa, meskipun besaran persentasenya fluktuatif setiap tahun. Sedangkan persentase terkecil yaitu sektor industri dengan persentase kurang dari 25 persen setiap tahunnya. Berbeda dengan sektor jasa dan industri yang cenderung fluktuatif, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian justru semakin menurun dari 38,79 persen di tahun 2015 menjadi 32,03 persen di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk Kabupaten Asahan memiliki peluang kerja yang semakin besar di sektor jasa, dan semakin berkurangnya penduduk yang berminat bekerja dalam sektor pertanian.

Tabel 2.24 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor di Kabupaten Asahan (Jiwa), 2015-2020

Sektor	2015	2017	2018	2019	2020
Pertanian	38,79	36,12	36,30	33,39	32,03
Industri	21,45	12,51	19,60	20,59	17,10
Jasa	39,76	51,37	44,10	46,01	50,87
Total					

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021

2.2.2.9 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja merupakan rata-rata laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perkapita per tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja di suatu daerah. PDB yang digunakan dalam perhitungan ini menggunakan PDB yang didasarkan pada harga konstan. Data tenaga kerja yang digunakan merupakan jumlah orang yang bekerja dalam kurun waktu tersebut.

Tabel selanjutnya menunjukkan jika PDRB Kabupaten Asahan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015, PDRB Kabupaten Asahan sebesar 21.116,72 miliar rupiah dan meningkat menjadi 26.299,57 miliar pada tahun 2020. Jumlah orang yang bekerja di Kabupaten Asahan meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah 276.998 jiwa menjadi 319.167 jiwa pada tahun 2018, namun turun dua tahun berturut-turut menjadi 294.795 jiwa pada tahun 2020. Namun demikian, karena berkurangnya jumlah orang yang bekerja tetapi PDRB terus mengalami peningkatan sehingga PDRB yang dihasilkan per tenaga kerja cenderung mengalami peningkatan, dari 76.234 (2015) menjadi 89.213 (2020). Sedangkan jika dilihat dari laju pertumbuhan PDB per tenaga kerjanya selama periode tersebut cenderung fluktuatif meskipun data yang disajikan tidaklah lengkap. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah sebesar 6,52 persen, kemudian naik tajam menjadi 10,62 persen pada tahun 2019 setelah mengalami penurunan laju penurunan sebesar 1,81 persen pada tahun 2018. Akan tetapi, laju pertumbuhan pertumbuhan PDB per tenaga kerja pada tahun 2020 hanya sebesar 3,60 persen.

Tabel 2.25 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja di Kabupaten Asahan, 2015-2020

INDIKATOR	2015	2017	2018	2019	2020
PDRB (miliar rupiah)	21.116,72	23.525,35	24.844,87	26.245,24	26.299,57
Jumlah orang bekerja	276.998	296.759	319.167	304.775	294.795
PDRB per tenaga kerja (ribu rupiah)	76.234	79.274	77.843	86.113	89.213
Laju pertumbuhan (%)	**6,52**	**-**	**-1,81**	**10,62**	**3,60**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2021 (data diolah)

2.2.2.10 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Kesempatan kerja dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan bagi penduduk di suatu daerah. Kesempatan kerja ditunjukkan dengan seberapa banyak jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja di suatu daerah. Di Kabupaten Asahan, terdapat 276.998 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja (2015) dan mengalami tren kenaikan jumlah hingga tahun 2019 mencapai 304.775 jiwa, namun menurun menjadi 294.795 jiwa (2020). Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pun secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 2015-2020, dari 480.938 jiwa pada 2015 menjadi 533.046 jiwa pada 2020. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh situasi pandemi, sehingga lebih banyak penduduk yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga ataupun melanjutkan sekolah dibanding bekerja.

Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kabupaten Asahan, 2015-2020

INDIKATOR	2015	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (jiwa)	276.998	296.759	319.167	304.775	294.795
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (jiwa)	480.938	492.959	498.178	503.861	533.046

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2021

Dari data yang tersaji pada tabel di atas, dapat disajikan pada gambar selanjutnya jika rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Asahan terus meningkat hingga mencapai puncaknya tahun 2018, namun tahun 2019-2020 terus menurun. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2015 adalah sebesar 57,60 persen, meningkat menjadi 60,20 persen pada tahun 2017 dan 64,07 persen pada tahun 2018. Namun, rasio tersebut turun menjadi 60,49 persen pada tahun 2019, dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 55,30 persen.

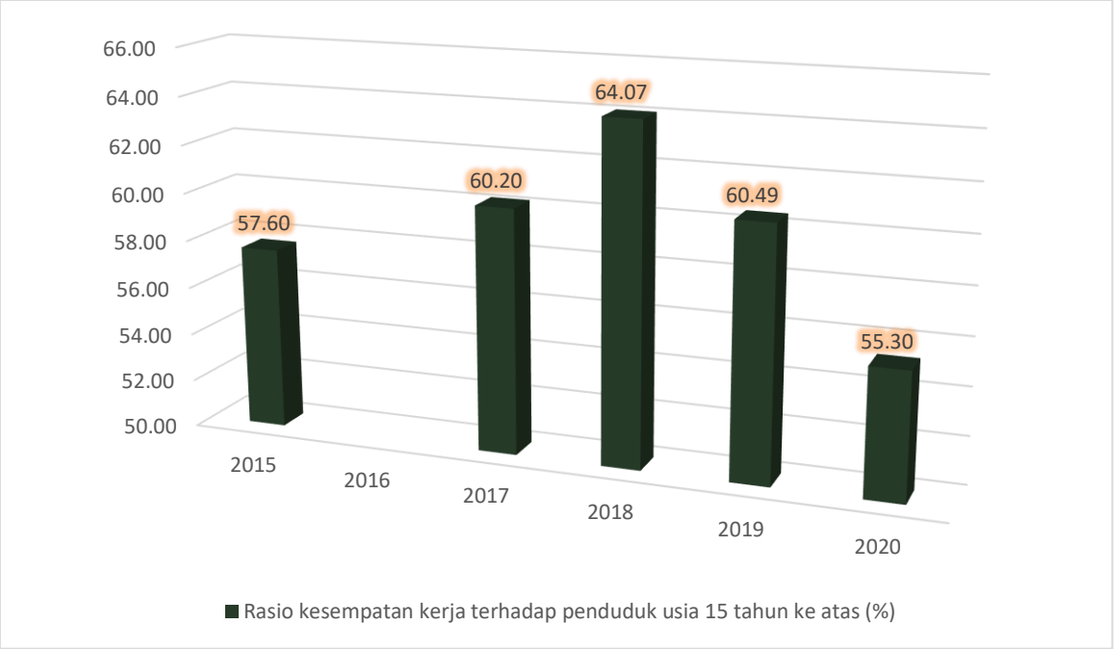

Gambar 2.33 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2021

2.2.2.11 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja

Pekerjaan penduduk dapat diklasifikasikan berdasarkan status utama. Tabel berikut menyajikan jumlah pekerja di Kabupaten Asahan yang didasarkan pada status utama pekerjaan mereka, meliputi pekerja berusaha sendiri, pekerja berusaha bebas, dan pekerja keluarga. Jumlah pekerja berusaha sendiri pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Asahan cenderung mengalami peningkatan meskipun terjadi satu kali penurunan pada tahun 2018. Sedangkan jumlah pekerja berusaha bebas dan jumlah pekerja keluarga cenderung fluktuatif. Akan tetapi, jumlah pekerja keluarga tercatat mengalami tren kenaikan selama kurun waktu 2015-2020, sedangkan jumlah pekerja berusaha bebas cenderung menurun. Total pekerja di Kabupaten Asahan selama kurun waktu 2015-2020 juga mengalami tren kenaikan meskipun fluktuatif, mulai dari 106.508 jiwa pada tahun 2015 menjadi 128.047 jiwa pada tahun 2020, total pekerja tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 136.209 jiwa.

Tabel 2.27 Jumlah Pekerja berdasarkan Status Utama Pekerjaan di Kabupaten Asahan, 2015-2020

INDIKATOR	2015	2017	2018	2019	2020
Jumlah pekerja berusaha sendiri	51.884	59.659	53.204	63.313	72.487
Jumlah pekerja berusaha bebas	40.212	43.374	38.119	51.536	34.576

INDIKATOR	2015	2017	2018	2019	2020
Jumlah pekerja keluarga	14.412	23.310	26.112	21.360	20.984
Total pekerja (berusaha sendiri, berusaha bebas, keluarga)	106.508	126.343	117.435	136.209	128.047

Sumber: Kabupaten Asahan Dalam Angka, 2016-2021

Dari data yang disajikan, maka dapat dihitung proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja. Proporsi tersebut didapatkan dari jumlah pekerja berusaha sendiri, pekerja berusaha bebas, dan pekerja keluarga yang dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Asahan. Dengan olahan data tersebut, maka didapatkan data yang menunjukkan kecenderungan kenaikan proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja di Kabupaten Asahan pada tahun 2015-2020. Proporsi tersebut sebesar 38,45 persen pada tahun 2015, meningkat menjadi 42,57 persen pada tahun 2017 dan turun menjadi 36,79 persen pada tahun 2018 dan meningkat hingga mencapai angka 44,69 persen di tahun 2019. Meskipun sempat terdapat peningkatan, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1,25 persen menjadi 43,44 persen.

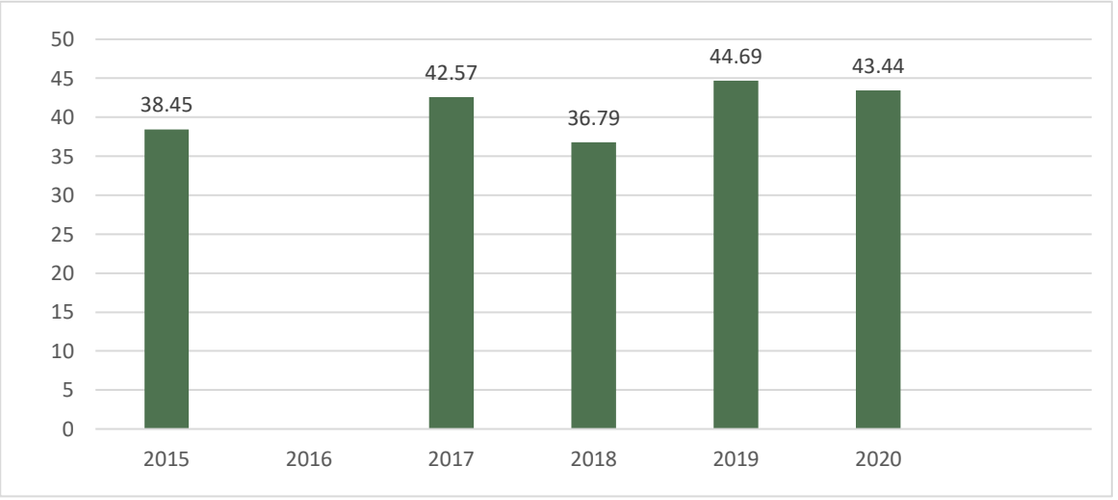

Gambar 2.34 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja di Kabupaten Asahan, 2015-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2021

2.2.2.12 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang dimaksud dengan keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu dari enam indikator keluarga sejahtera I yang disebut sebagai indikator "kebutuhan dasar"

keluarga. Keluarga sejahtera I merupakan keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal namun belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Dengan kata lain, keluarga sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan keluarga sejahtera I tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator keluarga sejahtera II atau disebut dengan indikator "kebutuhan psikologis" keluarga. Kedua indikator tersebut (indikator dasar keluarga dan indikator kebutuhan psikologis keluarga) merupakan dua tahap awal tingkat kesejahteraan keluarga. Keluarga sejahtera II adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya. Pada keluarga sejahtera II, kebutuhan fisik dan sosial-psikologis telah terpenuhi, namun kebutuhan untuk pengembangan belum terpenuhi, seperti kebutuhan menabung.

Tabel 2.28 Jumlah dan Klasifikasi Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Klasifikasi	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pra sejahtera	19.325	11,53	18.989	11,31	17.556	10,39	17.423	15,89	17.312	16,02
Keluarga Sejahtera I	26.810	15,99	26.860	15,99	27.235	16,12	27.025	10,54	27.895	10,90
Keluarga Sejahtera II	17.284	10,31	17.324	10,31	17.889	10,59	17.929	52,70	18.985	52,33
Keluarga Sejahtera III	88.271	52,66	88.328	52,59	89.225	52,82	89.625	10,62	91.125	10,89
Keluarga Sejahtera III Plus	15.927	9,50	16.457	9,80	17.023	10,08	18.059	15,89	18.954	16,02
Jumlah keluarga	167.617	100	167.958	100	168.928	100	170.061	100	174.121	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, 2016-2020

Jumlah keluarga yang terdapat di Kabupaten Asahan mengalami kenaikan setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2016-2020. Sebanyak 167.617 keluarga tercatat pada tahun 2016 dan secara konsisten mengalami pertambahan jumlah hingga mencapai 174.121 keluarga pada tahun 2020. Adapun persentase keluarga pra sejahtera terhadap jumlah keluarga di Kabupaten Asahan mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dari 11,53 persen pada tahun 2016 terus menurun hingga angka 10,39 persen pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan sebesar 15,89 pada tahun 2019 dan meningkat 16,02 pada tahun 2020. Persentase keluarga sejahtera I pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 15,99 persen, ditahun 2018 meningkat menjadi 16,12 persen, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 10,54 persen dan pada tahun 2020 sebesar 10,90 persen. Selanjutnya persentase keluarga sejahtera II pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 10,31 persen, pada tahun 2018 meningkat sebesar 10,59 persen, dan pada tahun

2019 mengalami kenaikan secara signifikan menjadi sebesar 52,70 persen dan pada tahun 2020 sebesar 52,33 persen. Adapun persentase klasifikasi keluarga terbesar di Kabupaten Asahan adalah keluarga sejahtera III, pada tahun 2016 sebesar 52,66 persen, pada tahun 2017 sebesar 52,59, pada tahun 2018 sebesar 52,82 persen, di tahun 2019 mengalami penurunan sangat signifikan sebesar 10,62 dan pada tahun 2020 sebesar 10,89 persen terhadap jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Asahan.

2.2.2.13 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Penerimaan daerah yang diperoleh Kabupaten Asahan selama 2016-2020 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Asahan selama tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif namun selalu mendominasi struktur penerimaan daerah yaitu mencapai di atas 65 persen. Akan tetapi, berbeda dengan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan, PAD Kabupaten Asahan konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, PAD Kabupaten Asahan sebesar 119,50 miliar rupiah, naik menjadi 123,70 miliar rupiah (2017), 142,97 miliar rupiah (2018), 149,65 miliar rupiah (2019), dan terakhir tercatat sebesar 159,31 miliar rupiah (2020). Total penerimaan daerah Kabupaten Asahan selama 2016-2020 juga cenderung fluktuatif. Pada 2016, total penerimaan daerah Kabupaten Asahan mencapai 1,61 triliun rupiah, kemudian turun menjadi 1,49 triliun rupiah pada tahun 2017, meningkat dua tahun berturut-turut yakni masing-masing sebesar 1,62 triliun rupiah (2018) dan 1,72 triliun rupiah (2019), namun kembali turun menjadi sebesar 1,61 triliun rupiah pada 2020.

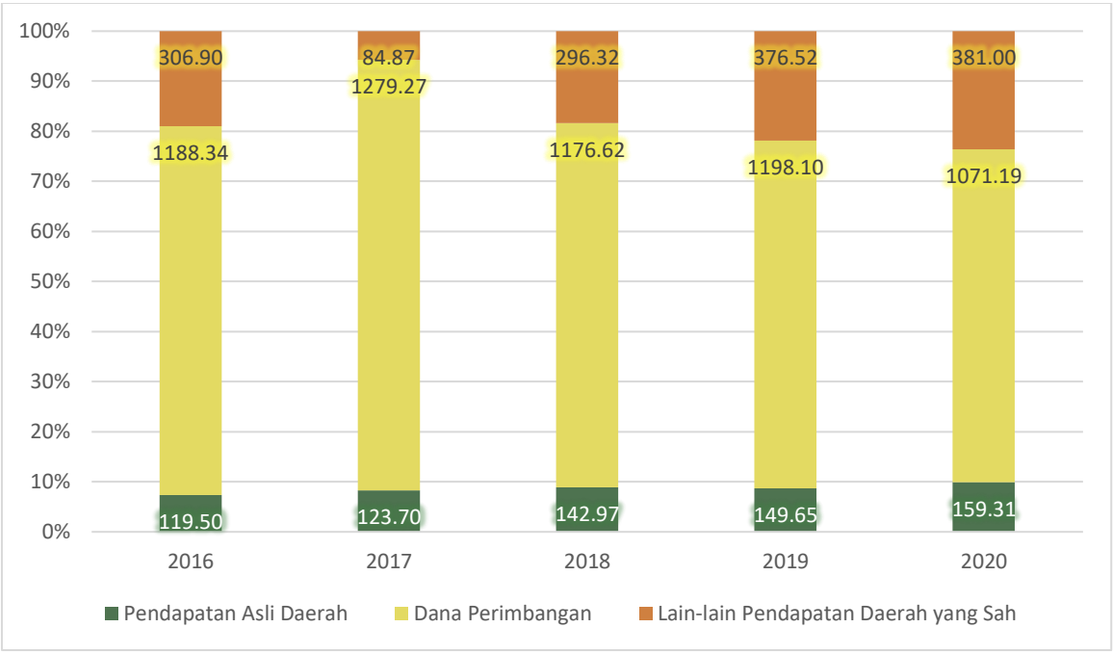

Gambar 2.35 Penerimaan Daerah menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Asahan (Miliar Rupiah), 2016-2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Asahan, 2016-2020

Pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh Kabupaten Asahan dihimpun dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari ketiga sumber tersebut, dapat dihitung seberapa besar persentase PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2016, persentase PAD terhadap total pendapatan adalah sebesar 7,40 persen, namun secara konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, persentase tersebut naik menjadi 8,31 persen, disusul menjadi 8,85 persen (2018) dan 8,68 persen (2019). Terakhir pada tahun 2020, persentase tersebut meningkat menjadi 9,89 persen.

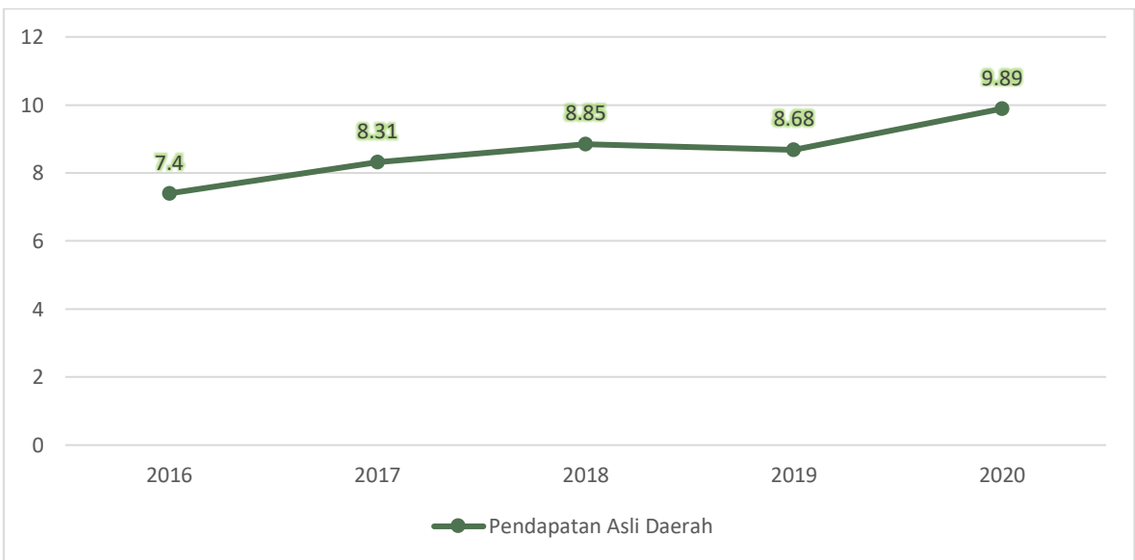

Gambar 2.36 Persentase PAD terhadap Total pendapatan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Asahan, 2016-2020

2.2.2.14 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD merupakan Indikator yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah
d. Penyerapan anggaran
e. Kondisi keuangan daerah
f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu indikator penilaian pencapaian keberhasilan tata kelola pemerintahan, terutama dalam fungsi keuangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006 telah mengatur jika BPK memiliki kewenangan, antara lain kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan merupakan tindakan pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai jika laporan keuangan yang telah disajikan tersebut wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntans iyang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Adapun pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pembuatan laporan keuangan ini didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini BPK adalah pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan daerah.

Dari hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Asahan, diperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut (2014-2020). Opini WTP tersebut diperoleh apabila penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD memenuhi syarat, yaitu sistem pengendalian internal milik daerah memadai dan tidak ada salah saji

yang material atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya, disusun laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini sebagai bagian dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan oleh BPK.

2.2.2.15 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Inklusif dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks ini terdiri atas 3 (tiga) Pilar dan 8 (delapan) Sub-pilar serta 21 (dua puluh satu) indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pilar I yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pilar II yaitu tentang pemerataan pendapatan dan kemiskinan. Pilar III yaitu tentang perluasan akses dan kesempatan. Nilai indeks berkisar antara 0-10, dengan nilai 1-3 adalah kurang memuaskan, nilai 4-7 adalah memuaskan, dan nilai 8-10 adalah sangat memuaskan.

Analisis mengenai indeks pembangunan ekonomi inklusif bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pembangunan yang inklusif menunjukkan proses pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Perkembangan angka indeks pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Asahan ditunjukkan oleh gambar berikut.

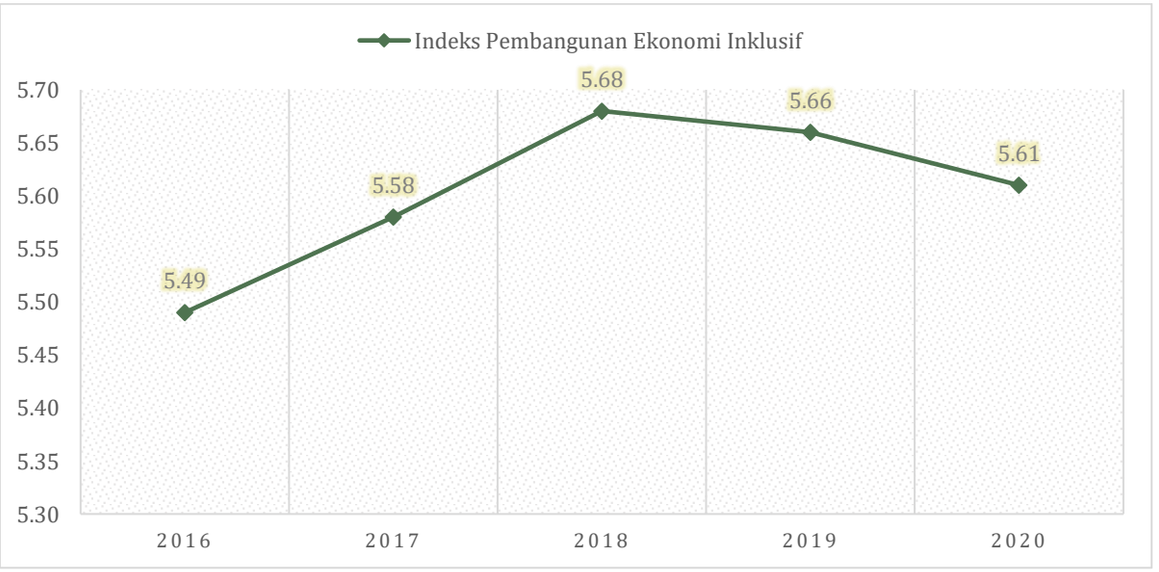

Gambar 2.37 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021

Pada tahun 2016-2018, perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Asahan terus meningkat dari bernilai 5,49 pada tahun 2016 menjadi 5,68 pada tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2019-2020 indeks mengalami penurunan masing-masing menjadi 5,66 dan 5,61. Selama lima tahun tersebut nilai rata-rata indeks sebesar 5,60 dan rata-rata pertumbuhan pertahun indeks sebesar 0,03 persen per tahun. Dengan nilai tersebut maka perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Asahan masuk ke dalam kategori memuaskan.

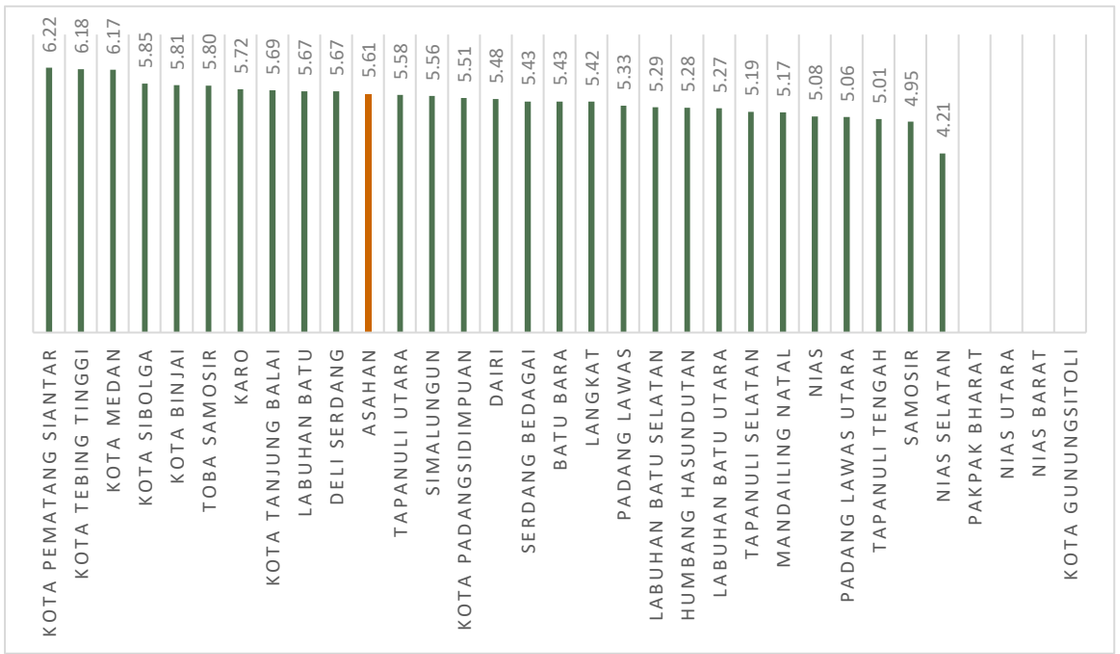

Gambar 2.38 Capaian Regional Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Sumatera Utara, 2019

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2020 daerah lain di Provinsi Sumatera Utara, maka nilai indeks Kabupaten Asahan berada di peringkat 11 dari 29 kabupaten/kota (data untuk 4 kabupaten/kota lainnya tidak tersedia) dengan nilai indeks sebesar 5,61. Pada tahun 2020, capaian indeks seluruh daerah di Provinsi Sumatera berada pada kategori memuaskan dengan nilai indeks tertinggi dicapai oleh Kota Pematang Siantar dengan nilai sebesar 6,22 dan nilai indeks terendah dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan dengan nilai sebesar 4,21. Sementara itu, capaian nilai indeks nasional sebesar 5,52 dan capaian Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 5,94. Dengan demikian, capaian indeks Kabupaten Asahan massih berada di atas capaian nasional, tetapi di bawah Provinsi Sumatera Utara. akan tetapi, secara umum baik nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, maupun daerah lain di sekitarnya mengalami penurunan capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di tahun 2020.

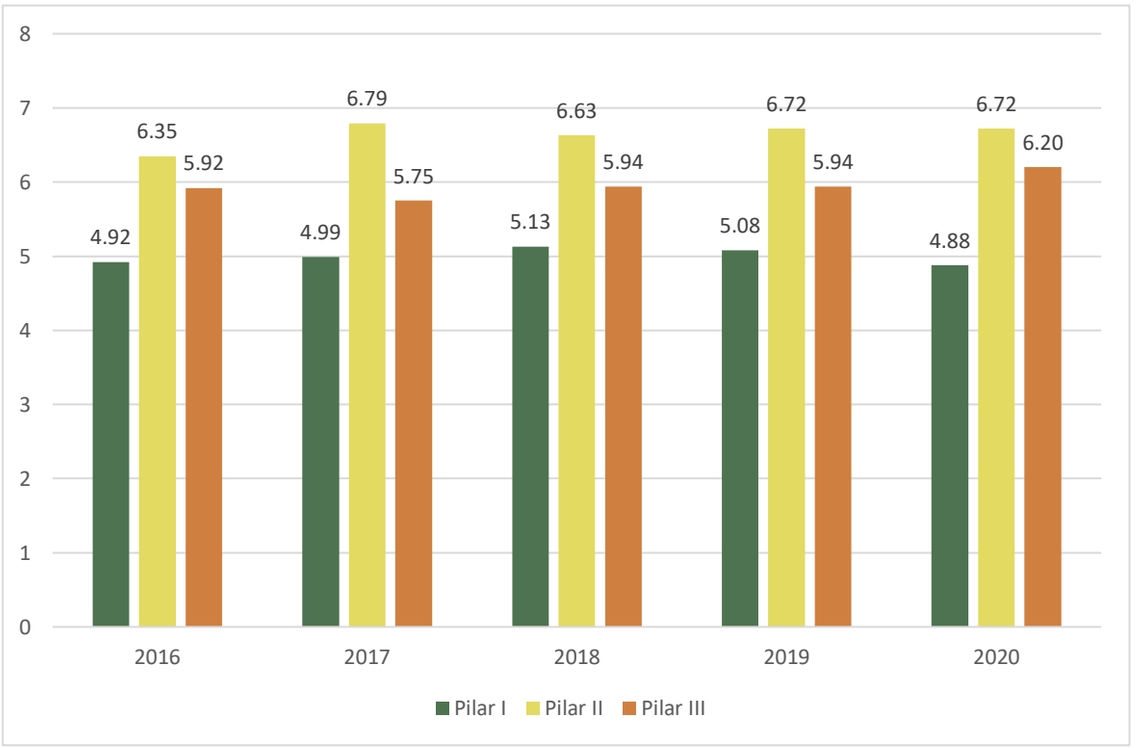

Gambar 2.39 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Asahan, 2016-2020 Per Pilar, 2016-2020

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020

Selama periode tahun 2016-2020, perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Asahan berdasarkan Pilar I, Pilar II, maupun Pilar III mengalami fluktuasi dengan nilai capaian indeks masuk ke dalam kategori memuaskan. Selama periode tersebut capaian Pilar II tentang pemerataan pendapatan dan kemiskinan selalu yang tertinggi dengan rata-rata nilai indeks sebesar 6,64. Capaian tersebut karena selama lima tahun terakhir usaha pengentasan kemiskinan di Kabupaten Asahan menunjukkan hasil yang baik dengan terus menurunnya angka kemiskinan serta rendahnya indeks gini dan indeks kedalaman kemiskinan (lihat sub bab 2.2.1.4-2.2.1.6). Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan yang cukup tinggi di atas laju nasional dan Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu indikator yang mendukung capaian dari Pilar I. Capaian Pilar III yang cenderung meningkat selama 2018-2020 juga menunjukkan semakin besarnya peluasan akses dan kesempatan.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Berkembangnya aspek seni dan olahraga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal ini bisa menjadi salah satu indikator perkembangan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan kesenian dan keolahragaan

dapat mendorong penguatan dan pelestarian budaya lokal suatu daerah. Aspek tersebut mendukung pencapaian pembangunan sosial-budaya dan keagamaan.

Berturut-turut selama 2014-2015, jumlah organisasi etnis di Kabupaten Asahan adalah 13 buah dan 14 buah. Adapun jumlah grup kesenian di Kabupaten Asahan pada kurun waktu tersebut masing-masing sebanyak 75 buah dengan 11 kegiatan seni budaya pada tahun 2014 dan 26 kegiatan seni budaya pada tahun 2015. Jumlah cagar budaya atau situs mengalami peningkatan, dari 26 buah (2014) menjadi 30 buah (2015). Jumlah sarana penyelenggara seni budaya pada 2014-2015 adalah sebanyak 2 buah di Kabupaten Asahan. Informasi tersebut terangkum sebagai berikut.

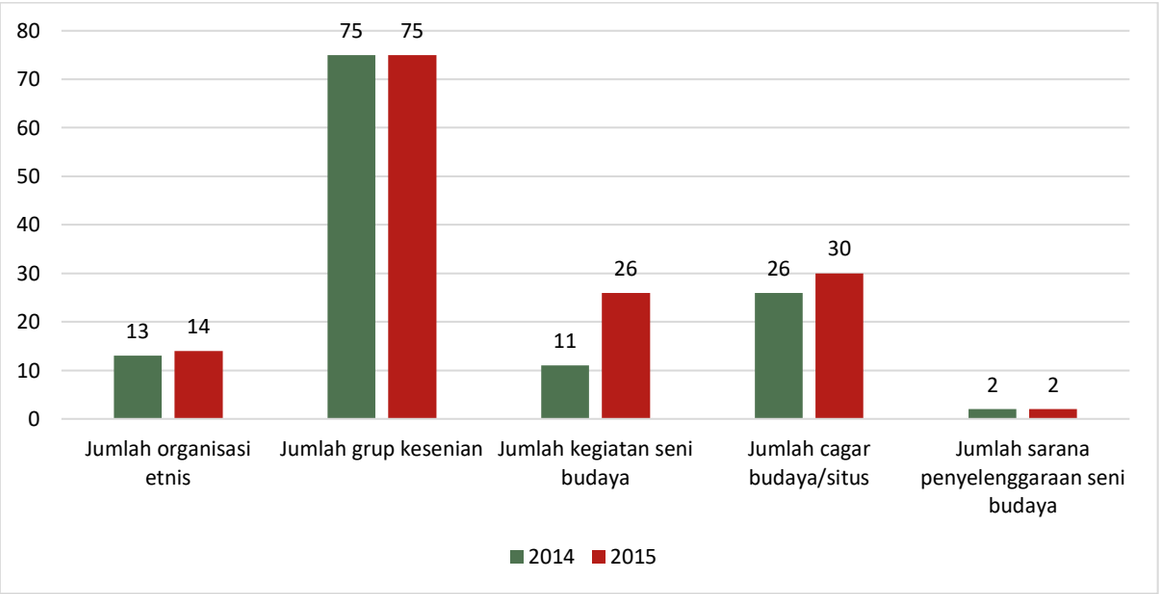

Gambar 2.40 Jumlah Fokus Kebudayaan di Kabupaten Asahan, 2014-2015

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2015-2016

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Asahan pada tahun 2016-2020 adalah sebanyak 24 buah. Pada tahun 2019 sampai 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 29. Jumlah klub olahraga yang ada di Kabupaten Asahan cenderung mengalami pertambahan, dari 225 buah pada tahun 2016 menjadi 230 buah pada tahun 2020. Lapangan olahraga di Kabupaten Asahan pun jumlahnya juga meningkat, dari 248 buah (2016) menjadi 252 buah (2017-2018) dan 254 buah (2019-2020). Jumlah olahraga unggulan milik Kabupaten Asahan pun mengalami peningkatan, dari 13 buah (2016) menjadi 20 buah (2019). Akan tetapi pada tahun 2020 tidak terdapat olahraga unggulan. Peningkatan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kegiatan olahraga. Pada tahun 2016, terdapat 25 kegiatan olahraga yang naik menjadi 29 kegiatan olahraga pada tahun 2019. Namun hanya terdapat 2 kegiatan olahraga pada tahun 2020. Jumlah gedung olahraga yang terdapat di Kabupaten

Asahan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 tercatat sebanyak 18 buah. Informasi ini disajikan di bawah.

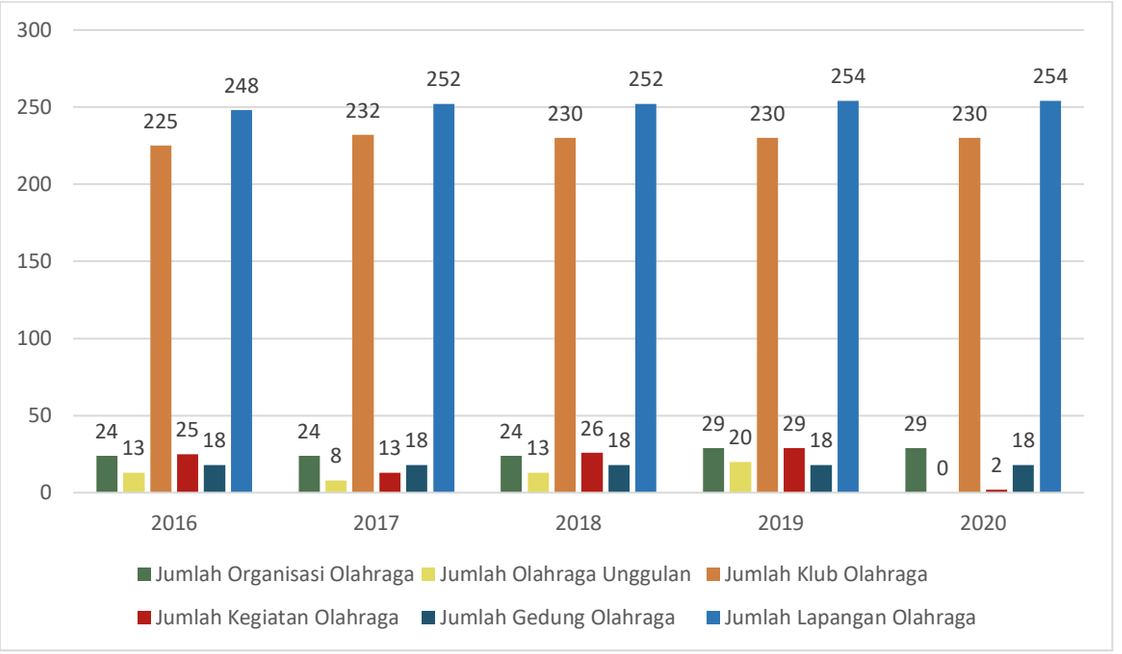

Gambar 2.41 Jumlah Fokus Keolahragaan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Selama tahun 2016-2020, terdapat 69 organisasi pemuda di Kabupaten Asahan. Jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Asahan sendiri adalah sebanyak 22 kegiatan pada tahun 2016-2017 yang kemudian meningkat menjadi 25 kegiatan pada tahun 2018, kemudian menjadi 28 kegiatan pada tahun 2019, dan menurun drastis menjadi 1 kegiatan pada tahun 2020. Adapun jumlah gelanggang atau balai remaja selain milik swasta yang ada di Kabupaten Asahan tercatat sebanyak 5 buah pada tahun 2016-2017, menurun pada tahun 2018 menjadi 1 dan meningkat menjadi 7 buah pada tahun 2019-2020.

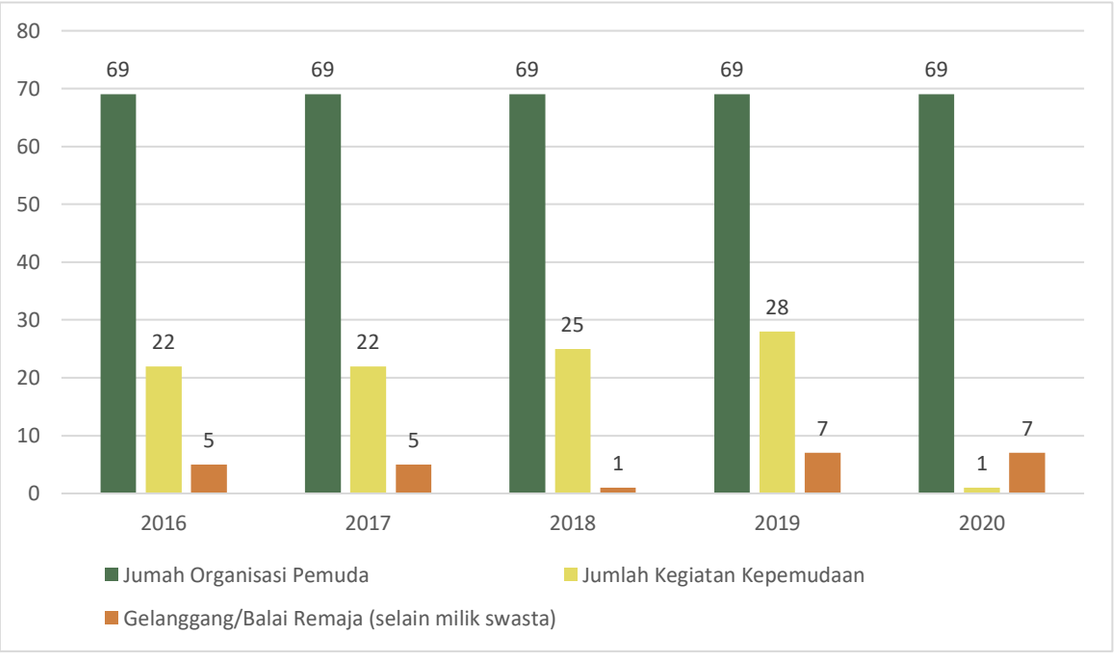

Gambar 2.42 Jumlah Fokus Kepemudaan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu komponen strategis untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yakni melalui peningkatan kualitas kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Tercukupinya kebutuhan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (skilled labour) merupakan modal utama untuk memulai proyek-proyek besar di setiap klaster industri.

1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK).

Pada tahun 2018 ke tahun 2020 terdapat pengurangan yang signifikan baik jumlah sekolah, guru, maupun siswa TK. Jumlah sekolah di tahun 2018 mencapai 405 unit menjadi 103 unit di tahun 2020, jumlah guru 1.082 orang menjadi 474 orang, dan jumlah siswa dari 12.631 anak menjadi 4.339 anak. Jumlah Bangunan TK, tenaga pendidik, dan siswa terbanyak di Kabupaten Asahan adalah Kecamatan Kisaran Timur sebanyak 19 unit, disusul Kecamatan Kisaran Barat dengan jumlah bangunan TK sebanyak 13 unit.

Jika dilihat dari jumlah tenaga pendidiknya, guru TK terbanyak di Kabupaten Asahan berada di Kecamatan Kisaran Timur sebanyak 102 orang, disusul Kecamatan Kisaran Barat sebanyak 67 orang, Kecamatan Air Joman dan Kecamatan Pulau Rakyat dengan masing-masing sebanyak 38 dan 40 orang guru. Sedangkan daerah dengan guru TK paling sedikit berada di Kecamatan Tanjung Balai, Tinggi Raja dan Kecamatan Sei Kepayang Timur yakni masing-masing memiliki guru TK sebanyak 3 orang. Namun demikian, jumlah siswa TK terbanyak di Kabupaten Asahan berada di Kecamatan Kisaran Timur sebanyak 850 orang, disusul Kecamatan Kisaran Barat sebanyak 613 orang, dan Kecamatan Air Joman sebanyak 3949 orang.

Rincian jumlah sekolah, guru, dan siswa TK di Kabupaten Asahan pada periode Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.43.

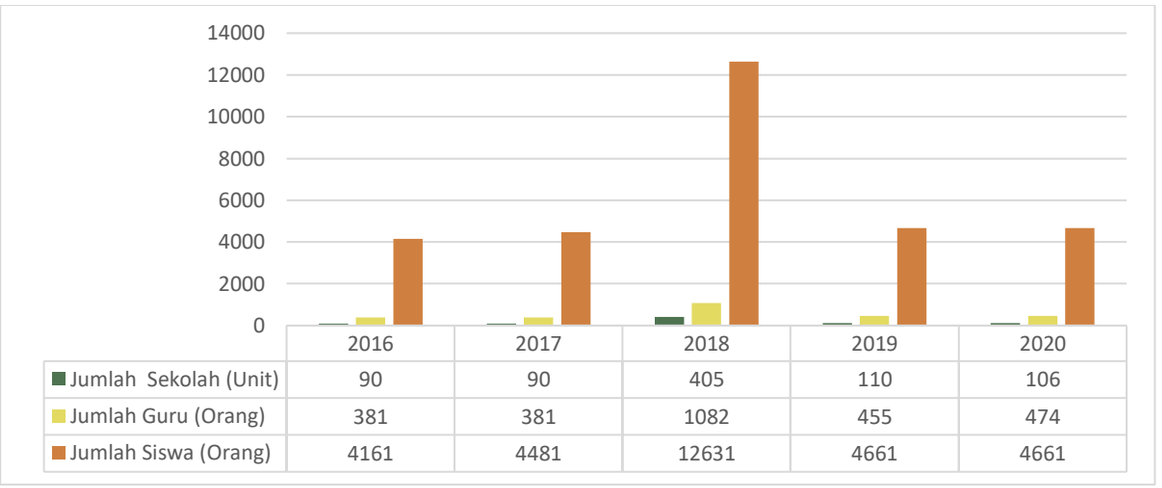

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah (Unit)	90	90	405	110	106
Jumlah Guru (Orang)	381	381	1082	455	474
Jumlah Siswa (Orang)	4161	4481	12631	4661	4661

Gambar 2.43 Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa TK di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2018-2021

Namun demikian, berdasarkan data dari tahun 2016-2020 baik jumlah sekolah, jumlah guru, maupun jumlah siswa cenderung meningkat. Walaupun, pada tahun 2020 kembali turun namun cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2016. Jumlah sekolah TK pada tahun 2016 mencapai 90 unit, sedangkan pada tahun 2020 meningkat hingga menjadi sebanyak 106 unit. Demikian pula dengan jumlah guru TK, pada tahun 2016 terdapat 381 orang guru, sedangkan tahun 2020 mencapai 474 orang. Akan tetapi jika dilihat jumlah siswa TK cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah siswa mencapai 4.161 anak, kemudian tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah siswa hingga mencapai 4.481 orang, dan naik kembali pada tahun 2018 dengan jumlah siswa sebanyak 12.631 orang. Kemudian kembali turun pada tahun 2019 hingga menjadi 4.661 orang. Pada tahun 2020, jumlah siswa tetap sebanyak 4.661 anak.

Tabel 2.29 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik TK Menurut Kecamatan, 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah (Unit)	Jumlah Guru (Orang)	Jumlah Siswa (Orang)
1.	Kecamatan Kisaran Barat	13	67	613
2.	Kecamatan Kisaran Timur	19	102	858
3.	Kecamatan Meranti	2	8	25
4.	Kecamatan Air Joman	6	38	394
5.	Kecamatan Simpang Empat	2	11	188
6.	Kecamatan Air Batu	4	12	157
7.	Kecamatan Bandar Pulau	-	-	-
8.	Kecamatan Bandar Pasir Mandoge	5	22	316
9.	Kecamatan Buntu Pane	4	10	153
10.	Kecamatan Sei Kepayang	1	5	41
11.	Kecamatan Tanjung Balai	1	3	19
12.	Kecamatan Aek Kuasan	8	23	227
13.	Kecamatan Pulau Rakyat	8	40	354
14.	Kecamatan Sei Dadap	4	17	172
15.	Kecamatan Setia Janji	2	5	98
16.	Kecamatan Tinggi Raja	1	3	-
17.	Kecamatan Rawang Panca Arga	2	8	100
18.	Kecamatan Pulo Bandring	6	28	230
19.	Kecamatan Teluk Dalam	2	8	66
20.	Kecamatan Silau Laut	2	7	46
21.	Kecamatan Sei Kepayang Barat	2	10	115
22.	Kecamatan Sei Kepayang Timur	1	3	17
23.	Kecamatan Rahuning	3	14	219
24.	Kecamatan Aek Songsongan	3	10	84
25.	Kecamatan Aek Ledong	5	20	169
	Kabupaten Asahan	106	474	4.661

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Mengenai persebaran murid, guru, dan jumlah sekolah ditampilkan pada gambar peta berikut.

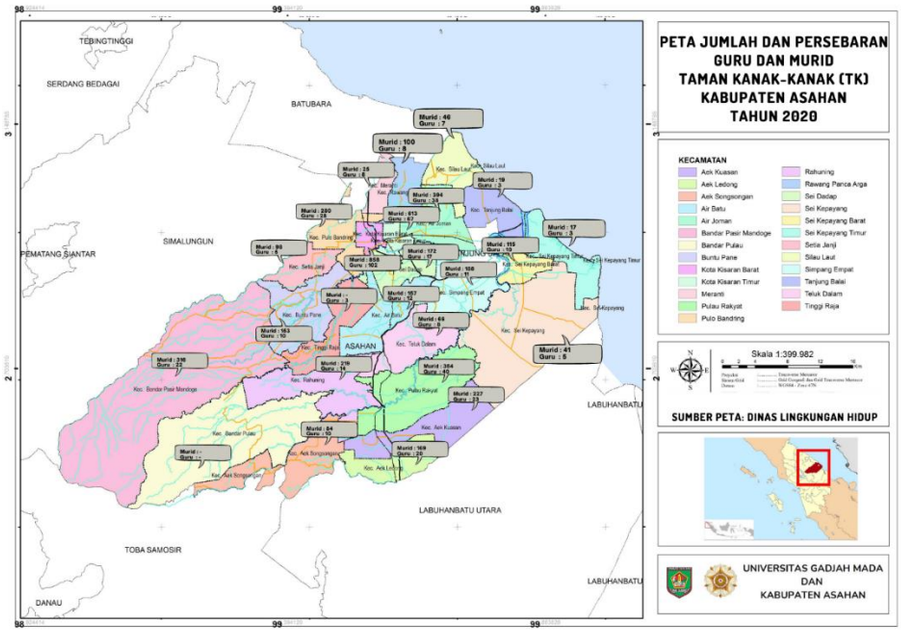

Gambar 2.44 Peta Jumlah dan Persebaran Guru dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) Kabupaten Asahan Tahun 2020

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Hasil Olahan 2021

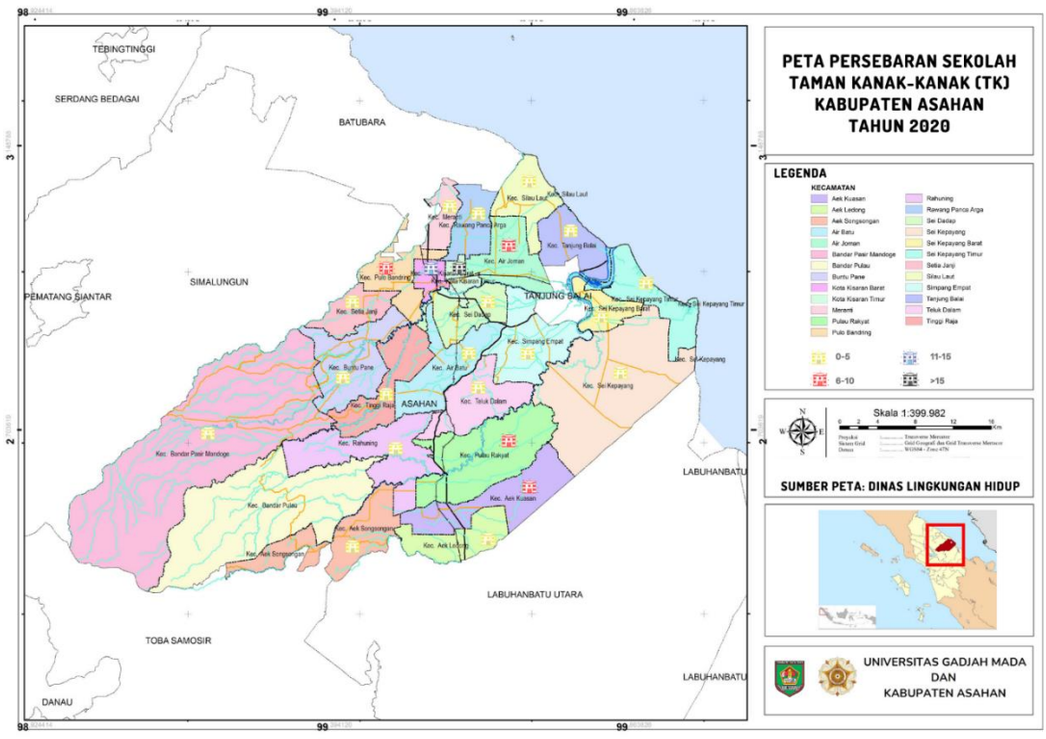

Gambar 2.45 Peta Persebaran Taman Kanak-kanak (TK) Kabupaten Asahan Tahun 2020

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Hasil Olahan 2021

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Asahan telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Selama periode 2016-2020 terlihat pada Gambar 2.46 bahwa APK di seluruh jenjang pendidikan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017, namun cederung menurun di tahun 2018-2020. APK SD/MI mengalami peningkatan empat tahun berturut-turut dari tahun 2016 mencapai 111,59 hingga tahun 2018 mencapai 115,67, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup besar yakni sebesar 6,08 poin menjadi 109,59, kemudian turun menjadi 107,76 pada tahun 2020. Sedangkan jika dilihat, APK SMP/MTs mengalami peningkatan terus menerus hingga tahun 2017, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup besar yakni menjadi sebesar 86,13. Pada tahun 2019 juga kembali mengalami penurunan menjadi 84,62. Namun, pada tahu 2020, APK SMP/MTs mengalami kenaikan menjadi 86,17. Demikian pula APK SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan tiga tahun berturut-turut hingga tahun 2017 mencapai 84,59. Pada tahun 2018, terjadi penurunan 12,41 menjadi 72,18. Akan tetapi, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 76,06. Kemudian, di tahun 2020 meningkat menjadi 78,69.

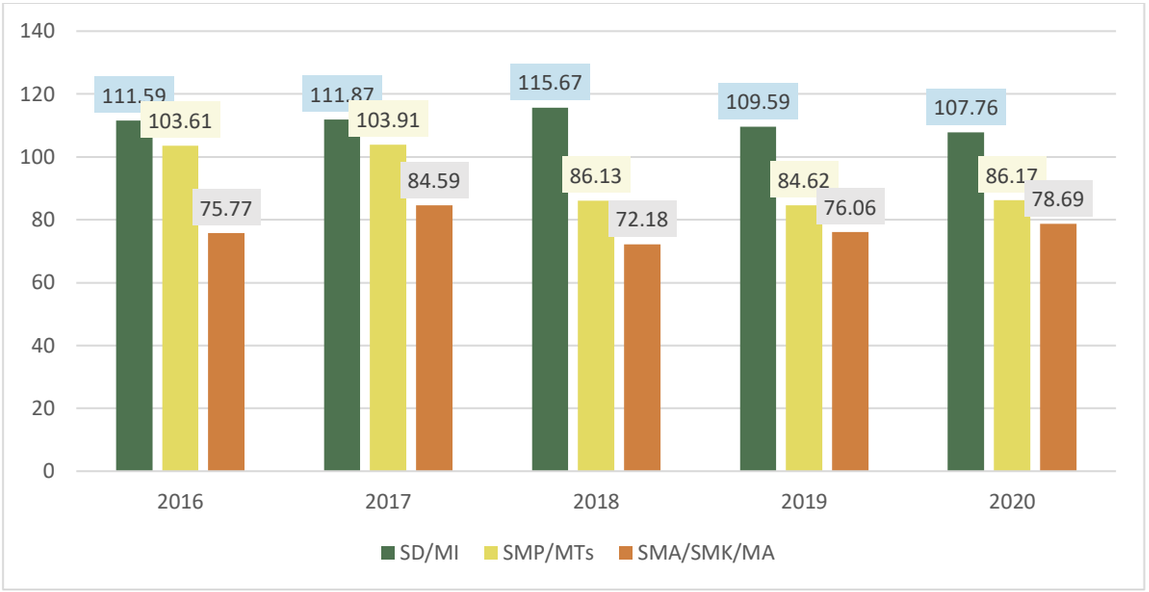

Gambar 2.46 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan 2016-2021

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misalnya APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Selama periode 2016-2020 APM SD/MI dan SMP/MTs selalu meningkat setiap tahun seperti terlihat pada Gambar 2.47. Pada tahun 2016, APM SD/MI mencapai 99,01 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 mencapai 99,66. Peningkatan APM SD/MI tertinggi terjadi di tahun 2018 dengan kenaikan sebesar 0,46 dari tahun 2017. Sedangkan SMP/MTs, pada tahun 2016 mencapai 71,24 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2020 mencapai 82,78. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan peningkatan APM sebesar 9,06 dari 71,47 pada tahun 2017 menjadi sebesar 80,53. Berbeda halnya dengan APM SMA/SMK/MA yang cenderung fluktuatif pada periode 2016-2020. Pada tahun 2016, APM SMA/SMK/MA mencapai 65,78. Kemudian, tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan berturut-turut sebesar 4,72 dan 0,81. Terakhir

pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,68 menjadi 60,93, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 60,71.

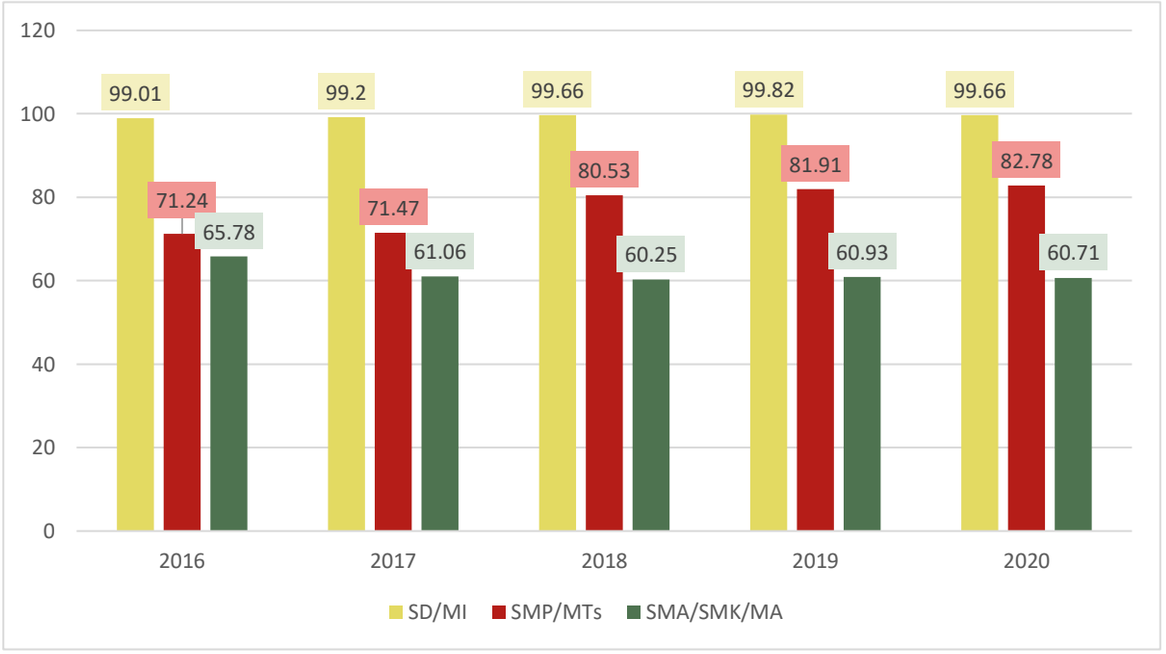

Gambar 2.47 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan 2016-2021

4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD/MI sebesar 100 persen dan APS SMP/MTs sebesar 100 persen atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar dan menengah (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Angka

Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, rumus yang dipakai untuk menghitung angka partisipasi sekolah Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Pada tahun 2020 angka Partisipasi Sekolah SD/MI di Kabupaten Asahan mencapai 995,78 persen, sedangkan Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs sebesar 751,82 persen

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Angka Partisipasi Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	990,11	991,04	993,92	999,74	995,78
SMP/MTs	712,46	714,73	735,07	738,81	751,82

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, 2021

5. Jumlah Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan. Jumlah sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan ketersediaan fasilitas sekolah. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian pemerintah terkait dengan ketersediaan sekolah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Berdasarkan data periode 2016-2020 yang ditampilkan pada Tabel 2.31, secara umum jumlah sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan cenderung mengalami peningkatan. Jumlah Sekolah Dasar pada tahun 2016 mencapai 434 unit, kemudian naik pada tahun 2017 menjadi sebanyak 440 unit, dan pada tahun 2020 juga kembali bertambah sebanyak dua unit menjadi sebanyak 443unit sekolah. Sedangkan jumlah MI hingga tahun 2017 mencapai 84 unit, kemudian pada tahun 2018 bertambah sebanyak delapan unit menjadi 92 unit. Pada tahun 2019 kembali bertambah menjadi 93 unit. Demikian pula

jumlah SMP juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 103 unit, dan pada tahun 2020 sebanyak 110 unit. Berbeda dengan jumlah MTs, pada tahun 2016 jumlah sekolah mencapai 85 unit, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 83 unit. Walaupun demikian, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 yakni sebanyak 7 unit, dan kembali bertambah 4 unit pada tahun 2019. Jumlah SMA selama periode 2016-2020 hanya bertambah di tahun 2017, dari semula berjumlah 83 unit menjadi 85 unit. Kemudian di tahun 2020, jumlah SMA turun menjadi sebanyak 83 unit. Sedangkan jumlah MA, juga sempat mengalami penurunan jumlah sekolah sebanyak satu unit pada tahun 2017. Namun demikian, pada tahun 2018 jumlah MA bertambah empat unit menjadi berjumlah 43 unit.

Tabel 2.31 Jumlah Sekolah di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
Sekolah Dasar (SD)	434	440	440	442	443
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	84	84	92	93	93*
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	103	111	111	112	110
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	85	83	90	94	94*
Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	83	85	85	85	83
Madrasah Aliyah (MA)	40	39	43	43	43*

**Data tahun 2019*
Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2021

6. Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio ketersediaan sekolah-penduduk usia sekolah merupakan rasio perbandingan antara jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung usia penduduk usia sekolah. Untuk kategori pendidikan dasar, rasio ini dihitung dengan membagi antara jumlah sekolah (SD/MI+SMP/MTs) dengan jumlah penduduk usia sekolah (7 s.d 12 tahun) + (13 s.d 15 tahun) dikali 10.000. Sedang untuk kategori pendidikan menengah dihitung dengan membandingkan jumlah sekolah (SMA/MA/SMK) dengan jumlah penduduk usia sekolah (16 s.d 19 tahun) dikali 10.000.

Berdasarkan data selama periode 2016-2020 yang disajikan pada Gambar 2.48, terlihat bahwa rasio ketersediaan sekolah baik pendidikan dasar maupun pendidikan

menengah cenderung menurun. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar pada tahun 2016 mencapai 58,09 persen. Setelah itu, terjadi peningkatan di tahun 2017 sebanyak 0,07 persen menjadi 58,16 persen. Namun kembali turun menjadi 57,15 persen pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Demikian pula rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah, pada tahun 2016 mencapai 44,27, kemudian sedikit memingkat pada tahun 2017 yaitu sebanyak 0,05 persen. Namun demikian, pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 43,57 persen sampai tahun 2020.

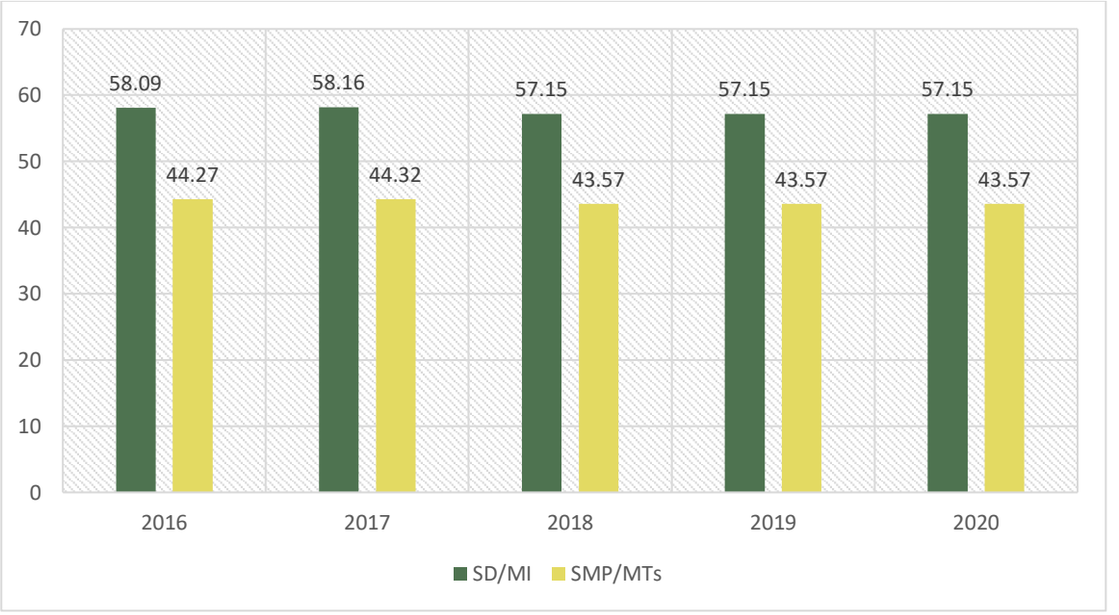

Gambar 2. 48 Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Asahan (%), 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan 2016-2020

7. Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs) dengan jumlah murid (SD/MI+SMP/MTs) dikali 10.000 untuk jenjang pendidikan dasar dan dengan menghitung jumlah guru (SMA/MA/SMK) dibagi dengan jumlah murid (SMA/MA/SMK) pada jenjang pendidikan menengah. Akan tetapi, karena jenjang pendidikan menengah merupakan kewenangan provinsi, sehingga rasio guru-murid yang dianalisis hanya rasio guru-murid pendidikan dasar.

Berdasarkan data dalam LKPJ 2016-2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum rasio guru-murid pendidikan dasar di Kabupaten Asahan tahun 2015-2018 mengalami peningkatan. Rasio guru-murid pendidikan SD/MI pada tahun 2015 mencapai 670,46, kemudian turun cukup signifikan pada tahun 2016 sebesar 72,94 menjadi 597,52. Namun

pada tahun 2017-2018 meningkat berturut-turut menjadi sebesar 685,89 dan 735,44. Sedangkan rasio guru-murid pendidikan SMP/MTs di awal periode tahun 2015 mencapai 710,93, kemudian naik menjadi 777,44. Pada tahun 2017 naik cukup signifikan yakni sebesar 143,61. Namun, pada tahun 2018 turun menjadi 912,42.

Tabel 2.32 Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun	Pendidikan Dasar	
	Pendidikan SD/MI	Pendidikan SMP/MTs
2016	597,52	777,44
2017	685,89	921,05
2018	735,44	912,42
2019	572.23	745.72
2020	745,57	791,21

Sumber: LKPJ Bupati Asahan 2016-2020

8. Guru yang Bersertifikat Pendidik dan Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 hingga 2019, guru SD/MI yang bersertifikat pendidik cenderung menurun hingga tahun 2018, naun naik cukup signifikan pada tahun 2019. Pada tahun 2015, guru SD/MI yang bersertifikat pendidik mencapai 48,00 persen. Kemudian turun cukup signifikan pada tahun 2016 sebesar 10,91 persen. Pada tahun 2016 naik menjadi 37,29 persen, tetapi kembali turun pada tahun 2018 menjadi 31,18 persen. Walaupun demikian, pada tahun 2019 terjadi peningkatan persentase guru SD/MI yang bersertifikat dengan kenaikan yang cukup tajam yakni menjadi sebesar 44,04 persen. Sedangkan pendidik SMP/MTs yang bersertifikat pada awal periode tahun 2015 mencapai 43,00. Kemudian meningkat dua tahun berturut-turut yakni menjadi sebesar 45,22 persen pada tahun 2016, dan 46,23 persen pada tahun 2017. Namun, turun relatif tajam pada tahun 2018 hingga menjadi 24,62 persen. Walaupun demikian, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 45,18 persen.

Berbeda dengan persentase guru yang bersertifikat pendidik, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di Kabuptaen Asahan justru terus mengalai peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai 2018. Pada tahun 2016 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 mencapai 56,00 persen. Pada tahun 2017, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 meningkat cukup signifikan yaitu menjadi sebanyak 69,76 persen. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali mencapai 69,83 persen.

Tabel 2.33 Guru yang Bersertifikat Pendidik dan Memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun	Guru SD/MI Bersertifikat Pendidik (%)	Guru SMP/MTs Bersertifikat Pendidik (%)	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 (%)

2016	37,09	45,22	56,00
2017	37,29	46,23	69,76
2018	31,18	24,62	69,83
2019	44,04	45,18	80,46
2020	44,04	45,18	81,95

Sumber: LKPJ Bupati Asahan 2016-2020

Pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada pada daerah tersebut, sehingga peningkatan SDM sangat dibutuhkan. Salah satu cara dalam meningkatkan kualitas SDM adalah dengan perluasan kesempatan bagi setiap penduduk untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan. Berikut merupakan capaian untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada urusan pendidikan yang tertuang dalam KLHS RPJMD Kabupaten Asahan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 2.34 Capaian TPB dalam Bidang Pendidikan Yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional

NO	TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	TARGET RPJMN 2019
1	Mengakhiri Kemiskinan	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Orang	23,43	25,12	29,91	30,828	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal
4	Kualitas Pendidikan	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Persentase	100	100	100	100	Meningkat
4	Kualitas Pendidikan	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		95,66	95,125	95,405	95,54	Meningkat

NO	TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	TARGET RPJMN 2019
4	Kualitas Pendidikan	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase	98,36	98,40	98,43	98,52	Meningkat menjadi 96,1%
4	Kualitas Pendidikan	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persentase	98,45	98,40	99,20	99,60	Meningkat
4	Kualitas Pendidikan	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Persentase	82,00	86,13	91,46	95,95	Meningkat

Sedangkan untuk capaian TPB dalam bidang pendidikan yang belum mencapai target nasional ditunjukkan pada tabel 2.35 Sebagai berikut. Capaian tersebut meliputi persentase SD/MI berakreditasi minimal B, Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat, Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.

Tabel 2.35 Capaian TPB dalam Bidang Pendidikan Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

NO	TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	TARGET RPJMN2019	GAP 2019
4	Kualitas Pendidikan	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persentase	50,69	50,34	68,50	77,92	Meningkat menjadi 84,2%	(6,28)
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persentase	29,13	29,13	57,94	75,43	Meningkat menjadi 81%	(5,57)
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Persentase	111,59	111,87	101,85	101,90	Meningkat menjadi 114,09%	(12,19)
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Persentase	103,61	103,91	104,47	103,02	Meningkat menjadi 106,94%	(3,92)
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tahun	8,33	8,46	8,47	8,50	Meningkat menjadi 8,8 tahun	(0,30)
		4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persentase	63,63	64,50	69,61	69,78	Meningkat menjadi 77,2%	(7,42)

NO	TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	TARGET RPJMN2019	GAP 2019
		4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	51,30	49,49	38,31	34,30	Meningkat	(15,17)

2.3.1.2 Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik.

A. Jumlah dan Sebaran Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Asahan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu Rumah Sakit (RS), Poliklinik, Puskemas, dan Puskemas Pembantu (Pustu). Dari empat jenis fasilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh wilayah kecamatan sudah terjangkau oleh setidaknya salah satu jenis fasilitas kesehatan, terutama berupa Puskemas dan/atau Pustu. Gambar 2.49 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 seluruh kecamatan di Kabupaten Asahan telah memiliki setidaknya satu Puskemas. Data yang sama juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah Poliklinik di Kabupaten Asahan sampai tahun 2018, dari sebelumnya berjumlah 32 fasilitas (tahun 2016) menjadi 58 fasilitas (tahun 2018), namun pada tahun 2020 menurun menjadi 33 fasilitas.

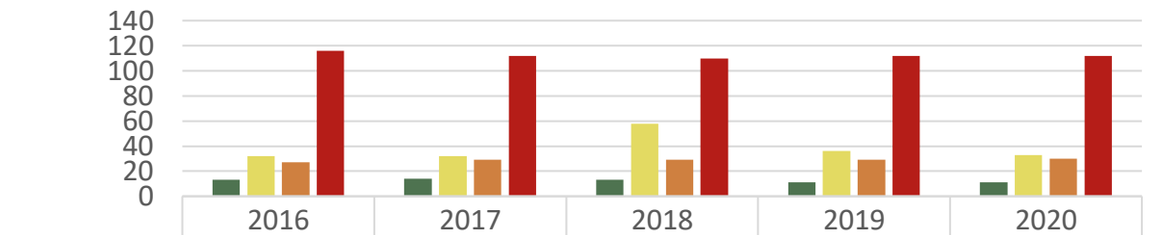

	2016	2017	2018	2019	2020
RS	13	14	13	11	11
Poliklinik	32	32	58	36	33
Puskesmas	27	29	29	29	30
Pustu	116	112	110	112	112

Gambar 2.49 Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Asahan 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Secara keseluruhan, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Asahan juga mengalami peningkatan berupa penambahan fasilitas kesehatan sebanyak 22 unit selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Kabupaten Asahan tercatat

memiliki 188 unit fasilitas kesehatan yang kemudian bertambah menjadi 210 unit fasilitas kesehatan pada tahun 2018. Namun jumlah jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Asahan dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan menjadi 186 unit. Terkait dengan fasilitas RS di Kabupaten Asahan, terdapat 11 RS (data tahun 2020) yang tersebar di lima wilayah kecamatan, dengan rincian 1 RS di Kecamatan Aek Kuasan, 1 RS di Kecamatan Aek Ledong, 1 RS di Kecamatan Sei Dadap, 5 RS di Kecamatan Kisaran Barat, dan 3 RS di Kisaran Timur.

Tabel 2.36 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Tiap Kecamatan Tahun 2016-2020

NO	KECAMATAN	2016				2017				2018				2019				2020			
		RS	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	RS	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	RS	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	RS	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	RS	Poliklinik	Puskesmas	Pustu
1	B. P. Mandoge	-	4	1	7	-	4	1	7	-	5	1	7	0	0	1	8	0	0	1	8
2	Bandar Pulau	-	2	1	8	-	2	1	2	-	3	1	3	0	2	1	3	0	2	1	3
3	Aek Songsongan	-	1			-	1	1	4	-	-	1	4	0	1	1	4	0	1	1	4
4	Rahuning	-	1			-	1	1	1	-	2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
5	Pulau Rakyat	-	2	1	11	-	2	2	10	-	6	2	9	0	3	2	10	0	3	2	10
6	Aek Kuasan	-	1	1	5	1	1	1	5	1	-	1	4	1	1	1	5	1	1	1	5
7	Aek Ledong	2	-	1	4	2	0	1	4	2	3	1	3	1	2	1	4	1	2	1	4
8	Sei Kepayang	-	-	1	5	-	0	1	4	-	-	1	4	0	0	1	4	0	0	1	4
9	Sei Kepayang Barat	-	-	2	8	-	0	2	8	-	-	1	4	0	0	1	4	0	0	1	4
10	Sei Kepayang Timur	-	-			-	0			-	-	1	5	0	0	1	4	0	0	1	4
11	Tanjung Balai	-	-	2	6	-	0	2	6	-	1	2	5	0	1	2	5	0	1	2	5
12	Simpang Empat	-	2	2	10	-	2	2	9	-	2	1	6	0	1	1	6	0	1	1	6
13	Teluk Dalam	-				-				-	2	1	4	0	3	1	3	0	3	1	3
14	Air Batu	1	1	2	2	-	1	2	4	-	9	2	4	0	9	2	4	0	9	2	4

NO	KECAMATAN	2016				2017				2018				2019				2020			
		RS	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	RS	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	RS	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	RS	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	RS	Poliklinik	Puskesmas	Pustu
15	Sei Dadap	1	1	2	6	1	1	1	4	1	6	1	4	1	1	1	4	1	1	1	4
16	Buntu Pane	-	2	1	4	-	2	1	4	-	2	1	4	0	4	1	5	0	4	1	5
17	Tinggi Raja	-	-	1	2	-	0	1	2	-	-	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2
18	Setia Janji	-	-	1	3	-	0	1	3	-	-	1	3	0	0	1	3	0	0	1	3
19	Meranti	-	3	2	9	-	3	2	9	-	-	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2
20	Pulo Bandring	-				-				-	3	1	7	0	11	1	6	0	11	1	6
21	Rawang Panca Arga	-	1	1	4	-	1	1	4	-	1	1	4	0	0	1	4	0	0	1	4
22	Air Joman	-	-	2	12	-	0	2	12	-	2	1	6	0	1	1	6	0	1	1	6
23	Silau Laut	-				-				-	-	1	5	0	0	1	6	0	0	1	6
24	Kisaran Barat	5	1	1	5	6	1	1	5	5	6	1	5	5	6	1	5	5	6	1	5
25	Kisaran Timur	4	10	2	5	4	10	2	5	4	5	2	5	3	5	2	5	3	5	2	5
Jumlah		**13**	**32**	**27**	**116**	**14**	**32**	**29**	**112**	**13**	**58**	**29**	**110**	**11**	**51**	**29**	**113**	**11**	**51**	**29**	**113**
Total		**188**				**187**				**210**				**204**				**204**			

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, 2021

Penggambaran menenai persebaran fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Asahan terlampir dalam peta berikut.

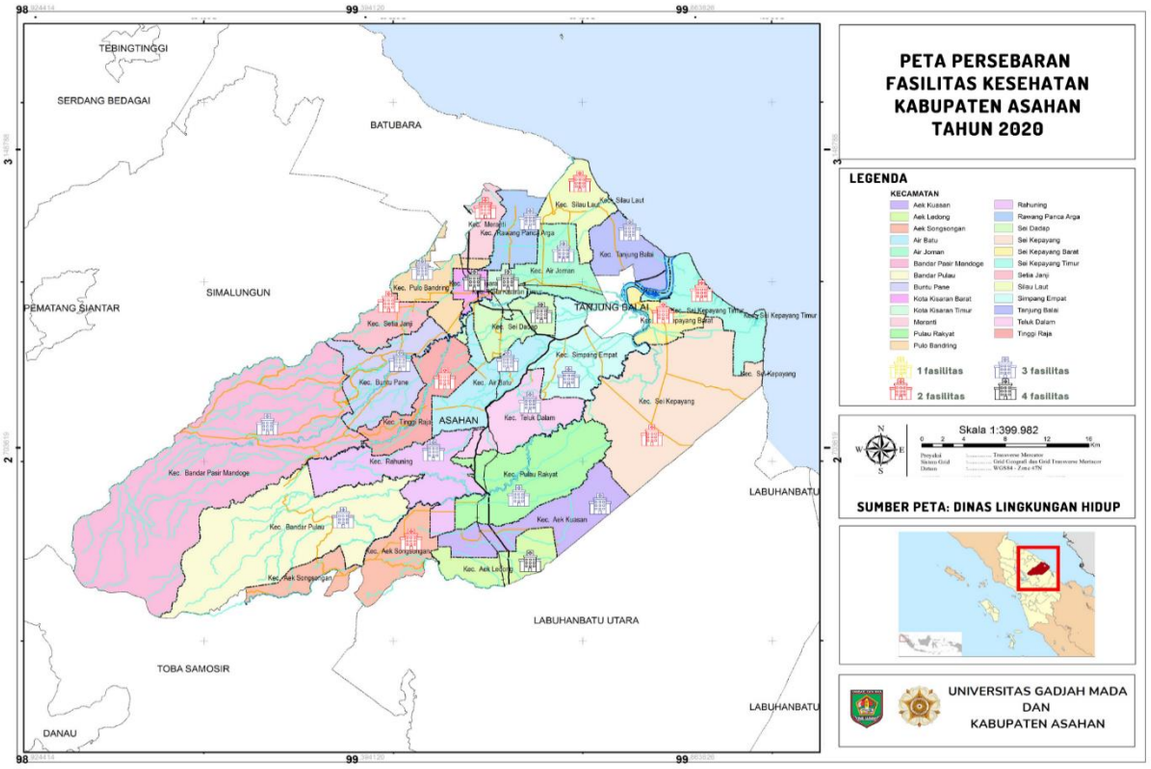

Gambar 2.50 Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan Kabupaten Asahan Tahun 2020

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Hasil Olahan 2021

1. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pelaksanaan Posyandu yang didukung oleh pelayanan dan pembinaan teknis dari petugas kesehatan memiliki nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Rasio posyandu per satuan balita merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita. Data menunjukan bahwa pada tahun 2016, rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Asahan mencapai 12,15 persen. Kemudian naik pada tahun 2018 yakni mencapai 16,73 persen. Namun kembali turun ditahun 2019 menjadi 12,96 persen dan meningkat kembali menjadi 13,11 di tahun 2020.

Tabel 2.37 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun	Rasio (%)
2016	12,15
2017	12,15
2018	16,73

Tahun	Rasio (%)
2019	12,96
2020	13,11

Sumber: LKPJ Bupati Asahan 2016-2020

2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Selain sarana dan prasarana, pemerintah juga perlu menambah tenaga medis dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas maupun pustu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio jumlah puskesmas per 1000 penduduk di Kabupaten Asahan cenderung stabil. Pada tahun 2016, rasio ini menunjukan nilai sebesar 0,04 sampai tahun 2020. Berbeda dengan rasio jumlah puskesmas, rasio jumlah pustu per 1.000 penduduk cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, rasio ini mencapai 0,15. Kemudian sedikit meningkat menjadi 0,16 pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019, rasio jumlah pustu per 1.000 penduduk kembali menurun hingga mencapai 0,15 dan 0,14 ditahun 2020.

Tabel 2.38 Rasio Puskesmas dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun	Rasio jumlah puskesmas	Rasio jumlah pustu
2016	0,04	0,15
2017	0,04	0,15
2018	0,04	0,16
2019	0,04	0,15
2020	0,04	0,14

Sumber: LKPJ Bupati Asahan 2016-2020

Sedangkan jika disatukan rasio puskesmas, polikilinik, dan pustu per 1.000 penduduk di Kabupaten Asahan dari tahun 2016-2020 menunjukan tren yang meningkat. Pada tahun 2016 rasio mencapai 0,230, kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 0,228. Hal ini disebabkan jumlah puskesmas, polikilinik, dan pustu tetap,

sedangkan jumlah penduduk meningkat. Akan tetapi, pada tahun 2018 terjadi peningkatan rasio yang cukup signifikan yaitu mencapai 0,276 yang disebabkan oleh peningkatan jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu yang melebihi kecepatan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah puskesmas, polikilinik, dan pustu sebanyak 36 unit dari tahun 2017. Pada tahun 2019 juga rasio jumlah puskesmas, polikilinik, dan pustu per 1.000 penduduk kembali meningkat yaitu menjadi sebesar 0,279. Namun kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,237 pada tahun 2020.

Tabel 2.39 Rasio Puskesmas, Polikilinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun	Jumlah Puskesmas, Polikilinik, dan Pustu	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Puskesmas, Polikilinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk
2016	164	712.684	0,230
2017	164	718.718	0,228
2018	200	724.379	0,276
2019	204	729.795	0,279
2020	175	735.026	0,237

Sumber: Kabupaten Asahan Dalam Angka, 2016-2020 (data olah)

3. Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya

Rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya 1 dokter dan tenaga medis melayani 2.500 penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga 2018, rasio dokter per 1.000 penduduk di Kabupaten Asahan terus mengalami peningkatan setiap tahun, dari sebesar 0,06 hingga 0,126. Namun kembali mengalami penurunan sampai tahun 2020 menjadi sebesar 0,082.

Tabel 2.40 Rasio Dokter dan Tenaga Medis per 1.000 Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun	Dokter	Tenaga Medis
2016	0,06	2,49
2017	0,122	1,75
2018	0,126	1,3
2019	0,115	0,115
2020	0,082	0,114

Sumber: LKPJ Bupati Asahan 2016-2020

Sebaliknya, rasio tenaga medis pada tahun 2016-2020 justru cenderung mengalami penurunan. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,49 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,114. Penurunan rasio tenaga medis terjadi empat

tahun berturut-turut, yaitu padan tahun 2017 sampai tahun 2020. Penurunan ini terjadi akibat berkurangnya sumber daya tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan jumlah penduduk terus meningkat.

Berdasarkan data Kabupaten Asahan Dalam Angka 2016-2021, jumlah dokter justru cenderung semakin menurun. Pada tahun 2016, jumlah dokter mencapai 127 orang. Namun pada tahun 2018 dan 2019 jumlah dokter terus menurun, masing-masing menjadi sebanyak 88 orang dan 84 orang. Pada tahun 2020, jumlah dokter sebanyak 61 orang. Demikian pula dengan jumlah tenaga kesehatan lainnya yang cenderung tetap hingga tahun 2017. Pada tahun 2016, jumlah perawat mencapai 601 orang, bidan sebanyak 758 orang, farmasi 44 orang, ahli gizi 35 orang, tenaga medis sebanyak 53 orang, sanitasi 18 orang, dan kesehatan masyarakat sebanyak 47 orang. Hanya jumlah bidan dan farmasi yang bertambah pada tahun 2016. Sedangkan di tahun 2018 seluruh tenaga kesehatan mengalami penurunan jumlah yang cukup tajam kecuali jumlah bidan yang bertambah sebesar 38 orang. Pada tahun 2020 jumlah dokter kembali berkurang menjadi 61 orang, perawat juga berkurang menjadi 311 orang, dan bidan meningkat menjadi 776 orang. Jumlah farmasi menurun menjadi 27 orang, ahli gizi meningkat menjadi 38 orang, tenaga medis sebanyak 42 orang, sanitasi meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 36 orang, dan juga jumlah tenaga kesehatan masyarakat bertambah menjadi 96 orang.

Tabel 2.41 Jumlah Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Teknisi Medis	Sanitasi	Kesehatan Masyarakat
2016	127	601	758	44	35	53	18	47
2017	127	601	758	44	35	53	18	47
2018	88	321	796	15	16	24	14	43
2019	84	205	592	31	30	29	29	66
2020	61	311	776	27	38	42	36	96

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2021

4. Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk

Pada tahun 2016, jumlah rumah sakit yang beroperasi mencapai 14 rumah sakit, dan stabil hingga tahun 2018. Namun, jumlah rumah sakit yang beroperasi pada tahun 2019 dan 2020 kembali turun sebanyak 3 unit, menjadi 11 rumah sakit yang beroperasi. Adapun rasio rumah sakit per 1000 penduduk di Kabupaten Asahan selama tahun 2016-2020 cenderung

menurun seiring dengan menurunnya jumlah rumah sakit dan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2016, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,020. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 sehingga mencapai nilai sebesar 0,019. Demikian pula pada tahun 2018 juga mencapai nilai sebesar 0,019. Sedangkan pada tahun 2019, rasio rumah sakit per 1000 penduduk turun menjadi sebesar 0,015. Terakhir, pada tahun 2020, rasio rumah sakit per 1000 penduduk turun hingga menjadi sebesar 0,014. Penurunan ini terjadi disebabkan adanya penambahan jumlah penduduk namun jumlah rumah sakit yang beroperasi justru berkurang.

Tabel 2.42 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Lainnya di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2016	14	712.684	0,020
2017	14	718.718	0,019
2018	14	724.379	0,019
2019	11	729.795	0,015
2020	11	735.026	0,014

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2021 (data olah)

5. Cakupan Imunisasi

Indikator imunisasi balita digunakan untuk menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Pemberian imunisasi pada balita sangat perlu dalam menjaga kekebalan pada tubuh balita dari berbagai macam penyakit. Imunisasi merupakan salah satu cara preventif untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit, seperti TBC, difteri, pertussis, hepatitis B, polio, dan campak. Pada tahun 2016, jumlah balita yang pernah mendapatkan imunisasi mencapai lebih dari empat belas ribu balita untuk masing-masing jenis imunisasi, kecuali imunisasi BCG dan HBO. Namun tahun 2017, jumlah balita yang pernah mendapatkan imunisasi menurun, kecuali imunisasi BCG yang bertambah sebesar 1.395 balita.

Tabel 2.43 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Jenis Imunisasi	2016	2017	2018	2019	2020
BCG	13.157	14.552	14.300	13.935	12.894
Polio	14.423	13.785	15.019	56.297	13.135

Jenis Imunisasi	2016	2017	2018	2019	2020
HBO	13.059	8.358	13.833	12.992	11.733
DPT3+HB3	14.466	14.407	13.667	14.371	13.187
Campak	14.459	13.693	12.185	13.975	12.888

Sumber BPS Kabupaten Asahan, 2016-2020

Jika dilihat pada Gambar 2.51 tentang persentase penduduk umur 0-59 bulan yang pernah mendapat imunisasi pada tahun 2019, maka persentase imunisasi tertinggi diperoleh dari jenis imunisasi polio yang mencapai 85,16 persen. Kemudian disusul jenis imunisasi BCG yang mencapai 83,61 persen, imunisasi DPT sebesar 76,51 persen, hepatitis B sebesar 71,96 persen, dan terendah imunisasi campak yang mencapai 53,46 persen. Namun demikian, persentase penduduk umur 0-59 bulan yang mendapat imunisasi lengkap pada tahun 2019 baru mencapai sebesar 39,30 persen.

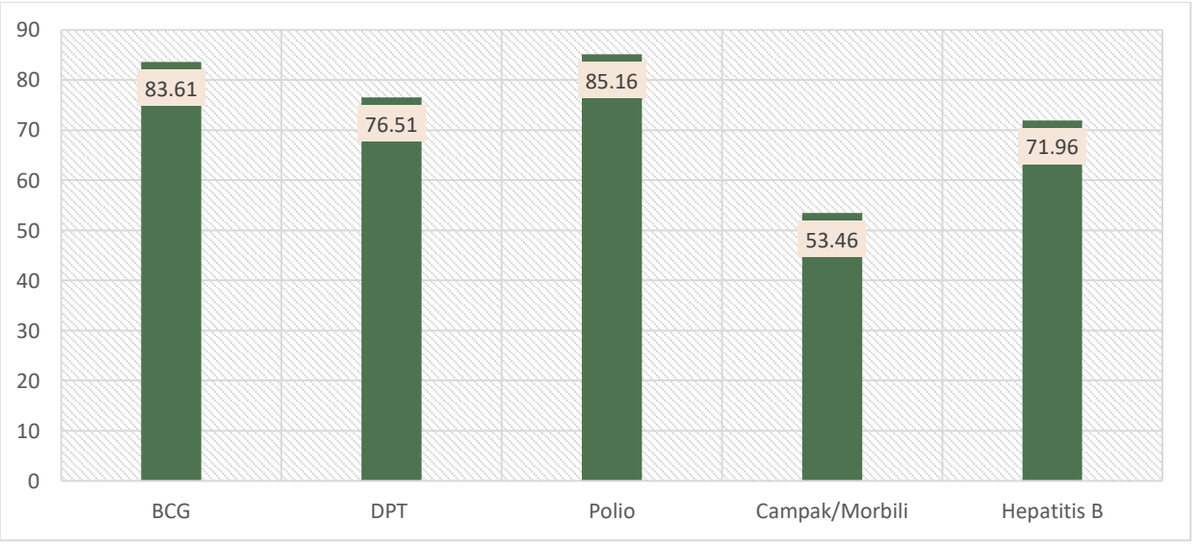

Gambar 2.51 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2019

Sumber: BPS Kabupaten Asahan , 2020 (diolah)

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang berbasis eco-city. Adapun sasaran dari urusan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan meningkatnya pelayanan drainase, dan pengendalian banjir dan air bersih. Beberapa indikator yang dapat menjelaskan pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

A. Panjang Jalan Berdasarkan Konstruksi dan Kondisi

Jalan merupakan sarana yang sangat penting untuk memperlancar dan mendorang roda perekonomian. Jalan meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sarana jalan yang baik dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan di seluruh Kabupaten Asahan pada tahun 2020 tercatat mencapai 1.734,48 km yang terbagi atas jalan nasional (81,79 km), jalan Provinsi (254,56 km) dan jalan kabupaten (1.398,13 km). Lokasi jalan nasional tersebar di 11 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Rakyat, Aek Kuasan, Aek Ledong, Simpang Empat, Teluk Dalam, Air Batu, Sei Dadap, Meranti, Pulo Bandring, Kisaran Barat, dan Kisaran Timur. Jalan nasional tersebar di 14 wilayah kecamatan, sedangkan jalan kabupaten tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Tabel 2.44 Panjang Jalan menurut Jenis Jalan di Kabupaten Asahan, 2020

NO	KECAMATAN	JENIS JALAN		
		NASIONAL (KM)	PROVINSI (KM)	KABUPATEN (KM)
1	B. P. Mandoge	-	27,00	130,19
2	Bandar Pulau	-	-	84,85
3	Aek Songsongan	-	31,70	38,20
4	Rahuning	-	8,30	47,27
5	Pulau Rakyat	11,25	8,60	70,65
6	Aek Kuasan	3,50	-	64,31
7	Aek Ledong	6,10	-	19,40
8	Sei Kepayang	-	40,16	40,26
9	Sei Kepayang Barat	-	11,50	5,90
10	Sei Kepayang Timur	-	28,93	30,84
11	Tanjung Balai	-	18,40	56,06
12	Simpang Empat	13,58	6,35	66,45

NO	KECAMATAN	JENIS JALAN		
		NASIONAL (KM)	PROVINSI (KM)	KABUPATEN (KM)
13	Teluk Dalam	10,55	-	52,05
14	Air Batu	14,91	-	79,56
15	Sei Dadap	6,50	-	58,61
16	Buntu Pane	-	31,20	45,97
17	Tinggi Raja	-	-	59,84
18	Setia Janji	-	-	48,07
19	Meranti	2,80	-	26,50
20	Pulo Bandring	1,50	-	53,37
21	Rawang Panca Arga	-	-	53,71
22	Air Joman	-	15,10	47,62
23	Silau Laut	-	12,30	71,92
24	Kisaran Barat	6,10	9,68	61,55
25	Kisaran Timur	5,00	5,34	84,98
JUMLAH		**81,79**	**254,56**	**1 398,13**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Dalam hal konstruksi permukaan jalan, data pada Gambar 2.52 menunjukkan bahwa sebagian besar jalan di Kabupaten Asahan pada tahun 2020 sudah berupa aspal. Selain itu, selama kurun lima tahun terakhir, panjang jalan konstruksi aspal terus mengalami kenaikan dari semula 424.86 km (2016) menjadi 605.32 km (2020). Di sisi lain, jalan dengan konstruksi kerikil dan tanah cenderung mengalami penurunan pada kurun waktu 2016-2020. Artinya, pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Asahan secara umum sudah menunjukkan progress yang positif. Namun demikian, ke depan tetap diperlukan program yang bersifat pemeliharaan maupun peningkatan tingkat konstruksi jalan secara lebih merata.

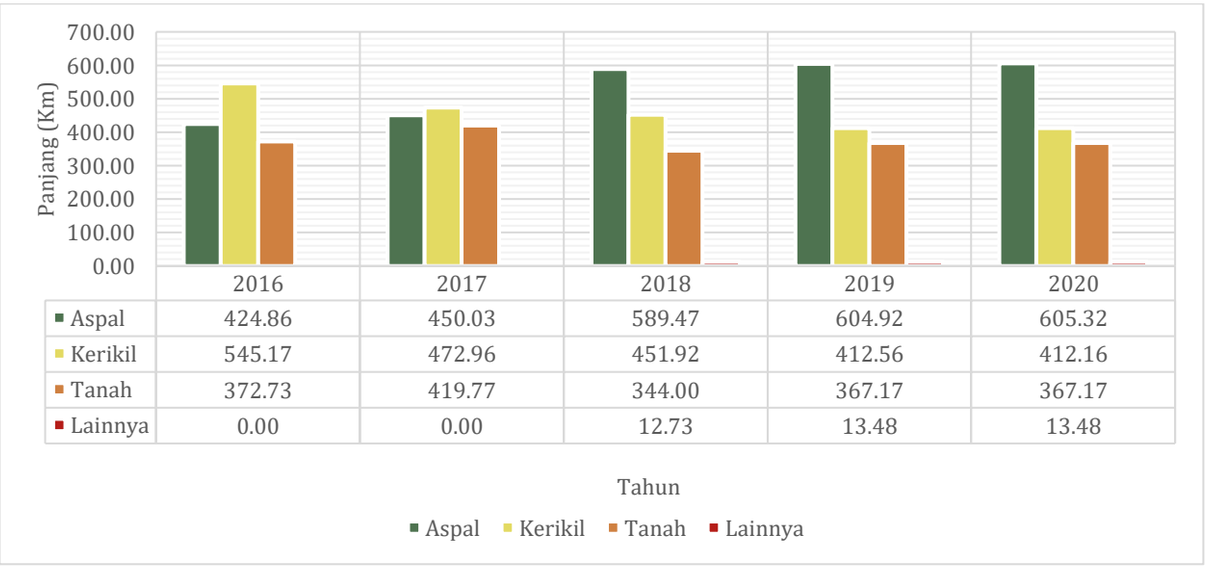

	2016	2017	2018	2019	2020
Aspal	424.86	450.03	589.47	604.92	605.32
Kerikil	545.17	472.96	451.92	412.56	412.16
Tanah	372.73	419.77	344.00	367.17	367.17
Lainnya	0.00	0.00	12.73	13.48	13.48

Gambar 2.52 Panjang Jalan berdasarkan Konstruksi Permukaan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2020

Dari segi kondisi jalan, terdapat klasifikasi meliputi kondisi baik, sedang, rusak sedang, rusak, dan rusak berat. Selama tahun 2015-2019, kondisi jalan berkategori baik di Kabupaten Asahan sempat berkurang cukup tajam, terutama pada tahun 2015-2016, namun kemudian terus meningkat pada tahun 2017-2019 seperti terekam pada Gambar 2.53.

Pada tahun 2016, jumlah total Panjang jalan di Kabupaten Asahan mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi sepanjang 642,76 km, kondisi jalan berkondisi baik turun cukup tajam hingga menjadi sepanjang 271,57 km, jumlah jalan yang berkondisi sedang, rusak sedang, dan rusak juga mengalami penurnan, sedangkan jalan dengan kondisi rusak berat bertambah hingga sepanjang 141,63 km. Pada tahun 2017, panjang jalan baik di Kabupaten Asahan bertambah, menjadi 1.343,06 km jalan, terbagi menjadi 305,54 km berkondisi baik, 64,20 km jalan berkondisi sedang, 7,86 km jalan berkondisi rusak sedang, 466,14 km berkondisi rusak, dan 499,32 km jalan rusak berat. Pada tahun 2018, jalan berkondisi baik, sedang, dan rusak sedang juga mengalami peningkatan, sedangkan jalan berkondisi rusak dan rusak berat menurun. Pada tahun 2019, dengan total jalan di Kabupaten Asahan sepanjang 1.398,13 km, sepanjang 417,86 km diantaranya berkondisi baik, jumlah ini naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah jalan berkondisi sedang, rusak sedang, rusak, dan rusak berat mengalami penurunan di tahun 2019 yakni masing-masing sepanjang 107,70 km, 73,09 km, 379,35 km, dan 420,13 km. Selanjutnya di tahun 2020, dari 1.398,13 km jalan, terbagi menjadi 397,58 km berkondisi baik, 127,33 km jalan berkondisi sedang, 73,74 km jalan berkondisi rusak sedang, 346,61 km berkondisi rusak, dan 452,87 km jalan rusak berat. Berikut data yang menunjukan kondisi jalan di Kabupaten Asahan.

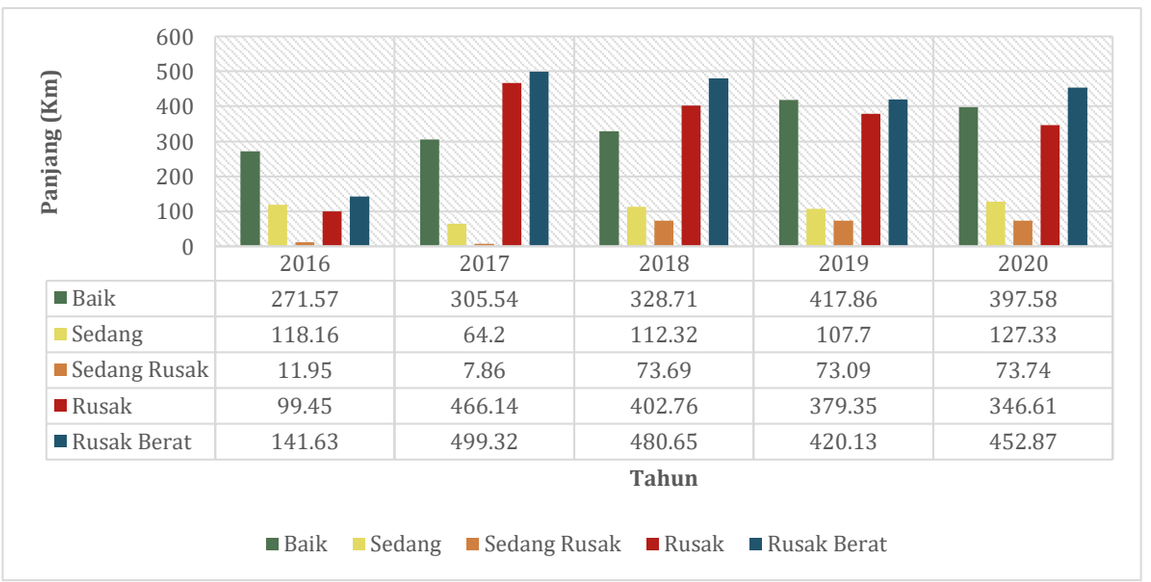

	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	271.57	305.54	328.71	417.86	397.58
Sedang	118.16	64.2	112.32	107.7	127.33
Sedang Rusak	11.95	7.86	73.69	73.09	73.74
Rusak	99.45	466.14	402.76	379.35	346.61
Rusak Berat	141.63	499.32	480.65	420.13	452.87

Gambar 2.53 Panjang Jalan berdasarkan Kondisi, 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Tabel 2.45 Perkembangan Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km) / Tahun									
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Baik	271,57	42,25	305,54	22,75	328,71	23,51	417,86	29,89	397,58	28,44
Sedang	118,16	18,38	64,20	4,78	112,32	8,03	107,70	7,70	127,33	9,11
Rusak Sedang	11,95	1,86	7,86	0,58	73,69	5,29	73,09	5,23	73,74	5,27
Rusak	99,45	15,47	466,14	34,71	402,76	28,81	379,35	27,13	346,61	24,79
Rusak Berat	141,63	20,03	499,32	37,18	480,65	34,38	420,13	30,05	452,87	32,39
Jumlah	642,76		1.343,06		1.398,13		1.398,13		1.398,13	

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2021

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum

Berdasarkan kajian pengembangan SPAM yang pernah dilakukan pada tahun 2017, secara umum dapat diklasifikan permasalahan pengelolaan SPAM di Kabupaten Asahan, meliputi:

1. Permasalahan Pemenuhan Kebutuhan Air Baku, terdiri dari:
    a. Pelayanan Skala Ibukota Kabupaten
        - Kapasitas daya dukung (debit air) dan kualitas air baku Sungai Silau makin menurun khususnya saat musim kemarau;
        - Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal;
        - Pelestarian daerah tangkapan air di hulu Sungai Silau belum optimal.
        - Kapasitas jaringan distribusi khususnya Kota Kisaran masih lebih rendah dari kapasitas produksi dan distribusi.
    b. Pelayanan Skala Ibukota Kecamatan dan Perdesaan
        - Cakupan pelayanan SPAM perpipaan masih relatif rendah
        - *Iddle capacity* (kapasitas terpasang yang belum terserap) masih ada khususnya pada SPAM ibukota kecamatan karena beroperasi kurang dari 24 jam per hari.
        - Tingkat kehilangan air sulit ditentukan karena tidak adanya meteran induk, tetapi diperkirakan masih tinggi

- SPAM perdesaan non perpipaan berupa sumur bor dan tanki air yang pengelolaannya diserahkan pada kelompok masyarakat masih belum dikelola dengan baik.

c. Pelayanan pada Daerah Rawan Banjir
   - Air tanah dangkal tidak potensial, karena kelangkaannya atau kualitasnya keruh, berbau, kadar Fe berlebih, sehingga masyarakat tidak mau menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari

2. Permasalahan dalam hal peran dan kemitraan swasta dan masyarakat, terdiri dari:
   a. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal,
   b. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah,
   c. Pembinaan Pemkab ke kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM masih kurang,
   d. Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat kurang kondusifnya iklim usaha.

Spesifik berkaitan dengan pengembangan jaringan air minum yang melayani masyarakat di Kabupaten Asahan, maka pengembangan utama yang sudah dilakukan adalah melalui sistem jaringan perpipaan terpadu yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silau Piasa. Tercatat bahwa jumlah pelanggan yang dilayani oleh PDAM cenderung terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir seperti terlihat pada Tabel 2.46 dan Gambar 2.54. Dari 17.909 pelanggan yang tercatat pada tahun 2016, kemudian meningkat hingga mampu melayani sejumlah 20.551 pelanggan pada tahun 2020. Artinya, terdapat peningkatan jumlah pelanggan hingga selama lima tahun terakhir. Di samping itu, kenaikan jumlah pelanggan terutama pelanggan dari konsumen rumah tangga menunjukkan potensi pengembangan yang cukup besar dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum perpipaan yang dikelola oleh PDAM sehingga harus terus dipertahankan.

Tabel 2.46 Banyaknya Pelanggan PDAM menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Asahan, 2016-2020

NO	JENIS KONSUMEN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sosial					
	Tempat Ibadah/ Fasilitas Umum	145	153	171	185	7
	Badan Sosial dan RS	13	16	6	5	189

NO	JENIS KONSUMEN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Non-Niaga					
	Rumah Tangga	16,400	15,385	17,061	18,294	19.115
	Instansi Pemerintah	378	329	333	339	341
3	Niaga	983	934	927	919	898
4	Industri	2	2	2	1	1
5	Hidran Umum	-	-	12	10	-
JUMLAH		17,909	17,921	16,819	18,512	20.551

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

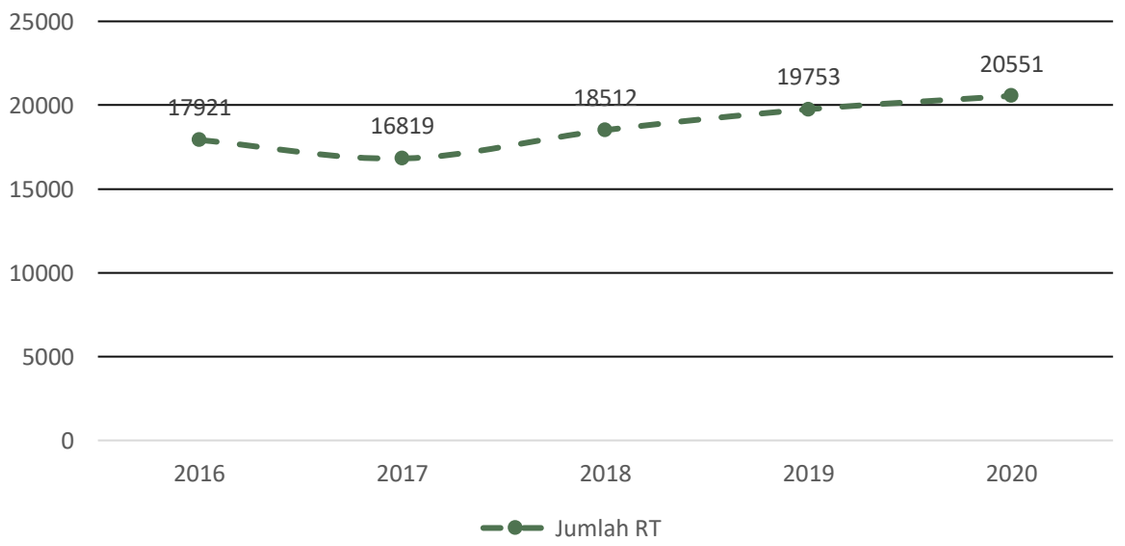

Gambar 2.54 Grafik Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Ditinjau dari segi jumlah air minum yang disalurkan, maka konsumen rumah tangga menjadi konsumen dengan tingkat penyaluran tertinggi, selaras dengan banyaknya jumlah pelanggan yang ada. Data lima tahun terakhir pada Tabel 2.47 menunjukkan kecenderungan kenaikan secara bertahap setiap tahun, kecuali pada tahun 2019, dimana terjadi anomali data oleh PDAM. Selain itu, grafik pada Gambar 2.55 juga menunjukkan jumlah air minum yang disalurkan PDAM di Kabupaten Asahan yang cenderung fluktuatif.

Tabel 2.47 Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen, 2016-2020

NO	JENIS KONSUMEN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sosial					
	Tempat Ibadah/ Fasilitas Umum	4,891	76,355	18,561	8,386	56.919
	Badan Sosial dan RS	769	130,194	72,473	408	95.156
2	Non-Niaga					
	Rumah Tangga	290,878	3,049,786	3,362,444	309,594	3.322.167
	Instansi Pemerintah	18,330	17,618	13,765	15,929	179.845
3	Niaga	20,370	234,223	235,853	20,404	211.902
4	Industri	76	720	764	65	936
5	Khusus	-	-	-	3,173	-
JUMLAH		335,314	3,508,896	3.703.860	357.959	3.866.925

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

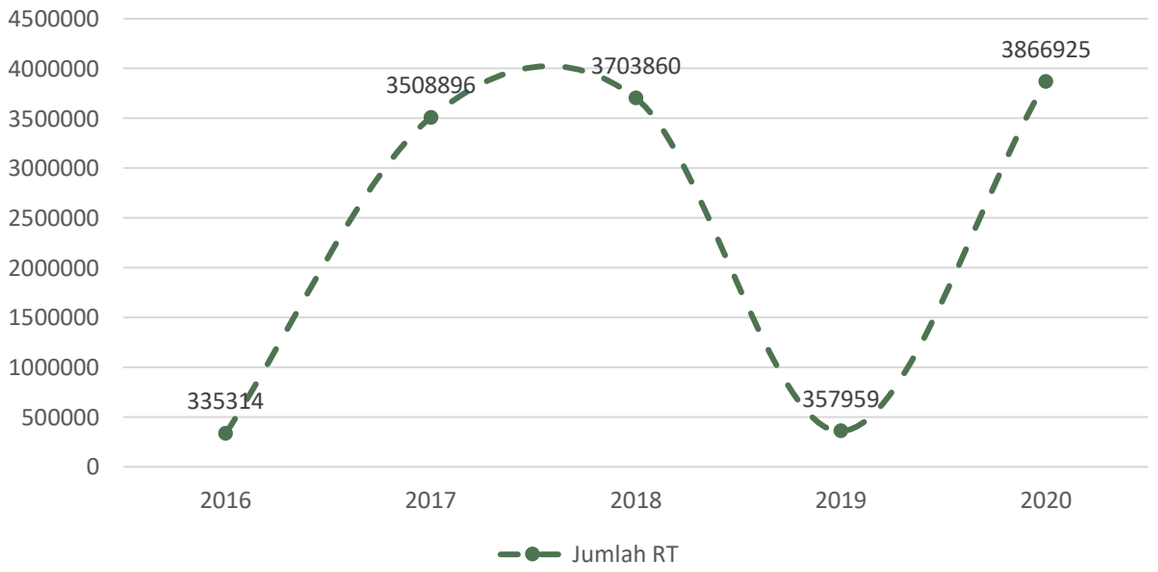

Gambar 2.55 Grafik Perkembangan Jumlah Air Minum yang Disalurkan PDAM di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2019

2. Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Sistem drainase dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem teknis dan non-teknis dari prasarana dan Sarana Drainase. Sebagai bagian dari konteks tersebut, prasarana drainase merupakan lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Sedangkan, sarana drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.

Kondisi riil drainase lingkungan di Kabupaten Asahan ditandai dengan permasalahan seperti:

a. tidak memadainya daya tampung saluran sehingga air buangan meluber ke kanan kiri saluran dan mengakibatkan genangan;
b. lokasi saluran drainase yang berada di dalam rumah warga sehingga menyulitkan pemeliharaan; dan
c. adanya pengendapan material di saluran yang menyebabkan permasalahan meluapnya air saluran di musim hujan.

Secara umum, kawasan perkotaan di Kabupaten Asahan sudah memiliki sistem drainase berupa saluran terbuka pasangan batu kali yang ditempatkan pada bahu jalan dengan pembuangan akhir saluran diarahkan langsung ke sungai atau anak sungai terdekat. Hirarki saluran yang ada yaitu saluran lingkungan yang berukuran 40-60 cm kemudian ditampung/dialirkan ke saluran sekunder yang berukuran 80-100 cm dan dibuang langsung ke saluran primer (sungai). Saluran drainase yang dikelola Pemerintah Kabupaten lebih banyak mencakup lingkungan permukiman di perkotaan saja. Hal ini juga yang menjadikan tantangan ke depan bagi Pemerintah Kabupaten untuk memperluas layanan. Selama ini, untuk yang di luar wilayah perkotaan, saluran drainasenya banyak yang menjadi satu dengan saluran irigasi, ataupun selokan alami yang kemudian teralirkan ke sungai besar.

Aspek pengelolaan drainase perkotaan/lingkungan di Kabupaten Asahan harus diakui masih terbatas oleh pihak pemerintah saja, sementara partisipasi masyarakat dan swasta masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu tidak optimalnya penanganan genangan air selama ini karena hanya mengandalkan kemampuan

pemerintah yang sangat terbatas. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk rutin dalam pengelolaan drainase juga berakibat pada banyaknya saluran drainase yang tersumbat akibat sampah yang bersumber dari jalanan atau dari limbah rumah tangga (kamar mandi, tempat cuci, dll) sehingga dapat dipastikan terjadi genangan pada musim hujan karena air saluran akan meluap/meluber ke jalanan.

Wilayah yang sering terdapat genangan pada permukiman perkotaan di Kabupaten Asahan antara lain adalah di Kisaran Timur yaitu di Kelurahan Siumbut Baru dan Kelurahan Siumbut-umbut dan di Kisaran Barat antara lain Kelurahan Sidodadi dan Dadimulyo.

Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan sistem drainase serta pengembangannya, maka disusun rencana dan konsep pengembangan sistem jaringan drainase di Kabupaten Asahan yang sudah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan 2013-2033 sebagai bagian dari struktur jaringan prasarana kabupaten. Dalam penjelasannya, sistem drainase di Kabupaten Asahan diarahkan pada sistem drainase makro dan sistem drainase perkotaan dengan kapasitas memadai. Rincian pokok-pokok dari rencana pengembangan sistem drainase tersebut antara lain, meliputi:

a. Normalisasi jaringan drainase yang ada;
b. Pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan;
c. Pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan;
d. Pembuatan waduk sebagai penampung limpasan air sungai dan laut yang berlokasi pada Pesisir Pantai dan muara sungai termasuk anak sungai; dan
e. Pengelolaan sumberdaya air bekerjasama dengan pemerintahan daerah terdekat di daerah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain.

Selain menjamin ketersediaan drainase disepanjang jalan, perlu juga memperhatikan kualitas dari drainase tersebut. Drainase yang baik akan mengurangi potensi banjir disuatu wilayah. Drainase dalam kondisi baik dalam hal ini termasuk pula kondisi pembuangan air yang tidak tersumbat.

Dari segi realiasi target capaian dalam hal pengelolaan jaringan draianase di Kabupaten Asahan, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian yang dilakukan sudah cukup baik. Sasaran mengenai terwujudnya kondisi saluran drainase/gorong-gorong dengan kondisi baik cenderung terus mengalami peningkatan capaian diatas angka 80, pada kurun 2016-2018. Selama tahun 2015 hingga tahun 2019 persentase drainase cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, persentase drainase dalam kondisi baik mencapai 82,98 persen. Pada tahun 2017, 83,05 persen drainase di Kabupaten Asahan dalam kondisi baik. Kemudian di tahun 2018, persentase ini kembali naik hingga mencapai

86,61 persen. Namun pada tahun 2019 sampai 2020 persentase ini menurun menjadi 85,12 persen.

Selain itu, sasaran yang berkaitan dengan pembangunan saluran drainase di kawasan perkotaan juga terus mengalami kenaikan dari semula sepanjang 13,908 meter pada tahun 2018 naik menjadi 29,568 pada tahun 2019.

Tabel 2.48 Realisasi Program Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Drainase, 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	%	82,98	83,05	86,61	85,12	85,12
2	Panjang Drainase Perkotaan	m	-	-	13.908,80	29.569,80	-

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016 – 2020

Tabel 2.49 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun	Drainase dalam Kondisi Baik (%)
2016	82,98
2017	83,05
2018	86,61
2019	85,12
2020	85,12

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

3. Rasio Ruang Terbuka Hujau Terhadap Luas Wilayah Kota

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Untuk mengukur ketersediaan ruang terbuka hijau di suatu wilayah dapat menggunakan rasio ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara luas terbuka hijau dengan luas wilayah kota. Selama tahun 2015 hingga 2018, rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Asahan cenderung stabil. Pada tahun 2015, rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Asahan menujukan nilai sebesar 40 persen. Kemudian turun pada tahun 2016, sehingga menjadi 39,74 persen.

Tabel 2.50 Rasio Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah Kota di Kabupaten Asahan, 2015-2018

Tahun	Rasio (%)
2015	40,00
2016	39,74
2017	39,74
2018	39,74

Sumber: LKPJ Bupati Asahan 2016-2019

4. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan merupakan perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah bangunan. Secara umum rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di Kabupaten Asahan cenderung mengalami peningkatan setiap tanhunnya. Pada tahun 2015, rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di Kabupaten Asahan menunjukan nilai sebesar 0,0681. Nilai ini meningkat pada tahun 2016, sebesar 0,0011 sehingga rasio bangunan ber IMB di Kabupaten Asahan menjadi 0,0692. Nilai ini terus meningkat pada tahun 2017 dan 2018 sehingga menjadi sebesar 0,0710 pada tahun 2017 dan 0,0724 pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Asahan masih terdapat bangunan yang belum ber IMB.

Tabel 2.51 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Asahan, 2015-2018

Tahun	Rasio (satuan bangunan)
2015	0,0681
2016	0,0692
2017	0,0710
2018	0,0724

Sumber: LKPJ Bupati Asahan 2016-2019

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Karakteristik Perumahan

Perumahan diartikan sebagai kumpulan rumah yang menjadi bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Secara umum, jenis perumahan di Kabupaten Asahan dapat dikelompokkan menjadi menjadi 6 (enam), yaitu perumahan formal, perumahan komersial, perumahan umum, perumahan

swadaya, perumahan perkebunan dan perumahan Negara. Penjelasan rinci mengenai definisi, kondisi serta potensi masing-masing jenis perumahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52 Karakteristik Perumahan di Kabupaten Asahan

NO	JENIS PERUMAHAN	DEFINISI	KONDISI DAN POTENSI
	Perumahan Formal	Perumahan formal adalah perumahan yang dibangun oleh pengembang	- Jumlah perumahan formal yang ada di Kabupaten Asahan hingga saat ini relatif belum banyak, namun berpotensi untuk terus berkembang di masa mendatang. - Perkembangan perumahan formal sudah tersebar di 25 (dua puluh lima) Kecamatan, artinya perumahan formal di Kabupaten Asahan terdapat dan sudah merata di seluruh wilayah kecamatan. - Perumahan jenis ini memiliki kondisi lingkungan yang relative bersih, sehat, teratur dan terawat dengan baik. Selain itu, pada beberapa perumahan formal yang berada di kawasan perkotaan sudah dilengkapi dengan sarana prasarana yang lengkap bagi penghuninya. - Dari segi pembangunan dan pengelolaan, termasuk aspek sarana prasarana, mayoritas perumahan formal yang ada merupakan unit bisnis serta tanggung jawab dari pihak swasta. - Perumahan formal diidentifikasi saat ini menyasar pada masyarakat golongan menengah keatas.
	Rumah Komersial	Perumahan non-subsidi yang diperuntukan untuk orang atau masyarakat yang sudah mampu, artinya mampu mengangsur rumah yang sesuai dengan penghasilannya.	- Perumahan komersial sudah tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Asahan yaitu Kecamatan Aek kuasan, Aek Ledong, Air batu, Air joman, Bandar pulau, Bandar pasir mandoge, Pulau Rakyat, Pulau Bandring, Simpang Empat, Rahuning, Sei Dadap, Kisaran Barat, Rawang Panca Arga, Silau Laut, Meranti dan Kisaran timur. -
	Rumah Umum	Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat	- Perumahan umum di Kabupaten Asahan sudah tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Asahan yaitu Kecamatan Aek kuasan, Aek Ledong, Air batu, Air joman, Buntu

NO	JENIS PERUMAHAN	DEFINISI	KONDISI DAN POTENSI
		berpenghasilan rendah.	Pane, Pulau Rakyat, Pulau Bandring, Simpang Empat, Aek Songsonggan, Teluk Dalam, Rahuning, Sei Dadap, Kisaran Barat, Rawang Panca Arga, Meranti dan Kisaran Timur.
	Rumah Swadaya	Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya Masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok.	- Perumahan Swadaya di Kabupaten Asahan tersebar di 22 Kecamatan di Kabupaten Asahan yaitu Kecamatan Aek Kuasan, Aek Ledong, Air Batu, Air Joman, Bandar Pulau, Kisaran Barat, Kisaran Timur, Bandar Pasir Mandoge, Meranti, Pulau Rayat, Pulau Bandring, Rahuning, Rawang Panca Arga, Sei dadap, Sei Kepayang, Sei kepayang Timur, Setia janji, Silo laut, Simpang Empat, Tanjung Balai, Teluk Dalam dan Tinggi Raja.
	Perumahan Perkebunan	Perumahan yang dibangun dan diperuntukkan bagi pekerja perkebunan.	- Perumahan perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan mengikuti keberadaan perkebunan sawit. - Sebagian besar rumah perkebunan di Kabupaten Asahan masih tergolong minim akan sarana dan prasarana. - Masih ditemukan pemanfaatan rumah-rumah yang dapat dikategorikan kondisi rusak atau tidak layak namun tetap digunakan sebagai tempat tinggal.
	Rumah Negara	Rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.	- Perumahan Negara tersebar di 12 Kecamatan di Kabupaten Asahan yaitu Kecamatan Aek Ledong, Buntu Pane, Bandar Pasir Mandoge, Simpang Empat, Aek Songsongan, Teluk Dalam, Rahuning, Sei Kepayang Barat, Sei Dadap, Kisaran Barat, Setia Janji dan Kisaran Timur.

Sumber: Dokumen RP3KP, 2018

Karakteristik Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan. Kawasan permukiman di Kabupaten Asahan tersebar merata di seluruh wilayah kecamatan dengan tipologi yang juga beragam. Setidaknya, terdapat lima jenis tipologi permukiman di Kabupaten Asahan, meliputi permukiman pesisir, permukiman sekitar pusat pemerintahan, permukiman di sepanjang jalan nasional, dan permukiman perbukitan. Kondisi dan potensi pengembangan kawasan permukiman berdasarkan tipologinya dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53 Karakteristik Permukiman di Kabupaten Asahan

NO	TIPOLOGI PERMUKIMAN	DEFINISI	KONDISI DAN POTENSI
1	Permukiman Pesisir	Permukiman yang terkait dengan kegiatan nelayan/kapal penangkap ikan dan pengolahan perikanan, kegiatan perkapalan, serta dilengkapi pelayanan kegiatan perdagangannya.	- Saat ini, permukiman pesisir mulai berkembang sebagai salah satu alternatif lokasi baru pengembangan wilayah permukiman, meskipun tidak berkaitan dengan kegiatan perikanan. - Kondisi umum lingkungannya relatif tidak tertata secara baik dan seringkali justru menurunkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pantai - Beberapa kawasan permukiman sudah berkembang sebelum dilakukan penimbunan, sehingga sebagian bangunan merupakan bangunan di atas air. - Permukiman pesisir di Kabupaten Asahan terdapat di Kecamatan Tanjung Balai, Sei Kepayang Barat dan Silau Laut.
2	Permukiman sekitar Pusat Pemerintahan	Permukiman yang berkembang di sekitar kantor-kantor pemerintah skala Kabupaten	- Pada awalnya, permukiman yang berkembang di sekitar kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Asahan terdiri dari bangunan-bangunan rumah yang terata rapi dengan kepadatan rendah dan luasan kapling besar di atas 300 m^2. - Permukiman sekitar pusat pemerintahan tersebar di wilayah Kecamatan Kisaran Barat dan Kisaran Timur.
	Permukiman Koridor Jalan Nasional	Permukiman yang berkembang di	- Permukiman koridor jalan nasional didominasi oleh bangunan Rumah Toko (Ruko)

NO	TIPOLOGI PERMUKIMAN	DEFINISI	KONDISI DAN POTENSI
		sepanjang Koridor Jalan Nasional	dengan fungsi perdagangan dan jasa. - Lokasi permukiman koridor jalan nasional terdapat di wilayah Kecamatan Air Batu, Simpang Empat, Sei Dadap, Aek Ledong, dan Pulau Rakyat.
	Permukiman Perbukitan	Permukiman yang berkembang di wilayah perbukitan	- Permukiman perbukitan saat ini berkembang sebagai area perluasan lahan kota untuk fungsi perumahan - Secara umum, rata-rata kavling di permukiman perbukitan cenderung berukuran kecil dan cukup banyak bangunan yang masuk kategori tidak layak huni. - Tata letak bangunan di kawasan permukiman perbukitan cenderung tidak teratur dan organik mengikuti pembangunan jalan lingkungan yang menyesuaikan kondisi topografi kawasan. - Permukiman perbukitan tersebar di wilayah Kecamatan Bandar Pulau dan Bandar Pasir Mandoge.

Sumber: Dokumen RP3KP, 2018

Backlog Rumah di Kabupaten Asahan

Secara sederhana, backlog rumah dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada skala kabupaten, data terakhir tahun 2018 menunjukkan bahwa backlog rumah di Kabupaten Asahan cenderung kecil, yaitu 108 rumah. Namun demikian, apabila dikaji lebih dalam pada tingkat kecamatan, maka sebaran kecamatan yang memiliki backlog rumah juga masih tergolong tinggi, seperti Kecamatan Tanjung Balai yang memiliki backlog rumah hingga lebih dari 2000 unit rumah. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki kelebihan unit rumah dengan jumlah besar, seperti di Kecamatan Sei Dadap, Air Joman, Kisaran Timur, dan Sei Kepayang. Artinya, terjadi ketidaksinkronan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah kebutuhan rumah oleh masyarakat berdasarkan rumah tangga. Dalam konteks tersebut, jelas dibutuhkan peranan pemerintah

sehingga kelebihan rumah tersebut dapat termanfaatkan secara baik sehingga dapat mengurangi jumlah backlog perumahan yang ada. Rincian data backlog rumah di Kabupaten Asahan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54 Penghitungan Backlog Rumah di Kabupaten Asahan, 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH RUMAH EKSISTING	SELISIH
1	B. P. Mandoge	7.141	6.518	- 623
2	Bandar Pulau	4.448	4.416	- 32
3	Aek Songsongan	3.578	3.703	+ 125
4	Rahuning	3.801	5.307	+ 1.506
5	Pulau Rakyat	7.978	7.608	- 370
6	Aek Kuasan	6.760	5.620	- 1.140
7	Aek Ledong	4.276	3.770*	- 506
8	Sei Kepayang	3.715	5.890	+ 2.175
9	Sei Kepayang Barat	2.780	2.090	- 690
10	Sei Kepayang Timur	1.865	2.039	+ 174
11	Tanjung Balai	7.586	5.505	- 2.081
12	Simpang Empat	8.572	8.749	+ 177
13	Teluk Dalam	3.748	4.426	+ 678
14	Air Batu	8.505	7.469	- 1.036
15	Sei Dadap	6.699	9.731	+ 3.032
16	Buntu Pane	5.816	5.328	- 488
17	Tinggi Raja	3.932	4.246	+ 314
18	Setia Janji	2.485	2.610	+ 125
19	Meranti	4.212	3.732	- 480
20	Pulo Bandring	6.021	5.404	- 617
21	Rawang Panca Arga	3.808	4.005	+197
22	Air Joman	9.959	12.731	+ 2.722
23	Silau Laut	4.372	5.435	- 1.063
24	Kisaran Barat	12.043	10.046	+ 1.997
25	Kisaran Timur	15.008	12.622	+ 2.386
JUMLAH		**149.108**	**149.000**	**- 108**

Sumber: Dokumen RP3KP, 2018
** = Modifikasi data berdasarkan data dalam dokumen RP3KP 2018 yang hanya disebutkan jumlah rumah sebanyak 3.770 di Kecamatan Aek Ledong*

Rumah Layak Huni

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah tersedianya perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, serta teratur. Selain itu, perumahan dan permukiman merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya, karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan ataupun bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas

rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Persentase rumah layak huni merupakan persentase yang didapatkan dari perbadingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Persentase rumah layak huni di Kabupaten Asahan pada tahun 2015 hingga 2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun seperti data yang disajikan pada Tabel 2.55., kecuali pada tahun 2019 dimana persentase rumah layak huni relatif menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, persentase rumah layak huni di Kabupaten Asahan sebsar 97,16 persen. Meningkat pada tahun 2016 sehingga menjadi sebesar 98,09 persen. Persentase ini terus meningkat hingga tahun 2017 mencapai persentase sebesar 99,28 persen. Pada tahun 2018, kembali mengalami kenaikan yakni menjadi 99,29 persen. Akan tetapi, pada tahun 2019 persentase ruang layak huni mengalami penurunan yang relatif signifikan yaitu sebesar 6,79 persen menjadi 92,50 persen. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah yang layak huni.

Tabel 2.55 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Asahan, 2015-2019

Tahun	Persentase RLH (%)
2015	97,16
2016	98,09
2017	99,28
2018	99,29
2019	92,50

Sumber: LKPJ Bupati Asahan 2016-2020

Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni (RTLH) secara sederhana dapat dipahami sebagai kebalikan dari rumah layak huni. Dengan pemahaman tersebut, maka RTLH dapat didefinisikan sebagai hunian atau tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Jumlah RTLH di Kabupaten Asahan berdasarkan kompilasi data tahun 2020 tercatat mencapai 10.335 unit yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Dari jumlah tersebut, kecamatan dengan jumlah RTLH terbanyak adalah Kecamatan Tanjung Balai, yaitu mencapai 1.317 unit RTLH atau 12,7% dari total RTLH di Kabupaten Asahan. Data lebih rinci mengenai sebaran RTLH di masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Asahan dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56 Data Jumlah RTLH di Kabupaten Asahan, 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH RTLH	KETERANGAN
1	KECAMATAN MERANTI	239	Data 2021
2	KECAMATAN AIR JOMAN	711	Data 2021
3	KECAMATAN TANJUNG BALAI	1.317	Data 2021
4	KECAMATAN SEI KEPAYANG	520	Data 2021
5	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	433	Data 2021
6	KECAMATAN AIR BATU	595	Data 2021
7	KECAMATAN PULAU RAKYAT	635	Data 2021
8	KECAMATAN BANDAR PULAU	257	Data 2021
9	KECAMATAN BUNTU PANE	323	Data 2021
10	KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGE	415	Data 2021
11	KECAMATAN AEK KUASAN	438	Data 2021
12	KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT	186	Data 2021
13	KECAMATAN KOTA KISARAN TIMUR	290	Data 2021
14	KECAMATAN AEK SONGSONGAN	161	Data 2021
15	KECAMATAN RAHUNING	252	Data 2021
16	KECAMATAN SEI DADAP	262	Data 2021
17	KECAMATAN SEI KEPAYANG BARAT	582	Data 2021
18	KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR	410	Data 2021
19	KECAMATAN TINGGI RAJA	447	Data 2021
20	KECAMATAN SETIA JANJI	311	Data 2021
21	KECAMATAN SILAU LAUT	175	Data 2021
22	KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA	534	Data 2021
23	KECAMATAN PULO BANDRING	403	Data 2021
24	KECAMATAN TELUK DALAM	314	Data 2021
25	KECAMATAN AEK LEDONG	125	Data 2021
JUMLAH		**10.335**	**-**

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Asahan – 2021

Penanganan Kawasan Kumuh

Salah satu isu di kawasan perkotaan yang saat ini terus berkembang adalah semakin menurunnya kualitas kawasan permukiman yang ditandai dengan keberadaan kawasan kumuh. Ciri-ciri kawasan kumuh antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang

sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. Beberapa faktor penyebab kekumuhan di kawasan perkotaan adalah meningkatnya arus urbanisasi di perkotaan, kemampuan ekonomi khususnya untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pertumbuhan penduduk itu sendiri.

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, sub urusan kawasan permukiman ada pembagian antara tugas pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Luasan kawasan kumuh di atas 15 ha menjadi tugas Pemerintah Pusat, luasan kawasan kumuh 10-15 ha menjadi tugas Provinsi dan luasan kumuh di bawah 10 ha menjadi tugas Kabupaten/ Kota.

Terdapat beberapa versi data yang memberikan gambaran tentang kondisi kawasan kumuh di Kabupaten Asahan. Dari segi lokasi persebarannya, seluruh kawasan kumuh berlokasi di kawasan perkotaan, sehingga berada di wilayah Kecamatan Kisaran Barat dan Kisaran Timur. Kelurahan Dadimulyo menjadi wilayah kelurahan dengan luasan kawasan kumuh terbesar dibandingkan kelurahan-kelurahan lainnya.

Dalam proses penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Asahan, tercatat adanya penurunan luasan kawasan kumuh pada periode tahun 2017 dan 2018. SK Bupati Asahan tahun 2017 menetapkan luasan kawasan kumuh mencapai 98,20 ha. Pada periode tahun selanjutnya (2018) terjadi penurunan luasan kawasan kumuh seiring dengan program penataan permukiman yang dilakukan, sehingga turun menjadi 61,14 ha.

Tabel 2.57 Data Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Asahan, 2017-2018

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)			
			SK BUPATI		DOKUMEN	OBSERVASI
			2017	2018	RPKPKP 2017	KOTAKU 2017
1	Kisaran Barat	Tegal Sari	2,88	0	5,27	5,57
		Tebing Kisaran	8,79	0	8,78	8,21
		Kisaran Barat	4,29	0	6,3	5,8
		Kisaran Baru	4,64	0	3,7	4,2
		Sendang Sari	4,55	0	7,78	7,5
		Kisaran Kota	1,31	0,42	2,75	2,9
		Mekar Baru	5,12	4,52	6,62	7,1
		Sidodadi	9,02	8,35	12,5	11,7
		Dadimulyo	10,93	10,93	17,8	15,3
2	Kisaran Timur	Teladan	8,04	8,03	11,5	10,5
		Kisaran Naga	8,86	7,76	13,5	13,2
		Sentang	5,92	4,06	7,2	7,8
		Kedai Ledang	4,73	4,73	3,1	3,71
		Selawan	6,67	5,46	6,9	6,5

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)			
			SK BUPATI		DOKUMEN	OBSERVASI
			2017	2018	RPKPKP 2017	KOTAKU 2017
		Mutiara	7,20	5,36	8,88	8,83
		Lestari	5,24	1,53	12,3	11,87
JUMLAH			**98,20**	**61,14**	**134.88**	**130,69**

Sumber: Dokumen RP3KP, 2018

Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas publik yang diperlukan oleh masyarakat. Walaupun demikian, selama tahun 2016-2020 rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk menunjukan tren menurun seperti data pada Tabel 2.58. Pada tahun 2016, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk di Kabupaten Asahan yaitu 229. Demikian pula pada tahun 2017 sampai 2020, rasio tempat pemakaman umum mengalami penurunan yakni menjadi sebesar 211. Data sementara pada tahun 2018, nilai rasio ini meningkat dari tahun sebelumnya sehingga rasio tempat pemakaman umum di Kabupaten Asahan menjadi sebesar 225 di tahun 2017, dan 219 di tahun 2018, 215 di tahun 2019 dan 211 ditahun 2020. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya penambahan luas area makam tetapi tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk.

Tabel 2.58 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	229
2017	225
2018	219
2019	215
2020	211

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Salah satu upaya dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu dengan adanya peran dari berbagai pihak seperti petugas perlindungan

masyarakat. Namun, selama tahun 2016-2020 rasio petugas linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Asahan justru semakin menurun. Data pada Gambar 2.56 menunjukan pada tahun 2016 nilai rasio mencapai 79,77. Terus mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2017 sampai 2020 yang juga terus menurun yaitu masing-masing sebesar 79,10 persen sampai 78,38 di tahun 2020.

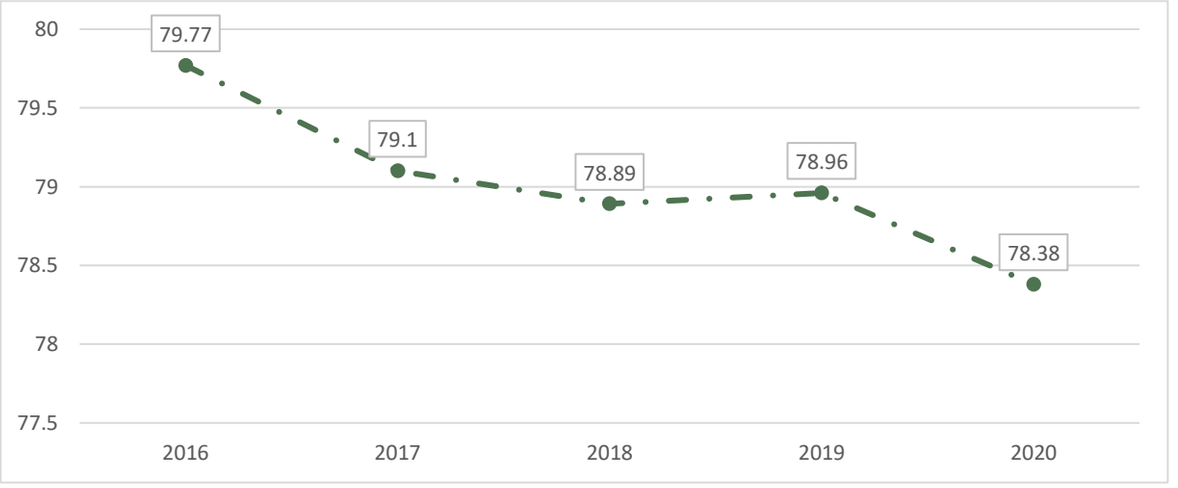

Gambar 2.56 Rasio Petugas Linmas per 10.000 Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Selain petugas linmas, petugas Pol PP juga memiliki peran dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Akan tetapi, berbeda dengan rasio petugas linmas per 10.000 penduduk, rasio pol PP per 10.000 penduduk di Data pada Gambar 2.57 menunjukkan bahwa rasio petugas Pol PP di Kabupaten Asahan cenderung fluktuatif selama tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 rasio ini mencapai 2,96. Pada tahun 2017, rasio pol PP menunjukan peningkatan yang relatif signifikan yaitu mencapai 4,16. Pada tahun 2018, nilai rasio pada indikator ini kembali mengalami peningkatan yakni menjadi sebesar 4,45. Namun selama dua tahun berturut-turut mengalami penurunan menjadi 4,21 pada tahun 2019 dan menurun menjadi 4,15 pada tahun 2020.

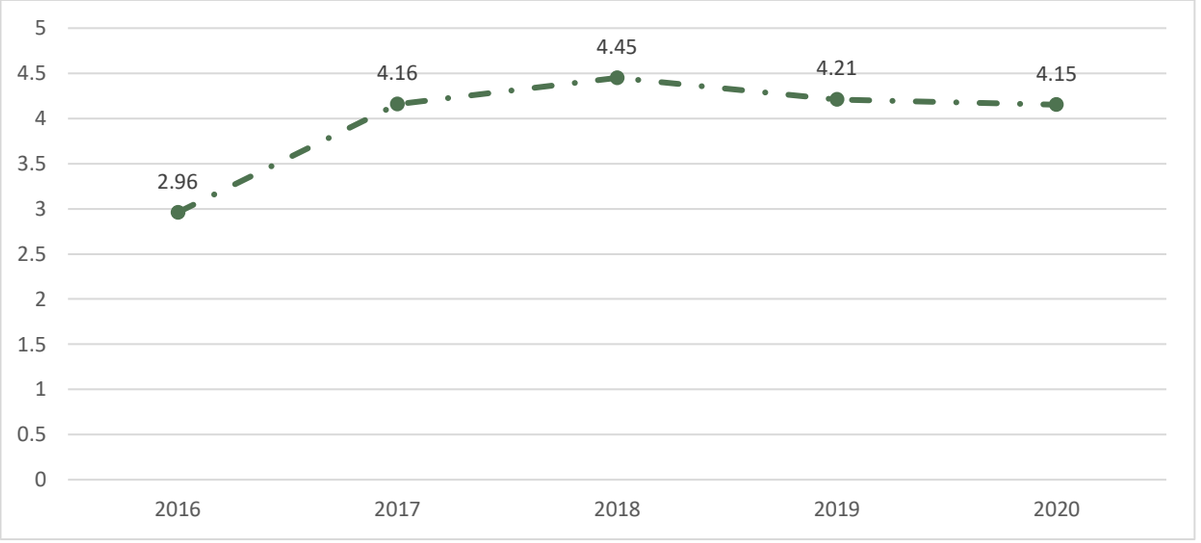

Gambar 2.57 Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Rasio Pos Kamling per Jumlah Dusun/Lingkungan

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, peran dari petugas linmas dan petuas Pol PP untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun demikian, keterlibatan masyarakat juga penting dalam mendukung peran dari petugas linmas dan Pol PP. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan kegiatan ronda. Kegiatan ini tentunya perlu didukung sarana yang memadai seperti ketersediaan pos kamling. Berdasarkan data LKPJ tahun 2016-2020 rasio pos kamling cenderung stabil. Pada tahun 2016, rasio pos kamling per jumlah dusun/lingkungan yakni sebesar 73,93. Adapun nilai dari rasio jumlah pos kamling per jumlah dusun/lingkungan di Kabupaten Asahan tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 hingga tahun 2018 yaitu sebesar 73,93. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 73,94 dan mengalami penurunan menjadi 73,34 pada tahun 2020.

Tabel 2.59 Rasio Pos Kamling per Jumlah Dusun/Lingkungan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	73,93
2017	73,93
2018	73,93
2019	73,94
2020	73,34

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Cakupan Penegakan Peratuan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Tingkat keberhasilan penegakan Perda suatu daerah dapat diukur dengan indikator cakupan penanganan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Cakupan ini

didapatkan dari jumlah operasional penegakan Perda dan Perkada. Berdasarkan data Kabupaten Asahan menunjukan bahwa pada tahun 2016, penanganan perda yang telah dilaksanakan di Kabupaten Asahan sebanyak 104 kali. Demikian pula pada tahun 2017, indikator ini kembali naik menjadi 115 kali. Pada tahun 2018, kembali meningkat cukup signifikan yaitu mencapai 245 kali. Sedangkan di tahun 2019 dan tahun 2020, jumlah operasional penegakan Perda dan Perkada mengalami penurunan sebanyak 71 kali atau menjadi sebanyak 174 kali di tahun 2019 dan hanya 15 kali di tahun 2020.

Tabel 2.60 Cakupan Penegakan Peratuan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun	Jumlah Operasional Penegakan Perda dan Perkada
2016	104
2017	115
2018	245
2019	174
2020	15

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Selain itu indikator yang juga penting dalam urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat adalah angka kriminalitas dan persentase penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat. Berdasarkan data 2020, angka kriminalitas pada tahun 2018 mencapai angka tertinggi sebesar 20,51 persen, dan di tahun 2020 menjadi 18,69 persen. Angka tersebut didapat dari jumlah tindak kriminal selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Sedangkan persentase penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019 mencapai 100,00 persen.

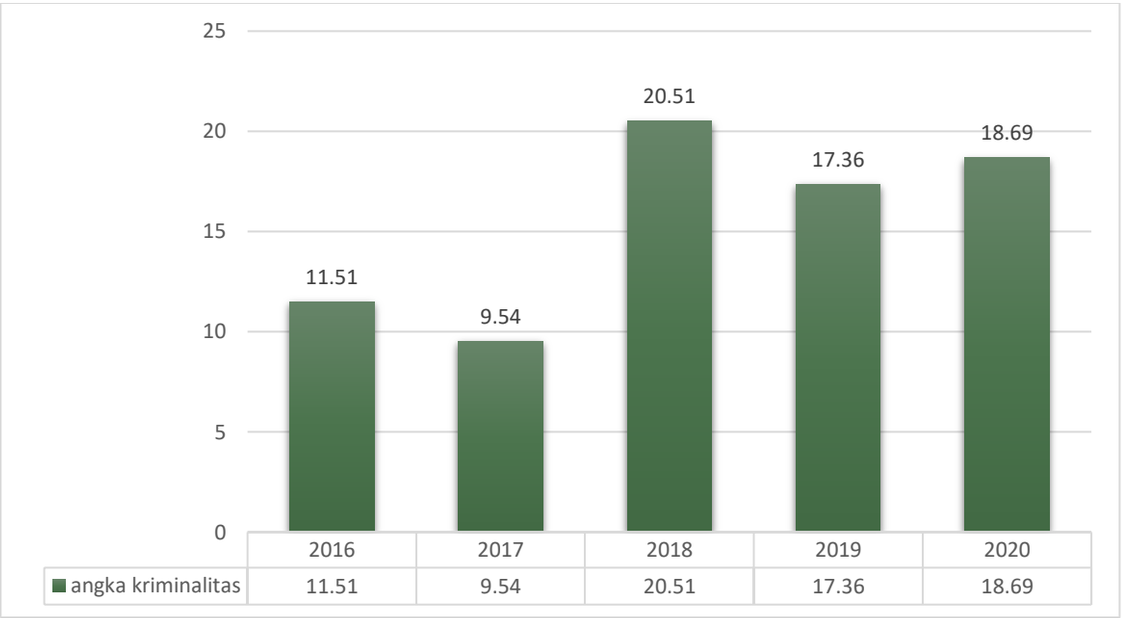

Gambar 2.58 Angka Kriminalitas di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

2.3.1.6 Sosial

Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Salah satu indikator urusan sosial adalah ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo maupun panti rehabilitasi. Data Kabupaten Asahan menunjukan bahwa selama tahun 2015-2018 ketersediaan sarana sosial cenderung stabil pada tahun 2015 persentase ketersediaan sarana sosial mencapai 80 persen. Akan tetapi, turun menjadi 60 persen di tahun 2016. Persentase ketersediaan sarana sosial tersebut tidak mengalami perubahan hingga pada tahun 2018.

Tabel 2.61 Persentase Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Asahan, 2015-2018

Tahun	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (%)
2015	80
2016	60
2017	60
2018	60

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2019

Penangangan Penyandang Masalah Kesejahtaraan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan dalam bentuk pendataan, pembinaan, pemberian bantuan dana, pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial dan pemulangan ke tempat asal atau keluarga PMKS. Berdasarkan data tahun 2016-2020

persentase penanganan PMKS cenderung mengalami peningkatan seperti terlihat pada Gambar 2.59. Pada tahun 2016, persentase penanganan mencapai 73,08 persen. Persentase ini meningkat dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2017-2018 dengan besaran persentase masing-masing sebesar 76,92 persen di tahun 2017, dan 80,77 di tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019 persentase penanganan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 80,77 persen, selanjutnya mengalami peningkatan ditahun 2020 mencapai 84,62 persen.

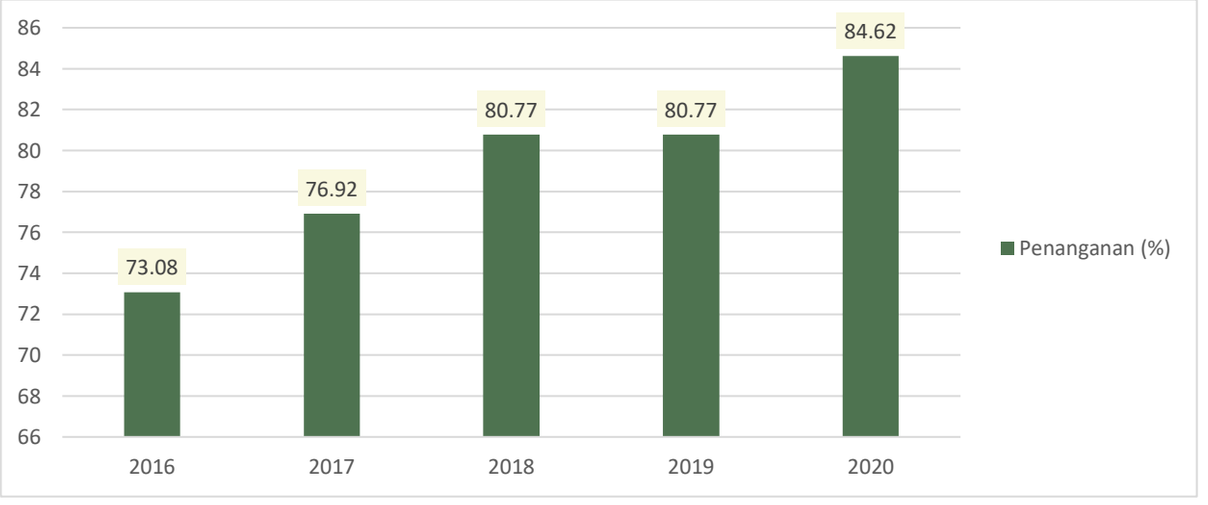

Gambar 2.59 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial

Salah satu cara penanganan PMKS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan adalah dengan memberikan bantuan sosial. Grafik pada Gambar 2.60 menggambarkan bahwa selama tahun 2016-2020 persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2016, persentase indikator ini mencapai 45,45 persen. Kemudian di tahun 2017 meningkat dengan peningkatan terbesar selama periode tersebut yaitu sebesar 10,97 persen, atau menjadi 56,42 persen. Data terakhir di tahun 2018 menunjukan bahwa PMKS yang mendapatkan bantuan sosial mencapai 62,63 persen, dan di tahun 2019 mencapai 64,91 persen. Pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 63,83 persen. Walaupun demikian persentase tersebut belum memenuhi target RPJMD yang mencapai 64 persen.

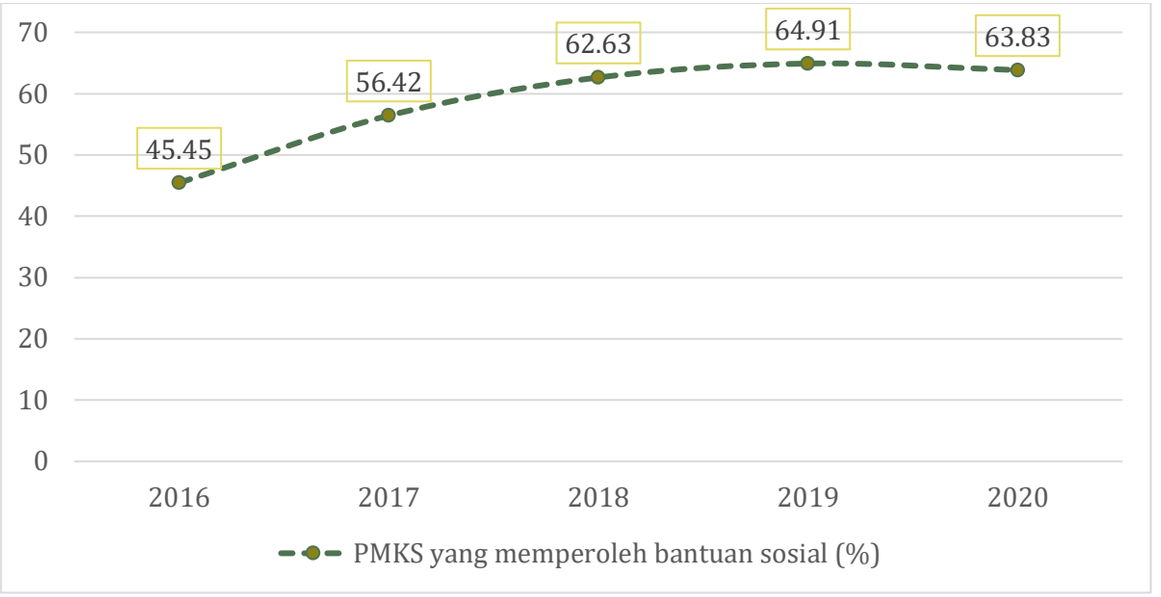

Gambar 2.60 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Bantuan Sosial di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Beberapa masalah muncul disektor ketenagakerjaan, seperti munculnya perselisihan antara pengusaha dan pekerja, perlunya peningkatan kompetensi pekerja, peningkatan cakupan pelayanan tenaga kerja, peningkatan penempatan tenaga kerja, peningkatan kompetensi pekerja yang terampil dan mandiri, serta penurunan rasio ketergantungan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terkait ketenagakerjaan bagi para penduduk. Menghadapi masalah dan tantangan tersebut memerlukan kebijakan pemerintah sebagai bentuk perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Selama kurun waktu empat tahun dari 2016-2020, tercatat jika angka perselisihan pengusaha dengan pekerja cenderung stagnan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.61. Terdapat 40 kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama pada tahun 2016 dan tahun 2017, namun kembali naik menjadi 50 kasus pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Pengelolaan kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama ini dapat terwujud apabila terdapat peningkatan kompetensi yang dilakukan terhadap tenaga kerja di Kabupaten Asahan.

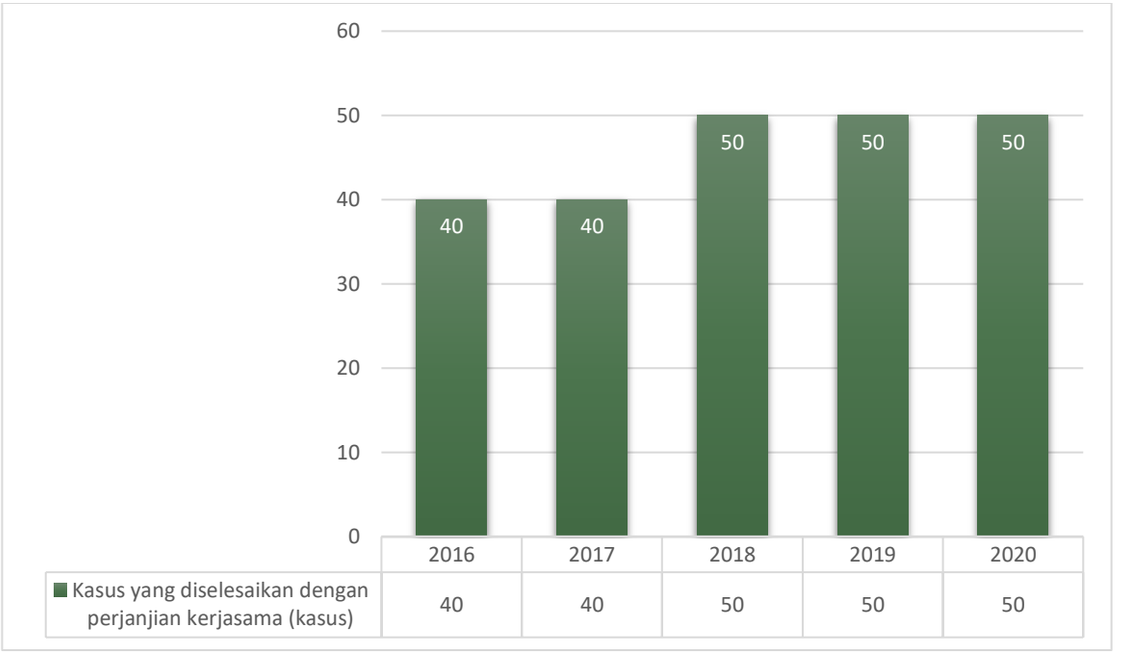

Gambar 2.61 Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja mendefinisikan penempatan tenaga kerja sebagai proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Pelayanan penempatan tenaga kerja merupakan kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya. Pasal 3 ayat (1) menyatakan jika penempatan tenaga kerja bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian, keterampilan, minat, bakat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Intervensi pemerintah diperlukan dalam tindakan pelayanan penempatan tenaga kerja sehingga memberikan kemudahan bagi para pencari kerja dan para pemberi kerja. Adapun pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan maupun lembaga swasta yang berbadan hukum.

Gambar 2.62 menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2020, Kabupaten Asahan secara konsisten mencatat kenaikan cakupan pelayanan penempatan tenaga kerja. Sebanyak 367 jiwa mendapatkan pelayanan tersebut pada tahun 2016, disusul menjadi 650 jiwa pada tahun 2017 dan 670 jiwa pada tahun 2018. Cakupan pelayanan penempatan tenaga kerja

tertinggi berhasil dicatat pada tahun 2019 sebanyak 952 jiwa. Namun ditahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi 410 jiwa.

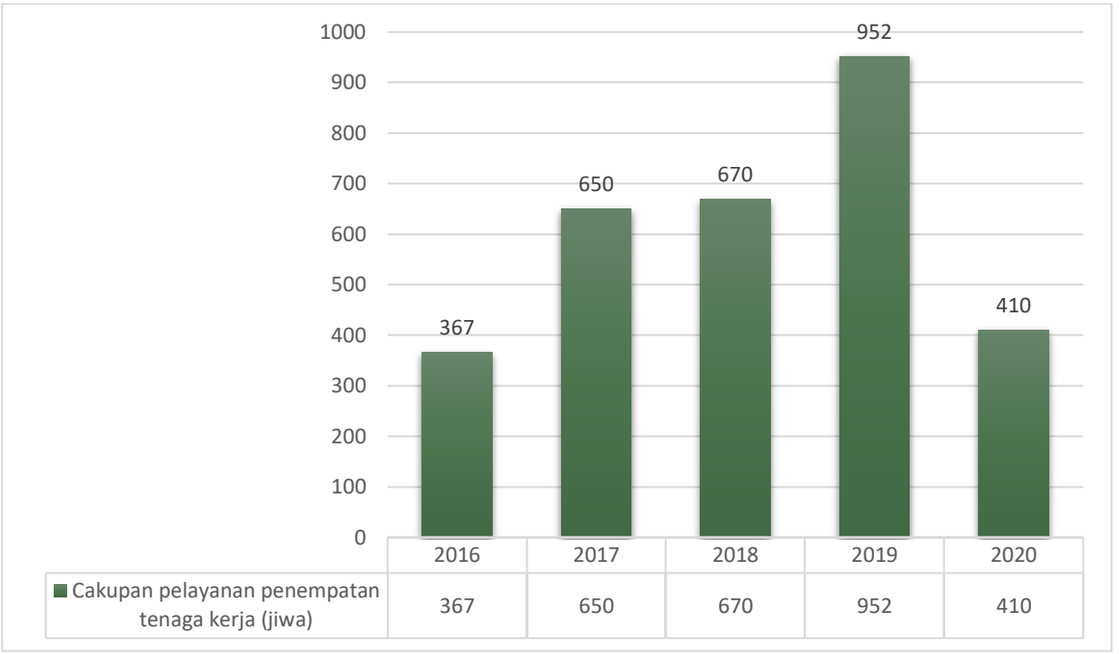

Gambar 2.62 Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Asahan (Jiwa), 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Rasio pencari kerja yang ditempatkan merupakan indikator yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja. Selama kurun waktu empat tahun, Kabupaten Asahan mencatat kenaikan rasio pada 2016-2020 seperti terlihat pada Gambar 2.63. Pada tahun 2016, rasio penempatan tenaga kerja sebesar 64,95 persen, naik menjadi 139,25 persen pada tahun 2017. Namun, angka rasio tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 42,62 persen, pada tahun 2019 menjadi 37,38 persen dan meningkat ditahun 2020 menjadi 45,5 persen.



Gambar 2.63 Rasio Penempatan Tenaga Kerja dalam Persen di Kabupaten Asahan 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Pemerintah Kabupaten Asahan memberikan pelayanan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat menciptakan tenaga kerja terampil dan mandiri. Data pada Gambar 2.64. menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah tenaga kerja yang terampil dan mandiri pada tahun 2016-2019 secara konsisten. Sebanyak 64 jiwa merupakan tenaga kerja terampil dan mandiri di Kabupaten Asahan pada tahun 2016, naik menjadi 150 jiwa pada tahun 2017. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 10 jiwa menjadi 140 jiwa pada tahun 2018, dan menurun menjadi 80 jiwa ditahun 2019.



Gambar 2.64 Terciptanya Tenaga Kerja Terampil dan Mandiri di Kabupaten Asahan (Jiwa), 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2019

Perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (yang mana kedua kategori penduduk tersebut disebut sebagai bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (yang disebut sebagai angkatan kerja) merupakan perhitungan dari rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, apakah daerah tersebut tergolong maju atau tergolong daerah yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan, maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Namun, apabila rasio ketergantungan semakin rendah, maka semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Seperti terlihat pada Gambar 2.65., rasio ketergantungan di Kabupaten Asahan pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mencapai 52,12 persen. Artinya, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap sebagai penduduk produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 58 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi di Kabupaten Asahan. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 56,50 persen dan pada tahun 2020 menurun menjadi 48,84 persen.

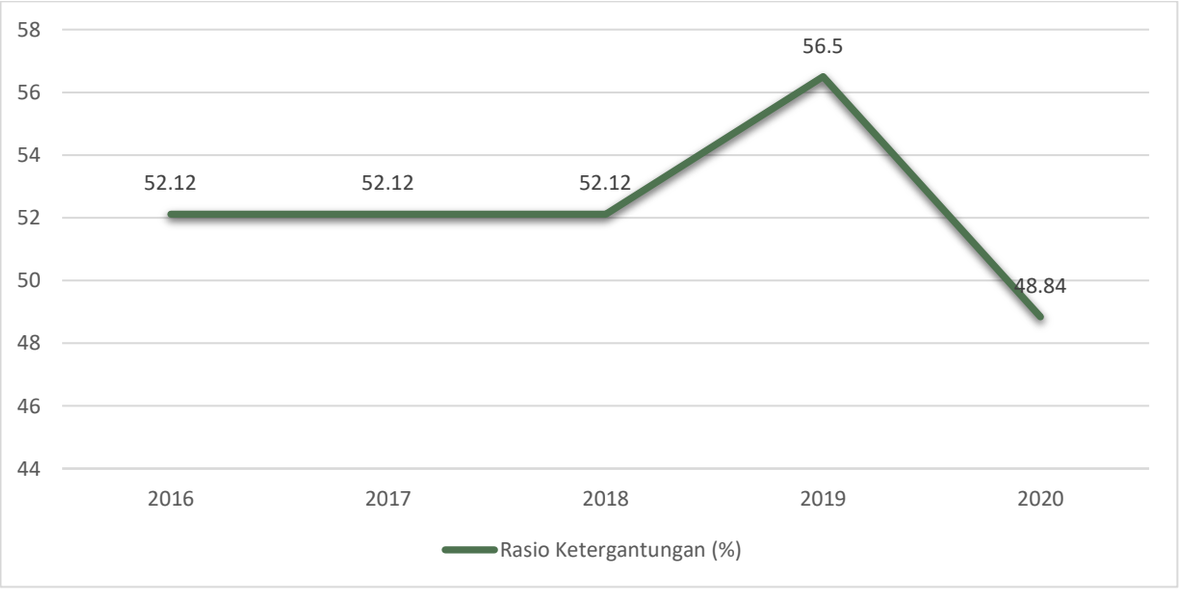

Gambar 2.65 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Asahan (%), 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Perlunya pembinaan perusahaan adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai bagi dua pihak, yaitu para pencari kerja dan para pemberi kerja. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat perselisihan antara pencari kerja, pekerja, dan pemberi kerja. Terdapat 80 buah perusahaan yang dibina oleh pemerintah Kabupaten Asahan pada tahun 2016. Jumlah ini menurun drastis pada tahun 2017 menjadi 25 buah perusahaan. Pada tahun 2018, jumlah tersebut kembali naik menjadi 54 buah perusahaan, dan kembali mengalami penurunan menjadi 15 perusahaan ditahun 2019 dan tahun 2020. Grafik jumlah perusahaan yang dibina di Kabupaten Asahan pada periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.66.

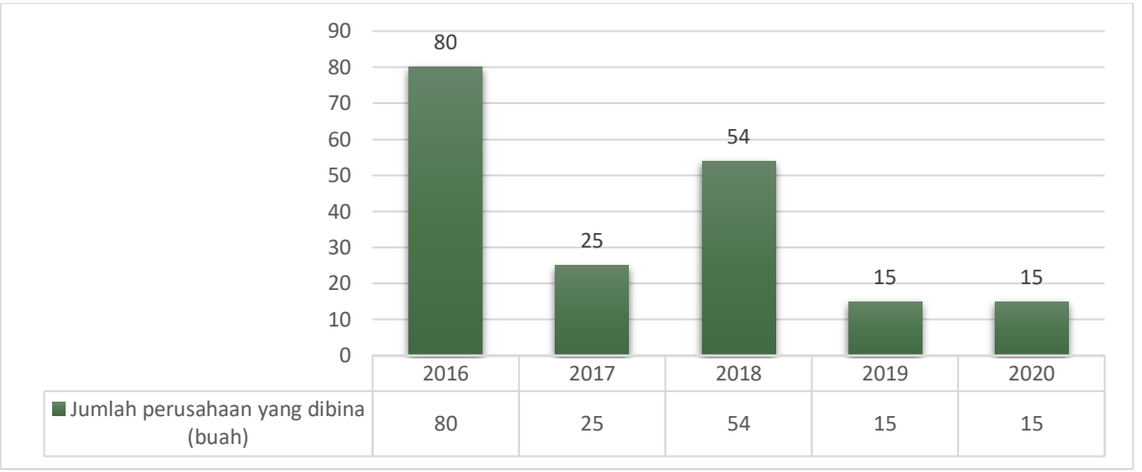

Gambar 2.66 Jumlah Perusahaan yang Dibina di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Selain itu, pemerintah Kabupaten Asahan memiliki kewajiban untuk memastikan agar setiap perusahaan yang beroperasi patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan. Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Asahan, diketahui jika sebanyak 25 persen perusahaan di Kabupaten Asahan pada kurun waktu tahun 2018-2019 yang mematuhi peraturan perusahaan. Hal ini tentu memerlukan dorongan sehingga angka persentase tersebut dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun. Tentu saja hal tersebut akan menciptakan kegiatan perusahaan yang tertib peraturan ketenagakerjaan.

2.3.2.2Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan daerah membutuhkan dukungan dari tiga pilar utama, yaitu pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat secara umum dapat menunjang terlaksananya pembangunan daerah. Adapun lembaga swasta berperan untuk melaksanakan urusan-urusan masyarakat yang belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah. Peran lembaga swasta dalam menyerap tenaga kerja perempuan di Kabupaten Asahan tampak meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2016-2020 seperti terlihat pada Gambar 2.67. Bahkan, peran perempuan di lembaga swasta tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan peran perempuan di lembaga pemerintahan selama kurun waktu tersebut.

Di Kabupaten Asahan, terlihat jika persentase partisipasi perempuan di lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, cenderung mengalami kenaikan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2016 sebesar 56,71. Namun, terjadi penurunan drastis persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun pada tahun 2017 menjadi 45,33 persen. Pada tahun berikutnya, tercatat kembali terjadi kenaikan menjadi 49,04 persen (2018), 65,49 persen (2019) dan 67,78 (2020).

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta pada tahun 2026 sebesar 56,71 selanjutnya cenderung meningkat sampai tahun 2019 mencapai 71,85. Namun pada tahun 2020 menurun drastic menjadi 34,08.

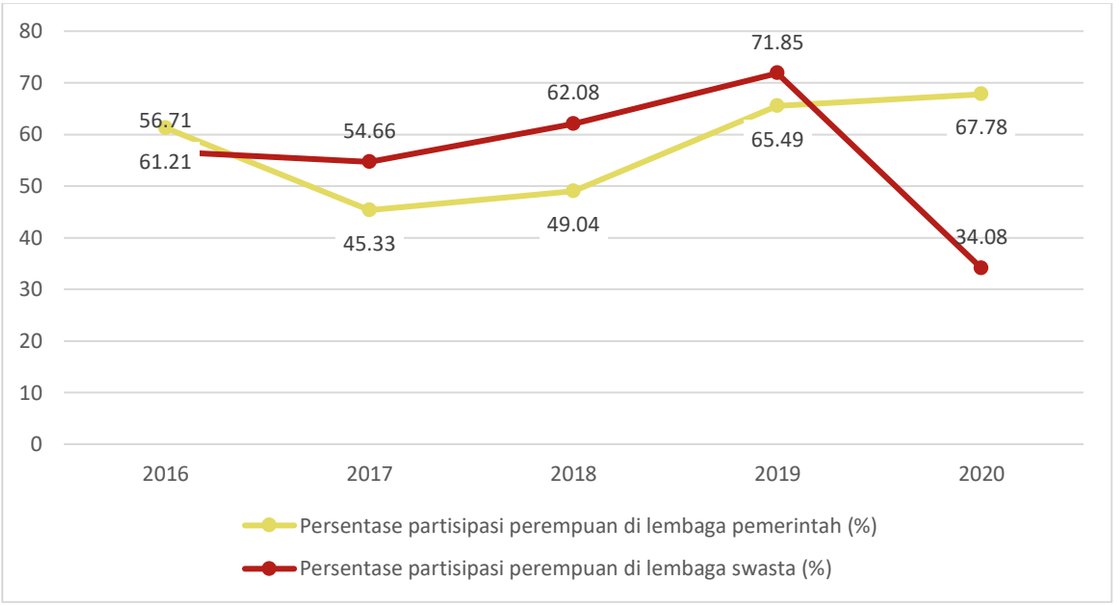

Gambar 2.67 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta di Kabupaten Asahan, 2015-2019

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2020

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Asahan dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan drastis seperti data yang disajikan pada Gambar 2.68. Rasio sebesar 0,024 persen terjadi pada tahun 2015, meningkat pada tahun 2016 menjadi 0,113 persen. Pada tahun 2017, terjadi penurunan rasio menjadi 0,0071 persen dan sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,008 persen pada tahun 2018. Namun, terjadi lonjakan drastis pada tahun 2019 di mana rasio KDRT di Kabupaten Asahan mencapai angka 0,51 persen.

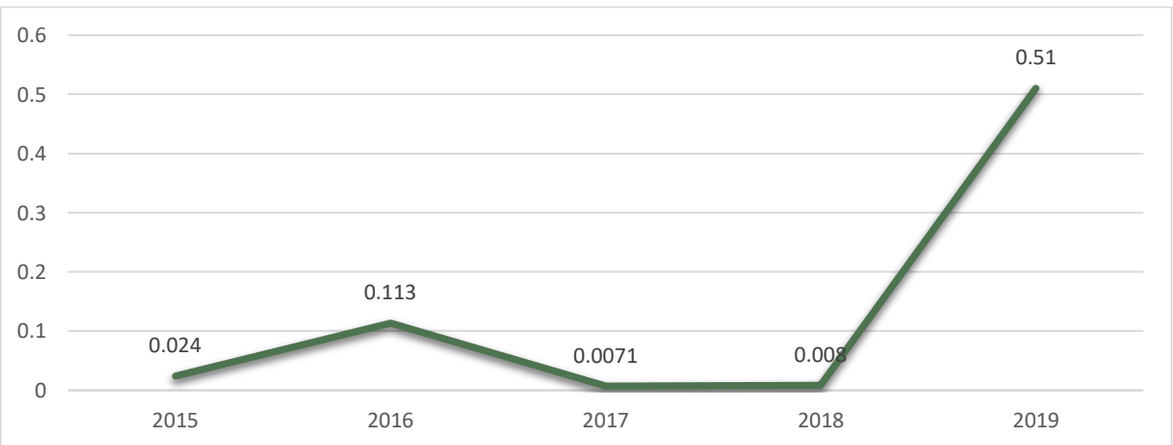

Gambar 2.68 Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Asahan, 2015-2019

Sumber: Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2019

Permasalahan KDRT yang terjadi di Kabupaten Asahan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Terbukti, dari tahun ke tahun, angka penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan semakin meningkat. Data pada Gambar 2.69 menunjukkan bahwa 68 persen pengaduan perlindungan dan anak diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Asahan pada tahun 2015. Pada tahun 2016, angka tersebut naik menjadi 118 persen. Artinya, meski tidak ada pengaduan perlindungan perempuan dan anak, namun pemerintah Kabupaten Asahan melakukan inisiatif guna mencegah hal tersebut terjadi. Meski mengalami penurunan pada tahun 2017, namun secara konsisten pemerintah Kabupaten Asahan mampu menyelesaikan pengaduan perlindungan perempuan dan anak hingga tahun 2019. Hal tersebut dibuktikan dengan angka 100 persen penyelesaian sejak tahun 2017 hingga 2019.

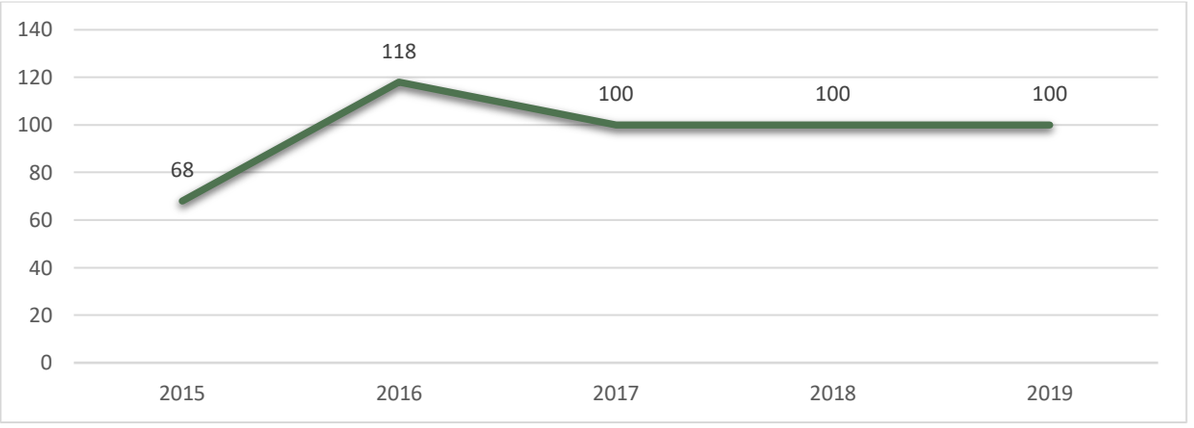

Gambar 2.69 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Asahan (%), 2015-2019

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2020

Penyelesaian kasus KDRT serta kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan di Kabupaten Asahan secara konsisten mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2018. Kondisi tersebut terpotret pada grafik yang disajikan pada Gambar 2.70. Pada tahun 2015, terdapat 200 kasus yang terselesaikan. Sebanyak 158 kasus dan 43 kasus terselesaikan pada tahun 2016 dan 2017. Jumlah kasus terselesaikan paling sedikit sebanyak 19 kasus, terjadi pada tahun 2018. Hal tersebut diharapkan sebanding dengan jumlah aduan KDRT serta kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan di Kabupaten Asahan.

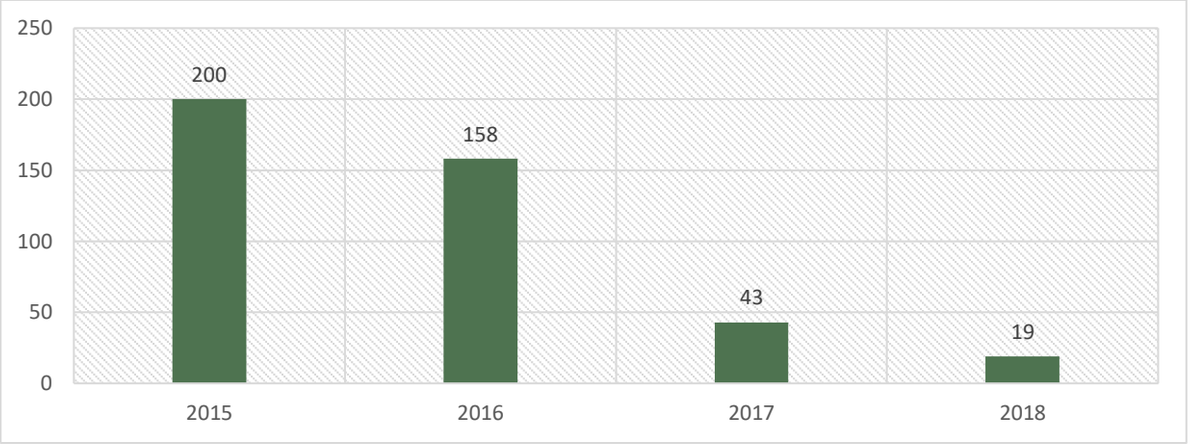

Gambar 2.70 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terlaporkan Terselesaikan di Kabupaten Asahan (Kasus), 2015-2018

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2019

Pembinaan terhadap lembaga perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Asahan untuk menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak. Jumlah lembaga yang terbina pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebanyak masing-masing Berdasarkan data pada Gambar 2.71, terdapat 10 lembaga terbina pada tahun 2015-2016 dan kemudian meningkat menjadi 12 lembaga pada tahun 2017. Data yang tercatat terakhir pada tahun 2018 terdapat 15 lembaga yang terbina di Kabupaten Asahan.

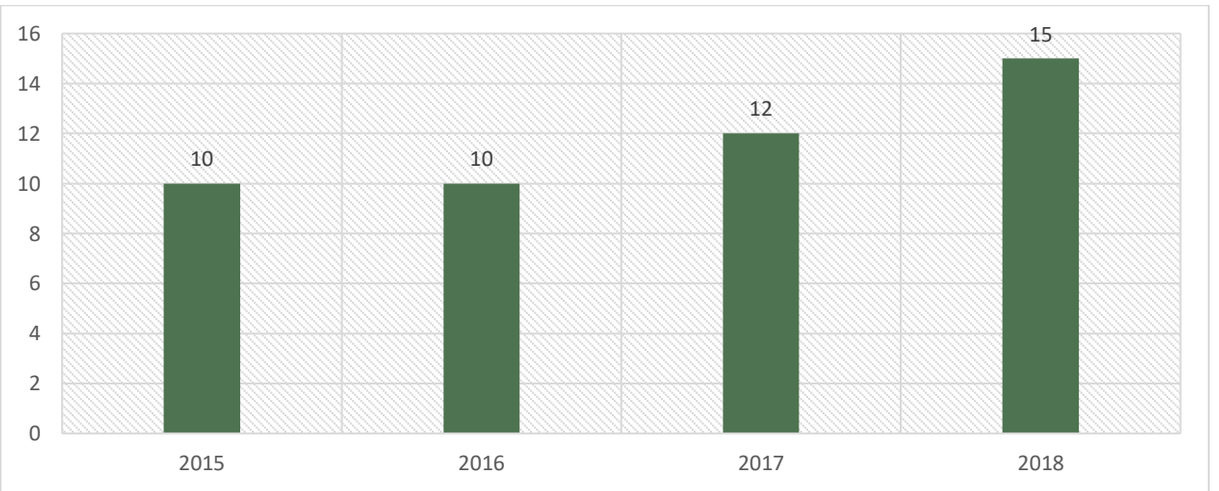

Gambar 2.71 Jumlah Lembaga yang Terbina di Kabupaten Asahan, 2015-2018

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2019

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional. Strategi PUG membutuhkan komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan seluruh pegawai sehingga terwujud pemerintahan yang bertanggung jawab. Kualitas penyelenggaraan PUG membutuhkan keberlanjutan, pelestarian, dan pengembangan yang konsisten. Menanggapi hal tersebut,

Pemerintah Kabupaten Asahan tercatat melakukan masing-masing enam kali pembinaan PUG pada tahun 2016 dan 2017. Kegiatan pembinaan PUG tersebut ditingkatkan menjadi tujuh kali pada tahun 2018 dan delapan kali pada tahun 2019. Jumlah tersebut tergambar dalam grafik yang disajikan pada Gambar 2.72.

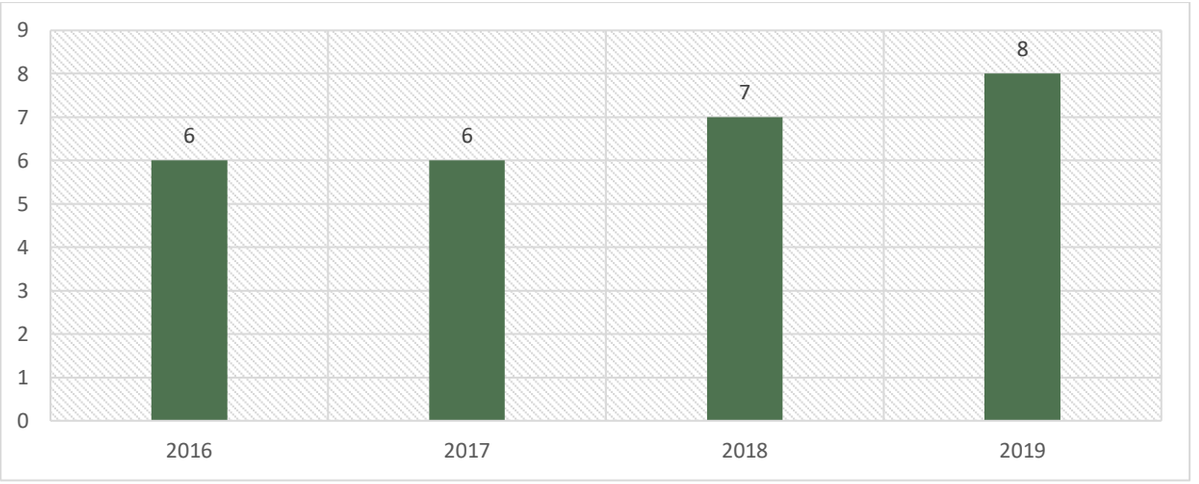

Gambar 2.72 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Asahan, 2016-2019

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan keluarga, diperlukan kegiatan positif yang dapat dilakukan, baik di dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Data yang disajikan pada Gambar 2.73 menunjukkan bahwa terdapat 20 kelompok kegiatan keluarga dan kelompok usaha keluarga yang tercatat pada tahun 2015 di Kabupaten Asahan. Jumlah kelompok tersebut meningkat pada tahun 2016-2018 di mana masing-masing tahun menunjukkan terdapat 41 kelompok. Namun, jumlah kelompok tersebut berkurang menjadi 21 kelompok pada tahun 2019.

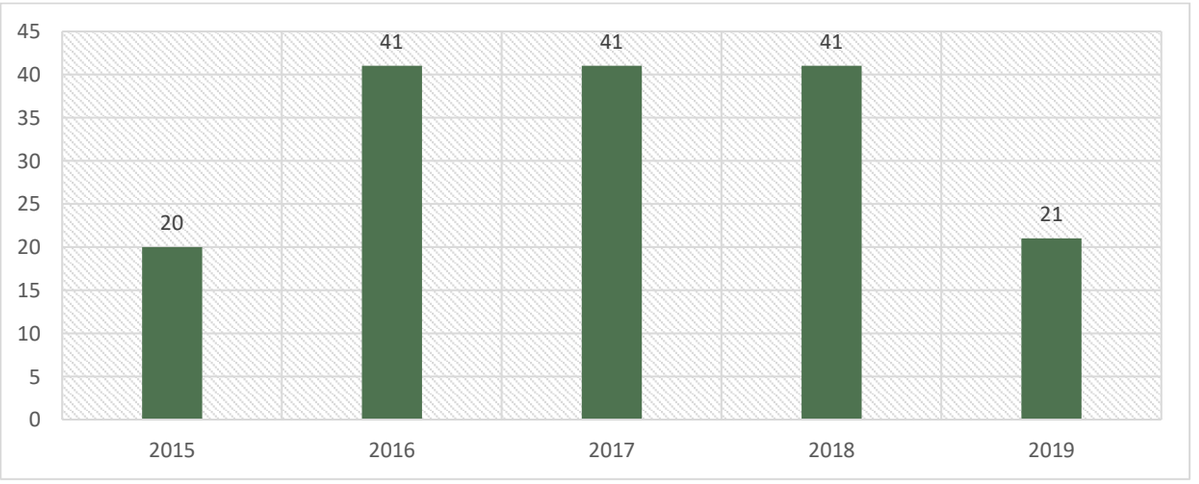

Gambar 2.73 Jumlah Kelompok Kegiatan Keluarga dan Kelompok Usaha Keluarga di Kabupaten Asahan, 2015-2019

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2020

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. Dalam hal pembangunan manusia sering dibahas mengenai perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

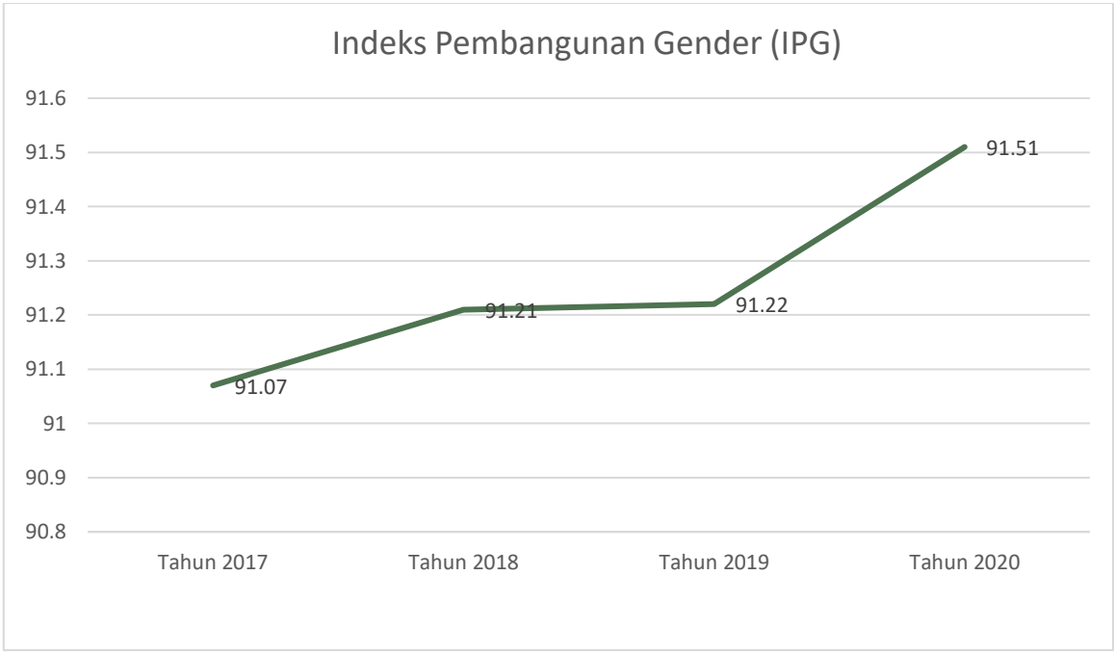

Gambar 2.74 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Asahan, 2017-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan

Berdasarkan data di atas, perkembangan IPG sejak tahun 2017 sebesar 91,07 menunjukkan peningkatan hingga pada tahun 2020 mencapai 91,51. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Asahan pada Tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari 60,44 pada tahun 2017 menjadi 69,1 pada tahun 2019, namun menurun pada tahun 2020 menjadi 67,48.

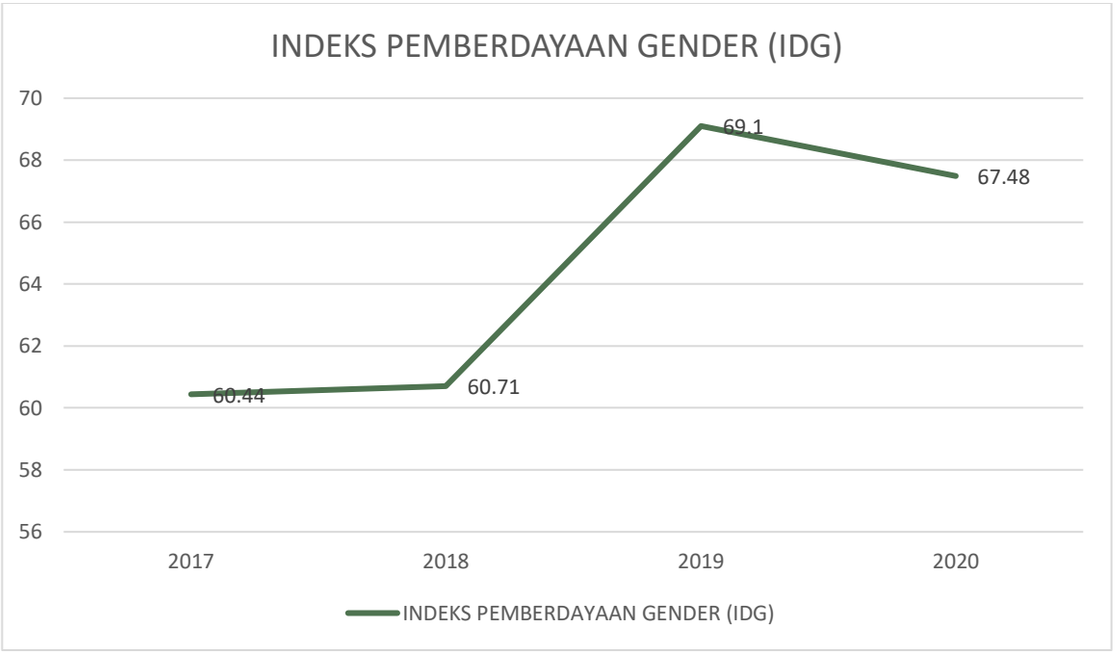

Gambar 2.75 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Asahan, 2017-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan

2.3.2.3 Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan pangan menjadi kebutuhan hidup yang tidak dapat digantikan. Ketersediaan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah daerah. Beras merupakan komoditas pangan utama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di Kabupaten Asahan. Berdasarkan data pada Gambar 2.76, terlihat bahwa selama kurun waktu 2016-2020, kebutuhan konsumsi beras seluruh penduduk Kabupaten Asahan relatif stabil, berkisar pada 71.052-79.471 ton per tahun. Namun, kebutuhan pangan utama pada tahun 2016 lebih tinggi dari ketersediaan pangan utamanya. Pada tahun 2017-2019, kebutuhan konsumsi beras seluruh penduduk mulai tercukupi karena ketersediaan pangan di Kabupaten Asahan masing-masing mencapai 76.173 ton, 87.016 ton, dan 76.094 ton. Sedangkan pada tahun 2020 ketersediaan pangan utama Kabupaten Asahan kembali menurun akibat pandemi covid-19 sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Asahan.

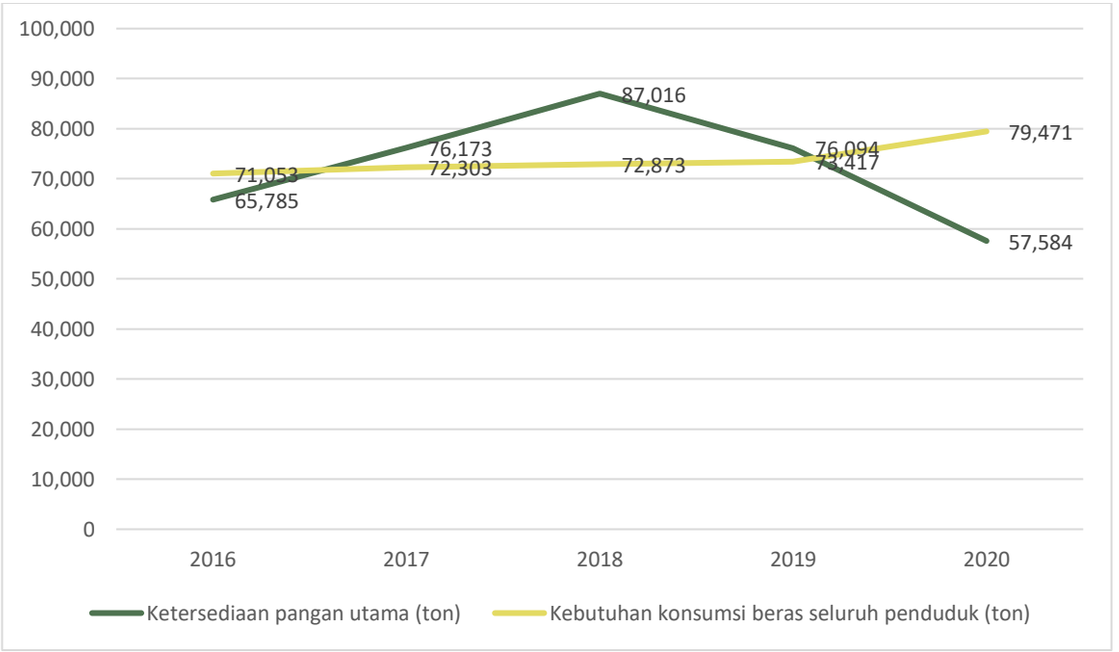

Gambar 2.76 Ketersediaan Pangan Utama dan Kebutuhan Konsumsi Penduduk di Kabupaten Asahan (Ton), 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Konsumsi makanan, baik kalori atau protein, merupakan kegiatan konsumsi yang dihitung jumlah kalori atau protein yang memang benar-benar dikonsumsi oleh seseorang per harinya. Rata-rata, laki-laki membutuhkan asupan sebanyak 2.500 kalori per hari, sedangkan perempuan membutuhkan asupan sebanyak 2.000 kalo per hari. Untuk memenuhi kebutuhan kalori masyarakat, maka diperlukan ketersediaan pangan di Kabupaten Asahan. Kebutuhan konsumsi beras penduduk di Kabupaten Asahan pada tahun 2016-2020 masing-masing sebanyak 100,60 kilogram per kapita per tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, konsumsi bahan pokok nasional pada tahun 2016 mencapai 124,89 kilogram per kapita per tahun dan pada tahun 2017 mencapai 111,58 kilogram per kapita per tahun. Artinya, konsumsi bahan pokok di Kabupaten Asahan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan konsumsi bahan pokok nasional.

Kebutuhan konsumsi beras ditunjang dengan ketersediaan lahan di wilayah Kabupaten Asahan. Untuk mencukupi kebutuhan beras tersebut, dibutuhkan luas lahan yang cukup. Di Kabupaten Asahan sendiri, terdapat lahan seluas 10 hektar yang digunakan untuk menanam padi bersertifikat. Areal lahan tersebut memiliki luasan yang tetap selama tahun 2016-2020. Artinya, setiap tahun Kabupaten Asahan memiliki lahan seluas 10 hektar tersebut yang digunakan untuk memproduksi beras dari padi bersertifikat. Luas lahan tersebut tidak mengalami penambahan maupun pengurangan selama kurun waktu tersebut.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Salah satu perwujudan ketersediaan pangan tersebut, merujuk pada undang-undang, adalah dengan menilai kecukupan gizi, baik kecukupan gizi dalam bentuk energi dan protein maupun keberagaman ketersediaan gizi. Keanekaragaman ketersediaan konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Indikator kuantitatif tersebut diimplementasikan dalam Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Di Provinsi Sumatera Utara, skor PPH dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan secara konsisten. Skor PPH pada tahun 2016 adalah sebesar 85,70, naik menjadi 88,50 (2017), 89,10 (2018), 89,60 (2019), dan mengalami penurunan sebesar 83,77 (2020). Adapun skor PPH di Kabupaten Asahan pada tahun 2016-2019 juga terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 mencapai 84,6, kemudian naik menjadi 85,6 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar mencapai 86,10 dan 89,20. Pada tahun 2020 tidak dilakukan perhitungan skor PPH. Berbeda dengan data menurut Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, dalam dokumen Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 tercatat bahwa skor PPH Kabupaten Asahan mencapai 73,45 pada tahun 2018 atau di bawah skor PPH Provinsi Sumatera Utara. Dengan skor tersebut, Kabupaten Asahan menempati peringkat 202 dari 416 kabupaten di Indonesia. Namun demikian, baik menurut dokumen LKPJ Bupati maupun Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, skor PPH Kabupaten Asahan masih dibawah Provinsi Sumatera Utara, sehingga perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

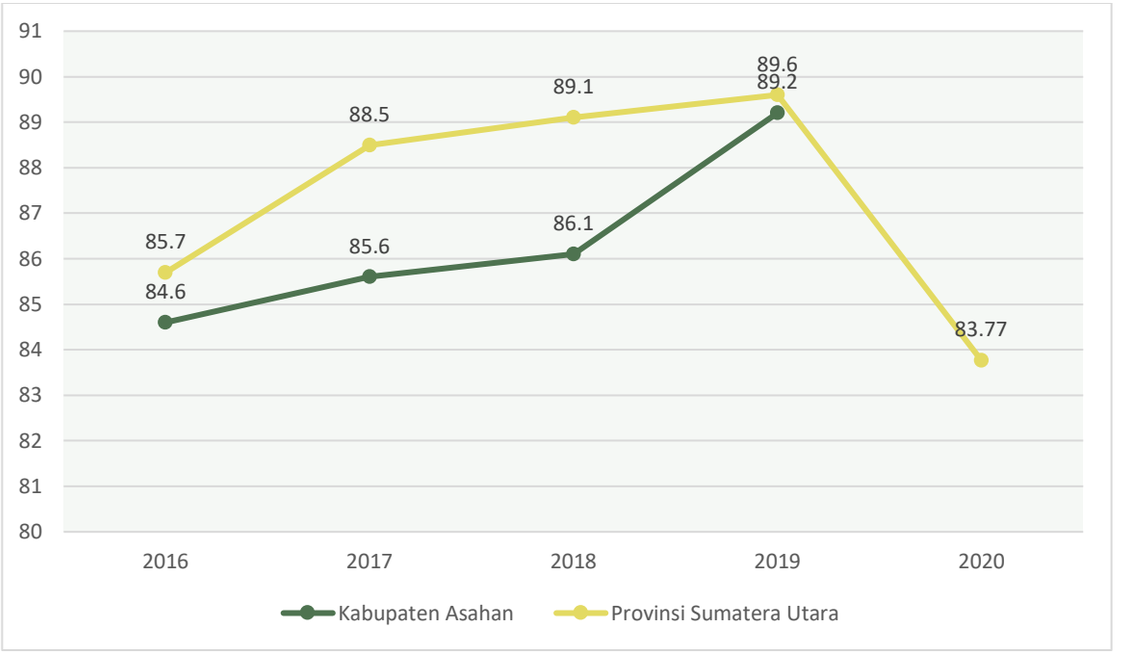

Gambar 2.77 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2019, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan 2016-2020

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat dimana setiap penduduk memiliki akses untuk memperolehnya, baik akses secara fisik maupun ekonomi. Ketahanan pangan dipengaruhi oleh faktor ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi pangan, serta akses fisik dan ekonomi bagi penduduk untuk memperoleh pangan. Konsep ketahanan pangan Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Menurunnya ketahanan pangan sering disebut sebagai kondisi rawan pangan, baik kondisi rawan pangan bersifat kronis maupun sementara. Rawan pangan sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan penduduk untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk menunjang hidup sehat dan beraktivitas dengan baik untuk sementara waktu dalam jangka panjang. Kondisi tersebut dapat disajikan dalam angka rawan pangan. Angka rawan pangan sendiri didapatkan dari jumlah kalori yang dikonsumsi oleh setiap orang per kapita per harinya. Apabila didapatkan jika angka tersebut kurang dari 1.400 kilo kalori, maka termasuk dalam kategori angka rawan pangan. Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan tahun 2018, dari 204 desa di Kabupaten Asahan dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok prioritas yaitu 6 desa pada Prioritas 1 atau sebesar 2,94 persen, 7 desa masuk dalam Prioritas 2 yakni sebesar 3,4 persen, 8 desa dalam Prioritas 3 atau sebesar 3,9

persen, dan 183 desa masuk ke dalam kelompok Prioritas 4 yakni mencapai 89,7 persen. Sementara pada tahun 2019 tidak dilakukan survey terhadap desa rawan pangan di Kabupaten Asahan. Selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan analisis komposit mengalami penurunan ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan serta pemanfaatan pangan dan gizi. Kondisi desa rawan pangan pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

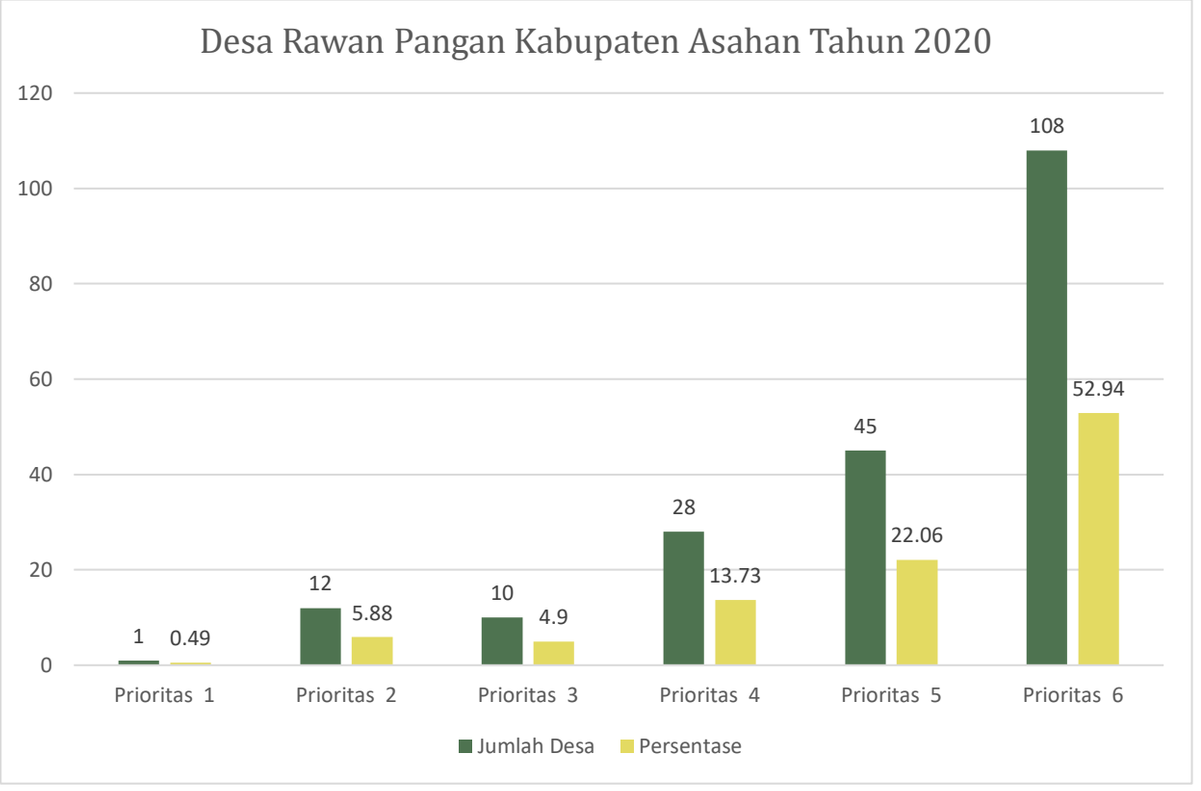

Gambar 2.78 Angka Rawan Pangan Kabupaten Asahan Tahun 2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Asahan, 2020.

Pada tahun 2017-2020 Pemerintah Kabupaten Asahan telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penanganan daerah rawan pangan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.62 Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Kegiatan	Volume	Jumlah Desa
1.	2017	Pemberian Bantuan untuk Peningkatan Gizi Balita	47 Balita	43 Desa

No.	Tahun	Kegiatan	Volume	Jumlah Desa
		Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan	6 ekor sapi, 11 ekor Kambing	4 Desa
2.	2018	Pemberian Bantuan untuk Peningkatan Gizi Balita	40 Balita	30 Desa
		Pemberian Bantuan Bahan Pangan di Daerah Rawan Pangan	75 KK	8 Desa
		Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan	17 ekor Kambing	1 Desa
3.	2019	Pemberian Bantuan untuk Peningkatan Gizi Balita	40 Balita	37 Desa
		Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan Kab. Asahan	150 ekor domba (1 Klmpk 25 ekor domba yang dapat bantuan ada 6 klmpk) 100 ekor kambing (1 kelompk 50 ekor kambing yang	8 Desa

No.	Tahun	Kegiatan	Volume	Jumlah Desa
			menerima bantuan 2 klmpk	
4.	2020	Pemberian Bantuan untuk Peningkatan Gizi Balita	40 Balita	30 Desa

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Asahan, 2020.

Ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Asahan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 energi perkapita di Kabupaten Asahan sebesar 2.948 kalori, tahun 2017 sebesar 2.371, tahun 2018 sebesar 3.616 dan pada tahun 2019 menjadi 1.438. Untuk ketersediaan protein perkapita di Kabupaten Asahan dari tahun 2016-2019 juga mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 sebesar 101,57, tahun 2017 sebesar 72,43, tahun 2018 sebesar 98,37 dan tahun 2019 menjadi 50,84. Sedangkan untuk ketersediaan lemak perkapita di Kabupaten Asahan dari tahun 2016-2019 juga mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 sebesar 45,17, tahun 2017 sebesar 43,48, tahun 2018 sebesar 126,60 dan tahun 2019 menjadi 33,98. Untuk perhitungan angka di Tahun 2020 dilakukan pada tahun 2021 dengan mempedomani angka tetap produksi bahan pangan di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.63 Ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Asahan Tahun 2016-2019

No.	TAHUN	ENERGI (KALORI)	PROTEIN (GR)	LEMAK (GR)
1	2016	2.948	101,57	45,17
2	2017	2.371	72,43	43,48
3	2018	3.616	98,37	126,60
4	2019	1.438	50,84	33,98

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Asahan, 2020.

Keberhasilan petani dalam memproduksi pangan di suatu daerah ditunjang oleh keberadaan penyuluh lapangan sebagai tenaga terampil. Jumlah penyuluh lapangan di Kabupaten Asahan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti terlihat pada Gambar 2.79. Tercatat ada 144 orang penyuluh lapangan pada tahun 2016. Jumlah tersebut meningkat 13 orang menjadi 157 orang pada tahun 2017. Namun, jumlah penyuluh yang dimiliki Kabupaten Asahan menurun dalam kurun 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2018

kembali menjadi 144 orang, tahun 2019 menjadi 139 orang dan pada tahun 2020 menjadi 133 orang

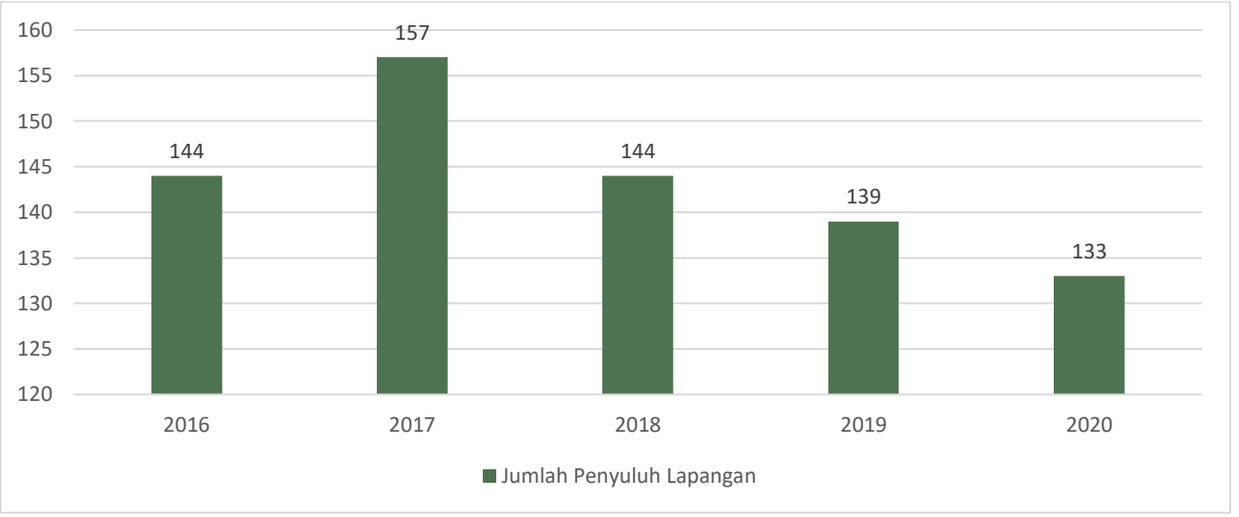

Gambar 2.79 Jumlah Penyuluh Lapangan dalam Jiwa di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Keberadaan penyuluh tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam mengelola pertaniannya. Tentu dibutuhkan jumlah penyuluh pertanian yang cukup. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mensyaratkan rasio satu desa satu penyuluh pertanian. Artinya, secara ideal, terdapat satu orang penyuluh pertanian disetiap desa yang bertanggung jawab memberikan pendampingan pertanian kepada para petani. Penyuluh pertanian tersebut dapat dipenuhi melalui penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya dan swasta. Keberadaan penyuluh pertanian dirasa sangat vital karena bertugas untuk mengawal dan mendampingi petani guna memastikan penerapan teknologi maju yang direkomendasikan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, membangun kemitraan dengan para pelaku usaha, akses terhadap modal, mengakses sarana dan prasarana pertanian, serta mengakses pasar. Hal tersebut akan mempengaruhi produktivitas petani, terutama dalam memproduksi bahan pokok. Gambar 2.80 menunjukkan rasio penyuluhan pertanian satu desa satu penyuluh pada tahun 2015-2018. Meski belum mencapai rasio ideal, namun tampak terdapat peningkatan rasio dari tahun ke tahun. Rasio sebesar 0,62 tercatat pada tahun 2015, meningkat menjadi 0,67 (2016), 0,76 (2017), dan 0,85 (2018). Peningkatan tersebut diharapkan terus terjadi sehingga rasio ideal satu desa satu penyuluh pertanian dapat dicapai di Kabupaten Asahan.

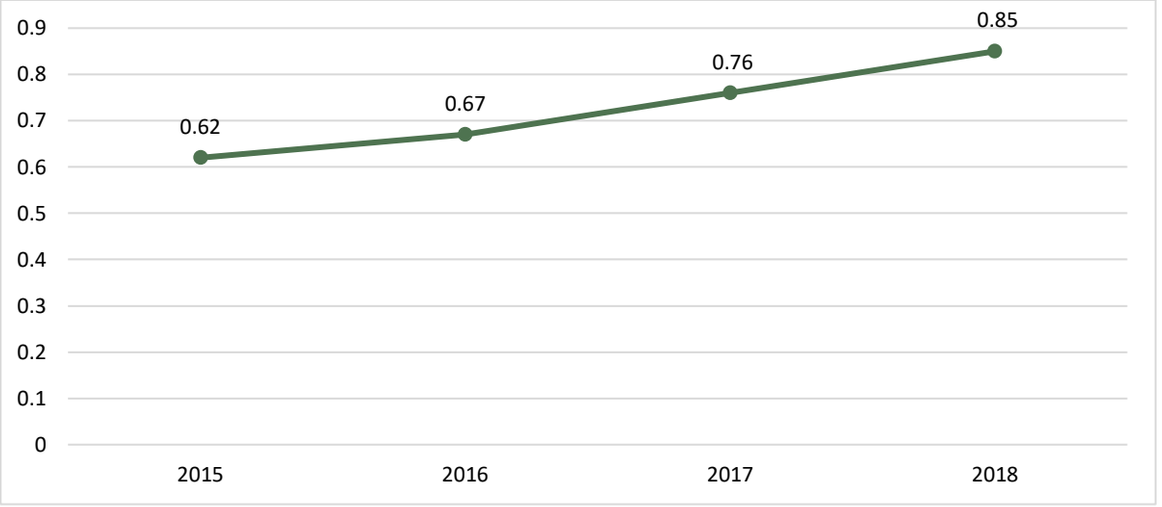

Gambar 2.80 Rasio Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluh di Kabupaten Asahan, 2015-2018

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2018

Kabupaten Asahan tidak memiliki cadangan pangan pada tahun 2020, namun memiliki lumbung pangan yang tersebar di 5 Desa di Kabupaten Asahan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.64 Lumbung Pangan di Kabupaten Asahan Tahun 2020

No.	NAMA LUMBUNG PANGAN	DESA	KECAMATAN
1	LP. MAKMUR	PANCA ARGA	RAWANG PANCA ARGA
2	LP. PALAGUNG	SEI BELURU	MERANTI
3	LP. PINTU AIR	BANJAR	AIR JOMAN
4	LP. MAKMUR	SERDANG	MERANTI
5	LP. MEKAR JAYA	SUKAJADI	MERANTI

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Asahan, 2020.

2.3.2.4 Pertanahan

Jumlah penerbitan sertifikat hak atas tanah menjadi salah satu indikator untuk mengukur bidang pertanahan. Hal tersebut dapat menunjukkan seberapa banyak aset milik daerah yang telah tersertifikasi. Tabel 2.65. menunjukkan jika pemerintah daerah Kabupaten Asahan memiliki tanah seluas 843 hektar yang terdapat dalam 499 sertifikat selama tahun 2016-2020. Terdapat penambahan dua sertifikat pada tahun 2020 sehingga jumlah sertifikat tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Asahan menjadi 501 lembar.

Tabel 2.65 Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Tanah	Sertifikat	Penambahan Sertifikat	Total Sertifikat
1	2016	843	499	0	499

No.	Tahun	Jumlah Tanah	Sertifikat	Penambahan Sertifikat	Total Sertifikat
2	2017	843	499	0	499
3	2018	843	499	0	499
4	2019	843	499	0	499
5	2020	843	499	2	501

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asahan, 2016-2020

Selain sertifikat tanah (aset) yang dimiliki daerah, pemerintah juga memberikan layanan penerbitan sertifikat bagi masyarakat. Jumlah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan di Kabupaten Asahan dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi seperti pada Gambar 2.81. Terdapat 4.742 sertifikat hak atas tanah tercatat pada 2016. Namun menurun pada tahun 2017, jumlah sertifikat menurun menjadi 2.238 sertifikat. Pada tahun berikutnya, terjadi lonjakan jumlah sertifikat, mencapai 7.631 sertifikat. Jumlah tersebut kembali turun pada tahun 2019 menjadi 4.936 sertifikat dan menurun kembali menjadi 1.764 sertifikat pada tahun 2020.

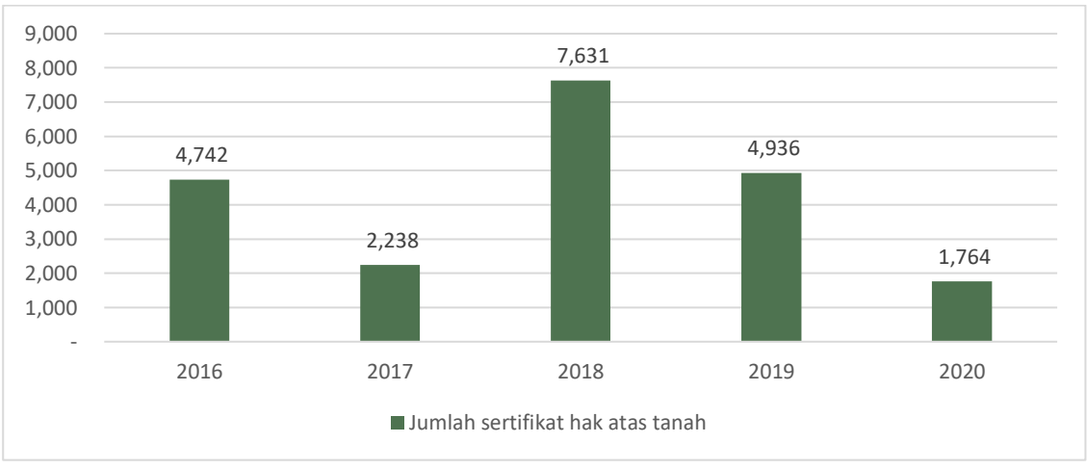

Gambar 2.81 Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Terdapat beberapa jenis sertifikat tanah yang dikeluarkan di wilayah Kabupaten Asahan. Sertifikat tanah yang dikeluarkan tersebut diklasifikasikan menurut jenis hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai.

Seperti disajikan pada Tabel 2.66, jumlah sertifikat tanah yang merupakan hak milik berjumlah paling sedikit 2.066 lembar di tahun 2017 dan terbanyak ada pada tahun 2018 yang berjumlah 7.228 lembar. Rata-rata sertifikat hak milik yang dikeluarkan di Kabupaten Asahan selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebanyak 4.575 lembar per tahun. Hak guna bangunan paling sedikit diterbitkan pada tahun 2016 sebanyak delapan lembar saja dan terbanyak ada pada tahun 2018 sejumlah 385 lembar. Rata-rata hak guna bangunan yang diterbitkan per tahun di Kabupaten Asahan adalah sebanyak 128 lembar. Adapun hak guna

usaha yang tercatat adalah sebanyak 18 lembar pada tahun 2018 dan enam lembar pada tahun 2019. Hak pakai yang diterbitkan paling sedikit adalah tiga lembar pada tahun 2017 dan paling banyak adalah 237 lembar pada tahun 2015. Dari data yang ada, rata-rata penerbitan sertifikat tanah menurut jenis hak atas tanah per tahun mencapai 4.760 lembar dengan jumlah penerbitan terbanyak terjadi pada tahun 2018 sejumlah 7.631 lembar.

Tabel 2.66 Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Hak Milik (lembar)	4.728	2.066	7.228	4.855	1.511
Hak Guna Bangunan (lembar)	8	169	385	62	232
Hak Guna Usaha (lembar)			18	6	-
Hak Pakai (lembar)	6	3	-	13	21
Jumlah (lembar)	4.742	2.238	7.631	4.936	1.764

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, 2017-2021

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup yang ditangani Pemerintah Kabupaten Asahan di antaranya adalah penanganan dan pengurangan sampah. Sejauh ini, pada periode tahun 2015-2019 penanganan sampah yang dilakukan di Kabupaten Asahan sudah relatif cukup baik. Berikut adalah data mengenai capaian penanganan sampah dan limbah di Kabupaten Asahan.

Tabel 2.67 Penanganan Sampah dan Limbah di Kabupaten Asahan 2016-2019

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019
Persentase Penanganan Sampah	%	n.a	n.a	82,00	73,00
Jumlah desa yang dibina terkait pengelolaan sampah konsep 3R *(Reduse, Reuse, Recylce)*	Desa	n.a	n.a	2	4
Penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dan Limbah B3	Dokumen	n.a	n.a	43	47
Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan	Unit	18	20	25	n.a
Pembangunan IPAL	Unit	2	1	1	n.a
Penataan, Pelaksanaan AMDAL, UKL, UPL, SPPL, Pengeloaan B3 dan Limbah	Dokumen	50	50	50	48

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2019

Berdasarkan tabel di atas persentase penanganan sampah di Kabupaten Asahan mengalami penurunan pada tahun 2019 sedangkan jumlah desa yang dibina terkait pengelolaan sampah konsep 3R mengalami peningkatan. Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) cukup stabil dengan adanya pembangunan setiap tahun selama periode tersebut. Secara relatif, capaian tersebut cukup baik namun perlu ada peningkatan agar pelayanan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Asahan semakin baik.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi rujukan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan seperti politik, sosial, dan ekonomi agar tepat sasaran. Pelayanan dokumen kependudukan yang dimaksud diantaranya meliputi pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Kematian. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Asahan.

Tabel 2.68 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Keluarga yang Memiliki KK Per Satuan Keluarga	%	77,90	98,90	100,00	100,00	100,00
Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	%	59,06	55,83	39,85	62,94	75,66
Rasio Kepemilikan KTP Per Wajib KTP	%	83,56	81,7	56,25	90,58	108,81
Rasio Penduduk yang Merekam e-KTP Per Satuan WKTP Pemula	%	45,00	99,60	99,49	99,75	99,77
Rasio Bayi Berakte kelahiran	%	n.a	n.a	84,39	87,45	94,79
Rasio Anak memiliki Akte Kelahiran	%	75,74	74,72	69,51	70,12	91,77
Rasio Pasangan Berakte Nikah dalam Kewenangan Dinas Dukcapil	%	n.a	19,31	25,04	35,90	48,33
Rasio akta kematian dengan jumlah penduduk yang meninggal yang tercatat dalam data base	%	n.a	n.a	17,88	69,57	70,04

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Selama periode tahun 2016-2020, secara umum indikator mengenai capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan indikator rasio keluarga yang memiliki KKper satuan keluarga yang telah mencapai 100 persen. Selanjutnya, rasio bayi berakta kelahiran pada tahun 2020 telah mencapai 94,79 persen. Rasio akta kematian dengan jumlah penduduk yang meninggal yang tercatat dalam data base mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 69,57 persen dan menjadi 70,04 persen pada tahun 2020.

Meskipun sebagian besar indikator mengalami peningkatan setiap tahun, kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil masih perlu terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan kinerja. Pada indikator rasio pasangan berakte nikah meski selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan, namun capaian tersebut masih lebih rendah daripada tahun 2015 yang sebesar 82,20 persen.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Asahan dapat tercermin dalam pelayanan pemerintah desa yang mengalami peningkatan. Beberapa indikator pemberdayaan desa diantaranya, pengelolaan kelompok Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, oragnisasi tingkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Tabel 2.69 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	LPM	0,46	0,53	0,59	n.a	n.a
PKK Aktif	%	100,00	100,00	100,00	n.a	n.a
Jumlah LSM	LSM	232	232,00	230,00	n.a	n.a
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	PKK	0,40	0,45	0,50	n.a	n.a
LPM Berprestasi	%	30,39	37,17	42,65	n.a	n.a
Posyandu Aktif	%	100,00	100,00	100,00	n.a	n.a

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kemampuan mengelola keuangan desa	Desa	27,00	56,00	86,00	n.a	n.a
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	17,07	21,03	29,64	n.a	n.a
Jumlah Desa yang mampu mengelola keuangan desa tepat waktu	Desa	n.a	n.a	86,00	115,00	150,00
Persentase jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	n.a	n.a	29,64	42,73	57,85
Jumlah Desa yang menghasilkan Pendapatan Asli desa	Desa	n.a	n.a	70,00	100,00	68,00

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Secara umum capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Asahan selama tahun 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik dengan adanya peningkatan disebagian besar indikator yang digunakan diantaranya peningkatan jumlah desa yang mampu mengelola keuangan serata mengahasilkan pendapatan asli desa. Kedua indikator ini penting guna menunjukkan tingkat kemandirian desa.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) diukur dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan capaian peserta KB aktif.

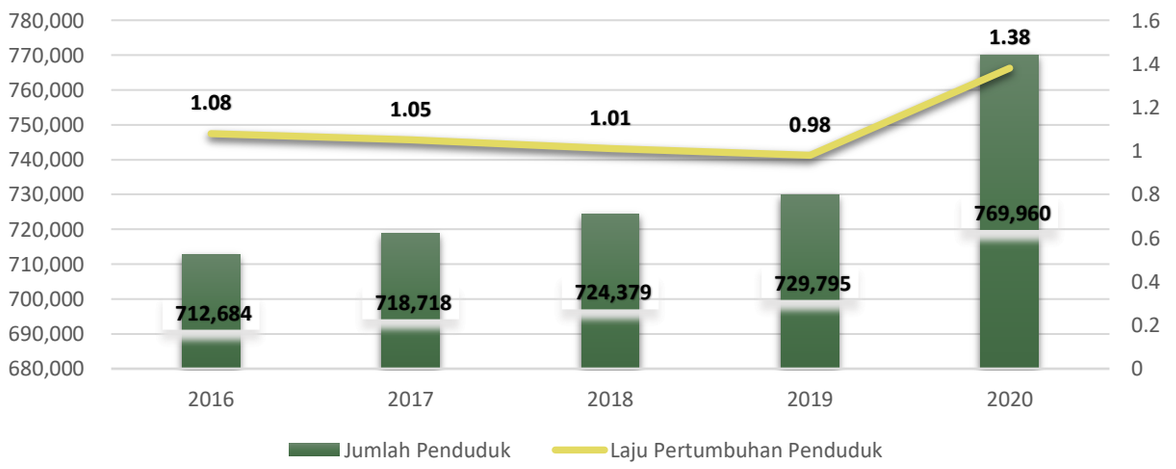

Gambar 2.82 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Asahan, 2015-2019

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2020

Gambar 2.82 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2016-2020, jumlah penduduk Kabupaten Asahan meningkat setiap tahunnya dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 712.684 jiwa meningkat pada tahun 2020 menjadi sebanyak 769.960 jiwa. Di sisi lain, laju petumbuhan penduduk di Kabupaten Asahan pada periode tersebut menurun dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,08 persen menurun menjadi 0,98 persen pada tahun 2019 tetapi meningkat ditahun 2020 menjadi 1,38, sehingga rata-rata laju pertumbuhan per tahunnya sebesar 1,10 persen.

Tabel 2.70 Perkembangan Banyaknya Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu Pembina Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Kecamatan/Tahun	KKB	PPKBD
B. P. Mandoge	2	9
Bandar Pulau	1	10
Aek Songsongan	1	9
Rahuning	1	7
Pulau Rakyat	2	12
Aek Kuasan	1	7
Aek Ledong	1	7
Sei Kepayang	1	6
Sei Kepayang Barat	1	6
Sei Kepayang Timur	1	5
Tanjung Balai	2	8
Simpang Empat	1	8
Teluk Dalam	1	6
Air Batu	2	12
Sei Dadap	2	10
Buntu Pane	3	9
Tinggi Raja	1	7
Setia Janji	1	5
Meranti	1	7
Pulo Bandring	1	10
Rawang Panca Arga	1	7
Air Joman	1	7

Kecamatan/Tahun	KKB	PPKBD
Silau Laut	1	5
Kisaran Barat	3	12
Kisaran Timur	5	13
2015	**60**	**204**
2016	**47**	**204**
2017	**47**	**204**
2018	**41**	**204**
2019	**41**	**204**
2020	**38**	**204**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2021

Jumlah klinik keluarga berencana selama periode tahun 2015-2019 menurun, dari sebanyak 60 unit pada tahun 2015 menjadi sebanyak 38 unit pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah pembantu pembina pelayanan keluarga berencana desa tidak mengalami perubahan selama periode yang tersebut. Jika dilihat berdasarkan pesebarannya, jumlah KKB dan PPKBD hampir tersebar rata di semua kecamatan. Jumlah KKB dan PPKBD paling banyak berada di kecamatan Kisaran Timur berturut-turut sebanyak 5 unit dan 13 unit.

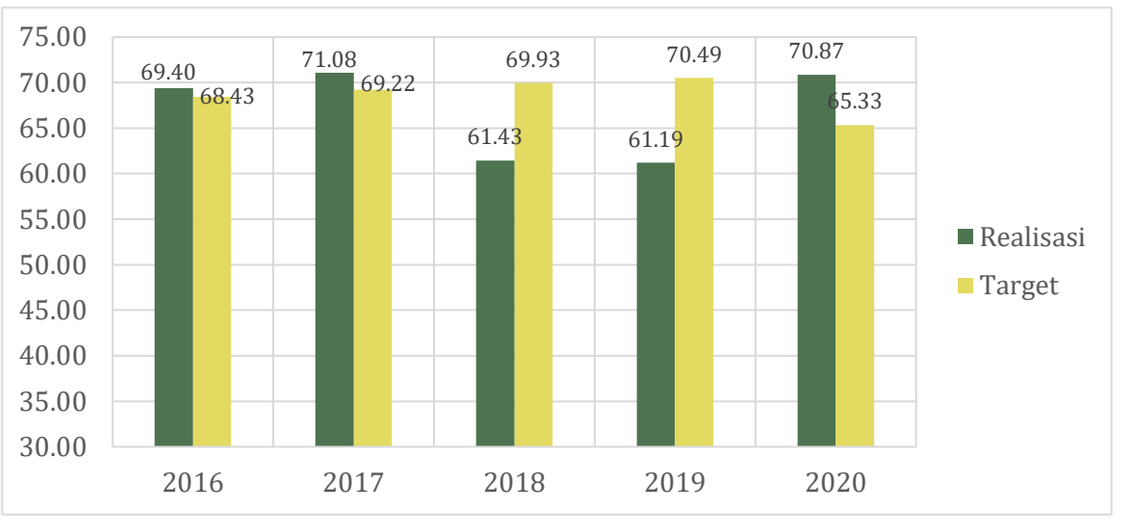

Gambar 2.83 Target dan Realisasi Rasio Akseptor KB

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Asahan, 2016-2020

Rasio Akseptor KB menunjukkan jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Nilai angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Gambar 2.83 memberikan gambaran bahwa pada tahun 2016-2017 realisasi rasio akseptor KB Kabupaten Asahan selalu di atas

target. Akan tetapi, pada tahun 2018-2020, besar realisasi rasio akseptor KB berada cukup jauh di bawah target.

2.3.2.9 Perhubungan

Sesuai dengan kondisi geografis di Kabupaten Asahan yang terdiri dari kawasan pesisir, kawasan dataran, dan kawasan perhubungan, maka pelayanan infrastruktur transportasi di Kabupaten Asahan juga sesuai dengan kondisi yang ada. Secara umum, terdapat tiga jenis sarana transportasi yang melayani masyarakat di Kabupaten Asahan, meliputi terminal bus, stasiun kereta api, dan pelabuhan. Namun demikian, melihat fakta di lapangan yang masih memerlukan pembenahan serius oleh pihak-pihak terkait, maka jelas bahwa tantangan pengembangan serta optimasi keberadaan infrastruktur tersebut perlu segera ditindaklanjuti sehingga pada akhirnya dapat memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.

Terminal bus utama di Kabupaten Asahan berlokasi di Kecamatan Kisaran Barat, yaitu Terminal Madya Kisaran. Semakin berkurangnya pengguna layanan transportasi bus memberikan pengaruh terhadap kondisi dan operasionalisasi terminal, Dengan kondisi tersebut, maka jelas perlu dicari solusi ideal sehingga dapat memberikan implikasi positif baik bagi masyarakat pengguna kendaraan umum maupun pada konteks keberadaan terminal yang membangkitkan perekonomian kawasan sekitarnya.

Dari segi ketersediaan infrastruktur kereta api, Kabupaten Asahan tercatat setidaknya memiliki enam fasilitas stasiun, baik yang dioperasikan sebagai stasiun penumpang maupun stasiun barang seperti terlihat pada Gambar 2.84. Stasiun pusat penumpang di Kabupaten Asahan terletak di Kecamatan Kisaran Barat, yaitu Stasiun KA Kisaran. Lima stasiun lain yang tersebar di sepanjang jalur kereta api yang ada meliputi Stasiun Bunut, Stasiun Henglo, Stasiun Teluk Dalam, Stasiun Puluraja, dan Stasiun Aek Loba. Jaringan KA di Kabupaten Asahan merupakan bagian dari beberapa jalur utama di Sumatera Utara, meliputi Tebing Tinggi – Kisaran, Kisaran – Tanjung Balai, dan Kisaran – Rantau Prapat – Kota Pinang.



Gambar 2.84 Stasiun Kereta Api di Kabupaten Asahan

Sumber: Google earth, diakses pada 2 Agustus 2020

Selain transportasi darat, Kabupaten Asahan juga telah memiliki fasilitas pelabuhan dengan adanya Pelabuhan Perikanan Bagan Asahan. Keberadaan pelabuhan ini menjadi penting mempertimbangkan posisi Kabupaten Asahan yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka sebagai salah satu koridor ekonomi paling potensial pada konteks Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Dengan tingginya potensi perikanan serta konteks posisi yang ada, maka jelas bahwa optimasi pengelolaan sekaligus pengembangan Pelabuhan Bagan Asahan perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Asahan.

Dalam hal target penyelenggaraan aspek pelayanan publik bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, maka teradapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, diantaranya jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio izin trayek, jumlah uji KIR, jumlah terminal penumpang serta urusan perhubungan lainnya. Secara umum, seluruh sasaran telah berhasil untuk dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun demikan, beberapa catatan muncul terutama berkaitan dengan implikasi belum beroperasionalnya terminal tipe C di Kabupaten Asahan pada periode tahun 2016-2019 sehingga membuat target beberapa sasaran yang berkaitan menjadi tidak terpenuhi.

Tabel 2.71 Laporan Kinerja Aspek Pelayanan Umum Bidang Perhubungan Kabupaten Asahan, 2016-2019

No	Sasaran	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Arus	3.300.120	0	0	n.a.
2	Rasio ijin trayek	%	0,000350	0,000354	0,000417	n.a.
3	Jumlah uji KIR kendaraan wajib uji	Bh	4.171	4.113	4.397	n.a.
4	Jumlah terminal penumpang	Bh	1	1	1	n.a.
5	Cakupan Pemasanganan rambu-rambu lalulintas	%	16,33	14,7	14,7	n.a.
6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum	Bln	6	6	6	n.a.
7	Biaya Pengujian Kelaikan Angkutan Umum	Rp	50.000	50.000	50.000	n.a.
8	Jumlah pelaksanaan sosialisasi ketertiban dan keselamatan berlalu lintas pada tahun n	Kali	1	1	1	n.a.
9	Persentase penerbitan dokumen kapal dibawah 7GT	%	15	0	n.a.	n.a.
10	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan	%	n.a.	n.a.	n.a.	77.32
11	Persentase Angka Korban Kecelakaan Fatal	%	n.a.	n.a.	n.a.	13.3
12	Persentase jalan kewenangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	75

No	Sasaran	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
	Kabupaten dengan 0,60<V/C<0,70					
13	Angkutan Umum yang lulus uji persyaratan teknis dan laik jalan	%	n.a.	n.a.	n.a.	100

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2019

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Penyediaan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Asahan saat ini sebagian besar masih sangat mengandalkan keberadaan jaringan internet sehingga diperlukan pengembangan berkaitan dengan cakupan jangkauan pelayanan melalui pembangunan menara BTS di seluruh wilayah kecamatan. Dalam hal program pengembangannya, saat ini tengah diinisiasi adanya program internet mandiri sehingga ke depan dapat mengakselerasi akses internet di seluruh wilayah desa. Secara faktual, memang saat ini masih terdapat wilayah-wilayah desa di Kabupaten Asahan yang belum terjangkau layanan akses internet.

Pada aspek yang lain, melihat dari sasaran strategis bidang telekomunikasi oleh Dinas teknis terkait pada tahun 2018, maka dapat dilihat adanya proses pembangunan yang sudah selaras dengan target yang ditetapkan. Beberapa sasaran yang bersifat teknis diantaranya adalah tetap diperhatikannya keberadaan radio lokal sebagai bagian dari media komunikasi masyarakat dan tercatat masih ada sekitar 7 radio lokal di Kabupaten Asahan. Selain itu, target ketersediaan akses internet di Kabupaten Asahan melalui terpenuhinya jumlah bandwidh juga sudah sesuai dengan target, bahkan melebihi dari yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada aspek lain, pemanfaatan aplikasi e-goverment di Kabupaten Asahan juga telah berjalan positif sehingga penting untuk terus dipertahankan atau ditingkatkan sehingga mempermudah upaya pelayanan kepada masyarakat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya dan meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Asahan mulai tahun 2018 mengikuti evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE), dimana pada tahun 2018 mendapatkan nilai Indeks 1,15 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,93 dengan predikat Cukup.

Tabel 2.72 Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan Tahun 2018-2020

NO	SASARAN	INDIKATOR	2018			2019			2020		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Persentase Kinerja dan Kerja Sama dengan Pihak Terkait Dalam Bidang Komunikasi, Penginformasi dan Media Massa	76,5	76,5	100	82,4	82,4	100	88,2	88,2	100
2	Terwujudnya pelayanan informasi bagi masyarakat	Ketersediaan radio lokal (bh)	7	7	100	7	7	100	7	7	100
3	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya bidang teknologi dan komunikasi	Ketersediaan website milik pemerintah (bh)	1	1	100	1	1	100	1	1	100
4	Ketersediaan akses internet di Kabupaten Asahan	(Jumlah Bandwidh)	250	300	120	300	550	183,3	300	920	306,7
5	Ketersediaan system informasi Kabupaten Asahan yang berbasis tekhnologi	Jumlah aplikasi e-government Kab.Asahan	6	9	150	7	22	314,3	7	18	257,1

Sumber: LKJ Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, 2021

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu unit perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan kosep gotong royong. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM atau usaha informal adalah bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

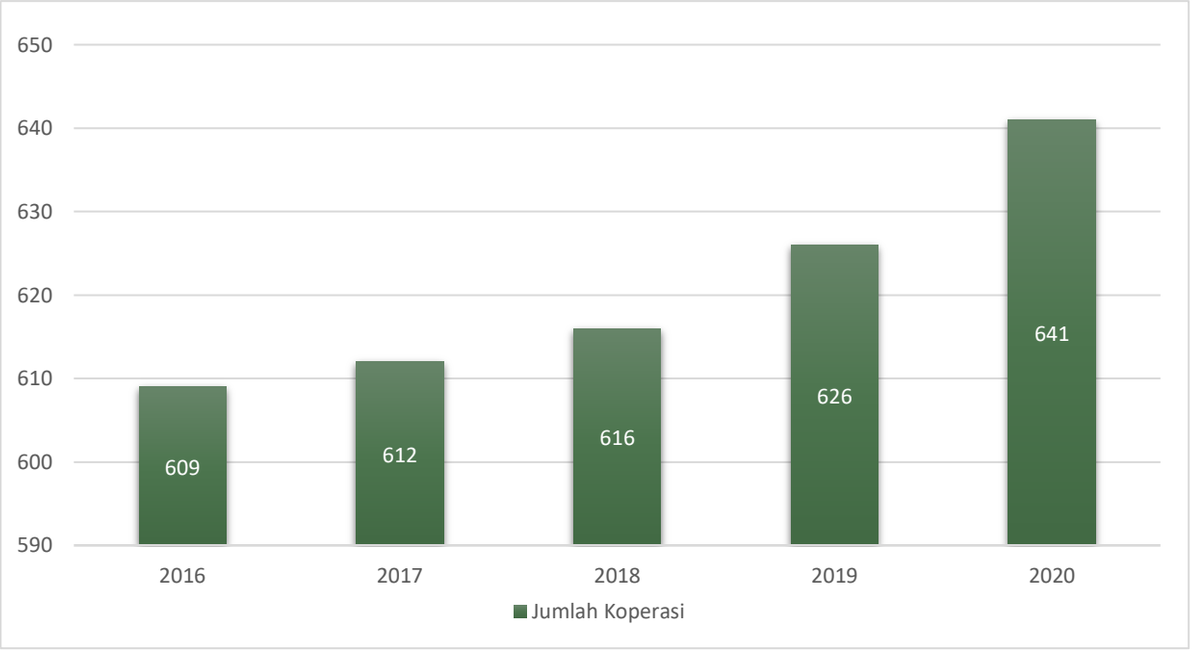

Gambar 2.85 Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2020

Gambar 2.85 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016-2020, jumlah koperasi di Kabupaten Asahan secara keseluruhan terus meningkat. Pada tahun 2016 jumlah koperasi sebanyak 609 unit meningkat menjadi 641 unit pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut persebaran koperasi menurut jenis ditunjukkan oleh gambar 2.86 berikut.

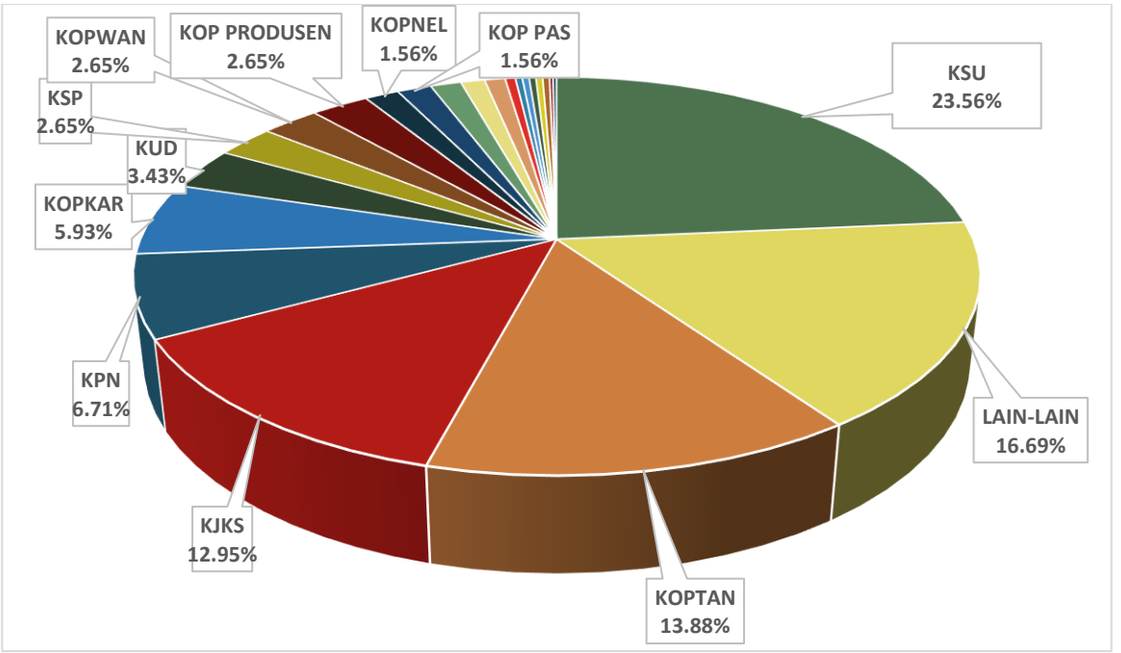

Gambar 2.86 Persentase Koperasi Menurut Jenis, 2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Pada tahun 2020, dari total 626 unit koperasi didominasi Koperasi Serba Usaha (KSU) sebanyak 23,56 persen. Selanjutnya sebanyak 13,88 persen berbentuk koperasi tani, 12,95 persen berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Meski jumlah unit koperasi terus meningkat, namun pada periode yang sama, jumlah anggota koperasi cenderung mengalami penurunan, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.87. Pada tahun 2016 jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan dari sebelumnya sebanyak 37.420 orang pada tahun 2015 menjadi 39.261 orang. Selanjutnya selama empat tahun selanjutnya, jumlah anggota koperasi mengalami penurunan hingga menjadi sebanyak 37.953 orang pada tahun 2020. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang per orang, bukan beranggoakan modal. Oleh karena itu, maka peran anggota koperasi sudah semestinya merupakan hal utama, pertama dan terus harus ditingkatkan untuk kemajuan usaha koperasi.



Gambar 2.87 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan. 2016-2020

Dari sisi volume usaha, Gambar 2.88 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016-2019 terjadi peningkatan volume yang signifikan. Pada tahun 2016 volume usaha koperasi total di Kabupaten Asahan sebesar 14078 milyar rupiah meningkat meningkat menjadi 148,99 milyar rupiah pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 148,18 milyar.

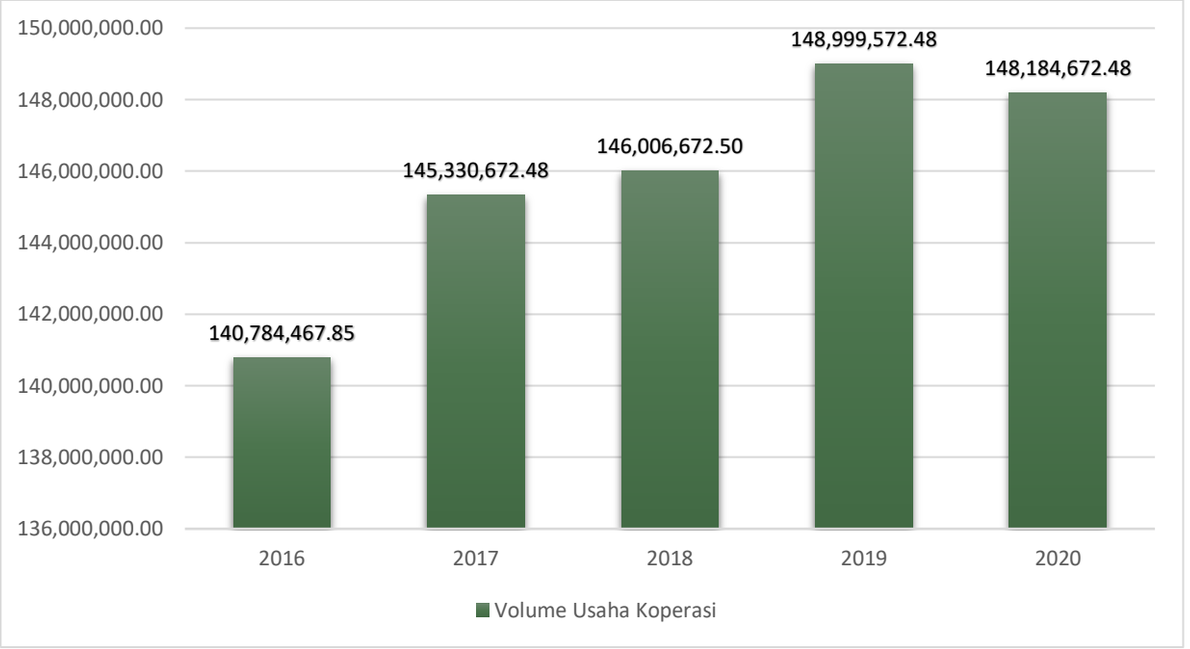

Gambar 2.88 Perkembangan Volume Usaha Koperasi di Kabupaten Asahan, 2015-2019 (Juta Rupiah), 2016-2020
(Ribu Rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2020

2.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk mengarahkan potensi ekonomi lokal, penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi salah satu urusan yang dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kabupaten Asahan.

Penanaman modal sendiri dapat dibedakan menjadi Penamanan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PDMN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedangkan PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah Investor

Menurut data lima tahun terakhir jumlah investor di Kabupaten Asahan cenderung meningkat baik itu investor PMA, PMDN, maupun investor berskala perusahaan non PMDN. Pada tahun 2015, jumlah investor PMA di Kabupaten Asahan sebanyak 7 perusahan, PMDN

14 perusahaan, dan investor non PMDN mencapai 420 unit. Terjadi peningkatan di tahun 2016 sehingga investor PMA mencapai 9 perusahaan, PMDN 16 perusahaan, dan investor non PMDN menjadi 470 unit. Pada tahun 2017 jumlah investor PMA tidak mengalami perubahan, sedangakan investor PMDN dan non PMDN meningkat masing-masing menjadi 18 investor dan 489 investor. Pada tahun 2018, investor PMA bertambah 1 perusahaan, investor PMDN sebanyak 5 perusahaan, dan investor non PMDN naik sebanyak 35 investor. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah investor PMA mencapai 11 perusahaan, PMDN sebanyak 35 perusahaan, dan investor non PMDN mencapai 609 unit. Pada tahun 2020, jumlah investor PMA mencapai 11 perusahaan, PMDN mengalami peningkatan sebanyak 12 perusahaan menjadi 47 perusahaan, namun Non PMDN mengalami penurunan sebanyak 219 perusahaan menjadi 390 perusahaan.

Tabel 2.73 Jumlah Investor di Kabupaten Asahan, 2015-2020

Jumlah Investor	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Unit/Perusahaan					
Berskala Nasional untuk PMA	7	9	9	10	11	11
Jumlah Investor Berskala Nasional untuk PMDN	14	16	18	23	35	47
Jumlah Investor Berskala Perusahaan Non PMDN	420	470	489	604	609	390

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2020

Jumlah Investasi

Selain jumlah investor, jumlah investasi di Kabupaten Asahan dalam lima tahun terakhir juga cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah investasi PMDN sebesar 7,60 Trilyun rupiah. Pada tahun 2016 jumlah investasi PMDN tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, pada tahun 2017 dan tahun 2019 jumlah investasi PMDN kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 8,10 Trilyun rupiah pada tahun 2017, 9,20 Trilyun rupiah pada tahun 2018, 11,9 Trilyun rupiah pada tahun 2019 dan mengalami penurunan sebesar 10,3 Triliun pada tahun 2020. Demikian pula dengan jumlah investasi PMA yang juga mengalami peningkatan setiap tahun, dari sebelumnya sebanyak US$ 121 juta naik hingga mencapai US$ 198 juta pada tahun 2018, US$ 199 juta pada tahun 2019, dan US$ 200,8 juta pada tahun 2020 . Peningkatan terbesar terjadi di tahun 2018 yaitu mencapai US$

70,50 juta dari tahun sebelumnya. Sedangkan peningkatan terkecil di tahun 2019 yaitu sebanyak US$ 1 juta.

Tabel 2.74 Jumlah Investasi PMDN dan PMA, 2015-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
PMDN (Triliun RP)	7,60	8,10	9,20	11,9	10,3
PMA (Juta US$)	125,00	127,50	198,00	199,00	200,8

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2020

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pada dasarnya kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, kepemimpinan serta profesionalitas.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja selain milik swasta, jumlah atlet pelajar berprestasi, dan jumlah olah raga unggulan. Data tentang bidang urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Asahan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.75 Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Asahan, 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi	69	67	69	69	69
2.	Jumlah Organisasi Olah Raga	Organisasi	24	22	24	29	29
3.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Kali	25	23	25	28	1

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
4.	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Kali	25	23	26	29	2
5.	Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	Unit	7	7	7	7	7
6.	Jumlah atlet pelajar berprestasi	Orang	17	12	24	63	0
7.	Jumlah cabang Olah Raga Unggulan	Cabang	13	12	13	20	0

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator capaian urusan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Asahan tahun 2016-2020 cenderung stabil, kecuali jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olah raga, jumlah atlet pelajar berprestasi dan jumlah cabang olahraga unggulan. Pada tahun 2016, terdapat 69 organisasi pemuda di Kabupaten Asahan, sempat turun di tahun 2017 sebanyak 2 organisasi, namun kembali menjadi 69 organisasi pada tahun 2020. Jumlah organisasi olah raga pada tahun 2016 yaitu sebanyak 24 organisasi. Pada tahun 2017 turun menjadi 22 organisasi, namun kembali naik menjadi 24 organisasi di tahun 2018 dan naik kembali ditahun 2019 sampai 2020 menjadi sebanyak 29 organisasi olahraga. Jumlah kegiatan kepemudaan cenderung fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2019 kegiatan kepemudaan di tahun 2016 sebanyak 25 kali, ditahun 2017 turun menjadi 23 kali, kembali meningkat ditahun 2018 menjadi sebanyak 25 kali, juga di tahun 2019 meningkat menjadi 28 kali, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi sebesar 1 kali. Jumlah gelanggang/balai remaja yang dimiliki pemda juga tidak berubah selama periode tersebut, yaitu sebanyak 7 unit. Jumlah cabang olah raga unggulan pada tahun 2016 sebanyak 13 cabang olah raga, ditahun 2017 menurun menjadi 12 cabang olahraga dan meningkat kembali ditahun 2018 menjadi 13 cabang olahraga dan pada tahun 2019 menjadi 20 cabang olahraga. Sedangkan jumlah atlet pelajar berprestasi mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 17 orang pada tahun 2016 menjadi 63 orang di tahun 2019, walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2017 yaitu menjadi sebanyak 12 orang. Berbeda dengan jumlah kegiatan olah raga yang juga mengalami penurunan dari 25 kali kegiatan pada tahun 2016, menjadi 23 kegiatan pada tahun 2017, meningkat menjadi 26 kegiatan olahraga pada tahun 2018 dan 29 kegiatan olahraga ditahun 2019. Namun mengalami penurunan drastis hanya 2 kegiatan olahraga pada tahun 2020.

Tabel 2.76 Indikator Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Asahan, 2019

No.	Uraian	Satuan	2019	2020
1.	Jumlah tersangka pemuda terlibat narkoba	orang	85	102
2.	Jumlah pemuda yang berprestasi	orang	178	0
3.	Jumlah wirausaha pemuda	orang	183	195
4.	Jumlah cabang olahraga yang meraih medali	orang	20	0
5.	Jumlah atlet pelajar berprestasi	orang	63	0

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2019

Indikator capaian urusan kepemudaan dan olah raga di tahun 2019 mengalami perubahan, tetapi terdapat satu indikator yang masih dipertahankan yaitu jumlah atlet pelajar berprestasi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya indikator tersebut mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 63 orang. Hal ini sejalan dengan jumlah pemuda yang berprestasi yang mencapai 178 orang, dan jumlah cabang olah raga yang meraih medali sebanyak 20 orang. Namun demikian, jumlah tersangka pemuda yang terlibat narkoba pun relatif tinggi, yaitu sebanyak 85 orang. Untuk jumlah pemuda yang berprestasi, jumlah cabang olahraga yang meraih medali dan jumlah atlet pelajar berprestasi pada tahun 2020 tidak ada dikarenakan kondisi pandemi covid-19 sehingga tidak ada pelaksanaan kejuaraan dibidang pemuda dan olahraga.

2.3.2.14 Statistik

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kabupaten Asahan bekerjasama dengan BPS Kabupaten Asahan dan telah merangkum berbagai statistik Kabupaten Asahan yang merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kabupaten Asahan. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain (1) Buku Kabupaten Dalam Angka; dan (2) Buku PDRB Kabupaten. Penyusunan ketiga buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Buku Kabupaten Asahan Dalam Angka pada dasarnya setiap tahunnya berisi dengan rangkuman statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional. Terkait dengan aktivitas ekonomi, pemerintah Kabupaten Asahan juga menyediakan buku PDRB Kabupaten Asahan menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah Kabupaten Asahan juga menyediakan Buku Statistik Daerah sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan ketersediaan ketiga buku tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini Kabupaten Asahan telah menunjukan kemajuan pesatnya dengan hasil selama periode 2016-2020 rangkuman statistik buku-buku tersebut selalu tersedia. Buku-buku tersebut tersedia dan dapat diakses melalui situs BPS Kabupaten Asahan.

Tabel 2.77 Indikator Capaian Urusan Statistik di Kabupaten Asahan, 2019

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku Statistik Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	-

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2020

2.3.2.15 Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh Perangkat Daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandiaan.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama

antara urusan komunikasi dan informatika dengan Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Asahan.

2.3.2.16 Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan di Kabupaten Asahan dapat diukur dengan indikator jumlah grup kesenian, jumlah gedung, penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, dan juga jumlah organisasi etnis. Namun indikator-indikator tersebut tidak diukur bersamaan selama periode 2015-2018. Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat perubahan indikator capaian urusan kebudayaan. Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama tahun 2015-2018, urusan kebudayaan cenderung stabil, didukung oleh tidak adanya perubahan capaian dari indikator-indikator yang ada. Capaian dari masing-masing indikator tersebut adalah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 2 buah, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 19,23 persen, serta jumlah organisasi etnis sebanyak 14 etnis.

Tabel 2.78 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, Benda Situs, Kawasan Cagar Budaya, dan Jumlah Organisasi Etnis di Kabupaten Asahan, 2015-2018

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	2	2	2	2
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	19,23	19,23	19,23	19,23
3.	Jumlah Organisasi Etnis	Etnis	14	14	14	14

Sumber: LKPJ Bupati Asahan Bupati Kabupaten Asahan 2016-2018

Pada tahun 2018, indikator urusan kebudayaan berubah menjadi jumlah grup kesenian, penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta jumlah gedung kesenian. Pencapaian dari masing-masing indikator sebagai berikut. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk mencapai 1,21. Penyelenggaraan festival seni dan budaya di tahun 2018 sebanyak 27 kali, serta jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk mencapai rasio 0,030.

sedangkan pada tahun 2019, indikator keberhasilan urusan kebudayaan diukur dari jumlah objek tradisi yang dilestarikan yaitu sebanyak 2 unit, dan jumlah objek seni budaya yang dilestarikan sebanyak 4 unit.

2.3.2.17 Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.79 Data Urusan Perpustakaan di Kabupaten Asahan 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan	Unit	148	161	176	176	182
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	82.499	29.850	39.183	39.183	13.921
3.	Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buah	35.050	38.569	40.752	40.752	41.633

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Berdasarkan data dalam LKPJ Bupati Asahan Kabupaten Asahan tahun 2016-2020 terlihat bahwa terdapat indikator yang mengalami peningkatan, namun juga terdapat indikator yang mengalami penurunan. Jumlah perpustakaan pada tahun 2016 mencapai 148 unit, dan terus bertambah setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 mencapai 182 unit perpustakaan. Penambahan jumlah perpustakaan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun yang dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada tahun 2016 jumlah perpustakaan mencapai 82.499 orang, tetapi turun relatif tajam pada tahun 2020 yaitu menjadi sebanyak 13.921 orang. Diperkirakan penurunan ini disebabkan oleh semakin mudahnya akses bacaan melalui internet, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan fisik. Sedangkan jika dilihat dari jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, sepanjang tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan, dari sebanyak 35.050 buku pada tahun 2016 menjadi sebanyak 41.633 buku di tahun 2020.

2.3.2.18 Kearsipan

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan, dapat diukur melalui indikator (i) Pengelolaan arsip secara baku; dan (ii) Peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.80 Data Urusan Kearsipan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengelolaan Arsip Secara Baku	OPD	63	23	33	56	56
2.	Kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	100	300	100	110	-

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Tabel di atas menunjukan bahwa pengelolaan arsip secara baku cenderung menurun dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016, terdapat 63 OPD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku, namun turun cukup signifikan di tahun 2017 menjadi 23 OPD. Pada tahun 2018, kembali meningkat yaitu sebanyak 33 OPD, selanjutnya kembali naik ditahun 2019 dan 2020 menjadi sebanyak 56 OPD. Sedangkan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dari tahun ke tahun cenderung stabil, yaitu sebanyak 100 orang, kecuali pada tahun 2017 yang mencapai 300 orang, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebanyak 100 orang, ditahun 2019 naik menjadi 110 orang.

2.3.3 Urusan Pelayanan Pilihan

2.3.3.1Kelautan dan Perikanan

Garis pantai Kabupaten Asahan menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup potensial. Oleh karena itu, pontensi di bidang kelautan dan perikanan tersebut perlu dikelola secara optimal, sehingga dimasa mendatang melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa, pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan. Walaupun

demikian kondisi perairan juga dipengaruhi oleh perubahan musim yaitu musim dari barat ke timur atau sebaliknya yang akan menyebabkan perubahan kondisi fisik seperti perubahan suhu, salinitas, gelombang, dan lain-lain.

Selain mengembangkan potensi yang ada pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab atas kelestarian sumberdaya perairan sesuai dengan Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan perubahannya Undang-undang No.45 tahun 2009, serta Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 yang mengamanatkan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Di dalam suatu ekosistem pesisir yang terdiri dari komponen hayati dan nirhayati saling berhubungan saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga ketika terjadi perubahan pada salah satu dari komponen tersebut akan berdampak pada keseluruhan baik dalam kesatuan struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Oleh karena itu dalam menjamin kelestarian sumber daya alam juga perlu memperhatiakan hubungan ekologis yang berlangsung diantara komponen-komponen sumber daya alam yang menyusun suatu sistem.

Jika dilihat dari volume produksi perikanan tangkap Kabupaten Asahan tahun 2016-2020 pada Gambar 2.89 terlihat bahwa dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap mencapai 33.437,25 ton, dengan pertumbuhan sebesar 20,60 persen. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 juga terus mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 33.894,35 ton di tahun 2017, 34.798,50 ton di tahun 2018, dan 35.842 ton pada tahun 2019, Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 mencapai 37.101,98 ton. Walaupun secara jumlah terus meningkat setiap tahun, namun jika dilihat dari persentase pertumbuhannya cenderung menurun. Pada tahun 2017 pertumbuhan produksi perikanan tangkap turun tajam dari 20,60 persen menjadi 1,37 persen. Akan tetapi, pada tahun 2018 dan 2019 persentase pertumbuhan kembali meningkat, masing-masing sebesar 2,67 persen dan 3,00 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan sebesar 3,52 persen. Selama periode tersebut, kecamatan dengan produksi perikanan tangkap tertinggi didapat dari Kecamatan Tanjung Balai.

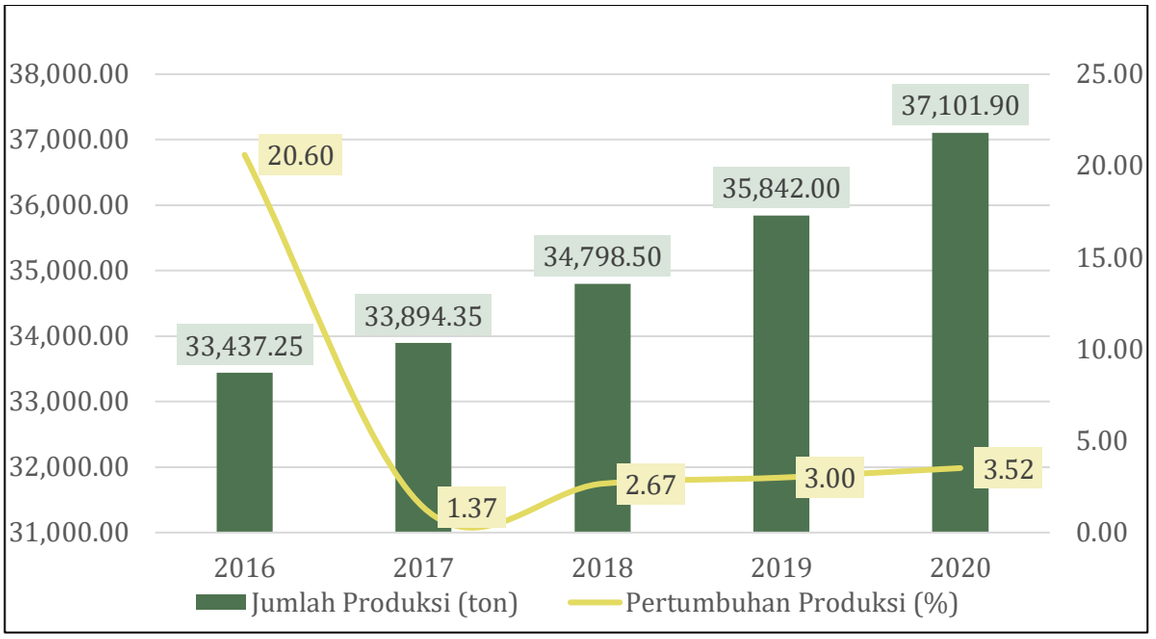

Gambar 2.89 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Sama seperti jumlah produksi perikanan tangkap, jumlah produksi ikan budi daya juga cenderung meningkat, walaupun sempat menurun di tahun 2017. Pada tahun 2016, produksi budi daya mencapai 2.711,15 ton dengan pertumbuhan sebesar 25,78 persen. Pada tahun 2017 jumlah produksi budi daya menurun menjadi 2.626,59 ton, sehingga pertumbuhannya mencapai -3.12 persen. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 kembali meningkat berturut-turut sebesar 2.628,00 ton dan 2.833,68 ton, dengan pertumbuhan sebesar 7,67 persen di tahun 2018 dan 0,20 persen di tahun 2019. Pada tahun 2020 produksi budidaya mengalami penurunan, nilai produksi sebesar 2.042,02 Ton dengan pertumbuhan produksi -27,94 persen. Berdasarkan grafik pada Gambar 2.90, maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016-2020 pertumbuhan produksi budi daya cenderung fluktuatif. Sepanjang periode tersebut, hasil ikan budi daya terbanyak diperoleh dari Kecamatan Rawang Panca Arga dan Kecamatan Air Joman.

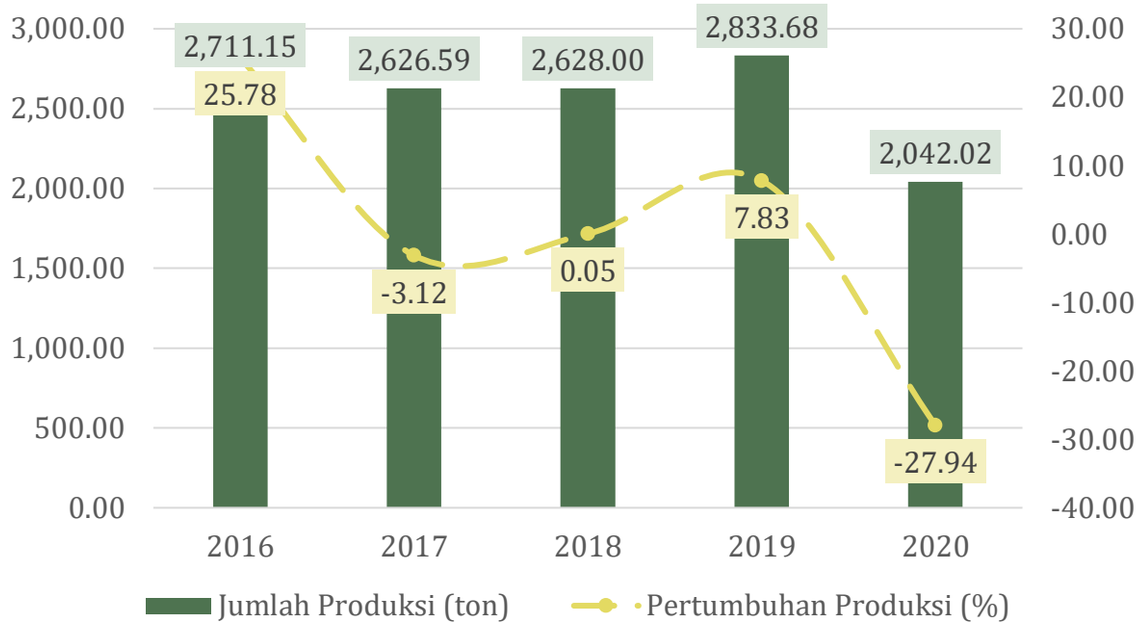

Gambar 2.90 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Ikan Budi Daya di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Peningkatan jumlah produksi ikan baik ikan tangkap maupun ikan perairan dan budi daya diimbangi dengan peningkatan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Asahan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,93 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2016, tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Asahan mencapai 43,2 kg/kapita/tahun. Demikian pula di tahun 2017 dan 2018, tingkat konsumsi ikan kembali meningkat menjadi sebesar 44,01 kg/kapita/tahun, dan 44,87 kg/kapita/tahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2019, yaitu sebesar 1,98 kg/kapita/tahun, menjadi 46,85 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2020 tingkat konsumsi ikan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai 45,33 kg/kapita/tahun.

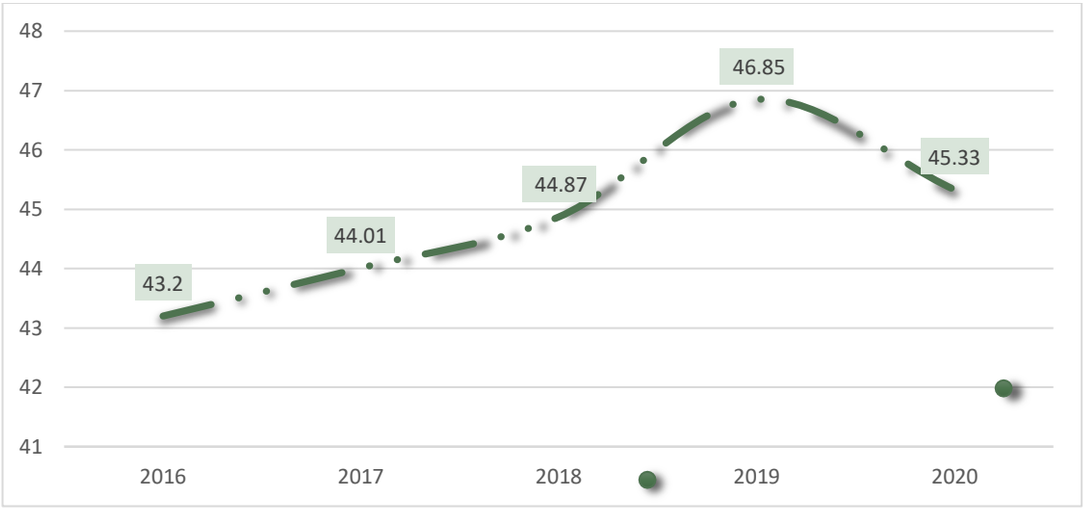

Gambar 2.91 Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Dalam upaya peningkatan jumlah produksi ikan perairan umum dan budi daya, perlu juga diimbangi dengan peningkatan produksi benih ikan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, selama periode 2016-2020 produksi benih ikan di Kabupaten Asahan juga terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016, produksi benih ikan mencapai 1.395,20 ribu ekor. Demikian pula tahun 2017-2019 produksi benih ikan terus mengalami peningkatan masing-masing sebanyak 1.644,00 ribu ekor, 1.654,00 ribu ekor, dan 1.695,00 ribu ekor. Pada Tahun 2020 jumlah benih sebanyak 1.806,84 ribu ekor juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Walaupun demikian, pertumbuhan produksi benih ikan semakin kecil dari tahun ke tahun.

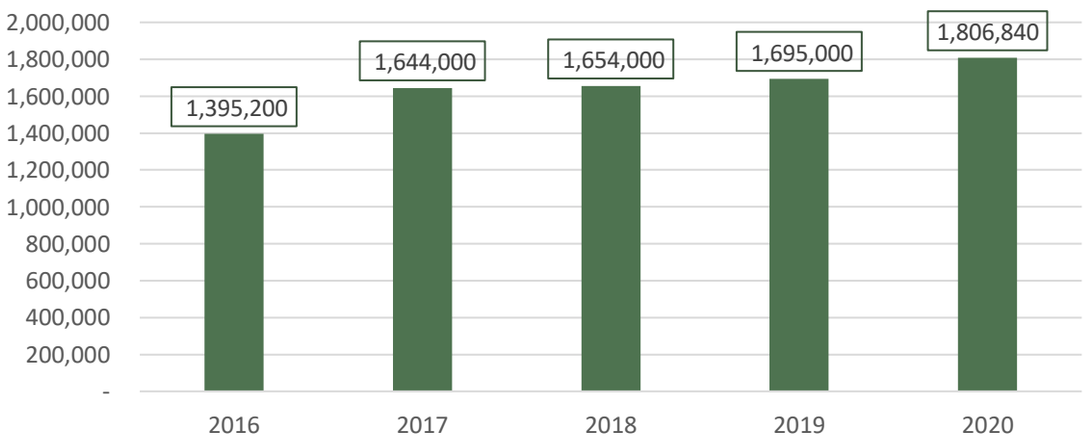

Gambar 2.92 Produksi Benih Ikan (ekor) di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

2.3.3.2 Pariwisata

Dengan dijadikannya objek wisata Danau Toba menjadi salah satu objek wisata unggulan di Indonesia, memberikan potensi bagi pariwisata Kabupaten Asahan untuk ikut mendapatkan dampak baik dari pengembangan daerah sekitar objek wisata Danau Toba. Oleh karena itu, Kabupaten Asahan diarahkan untuk mencapai tujuan mengembangkan potensi dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Asahan. Grafik di bawah ini menunjukan selama 5 (lima) tahun terakhir tingkat kunjungan ke tempat wisata di Kabupaten Asahan cenderung meningkat pada tahun 2016-2020 tingkat kunjungan ke tempat wisata berturut-turut sebesar 251.740 orang, 261.327 orang, 279.825 orang, dan 298.906 orang. Dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 170.391 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

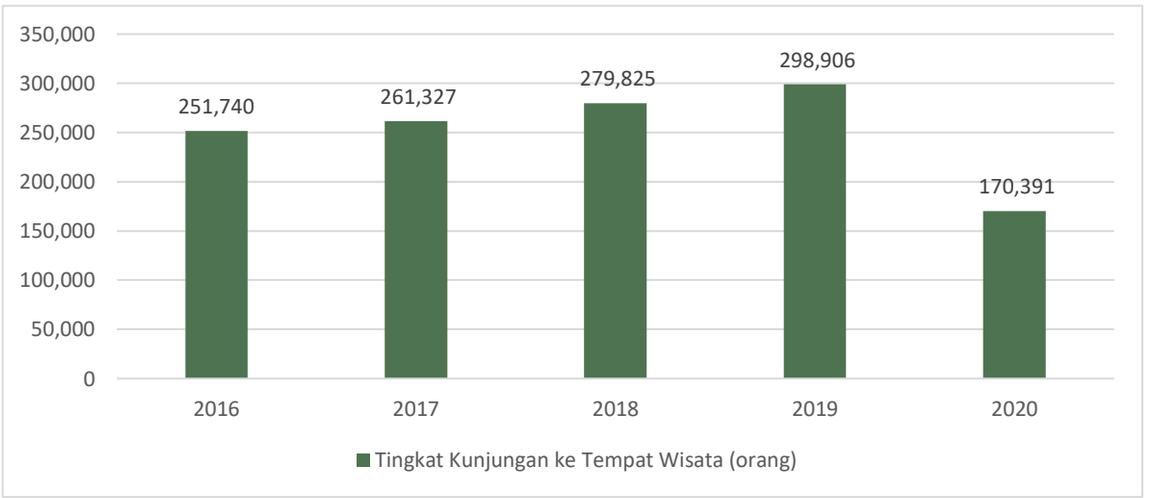

Gambar 2.93 Tingkat Kunjungan ke Tempat Wisata (orang) di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Sedangkan jika dilihat dari perkembangan komponen pendukungnya, sepanjang tahun 2016-2020 terdapat beberapa peningkatan komponen pendukung objek wisata yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.81 Data dan Informasi Urusan Pariwisata di Kabupaten Asahan, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Organisasi Kelompok Wisata	9	9	14	14	14
2.	Jumlah Lokasi Wisata	17	17	17	21	21
3.	Jumlah Restoran	51	71	75	75	80
4.	Jumlah Hotel	25	25	26	26	26

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5.	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	1	1	4	4	5

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah organisasi kelompok wisata pada tahun 2016-2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 9 kelompok, kemudian meningkat di tahun 2018 sebanyak 5 kelompok atau menjadi sebanyak 14 kelompok. Dalam tabel tersebut juga menunjukan bahwa jumlah lokasi wisata yang ada di Kabupaten Asahan cenderung tetap hingga tahun 2018, tetapi meningkat di tahun 2019 menjadi 21 lokasi wisata. Peningkatan yang cukup signifikan dapat dilihat dalam jumlah restoran. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah restoran yang cukup tajam yaitu mencapai 20 unit restoran. Sedangkan tahun 2018 jumlah restoran kembali meningkat menjadi 75 unit dan menjadi 80 unit pada tahun 2020. Selain itu jika dilihat dari jumlah hotel di Kabupaten Asahan pada awal periode tahun 2016 terdapat sebanyak 25 hotel, kemudian naik sebanyak 1 unit hotel di tahun 2018 menjadi 26 hotel. Selanjutnya terdapat kelompok sadar wisata di Kabupaten Asahan pada tahun 2016 sebanyak 1 kelompok berlokasi di Danau Teratai Desa Terusan Tengah Kec. Tinggi Raja. Pada tahun 2018 tumbuh 3 kelompok sadar wisata yaitu kelompok sadar wisata Bukit Kijang Desa Gunung Melayu Kec. Rahuning, Kelompok Tani Hutan Makmur Desa Silo Baru Kec. Silau Laut, dan kelompok sadar wisata Gonting Malaha Outcamp Desa Gonting Malaha Kec. Bandar Pulau. Pada tahun 2020 tumbuh 1 kelompok sadar wisata yaitu kelompok sadar wisata Pantai Padas Dusun II Desa Padang Pulau Kec. Bandar Pulau. Sehingga jumlah kelompok sadar wisata di Kabupaten Asahan pada tahun 2020 berjumlah 5 kelompok sadar wisata.

2.3.3.3 Pertanian

Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor penting karena memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pokok atau primer bagi kehidupan manusia di dunia, termasuk masyarakat Kabupaten Asahan. Dalam arti luas sektor pertanian tidak hanya mencakup kegiatan dalam hal tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi juga hortikultura (sayur dan buah), perkebunan, dan peternakan. Pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan tanaman pangan memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Asahan. Lebih lagi, dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan juga akan terus meningkat.

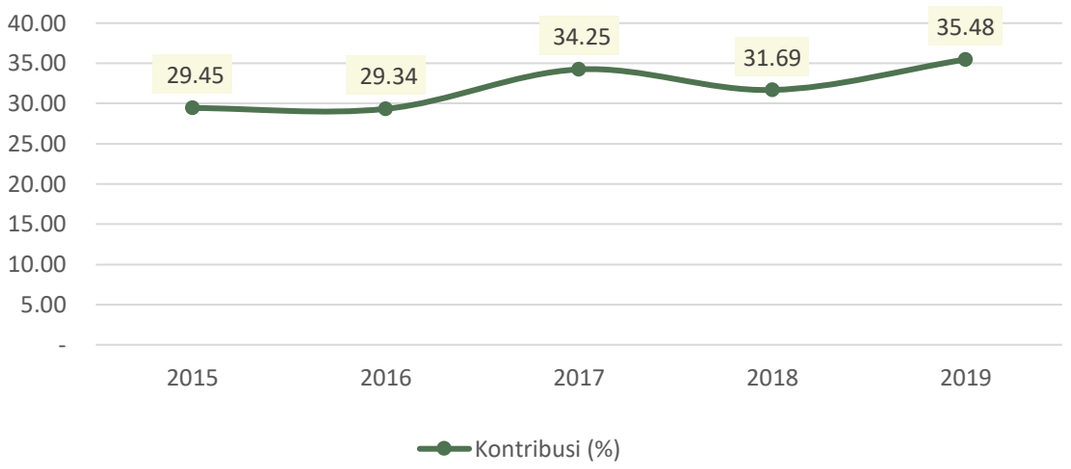

Gambar 2.94 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB di Kabupaten Asahan, 2015-2019

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2020

Berdasarkan data LKPJ Bupati Kabupaten Asahan Periode 2016-2020, dapat disimpulkan bahwa kontribusi sektor pertanian dan perkebunan selama periode 2015-2019 mencapai sepertiga dari PDRB Kabupaten Asahan, walaupun nilainya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian dan perkebunan mencapai 29,45 persen. Sedikit menurun di tahun 2016 menjadi sebesar 29,34 persen. Pada tahun 2017, kontribusi sektor pertanian dan perkebunan mengalami kenaikan menjadi 34,25 persen. Namun, kembali turun pada tahun 2018 sehingga kontribusi sektor pertanian dan perkebunan menjadi sebesar 31,69 persen. Sedangkan di tahun 2019, persentase kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 35,48 persen.

Menurut data, jenis tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Namun demikian, tanaman pangan yang memiliki produksi hasil pangan terbanyak yaitu padi. Padi merupakan salah satu bahan makanan terpenting yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Asahan. Padi, terutama padi sawah merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Asahan.

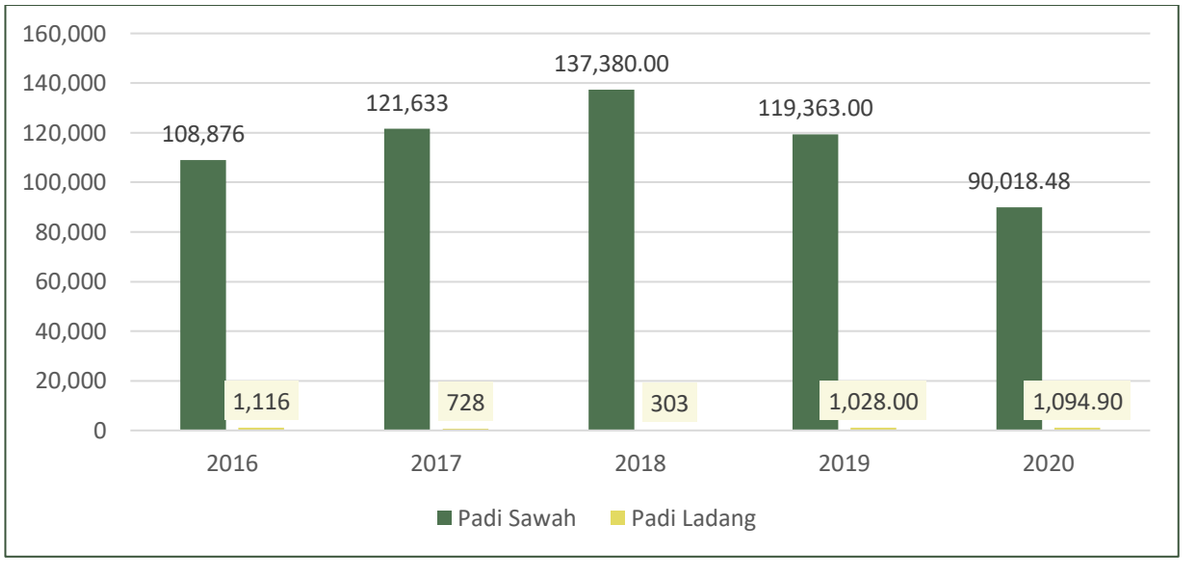

Gambar 2.95 Produksi Padi di Kabupaten Asahan (ton), 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Gambar di atas menunjukan bahwa selama periode 2016-2020 produksi padi sawah di Kabupaten Asahan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018, namun turun di tahun 2019. Pada tahun 2016, produksi padi sawah mencapai 108.876 ton dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi sebanyak 137.380 ton. Akan tetapi, pada tahun 2019 turun cukup signifikan yaitu menjadi sebanyak 119.363 ton dan menurun sebanyak 29.344,52 menjadi 90.018,48 pada tahun 2020. Sedangkan produksi padi ladang terus menurun hingga tahun 2017, namun meningkat di tahun 2018-2020. Pada tahun 2016, produksi padi ladang mencapai 1.116 ton, namun terus mengalami penurunan hingga di tahun 2018 menjadi 303 ton. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1.028 ton dan 1.094,90 ton. Secara keseluruhan produksi padi di Kabupaten Asahan selalu mengalami peningkatan hingga di tahun 2018, tetapi turun di tahun 2019 yang disebabkan oleh semakin berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Asahan.

Berdasarkan data Kabupaten Asahan dalam angka tahun 2021, terlihat bahwa hingga tahun 2020 produksi padi masih menjadi tanaman pangan unggulan di Kabupaten Asahan, yaitu mencapai 91.113,38, dengan padi sawah sebanyak 90.018,48 ton dan padi ladang sebanyak 1.094,90 ton. Kemudian disusul produksi ubi kayu sebesar 15.699,78 ton, dan produksi jagung sebesar 6.998,84 ton. Sedangkan produksi terendah yaitu tanaman pangan kedelai yaitu dengan produksi sebanyak 8,02 ton. Akan tetapi jika dilihat dari produktivitasnya, produktivitas tanaman pangan tertinggi didapatkan dari hasil tanaman pangan ubi kayu yang mencapai 330,87 kw/ha, kemudian disusul tanaman ubi jalar dan

jagung dengan masing-masing produktivitas mencapai 155,47 kw/ha dan 57,77 kw/ha. Sedangkan produktivitas terendah dihasilkan dari tanaman pangan kacang tanah.

Tabel 2.82 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Asahan, 2020

No.	Jenis Tanaman Pangan	Produksi Tahun 2020 (ton)	Produktivitas (kw/ha)
1	Padi Sawah	90.018,48	55,99
2	Padi Ladang	1.094,90	41,79
3	Jagung	6.998,84	57,77
4	Kedelai	8,02	17,83
5	Kacang Tanah	63,43	8,81
6	Kacang Hijau	72,77	11,37
7	Ubi Kayu	15.699,78	330,87
8	Ubi Jalar	1.335,49	155,47

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Perkebunan

Selain tanaman pangan, Kabupaten Asahan juga memilki beberapa produksi tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit, cokelat, karet, dan kelapa. Selama periode 2016-2020 tanaman perkebunan yang menjadi tanaman unggulan adalah kelapa sawit. Pada periode tersebut tren produksi kelapa sawit terus meningkat dan mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2016, produksi kelapa sawit mencapai 1.590.224 ton, kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi sebesar 1.647.852 ton. Pada tahun 2020, terjadi penurunan produksi kelapa sawit sebanyak 36.103,5 ton menjadi 1.611.748,5 ton.

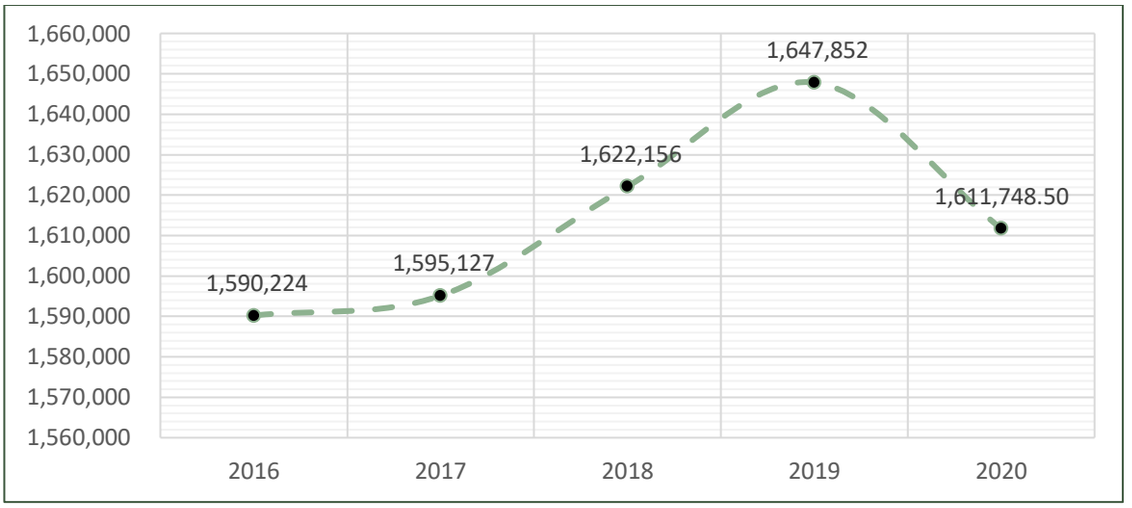

Gambar 2.96 Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Asahan (ton), 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Selain kelapa sawit, tanaman produksi unggulan lainnya yaitu kelapa. Sepanjang tahun 2016-2020, produksi kelapa sawit cenderung fluktuatif. pada tahun 2016, produksi kelapa mencapai 22.372 ton, mengalami peningkatan berturut-turut di tahun 2017 dan 2018 masing-masing menjadi 22.486 ton dan 23.848. Namun di tahun 2019 produksi kelapa mengalami penurunan yaitu menjadi 23.254 ton dan sedikit mengalami peningkatan menjadi 23.260,86 di tahun 2020. Produksi karet juga cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2016, produksi karet mencapai 5.268 ton, mengalami peningkatan di tahun 2017 dan 2018 menjadi 5.406 ton dan 5.511 ton. Pada tahun 2019 dan 2020, produksi karet mengalami penurunan berturut-turut masing-masing menjadi sebesar 5.069 ton dan 4.972,28 ton. Pada tahun 2016, produksi cokelat mencapai 599 ton, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar 610 ton di tahun 2017. Pada tahun 2018, produksi cokelat turun sebanyak 30 ton, tetapi kembali meningkat di tahun 2019 menjadi sebanyak 625 ton dan menjadi 640 ton di tahun 2020.

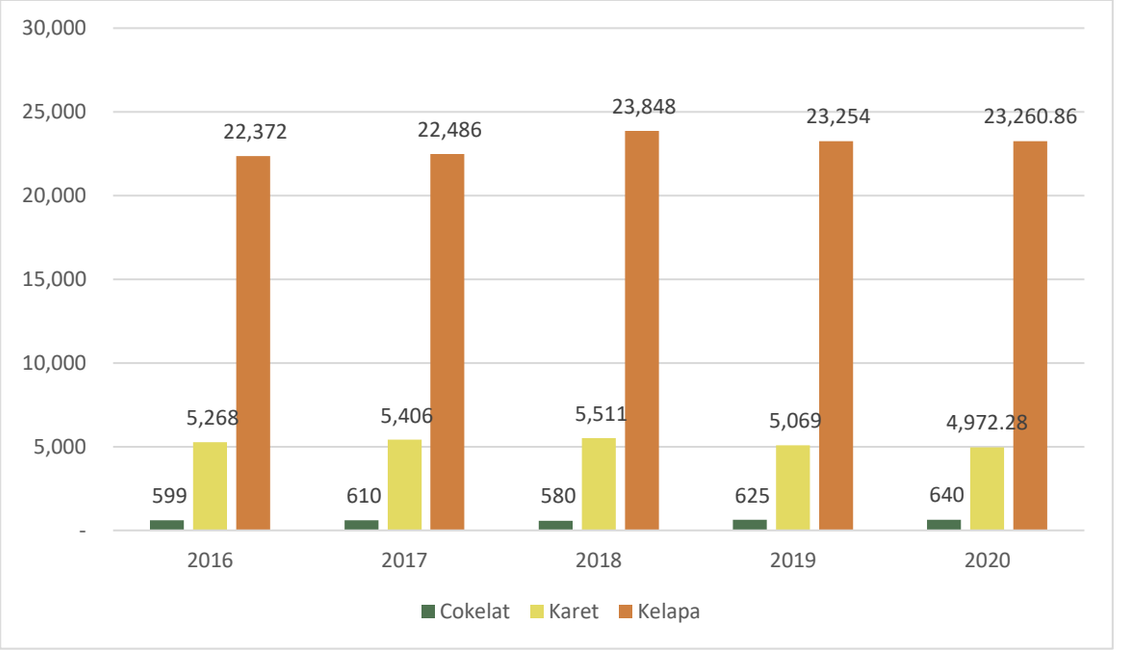

Gambar 2.97 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Selain Kelapa Sawit di Kabupaten Asahan (ton), 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Tidak hanya jumlah produksinya saja yang menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu tanaman perkebunan unggulan di Kabupaten Asahan, tetapi juga karena tingginya produktivitas kelapa sawit jika dibandingkan dengan produktivitas tanaman perkebunan lainnya. Pada tahun 2020, produktivitas tertinggi yaitu kelapa sawit dengan produktivitas sebesar 213,85 kw/ha. Disusul tanaman perkebunan kelapa dengan produktivitas sebesar 10,54 kw/ha, kemudian karet sebesar 9,11 kw/ha, dan terakhir cokelat dengan produktivitas sebesar 3,8 kw/ha.

Tabel 2.83 Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Asahan, 2020

No	Jenis Tanaman Perkebunan	Produksi Tahun 2020 (Ton)	Luas Tanam (ha)	Produktivitas 2020 (kw/ha)
1	Kelapa Sawit	1.611.748,5	75.368,19	213,85
2	Cokelat	640	1.682,06	3,80
3	Karet	4.972,28	5.459,94	9,11
4	Kelapa	2.3260,86	22.070,66	10,54

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021 (diolah)

Peternakan

Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Kabupaten Asahan meliputi jenis ternak besar (sapi dan kerbau), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), dan ternak unggas (ayam kampung, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik).

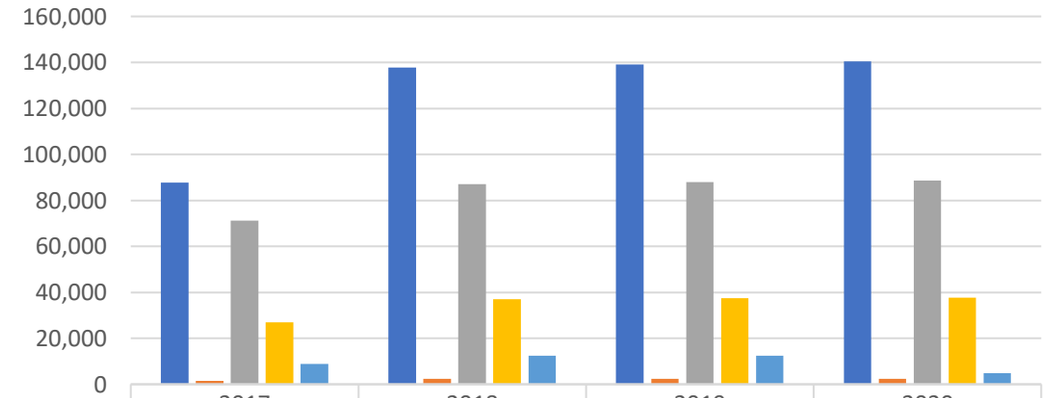

	2017	2018	2019	2020
Sapi	87,818	137,803	139,181	140,562
Kerbau	1,478	2,271	2,293	2,300
Kambing	71,248	86,988	87,858	88,723
Domba	26,907	37,019	37,389	37,676
Babi	8,843	12,365	12,489	4,849

Gambar 2.98 Populasi Hewan Ternak Besar dan Kecil (ekor) di Kabupaten Asahan, 2017-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2018-2021

Populasi hewan ternak terbanyak di Kabupaten Asahan yaitu sapi, dengan tren meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017, populasi sapi sebanyak 87.818 ekor, kemudian terus meningkat di tahun 2020 menjadi 140.562 ekor. Disusul populasi kambing yang mencapai 71.248 ekor di tahun 2017, dan terus meningkat hingga di tahun 2020 mencapai 88.723 ekor. Lalu domba dengan populasi sebanyak 26.907 ekor di tahun 2017, hingga mencapai 37.676 ekor di tahun 2020. Populasi babi juga meningkat dari sebanyak 8.843 ekor di tahun 2017 menjadi sebanyak 12.489 ekor pada tahun 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 4.849. Sedangkan kerbau, walaupun populasinya paling sedikit jika dibandingkan dengan hewan ternak lainnya tetapi mengalami peningkatan setiap tahun. Secara umum, seluruh hewan ternak di Kabupaten Asahan cenderung meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2020.

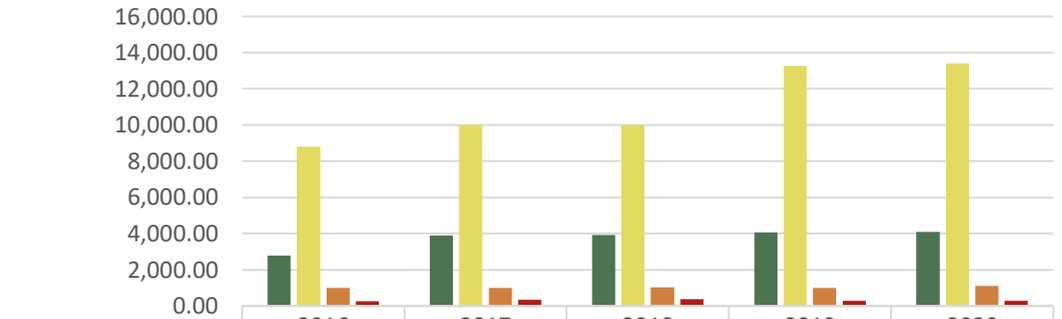

	2016	2017	2018	2019	2020
Ayam Ras Petelur	2,775.00	3,891.50	3,917.15	4,070.16	4,102.72
Ayam Ras Pedaging	8,795.30	9,986.65	9,998.87	13,261.47	13,394.07
Ayam Kampung	987.80	998.90	1,018.10	1,006.86	1,104.90
Itik	251.00	361.50	386.61	293.25	295.58

Gambar 2.99 Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis (ribuan ekor) di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Sedangkan populasi ternak unggas terbanyak yaitu ayam ras pedaging. Populasi ayam ras pedaging tahun 2016 mencapai 8.795,30 ribu ekor. Kemudian terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada tahun 2020 mencapai 13.394,07 ribu ekor. Populasi terbesar kedua adalah ayam ras petelur dengan populasi di tahun 2016 sebanyak 2.775 ribu ekor, dan terus meningkat hingga mencapai 4.102,72 ribu ekor pada tahun 2020.

Berbeda dengan populasi ayam ras yang selalu naik populasinya hingga tahun 2020, ternak unggas ayam kampung dan itik mengalami kenaikan hingga tahun 2018, namun turun di tahun 2019 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020. Populasi ayam kampung terus meningkat dari sebanyak 987,80 ribu ekor pada tahun 2016 hingga mencapai 1.018,10 ribu ekor pada tahun 2018. Akan tetapi turun di tahun 2019 turun menjadi 1.006,86 ribu ekor di tahun 2019 dan meningkat menjadi 1.104,90 ribu ekor pada tahun 2020. Demikian pula populasi itik yang juga meningkat dari sebelumnya sebanyak 251 ribu ekor di tahun 2016 menjadi 386,61 ribu ekor di tahun 2018. Sedangkan tahun 2019, jumlah itik di Kabupaten Asahan turun menjadi 293,25 ribu ekor dan meningkat menjadi 295,58 pada tahun 2020.

Produksi daging dan telur pada tahun 2016 sampai 2020 terus meningkat, pada tahun 2016 produksi daging sebesar 9.794,55 ton dan produksi telur sebesar 21.175,73 ton, pada tahun 2020 masing-masing meningkat menjadi 11.023,31 ton dan 24.910,91 ton. Untuk lebih jelasnya produksi per tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.84 Produksi Daging dan Telur di Kabupaten Asahan, 2016-2020

PRODUKSI	2016	2017	2018	2019	2020
Daging (ton)	9.794,55	10.202,22	10.605,67	10.914,17	11.023,31
Telur (ton)	21.175,73	22.983,24	23.967,00	24.664,27	24.910,91

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan, 2021

2.3.3.4 Perdagangan

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan perdagangan di Kabupaten Asahan adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar dan perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal. Penyelenggara urusan perdagangan di Kabupaten Asahan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.

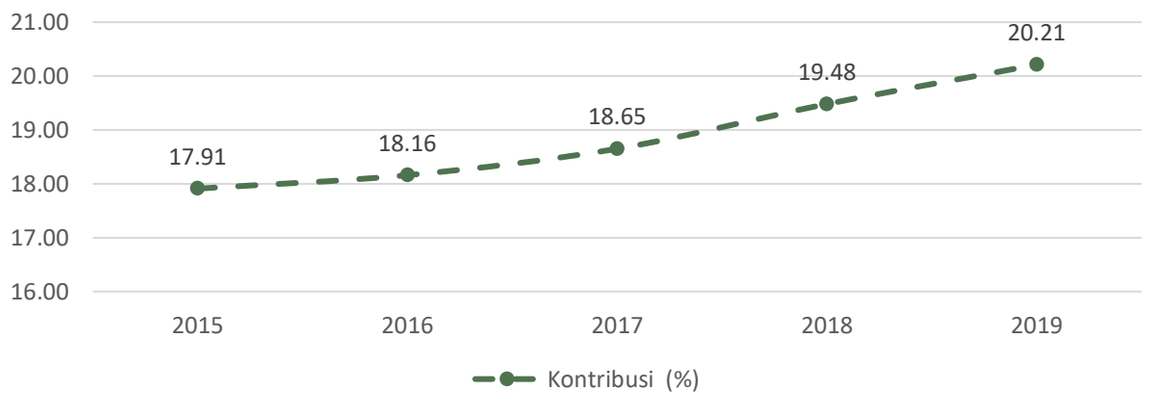

Gambar 2.100 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Asahan, 2015-2019
Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2019

Berdasarkan data LKPJ Bupati Kabupaten Asahan Periode 2016-2020, dapat disimpulkan bahwa kontribusi sektor perdagangan selama periode 2015-2019 terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor perdagangan mencapai 17,91 persen. Meningkat di tahun 2016 menjadi sebesar 18,16 persen. Pada tahun 2017, kontribusi sektor perdagangan kembali mengalami kenaikan menjadi 18,65 persen. Demikian pula pada tahun 2018 yang juga meningkat menjadi 19,48 persen. Pada tahun 2019, persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 20,21 persen.

Tabel 2.85 Indikator Capaian Sektor Perdagangan di Kabupaten Asahan, 2015-2018

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Tertatanya pasar rakyat (unit)	2	2	1	2	0
Terdatanya jumlah alat UTTP (unit)	1.126	1.231	3.448	-	-

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2019

Penataan terhadap pasar merupakan renovasi atau pembangunan yang dilaksanakan terhadap pasar rakyat. Jumlah tertatanya pasar rakyat di Kabupaten Asahan pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019 dilaksanakan pembangunan atau renovasi masing-masing sebanyak 2 unit pasar, untuk tahun 2018 dilaksanakan pembangunan atau renovasi terhadap 1 unit pasar, sedangkan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan. Selain indikator tertatanya pasar rakyat, ada pula indikator terdatanya jumlah alat UTTP. Selama periode 2016-2018 alat UTTP yang terdata cenderung meningkat, dari sebanyak 1,120 unit di tahun 2015 menjadi sebanyak 3,448 unit di tahun 2018. Peningkatan ini di dukung oleh sumber daya dan peralatan yang mumpuni untuk mendata alat UTTP di Kabupaten Asahan.

2.3.3.5 Perindustrian

Keberadaan industri memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi di daerah. Peranan tersebut meliputi peningkatan produksi dengan skala besar dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu adanya percepatan pemerataan dan penyebaran industri di daerah.

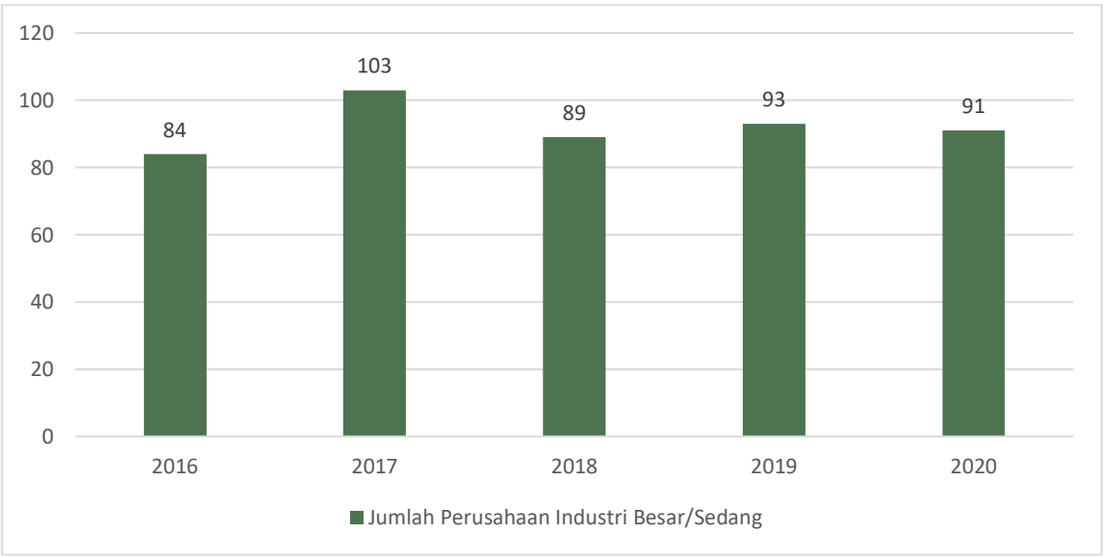

Gambar 2.101 Perkembangan Jumlah Industri Besar/Sedang di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Di Kabupaten Asahan, selama tahun 2016-2020, jumlah industri baik besar maupun sedang berfluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah industri besar/sedang sebanyak 84 unit mengalami peningkatan menjadi sebanyak 103 unit pada tahun 2017. Akan tetapi, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun selanjutnya menjadi sebanyak 89 unit. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan sebanyak 4 unit industri besar/sedang sehingga jumlah total menjadi 93 unit dan menurun sebanyak 2 unit di tahun 2020 menjadi 91.

Tabel 2.86 Persebaran Industri Besar/Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan, 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang Menurut Kecamatan
1	B. P. Mandoge	3
2	Bandar Pulau	1
3	Aek Songsongan	-
4	Rahuning	3
5	Pulau Rakyat	2
6	Aek Kuasan	1
7	Aek Ledong	-
8	Sei Kepayang	1
9	Sei Kepayang Barat	1
10	Sei Kepayang Timur	1
11	Tanjung Balai	7
12	Simpang Empat	4
13	Teluk Dalam	3
14	Air Batu	7
15	Sei Dadap	-
16	Buntu Pane	2
17	Tinggi Raja	-
18	Setia Janji	1
19	Meranti	-
20	Pulo Bandring	-
21	Rawang Panca Arga	-
22	Air Joman	10
23	Silau Laut	26
24	Kisaran Barat	4
25	Kisaran Timur	14
	Kabupaten Asahan	**91**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

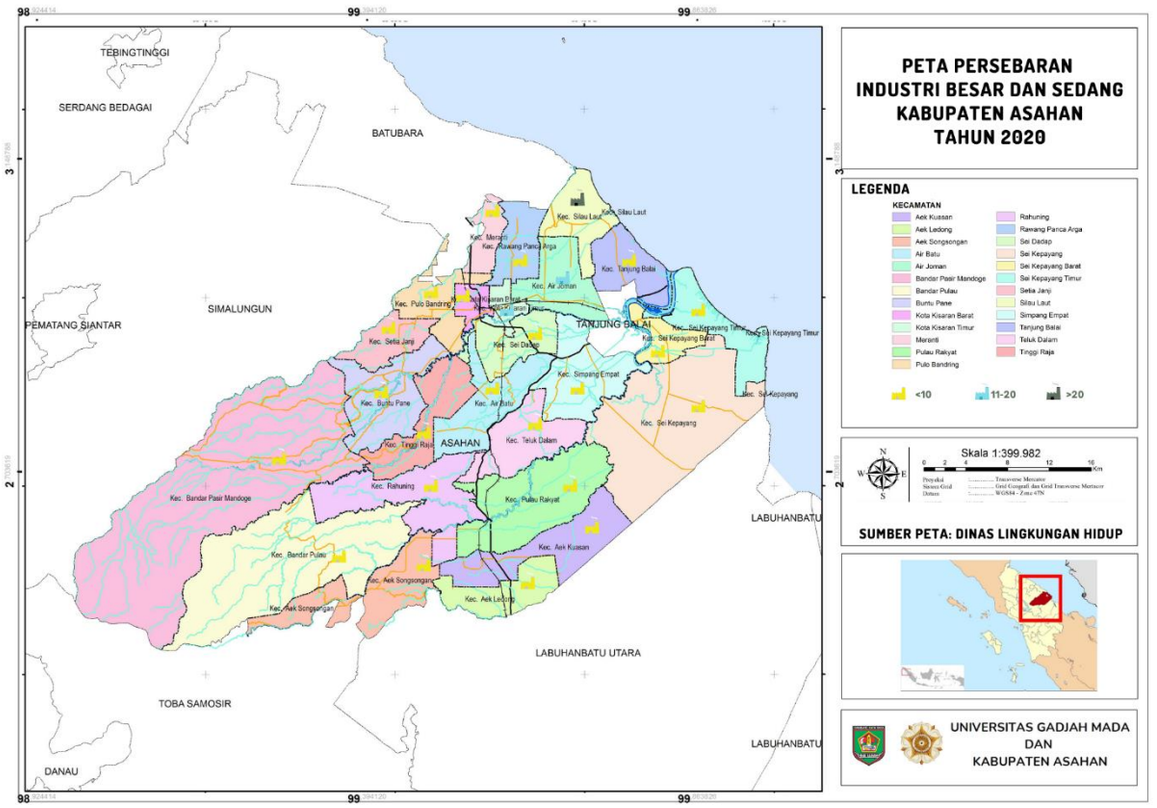

Gambar 2.102 Jumlah Persebaran Industri Besar dan Sedang Kabupaten Asahan, 2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Hasil Olahan 2021

Berdasarkan persebarannya, jumlah industri besar/sedang paling banyak berada di Kecamatan Silau Laut yaitu sebanyak 26 industri. Selanjutnya disusul oleh Kecamatan Kisaran Timur sebanyak 14 industri, dan 10 industri berada di Kecamatan Air Joman. Sedangkan di beberapa kecamatan tidak terdapat industri besar/sedang yaitu di Kecamatan Aek Songsongan, Kecamatan Aek Ledong, Kecamatan Sei Dadap, Kecamatan Tinggi Raja, Kecamatan Meranti, Kecamatan Pulo Bandring, dan Kecamatan Rawang Panca Arga.

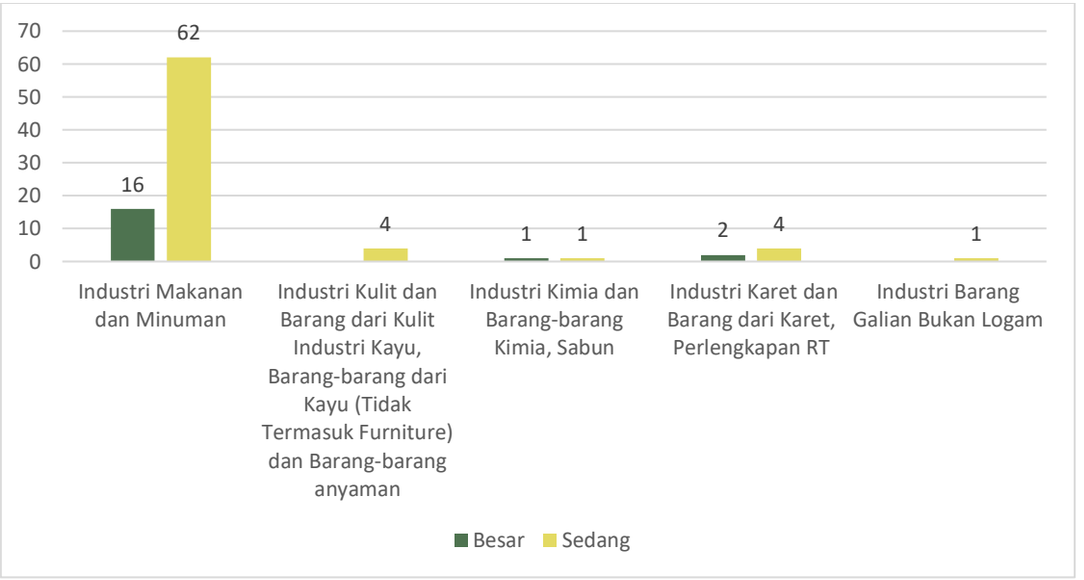

Gambar 2.103 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, 2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Dari keseluruhan 91 unit industri besar/sedang di Kabupaten Asahan pada tahun 2020, sebanyak 19 unit merupakan industri besar dan 72 unit merupakan industri sedang. Dari sisi klasifikasi yang didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBU), maka industri di Kabupaten Asahan didominasi oleh industri makanan dan minuman sebanyak 78 unit yang terdiri dari 16 unit merupakan industri besar dan 62 unit merupakan industri sedang. Selanjutnya jenis industri lain yang terdapat di Kabupaten Asahan adalah industri kayu dan anyaman sebanyak 4 unit industri sedang, industri kimia dan barang-barang kimia, sabun sebanyak 2 unit dengan industri besar 1 unit dan 1 unit industri sedang, industri karet perlengkapan rumah tangga sebanyak 6, serta industri barang galian bukan logam sebanyak 1 unit.

Tabel 2.87 Jumlah Tenaga Kerja Terserap Menurut KLBU, 2020

KBLU	Industri Besar	Industri Sedang
Industri Makanan dan Minuman	4.664	2.209
Industri Karet, Perlengkapan RT	473	274
Industri Kimia dan Barang-barang Kimia, Sabun	100	34
Industri Kayu (Tidak Termasuk Furnitur) dan Anyaman	-	157
Industri Barang Galian Bukan Logam	-	56
Jumlah	**5.237**	**2.730**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2021

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2020 terdapat sebanyak 5.237 tenaga kerja terserap di industri besar dan 2.730 tenaga kerja terserap di industri sedang. Sedangkan menurut jenis industrinya, tenaga kerja paling banyak terserap pada jenis industri makanan dan minuman dengan jumlah tenaga kerja terserap baik di industri besar maupun sedang sebanyak 6.873 orang. Dua industri selanjutnya yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah industri karet, perlengkapan rumah tangga sebanyak 747 orang dan industri kayu sebanyak 157 orang.

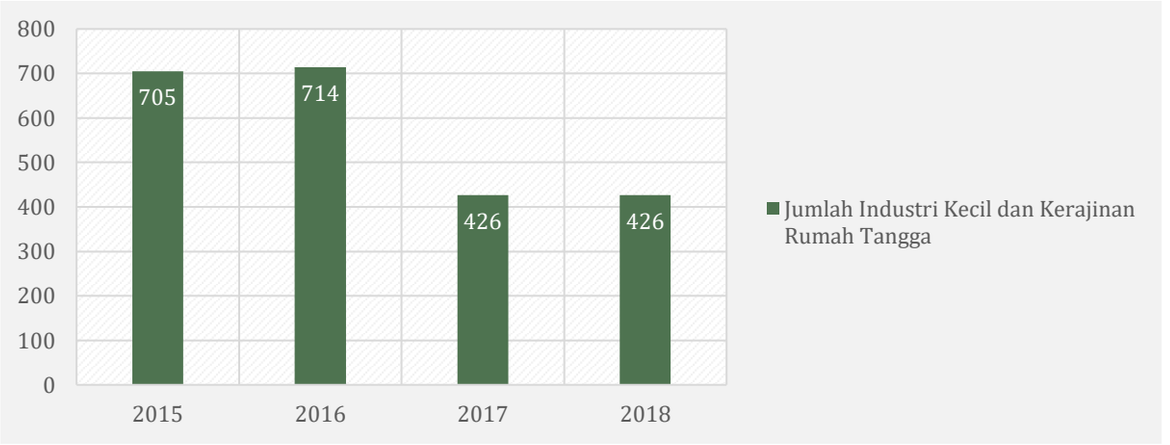

Gambar 2.104 Jumlah Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Asahan, 2015-2018

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2016-2019

Sementara itu, jumlah industri berjenis industri kecil dan kerajinan rumah tangga selama tahun 2015-2018 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015 jumlah industri kecil dan kerajinan rumah tangga (IKKR) di Kabupaten Asahan sebanyak 705 unit menurun menjadi sebanyak 426 unit di tahun 2018 atau menurun sebesar 39,6 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian karena IKKR merupakan salah satu penopang sektor industri dengan tenaga kerja 1 sampai dengan 19 orang. Secara keseluruhan IKKR mempunyai andil yang cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan telah menetapkan perangkat daerah melalui Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan Pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan adminsitratif. Adapun fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4) Pembinaan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya di atas Sekretariat Daerah membangun kesisteman organisasi perangkat daerah, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, beriman, dan bertaqwa, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, mewujudkan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian dari organisasi perangkat daerah sebagai unsur staf Pemerintah Daerah yang ada pada Pemerintah Kabupaten Asahan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sebagai bagian dari perangkat daerah, dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi bagian-bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Bagian Organisasi

Tabel 2.88
Capaian Kinerja Indikator Bagian Organisasi Kabupaten Asahan, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penilaian SAKIP	nilai	C (47,31)	B (60,21)	B (60,49)	B (62,52)	B (62,79)
Jumlah OPD yang Menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	OPD	30	34	30	38	-
Penataan Perangkat Daerah	Dok	9	14	17	4	4
Nilai Capaian Kinerja	Skala	47,31	60,21	60,49	62,52	Belum ada nilai

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Secara umum capaian kinerja bagian organisasi di Kabupaten Asahan menunjukkan terjadinya fluktuatif pada jumlah OPD yang menyusun dan menerapkan standar pelayanan SOP, meskipun dalam penataan perangkat daerah mengalami angka yang positif. OPD yang

menyusun SOP, SP, SPM, dan SKM pada tahun 2016 berjumlah 30 OPD, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 38 OPD. Sedangkan untuk penataan perangkat daerah pada tahun 2016 sebanyak 9 dokumen, kemudian tahun 2020 berjumlah 4 dokumen. Selanjutnya Nilai Capaian Kinerja pada tahun 2016 mendapat nilai sebesar 47,31 dan meningkat sampai tahun 2019 menjadi sebesar 62,52.

Bagian Pemerintahan

Tabel 2.89
Capaian Kinerja Indikator Bagian Pemerintahan Kabupaten Asahan, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penilaian LPPD	nilai	Tinggi (2,6857)	Tinggi (2,9141)	Tinggi (2,8045)	Tinggi (3,2377)	Masih proses
Pelaksanaan Penilaian Kecamatan se-Kabupaten Asahan	Kec	25	25	25	25	25
Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kabupaten Asahan	Kec	25	25	25	25	25

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Secara umum capaian kinerja bagian pemerintahan di Kabupaten Asahan menunjukkan terjadinya peningkatan pada Penilaian LPPD pada tahun 2016 mendapat nilai kategori tinggi (2,6857) dan sampai tahun 2019 mendapat nilai kategori tinggi (3,2377). Sedangkan untuk Pelaksanaan Penilaian Kecamatan se-Kabupaten Asahan dan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kabupaten Asahan dari tahun 2016 sampai 2020 telah dilaksanakan di 25 Kecamatan di Kabupaten Asahan.

Bagian Perlengkapan dan RT

Capaian kinerja bagian Perlengkapan dan RT Kabupaten Asahan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yang fluktuatif, dengan penurunan pada pengadaan kendaraan dinas sampai tahun 2018. Capaian mengenai surat menyurat dibuktikan meningkat dari tahun 2016 sebanyak 6.616 naskah menjadi 6.508 naskah pada tahun 2020. Pada jumlah kendaraan dinas operasional yang tercatat juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 74 unit kemudian pada tahun 2020 sebanyak 132 unit.

Tabel 2.90
Capaian Kinerja Indikator Bagian Perlengkapan dan RT Kabupaten Asahan, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Lancar dan tertibnya administrasi surat-menyurat	Naskah	6.616	7.862	7.973	16.060	6.508
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda 4)	Unit	11	8	2	29	-
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tercatat	Unit	74	87	101	131	132

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Bagian Hukum

Capaian kinerja bagian Hukum Kabupaten Asahan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yang fluktuatif, dengan penurunan pada draft produk hukum. Capaian mengenai Draft Ranperda dibuktikan meningkat dari tahun 2016 sebanyak 9 draft menjadi 13 draft pada tahun 2019 dan menurun ditahun 2020 menjadi 5 draft. Pada bantuan hukum masyarakat miskin yang tercatat juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 91 objek kemudian pada tahun 2019 menjadi 163 objek, dan menurun ditahun 2020 menjadi 91 objek.

Tabel 2.91 Capaian Kinerja Indikator Bagian Hukum Kabupaten Asahan, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Draft Ranperda	Draft	9	8	11	13	5
Draft Produk Hukum	Draft	581	483	716	501	458
Bantuan Hukum Masyarakat Miskin	Objek	91	105	130	163	91

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Bagian Perekonomian

Capaian kinerja bagian Perekonomian Kabupaten Asahan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yang fluktuatif, dengan kenaikan pada cakupan jumlah rumah tangga sasaran penerima raskin. Capaian mengenai rumah tangga sasaran penerima raskin dibuktikan stagnan dari tahun 2016 dan 2018 sebanyak 44.785 RTS. Pada bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan pokok masyarakat kurang mampu dan pengendalian harga bahan mengalami peningkatan yang pada tahun 2016 sebanyak 48.575 RTS kemudian pada tahun 2018 menjadi 51.274 RTS. Pada tahun 2019 dan 2020 pelaksanaan dua kegiatan tersebut beralih ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan.

Tabel 2.92 Capaian Kinerja Indikator Bagian Perekonomian Kabupaten Asahan, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Raskin / data Menko Kesra	RTS	44.785	40.307	44.785	n.a	n.a
Pemenuhan sebagian kebutuhan pokok Masyarakat kurang mampu dan pengendalian harga bahan pokok	RTS	48,575	49.023	51.274	n.a	n.a
Persentase Sarana Perekonomian, Produksi Daerah, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Subsidi Pemerintah yang diawasi	%	n.a	n.a	n.a	88,65	99,95

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Bagian Pembangunan

Capaian kinerja bagian Pembangunan Kabupaten Asahan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan dan peningkatan, dengan kenaikan pada terlaksananya e-procurement. Capaian mengenai terlaksananya e-procurement dibuktikan naik dari tahun 2016 dan 2018 sebanyak 30 persen dan 100 persen. Pada terpublikasinya rencana umum pengadaan dan realisasi anggaran pada tahun 2016 sebanyak 9 kali kemudian pada tahun 2018 menjadi 1 kali.

Tabel 2.93 Capaian Kinerja Indikator Bagian Pembangunan Kabupaten Asahan, 2016-2018

Indikator	Satuan	2016	2017	2018
Terlaksananya e-procurement	%	30	100	100
Terpublikasinya rencana umum pengadaan dan realisasi anggaran	Kali	9	1	1

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2018

2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Tugas sekretariat DPRD yang ada di Kabupaten Asahan memiliki beberapa indikator capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemmerintahan seperti pembuatan dokumen Ranperda, Reses DPRD, laporan kunjungan kerja, rapat paripurna, dan rancangan peraturan yang tersaji dalam tabel berikut. Jumlah ranperda yang disetujui cenderung meningkat dari tahun 2017 menuju tahun 2018, di tahun 2020 hanya 3 ranperda yang disetujui. Sedangkan tersedianya laporan hasil reses DPRD dan laporan hasil kunjungan kerja komisi-komisi DPRD Kabupaten Asahan cenderung dalam kondisi stagnan.

Tabel 2.94
Capaian Kinerja Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, 2017-2020

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ranperda yang disetujui bersama DPRD dan Bupati Asahan	Perda	8	13	11	3
Tersedianya laporan hasil Reses DPRD Kab. Asahan	Dok	28	28	28	28
Tersedianya laporan hasil Kunjungan Kerja komisi-komisi DPRD Kab. Asahan	Dok	8	10	14	10
Jumlah Rapat Paripurna DPRD Kab. Asahan	Kali	28	34	26	30
Jumlah Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Asahan	Peraturan DPRD	-	1	-	1

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2017-2020

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1 Perencanaan

Bidang perencanaan dalam unsur penunjang urusan pemerintahan biasanya diemban oleh Bappeda masing-masing daerah. Bappeda dalam pelaksanaannya bertugas dalam

koordinasi proses perencanaan secara teknokratis, menggunakan pendekatan/metode dalam rangka menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih (tataran politis), baik untuk kurun waktu jangka menengah/lima tahunan atau jangka pendek/tahunan. Bappeda melakukan verifikasi, menganalisis, dan menformulasikan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah perencanaan terhadap materi perencanaan yang diperoleh lewat penyerapan aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Bappeda melaksanakan program-program seperti pengembangan data/informasi daerah, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan ekonomi, serta perencanaan sosial dan budaya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan Tupoksi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
6. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan daerah;
7. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
8. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab badan;
9. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
10. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi penunjang perencanaan pembangunan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Asahan. Perencanaan mempunyai peran penting dalam sebagai kunci awal untuk setiap pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan dan dilakukan tanpa persiapan yang matang maka kualitas hasil kerja, pelaksanaan, waktu kerja dan anggaran tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Proyek pembangunan jika mengikuti alur dan aturan yang telah direncanakan maka hasilnya akan baik.

Tabel 2.95 Capaian Kinerja Indikator Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan, 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya data statistik/informasi untuk kebutuhan perencanaan pembangunan	Dok	9	10	9		
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dok	9	9	14		
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang (RTRW, RDTR, Dokumen Kawasan Strategis)	Dok	5	5	5		
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2015-2020

Sesuai dengan data yang disajikan pada Tabel 2.95, selama periode 2016-2020, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asahan telah disahkan menjadi Perda. Kemudian RPJMD Kabupaten Asahan juga telah ditetapkan menjadi Perda. Hal ini menunjukkan selama periode tersebut telah ada dokumen perencanaan pembangunan

jangka panjang dan menengah yang menjadi acuan dan terlegitimasi. Selain itu, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.3.5.2 Keuangan

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan bagian Keuangan diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan keuangan di pemerintahan daerah, seperti pengoptimalan penerimaan pendapatan daerah, pengoptimalan penggunaan teknologi (sistem informasi) keuangan daerah, dan peningkatan kinerja keuangan daerah. Kabupaten Asahan sendiri menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk mengelola kegiatan keuangannya. Adapun pemerintah Kabupaten Asahan secara konsisten menerbitkan dokumen pelaksanaan keuangan daerah, seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib. Kegiatan pelaksanaan keuangan daerah pun juga diterbitkan dokumen pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan diaudit oleh BPK.

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Asahan salah satunya dapat dilihat dari realisasi pajak daerah sesuai ketetapan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya pada 2016-2020. Realisasi pajak pada 2016 mencapai 28,60 miliar rupiah dan meningkat menjadi 59,94 miliar rupiah pada tahun 2020. Capaian tersebut tidak terlepas dari kegiatan motivasi kepada para camat, unit pelaksana teknis daerah (UPTD), kepala desa/lurah, dan kolektor dalam mencapai target kinerja keuangan Kabupaten Asahan. Penilaian atas pemberian motivasi tersebut mencapai 68,79 persen pada tahun 2016, kemudian meningkat di tahun 2017 mencapai 98,37 persen tetapi menurun menjadi 84,25 persen pada tahun 2018 dan meningkat kembali di tahun 2019 mencapai 97,61 persen tetapi sedikit menurun di tahun 2020 mencapai 94,42. Kinerja keuangan yang baik juga terlihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang mengetahui peraturan tentang pajak daerah. Terdapat 1.500 orang yang mengetahui peraturan tentang pajak daerah pada tahun 2016 di Kabupaten Asahan. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 554 orang pada tahun 2017. Akan tetapi, jumlah wajib pajak kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 1.460 orang. Peningkatan jumlah wajib pajak mengenai peraturan tentang pajak daerah sebanding dengan peningkatan potensi (wajib) pajak daerah. Potensi pajak daerah pada tahun 2016 hanya sebanyak 20.386 wajib pajak saja. Namun, jumlah tersebut terus mengalami peningkatan secara drastis selama tahun 2017-2019 dengan jumlah masing-masing adalah

207.054 wajib pajak, 223.411 wajib pajak dan 418.577 wajib pajak tetapi mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 217.430 wajib pajak.

Tabel 2.96 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Sistem Informasi Manajemen Pemda (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terlaksananya dokumen pelaksanaan keuangan daerah (PERDA dan Perbup APBD, PAPBD, Penjabaran P.APBD, DKPMD) (dokumen)	9	9	9	9	9
Tersedianya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah (LKPD) (dokumen)	2	2	2	2	2
Tersedianya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah	2	2	2	2	2
Jumlah pemasangan plank aset (titik)	150	150	200	200	200
Tercapainya realisasi pajak daerah sesuai dengan ketetapan (Rp miliar)	26,28	28,60	37,93	42,86	59,94
Termotivasinya camat, UPTD, kepala desa/lurah, dan kolektor atas pencapaian target (%)	88,98	69,26	98,37	84,25	94,4
Bertambahnya wajib pajak yang mengetahui peraturan tentang pajak daerah (orang)	1.000	1.500	554	3.000	2.000
Meningkatnya potensi pajak daerah (wajib pajak)	19.902	20.386	207.054	223.411	217.430

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Penggunaan anggaran melalui belanja daerah menjadi salah satu indikator efektivitas penyerapan anggaran di suatu daerah. Persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) terhadap total belanja daerah bisa menunjukkan hal tersebut. Persentase SILPA terhadap total belanja di Kabupaten Asahan selama kurun waktu 2016-2020 terus mengalami penurunan, dari 18,15 persen pada tahun 2016 menjadi 2,64 persen pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan jika dari tahun ke tahun, penyerapan

anggaran di Kabupaten Asahan semakin efektif. Hal tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan layanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Persentase belanja langsung terhadap total belanja fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan selama 2016-2019, dari 36,78 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 44,84 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, persentase belanja langsung mengalami penurunan menjadi 31,57 persen. Persentase tersebut berbanding terbalik dengan persentase belanja tidak langsung terhadap total belanja yang cenderung mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi setelah tahun 2016 sebesar 50,54 persen menurun menjadi 43,01 persen pada tahun 2019. Tahun 2020 persentase belanja tidak langsung turun menjadi 31,57 persen. Kondisi-kondisi tersebut tergambar pada grafik yang disajikan pada Gambar 105.

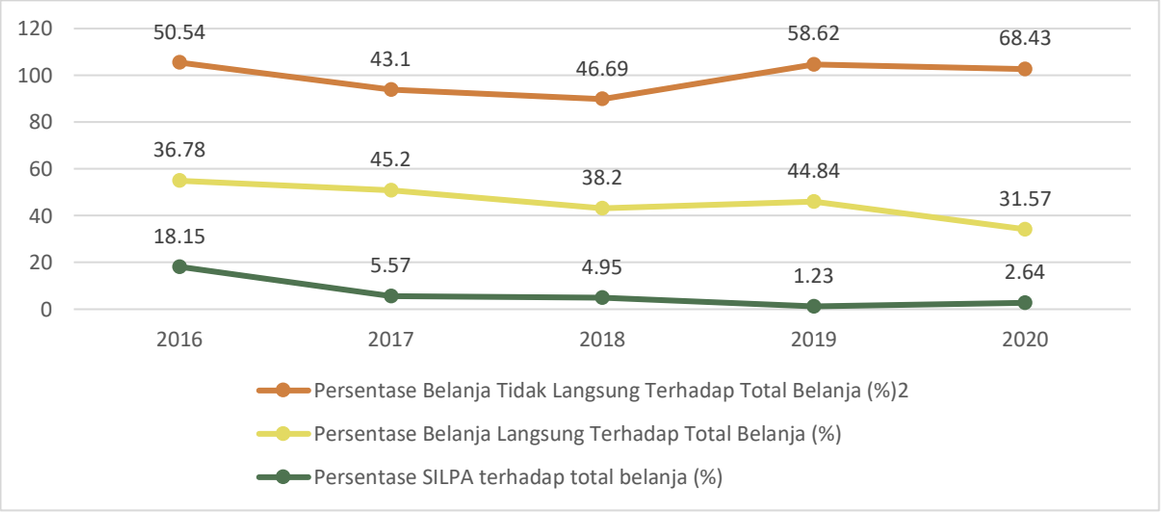

Gambar 2.105 Persentase SILPA, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2016-2020

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan, pemerintah wajib menerbitkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Laporan tersebut akan diaudit oleh BPK untuk melihat kewajaran penggunaan anggaran di daerah. Selama empat tahun berturut-turut pada 2016-2019, Kabupaten Asahan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang dilakukan oleh BPK. Artinya, tidak ditemukan ketidakwajaran penggunaan anggaran dalam laporan keuangan di Kabupaten Asahan.

Penyerapan anggaran di Kabupaten Asahan terlihat semakin efektif, terbukti dari nilai SILPA dan persentase SILPA terhadap total belanja yang semakin menurun dari tahun ke tahun. SILPA Kabupaten Asahan pada tahun 2016 mencapai 262,7 miliar rupiah dan secara konsisten mengalami penurunan hingga tersisa 19,9 miliar rupiah pada tahun 2019.

Realisasi belanja pada tahun 2016 adalah sebesar 1,3 triliun rupiah dan secara bertahap mengalami peningkatan hingga mencapai 1,5 triliun rupiah pada tahun 2019.

Seiring dengan peningkatan belanja, maka persentase belanja pendidikan dan belanja kesehatan pun juga ikut naik. Tercatat belanja pendidikan pada tahun 2016 adalah sebesar 613,5 miliar rupiah dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 514 miliar rupiah pada tahun 2019. Demikian pula dengan belanja kesehatan di Kabupaten Asahan. Belanja kesehatan adalah sebesar 159,4 miliar rupiah pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 218,8 miliar rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020, belanja kesehatan meguat mencapi 246 miliar karena kebutuhan akan alat kesehatan dalam masa penanganan *Covid-19*.

Tabel 2.97 Perkembangan Indikator Kinerja Keuangan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SILPA (Rp)	262.681.269.365	84.505.211.111	74.153.164.086	19.992.218.269	45.088.586.746,61
Total belanja (Rp)	1.447.349.546.008,85	1.517.424.447.780,71	1.498.770.371.723,79	1.630.254.234.875,37	1.440.528.107.531,72
Realisasi belanja (Rp)	1.301.818.576.864,95	1.404.016.951.686,13	1.396.390.237.081,40	1.522.570.926.000,21	1.231.980.056.000,23
Dana Alokasi Umum (DAU) (Rp)	891.149.644.000	875.860.020.000	877.794.638.000	917.363.719.000	830.586.749.000
Persentase belanja pendidikan (20%) (Rp)	613.004.234.119,97	496.681.566.807,45	451.281.526.070,00	514.625.240.422,62	503.948.164.278,17
Belanja kesehatan (10%) (Rp)	159.471.635.528,98	179.596.681.327,53	211.712.752.007,10	218.823.327.766,42	246.829.841.586,85

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2016-2020

2.3.5.3 Kepegawaian

Unsur penunjang bagian kepegawaian memegang peranan penting untuk mengatasi permasalahan terkait kurangnya kesesuaian penempatan. Dalam mewujudkkan sistem kepegawaian, kebijakan pembangunan bidang kepegawaian dilakukan melalui evaluasi terhadap formasi dan pengadaan pegawai, pengelolaan mutasi pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta memperhatikan kesejahteraan pegawai. Urusan tersebut dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam pelaksanaannya, BKD melaksanakan administrasi kepegawaian yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM).

Perwujudan Badan Kepegawaian Daerah sebagai pelaksana dari Undang-Undang tentang aparatur sipil negara (ASN) tahun 2014, dan berdasarkan peraturan menteri PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan analisis dan evaluasi perencanaan kebutuhan, perancangan dan implementasi rekrutmen, penyusunan formasi, pengelolaan system data formasi, pengembangan program *graduate* pegawai;
2. Pelaksanaan analisis dan pendidikan dan pelatihan, evaluasi perencanaan serta pengembangan kompetensi, program *assessment*,kepemimpinan;
3. Pelaksanaan kajian pengembangan, perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi standar kinerja, Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian, mutasi, manajemen bakat,penilaian kinerja, serta pelaksanaan pengelolaan kepangkatan, pengangkatan,pemberhentian dan pemensiunan pegawai; dan
4. Pelaksanaan analisis perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi administrasi, kepuasan pegawai, sarana dan metode implementasi *reward* dan *punishment,* Sumber Daya Manusia, penyelesaian kasus pegawai, penyempurnaan kode etik, kajiankompensasi dan benefit, serta penyiapan koordinasi jabatan fungsional padaSekretariat Direktorat Jenderal.

Setiap pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas untuk mengerjakan deskripsi pekerjaannya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya analisis beban kerja (ABK) untuk mengukur beban pekerjaan setiap pegawai di lingkungan pekerjaan pemerintah daerah. Selain itu, dibutuhkan pula analisis jabatan untuk mencari sumber daya manusia yang cocok dan sesuai dengan suatu jabatan tertentu. Adapun jumlah kebutuhan pegawai di Kabupaten Asahan berdasarkan ABK dan analisis jabatan mengalami

penurunan setiap tahunnya seperti terlihat pada Gambar 2.106. Sebanyak 4.993 pegawai dibutuhkan pada 2016. Jumlah kebutuhan menurun secara drastis pada tahun 2017 karena hanya dibutuhkan 311 pegawai saja. Dengan sedikit kenaikan, jumlah kebutuhan pegawai naik menjadi 401 orang pada tahun 2018. Dengan sedikit kenaikan, jumlah kebutuhan pegawai naik menjadi 401 orang pada tahun 2018. Pada tahun 2019 jumlah kebutuhan pegawai menurun menjadi 120 orang. Pengadaan/Pengangkatan CPNS tahun 2020 merupakan lanjutan dari tahun 2019 sehingga rencana kebutuhan pegawai tetap sama 120 orang untuk tahun 2020.

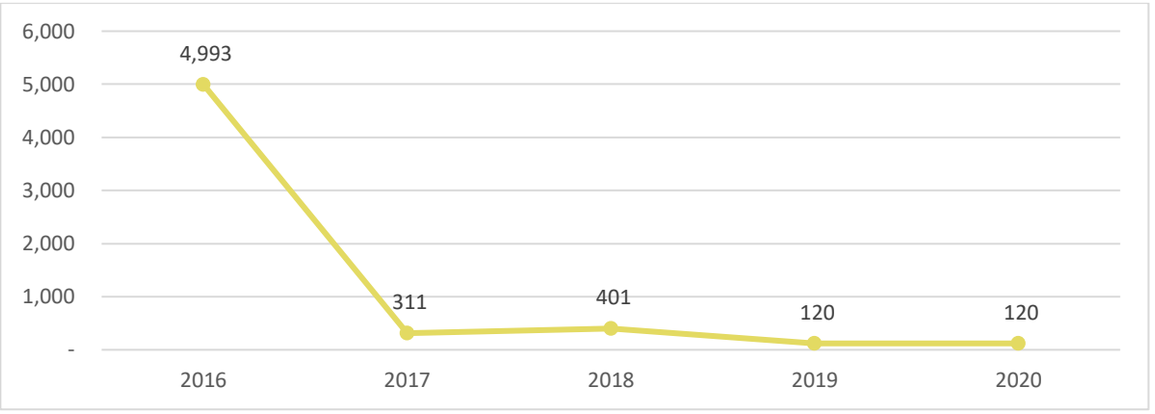

Gambar 2.106 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2019

2.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Unsur penunjang pendidikan dan pelatihan memegang peranan penting untuk mengatasi kualitas dan kemampuan aparatur, baik dalam menjalankan tugas-tugas umum maupun pembangunan di pemerintahan daerah serta dinamika kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan kualitas kerja dan prestasi aparatur harus ditunjang dengan sarana prasarana yang mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan. Dalam perwujudan tersebut, kebijakan pembangunan bidang kepegawaian, pengelolaan mutasi pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegaawai, serta memperhatikan kesejahteraan pegawai.

Pelayanan yang diberikan untuk penjenjangan struktural mengalami peningkatan meski dalam kurun waktu 2016-2020 terjadi fluktuasi. Cakupan fasilitasi pelayanan penjenjangan struktural mencapai angka 34,15 persen pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 mencapai 35,71 persen. Namun, angka tersebut turun menjadi

21,05 persen pada tahun 2018 dan tercatat kembali naik menjadi 22,92 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak mencatat angka atau 0,00 persen disebabkan pengalihan anggaran/refocusing pada penanganan penyakit yang disebabkan COVID-19.

Adapun tingkat pendidikan formal pascasarjana (S2) yang dicapai oleh ASN yang menjabat eselon II dan eselon III di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Tercatat jumlah jabatan eselon II dan eselon III yang berhasil mendapatkan gelar S2 sebanyak 66 persen pada tahun 2016 dan terus meningkat secara konsisten hingga mencapai 158,33 persen pada tahun 2019, tetapi menurun menjadi 106,36 persen di tahun 2020. Untuk penyediaan fasilitasi layanan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS), pemerintah Kabupaten Asahan juga mengalami peningkatan layanan, di mana pada tahun 2016 hanya mencapai 7,82 persen saja. Namun, dengan upaya perbaikan, cakupan fasilitasi layanan kenaikan pangkat PNS kembali naik pada tahun 2017 yang mencapai 12,35 persen dan 18,70 persen pada tahun 2018. Cakupan tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 dengan capaian 17,59 persen. Pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019 dengan capaian 15,19 persen.

Grafik yang menunjukan tren perkembangan indikator kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di kabupaten asahan pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 107.

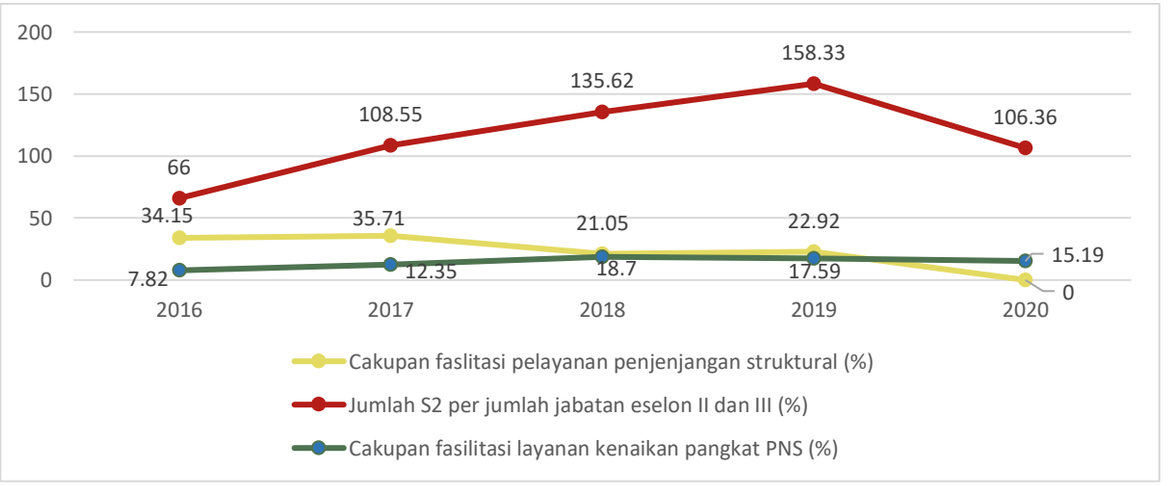

Gambar 2.107 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Lebih lanjut, seperti terlihat pada Gambar 108, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di Kabupaten Asahan mengalami fluktuasi selama tahun 2016-2020. Terdapat 14 orang PNS yang mengikuti diklat tersebut pada tahun 2016, disusul sebanyak 53 orang PNS yang mengikutinya pada tahun

2017. Namun, menurun 28 orang dari tahun 2017, terdapat 25 orang PNS yang mengikuti diklat tersebut pada tahun 2018. Pada tahun 2019 terdapat 26 orang PNS yang mengikuti diklat fungsional namun menurun menjadi 11 orang pada tahun 2020. Untuk jumlah PNS yang pensiun sebanyak 14 orang dan di tahun 2016 meningkat menjadi 53 orang di tahun 2017, menurun menjadi 25 orang di tahun 2018, 26 orang di tahun 2019 dan 11 orang pada tahun 2020.

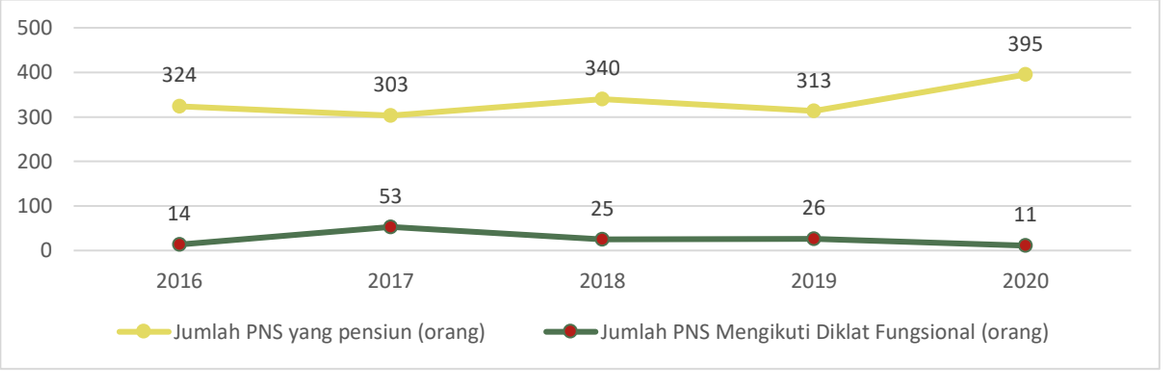

Gambar 2.108 Perkembangan jumlah PNS yang Pensiun dan PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

2.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai input dalam proses penyusunan langkah-langkah atau kebijakan strategis daerah ke depan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pengembangan dapat memberikan berbagai input/rekomendasi dalam rangka implementasi program-program strategis daerah yang tengah berjalan. Tabel di bawah menunjukkan capaian kinerja fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Selama tahun 2018 dan 2019 hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan sebanyak 100 persen. Pada tahun 2019 nilai tersebut melampaui target capaian RPJMD pada tahun tersebut yang sebanyak 35 persen.

Tabel 2.98 Capaian Kinerja Indikator Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan, 2018-2019

Uraian	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Capaian RPJMD 2019
Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	100,00	100,00	35,00

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2019

2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.6.1 Inspektorat

Inspektorat membawahi peranan penting dalam fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat berada pada posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Tabel di bawah menunjukkan capaian kinerja unsur pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksankan oleh inspektorat.

Tabel 2.99 Capaian Kinerja Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, 2016-2020

Uraian	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terlaksananya Akuntabilitas Capaian Kinerja dan Keuangan	Bln	12	12	12	n.a	12
Terlaksananya monitoring tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan	Obrik	124	87	202	n.a	42
Terlaksananya pemeriksaan reguler	Obrik	106	48	137	n.a	45
Terlaksananya pemeriksaan khusus terhadap pengaduan masyarakat	Obrik	91	48	47	n.a	48
Terlaksananya pengiriman Auditor/ pegawai Inspektorat untuk mengikuti Diklat	Org	15	22	24	n.a	13
Persentase OPD yang mendapat temuan tindak pidana korupsi yang material	%	n.a	n.a	53,33	24,24	21,21
Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	%	n.a	n.a	33,33	33,33	66,67
Persentasi OPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B	%	n.a	n.a	40,00	92,00	90,91
Tertib administrasi barang/aset daerah	%	n.a	n.a	90,91	69,70	30,30
Persentase berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan	%	n.a	n.a	56.79	77.38	83,01

Uraian	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti						
Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun	%	n.a	n.a	42,72	54,45	68,57

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Asahan diukur melalui Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi, namun pada tahun 2016 sampai dengan 2019 Pemerintah Kabupaten Asahan belum mengikuti penilaian Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Asahan mendapatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi CC (Cukup baik, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar). Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Asahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100 Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi 2016-2020

Uraian	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi	n.a	n.a	n.a	n.a	CC

Sumber: Inspektorat Kabupaten Asahan, 2021

2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

2.3.7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur pemerintahan umum dilaksankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja unsur pemerintahan umum dapat dianalisis dari jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; Jumlah pembinaan partai politik; serta Jumlah orang dibina terkait kerukunan umat beragama di Kabupaten Asahan. Selama tahun 2018 dan 2019 kinerja berdasarkan ketiga indikator tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2019, indikator jumlah orang dibina terkait kerukunan umat beragama di

Kabupaten Asahan dan indikator jumlah pembinaan partai politik telah melebihi target capaian yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 2.101 Capaian Kinerja Indikator Unsur Pemerintahan Umum, 2018-2019

Uraian	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Capaian RPJMD 2019
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kali	1	1	1
Jumlah pembinaan partai politik	Parpol	11	11	14
Jumlah orang dibina terkait kerukunan umat beragama di Kabupaten Asahan	orang	75	70	70

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2019

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah merupakan kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik *(attractiveness)* bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect ffect* bagi peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dan nilai tukar petani.

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan

sebagainya. Berikut merupakan jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Asahan 2016-2020:

Tabel 2.102 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2016-2020 Kabupaten Asahan

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pengeluaran RT	769.700	842.129	1.024.134	982.312	1.036.725
Jumlah RT	166.430	167.839	169.161	-	-
Rasio	4,624767	5,017481	6,054197	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa angka konsumsi Rumah Tangga terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2018 menuju tahun 2019 terjadi penurunan. Rerata pertumbuhan untuk total pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 7,73 persen per tahun. Jika dilihat berdasarkan rasio total pengeluaran RT per jumlah RT dapat diketahui bahwa nilainya terus meningkat pula. Artinya semakin atraktif pengeluaran rumah tangga terhadap kemampuan ekonomi daerah setiap tahunnya.

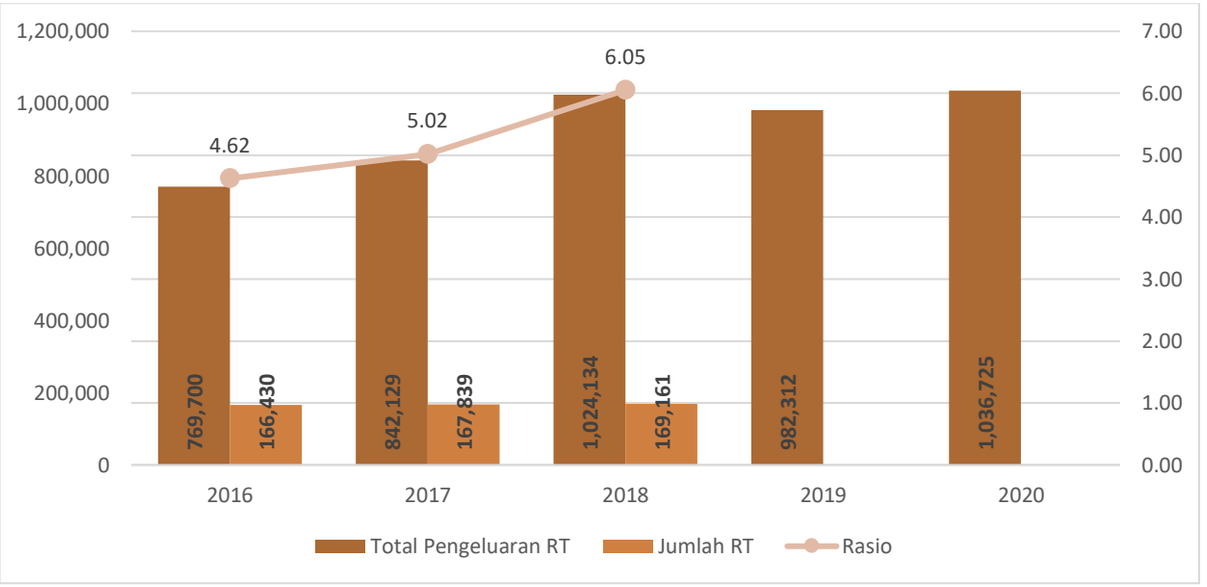

Gambar 2.109 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2016-2020 di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, Hasil Olahan 2021

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan

tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. Pada analisis ini mengacu pada nilai tukar petani di Provinsi Sumatera Utara. Adapun nilai tukar petani di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 103 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016-2020 Provinsi Sumatera Utara

Nilai Tukar Petani	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Yang Diterima Petani (It)	124,86	128,46	131,85	135,41	115,25
Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	124,63	129,24	134,56	138,06	104,35
Rasio	1,001845	0,993965	0,97986	0,980805	1,1044561

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2017-2021

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa rasio NTP di Provinsi Sumatera utara dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai dibawah 100 kecuali pada tahun 2016 dan tahun 2020. Artinya bahwa petani dalam hal ini mengalami defisit yang disebabkan oleh kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Pada tahun 2020 pendapatan petani lebih besar dari pengeluaran, meskipun indeks yang diterima dan dibayar petani lebih rendah dari tahun 2019. Secara rata-rata, pertumbuhan Indeks Yang Diterima Petani (It), Indeks Yang Dibayar Petani (Ib), dan rasio NTP berturut-turut sebesar -1,98 persen, -4,34 persen, dan 2,47 persen per tahun.

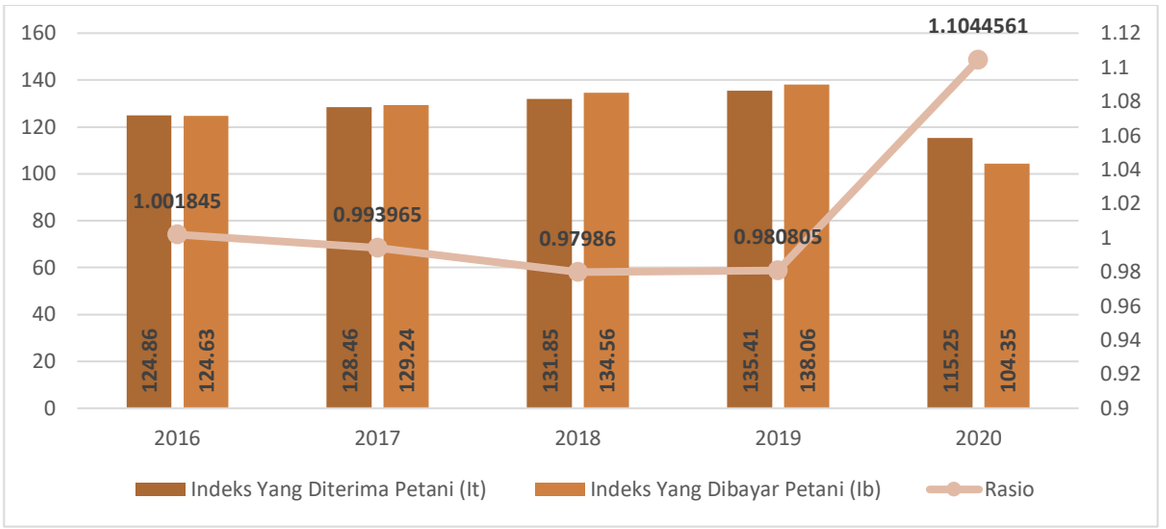

Gambar 2.110 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016-2020 Provinsi Sumatera Utara

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Hasil Olahan 2021

2.4.1.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Adapun pengeluaran konsumsi non pangan perkapita di Kabupaten Asahan tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.104 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2016-2020 Kabupaten Asahan

Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pengeluaran RT Non Pangan	334.695	346.901	460.806	442.049	482.440
Total Pengeluaran	769.700	842.129	1.024.134	982.312	1.036.725
Rasio	43,48%	41,19%	44,99%	45,00%	46,54%

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa angka konsumsi Non Pangan Rumah Tangga terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dilihat berdasarkan persentasenya, konsumsi RT non pangan Kabupaten mengalami pola yang fluktuatif. Pada tahun 2015, persentase pengeluaran konsumsi non pangan terhadap total pengeluaran di Kabupaten Asahan yaitu sebesar 43,62 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga

mencapai 43,47 persen. Kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 hinggai mencapai nilai sebesar 41,19 persen. Tahun 2018 persentase pengeluaran konsumsi non pangan terhadap total pengeluaran di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan yaitu hingga mencapai nilai sebesar 44,99 persen. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 persentase pengeluaran konsumsi non pangan terhadap total mencapai peningkatan berturut-turut menjadi 45,00 persen dan 46,54 persen.

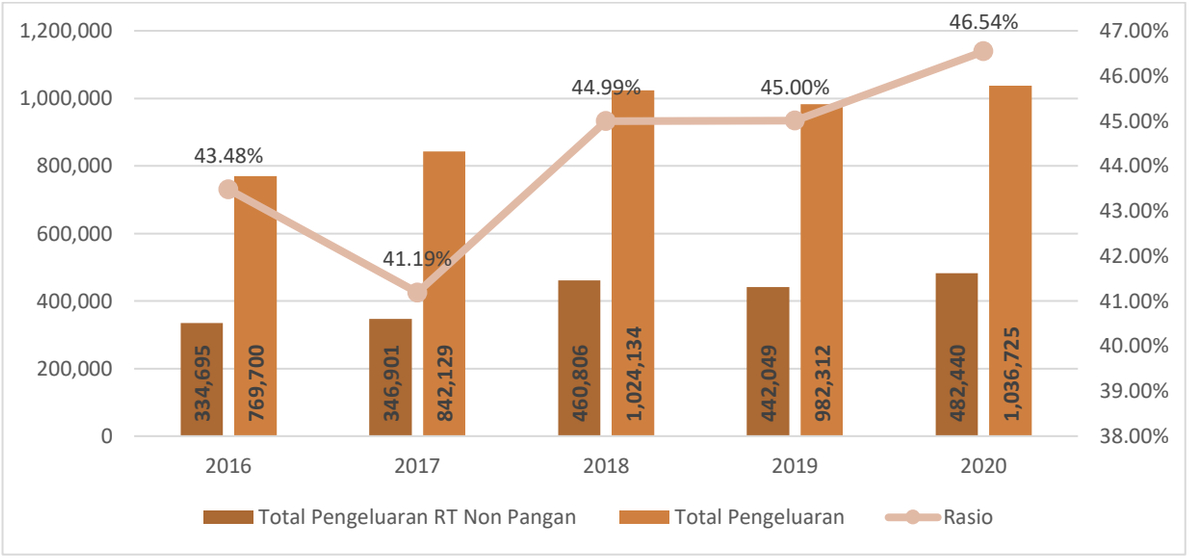

Gambar 2.111 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2016-2020 Kabupaten Asahan

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, Hasil Olahan 2021

Gambar 2.111 Menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi angka mengenai total pengeluaran rumah tangga non pangan, total pengeluaran, dan rasio dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Rerata pertumbuhan untuk total pengeluaran rumah tangga non pangan adalah sebesar 9,57 persen per tahun. Rerata pertumbuhan untuk total pegeluaran adalah sebesar 7,73 persen per tahun. Sedangkan untuk rerata pertumbuhan rasio adalah sebesar 1,71 persen per tahun.

2.4.1.4 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah di seluruh kabupaten/kota menggambarkan pencapaian produktivitas sebagai muara pembangunan setiap daerah. Pengukuran tersebut sekaligus berguna dalam mendeteksi tingkat efisiensi, efektivitas dari kualitas input, proses, dan hasil pembangunan yang ada di berbagai wilayah. Pengukuran produktivitas akan menjadi prioritas dan indikator pembangunan dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi, dengan terlibat dalam setiap tahapan pembangunan tersebut. Analisis tersebut biasa menyasar pada sektor pertanian suatu daerah dengan tujuan untuk mengukur kemampuan

daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Produksi komoditas sawah dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.105 Produksi dan Produktivitas Data Angka Tetap dan Angka Sementara Tanaman Pangan dan Hortukultura 2016-2020 Kabupaten Asahan

No.	Komoditi	2016		2017		2018		2019		* Asem 2020	
		Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	Padi	109.992,00	58,47	122.361,50	59,90	137.682,88	57,83	115.093,48	55,82	91.207,65	55,82
2.	Jagung	13.462,00	43,53	10.901,00	42,24	15.643,00	47,38	6.640,57	57,77	6.998,84	57,77
3.	Kedelei	20,00	13,16	2,00	12,28	151,98	7,20	103,41	17,83	8,02	17,83
4.	Kacang Tanah	130,00	9,39	63,00	9,44	110,75	16,05	73,09	8,81	63,43	8,81
5.	Kacang Hijau	154,00	11,31	71,50	11,24	65,60	10,09	92,10	11,37	72,77	11,37
6.	Ubi Kayu	23.868,00	288,36	15.834,00	279,16	10.850,61	292,47	15.186,78	330,87	15.699,78	330,87
7.	Ubi Jalar	1.274,00	112,10	773,00	117,09	615,17	102,53	1.321,51	155,47	1.335,49	155,47
8.	Cabai Keriting	858,10	58,77	942,30	85,66	1.048,70	68,99	847,3	51,98	1.786,00	121,50
9.	Bawang Merah	-	-	-	-	-	-	62,00	88,57	42,50	53,13

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, 2021

Data mengenai produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Asahan menunjukkan jenis-jenis tanaman unggulan yang dihasilkan dalam suatu daerah. Pada tabel terlihat bahwa produksi yang mengalami angka fluktuatif hampir pada semua jenis komoditi yang tersaji dalam tabel, kecuali bawang merah karena hanya ada perbandingan data tahun 2019 dan 2020. Data mengenai produktivitas juga sama, dengan angka fluktuatif kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sektor komoditi daerah belum memiliki angka tetap yang dapat diidentifikasi sebagai produktivitas daerah dalam menyusun strategi pembangunan yang berfokus pada jenis tanaman tertentu, meskipu terlihat bahwa komoditi dengan produktivitas tinggi ada pada ubi-ubian dan padi.

2.4.1.5 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita

Persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita merupakan besaran penduduk berdasarkan jumlah pengeluarannya dalam sebulan. Hal ini untuk mengetahui rerata golongan penduduk mengeluarkan jumlah secara berkala. Golongan tersebut dapat dilihat pada Tabel 106. berikut.

Tabel 2.106 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2016-2020 Kabupaten Asahan

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan
<200.000						
200.000-299.999	2,87	0,78	0,25		0,21	-58,17
300.000-499.999	25,40	16,59	9,07	9,20	6,12	-29,94
500.000-749.999	33,33	34,59	28,88	32,78	25,35	-6,61
750.000-999.999	21,08	25,45	25,87	24,45	29,78	9,02
1.000.000-1.249.999	8,29	9,72	14,89	14,90	15,66	17,24
1.250.000-1.499.999	4,52	6,08	7,35	7,73	9,61	20,75
≥ 1.500.000	4,51	6,79	13,69	10,95	13,27	30,97

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Tabel 2.106 menunjukkan bahwa terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan untuk penduduk yang mengeluarkan Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 749.000,00 per kapita dalam sebulan. Sedangkan pada kelompok pengeluaran di atas Rp. 750.000,00 memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif. Penurunan tertinggi untuk pengeluaran penduduk terdapat digolongan Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 299.000,00 sebesar -58,17 persen per tahun. Kenaikan rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada penduduk yang tergolong pada kelompok pengeluaran di atas Rp. 1.500.000,00 yaitu sebesar 30,97 persen per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pendapatan untuk penduduk per kapita di Kabupaten Asahan.

2.4.1.6 Persentase Pengeluaran untuk Konsumsi Menurut Golongan Pengeluaran

Persentase pengeluaran untuk konsumsi menurut golongan pengeluaran merupakan besaran golongan pengeluaran yang dikeluarkan untuk produk makanan. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup, yang mana pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok. Pengeluaran untuk konsumsi bisa tergolong dalam kebutuhan pokok seperti sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya termasuk daging ataupun susu. Tabel berikut menunjukkan persentase berdasarkan golongan pengeluaran sebagai berikut.

Tabel 2.107 Persentase Pengeluaran untuk Konsumsi Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2016-2020 Kabupaten Asahan

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan
<200.000						
200.000-299.999	0,95	0,24	0,07		0,06	-60,18
300.000-499.999	13,99	8,16	3,80	4,06	2,54	-34,72
500.000-749.999	26,82	25,92	17,78	21,14	15,53	-12,77
750.000-999.999	23,65	25,92	21,59	21,31	24,87	1,27
1.000.000-1.249.999	11,71	12,87	16,16	16,83	16,84	9,51
1.250.000-1.499.999	7,98	9,85	9,91	10,76	12,52	11,92
≥ 1.500.000	14,90	17,03	30,68	25,91	27,65	16,72

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Data tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan rerata pertumbuhan untuk pengeluaran konsumsi golongan Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 749.000,00. Sedangkan untuk golongan di atas Rp. 750.000,00 mengalami rerata pertumbuhan yang positif. Rerata penurunan tertinggi ada pada kelompok pengeluaran Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 299.000,00 yaitu sebesar -60,18 persen per tahun. Sedangkan untuk kenaikan

rerata pertumbuhan tertinggi ada pada kelompok pengeluaran di atas Rp. 1.500.000,00 yaitu sebesar 16,72 persen per tahun.

2.4.1.7 Kemajuan dan Kemandirian Desa

Kemajuan dan kemandirian desa adalah suatu kondisi tingkat perkembangan desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM), dibentuk berdasarkan pertimbangan dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Indeks desa membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Penentuan klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas dengan pengelompokkan sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907
2. Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989
3. Desa Berkembang : 0,5989 < IDM ≤ 0,7072
4. Desa Maju : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155
5. Desa Mandiri : IDM > 0,8155

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, untuk intervensi kebijakan pada desa yang tertinggal akan berbeda dengan desa yang berkembang. Tabel 2.108. menunjukkan capaian mengenai kemandirian desa dalam muatan KLHS dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 2.108 Indikator TPB Mengenai Kemajuan dan Kemandirian Desa Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

NO	TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	TARGET RPJMN 2019
6	**Air Bersih dan Sanitasi**	**6.2.1.(c)**	**Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).**	**Jumlah**	**0**	**10**	**55**	**141**	**Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)**
6	**Air Bersih dan Sanitasi**	**6.2.1.(d)**	**Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).**	**Jumlah**	**0**	**0**	**2**	**5**	**Meningkat**
10	**Kesenjangan Intra- dan Antarnegara**	**10.1.1.(c)**	**Jumlah desa tertinggal.**	**persen**	**108**	**0**	**0**	**47**	**Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)**
10	**Kesenjangan Intra- dan Antarnegara**	**10.1.1.(d)**	**Jumlah Desa Mandiri.**	**persen**	**0**	**0**	**0**	**2**	**Meningkat paling sedikit 2.000 desa**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Asahan, 2020

Sedangkan berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan provinsi pada tahun 2020 terdapat 2 provinsi dengan status IDM Maju, 25 provinsi berkembang, 5 provinsi tertinggal, sedangkan 1 provinsi sangat tertinggal. Berdasarkan peringkat status IDM pada tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara masuk dalam peringkat ke-28 untuk status IDM dengan rerata perolehan nilai sebesar 0,5956 dan termasuk dalam status tertinggal. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, untuk status desa berkembang tersebar pada 15 kabupaten, 11 kabupaten tertinggal, dan 1 kabupaten sangat tertinggal.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Asahan pada tahun 2016 belum ada perhitungan IDM Kabupaten Asahan. Dari jumlah 177 desa di Kabupaten Asahan, pada tahun 2017 sampai 2020 status IDM mandiri belum dicapai Pemerintah Kabupaten Asahan. Untuk status desa maju pada tahun 2017 dan 2018 terdapat 8 desa, meningkat ditahun 2019 menjadi 17 desa, namun mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi 3 desa. Selanjutnya status desa berkembang ditahun 2017 dan 2018 sebanyak 103 desa, ditahun 2019 meningkat menjadi 159 desa. Kemudian status desa tertinggal di Kabupaten Asahan cenderung mengalami penurunan ditahun 2017 dan 2018 sebanyak 62 desa selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 turun menjadi 15 desa tertinggal di Kabupaten Asahan. Selanjutnya status desa sangat tertinggal pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 4 desa dan di tahun 2019 sampai 2020 tidak terdapat desa sangat tertinggal di Kabupaten Asahan.

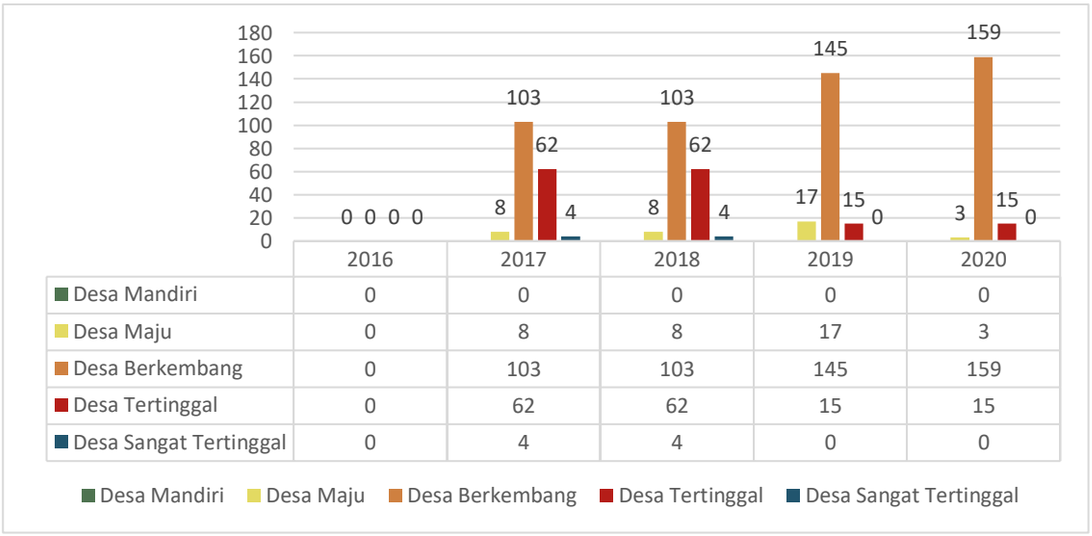

Gambar 2.112 Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah Kabupaten Asahan, 2016-2021

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Asahan, 2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan

Pada bagian ini dilakukan perhitungan rasio atau perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan di Kabupaten Asahan. Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Data umum mengenai panjang jalan, luas wilayah, jumlah penduduk, serta jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Asahan disajikan pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Asahan, 2016 - 2020

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)
2016	1.557.84	3.732,92	712.684	97.809
2017	1.668,41	3.732,92	718.718	87.372
2018	1.734,48	3.732,92	724.379	88.702
2019	1.734,48	3.732,92	729.795	96.943
2020	1.734,48	3.732,92	769.960	70.794

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021
Catatan: (1) Panjang jalan mencakup jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten; (2) Jumlah Kendaraan Bermotor terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor

Rasio panjang jalan dengan luas wilayah diperoleh dengan membagi panjang jalan (km) dengan luas wilayah daerah terkait (km^2). Nilai rasio ini memiliki arti panjang jalan yang terdapat di suatu daerah dalam 1 km^2 luas wilayah. Rasio ini juga dapat dijadikan sebagai informasi tingkat aksesibilitas suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio panjang jalan dengan luas wilayah, maka aksesibilitasnya semakin baik, sehingga konektivitas jalan di daerah tersebut juga semakin baik dilihat dari ketersediaan jaringan jalannya. Gambar di bawah menunjukkan bahwa rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kabupaten Asahan mengalami kenaikan dari 0,41 pada tahun 2016 terus naik mencapai 0,46 pada tahun 2019. Pada tahun 2019 ke tahun 2020, rasio panjang jalan memiliki angka tetap.

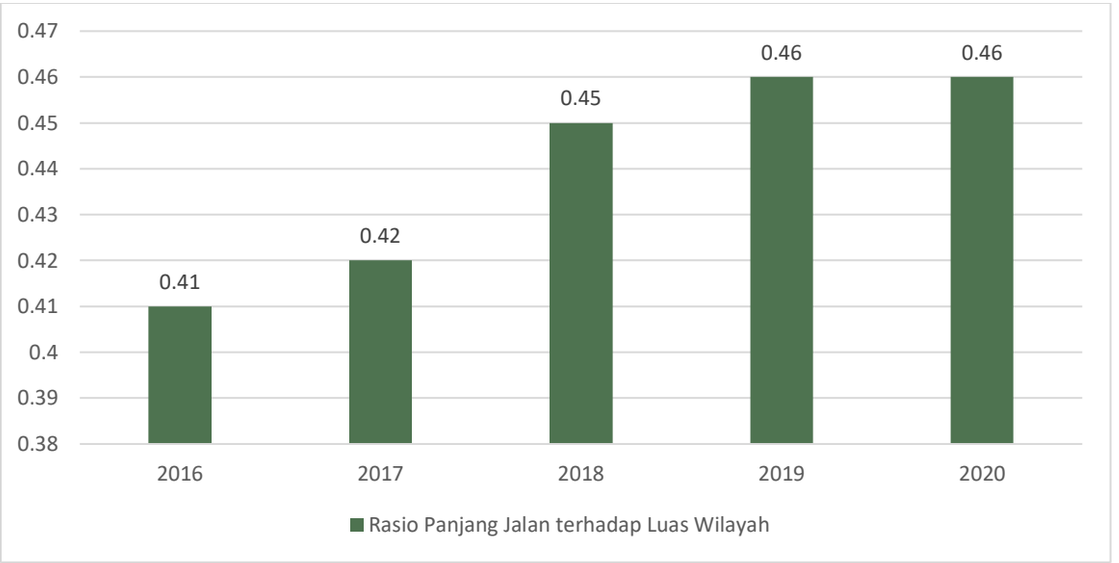

Gambar 2.113 Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah Kabupaten Asahan, 2016-2021

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Sementara rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk (ribu jiwa) suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah ribu jiwa penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Berdasarkan data yang disajikan pada gambar di bawah, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk selama periode 2015-2019 cenderung megalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 rasio 1 km jalan per penduduk mengalami peningkatan.

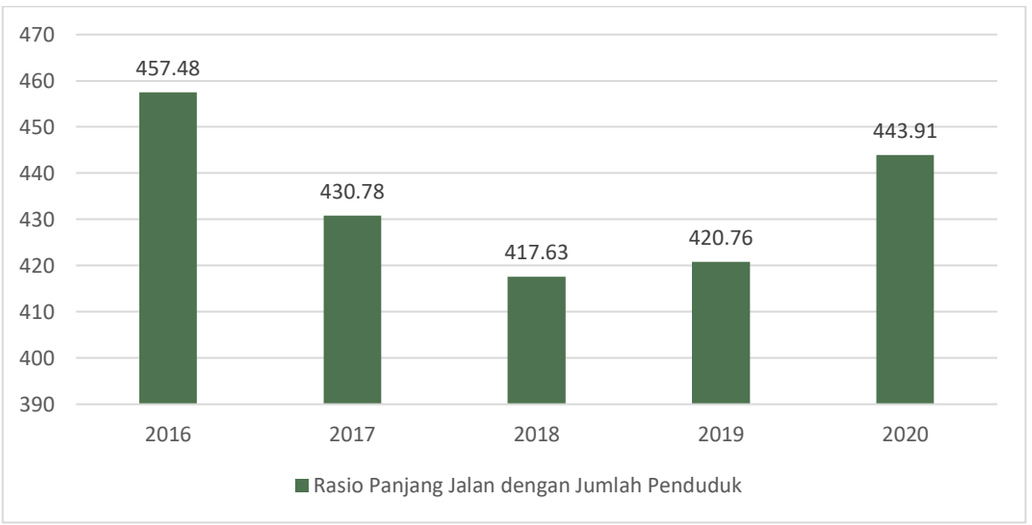

Gambar 2.114 Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan Dalam Angka, 2017-2021

Kemudian rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan yang diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Gambar 2.115 menunjukkan bahwa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Asahan mengalami penurunan pada periode tahun 2016-2018, namun kemudian naik pada tahun 2019. Pada tahun 2020, rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 40,82.

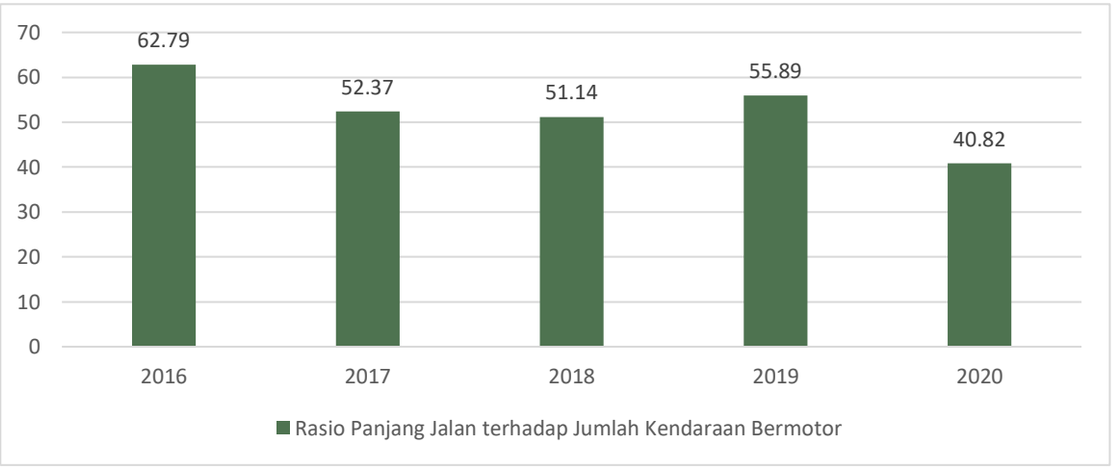

Gambar 2.115 Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan Dalam Angka, 2017-2021

Kompilasi data yang menggambarkan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk, serta rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Asahan seperti dalam penjabaran sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 2.116.

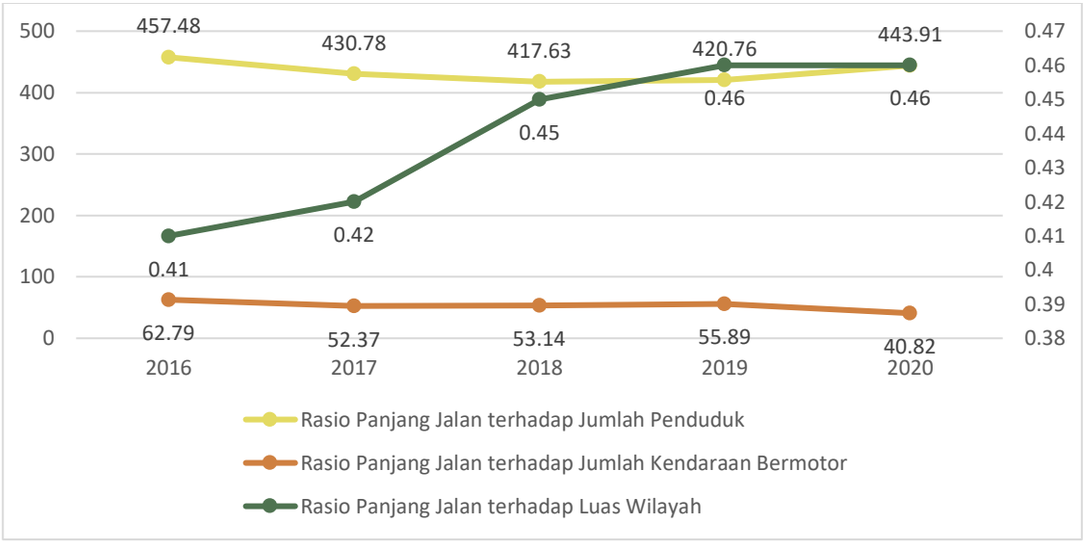

Gambar 2.116 Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah, Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk, Serta Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Fokus wilayah infrastruktur juga mengacu kepada tersedianya fasilitas persampahan yang ada di Kabupaten Asahan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, TPS yang dapat memuat sampah sebanyak 6 m^3 dikalikan dengan jumlah timbulan sampah adalah sebanyak 1.980 kg per hari. Sehingga jumlah kebutuhan TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Asahan tahun 2020 per hari adalah sebanyak kurang lebih 187 unit, dengan rasio 1 : 3.950. berdasarkan fakta yang ada bahwa luas TPA kabupaten sebesar 2,5 Ha (kondisi sudah penuh dan tidak memadai). Dengan sistem pengelolaan TPA yang masih bersifat *open dumping*, tidak memungkinkan menggunakan pengelolaan sistem *controlled landfill* atau *sanitary landfill* dikarenakan luas TPA saat ini tidak memadai (minimal luas TPA sebesar 6 Ha), sehingga perlu perencanaan dalam kajian pembukaan TPA. Data pengurangan persampahan skala kabupaten juga masih tergolong rendah dengan data pada tahun 2020 sebesar 12,65 persen dari total keseluruhan sampah yang ada di kabupaten.

Tabel 2.110 Persentase Pengurangan Sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Tahun 2016-2020

2016	2017	2018	2019	2020
-	-	-	11,73%	12,65%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, 2021

2.4.2.2 Ketaatan terhadap Ketentuan Penataan Ruang

Penataan ruang dipahami sebagai suatu sistem proses dari mulai tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Tiga tahapan

tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang yang telah ditetapkan sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan atau tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Dengan kata lain, proses penataan ruang harus mampu mengakomodasi secara seimbang, tidak hanya kebutuhan pembangunan dan investasi, namun juga pemenuhan ruang-ruang publik bagi masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang berorientasi pada upaya pembangunan berkelanjutan.

Secara legal formal, Kabupaten Asahan telah memiliki dokumen rencana umum penataan ruang skala kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan 2013-2033. Dalam dokumen tersebut termuat uraian rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Asahan, yang dijabarkan menjadi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kabupaten. Dengan adanya Perda RTRW Kabupaten Asahan, maka arahan pengembangan ruang wilayah di Kabupaten Asahan menjadi lebih kuat, sehingga di sisi lain juga memberikan peluang bagi seluruh pihak untuk melakukan pembangunan atau investasi sebesar-besarnya sesuai dengan koridor atau kaidah perencanaan yang telah ditetapkan.

Bahkan, dalam proses pelaksanannya, direncanakan adanya penetapan rencana tata ruang skala rinci sebagai turunan dari RTRW, berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kawasan-kawasan strategis sehingga akan lebih memberikan jaminan kemudahan bagi seluruh pihak dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Asahan, termasuk kemudahan dalam berinvestasi. Namun demikian, hingga tahun 2019, penyusunan RDTR kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Asahan masih tergolong rendah. Tercatat baru terdapat 6 wilayah yang sudah memiliki dokumen kajian penyusunan RDTR, meliputi wilayah Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Tanjung Balai, Kecamatan Air Joman dan wilayah Kecamatan Aek Ledong. Dengan kondisi tersebut, jelas perlu upaya lebih terhadap terwujudnya RDTR di wilayah Kabupaten Asahan, mulai dari perencanaan kegiatan penyusunan hingga penetapan menjadi Perda.

2.4.2.3 Luas Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Asahan diperuntukkan bagi jenis industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam pengembangannya, prioritas jenis industri diberikan pada jenis industri yang memiliki keterkaitan dengan pertanian, perikanan serta industri pengolahan lain, Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Asahan meliputi kawasan untuk industri besar, menengah dan kecil. Artinya, pengembangan industri skala kecil dan menengah juga terus digalakkan di seluruh wilayah kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing.

Kawasan peruntukan industri besar dan menengah ditetapkan berada pada lokasi-lokasi berikut:

1. Kawasan Industri Bagan Asahan seluas 2,12 Ha
2. Kecamatan Simpang Empat seluas 283,12 Ha
3. Kecamatan Air Joman Seluas 100 Ha.

Di samping tiga lokasi tersebut, pengembangan kawasan industri pengolahan hasil perkebunan diarahkan tersebar secara merata di 25 wilayah kecamatan. Hal ini mempertimbangkan kondisi eksisting bahwa kegiatan pengolahan sawit/karet/kelapa dan tanaman lainnya sudah relatif berkembang di setiap kecamatan.

2.4.2.4 Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan 2013-2033, kawasan perkotaan di Kabupaten Asahan berorientasi pada kawasan dengan pengembangan dominasi kegiatan non-pertanian. Fokus rencana pengembangan terhadap kawasan perkotaan di Kabupaten Asahan diantaranya mencakup adanya prioritas penyediaan atau peningkatan prasarana dan sarana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia

2.4.2.5 Jumlah Restoran/Rumah Makan

Restoran menjadi salah satu fasilitas pendukung utama terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah. Mempertimbangkan fakta tersebut, maka peningkatan jumlah restoran pada satu daerah seringkali berbanding lurus dengan kondisi pariwisata yang ada. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan secara umum pada sub bab sebelumnya, jumlah

restoran di Kabupaten Asahan tercatat cenderung menunjukan tren peningkatan pada periode 2016-2019.

Seperti dijabarkan pada tabel di bawah, pada kurun waktu empat tahun tersebut, terjadi penambahan sebanyak 24 restoran dari semula sebanyak 51 restoran pada tahun 2016 meningkat menjadi 75 restoran pada tahun 2019. Artinya, terjadi peningkatan mencapai sekitar 50 persen dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah restoran meningkat menjadi 80. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Asahan menunjukan tren positif sehingga penting untuk terus dikembangkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sejumlah peningkatan restoran tersebut, jumlah restoran paling banyak berada di Kecamatan Kisaran Barat.

Tabel 2.111 Data Jumlah Restoran di Kabupaten Asahan, 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	B. P. Mandoge	2	2	2	2	2
2	Bandar Pulau	2	2	2	2	2
3	Aek Songsongan	-	-	-	-	-
4	Rahuning	1	1	1	1	1
5	Pulau Rakyat	2	4	4	4	4
6	Aek Kuasan	2	2	2	2	2
7	Aek Ledong	2	6	5	6	5
8	Sei Kepayang	-	-	-	-	-
9	Sei Kepayang Barat	2	2	2	2	2
10	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-
11	Tanjung Balai	-	-	-	-	-
12	Simpang Empat	-	-	-	-	-
13	Teluk Dalam	-	-	-	-	-
14	Air Batu	12	19	19	17	19
15	Sei Dadap	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
16	Buntu Pane	3	4	4	4	4
17	Tinggi Raja	-	-	-	-	-
18	Setia Janji	-	-	-	-	-
19	Meranti	-	-	-	-	-
20	Pulo Bandring	-	-	-	-	-
21	Rawang Panca Arga	-	-	-	-	-
22	Air Joman	7	12	11	10	11
23	Silau Laut	-	-	-	-	
24	Kisaran Barat	11	12	19	20	21
25	Kisaran Timur	5	5	4	5	7
JUMLAH		**51**	**71**	**75**	**75**	**80**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

2.4.2.6 Jumlah Penginapan/Hotel

Berdasarkan definisinya, hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Dilihat dari jumlahnya, jumlah hotel di Kabupaten Asahan cenderung stagnan pada periode 2016-2020. Secara keseluruhan, terdapat 25 hotel yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Asahan pada tahun 2019. Jumlah tersebut tidak berbeda jauh dengan periode 2016 yaitu 24 hotel. Dari sejumlah tersebut, sebagian besar hotel berada di Kecamatan Kusaran Barat dengan 12 hotel, diikuti Kecamatan Kisaran Timur dengan 7 hotel. Pada tahun 2020 jumlah hotel menjadi 27 dengan penambahan 2 hotel di Kecamatan Simpang Empat. Rincian jumlah dan sebaran hotel di Kabupaten Asahan pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.112 Data Jumlah Hotel di Kabupaten Asahan, 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	B. P. Mandoge	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Bandar Pulau	-	-	-	-	-
3	Aek Songsongan	-	-	-	-	-
4	Rahuning	-	-	-	-	-
5	Pulau Rakyat	-	-	-	-	-
6	Aek Kuasan	-	-	-	-	-
7	Aek Ledong	2	2	2	2	2
8	Sei Kepayang	-	-	-	-	-
9	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-
10	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-
11	Tanjung Balai	-	-	-	-	-
12	Simpang Empat	-	-	-	-	2
13	Teluk Dalam	-	-	-	-	-
14	Air Batu	3	3	3	3	3
15	Sei Dadap	1	1	1	1	1
16	Buntu Pane	-	-	-	-	-
17	Tinggi Raja	-	-	-	-	-
18	Setia Janji	-	-	-	-	-
19	Meranti	-	-	-	-	-
20	Pulo Bandring	-	-	-	-	-
21	Rawang Panca Arga	-	-	-	-	-
22	Air Joman	-	-	-	-	-
23	Silau Laut	-	-	-	-	-
24	Kisaran Barat	11	11	12	12	12
25	Kisaran Timur	7	7	7	7	7
JUMLAH		**24**	**24**	**24**	**25**	**25**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

2.4.2.7 Presentase Pengguna Air Bersih PDAM

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat utamanya untuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga. Ketersediaan air bersih juga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2016-2020, rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Asahan relatif mengalami peningkatan setiap tahun seperti terlihat pada Tabel 2.113 dan Gambar 2.117. Bahkan, ditinjau dari data cakupan pelayanan PADM, terdapat peningkatan jumlah rumah tangga pengguna PDAM sebanyak 2.819 rumah tangga dari semula 16.400 RT pada tahun 2016 menjadi 19.219 RT pada tahun 2020.

Tabel 2.113 Banyaknya Rumah Tangga Pelanggan PDAM di Kabupaten Asahan, 2016-2020

NO	JENIS KONSUMEN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga	16.400	15.385	17.061	18.595	19.219

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

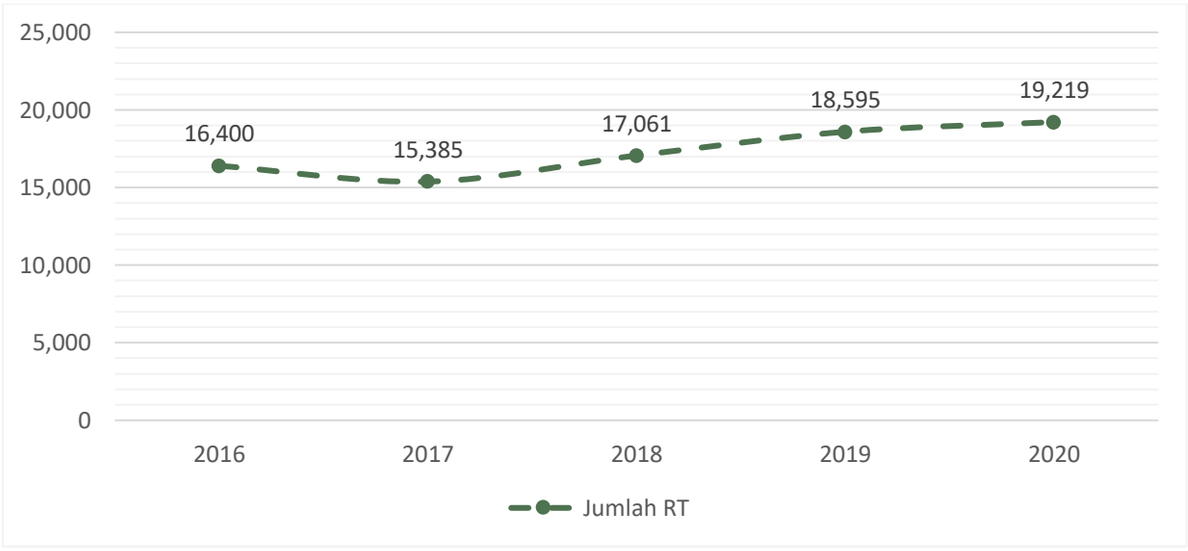

Gambar 2.117 Grafik Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Dari segi persentase cakupannya, pada tahun 2016, pengguna air bersih PDAM di Kabupaten Asahan mencapai 12,53 persen. Persentase tersebut kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 12,81 persen. Data terakhir pada tahun 2018, cakupan pengguna air bersih di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 15,36 persen. Sedangkan pada tahun 2019 dalam LKPJ Bupati Asahan disebutkan

bahwa persentase ketersediaan air pada tahun 2018 sebesar 36,52 persen, dan pada tahun 2019 naik hingga mencapai 41,84 persen.

Tabel 2.114 Cakupan Pengguna Air Bersih PDAM di Kabupaten Asahan, 2016-2018

Tahun	Cakupan Pengguna PDAM (%)
2016	12,53
2017	12,81
2018	15,36

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2018

2.4.2.8 Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Energi dan sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*). Sumber daya alam jenis ini mempunyai waktu pemulihan yang sangat lama, sehingga pemanfatannya harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia contohnya listrik yang berasal dari sumber daya energi. Sumber daya energi yang tidak bisa diperbaharui berasal dari minyak dan gas bumi (migas). Kebutuhan energi yang semakin meningkat dan menipisnya cadangan migas sebaiknya disertai dengan pengembangan sumber energi yang memanfaatkan sumber daya energi lain misalnya yang berasal dari gelombang laut, angin, air, dan matahari.

Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Asahan berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB.

Tabel 2.115 Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung, Jumlah KWH Terjual dan Penjualan Listrik PT. PLN (Persero) Rayon Kisaran Menurut Jenis Tarif di Kabupaten Asahan, 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Pelanggan	57.133	41.625	49.955
Daya Tersambung	63.485.305	52.619.005	63.527.205
Jumlah KWH Terjual	133.429.071	10.311.460	12.309.293
Penjualan Listrik	111.598.684.764	9.469.939.067	12.193.534.222

Sumber: Buku Saku Statistik Kabupaten Asahan 2015-2019.

Berdasarkan data dalam Buku Saku Statistik Kabupaten Asahan 2015 sampai dengan tahun 2019 dan BPS Kabupaten Asahan tahun 2021 seperti pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah pelanggan PLN Rayon Kisaran di Kabupaten Asahan cenderung semakin menurun. Pada tahun 2016 jumlah mencapai 57.133 unit, namun terus mengalami penurunan tiga tahun berturut-turut hingga pada tahun 2018 jumlah pelanggan PLN menjadi sebanyak 49.955 unit. Akan tetapi pada tahun 2018 jumlah pelanggan naik cukup signifikan daripada tahun 2017. Tahun 2020 jumlah tersebut turun menjadi 48.088 pelanggan

Sedangkan daya tersambung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014, daya tersambung sebanyak 61.403.055 KVA, kemudian naik relatif tajam pada tahun 2015 hingga sebanyak 336.397,10 KVA. Walaupun demikian pada tahun 2018 kembali turun cukup tajam yaitu sebanyak 63.527.205 KVA. Demikian juga jumlah KWH terjual dan penjualan listrik yang juga berfluktuatif. Jumlah KWH terjual tertinggi selama tahun 2014-2020 terjadi di tahun 2016 yaitu sebanyak 133.429.071 KWH, sedangkan penjualan terendah di tahun 2015 yaitu sebanyak 2.511,45 KWH. Penjualan listrik tertinggi juga terjadi di tahun 2016, sedangkan penjualan listrik terendah di tahun 2014.

Tabel 2.116 Jumlah Energi Listrik yang Diproduksi, Dibeli, Diterima, Susut dan Dijual PT. PLN (Persero) Rayon Kisaran (MWH) di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2020
Energi				
Diproduksi	-	-	-	
Dibeli	-	-	-	
Diterima dari GI	197.129.627	525.510.075	533.056.297	572.031.088
Pemakaian dan Susut				
Dipakai sendiri	-	-	-	
Susut jaringan distribusi (%)	17,87	13,12	13,05	7,87
Dijual	161.909.616	165.212.687	177.406.638	191.560.668
Dijual ke PLN Wil. I dan III	-	-	-	

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Jika dianalisis dari jumlah energi listrik yang diterima seperti disajikan pada Tabel 2.90, selama tahun 2016-2020 energi yang diterima PLN Rayon Kisaran di Kabupaten Asahan selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016 jumlah energi yang

diterima sebesar 197.129.627 MWH, dan terus meningkat hingga tahun 2018 mencapai 533.056.297 MWH. Pada tahun 2020 jumlah yang diterima sebesar 572.031.088 MWH dengan penyusutan jaringan sebesar 7,87 persen. Peningkatan tertinggi di tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 197.129.627 MWH menjadi 525.510.075 MWH. Namun peningktan tersebut tidak berbanding lurus dengan energi yang dijual, karena pada tahun 2016 energi yang dijual justru mengalami penurunan. Walaupun demikian pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2020 energi yang dijual naik berturut-turut sebesar 165.212.687 MWH, 177.406.638 MWH, dan 191.560.668 MWH.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja barusehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi iklim investasi di suatu daerah adalah angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan restribusi daerah, serta jumlah perda yang mendukung dunia usaha.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, faktor keamanan dan ketertiban di suatu daerah merupakan hal yang penting. Angka kriminalitas merupakan perbandingan antara jumlah kriminalitas di terhadap jumlah penduduk di suatu daerah. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan di masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.117 Jumlah Kriminalitas di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Narkoba	169	194	309	313	299
Jumlah Kasus Pembunuh	-	2	3	3	2
Jumlah Kejahatan Seksual	83	51	3	9	29
Jumlah Kasus Penganiayaan	107	93	289	238	267
Jumlah Kasus Pencurian	407	277	800	604	696
Jumlah Kasus Penipuan	54	63	81	91	78
Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-	6	1	9	3

Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	**820**	**686**	**1486**	**1267**	**1374**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

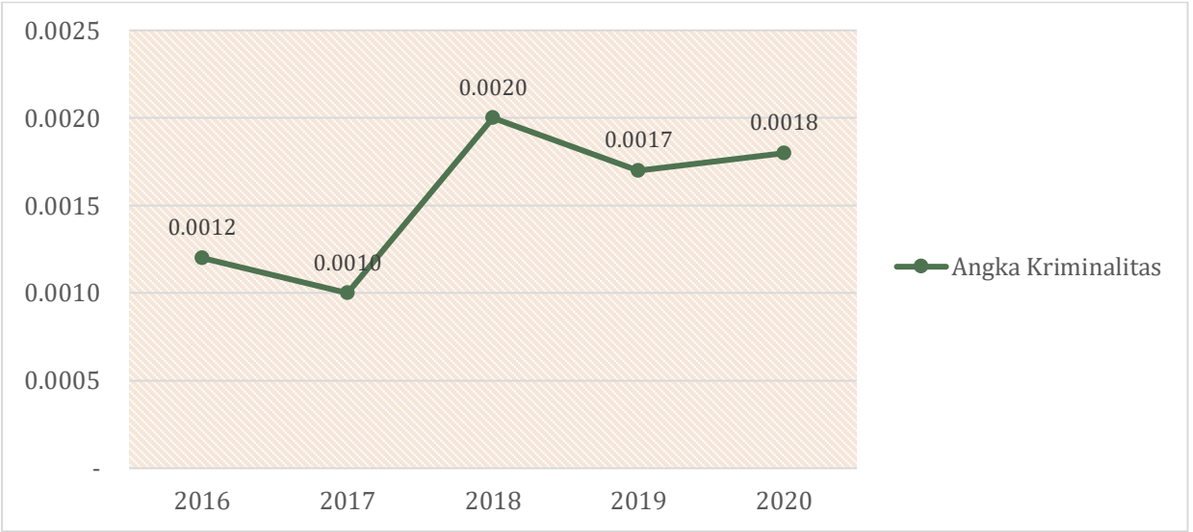

Gambar 2.118 Angka Kriminalitas di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Tabel 2.117 dan Gambar 2.118 menjukkan bahwa angka kriminalitas dari tahun 2016 – 2017 mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan pada tahun 2018, angka kriminalitas mencapai 0,0020, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,0017 serta pada tahun 2020 angka kriminlitas mengalami peningkatan 0,0018 dari jumlah tindak kriminalitas sebanyak 1.374 kasus pada tahun tersebut. Jika dirata-rata pada tahun 2020 tindak kejahatan sebanyak 3 - 4 kasus per hari. Meskipun mengalami peningkatan, angka tersebut secara umum relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas sosial masyarakat dan kegiatan berinvestasi. Akan tetapi, tetap diperlakukan upaya dari pemerintah daerah maupun polri untuk menekan peningkatan angka kriminalitas di tahun tahun selanjutnya. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui pembinaan keamanan dan ketertiban partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Selain data mengenai kriminalitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan juga menangani konflik mengenai SARA. Hal tersebut penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam suku, budaya, agama, dan ras yang saling berbaur menyatu dalam tatanan kehidupan bangsa, sehingga diperlukan kesatuan dan saling tenggang rasa terhadap satu sama lain. Mengenai penanganan konflik SARA, dari kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bahwa konflik SARA yang tertangani

adalah sebesar 100 persen, artinya pengendalian konflik tersebut telah tercapai dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang cukup signifikan di Kabupaten Asahan.

Tabel 2.118 Persentase Tingkat Pengendalian Penanganan Konflik SARA 2016-2020

Jenis	2016	2017	2018	2019	2020
Fasiitasi Penanganan Konflik SARA (persen)	0	0	0	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan 2021

2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Sebagai negara demokrasi, aksi unjuk rasa/demokrassi merupakan peristiwa yang umum sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut dapat memengaruhi iklim investasi dan bisnis jika proses demokrasi yang berupa aksi massa ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan tujuan untuk mengubah arah suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor utama yang mendorong investor untuk berinvestasi. Kebijakan yang berubah-rubah dan situasi politik yang tidak stabil dapat mengurangi minat investor dalam berinvestasi. Berikut merupakan jumlah aksi demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Asahan.

Tabel 2.119 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Jenis	2016	2017	2018	2019	2020
Unjuk rasa dari foksi mahasiswa	20	29	23	15	9
Unjuk rasa dari pemuda	37	10	28	16	14
Unjuk rasa dari masyarakat	19	14	17	5	10
Jumlah	**76**	**53**	**68**	**36**	**33**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah demonstrasi selama tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah demonstrasi sebanyak 76 aksi turun menjadi sebanyak 33 aksi pada tahun 2020. Secara umum kondisi tersebut relatif kondusif bagi berlangsungnya kegiatan investasi di Kabupaten Asahan.

2.4.3.3 Kemudahan Perizinan dan Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Kemudahan tata cara memperoleh perizinan dan prosedur untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Asahan. Selanjutnya, jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim usaha menunjukkan

upaya pemerintah untuk meningkatkan minat investor datang ke daerah. Indikator ini dugunakan untuk melihat berapa jumlah perda yang mendukung iklim usaha pada setiap tahun.

Tabel 2.120 Lama Perizinan dan Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha, 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Lama Perizinan	Hari	5	5	4	3	3
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	Buah	4	4	4	4	4

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2016-2020

Berdasarkan di atas, pada tahun 2016 lama proses perijinan yang dibutuhkan adalah selama 5 hari, tetapi pada tahun 2018 lama proses perijinan dipercepat yaitu menjadi 4 hari, dan pada tahun 2020 lama proses perizinan semakin dipercepat menjadi 3 hari. Sementara itu, jumlah perda yang mendukung iklim usaha mengalami stagnasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Dalam tahun-tahun berikutnya, pelayanan perizinan ini dapat terus disempunakan dan diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perizinan serta pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi.

2.4.3.4 Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah

Peningkatan daya saing sebuah daerah dapat meningkatnya daya tarik pelaku ekonomi untuk berinvestasi di daerah tersebut. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi sebuah daerah merupakan salah satu faktor yang dapat merepresentasikan meningkatnya iklim investasi di sebuah daerah. Hubungan mengenai jumlah penerimaan pajak dan retribusi dengan iklim investasi di sebuah daerah adalah semakin tinggi daya saing daerah akan menarik investor berinvestasi di daerah tersebut.

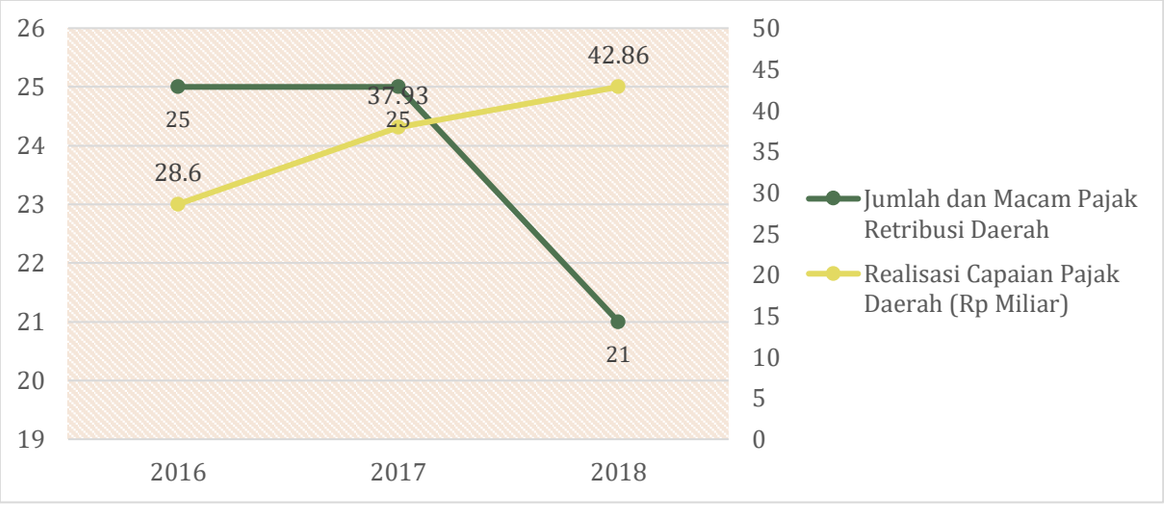

Gambar 2.119 Macam Pajak Retribusi Daerah dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2018

Sumber: LKPJ Bupati Asahan, 2017-2018

Berdasarkan grafik pada gambar di atas, sumber macam pajak daerah mengalami penurunan atau mengalami peringkasan. Pada tahun 2016 terdapat 25 sumber pajak daerah kemudian turun sepanjang tahun hingga pada tahun 2018 terdapat 21 sumber pajak daerah. Sedangkan berdasarkan jumlah realisasi capaian pajak daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 capaian realisasi pajak daerah sebesar 28,6 miliar rupiah. Pada tahun 2018 realisasi pajak daerah mencapai 42,86 miliar rupiah.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting bagi kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. SDM yang berkualitas memiliki andil besar dalam kemajuan dan pembangunan tersebut. Kualitas SDM dapat dilihat dari produktivitas tenaga kerja yang usianya berada pada rentang 15-64 tahun yang dimiliki oleh suatu daerah dan dilihat pula dari tingkat pendidikannya. Apabila tingkat pendidikan SDM suatu daerah semakin tinggi, maka diharapkan jika SDM tersebut memiliki kualitas yang lebih baik.

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja mengacu pada seberapa tinggi kualitas SDM yang dimiliki suatu daerah untuk penduduk yang berusia rentang 15-64 tahun. Kualitas tenaga kerja dapat diukur menggunakan perbandingan antara lulusan sarjana (S1, S2, dan S3) terhadap jumlah penduduk di suatu daerah. Perhitungan tersebut akan menghasilkan rasio lulusan sarjana terhadap jumlah penduduk. Di Kabupaten Asahan, mengambil data sarjana lengkap yang merupakan pencari kerja dan jumlah penduduk di kabupaten tersebut, dapat dihitung rasionya. Terlihat jika rasio tertinggi di kabupaten tersebut ada pada tahun 2019 sebesar

0,0012. Pada tahun 2016 sebesar 0,0005, namun penurunan terjadi pada tahun 2017 dimana rasio yang dicapai adalah 0,0002. Akan tetapi, tercatat jika pada tahun 2018-2019 masing-masing rasio mengalami peningkatan menjadi 0,0006 dan 0,0012, namun menurun ditahun 2020 menjadi 0,0010.

Tabel 2.121 Rasio Lulusan Sarjana terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Asahan, 2014-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Sarjana lengkap (jiwa)	340	165	429	898	795
Jumlah penduduk (jiwa)	712.684	718.718	724.379	729.795	769.960
Rasio lulusan sarjana terhadap jumlah penduduk	**0,0005**	**0,0002**	**0,0006**	**0,0012**	**0,0010**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2015-2019

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Adapun penduduk yang berusia produktif adalah penduduk yang berusia pada rentang 15-64 tahun sedangkan penduduk yang tidak produktif adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Oleh karena itu, dapat dihitung seberapa besar jumlah penduduk yang bergantung pada penduduk usia kerja pada suatu daerah.

Bila dicermati, jumlah penduduk yang berusia tidak produktif di Kabupaten Asahan pada tahun 2016-2019 terus meningkat, dari 258.921 jiwa (2016) menjadi 263.486 jiwa (2019), dan menurun pada tahun 2020 menjadi 252.686 jiwa. Hal tersebut juga sejalan dengan jumlah penduduk usia produktif pada rentang tahun yang sama, yaitu 453.763 jiwa (2016) menjadi 517.274 jiwa (2020). Berdasarkan perhitungan, apabila dicermati, maka rasio ketergantungan di Kabupaten Asahan pada 2016-2019 cenderung stabil pada angka 0,57 (2016-2019) dan 0,49 (2020). Artinya, pada tahun 2020 setiap 100 orang penduduk berusia kerja (usia produktif) memiliki tanggungan sebanyak 49 orang penduduk yang tidak produktif.

Tabel 2.122 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Asahan, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk usia <15 tahun (jiwa)	226.890	227.102	227.132	226.876	216.553
Jumlah penduduk usia >64 tahun (jiwa)	32.031	33.366	34.887	36.610	36.133

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk usia tidak produktif (jiwa)	258.921	260.468	262.019	263.486	252.686
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun (jiwa)	453.763	458.250	462.360	466.309	517.274
Rasio ketergantungan	**0,57**	**0,57**	**0,57**	**0,57**	**0,49**

Sumber: BPS Kabupaten Asahan, 2017-2021


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
KETUA DPRD
KABUPATEN ASAHAN
BUPATI



BAB 3
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika pemerintahan daerah diibaratkan sebagai satu organ tubuh maka fungsi keuangan daerah dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai jantung yang senantiasa memompakan darah segar bagi fungsi/sektor pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan.

Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah *instrumen kunci dari* kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara "*revenue* dan *expenditure*". Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainabilty*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini :

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

Gambaran kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan dan proposi komponen APBD berupa; pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, disamping juga dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kapasitas fiscal, ruang fiskal dan *tax ratio*.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Asahan meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)

No	Uraian	Tahun					R (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	PENDAPATAN	1.614.734,43	1.487.832,24	1.615.917,02	1.724.265,27	1.611.493,53	0,23%
04.01	Pendapatan Asli Daerah	119.498,54	123.695,03	142.972,03	149.647,05	159.308,33	7,56%
04.02	Dana Perimbangan	1.188.340,36	1.279.271,63	1.176.621,45	1.198.101,35	1.071.185,61	-2,28%
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	306.895,52	84.865,57	296.323,52	376.516,87	380.999,59	51,27%
5	BELANJA	1.501.954,70	1.662.694,85	1.623.250,76	1.775.230,08	1.587.136,69	1,77%
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	969.569,87	976.834,64	1.050.709,64	1.044.150,32	1.086.130,99	2,93%
05.02	BELANJA LANGSUNG	532.384,83	685.860,21	572.541,12	731.079,75	501.005,69	2,13%
	Surplus (Defisit)	112.779,13	-174.862,61	-7.333,73	-50.964,80	24.356,84	24,07%
6	PEMBIAYAAN						
06.01	PENERIMAAN DAERAH	171.391,13	262.737,62	85.242,49	74.157,05	20.069,39	-25,05%
06.02	PENGELUARAN DAERAH	21.489,59	3.369,80	3.755,59	3.200,02	2.500,00	-27,38%
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	149.901,53	259.367,82	81.486,90	70.957,02	17.569,39	-20,93%
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	262.681,26	84.505,21	74.153,16	19.992,21	41.926,23	-10,85%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Asahan, 2016– 2020 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan perkembangan APBD Kabupaten Asahan tahun 2016 - 2020, selama periode tersebut realisasi total pendapatan daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,23 persen per tahun. Selama periode 2016-2019 realisasi total pendapatan mengalami fluktuasi dari sebesar Rp.1,61 triliun pada tahun 2016, hingga menjadi sebesar Rp.1,72 triliun pada pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 6,54 persen sehingga realisasi pendapatan menjadi sebesar Rp.1,61 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari pendapatan daerah yang mencapai rata-rata sebesar 1,77 persen per tahun, dari sebesar Rp.1,50 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.1,59 triliun pada tahun 2020. Dari segi realisasi pembiayaan, surplus pembiayaan mengalami pertumbuhan negatif yaitu mencapai rata-rata sebesar -20,93 persen, dari sebesar Rp.149,90 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.17,57 miliar pada tahun 2020.

Jika dilihat dari pola perimbangan antara pendapatan dan belanja daerah terlihat pada periode tahun 2017-2019 setiap tahun terjadi defisit pada APBD Kabupaten Asahan, sedangkan pada tahun 2016 dan 2020 terjadi surplus anggaran. Pada tahun 2016 terjadi surplus anggaran yang mencapai sebesar Rp.112,77 milyar, kemudian tahun 2017 mengalami defisit anggaran yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.174,86 milyar. Pada tahun 2018 masih terjadi defisit anggaran namun menunjukkan perbaikan kinerja dengan nilai defisit anggaran sebesar yang mencapai Rp.7,33 milyar. Sedangkan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan defisit hingga mencapai nilai sebesar Rp.50,96 milyar. Selanjutnya, pada tahun 2020 terjadi surplus anggaran sebesar Rp.24,36 miliar.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keungan Daerah maka mulai tahun 2020, kategorisasi Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 3 2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	R (%)
4	PENDAPATAN	1.614.734,43	1.487.832,24	1.615.917,02	1.724.265,27	1.611.493,83	0,23%
04.01	Pendapatan Asli Daerah	119.498,54	123.695,03	142.972,03	149.647,05	159.308,33	7,56%
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	28.606,02	37.930,65	42.852,88	55.100,68	59.944,43	20,74%
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	6.138,78	5.668,24	5.859,94	7.080,35	7.845,11	6,84%
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.944,62	9.146,60	10.193,76	8.685,77	7.976,04	-4,89%
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.809,10	70.949,54	84.065,45	78.780,23	83.542,75	3,27%
04.02	Dana Perimbangan	1.188.340,36	1.279.271,63	1.176.621,45	1.198.101,35	1.071.185,61	-2,28%
04.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	72.025,98	56.352,18	65.622,11	52.397,43	38.535,20	-12,98%
04.02.02	Dana Alokasi Umum	891.149,64	875.860,02	877.794,63	917.363,71	830.586,75	-1,61%
04.02.03	Dana Alokasi Khusus	45.238,21	205.086,86	233.204,70	228.340,20	202.063,66	88,37%
04.02.04	Dana Alokasi Khusus IPD	38.890,08	-	-	-	-	-
04.02.05	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	141.036,43	-	-	-	-	-

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	R (%)
04.02.06	Dana Desa	-	141.972,56	-	-	-	-
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	306.895,52	84.865,57	296.323,52	376.516,87	380.999,59	51,27%
04.03.01	Pendapatan Hibah	25.989,59	-	75.534,21	102.548,90	2.836,43	-30,73%
04.03.03	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	127.425,54	84.865,57	64.226,59	117.227,60	83.668,27	-0,96%
04.03.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	1.572,68	-	29.949,91	-	-	-
04.03.07	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
04.03.17	Anggaran Alokasi Dana Desa	111.404,03	-	126.612,80	145.800,98	148.593,49	8,54%
04.03.18	Dana Insentif Daerah (DID)	40.503,67	-	-	10.939,37	57.564,94	426,21%*

Sumber: LRA Kabupaten Asahan 2016-2020
**pertumbuhan tahun 2020*

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 realisasi total pendapatan mengalami fluktuasi dari sebesar Rp.1,61 triliun pada tahun 2016, hingga menjadi sebesar Rp. 1,72 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 6,54 persen sehingga realisasi pendapatan menjadi sebesar Rp.1,61 triliun. Secara keseluruhan pada periode 2016-2020, kontribusi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Asahan masih berasal dari dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum. Sehingga ketergantungan fiskal terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Pendapatan asli daerah yang merupakan indikator kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah selama periode tersebut tumbuh rata-rata sebesar 7,56 persen pertahun. Meskipun total realisasi pendapatan di Kabupaten Asahan pada tahun 2020 mengalami penurunan, namun Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 6,46 persen. Kemudian dana perimbangan turun rata-rata sebesar -2,28 persen pertahun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tumbuh sebesar 51,27 persen pertahun, dikarenakan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan antara tahun 2017 ke tahun 2018. Peningkatan PAD dalam masa pandemi Covid-19 tersebut, menunjukkan bahwa ekonomi daerah khususnya yang tercermin dari objek-objek PAD di Kabupaten Asahan tergolong cukup stabil.

Di sisi lain, dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Asahan dapat dikatakan masih sangat didominasi oleh besarnya kontribusi dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum. Pendapatan asli daerah masih menjadi sumber yang memiliki kontribusi paling sedikit dibandingkan dua sumber pendapatan lainnya. Seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

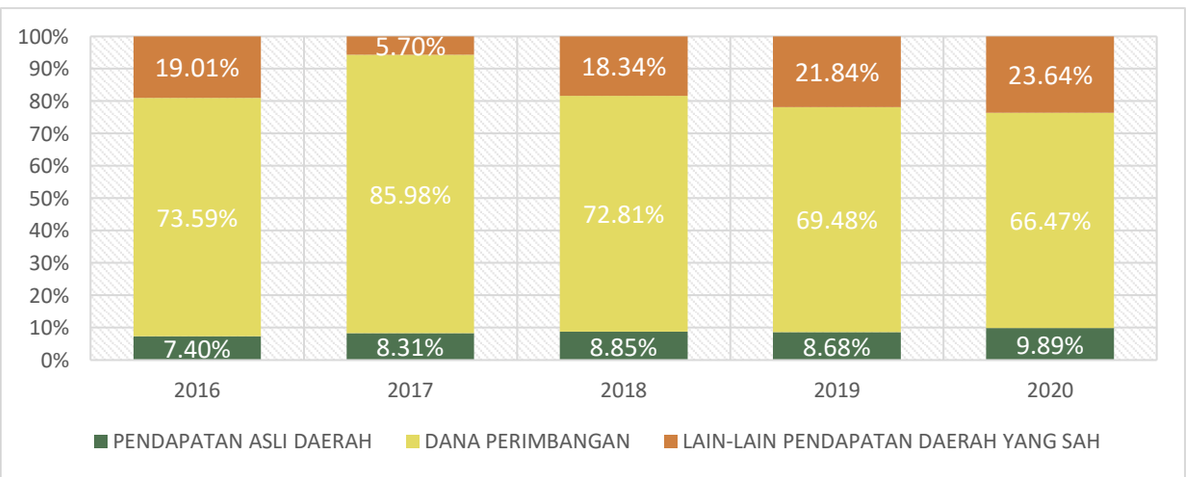

Gambar 3. 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LRA Kabupaten Asahan 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Kabupaten Asahan sepanjang tahun 2016-2020. Pada periode tersebut terlihat bahwa Dana Perimbangan memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah. Kontribusi Dana Perimbangan yakni sebesar 73,59 persen pada tahun 2016 hingga

mencapai 66,47 persen pada tahun 2020. Meskipun Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi terendah terhadap total pendapatan daerah, namun terus mengalami tren peningkatan peran, dari sebesar 7,40 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,31 persen pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,85 persen pada tahun 2018, mengalami sedikit penurunan sehingga menjadi sebesar 8,68 persen pada tahun 2019, lalu meningkat menjadi 9,89 persen di tahun 2020. Sedangkan pendapatan daerah lainnya juga memberikan kontribusi dengan kisaran angka 5,70 persen sampai dengan 23,64 persen pertahun.

Selama periode tahun 2016-2020, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD Kabupaten Asahan masih di bawah 100 persen. Pada tahun 2016, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Asahan berhasil mencapai target dengan nilai persentase sebesar 107,44 persen. Namun, pada tahun 2017 hingga 2020, pendapatan daerah Kabupaten Asahan tidak dapat mencapai target 100 persen, dengan nilai persentase berkisar 94,90 persen hingga 98,12 persen.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2016	1.502.930.028.344,80	1.614.734.437.069,48	107,44	111.804.408.724,68
2017	1.532.579.693.523,10	1.487.832.248.097,59	97,08	-44.747.445.425,51
2018	1.646.804.154.010,29	1.615.917.027.263,00	98,12	-30.887.126.747,29
2019	1.814.345.640.848,37	1.724.265.273.792,65	95,04	-90.080.367.055,72
2020	1.698.111.574.562,28	1.611.493.527.825,54	94,90	-86.618.046.736,74

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

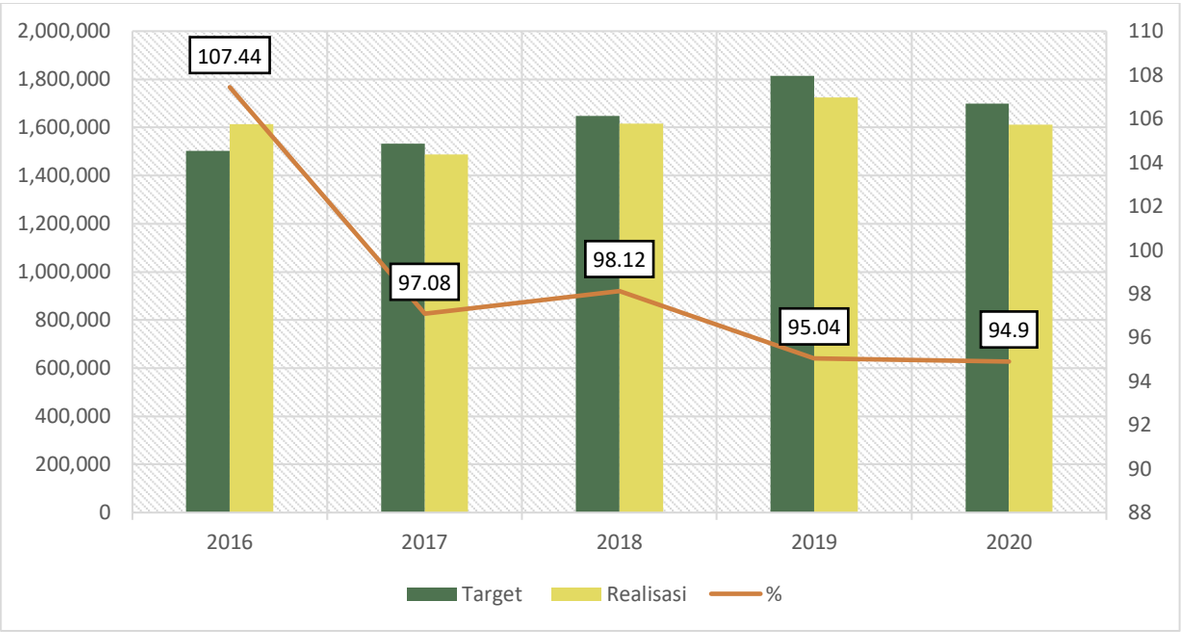

Gambar 3. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

3.1.1.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja ini dibagi menjadi belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Secara umum dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Asahan terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Tabel berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah realisasi belanja daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 1,50 triliun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 1,77 triliun pada tahun 2019. kemudian di tahun 2020, terjadi penurunan realisasi belanja yang cukup signifikan menjadi Rp 1,59 triliun. Selama periode 2016-2020 belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,77 persen pertahun. Jika dilihat dari distribusi pertumbuhan belanja daerah diketahui bahwa alokasi belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan alokasi terhadap belanja langsung pada

periode 2016 hingga 2020. Belanja tidak langsung rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 2,93 persen, sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,13 persen per tahun. Di sisi lain, penting untuk menjadi perhatian bahwa di tahun 2020, terjadi penurunan signifikan pada belanja langsung sebesar 31,47 persen. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung tersebut mengindikasikan semakin besarnya belanja untuk kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik.

Pos belanja tidak langsung dalam periode tahun 2016-2020 memiliki pola yang fluktuatif. Pos belanja pegawai mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,38 persen per tahun. Kemudian belanja hibah mengalami pertumbuhan sebesar 61,38 persen per tahun, belanja bantuan sosial turun dengan rerata sebesar 4,55 persen per tahun. Pos belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengalami peningkatan rata-rata sebesar 30,91 persen per tahun, sedangkan pos belanja Bantuan Keuangan Kepada desa/kelurahan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,67 persen per tahun. Pengalokasi komposisi belanja untuk pelaksanaan kegiatan juga terlihat semakin baik, hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya jumlah belanja kegiatan yang teralokasi pada jenis belanja barang dan belanja modal. Selama periode tahun 2016-2020 terlihat pos belanja pegawai pada belanja langsung mengalami peningkatan rerata sebesar 7,12 persen per tahun, kemudian belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,40 persen per tahun dan belanja modal mengalami pertumbuhan negatif rerata sebesar 1,60 persen per tahun.

Tabel 3 4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	R (%)
5	BELANJA	1.501.954,70	1.662.694,85	1.623.250,76	1.775.230,08	1.587.136,69	1,77 %
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	969.569,87	976.834,64	1.050.709,64	1.044.150,32	1.086.130,99	2,93 %
05.01.01	Belanja Pegawai	731.503,43	653.977,71	699.711,31	701.182,93	658.161,27	-2,38 %
05.01.03	Belanja Subsidi	2.749,99	2.999,99	2.999,40	-	-	4,54 %
05.01.04	Belanja Hibah	22.430,42	43.198,43	106.567,77	69.838,43	98.279,06	61,38%
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	12.749,88	16.106,30	14.568,06	20.469,80	5.016,11	-4,55 %
05.01.06	Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota dan PemDes	-	2.860,59	4.289,71	6.140,94	6.117,13	30,91%
05.01.07	Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota/Desa dan Parpol	200.136,12	255.809,57	222.570,80	246.518,21	268.935,93	8,67 %
05.01.08	Belanja Tidak Terduga	-	1.882,02	2,55	-	49.621,50	-
05.02	BELANJA LANGSUNG	532.384,83	685.860,21	572.541,12	731.079,75	501.005,69	2,13 %
05.02.01	Belanja Pegawai	53.462,33	60808,04	54.983,33	38.132,75	59.091,42	7,12 %
05.02.02	Belanja Barang dan Jasa	241.245,54	274.906,13	287.357,66	388.468,42	294.931,26	7.40 %
05.02.03	Belanja Modal	237.676,95	350.146,02	230.200,11	304.478,57	146.983,02	-1,60 %

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat masih besarnya belanja daerah yang teralokasi pada belanja tidak langsung. Selama periode 2016 sampai 2020, peranan belanja tidak langsung mencapai kisaran angka sebesar 58,75 persen sampai dengan 68,43 persen, sedangkan proporsi belanja langsung mencapai kisaran angka 31,57 persen sampai dengan 41,25 persen. Berdasarkan komposisi yang lebih besar pada belanja tidak langsung mengindikasikan rendahnya sisa ruang fiskal yang dimiliki daerah untuk mendukung belanja program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraaan masyarakat.

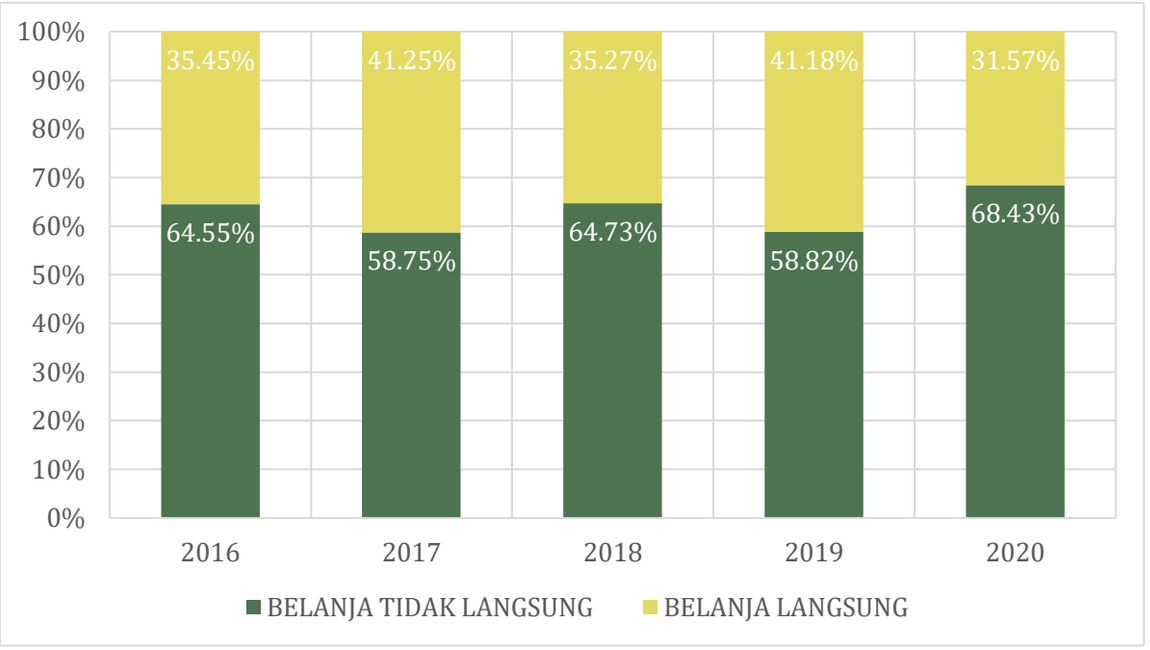

Gambar 3.3 Komposisi Belanja Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

Selama periode tahun 2016-2020, rencana belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang dapat diwujudkan oleh daerah yang hanya mencapai kisaran angka sebesar 90,87 persen sampai dengan 94,16 persen. Pada periode tahun 2016-2019, realisasi telah mengalami peningkatan pertahunnya, namun terjadi penurunan di tahun 2020, yaitu menjadi sebesar 92,51 persen dari target.

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2016	1.652.784.399.689,50	1.501.954.701.573,97	90,87	-150.829.698.115,53
2017	1.791.891.162.417,01	1.662.694.858.803,13	92,79	-129.196.303.613,88
2018	1.727.553.768.237,19	1.623.250.765.025,40	93,96	-104.303.003.211,79
2019	1.885.298.783.893,37	1.775.230.082.118,21	94,16	-110.068.701.775,16

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2020	1.715.603.792.831,72	1.587.136.692.931,23	92,51	-128.467.099.900,49

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

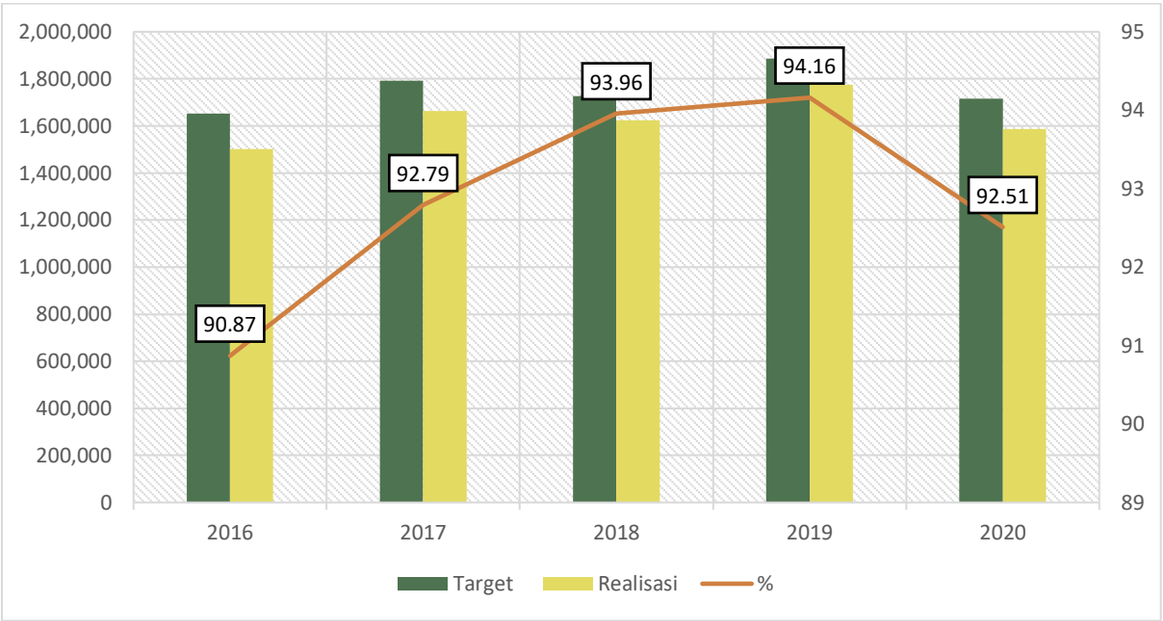

Gambar 3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan

modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Asahan tahun 2016-2020. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Asahan sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 3.6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	r (%)
1	Pendapatan Daerah	1.614.734,43	1.487.832,24	1.615.917,02	1.724.265,27	1.611.493,53	0,23
2	Belanja Daerah	1.501.954,70	1.662.694,85	1.623.250,76	1.775.230,08	1.587.136,69	1,77
	Surplus/Defisit	112.779,73	-174.862,61	-7.333,73	-50.964,80	24.356,84	24,07
3	Pembiayaan daerah						
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	171.391,13	262.737,62	85.242,49	74.157,04	20.069,39	-25,05
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.489,59	3.369,80	3.755,59	3.200,02	2.500,00	-27,38
	Pembiayaan Netto	149.901,53	259.367,82	81.486,90	70.957,02	17.569,39	-20,93
	Sisa Lebih/Kurang Pembiyaaan Tahun Berkenaan	262.681,26	84.505,21	74.153,16	19.992,21	41.926,23	-10,85

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

3.2 Analisis Keuangan Daerah

3.2.1 Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah setelah dikeluarkannya pendapatan-pendapatan yang sudah tertentu penggunaannya dan dipenuhinya belanja belanja yang besifat wajib. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat (*earmarked;* ditentukan penggunaannya). Semakin besar Ruang Fiskal daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada BUMD. Secara teknis perhitungan ruang fiskal dapat menggunakan formula berikut ini;

Ruang Fiskal	=	(Total Pendapatan + silpa) – Pendapatan Mengikat – Belanja Wajib Daerah
Pendapatan Mengikat	=	DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/otsus
Belanja Wajib	=	Belanja Urusan Pendidikan (20%) + Belanja Urusan Kesehatan (10%) + Gaji dan Tunjangan + belanja wajib lainnya

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya Ruang Fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005) mengemukakan bahwa Ruang Fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

Sesuai dengan hasil perhitungan Ruang Fiskal Kabupaten Asahan tahun 2016-2020 ditemukan ruang fiskal yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Asahan cukup terbatas dalam mendanai penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan daerah. Tabel berikut menunjukkan hasil ruang fiskal daerah di Kabupaten Asahan. Pada tahun 2016, ruang fiskal Kabupaten Asahan mencapai sebesar Rp.274,44 milyar yang kemudian menurun menjadi sebesar Rp.141,95 milyar pada tahun 2017 dan terus menurun hingga mencapai nilai sebesar Rp.110,74 milyar pada tahun 2018. Pada tahun 2019 ruang fiskal kembali

mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.119,89 milyar. Kemudian pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 196,59 milyar.

Tabel 3.7 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PENERIMAAN	**1.786.125,56**	**1.750.569,86**	**1.701.159,51**	**1.798.422,31**	**1.631.563,22**
PENDAPATAN MENGIKAT	**251.154,31**	**347.059,42**	**308.738,91**	**330.889,10**	**204.927,09**
DAK	45.238,21	205.086,86	233.204,70	228.340,20	202.063,66
Hibah	25.989,59	-	75.534,21	102.548,90	2.863,43
Dana Penyesuaian	179.926,51	-	-	-	-
Dana Desa	-	141.972,56	-	-	-
BELANJA MENGIKAT	**806.601,17**	**739.973,04**	**785.163,56**	**796.085,37**	**743.635,23**
Belanja Pegawai	731.503,43	653.977,71	699.711,31	701.182,93	658.161,27
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	2.860,59	4.289,71	6.140,94	6.117,13
Belanja Adum (5%)	75.097,74	83.134,74	81.162,54	88.761,50	79.356,83
BELANJA WAJIB	**453.922,79**	**521.580,15**	**496.510,49**	**551.555,07**	**486.406,81**
Belanja Pendidikan 20%	154.090,25	201.743,43	184.707,89	214.809,43	185.795,08
Belanja Kesehatan 10%	77.045,13	100.871,71	92.353,95	107.404,72	92.897,54
Belanja Infrastruktur (25%*DAU)	222.787,41	218.965,01	219.448,66	229.340,93	207.714,19
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT SERTA BELANJA WAJIB	**1.511.678,27**	**1.608.612,61**	**1.590.412,96**	**1.678.529,55**	**1.434.969,14**
RUANG FISKAL	**274.447,29**	**141.957,25**	**110.746,55**	**119.892,76**	**196.594,08**

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

3.2.1.1 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementrian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Pada pasal 1 butir 2 Peraturan Kementrian Keuangan PMK No. 37/PMK.07/2016 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya Formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

$$KF = \frac{(\text{PAD} + \text{DAU} + \text{DBH} + \text{OTSUS} + \text{TRANSFER PROV} + \text{LP}) - \text{BP}}{\text{JUMLAH PENDUDUK MISKIN}}$$

Keterangan

- KF = Kapasitas Fiskal
- PAD= Pendapatan Asli Daerah
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DAU = Dana Alokasi Umum
- Otsus = Dana Otonomi Khusus
- Transfer Prov = Transfer= Pemerintah Provinsi ke Kabupaten /Kota (bernilai positif untuk
- Kabupaten /Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)
- LP= Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- BP= Belanja Pegawai

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementrian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka dapat dikemukakan, Nilai Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Asahan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perubahan

yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, nilai IKF Kabupaten Asahan menunjukan nilai sebesar 0,4 atau masuk dalam kategori rendah, Pada tahun 2017, nilai IKF Kabupaten Asahan mengalami peningkatan yakni sebesar 0,97 sehingga masuk ke dalam kategori sedang. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019, nilai IKF Kabupaten Asahan mengalami peningkatan dengan nilai IKF mencapai 1,027 pada tahun 2018 dan 0,92 pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020, nilai IKF Kabupaten Aasahan turun menjadi 0,86.

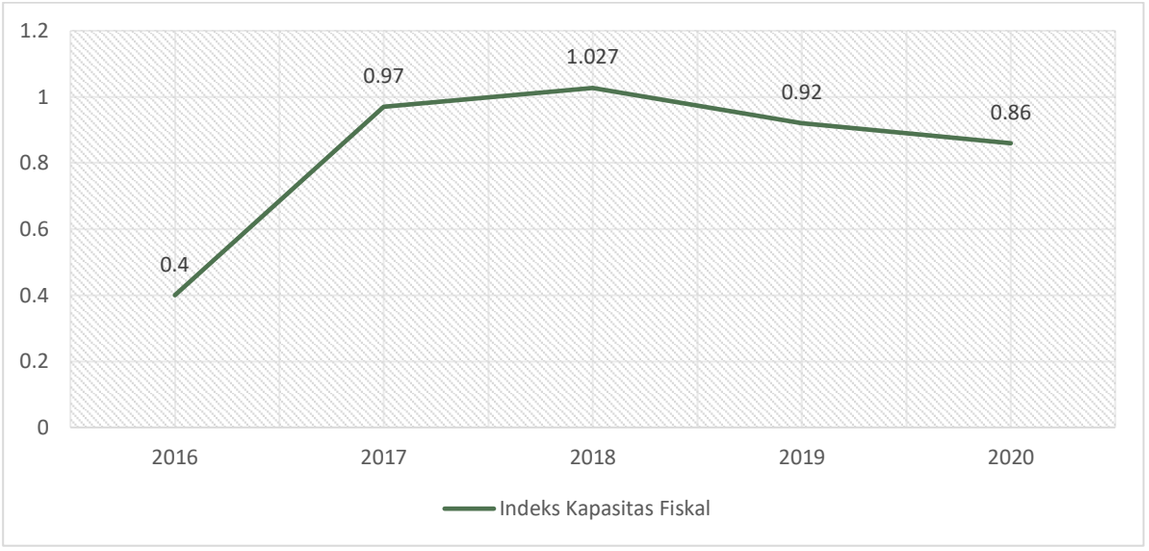

Gambar 3.5 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

3.2.2 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah Kabupaten Asahan mengalami tren penurunan selama periode tahun 2016-2020. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2016 yakni sebesar 1,17. Mengalami penurunan pada tahun 2017 yakni sebesar 1,05 dan terus menurun hingga mencapai nilai 1,04 pada tahun 2018 dan 1,01 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan menjadi 1,03. Berkaitan dengan kondisi tersebut, meskipun tahun 2020 telah mengalami peningkatan, namun masih diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan.

Tabel 3.8 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Penerimaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Total Pengeluaran	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
2016	1.614.734	171.391	1.786.126	1.501.954	21.489	1.523.444	1,17
2017	1.487.832	262.737	1.750.570	1.662.694	3.369	1.666.065	1,05
2018	1.615.917	85.242	1.701.160	1.623.250	3.755	1.627.006	1,04
2019	1.724.265	74.157	1.798.422	1.775.230	3.200	1.778.430	1,01
2020	1.611.494	20.069	1.631.563	1.587.137	2.500	1.589.637	1,03

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

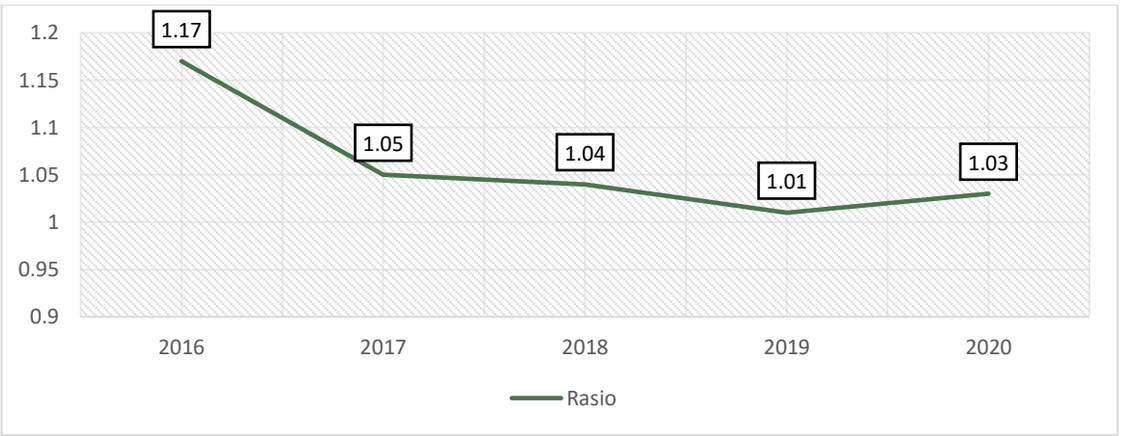

Gambar 3.6 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Asahan 2016-2020

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

3.2.3 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Asahan selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Asahan, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	1.614.734,43	1.487.832,24	1.615.917,02	1.724.265,27	1.611.493,53
2	Belanja Daerah	1.501.954,70	1.662.694,85	1.623.250,76	1.775.230,08	1.587.136,69
	Surplus/Defisit	112.779,73	-174.862,61	-7.333,73	-50.964,80	24.356,84

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Pembiayaan daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	171.391,13	262.737,62	85.242,49	74.157,04	20.069,39
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.489,59	3.369,80	3.755,59	3.200,02	2.500,00
	Pembiayaan Netto	149.901,53	259.367,82	81.486,90	70.957,02	17.569,39
	Sisa Lebih/Kurang Pembiyaaan Tahun Berkenaan	262.681,26	84.505,21	74.153,16	19.992,21	41.926,23

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2016-2020, terjadi pola fluktuasi pembiayaan netto pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pembiayaan netto Kabupaten Asahan mencapai nilai sebesar Rp.149,90 milyar, mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2017 yakni mencapai Rp.259,36 milyar. Pada tahun 2018, pembiayaan netto kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga nilai pembiayaan netto mencapai Rp.81,48 milyar. Pada tahun 2019, nilai pembiyaan netto Kabupaten Asahan kembali mengalami penurunan sehingga mencapai nilai sebesar Rp.70,95 milyar. Selanjutnya, di tahun 2020, pembiayaan netto mengalami penurunan signifikan menjadi Rp.17,57 milyar.

Tabel 3.10 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Asahan, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.614.734,43	1.487.832,24	1.615.917,02	1.724.265,27	1.611.493,53
	Dikurangi					
2	Realisasi Belanja Daerah	1.501.954,70	1.662.694,85	1.623.250,76	1.775.230,08	1.587.136,69
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.489,59	3.369,80	3.755,59	3.200,02	2.500,00
	Surplus/Defisit Riil	91.290,14	-178.232,41	-11.089,33	-54.164,83	21.856,84

Sumber: LRA Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

3.2.4 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Asahan pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp.3,23 triliun yang kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar Rp.3,25 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2018, nilai total aset daerah kembali meningkat menjadi sebesar Rp.3,38 triliun dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.3,49 triliun. Kemudian, di tahun 2020, nilai total aset meningkat menjadi Rp.3,52 triliun. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Kewajiban daerah terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan, dalam kurun waktu

lima tahun (2016-2020) mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, jumlah kewajiban daerah kabupaten Asahan mencapai nilai sebesar Rp.20,54 milyar kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga mencapai Rp.12,34 milyar. Pada tahun 2018, jumlah kewajiban daerah kembali mengalami penurunan yaitu hingga mencapai Rp.9,36 milyar. Pada tahun 2019, jumlah kewajiban daerah Kabupaten Asahan kembali mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai nilai sebesar Rp.36,01 milyar. Kemudian, di tahun 2020, mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.7,81 milyar.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2016-2020, nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Asahan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai ekuitas daerah kabupaten Asahan mencapai nilai sebesar Rp.3,21 triliun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga mencapai Rp.3,244 triliun. Pada tahun 2018, nilai ekuitas daerah kembali mengalami peningkatan yaitu hingga mencapai Rp.3,37 triliun. Pada tahun 2019, nilai ekuitas daerah Kabupaten Asahan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai nilai sebesar Rp.3,46 triliun. Kemudian pada tahun 2020, nilai ekuitas daerah Kabupaten Asahan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai nilai sebesar Rp.3,51 triliun.

Tabel 3.11 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Growth
ASET						
ASET LANCAR						
Kas Di Kas Daerah	259.715.291.167,51	84.080.010.261,50	65.451.640.536,09	7.624.444.058,46	33.248.778.293,63	39,49
Kas Di Bendahara Penerimaan	34.601.996,00	25.171.940,00	40.444.134,00	25.173.536,00	25.158.884,00	-1,10
Kas Di Bendahara Pengeluaran	714.255.830,00	757.211.000,00	394.181.546,00	655.529,00	18.863.800,00	658,97
Kas di BLUD	2.251.722.367,40	424.443.638,40	7.912.160.024,40	3.155.499.089,40	6.970.166.748,40	435,94
Kas Lainnya	9.704.477,37	955.978.044,00	396.409.933,51	9.440.401.088,58	1.787.663.170,18	2973,19
Setara Kas	-	-	-	-		
Kas Di BOS	1.964.700.656,20	-	-	-		
Kas di FKTP Dinas Kesehatan	-	-	-	-		
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-		
Piutang Pendapatan	81.746.589.367,16	91.858.816.132,63	103.027.330.254,76	82.098.147.473,95	79.982.482.283,75	
Piutang Lainnya	7.326.706.781,00	7.637.289.281,00	11.386.970.942,13	16.002.476.701,13	11.914.705.160,13	17,08
Penyisihan Piutang	-18.151.893.149,13	-32.359.143.290,52	-36.977.849.737,68	-37.832.861.068,09	-40.464.359.915,29	25,45
Beban Dibayar Dimuka	27.500.000,00	28.025.000,00	30.858.333,34	28.333.333,34	29.666.666,67	2,14
Persediaan	6.563.998.637,72	13.915.057.204,31	13.441.662.758,15	17.490.405.735,34	18.826.626.430,83	36,59
JUMLAH ASET LANCAR	342.203.178.131,23	166.566.405.422,32	165.103.808.724,70	98.032.675.477,11	112.339.751.468,30	-19,56

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Growth
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-		
Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-		
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-		
Dana Bergulir	-	-	-	-		
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-		
Investasi Non Permanen Lainnya	31.794.096.865,11	31.626.101.658,33	31.543.980.364,07	31.533.079.925,88	31.455.072.963,79	-0,27
Penyisihan Investasi Non Permanen	- 9.912.560.431,34	- 14.863.783.060,31	- 19.121.630.390,55	- 21.542.331.851,46	-21.658.651.472,24	22,95
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**21.881.536.433,77**	**16.762.318.598,02**	**12.422.349.973,52**	**9.990.748.074,42**	**9.796.421.491,55**	-17,70
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31.346.466.543,12	35.166.113.929,54	68.020.110.304,16	67.292.603.084,98	66.608.624.665,80	25,88
Investasi Permanen	-	-	-			

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Growth
Lainnya						
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	**31.346.466.543,12**	**35.166.113.929,54**	68.020.110.304,16	**67.292.603.084,98**	66.608.624.665,80	25,88 %
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**53.228.002.976,89**	**51.928.432.527,56**	**80.442.460.277,68**	**77.283.351.159,40**	**76.405.046.157,35**	11,85
ASET TETAP						
Tanah	837.589.238.141,00	814.534.905.676,00	812.697.068.376,00	863.775.710.626,00	860.989.104.276,00	0,75
Peralatan dan Mesin	342.917.312.683,10	338.500.341.244,03	360.140.357.433,26	399.871.820.814,00	438.112.194.991,61	6,43
Gedung dan Bangunan	845.311.970.651,95	840.048.131.338,67	885.241.321.054,67	954.843.995.762,46	977.603.130.202,89	3,75
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.384.623.204.221,18	1.569.992.928.599,91	1.754.974.925.035,95	1.880.909.829.923,38	1.930.462.029.421,83	8,75
Aset Tetap Lainnya	137.679.397.587,96	146.554.482.701,32	139.058.495.348,76	124.050.132.215,73	136.794.446.870,73	0,20
Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.385.864.427,27	15.202.431.065,00	3.427.646.065,00	19.612.999.285,00	17.943.924.316,73	94,75
Akumulasi Penyusutan	- 744.133.733.249,09	- 767.347.323.650,98	- 848.008.966.505,98	- 951.927.228.534,66	-1.059.403.922.720,90	9,29
JUMLAH ASET TETAP	2.820.373.254.463,37	2.957.485.896.973,95	3.107.530.846.807,66	3.291.137.260.091,91	3.302.500.907.358,89	4,05
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-		
JUMLAH DANA CADANGAN	**-**	-	-	-		
ASET LAINNYA						

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Growth
Tagihan Jangka Panjang	37.500.000,00	-	-	-		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-		
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-		
Aset Lain-lain	14.901.803.370,34	81.252.255.619,75	29.295.461.134,00	30.965.140.834,90	28.542.959.606,30	94,80
JUMLAH ASET LAINNYA	14.939.303.370,34	81.252.255.619,75	29.295.461.134,00	30.965.140.834,90	28.542.959.606,30	94,45
JUMLAH ASET	3.230.743.738.941,83	3.257.232.990.543,58	3.382.372.576.944,04	3.497.418.427.563,32	3.519.788.664.590,83	2,18
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8.983.476,00	211.189.383,00	1.227.954,00	228.781.496,00	96.328.133,00	5156,17
Utang Bunga	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	3.394.444,44	50.137.394,53	27.144.382,20	4.430.555,56	30.000.000,00	456,16
Utang Beban	20.532.992.654,00	11.476.847.323,04	9.608.179.421,13	10.938.578.108,71	7.687.584.149,00	-19,07
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	603.446.416,68	-	24.643.099.193,22	-	
Utang Pemotongan Pajak Pusat	-	-	-	-	-	

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Growth
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**20.545.370.574,44**	**12.341.620.517,25**	**9.636.551.757,33**	**36.014.889.353,49**	**7.813.912.282,00**	33,40
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**-**	-	-	-	-	
					-	
JUMLAH KEWAJIBAN	**20.545.370.574,44**	**12.341.620.517,25**	**9.636.551.757,33**	**36.014.889.353,49**	**7.813.912.282,00**	33,40
EKUITAS						
EKUITAS	3.210.198.368.367,39	3.244.891.370.026,33	3.372.736.025.186,71	3.461.403.538.209,83	3.511.974.752.308,83	2,28
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.230.743.738.941,83	3.257.232.990.543,58	3.382.372.576.944,04	3.497.418.427.563,32	3.519.788.664.590,83	2,18

Sumber: Laporan Neraca Daerah Kabupaten Asahan 2016-202

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.12 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020 (Rp juta)

Rasio	Rumus	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	342.203,18	166.566,41	165.103,81	98.032,68	112.339,75
	Kewajiban Jangka Pendek	20.545,37	12.341,62	9.636,55	36.014,89	7.813,91
	Rasio Lancar	16,66	13,50	17,13	2,72	14,38
	Aset Lancar Persediaan	6.564,00	13.915,06	13.441,66	17.490,41	18.826,63
	Kewajiban Jangka Pendek	20.545,37	12.341,62	9.636,55	36.014,89	7.813,91
	Quick Ratio	0,32	1,13	1,39	0,49	2,41
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	20.545,37	12.341,62	9.636,55	36.014,89	7.813,91
	Total Aset	3.230.743,74	3.257.232,99	3.382.372,58	3.497.418,43	3.519.788,66
	Rasio Total Hutang (%)	0,64%	0,38%	0,28%	1,03%	0,22%
	Total Hutang	20.545,37	12.341,62	9.636,55	36.014,89	7.813,91
	Total Ekuitas	3.210.198,37	3.244.891,37	3.372.736,03	3.461.403,54	3.511.974,75
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,64%	0,38%	0,29%	1,04%	0,22%

Sumber: Laporan Neraca Daerah Kabupaten Asahan, 2016-2020 (diolah)

Berdasarkan perhitungan, Kinerja neraca daerah Kabupaten Asahan di tahun 2020 cukup baik terutama pada Rasio Lancar dan Rasio Cepat. Nilai Rasio Lancar Neraca

Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2016-2020 relatif tinggi, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2020 mencapai 14,38 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Asahan adalah 14,38 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar *(current ratio)* karena *Quick Ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas 1 berarti menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2017, 2018, 2020 rasio cepat di Kabupaten Asahan menunjukkan nilai di atas 1 yaitu dengan masing-masing nilai sebesar 1,127, 1,395 dan 2,41.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2016 sebesar 0,636% artinya sebesar Rp0,636 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Kabupaten Asahan yang didanai oleh hutang adalah sebesar 0,636%, sisanya dari modal

sendiri (ekuitas). Sedangkan dari tahun 2016-2020, rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang hampir sama dengan rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Asahan.

3.3 Kerangka Pendanaan: Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Setelah memperhatikan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2019, maka selanjutnya dapat digambarkan proyesi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2021 hingga tahun 2026 mendatang.

Proyeksi pendapatan Kabupaten Asahan dilakukan berdasarkan analisis trend pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2016-2020 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kabupaten Asahan tahun 2020. Disamping juga diperkuat dengan justifikasi kualitatif angka pertumbuhan masing-masing pos pendapatan dan belanja dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaannya. Pada analisis ini juga diberlakukan asumsi pertumbuhan yang melambat pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Pada tahun 2021 dan 2022 diasumsikan bahwa perekonomian mulai mengalami perbaikan dengan mulai dilonggarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tahun 2023 hingga 2025 diasumsikan bahwa perekonomian telah kembali pada kondisi normal.

Data APBD Kabupaten Asahan tahun 2020 menunjukkan bahwa pendapatan daerah menunjukkan nilai sebesar Rp 1,69 triliyun, mengalami penurunan dari tahun 2019. Sedangkan belanja daerah berdasarkan data APBD tahun 2020 menunjukkan nilai sebesar Rp 1,74 triliun. Berdasarkan penghitungan proyeksi, pendapatan daerah pada APBD tahun 2021 diperkirakan mencapai nilai sebesar Rp.1,75 triliun dan menjadi Rp 2,09 triliun pada tahun 2025. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum. Seiring dengan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah mengalami perubahan yang sejalan.

Tabel 3.13 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, 2021-2026 (Rupiah)

NO	URAIAN	PROYEKSI APBD (Rp)						R (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	**PENDAPATAN**	**1,616,453,721,041.00**	**1,622,566,112,952.00**	**1,630,692,548,883.34**	**1,638,943,787,389.06**	**1,647,324,820,470.18**	**1,655,840,839,807.73**	**0.48**
04.01	**Pendapatan Asli Daerah**	**172,117,196,925.00**	**178,229,588,836.00**	**186,356,024,767.34**	**194,607,263,273.06**	**202,988,296,354.18**	**211,504,315,691.73**	**4.21**
04.01.01	Hasil Pajak Daerah	77,755,000,000.00	78,000,000,000.00	81,120,000,000.00	84,364,800,000.00	87,739,392,000.00	91,248,967,680.00	1,61
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	16,083,395,000.00	16,089,828,358.00	16,096,264,289.34	16,102,702,795.06	16,109,143,876.18	16,115,587,533.73	0.04
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,146,601,279.00	9,146,601,279.00	9,146,601,279.00	9,146,601,279.00	9,146,601,279.00	9,146,601,279.00	-
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	69,132,200,646.00	74,993,159,199.00	79,993,159,199.00	84,993,159,199.00	89,993,159,199.00	94,993,159,199.00	6.57
04.02	**Pendapatan Transfer**	**1,357,392,924,116.00**	**1,357,392,924,116.00**	**1,357,392,924,116.00**	**1,357,392,924,116.00**	**1,357,392,924,116.00**	**1,357,392,924,116.00**	**-**
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,289,136,783,000.00	1,289,136,783,000.00	1,289,136,783,000.00	1,289,136,783,000.00	1,289,136,783,000.00	1,289,136,783,000.00	-
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68,256,141,116.00	68,256,141,116.00	68,256,141,116.00	68,256,141,116.00	68,256,141,116.00	68,256,141,116.00	-

NO	URAIAN	PROYEKSI APBD (Rp)						R (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
04.03	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**86,943,600,000.00**	**86,943,600,000.00**	**86,943,600,000.00**	**86,943,600,000.00**	**86,943,600,000.00**	**86,943,600,000.00**	-
04.03.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	86,943,600,000.00	86,943,600,000.00	86,943,600,000.00	86,943,600,000.00	86,943,600,000.00	86,943,600,000.00	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan (2021)

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keungan Daerah maka mulai tahun 2020, kategorisasi Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel di atas menunjukkan perkembangan APBD Kabupaten Asahan tahun 2021-2026, selama periode tersebut realisasi total pendapatan daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,48 persen per tahun. Selama periode 2021-2026 realisasi total pendapatan mengalami peningkatan dari sebesar Rp.1.616.453.721.041,00,- pada tahun 2021, hingga menjadi sebesar Rp.1.655.840.839.807,73,- pada pada tahun 2026.

Kontribusi sumber pendapatan di Kabupaten Asahan masih berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 sebesar Rp. 172.117.196.925,00,- menjadi Rp. 211.504.315.691,73 pada tahun 2026. Sedangkan Pajak Daerah dari Rp. 77.755.000.000,00,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 91.248.967.680,00,- pada tahun 2026 dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 16.083.395.000,- pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 16.115.587.533.73,- pada tahun 2026.

Tabel 3.14 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Asahan, 2021-2026 (Rupiah, juta)

No	URAIAN	PROYEKSI APBD (Rp.Juta)						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	R (%)
5	**BELANJA DAERAH**	**1,613,953,721,041.00**	**1,620,066,112,952.00**	**1,628,192,548,883.34**	**1,636,443,787,389.06**	**1,644,824,820,470.18**	**1,653,340,839,807.73**	**4,11**
05.01	**Belanja Operasi**	**1,144,152,792,485.00**	**1,148,523,575,668.00**	**1,184,073,199,669.00**	**1,189,220,659,775.00**	**1,160,319,773,960.00**	**1,154,919,289,030.00**	**3,82**
05.01.01	Belanja Pegawai	698,745,132,928.00	710,518,006,993.00	712,518,006,993.00	714,518,066,993.00	716,518,066,993.00	718,518,066,993.00	4,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	402,090,882,057.00	401,688,791,175.00	390,738,415,176.00	400,885,815,282.00	400,484,929,467.00	400,084,444,537.00	4,80
05.01.03	Belanja Hibah	42,887,277,500.00	35,887,277,500.00	80,387,277,500.00	73,387,277,500.00	42,887,277,500.00	35,887,277,500.00	0,00
05.01.04	Belanja Bantuan Sosial	429,500,000.00	429,500,000.00	429,500,000.00	429,500,000.00	429,500,000.00	429,500,000.00	0,00
05.02	**Belanja Modal**	193,056,616,656.00	196,034,197,205.00	168,346,373,507.34	171,110,202,489.06	207,966,050,886.18	221,356,037,997.73	**10,39**
05.03	**Belanja Tidak Terduga**	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	**0,00**

05.04	**Belanja Transfer**	274,744,311,900.00	273,508,340,079.00	273,772,975,707.00	274,112,925,125.00	274,538,995,624.00	275,065,512,780.00	2,40
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	9,383,839,500.00	8,147,867,679.00	8,412,503,307.00	8,752,452,725.00	9,178,523,224.00	9,705,040,380.00	2,40
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	265,360,472,400.00	265,360,472,400.00	265,360,472,400.00	265,360,472,400.00	265,360,472,400.00	265,360,472,400.00	2,40

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan (2021)

Secara umum dari tahun 2021 sampai tahun 2026, jumlah anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Asahan terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Tabel di atas menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Jumlah realisasi belanja daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp 1.613.953.721.041,00 yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 1.653.340.839.807,73 pada tahun 2026. Selama periode 2021-2026 belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,11 persen pertahun. Jika dilihat dari distribusi pertumbuhan belanja daerah diketahui bahwa alokasi belanja operasi memiliki proporsi yang lebih besar terhadap belanja periode 2021 hingga 2026. Belanja operasi rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 3,82 persen, dengan belanja pegawai rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 4,00 persen per tahun dan belanja barang dan jasa rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 4,80 persen .

Tabel 3.15 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Asahan, 2021-2025 (Rupiah, juta)

No	URAIAN	PROYEKSI APBD (Rp.Juta)						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	R (%)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**							
6.01	**Penerimaan Pembiayaan**	**20.792**	**21.208**	**21.632**	**22.064**	**22.506**	**22.956**	**2,00**
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.792	21.208	21.632	22.064	22.506	22.956	2,00
6.01.02	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	
6.02	**Pengeluaran Pembiayaan**	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00
6.02.01	Penyertaan Modal	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00
6.02.02	Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	
	SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN	**18.292**	**18.708**	**19.132**	**19.564**	**20.006**	**20.456**	**2,26**

Sumber: Analisis Penulis (2020)

Proyeksi Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2021-2026

Perhitungan kapasitas fiskal diperlukan untuk mengukur sejauh mana fleksibelitas Pemerintah daerah Kabupaten Asahan dalam menggunakan pendapatan yang yang dimiliki untuk dialokasi pada berbagai program dan kegiatan pembangunan pembangunan daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026. Secara teknis, beberapa langkah yang dilakukan dalam menghitungan ruang fiskal daerah adalah :

- **Langkah pertama:** menghitung kapasitas riil penerimaan daerah yang berasal dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang umumnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya,
- **Langkah kedua**: menghitung jumlah total pendapatan mengikat yang dimiiki daerah yaitu pendapatan DAK dan Dana penyesuaian dan Otsus. Kedua jenis pendapatan ini memang sudah diikat peruntukannya oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Juklak dan Juknis yang tersedia,
- **Langkah Ketiga:** Menghitung jumlah nominal total belanja mengikat yang dimiliki oleh daerah, yaitu belanja gaji dan tunjangan pegawai dan belanja transfer Kemudian termasuk juga dalam belanja mengikat yaitu belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan rutin OPD, berupa kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, belanja ATK, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, kegiatan pemeliharaan ruang kantor, dst.
- **Langkah Keempat**: menghitung jumlah belanja wajib yang harus dikeluarkan oleh daerah sesuai dengan arahan dari pemerintahan pusat, diantaranya belanja untuk mendukung program pendidikan yang mencapai 20 % dari alokasi belanja, kemudian belanja untuk kesehatan yang mencapai 10 % dari belanja daerah dan kebutuhan belanja BLUD yang pada beberapa perangkat daerah.
- **Langkah Kelima**: menghitung ruang fiskal daerah dengan rumus berikut **Kapasitas Fiskal Daerah = Kapasitas riil keuangan daerah – (Pendapatan Mengikat + Belanja Mengikat + Belanja Wajib Daerah)**

Proyeksi kapasitas fiskal daerah Kabupaten Asahan tahun 2021-2026 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten, dari sebesar Rp. 323,9 milyar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 329,95 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp. 354,08 milyar pada tahun 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya asumsi peningkatan pendapatan daerah yang lebih cepat daripada peningkatan kebutuhan belanja mengikat dan belanja wajib. Selanjutnya kondisi tersebut akan terus terjaga dengan persyaratan adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, selain itu, perlu kebijakan pengetatan terhadap belanja mengikat terutama belanja pegawai dan belanja rutin OPD agar lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 nantinya maka dapat menggunakan hitungan ruang fiskal ini untuk menentukan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam tiga kelompok prioritas:

a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah; dan
c. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.16 Proyeksi Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Asahan, 2021-2026 (Rupiah, juta)

Uraian	2021 (Rp, Juta)	2022 (Rp, Juta)	2023 (Rp, Juta)	2024 (Rp, Juta)	2025 (Rp, Juta)	2026 (Rp, Juta)
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	**1.758.497**	**1.836.998**	**1.919.424**	**2.005.972**	**2.096.847**	**2.196.301**
PENDAPATAN DAERAH	**1.758.497**	**1.836.998**	**1.919.424**	**2.005.972**	**2.096.847**	**2.196.301**
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN MENGIKAT	**427.204**	**448.564**	**470.992**	**494.542**	**519.269**	**545.232**
DAK	212.800	223.440	234.612	246.342	258.659	271.592
Dana Penyesuaian	214.404	225.125	236.381	248.200	260.610	273.640
BELANJA MENGIKAT	**859.505**	**897.483**	**936.751**	**977.732**	**1.020.498**	**1.059.807**
Belanja Pegawai	785.564	816.987	849.666	883.653	918.999	955.759
Belanja langsung terkait dengan Rutin OPD (15% dari belanja barang dan jasa + modal)	73.941	80.497	87.085	94.079	101.500	104.048
BELANJA WAJIB	**147.882**	**160.993**	**174.171**	**188.158**	**202.999**	**208.097**
Belanja Pendidikan (20% dari belanja barang dan jasa + modal)	98.588	107.329	116.114	125.438	135.333	138.731
Belanja Kesehatan (10% dari belanja barang dan jasa + modal)	49.294	53.664	58.057	62.719	67.666	69.366
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT SERTA BELANJA WAJIB	**1.434.592**	**1.507.041**	**1.581.915**	**1.660.431**	**1.742.767**	**1.813.136**
KAPASITAS FISKAL	**323.905**	**329.957**	**337.510**	**345.541**	**354.080**	**383.165**
Persentase	**18,42**	**17,96**	**17,58**	**17,23**	**16,89**	**17,45**

Sumber : Analisis Penulis, 2021


PUPUK ORGANIK
& PUPUK HAYATI
UNTUK MENINGKATKAN KESUBURAN TANAH DAN PRODUKSI



BAB 4
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan permasalahan sangat penting dalam proses perencanaan daerah, perumusan permasalahan yang tepat akan menentukan ketepatan pemilihan kebijakan pembangunan yang menjadi solusi bagi kemajuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Permasalahan Pembangunan Daerah terdiri dari tiga klasifikasi, yaitu; Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah. Masalah pokok merupakan rumusan permasalahan permasalahan yang bersifat makro yang dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sementara itu, perumusan masalah dilakukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dimana pemecahan masalah dilakukan melalui strategi pembangunan, sedangkan perumusan akar masalah dilakukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Berdasarkan telaah, permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Asahan dikelompokkan menjadi 6 permasalahan yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi di daerah belum dirasakan secara merata pada setiap lapisan masyarakat;
2. Program perlindungan sosial bagi masyarakat belum optimal;
3. Ketersediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat belum merata;
4. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar;
5. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat;
6. Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal.

Secara rinci, masalah pokok, masalah, dan akar masalah pembangunan daerah di Kabupaten Asahan ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Asahan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pertumbuhan ekonomi di daerah belum dirasakan secara merata pada setiap lapisan masyarakat	a. Sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Asahan, namun dari tingkat produktivitas belum optimal	➢ Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem pertanian yang modern. ➢ Cukup tingginya alih lahan pertanian produktif menjadi kawasan non pertanian dan permukiman penduduk. ➢ Masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi. ➢ Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas. ➢ Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pertanian seperti irigasi yang dalam keadaan baik. ➢ Keterbatasan akses petani terhadap permodalan yang berkelanjutan. ➢ Petani belum mendapatkan keuntungan yang baik mengingat panjangnya tata niaga produk pertanian. ➢ Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak menentu yang banyak menimbulkan kerugian bagi petani. ➢ Keterbatasan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi. ➢ Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif (masih menggunakan cara tradisional dan ternak tidak dikandangkan) dan belum menerapkan teknologi terbaru dalam bidang peternakan.

			➢ Harga pakan ternak mahal/tidak terjangkau petani/peternak, Bahan baku sumber pakan ternak kurang (utamanya jagung). ➢ Munculnya penyakit hewan yang menular dan bersifat emergensi. ➢ Belum optimalnya pengawasan produk hasil ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). ➢ Jumlah dokter hewan sangat terbatas dimana hal tersebut mengakibatkan masih terjadinya kematian hewan ternak di masyarakat. ➢ Kapasitas penyuluh pertanian dan peternakan belum memadai.
		b. Produktivitas sektor perikanan masih rendah	➢ Masih terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan. ➢ Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal). ➢ Ketersediaan tenaga penyuluh perikanan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan pelaku usaha di lapangan belum memadai.
		c. Sektor pariwisata yang sesungguhnya dapat menjadi akselerator pengembangan sektor-sektor lain kurang berkembang dikarenakan daya saing yang rendah	➢ Daya tarik objek wisata di Kabupaten Asahan perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Selain mempercantik objek wisata, hal lain yang diperlukan adalah peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata, sarana pendukung seperti hotel dan restoran, dan mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas. ➢ Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Asahan. ➢ Belum optimalnya PAD yang diperoleh dari pengembangan sektor

			pariwisata. Sesungguhnya, dengan cukup banyak kunjungan wisatawan, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi PAD melalui penarikan berbagai jenis retribusi. ➢ Belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Asahan yang mencakup prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*suistainable tourism development*) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*). ➢ Kurang optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam rangka memajukan sektor pariwisata.
		d. Peranan sektor industri didominasi oleh satu industri besar dan pengembangan industri kecil berbasis potensi daerah masih belum optimal	➢ Tidak adanya konsep pengembangan industri berbasis kawasan dan potensi unggulan daerah. ➢ Lemahanya akses permodalan untuk indutri kecil dan mikro. ➢ Potensi sumber daya lokal belum diolah secara maksimal, padahal bahan baku yang tersedia cukup memadai. ➢ Kualitas SDM yang bergerak di industri kecil belum optimal sehingga masih lemah dalam penerapan teknologi pengolahan. ➢ Lemahnya informasi mengenai kluster industri mikro dan kecil di daerah.
		e. Sektor perdagangan telah memberikan kotribusi yang signifikan bagi perekonomian, tetapi belum mendorong peningkatan kelas usaha pelaku di bidang perdagangan.	➢ Belum terealisasinya revitalisasi pasar rakyat di beberapa kecamatan. Perlu adanya perbaikan fasilitas pasar rakyat seperti jalan lingkungan, toilet, dan fasilitas lainnya.

			➢ Belum optimalnya penerimaan PAD di sektor perdagangan. Salah satu sumber PAD yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang perdagangan adalah rertribusi tera ulang pedagang. ➢ Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen. ➢ Pelaporan arus barang keluar masuk, yang merupakan kewajiban pelaku usaha belum terlaksana dengan baik sehingga informasi ketersediaan barang tidak diketahui.
		f. Ekonomi kerakyatan yang digerakkan melalui koperasi dan UKM perkembangannya cenderung lambat	➢ Persentase koperasi aktif dan berkembang di Kabupaten Asahan masih rendah. ➢ Sebagian besar koperasi di Kabupaten Asahan masih bergerak pada kegiatan simpan pinjam. ➢ Belum optimalnya pendampingan penyediaan permodalan dan pembiayaan bagi usaha kecil dan promosi produk UKM masih terbatas. ➢ Belum terbangunnya jaringan kemitraan antara UKM dengan pelaku usaha lain sebagai induk semang dan tingkat produktivitas UKM masih rendah. ➢ Belum tersusunnya data UMKM potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN.

			➢ Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Asahan. ➢ Kualitas produk UMKM di Kabupaten Asahan belum memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produk. ➢ Belum tersedianya regulasi yang mendorong potensi daerah
		g. Daya saing investasi daerah rendah	➢ Ketersediaan infrastruktur dasar yang menjadi daya tarik investasi. ➢ Promosi investasi yang dilakukan kurang tepat sasaran. ➢ Pelaksanaan pemberian kemudahan dan insentif kepada investor mengalami banyak hambatan dan membutuhkan waktu lama. ➢ Potensi sektor potensial yang dapat dikembangkan daerah belum teridentifikasi dengan baik. ➢ Belum memadainya sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik.
		h. Daya saing tenaga kerja daerah rendah	➢ Sebagian besar angkatan kerja unskillfull ➢ Produktivitas tenaga kerja daerah masih rendah. ➢ Ketersediaan sarana pelatihan kerja yang memadai untuk peningkatan kompetensi masih terbatas.
		i. Penggunaan dana desa sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan administrasi aparatur dan pembangunan infrastruktur desa	➢ Belum teridentifikasinya potensi unggulan pada setiap desa. ➢ Perencanaan pembangunan belum integratif dengan perencanaan pembangunan daerah. ➢ Kapasitas perangkat desa dalam perencanaan dan pengaggaran masih terbatas ➢ Lemahnya pembinaan pada perangkat desa dari OPD teknis dan kecamatan

			➢ Pengawasan penggunaan dana desa masih sebatas pada administrasi keuangan dan belum pada dampak yang ditimbulkan dari belanja ➢ Belum optimalnya kemunculan BUMDES dalam mendorong pemanfaatan potensi ekonomi desa
2.	Program perlindungan sosial bagi masyarakat belum optimal	a. Penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal	➢ Cakupan PMKS yang tertangani belum berjalan optimal dengan persentase sebesar 37,83%. ➢ Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. ➢ Masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. ➢ Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat. ➢ Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan di wilayah perkotaaan. ➢ Belum menguatnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat kegotongroyongan di masyarakat.
		b. Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak belum berjalan optimal	➢ Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan. ➢ Rendahnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan. ➢ Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. ➢ Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah.

			Banyak kegiatan yang diarahkan untuk pengarusutamaan gender diidentikan hanya untuk keterlibatan perempuan saja. Munculnya dikotomi dasar tentang arti pengarusutamaan gender ini secara tidak langsung justru membuat program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan optimal. ➢ Masih kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak. ➢ Belum optimalnya OPD dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
		c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana belum optimal	➢ Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana. ➢ Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial. ➢ Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
		d. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal	➢ Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas dan proses pelayanan belum dilakukan secara online. ➢ Ketersediaan sarana pelayanan cenderung terpusat di ibukota kabupaten dan belum dibagi berdasarkan kluster kawasan. ➢ Tingkat pemahaman masyarakat rendah akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

		e. Pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera belum optimal	➢ Pelayanan kesehatan reproduksi yang disosialisasikan belum menjangkau seluruh wilayah. ➢ Pemahaman pentingnya keluarga berencana dalam keluarga masih belum memadai. ➢ Sarana penunjang pelayanan KB belum memadai. ➢ Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan sehingga pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga tidak optimal. ➢ Masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas. ➢ Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
		f. Pelestarian seni budaya daerah belum optimal	➢ Sarana untuk pertunjukan seni budaya daerah belum memadai. ➢ Penghargaan bagi insan seni budaya daerah masih rendah. ➢ Berkurangnya minat generasi muda untuk belajar seni budaya daerah. ➢ Pembinaan terhadap pegiat seni budaya belum dilakukan secara berkala. ➢ Kurangnya fasilitasi penyelenggaraan festival seni berbasis kebudayaan lokal. ➢ Promosi seni budaya lokal belum efektif. ➢ Pemeliharaan pada situs cagar budaya daerah masih terbatas
3.	Ketersediaan infrastruktur dasar bagi	a. Kuantitas dan dan kualitas ketersediaan infrastruktur dasar (jalan, sumber daya air) belum memadai	➢ Proses konstruksi atau perbaikan jalan membutukan waktu yang cukup lama. ➢ Masih banyak jalan, irigasi, SPAM, pengelolaan air limbah yang

	masyarakat belum merata		bermanfaat besar bagi masyarakat dalam kondisi kurang baik. ➢ Pembangunan jalan yang memadai belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan sehingga mobilitas orang dan barang mengalami hambatan. ➢ Rencana pengembangan infrastruktur dasar belum komprehensif ➢ Manajemen infrastruktur dasar belum dikelola dengan baik.
		b. Kualitas pelayanan kesehatan lingkungan permukiman belum optimal.	➢ Rumah layak huni dan permukiman kumuh belum seluruhnya terdata pada database profil permukiman. ➢ Pembangunan rumah yang dilakukan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah belum memperhatikan pedoman yang telah ditentukan. ➢ Penyediaan sarana prasarana dan utilitas umum masih belum memadai. ➢ Kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta untuk perbaikan lingkungan permukiman belum berjalan dengan baik. ➢ Fasilitasi penyediaan perbaikan rumah tidak layak huni masih terbatas. ➢ Fasilitasi penanganan persampahan rumah tangga masih terbatas pada daerah tertentu. ➢ Kondisi ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagian besar dalam kondisi tidak memadai.
4.	Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan	a. Aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas belum merata, kualitas dan tata kelola penyelenggaraan belum optimal	➢ Ketersediaan sekolah (PAUD, SD, SMP) yang berkualitas baik belum merata di setiap kecamatan. ➢ Kesadaran akan pentingnya pendidikan formal masih rendah dengan masih cukup tingginya angka

	pendidikan dasar		putus sekolah pada jenjang SD dan SMP. ➢ Pelaksanaan pendidikan kesetaraan belum menjangkau seluruh kawasan sehingga masih ada penduduk yang melek huruf. ➢ Kualitas bangunan sekolah yang baik belum menjangkau seluruh kecamatan, ➢ Kualifikasi tenaga pendidik yang memadai belum tersebar merata di setiap kecamatan dan cenderung terpusat pada ibukota kabupaten. ➢ Pengelolaan manajemen pendidikan dasar yang diiringi dengan ketersediaan data profil pendidikan daerah belum memadai.
5.	Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat	a. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal	➢ Sarana dan prasarana kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas belum sepenuhnya memadai untuk berbagai jenis pelayanan. ➢ Ketersediaan tenaga medis dan paramedis masih terpusat di ibukota kabupaten dan belum merata di setiap kecamatan. ➢ Penerapan SPM kesehatan belum menjadi indikator kinerja bidang kesehatan. Pelayanan pada 12 jenis SPM yang menjadi kewenangan kabupaten belum sesuai standar nasional ➢ Tata kelola pelayanan kesehatan belum berjalan dengan optimal. ➢ Belum seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan jaminan kesehatan memperoleh bantuan
6.	Penerapan tata kelola pemerintahan	a. Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal	➢ Publikasi pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal.

	yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal		➢ Kurangnya koordinasi baik antar sektor maupun tingkatan pemerintahan. ➢ Diseminasi produk hukum daerah yang strategis belum terkominikasikan dengan baik ke masyarakat. ➢ Tindak lanjut evaluasi kebijakan strategis daerah masih belum optimal. ➢ Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah. ➢ Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat. ➢ Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpeng tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal. ➢ Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah. ➢ Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk penentuan kebijakan strategis daerah.
		b. Kualitas perencaanaan pembangunan daerah belum optimal	➢ Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah. ➢ Belum dimanfaatkannya hasil monitoring dan evaluasi sebagai basis perbaikan perencanaan pembangunan daerah. ➢ Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah masih belum baik. ➢ Belum optimalnya koordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan OPD-

			OPD, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi. ➢ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas. ➢ Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
		c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah belum optimal.	➢ Belum tersedianya instrumen penganggaran daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. ➢ Tingkat kedisiplinan pemangku kepentingan guna penyusunan APBD tepat waktu dan berkualitas masih belum baik. ➢ Pelayanaan penatausahaan daerah masih belum optimal. ➢ Belum tersedianya sistem pengendalian internal terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disertai peningkatan dan pengembangan penglolaan pemanfaatan BMD. ➢ Implementasi analisis standar belanja dalam penganggaran masih belum optimal ➢ Penggalian potensi pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah pada unit penghasil belum optimal. ➢ Sistem informasi manajemen pengelolan pendapatan daerah berbasis elektronik belum berjalan optimal. ➢ BUMD sebagai salah satu unit penghasil PAD belum memberikan sumbangan pendapatan yang maksimal.

		d. Sistem pengawasan kinerja pembangunan belum akuntabel berjalan secara optimal	➢ Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah. ➢ Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan masih rendah. ➢ Belum optimalnya sistem pelayanan pengaduan masyarakat atas layanan publik. ➢ Masih kurangnya kapasitas aparatur pengawasan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. ➢ Lemahnya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah.

4.2 PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

4.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

4.2.1.1 Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Bidang Urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa
2. Masih minimnya Jumlah PAUD terakreditasi
3. Masih tinggi angka putus sekolah SD/MI
4. Masih rendahnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS
5. Belum optimalnya persentase guru SD bersertifikat pendidik
6. Masih tinggi angka putus sekolah SMP/MTs
7. Belum optimalnya rata-rata nilai ujian nasional SMP/MTs
8. Belum optimalnya persentase guru SMP bersertifikat pendidik
9. Belum optimalnya persentase SMP yang memenuhi SPM

10. Masih rendahnya angka partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini
11. Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar
12. Masih rendahnya angka partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan menengah
13. Masih terdapat penduduk usia dewasa usia 15 – 59 tahun yang buta huruf
14. Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan khusus (sekolah luar biasa)
15. Masih rendahnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan
16. Masih rendahnya kapasitas pengawasan, komite sekolah dan dewan pendidikan
17. Belum maksimalnya pelayanan dan kualitas tatakelola dinas pendidikan

4.2.1.2 Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi sektor kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya rasio rumah sakit dan rasio puskesmas persatuan penduduk
2. Masih tingginya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
3. Masih rendahnya persentase komplikasi kebidanan yang ditangani
4. Masih tingginya angka kematian ≥ 48 Jam (NDR) dan angka kematian umum (GDR)
5. Masih terdapat jumlah kasus akibat bahan berbahaya bagi makanan
6. Belum tercukupinya dokter spesialis, tenaga paramedis, dan tenaga paramedis non keperawatan
7. Masih terbatasnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standart
8. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh
9. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular
10. Belum tersedianya puskesmas yang terakreditasi untuk menuju Puskesmas BLUD
11. Belum optimalnya prasarana kesehatan
12. Belum optimalnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
13. Belum optimalnya perlindungan masyarakat terhadap beban pembiayaan kesehatan
14. Masih kurangnya dan tidak standartnya beberapa sarana dan prasarana berupa gedung pelayanan dan alat-alat kesehatan yang penguat akreditasi rumah sakit
15. Belum tersedianya rumah sakit umum yang modern
16. Belum tersedianya Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR) yang terintegrasi disemua unit pelayanan
17. Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit yang cukup dan berkelanjutan
18. Belum tercapaianya akreditasi rumah sakit.
19. Belum tersedianya sarana kantor yang memadai

4.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peningkatan persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
2. Belum optimalnya pembangunan bangunan pelayanan publik dan aparatur berfungsi baik
3. Belum optimalnya prasarana jalan penghubung pusat-pusat pertumbuhan
4. Kesenjangan antar wilayah perkembangan yang tidak terarah tidak mengikuti tata ruang yang telah ditetapkan
5. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas ruang publik
6. Belum terpenuhinya areal pemakaman
7. Belum memadainya Infrastruktur Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

4.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
2. Masih terdapat rumah tidak layak huni
3. Masih rendahnya cakupan pelayanan sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
4. Masih rendahnya sarana dan prasarana kebersihan
5. Belum tertatanya kawasan kumuh khususnya wilayah pesisir dan sebahagian kawasan perkotaan
6. Masih tingginya rumah tinggal yang belum bersanitasi dikawasan pesisir pantai

4.2.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan di urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan keajahatan perlu ditingkatkan

2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta belum optimalnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah
3. Masih tingginya kejahatan narkotika.
4. Masih rendahnya kuantitas siskamling di setiap desa

4.2.1.6 Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan di urusan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya persentase penurunan PMKS dan persentase penanganan PMKS
2. Belum optimalnya penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesejahteraan sosial
3. Belum optimalnya penaggulangan PMKS melalui rehabilitasi pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
4. Belum optimalnya cakupan pelayanan khusus pada kelompok masyarakat miskin.

4.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

4.2.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan di urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja
2. Belum optimalnya cakupan pelayanan penempatan tenaga kerja
3. Belum optimalnya penyebaran informasi lowongan kerja
4. Belum optimalnya cakupan pelayanan pelatihan
5. Belum optimalnya cakupan pelayanan perselisihan hubungan industrial

4.2.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan di urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat rasio KDRT
2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan perkerasan dalam rumah tangga
3. Meningkatnya pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan
4. Minimnya tenaga lapangan penyelesaian perlindungan anak
5. Rendahnya tingkat penyerapan masyarakat tentang undang-undang perlindungan anak dan perempuan

6. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Asahan
7. Belum terpenuhinga kegiatan pemenuhan hak anak
8. Belum jalannya kerjasama Tim P2TP2A gugus tugas TPPO dan KPAID di Kabupaten Asahan

4.2.2.3 Urusan Pangan

Permasalahan pembangunan di urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya implementasi Regulasi ketahanan pangan.
2. Perlunya peningkatan ketahanan pangan dan diversikasi pangan dengan standart pola pangan harapan (PPH).
3. Perubahan iklim mengakibatkan degradasi kesuburan lahan yang berdampak terhadap pemicu penurunan luas pertanaman dan produksi. Data Perkembangan Luas Panen di Kabupaten Asahan telah menunjukkan penyusutan Lahan Padi Sawah dan Padi Ladang selama 10 Tahun terakhir.
4. Penurunan harga pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari- hari besar harga pangan meningkat tinggi menekan konsumen.
5. Masih didapati kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang

4.2.2.4 Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan di urusan Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pelaksanaan Program Tanah Objek Reforma Agraria
2. Masih rendahnya cakupan pelayanan sertifikat asset pertanahan milik pemerintah
3. Belum optimalnya cakupan pelayanan tertib administrasi penguasaan tanah
4. Masih terdapat konflik pertanahan antara masyarakat dengan HGU

4.2.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan di urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penataan, pelaksanaan AMDAL, UKL, UPL, SPPL, pengelolaan B3 dan limbah
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan

3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran, kerusakan dan pelestarian lingkungan
4. Belum optimalnya pemantauan kualitas air, udara dan tanah peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran, kerusakan dan pelestarian lingkungan
5. Belum terpenuhinya standarisasi TPA

4.2.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan di urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya persentase jumlah pencetakan kartu identitas anak, dan rasio pasangan berakte nikah
2. Masih adanya penduduk yang belum melengkapi dokumen kependudukan
3. Belum optimalnya data base kependudukan berskala kabupaten
4. Masih rendahnya pemahaman aparatur dan penduduk terhadap kebijakan kependudukan.

4.2.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan di urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya jumlah desa yang mampu mengelola keuangan desa tepat waktu, persentase jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, dan jumlah desa yang menghasilkan pendapatan asli desa
2. Belum optimalnya penganggaran IMTAQ di Desa/Kelurahan
3. Belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung pembangunan desa
4. Rendahnya partisipasi masyarakat melaksanakan gotong royong
5. Masih rendahnya pengetahuan aparatur desa tentang tata cara pengelolaan keuangan desa
6. Belum optimalnya pemerintah desa dalam mengelola pendapatan asli desa.

4.2.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan di urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya cakupan peserta KB aktif, rasio akseptor KB, dan cakupan PUS menjadi peserta KB
2. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah dengan stakeholders dalam pelaksanaan Program KB
3. Belum maksimalnya kualitas pelayanan KB
4. Belum terciptanya sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan stakeholders dalam pelaksanaan program KB
5. Belum optimalnya pengelolaan dan penyusunan buku Data/Informasi Keluarga Pengelolaan dan penyusunan buku data/informasi keluarga
6. Belum maksimalnya sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi di pelayanan dan klinik – klinik KB
7. Masih tingginya tingkat perkawinan dibawah usia 20 tahun
8. Rendahnya cakupan partisipasi keluarga yang aktif dalam kegiatan Program Bina Keluarga.

4.2.2.9 Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan di urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan transportasi sungai akibat sedimentasi yang tinggi
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengujian kenderaan bermotor
3. Sangat dibutuhkanya penataan ulang dan perencanaan operasional terminal madya Kisaran
4. Masih rendahnya fasilitas keselamat jalan
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalulintas dan pengetahuan mengenai rambu lalu lintas
6. Belum optimalnya pelayanan angkutan
7. Belum tersedianya dokumen perencanaan dibidang angkutan umum
8. Belum optimalnya pengawasan administrasi kapal dibawah 7 GT
9. Belum terpenuhinya standart keselamatan kapal dengan ukuran dibawah 7 GT.

4.2.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan di urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan Website Milik Pemerintah Daerah
2. Belum optimalnya cakupan pelayanan informasi dan telekomunikasi (internet sehat) di wilayah pedesaan

3. Belum terwujudnya *Cellplan* menara di Kabupaten Asahan yang dapat mendukung kegiatan pengawasan dan peningkatan PAD dibidang telekomunikasi
4. Sangat diperlukannya pengawasan rutin menara telekomunikasi.
5. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian keberadaan warung internet.

4.2.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan di urusan Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya persentase koperasi aktif, persentase usaha mikro kecil, dan persentase koperasi sehat
2. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi
3. Rendahnya sistem pendukung bagi koperasi bagi UMKM
4. Belum optimalnya penataan sarana dan prasarana distribusi barang
5. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi alat UTTP dan kualitas barang dan jasa yang beredar.

4.2.2.12 Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan di urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya cakupan kewenangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
2. Masih rendahnya citra pelayanan publik
3. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan investasi terutama investasi berskala nasional
4. Masih rendahnya pelayanan informasi peluang investasi.

4.2.2.13 Urusan Kepemudaan, dan Olahraga

Permasalahan pembangunan di urusan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat tersangka pemuda terlibat narkoba,
2. Belum optimalnya jumlah pemuda yang berprestasi, dan jumlah wirausaha pemuda
3. Belum maksimalnya peran bidang keolahragaan yang mendukung upaya kesehatan masyarakat
4. Belum maksimalnya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatakan partisipasi dan peran aktif pemuda diberbagai bidang pembangunan.

4.2.2.14 Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan di urusan Statistik adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya konsolidasi data kinerja sektoral di tingkat OPD
2. Rendahnya kapasitas SDM dalam analisis statistik.

4.2.2.15 Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan di urusan Persandian adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
2. Belum terlaksananya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

4.2.2.16 Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan di urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya
2. Belum maksimalnya kualitas perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya.

4.2.2.17 Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan di urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Masih ada desa/kelurahan, taman bacaan masyarakat, rumah ibadah, kecamatan yang belum memiliki perpustakaan
2. Kurang minat baca masyarakat dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti penting pelayanan perpustakaan
3. Terbatasnya koleksi buku dan kurangnya kepedulian pengunjung terhadap koleksi buku.

4.2.2.18 Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan di urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya SDM pengelola kearsipan
2. Belum optimalnya penghimpunan arsip.

4.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

4.2.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan di Kelautan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap gizi makanan asal ikan
2. Belum optimalnya cakupan pembinaan masyarakat terhadap kelompok masyarakat perikanan

4.2.3.2 Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan di sektor Pariwisata adalah :

1. Masih minimnya jumlah pariwisata daerah yang memberikan kontribusi siknifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
2. Masih minimnya jumlah kunjungan ke tempat wisata

4.2.3.3 Urusan Pertanian

Permasalahan pembangunan di sektor Pertanian dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produktivitas hasil pertanian
2. Ancaman alih fungsi lahan dan pemanfaatan lahan belum optimal
3. Kondisi sarana dan prasarana belum optimal
4. Belum maksimalnya perwujudan kemandirian pangan

4.2.3.4 Urusan Perkebunan

Permasalahan pembangunan di sektor Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas produksi dan produktivitas yang dihasilkan petani, hal ini terkait dengan rotasi panen yang belum sesuai
2. Belum optimalnya SDM petani sehingga masih perlu pemberdayaan yang lebih intensif
3. Adanya ancaman serangan hama pada komoditas perkebunan lokal semakin tinggi

4.2.3.5 Urusan Peternakan

Permasalahan pembangunan di sektor Peternakan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya produktifitas ternak
2. Rendahnya kualitas pejantan ternak sapi yang ada di masyarakat.

3. Terbatasnya sumber hijauan pakan ternak
4. Belum meratanya pendistribusian ternak dimasyarakat
5. Terbatasnya SDM peternakan
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan hewan
7. Belum optimalnya ketersediaan obatan-obatan, vitamin, hormon reproduksi dan peralatan kedokteran hewan
8. Masih terdapatnya kasus penyakit hewan menular
9. Tidak terkendalinya lalu lintas perdagangan ternak
10. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok peternakan
11. Masih rendahnya penerapan higienitas dan sanitasi keamanan pangan asal hewan.

4.2.3.6 Urusan Perdagangan;

Permasalahan pembangunan di sektor Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, persentase pasar rakyat dalam kondisi baik, dan persentase alat UTTP tertera
2. Belum optimalnya penataan sarana dan prasarana distribusi barang
3. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi alat UTTP dan kualitas barang barang dan jasa yang beredar.
4. Optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana pasar (Perdagangan)

4.2.3.7 Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan di sektor Industri adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya pertumbuhan sektor industri
2. Rendahnya daya saing produksi industri.

4.2.4 Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

4.2.4.1 Sekretariat Daerah

Permasalahan pembangunan di Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya BUMD dalam meningkatkan PAD
2. Belum optimalnya sistem laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
3. Belum terimplementasikannya instrumen penyusunan Standart Pelayanan (SP), Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam mendukung peningkatan pelayanan pada masyarakat

4. Masih perlunya sarana dan prasarana demi kelancaran urusan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. Sarana dan prasarana kantor masih belum cukup
6. Belum optimalnya penyampaian informasi yang jelas tentang mekanisme pemberian subsidi pemerintah kepada masyarakat
7. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat dalam hal masalah pertanahan yang terjadi baik dengan pihak perkebunan swasta maupun BUMN terkait dengan areal HGU Perkebunan dengan masyarakat
8. Masih rendahnya penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi manajemen pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat
9. Perlu dilakukan harmonisasi produk hukum daerah
10. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan kesadaran hukum di masyarakat
11. Kurangnya informasi pembangunan kepada masyarakat secara transparan dan akurat
12. Kurangnya koordinasi tentang pembuatan Website di Pemkab Asahan
13. Kurang optimalnya peningkatan pelayanan informasi publik
14. Belum maksimalnya publikasi informasi pembangunan daerah
15. Kurangnya koordinasi tentang pembuatan website
16. Belum optimalnya pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
17. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Asahan.
18. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat dalam pemahaman dan pengamalan agama

4.2.4.2 Sekretariat DPRD

Permasalahan pembangunan di Sekretariat Dewan adalah masih perlu ditingkatkan hubungan kerja yang sinergi antara Sekretariat dengan anggota dewan dalam rangka suksesnya tugas-tugas anggota dewan.

4.2.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

4.2.5.1 Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan di urusan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil musrenbang dalam dokumen perencanaan pembangunan.

2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem/aplikasi perencanaan elektronik.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana jaringan internet untuk pendukung sistem aplikasi perencanaan elektronik.
4. Belum adanya pejabat fungsional perencana.
5. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
6. Masih lemahnya konsistensi dan komitmen OPD terhadap dokumen perencanaan pembangunan.
7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi.

4.2.5.2 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Permasalahan pembangunan di Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyusunan APBD yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2. Sering terjadi perubahan peraturan perundangan di bidang penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Rendahnya kedisiplinan OPD dalam melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

4.2.5.3 Pendapatan Daerah

Permasalahan pembangunan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah :

1. Belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah yang utama.
2. Belum mantapnya sistem dan prosedur pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah

4.2.5.4 Kepegawaian Daerah

Permasalahan pembangunan di Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya beberapa pegawai yang masih memiliki disiplin rendah dan melakukan pelanggaran peraturan kepegawaian
2. Masih rendahnya motivasi pegawai dalam melakukan tugas dan fungsi secara baik dan benar.

4.2.5.5 Penanggulangan Bencana Daerah

Permasalahan pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembinaan masyarakat siaga.
2. Masih belum optimalnya pemetaan jenis bencana, lokasi bencana, dan prosedur tetap antisipasi bencana.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan dan penanggulangan bencana.
4. Belum adanya prosedur tetap dalam penanggulangan bencana.
5. Persentase desa tangguh bencana dan ketersediaan analisis jenis bencana belum maksimal.

4.2.6 Fungsi Penunjang Lainnya

4.2.6.1 Inspektorat

Permasalahan pembangunan di Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan SPIP di OPD.
2. Belum optimalnya penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
3. Masih kurangnya jumlah personil dan kompetensi tenaga auditor.

4.2.6.2 Kecamatan

Permasalahan pembangunan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya hasil musrenbang Kecamatan dalam perencanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya OPD melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
3. Belum optimalnya database tentang pertanahan di Kecamatan
4. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat dalam pemahaman dan mengamalkan agama
5. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan.

4.3 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa mendatang. Suatu hal yang masih belum menjadi masalah saat ni, namun berpotensi akan menjadi permasalahan daerah pada suatu saat. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang akan datang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan isu strategis terlebih dahulu perlu diidentifikasi isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

4.3.1 Isu Strategis Global/Internasional

4.3.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan upgrading terhadap konsepsi Millenium Development Goals (MDGs) dengan agenda pembangunan global yang bernama Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan MDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta indikator-indikatornya untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, Indikator TPB/SDGs yang dapat diukur menjadi bagian dari rencana kerja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Asahan baik dalam bentuk rumusan, program, kegiatan dan indikator. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan daerah dapat dilihat sebagai berikut :

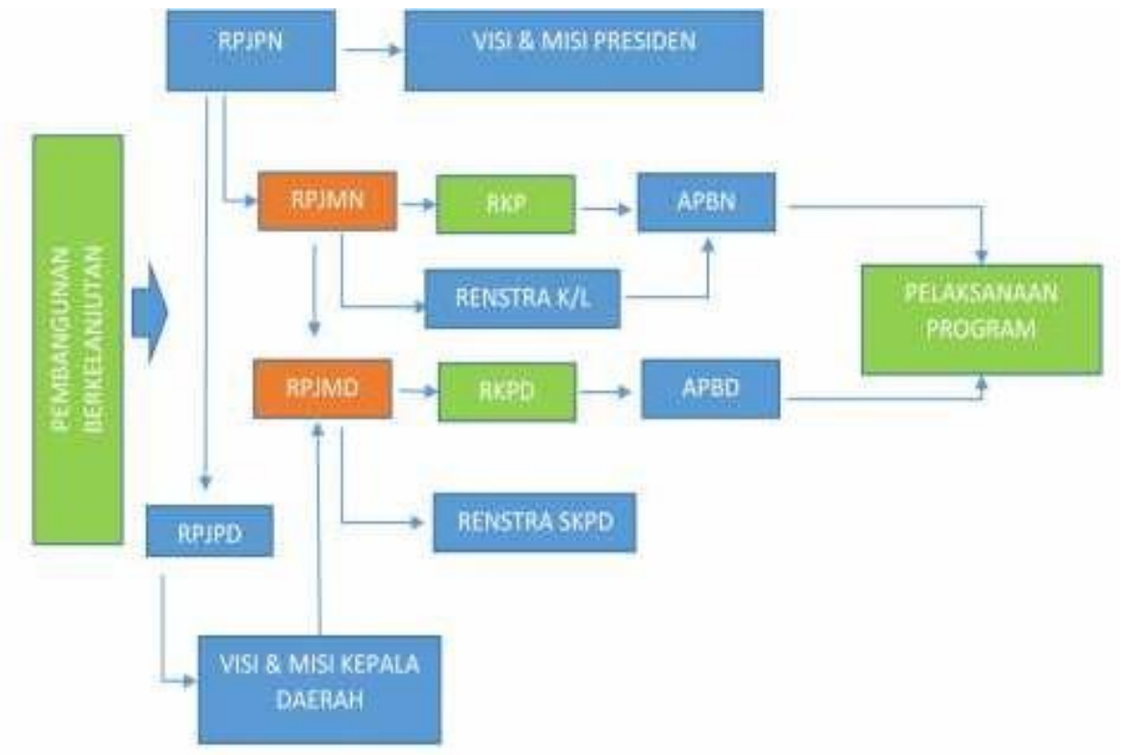

Gambar 4.1
Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen

Sedangkan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Kemiskinan dan pengangguran
2. Pola hidup sehat ibu dan anak
3. Jangkauan dan Kualitas pelayaan pendidikan
4. Jangkauan dan kualitas pelayanan air besih
5. Pengelolaan sanitasi dan limbah
6. Pengembangan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
7. Pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik
8. Penanganan pencegahan dan penanggulangan bencana alam

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas dalam pembangunan, hal ini terlihat dari sinkronisi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Indikator proksi
		Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.		
	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Sesuai
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persentase anak usia 1 tahun yang di imunasasi campak	Indikator proksi
		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Indikator Proksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Indikator Proksi
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Sesuai
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Sesuai

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Sesuai
TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan (underweight) pada anak balita.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Sesuai
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Sesuai
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Berkurangnya penduduk miskin dan rawan pangan	Indikator Proksi
			Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	
			Karbohidrat	Indikator Proksi
			Protein	
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah Kematian Ibu	Indikator Proksi
	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Balita	Indikator Proksi
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Neonata	Indikator Proksi
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Bayi	Indikator Proksi
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Indikator Proksi
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kejadian TB per 1000 orang.	Cakupan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Indikator Proksi
		Kejadian Malaria per 1000 orang.	Angka Kejadian Malaria	

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	Indikator Proksi
		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan	Indikator Proksi
		Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri	
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Sesuai
		Median Kawin Pertama.	Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan	Sesuai
		Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah Usia 15– 49 Tahun	Indikator Proksi
		Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR).	Sesuai
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi *(unmet need)*	Sesuai
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Sesuai
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Angka Partisipasi Kasar	Sesuai
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar	Sesuai
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar	Sesuai
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Angka Partisipasi Kasar	Sesuai

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.			
	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar	Sesuai
	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dananak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Sesuai
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Sesuai
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Sesuai
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Angka Melek Huruf	Sesuai
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Angka Melek Huruf	
	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D3	Indikator Proksi
TUJUAN : 5 KESETARAAN GENDER	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	Indikator Proksi
	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Rasio kekerasan terhadap anak terhadap TPPO	Sesuai

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
	dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.			
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 1564 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Rasio kekerasan terhadap perempuan terhadap TPPO	Sesuai
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Cakupan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO	Sesuai
	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran remaja (perempuan umur 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19).	Sesuai
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar	Sesuai
	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Sesuai
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Sesuai
	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	Sesuai
TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Masyarakat	Sesuai
		2. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		Indikator Proksi

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
		3. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan system terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan	Sesuai
		4.Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat		Sesuai
	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1. Persentase Luas Permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan	Indikator Proksi
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1. Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan	Indikator Proksi
		2. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja		
	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Terbangunnya Sistem Informasi Sumber Daya AIR Software (Sistem Aplikasi), Hardware, Pelatihan dan Updating Data	Indikator Proksi
		Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Terbinanya dan terkoordinasinya perkuatan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD, Komisi Irigasi, P3A/GP3A/IP3A) Provinsi dan Kabupaten Kota	Indikator Proksi
	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Sesuai
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	Sesuai
		Konsumsi listrik per kapita	Daya listrik terpasang	Indikator Proksi

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHA N EKONOMI	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Pertumbuhan PDRB	Sesuai
		PDB per kapita	PDRB Per Kapita	Sesuai
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Persentase tenaga kerja formal.	Angka partisipasi angkatan kerja (orang)	Indikator Proksi
			Tingkat partisipasi angkatan kerja	Indikator Proksi
		Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Jumlah tenaga kerja yang diserap sektor informal	Sesuai
	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka	Sesuai
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan	Jumlah wisatawan mancanegara.	Kunjungan wisata	Sesuai
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Kunjungan wisata	Sesuai
TUJUAN 9 : INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKT UR	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Penurunan Emisi GRK (TEqCO2)	Sesuai
	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan	Koefisien Gini	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Sesuai

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
TUJUAN 10 BERKURANG KESENJANGAN	pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.			
		Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		
TUJUAN 13 : PERUBAHAN IKLIM	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Penurunan Emisi GRK (TEqCO2)	Sesuai
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Sesuai
			Kerusakan Kawasan Hutan	Sesuai
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAA N YANG TANGGUH	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Sesuai
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indeks Pembangunan Gender	Sesuai
			Indeks Pemberdayaan Gender	Sesuai
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indeks Pembangunan Gender	Sesuai
			Indeks Pemberdayaan Gender	Sesuai
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	PDRB Per Kapita	Indikator Proksi

GOALS/ TUJUAN	TARGET TPB/SDGS	SINKRONISASI		KET
		INDIKATOR SDGS	INDIKATOR RPJMD	
MENCAPAI TUJUAN	pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.			
		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persentase PDB terhadap pendapatan	
	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Ekspor bersih perdagangan	Sesuai
			Ekspor hasi perikanan	Sesuai
	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Total Fertility Rate (TFR)	Sesuai
			Jumlah Kematian Bayi	Sesuai
			Jumlah Kematian Balita	Sesuai
			Jumlah Kematian Neonatal	Sesuai
			Jumlah Kematian Ibu	Sesuai

4.3.1.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya dari 2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Konsep Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain, yaitu: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

1. Pasar tunggal dan basis produksi
2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi
3. Kawasan pengembangan ekonomi yang merata
4. Kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009
2. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang susunan keanggotaan Setnas ASEAN
4. Program Pembangunan seperti MP3EI
5. Program Sislognas
6. Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing
7. Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC
8. Pembentukan Komite Nasional AEC 2015
9. Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan.

Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat berproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Sebab disisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

Tabel 4.3 Isu Strategis Pembangunan Skala Global-Regional

No.	Acuan	Isu Strategis
Skala Global - Internasional		
1.	***Sustainable Development Goals* (SDG's)**	1. Masih terdapat jurang yang lebar antara rumah tangga yang miskin dan rumah tangga, antara daerah pedesaan dan perkotaan. 2. Masih terdapat ketidaksetaraan gender. 3. Banyak terjadi konflik yang menjadi ancaman nyata bagi pembangunan manusia. 4. Jutaan orang miskin hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, tanpa akses terhadap pelayanan dasar.

No.	Acuan	Isu Strategis
		5. Ancaman terjadinya perubahan iklim dan degradasi lingkungan, dimana kelompok masyarakat miskin terkena dampak yang paling besar.
2.	***Indonesia Malaysia Thailand – Growth Triangle*** **(IMT-GT)**	**Isu (Positif)** 1. Pertumbuhan ekonomi tiga negara yang relatif terjaga 2. Tren pasar internal pada tiga negara yang terus berkembang 3. Perdagangan antar daerah antar negara cenderung tumbuh 4. Potensi lokasi tujuan investasi yang beragam 5. Adanya potensi bonus demografi 6. Kekayaan budaya yang beragam 7. Kenekaragaman hayati pada daerah yang masuk dalam IMT-GT sangat melimpah 8. Program IMT-GT masuk dalam prioritas nasional di masing-masing negara 9. Potensi kerjasama internasional strategis dalam IMT-GT **Isu (Negatif)** 1. Proses tahapan fasilitasi kegiatan investasi dan perdagangan yang masih belum efisien 2. Arus investasi antar daerah antar negara yang masih terbatas 3. Kesenjangan konektivitas transportasi yang masih tinggi 4. Skil/ketrampilan SDM yang masih kurang 5. Diversifikasi produk perdagangan (khusunya produk UMKM) yang masih sangat kurang 6. Keterlibatan sektor swasta yang masih rendah 7. Tata kelola organisasi di setiap negara yang belum efektif 8. Sistem pengelolaan kegiatan yang masih lemah 9. Lambatnya reformasi kebijakan di tingkat ASEAN 10. Potensi risiko tidak tercapainya target-target yang ditetapkan dalam investasi infrastruktur 11. Risiko harga komoditas yang tidak terjaga 12. Terjadinya degradasi lingkungan karena eksploitasi berlebihan
3.	**Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**	1. Potensi munculnya risiko kompetisi yang berhubungan dengan daya saing dan kualitas produk 2. Potensi eksploitasi SDA di bidang investasi, terutama karena kurang ketanya regulasi yang adaa 3. Regulasi untuk investasi yang masih saling tumpang tindih

No.	Acuan	Isu Strategis
		4. Kualitas SDM (Tenaga Kerja) yang masih di bawah negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapore, Malaysia, dan Thailand 5. Biaya produksi barang, terutama sektor UKM dalam negeri, yang masih relatif mahal dibandingkan negara lain sehingga tidak mampu menciptakan efisiensi produksi.
4.	**Kondisi Aktual**	1. Pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir 2. Tren harga minyak dunia yang cenderung naik dan berpotensi melesat pasca selesainya pandemi Covid-19 3. Proyeksi masa keemasan industri sawit nasional pada periode 2020-2030 4. Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India 5. Masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global 6. Risiko geopolitik dari Korea Utara, Timur Tengah, dan Amerika Serikat 7. Rencana lanjutan kenaikan Fed Fund Rate dan Normalisasi Neraca Bank Sentral AS 8. Permasalahan lingkungan dan pemanasan global

4.3.2 Isu Strategis Nasional

4.3.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu;

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selanjutnya terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

   Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

   1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
   3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
2) Memajukan kebudayaan;
3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
5) Meningkatkan budaya literasi.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan

memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
3) Pembangunan Rendah Karbon.

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

4.3.2.2 Penanganan Pandemi COVID-19

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China yang kemudian diidentifikasi sebagai jenis baru coronavirus (*novel coronavirus*). Pada awal tahun 2020 virus jenis ini mulai menjadi penyebab pendemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar China. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya

laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Kasus pertama Covid 19 di Indonesia mulai terjadi per 1 Maret 2020 yang menjangkiti seorang pekerja seni di Kabupaten Depok Jawa Barat. Setelah itu penyebaran COVID-19 yang semakin cepat ke seluruh wilayah Indonesia dan telah memberi dampak yang sangat serius terhadap segala sendi kehidupan masyarakat terutama di bidang kesehatan, ekonomi dan bahkan dinamika kehidupan sosial pada umumnya. Tak terbayangkan sebelumnya, pandemi ini telah mengancam kehidupan masyakat dan memberikan dampak yang parah terhadap merosotnya kualitas hidup masyarakat secara umum.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Sebelum itu, pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Keppres No. 9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, serta pertahanan dan keamanan.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi

dampak COVID-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: **pertama** adalah menguatkan sektor kesehatan, **kedua** melindungi masyarakat dan dunia usaha, **ketiga** mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan **keempat** adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi COVID-19. Sedangkan beberapa program yang telah dan akan dijalankan oleh Pemerintah terkait dengan penanganan Covid-19 antara lain;

1. *Pertama*, program rakyat aman dari virus corona. Pemerintah akan memperluas tes polymerase chain reaction (PCR), pelacakan, dan karantina terhadap masyarakat yang positif terkena virus corona. Selain itu, pemerintah pusat juga mempersiapkan skema penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilakukan pada Desember 2020 mendatang. Hal ini agar pesta demokrasi tetap berlangsung secara aman di tengah pandemi corona.
2. *Kedua*, program Indonesia sehat. Di sini pemerintah mendorong kemandirian pelayanan kesehatan di rumah sakit dan penyediaan obat-obatan. Di dalamnya ada transformasi sistem kesehatan termasuk BPJS Kesehatan yang berkualitas.
3. *Ketiga*, program Indonesia berdaya. Pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) demi mendongkrak daya beli masyarakat domestik. "Kemudian program lainnya seperti program kartu prakerja, subsidi gaji, kredit modal kerja, dan subsidi listrik
4. *Keempat*, pemerintah menyiapkan program Indonesia tumbuh. Beberapa poin yang masuk dalam program tersebut, antara lain peningkatan ekspor transformasi perpajakan, dan mendorong ekonomi di level mikro.
5. *Kelima*, pemerintah juga menyiapkan program jangka panjang (*multiyears*) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca dihantam pandemi corona."

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan maka penanganan Covid-19 dapat dijadikan sebagai isu strategis di setiap urusan kewenangan Pemerintah daerah. Dalam merumuskan permasalahan pembangunan di setiap urusan kewenangan pemerintah daerah maka perlu dianalisa sejauhmana pengaruh Covid-19 terhadap pelaksanaan urusan kewenangan. Selanjutnya juga harus dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam mengatasi kendala dan hambatan yang disebabkan oleh Covid-19. Identifikasi sejauhmana pengaruh Covid-19 terhadap pelaksanaan masing-masing urusan kewenangan pemerintah daerah serta arahan kebijakan dan strategi yang ditempuh akan memandu daerah dalam menentukan pilihan prioritas program, kegiatan dan sub-kegiatan penanganan Covid-19 secara efisien, efektif dan tepat guna.

Tabel 4.4 Isu Strategis Pembangunan Nasional

SKALA NASIONAL		
1.	**RPJMN 2020-2040**	**1. Isu Ekonomi** a. Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) semakin berkurang b. Tata kelola Sumber Daya Ekonomi yang belum efektif c. Transformasi struktural yang berjalan lambat d. Tantangan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital e. Terjadinya pasar bebas yang sangat kompetitif f. Adanya peluang sekaligus tantangan bonus demografi g. Pengelolaan urbanisasi yang belum optimal h. Komitmen mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dipertahankan **2. Isu Pembangunan Kewilayahan** a. Kesenjangan antar wilayah yang masih tinggi b. Pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah c. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang d. Pemenuhan pelayanan dasar dan daya saing daerah yang masih rendah e. Kepastian hukum hak atas tanah yang masih rendah f. Ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah g. Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan yang milai menurun dan tidak efisien **3. Isu Kependudukan dan Sumber Daya Manusia** a. Perpindahan penduduk yang tidak merata b. Pendataan penduduk yang masih belum serasi dan selaras c. Sistem perlindungan sosial yang belum merata dan adaptif sesuai kebutuhan penduduk d. Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi semakin tinggi e. Kompetensi siswa di berbagai wilayah masih jauh tertinggal f. Kesenjangan mutu antar satuan pendidikan masih tinggi g. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal. h. Laju penurunan kemisikinan cenderung melambat i. Produktivitas dan daya saing SDM Indonesia masih belum optimal

SKALA NASIONAL		
		4. Isu Sosial Kebudayaan a. Ketahanan budaya bangsa yang cenderung melemah b. Upaya pemajuan kebudayaan Indonesia yang belum optimal c. Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti d. Pemahaman dan pengamalan nilai agama yang cenderung lemah e. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama f. Budaya literasi yang masih rendah g. Peran keluarga yang belum optimal **5. Isu Infrastruktur dan Pelayanan Dasar** a. Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau b. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan masih terbatas c. Keselamatan dan keamanan transportasi yang masih relatif rendah d. Infrastruktur kebencanaan belum tersedia secara ideal e. Kapasitas tampungan air pada bendungan dan upaya modernisasi saluran irigasi yang masih rendah f. Konektivitas transportasi darat, laut, udara yang masih belum optimal g. Keterbatasan infrastruktur perkotaan dibandingkan dengan laju urbanisasi yang terjadi **6. Isu Lingkungan Hidup** a. Deplesi SDA dan degradasi kualitas lingkungan hidup b. Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup c. Tingginya risiko bencana di Indonesia d. Tata kelola penanggulangan bencana di daerah yang masih lemah e. Transisi dari penurunan emisi menuju pembangunan rendah karbon **7. Isu Politik, Hukum, dan Keamanan** a. Konsolidasi demokrasi yang masih belum optimal b. Koordinasi antar pemangku kepentingan yang masih lemah c. Dimensi pembangunan hukum di Indonesia yang cenderung lemah d. Kondisi akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan yang masih sebatas pemenuhan pelaporan administrasi e. Ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional

4.3.3 Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Analisis isu-isu strategis yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu :

Tabel 4.5 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

NO	SASARAN PRIORITAS	ISU STRATEGIS
1	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja	a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara (5,56 persen)
2	Peningkatan dan Pemenuhan akses Pendidikan	a. Rendahnya kualitas dan kompetensi guru, gaji guru honorer blm sesuai standar, dan belum meratanya distribusi guru. b. Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan yang melanjutkan sekolah ke Pendidikan Tinggi. c. Belum adanya *Link and Match* antara sekolah menengah kejuruan dengan industri usaha d. Terbatasnya tenaga Pendidik dan sarana prasarana fasilitas Sekolah berkebutuhan Khusus/ Sekolah Luar Biasa (SLB)
3	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan Lingkungan	a. Belum optimalnya operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air berupa irigasi dan rawa. b. Adanya kondisi rawan bencana pada beberapa daerah. c. Masih adanya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni d. Masih terbatasnya konektivitas sehingga menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan strategis
4	Penyediaan Layanan Kesehatan yang berkualitas	a. Masih terbatasnya akses dan mutu pelayanan kesehatan b. Masih terbatasnya sumber daya kesehatan sesuai standar
5	Peningkatan Daya Saing melalui sektor agraris dan Pariwisata	a. Belum optimalnya pemanfaatan hasil Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi. b. Belum optimalnya Pengelolaan pariwisata di Sumatera Utara baik dari sarana prasarana maupun promosi dan pemasaran

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Beberapa isu strategis yang dikemukakan dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2019-2023 tersebut juga sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Asahan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan mengembangkan sinergisitas pembangunan yang produktif dengan Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Utara terutama dalam menangani berbagai isu straegis tersebut melalui program dan kegiatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Asahan.

4.3.4 Isu Strategis Kabupaten Asahan

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis utama Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut :

1. Reformasi dan Digitalisasi Birokrasi

   Sejalan dengan isu strategis pertama, dukungan birokrasi yang adaptif dan inovatif merupakan salah satu kunci dalam penanganan covid-19. Untuk itu, isu strategis berikutnya adalah pelaksanaan Reformasi dan Digitalisasi Birokrasi. Isu ini juga menjadi salah satu elemen yang mendukung kuat kesuksesan pembangunan Kabupaten Asahan selama lima tahun mendatang.

   Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan *(business process)* dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan menyingkirkan ego sektoral, sehingga terwujud kolaborasi kerja lintas OPD dalam melaksanakan kegiatan hingga mencapai tujuan dari pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra hingga RPJMD.

   Isu Reformasi Birokrasi di Kabupaten Asahan pada saat ini, antara lain :

   - Belum semua jabatan memiliki standar kompetensi Jabatan;
   - Kebutuhan pegawai tidak sesuai dengan beban kerja;
   - Belum memiliki manajemen karir : perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
   - Belum memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
   - Belum memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

Berikutnya, seiring dengan pesatnya laju perkembangan teknologi, birokrasi dituntut untuk segera berbenah dengan berbagai layanan digital. Secara teoritis, konsep digitalisasi birokrasi melalui tiga tahapan yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Digitalisasi birokrasi juga dapat diterapkan baik secara internal pemerintah maupun eksternal (publik). Implementasi digitalisasi birokrasi membutuhkan perubahan *mindset* dari ASN sebagai pelaksana karena dalam beberapa kasus akan mengubah *business process* layanan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Digitalisasi layanan birokrasi diharapkan akan menekan praktik KKN dan memberikan kepastian *(certainty)* layanan kepada seluruh *stakeholders*.

Sampai dengan saat ini, berbagai pelayanan publik masih dilakukan secara manual, dengan kualitas pelayanan yang relatif masih rendah. Di sisi lain, harapan masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital semakin meningkat, karena dapat diakses dengan mudah secara online dan digital.

Kondisi pelayanan publik yang perlu dioptimalkan melalui digitalisasi antara lain :

- Kependudukan: Pelayanan urusan kependudukan mulai dari Akta, KK, KTP, KIA, dan berbagai surat keterangan atau dokumen kependudukan lainnya agar terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Rumah Sakit: Pelayanan kesehatan masih belum maksimal, data ketersediaan kamar pasien rawat inap masih manual, data pasien belum tervalidasi secara digital, dan terintegrasi dengan layanan telemedicine.
- Kepegawaian: Pelayanan kepegawaian mulai dari rekrutmen, kenaikan pangkat, diklat, dan penempatan ASN dalam jabatan masih memakai proses manual sehingga memakan waktu.
- Perencanaan: Layanan tentang sistem perencanaan bagi OPD perlu lebih terintegrasi dan memberikan ruang kepada publik untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.
- Pendapatan: Pelayanan pada bidang pendapatan daerah terutama pada pendataan wajib pajak dan potensi retribusi masih kurang maksimal sehingga proses pengumpulan *(collecting)* pos-pos pendapatan masih belum efisien.

- Layanan informasi, aduan, dan kolaborasi: Belum tersedianya platform yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengakses informasi, menyampaikan aduan/aspirasi, bahkan hingga potensi kolaborasi.
- Pengembangan UKM: Belum maksimalnya proses fasilitasi kepada masyarakat untuk mengembangkan unit usaha secara digital.

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Kabupaten Asahan mengalami pertumbuhan ekonomi berada diatas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara maupun Nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang kontribusi paling besar dengan rata-rata per tahun sebesar 42,45 persen kemudian diikuti Sektor industri pengolahan menyumbang kontribusi per tahun sebesar 20,95 persen. Namun demikian beberapa hal yang perlu diwaspadai adalah adanya kecenderungan peningkatan indeks gini selama periode 5 tahun belakangan, kemudian adanya kecenderungan peningkatan angka pengangguran terbuka yang pada tahun 2019 mencapai angka 7,24 persen dari total angkatan kerja. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah daerah Kabupaten Asahan berupaya meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dalam artian pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Asahan yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, pengangguran dan adanya keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup.

3. Asahan Sehat

Rendahnya Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Asahan yang pada tahun 2020 hanya mencapai selama 68,26 tahun atau berada pada urutan 25 dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan masih perlu ditingkatkan. Beberapa permasalahan bidang kesehatan yang perlu ditangani antara lain masih cukup tingginya jumlah kasus Persentase Bayi Gizi Buruk, masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, masalah gizi masyarakat, rendahnya kualitas pola hidup sehat ibu dan anak, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan dan terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata.

Mulai tahun 2021 Kabupaten Asahan menjadi lokus penanganan percepatan penurunan stunting. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan angka stunting di Kabupaten Asahan pada periode 2016-2020. Pada tahun 2016 angka stunting di

Kabupaten Asahan sebesar 16.481 kasus, meningkat menjadi 20.980 kasus pada tahun 2020.

4. Asahan Cerdas

Pada tahun 2020, rata-rata penduduk Kabupaten Asahan mengenyam pendidikan formal selama 8,79 tahun atau setara dengan jenjang kelas 3 sekolah menengah pertama. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Asahan perlu memberi perhatian yang lebih besar pada bidang pendidikan dengan membenahi aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan jumlah guru dan tenaga pendidik yang berkualitas, pengembangan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan pendidikan menengah dengan pihak pemerintah provinsi, peningkatan tata kelola dan manajemen pendidikan serta inovasi kebijakan yang mampu mendorong prestasi siswa di semua jenjang pendidikan

5. Peningkatan Kondusifitas Daerah

Kondusifitas Daerah dipengaruhi oleh tingkat Kriminalitas. Semakin tinggi kondisi tingkat kriminalitas maka daerah tersebut semakin tidak kondusif. Tindak kriminalitas dapat terjadi karena beberapa faktor mulai dari faktor ekonomi, faktor kemiskinan, krisis moneter, kurangnya lapangan kerja serta penyalahgunaan narkoba. Jumlah kriminalitas di Kabupaten Asahan pada tahun 2019 sebesar 1.267 kasus meningkat pada tahun 2020 menjadi 1.374 kasus.

6. Infrastruktur Kuat

Pembangunan infrastruktur menjadi satu perhatian utama dari Pemerintah Kabupaten Asahan seiring dengan perkembangan wilayah dan jumlah penduduk. Belum optimalnya ketersediaan Infrastruktur baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi isu strategis yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan. Bidang infrastruktur kuat yang menjadi prioritas antara lain meningkatkan persentase infrastruktur jalan dan jembatan kewenangan kabupaten dalam kondisi mantab untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. Peningkatan akses rumah layak huni, pengelolaan air minum, dan pengelolaan sanitasi untuk menopang tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengurangan luasan kawasan kumuh. Selain itu, untuk menunjang produksi hasil pertanian dan ketahanan pangan, maka infrastruktur irigasi masih perlu ditingkatkan.

7. Percepatan Penanganan Dan Pemulihan Dampak Ekonomi COVID-19

Penyebaran Covid-19 yang semakin cepat telah memberi dampak yang sangat serius terhadap segala sendi kehidupan masyarakat terutama di bidang kesehatan, ekonomi dan bahkan dinamika kehidupan sosial pada umumnya. Tak terbayangkan sebelumnya, pandemi ini telah mengancam kehidupan masyarakat dan memberikan dampak yang parah terhadap merosotnya kualitas hidup masyarakat secara umum. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan harus terus mengupayakan penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dan penanganan dampak sosial ekonomi lainnya. Berbagai sumber daya termasuk kapasitas keuangan yang dimiliki oleh pemerintah dikerahkan untuk memberikan bantuan pada masyarakat terdampak, insentif ekonomi maupun pemberian bantuan jaring pengaman sosial. Pada akhirnya kemampuan Kabupaten Asahan dalam menangani dampak Covid-19 akan sangat berpengaruh terhadap kembalinya normalitas kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Asahan.

4.3.5 Penelaahan RPJPD Kabupaten Asahan 2005-2025

RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD periode ke-4 dari RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025. RPJMD ke-4 ditujukan untuk Mewujudkan Asahan yang Religius, Sejahtera dan Mandiri melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Asahan pada periode akhir RPJMD ini meliputi :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Asahan, baik pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.
2. Terciptanya kelembagaan politik dan hukum yang kuat merupakan perwujudan tujuan pembangunan.
3. Terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral.
4. Terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri

5. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh.
6. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, serta sektor jasa.
7. Pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.
8. Terwujudnya kemandirian daerah tercermin, melalui ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya.
9. Daerah mandiri akan mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat masyarakatnya dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

4.3.6 Penelaahan RTRW Kabupaten Asahan 2013-2033

Penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan merujuk kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033. Perencanaan yang disusun mengikuti rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah RTRW. Ketaatan pelaksanaan pembangunan sesuai RTRW akan menciptakan pemerataan pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 merujuk kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033. Perencanaan yang disusun mengikuti rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah. Ketaatan pelaksanaan pembangunan sesuai RTRW akan menciptakan pemerataan pembangunan.

Struktur ruang wilayah Kabupaten Asahan terdiri dari :

a. Rencana sistem perkotaan meliputi pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan dan pusat kegiatan lokal promosi.

b. Rencana Sistem Perdesaan meliputi pengembangan kawasan permukiman pedesaan, pengembangan sistem transportasi pedesaan, pengembangan sarana dan prasarana permukiman pedesaan.
c. Rencana sistem jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan sistem transpotasi, rencana jaringan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan sumberdaya air, rencana pengelolaan air limbah, dan rencana pengelolaan persampahan.

Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten Asahan terdiri dari :

a. Rencana Kawasan Lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan lindung setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam.
b. Rencana Kawasan Budidaya meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan konversi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan/tanaman tahunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan, kawasan industri, pariwisata, perumahan dan permukiman, kawasan pertahanan keamanan, kawasan pesisir dan laut, pengembangan hutan kota, dan pengembangan kawasan perkotaan.

4.3.7 Penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026

KLHS RPJMD merupakan analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD. Berdasarkan hasil pencapaian TPB di atas, kebutuhan perkembangan kabupaten, dan kondisi lingkungan hidup (daya dukung dan daya tampung lingkungan) berbasis jasa ekosistem, analisa peran para pihak serta kondisi keuangan daerah, maka KLHS RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan yang wajib diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah :
   a. Kemiskinan dan pengangguran
   b. Pola hidup sehat ibu dan anak
   c. Jangkauan dan Kualitas pelayanan pendidikan
   d. Jangkauan dan kualitas pelayanan air besih
   e. Pengelolaan sanitasi dan limbah
   f. Pengembangan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
   g. Pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik
   h. Penanganan pencegahan dan penanggulangan bencana alam

2. Kesimpulan bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Asahan, meliputi:
    a. Pilar Lingkungan Hidup :
        - Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar.
        - Pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya
        - Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
        - Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan
        - Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
        - Menjamin bahwa masyarakat memiliki informasi dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.
        - Meningkatkan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua.
        - Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya.
        - Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau.
        - Meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan memiliki ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
        - Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya (khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pesisir).
        - Memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir.
        - Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan.
        - Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.

- Mencapai akses merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
- Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air.

b. Pilar Sosial :

- Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk.
- Mengadopsi kebijakan pengupahan dan perlindungan sosial, serta kesetaraan.
- Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan dari luar daerah.
- Mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan.
- Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
- Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
- Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
- Menciptakan pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas.
- Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan.
- Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan.

- Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan terjangkau internet.

c. Pilar Ekonomi

- Mengurangi penduduk yang hidup dalam kemiskinan.
- Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin.
- Menjamin hak masyarakat miskin dan rentan, terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar.
- Membangun ketahanan masyarakat miskin dan yang rentan, terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
- Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan.
- Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi bayi, balita, remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
- Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana.
- Mencapai akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar.
- Meningkatkan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan.
- Menjamin akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini.
- meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan.
- Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan.
- Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
- Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
- Meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.
- Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.
- Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan.
- Menjamin akses kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi.

- Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan dan pemberdayaan perempuan.

d. Pilar Hukum dan Tata Kelola

- Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar.
- Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
- Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

4.3.8 Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar yaitu Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kota Tanjungbalai. Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD daerah lain dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.6 Identifikasi Kebijakan RPJMD Daerah Lain

No.	Kabupaten/kota	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1	Kabupaten Batu Bara	Tahun 2019-2023	1. Pembangunan jalan pesisir pantai timur 2. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera 3. Peningkatan debit air daerah irigasi desa Gajah dan persawahan Air Putih 4. Supplai Tenaga Kerja untuk kebutuhan rencana pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kawasan Industri 5. Kerjasama penanggulangan bencana
2	Kabupaten Toba	Tahun 2021-2026	1. Pengembangan jalur wisata Tanjungbalai-Simpang Empat-Pulau Rakyat-Aek Songsongan-Danau Toba 2. Kerjasama penanggulangan bencana alam
3	Kabupaten Simalungun	Tahun 2021-2026	1. Rencana pembangunan jalan tol trans Sumatera 2. Supplai tenaga kerja untuk KEK Sei Mangke 3. Supplai bahan baku berbasis produksi sawit untuk industri di KEK sei Mangke 4. Kerjasama pemeliharaan sumber air untuk irigasi DI Silau Maraja Kecamatan Setia Janji dan DI Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan 5. Pengembangan jalur wisata Tanjungbalai-Buntu pane-BP Mandoge-Tanah Jawa-Danau Toba

No.	Kabupaten/kota	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
			6. Kerjasama penanggulangan bencana alam
4	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Tahun 2021-2026	1. Pembangunan irigasi dan cetak sawah 2. Pembangunan jalan lingkar luar Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong-Aek Kanopan Labuhan Batu Utara 3. Rencana pembangunan jalan tol trans Sumatera 4. Pengembangan SPAM regional 5. Kerjasama penanggulangan bencana
5	Kota Tanjungbalai	Tahun 2021-2026	1. Penanggulangan sedimentasi Sungai Asahan 2. Pembangunan TPA Regional 3. Penyelesaian jalan lingkar utara 4. Perawatan jembatan Sei Kepayang Kota Tanjungbalai-Sei Kepayang 5. Pembangunan SPAM Regional 6. Pembangunan jalur wisata Tanjungbalai-Simpang Empat-Pulau Rakyat-Aek Songsongan-Danau Toba 7. Pengendalian banjir Sungai Asahan 8. Kerjasama penanggulangan bencana alam


2


TPS
7
KPU

BAB 5
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Asahan, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Asahan yaitu:

SEJAHTERA : suatu kondisi harapan yang akan diwujudkan untuk masyarakat Asahan dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan yang berkualitas, rasa aman, dan peningkatan pendapatan yang didukung oleh infrastruktur sosial, ekonomi, dan lingkungan.

RELIGIUS : merupakan semangat kebersamaan yang dibangun melengkapi proses pembangunan di Kabupaten Asahan dengan terbentuknya jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa, ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar.

BERKARAKTER : masyarakat Asahan diarahkan memiliki perilaku yang bertanggungjawab, bergotong-royong, hidup dalam kebersamaan dan

kerukunan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2016, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel;
2. Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi;
4. Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja;
5. Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kesehatan;
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi;
8. Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
9. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berorientasi mendukung produktivitas dan pengembangan kawasan strategis;
10. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan bernilai ekonomis;
11. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong royong;
12. Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumberdaya manusia.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran makro sebagai *impact* makro jangka menengah daerah, meliputi:

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun
2. Menurunnya Laju Inflasi setiap tahun
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Menurunnya Gini Rasio
5. Menurunnya Persentase tingkat Kemiskinan
6. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Selanjutnya Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

5.3.1. Tujuan dan Sasaran pada Misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel.

Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatnya akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dengan indikator :
   - Nilai LPPD
   - Nilai SAKIP
   - Level Maturitas SPIP
   - Indeks Profesionalitas ASN
b. Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT, dengan indikator :

- Cakupan pelayanan Smart City
- Indeks SPBE

5.3.2. Tujuan dan Sasaran pada Misi Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka Mendorong Perekonomian Daerah.

Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas; dengan indikator :
   - Peningkatan Produktivitas Potensi Unggulan Daerah sektor Pertanian
b. Meningkatnya daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah, dengan indikator:
   - Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung Potensi Unggulan Daerah
c. Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah, dengan indikator :
   - Potensi daya Tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (kelompok sadar wisata) yang direalisasikan

5.3.3. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi.

Tujuan : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya kemandirian masyarakat, dengan indikator :

- Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM

5.3.4. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Menciptakan Iklim yang Kondusif dan Kemudahan Investasi Bagi Pengembangan Usaha dalam Menciptakan Lapangan Kerja

Tujuan : Meningkatkan daya saing investasi daerah

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya realisasi investasi daerah, dengan indikator :

- Realisasi Investasi PMA
- Realisasi Investasi PMDN

5.3.5. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Meningkatkan Akurasi Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APBD yang Transparan dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan, dan Pengelolaan APBD, dengan indikator :

- Opini BPK

5.3.6. Tujuan dan Sasaran pada Misi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Menumbuhkan Partispasi Masyarakat dalam Memelihara Kesehatan

Tujuan : Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya kualitas layanan kesehatan mayarakat, dengan indikator :

- Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
- Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
- Angka Stunting

5.3.7. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Daya Dukung Generasi Muda yang Melek Teknologi dan Budaya literasi tinggi.

Tujuan : Meningkatkan pendidikan yang unggul dan berkualitas serta peran generasi muda.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan peran generasi muda melek teknologi, dengan indikator :

- APK PAUD
- APM SD
- APM SMP
- Persentase SMP yang memiliki ruang baca digital

5.3.8. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Mendorong Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Tujuan : Meningkatkan kodusivitas daerah.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, dengan indikator :

- Cakupan Penyelesaian Penanganan Gangguan Trantibum Daerah

5.3.9. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berorientasi Mendukung Produktivitas dan Pengembangan Kawasan Strategis.

Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik, dengan indikator :

- Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik.

5.3.10. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas, Berkelanjutan dan Bernilai Ekonomis.

Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan hidup.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup, dengan indikator :

- Indeks Air
- Indeks Udara
- Indeks Kualitas Lahan
- Persentase RTH

5.3.11. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong.

Tujuan : Meningkatkan kehidupan harmoni *intern* dan antar masyarakat dan umat beragama.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan, dengan indikator :

- Cakupan Ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan

5.3.12. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Meningkatkan Perlindungan dan Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan yang Berbasis pada Kompetensi Sumberdaya Manusia.

Tujuan : Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Menurunya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan indikator :

- Persentase PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026

Sasaran Makro	Target					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Laju Pertumbuhan Ekonomi*)	1,70	2,46	3,21	3,96	4,71	5,32
Laju Inflasi*)	2,25	2,13	2,07	2,05	2,08	2,17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,05	71,57	72,08	72,60	73,12	73,63
Gini Rasio	0,257	0,254	0,251	0,248	0,245	0,242
Persentase tingkat Kemiskinan	8,57	8,11	7,65	7,20	6,76	6,32
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,77	6,35	5,94	5,54	5,14	4,74

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target*)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel									
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi			B = 61	B = 64	B = 68	BB = 71	BB = 74	BB = 78
		1. Meningkatnya akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1. Nilai LPPD	Tinggi = 3,0	Tinggi = 3,05	Tinggi = 3,10	Tinggi = 3,15	Tinggi = 3,20	Tinggi = 3,25
			2. Nilai SAKIP	B = 60	BB =70	BB =73	BB =75	BB =78	BB =80
			3. Level Maturitas SPIP	3 = 3,0	3 = 3,1	3 = 3,2	3 = 3,3	3 = 3,4	3 = 3,5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target*)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			4. Indeks Profesionalitas ASN	62	65	68	70	72	75
		2. Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	1. Cakupan pelayanan Smart City	44,44%	55,56 %	66,67 %	77,78 %	88,89 %	100%
			2. Indeks SPBE	1,95	1,97	1,99	2,01	2,03	2,05
Misi 2 : Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah.									
Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi sektor Primer			3,80	4,16	4,52	4,88	5,23	5,59
		Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Peningkatan Produktivitas potensi unggulan daerah sektor pertanian	1,63	1,65	1,67	1,69	1,71	1,73
	Pertumbuhan ekonomi Sektor Sekunder dan Tersier (Jasa, perdangangan, industri)			2,23	3,11	3,99	4,12	4,87	5,72
		1. Meningkatnya daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung potensi unggulan daerah	3,93	4,16	4,35	4,52	4,69	4,77
		2. Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah	Potensi daya Tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (kelompok sadar wisata) yang direalisasikan	5 pokdar wis	6 pokdar wis	7 pokdar wis	8 pokdar wis	9 pokdar wis	10 pokdar wis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target*)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi									
Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten			0,6491	0,6527	0,6563	0,6599	0,6635	0,6671
		Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	1,69	1,69	2,26	2,82	3,39	3,95
Misi 4 : Menciptakan Iklim yang Kondusif dan Kemudahan Investasi Bagi Pengembangan Usaha Dalam Menciptakan Lapangan Kerja									
Meningkatkan daya saing investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah			0.3 %	0.6 %	1%	1.5 %	2 %	2.5 %
		Meningkatnya realisasi investasi daerah	1. Realisasi Investasi PMA (Juta US $)	201,4	202,6	204,7	207,7	211,9	217,2
			2. Realisasi Investasi PMDN (Trilyun Rupiah)	10,7	10,8	10,9	11,1	11,3	11,6
Misi 5 : Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat									
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			79,32	79,42	79,52	79,62	79,72	79,82
		Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Menumbuhkan Partispasi Masyarakat Dalam Memelihara Kesehatan									
Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Indeks Kesehatan			77,88	77,98	78,08	78,18	78,28	78,38
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan mayarakat	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	125	116	108	100	91	83

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target*)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			2. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	1	1	1	1	1	1
			3. Angka Stunting	28%	27%	26%	24%	22%	20%
Misi 7 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi									
Meningkatkan pendidikan yang unggul dan berkualitas serta peran generasi muda	Indeks Pendidikan			79,50	79,60	79,70	79,80	79,90	80,00
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan peran generasi muda melek teknologi	1. APK PAUD	69,90	70,00	70,02	70,07	70,12	70,15
			2. APM SD	99,67	99,68	99,69	99,70	99,71	99,72
			3. APM SMP	82,82	82,89	82,95	82,98	83,26	83,40
			4. Persentase SMP yang memiliki ruang baca digital	36,50	41,00	45,50	51,00	55,50	60,00
Misi 8 : Mendorong Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat									
Meningkatkan kondusivitas daerah	Angka kriminalitas			18,8	18,79	18,76	18,74	18,73	18,71
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di masyarakat	Cakupan penyelesaian penanganan gangguan Trantibum daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 9 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berorientasi mendukung Produktivitas dan Pengembangan Kawasan Strategis									
Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks infrastruktur wilayah			68,16	68,30	68,50	68,70	69,00	69,20
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	30%	33%	36,5%	40,5%	45%	50%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target*)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 10 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Berkelanjutan dan Bernilai Ekonomis									
Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten			62,66	63,28	63,90	64,52	65,14	65,76
		Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup	1. Indeks air	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10
			2. Indeks Udara	87,23	87,33	87,43	87,53	87,63	87,73
			3. Indeks Kualitas Lahan	34,49	36,97	39,45	41,93	44,41	46,89
			4. Persentase RTH	39,74%	40%	40%	40%	40%	40%
Misi 11 : Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong.									
Meningkatkan kehidupan harmoni *intern* dan antar masyarakat dan umat beragama	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan			60,84	62,20	62,80	68,10	66,40	67,48
		Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Cakupan ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	33%	42%	49%	55%	60%	65%
Misi 12 : Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumber daya manusia.									
Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	Persentase Keluarga Sejahtera			63,36	63,56	63,76	63,96	64,16	64,36
		Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

*) diukur menggunakan tahun dasar tahun 2020.







BAB 6
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026

VISI: MASYARAKAT ASAHAN SEJAHTERA YANG RELIGIUS DAN BERKARAKTER			
Misi 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Evaluasi terhadap peta jalan reformasi birokrasi
			Perumusan kebijakan percepatan reformasi birokrasi
			Peningkatan koordinasi kelembagaan antar eksekutif dan legislatif
			Digitalisasi Birokrasi
			Transparansi Birokrasi
			Penerapan SOP yang jelas di birokrasi
			Penerapan reward and punishment bagi aparatur
			Evaluasi tugas aparatur secara berkala
			Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan
			Penataan dan penguatan organisasi
			Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan aparatur
			Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja
	Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	Pengembangan Smart City bagi penyelenggaraan pemeritahan dan pelayanan publik	Penyiapan roadmap dan masterplan Smart City
			Pengembangan e-government secara terpadu untuk digitalisasi pemerintahan
			Pengembangan, pengintegrasian, dan

			pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu big data
			Pengembangan aplikasi pendukung layanan desa
			Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu big data
			Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika
			Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, UMKM, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya
			Pengembangan dan pengelolaan media informasi publik
			Kerjasama dengan pemangku kepentingan dan komunitas di bidang penyelenggaraan informasi dan pelayanan publik
			KTP Tangguh
			Pelayanan delivery system Adminduk
			Pengembangan aplikasi modern
			Pengembangan pusat informasi layanan publik berbasis digital
Misi 2: Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
			Pengembangan kawasan agromarinepolitan
			Pengembangan kawasan pertanian organik
			Optimalisasi lahan pertanian marginal dan

	dalam arti luas		pekarangan
			Pengembangan komoditas unggulan pertanian
			Pengembangan sistem pemasaran produk agro
			Pengembangan komoditas unggulan peternakan
			Penguatan gerakan pertanian organik, sertifikasi produk, dan kerjasama pemasaran Organik
			Subsidi saprodi untuk petani
		Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	Pengembangan lumbung pangan desa
			Peningkatan distribusi pangan
			Peningkatan ketersediaan pangan
			Pengembangan olahan pangan berbasis sumberdaya lokal
			Peningkatan keamanan pangan
		Peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap
			Pengembangan produksi dan nilai tambah perikanan budidaya
			Pengembangan Kawasan Minapolitan
			Pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan
			Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
			Subsidi saprodi untuk nelayan
	Meningkatnya daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah	Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi UKM dan Koperasi

			Penguatan UMKM
			Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)
			Pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirusahawan baru
			Pemberian insentif wirausaha baru
			Peningkatan Akses pasar UMKM dan koperasi ke daerah daerah yang potensial
			Fasilitasi Penerapan teknologi tepat guna
			Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan besar dan stakeholder potensial lainnya
			Mall UMKM
			Pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha
		Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali	Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata di wilayah Kabupaten Asahan
			Meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di di seluruh wilayah Kabupaten Asahan
			Pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
			Peningkatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
			Pembangunan dan pengembangan Pasar Inpres Kisaran II
			Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional perdesaan

		Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah	Roadmap pengembangan potensi sektor Industri Kabupaten Asahan
			Fasilitasi Kemitraan Usaha Industri Kecil dengan berbagai pihak potensial lainnya
			Pembinaan dan Pelatihan bagi pelaku industri kecil berbasis komoditas masyarakat
	Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah	Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan	Identifikasi obyek wisata yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang
			Pengembangan Desa Wisata dan Roadmap Pemulihan Destinasi Wisata
			Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkonekvitias antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam trip sehari
			Pengembangan Desa Wisata pintar berbasis karakter lokal didukung promosi e-commerce (dukungan IT)
			Asahan Go Wisata: Pembentukan Ripparda, Asahan One Stop Adventure Tourism, Wisata religi dan kuliner, Ekowisata mangrove
		Pengembangan seni budaya, kearifan lokal, dan nilai tradisi berbasis masyarakat	Penguatan seni budaya, kearifan lokal dan nilai tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah
			Sinergitas seni budaya di kurikulum pendidikan dalam rangka keberlanjutan daya dukung potensi daerah
			Faslitasi kegiatan seni budaya dan nilai tradisi masyarakat sampai dengan tingkat desa
			Peningkatan peran masyarakat dalam

			kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi lokal
			Pembangunan sarana event seni budaya di tiap kecamatan
			Penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional dan internasional
			Promosi potensi seni budaya lokal berbasis masyarakat
Misi 3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mendorong daya saing ekomoni masyarakat	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	Optimalisasi peran lembaga desa dalam pembangunan
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
			Penguatan kapasitas pemerintahan desa
			Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
			Fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa
			Sinergitas program pemerintah dengan desa
			Ekonomi Mandiri melalui Pengembangan Kampung Mandiri
			Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengefektifkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat
			Pengembangan ekonomi kreatif kelompok masyarakat
Misi 4: Menciptakan Iklim Yang Kondusif Dan Kemudahan Investasi Bagi Pengembangan Usaha Dalam Menciptakan Lapangan Kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan iklim kondusif yang mendorong peningkatan realisasi investasi pada sektor unggulan daerah yang meyerap tenaga kerja lokal	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal
			Pengembangan Peta Digital Potensi Investasi
			Penigkatan Promosi Potensi Penanaman Modal
			Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang terintegrasi dengan SATU DATA Provinsi dan Nasional
			Penertiban Regulasi Investasi
			Proses Perizinan berbasis digital
			Penyediaan data dan informasi peluang investasi secara online
			Peningkatan sarana untuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi
			Optimalisasi fungsi Mall Pelayanan Publik (MPP)
			Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
Misi 5: Meningkatkan Akurasi Proses Perencanaan, Penganggaran Dan Pengelolaan APBD Yang Transparan Dan Berorientasi Pada Kepentingan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	Optimalisasi pengelolaan Keuangan daerah	Penguatan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
			Optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital

			Peningkatan pengelolaan asset dan kekayaan daerah
		Penguatan perencanaan, analisis data, penelitian dan pengembangan	Perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan penelitian
			Penguatan pelaksanaan perencanaan yang sistematis melalui musyawarah (bottom up).
			Penguatan kapasitas perencanaan daerah
			Optimalisasi peran Lembaga Riset dan Inovasi Daerah
			Peningkatan kreasi dan inovasi daerah
Misi 6: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Menumbuhkan Partispasi Masyarakat Dalam Memelihara Kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan mayarakat	Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta terjangkau
			Meningkatkan kompetensi dan ketersediaaan SDM bidang kesehatan
			Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
			Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
			Penataan Manajemen RSUD
			Peningkatan promosi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi.
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai dengan desa
			Membangun RS berstandar nasional
			Berobat gratis bagi masyarakat miskin
			Peningkatan insentif kader kesehatan
			Pemerataan akses dan mutu layanan

			kesehatan dasar dan rujukan;
			Pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan;
			Peningkatan kesadaran perilaku serta kemandirian masyarakat dan keluarga dalam memelihara kesehatan;
			Peningkatan cakupan jaminan kesehatan;
			Peningkatan Gizi Masyarakat
			Penataan Lingkungan Sehat
			Percepatan Penanganan Stunting
			Percepatan Penanganan Covid-19
Misi 7: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Dan Daya Dukung Generasi Muda Yang Melek Teknologi Dan Budaya Literasi Tinggi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pendidikan yang unggul dan berkualitas serta peran generasi muda	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan dan peran serta generasi muda dalam pembangunan	Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pendidikan	Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan
			Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar
			Pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di tingkat pendidikan
			Penguatan kapasitas sumberdaya dan manajemen pendidikan
			Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
			Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika
			Fasilitasi layanan pendidikan inklusi
			Beasiswa Pendidikan pelajar/mahasiswa miskin dan berprestasi

			Peningkatan kesejahteraan guru Non PNS
			Memfasilitasi SMA/SMK Negeri
			Peningkatan sarana dan infrastruktur pendidikan untuk menjamin kemudahan akses layanan pendidikan
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berbasis IMTAQ
			Peningkatan partisipasi pendidikan melalui pendidikan formal dengan tata kelola yang professional
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan
			Pengembangan sekolah model/sekolah penggerak melalui program digitalisasi pendidikan
		Pengembangan Budaya Baca dan Digitalilasasi Literasi	Pengembangan sarana prasarana literasi masyarakat dan pendidikan
			Digitalisasi wahana literasi dan perpustakaan
		Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan: pemuda yang mandiri dan kreatif
			Meningkatkan sarana prasarana olahraga
Misi 8: Mendorong Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kodusivitas daerah	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	Penguatan kelembagaan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan trantibum
			Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
			Monitoring bersama masyarakat secara

			berkala
			Peningkatan dan penguatan kerukunan intern dan antar umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial
			Penguatan pranata sosial
			Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas untuk menjaga stabilitas, ketentraman dan kenyamanan lingkungan
			Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
			Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko bencana ada di semua elemen (urusan)
			Kerjasama pengembangan desa tangguh dengan sektor pertanian, wisata, dan informasi
Misi 9: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berorientasi Mendukung Produktivitas dan Pengembangan Kawasan Strategis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Memantapkan penyediaaan infrastuktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Asahan guna menunjang produktivitas antar wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan Jalan serta Jembatan yang menghubungkan sentra produksi dan pemasaran
			Pembangunan infrastruktur di Kawasan pusat pertumbuhan Ekonomi
			Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan, jalan usaha tani dan sarana produksi lainnya di wilayah sentra produksi pertanian
			Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat
			Penguatan sistem sanitasi lingkungan

			Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
			Penataan kawasan dan wilayah guna mendukung harmonisasi dan keberlanjuan wilayah
			Pengembangan peta digital ruang wilayah Kabupaten Asahan dalam mendukung kebijakan SATU DATA
		Meningkatkan Penataan perumahan dan kawasan Pemukiman yang sehat dan berkelanjutan	Pembangunan Rumah Layak Huni
			Penataan kawasan perumahan dan pemukiman
			Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pemukiman
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan peumahan dan pemukiman
			Penataan kawasan kumuh perkotaan
		Memantapkan sistem transporasi antar wilayah guna peningkatan mobiitas orang dan barang antar wilayah	Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
			Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ
			Peningkatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan

			Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Misi 10: Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas, Berkelanjutan Dan Bernilai Ekonomis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan tatakelola lingkungan hidup berbasis masyarakat	Pengembangan aplikasi pemantauan kondisi area pembuangan sampah dan limbah
			Pengawasan lingkungan di tingkat kecamatan, seperti satgas yang didukung trantib
			Peningkatan pemanfaatan ruang-ruang hijau di gedung pemerinttahan, sekolah
			Pengembangan kelompok atau komunitas berbasis desa atau kecamatan
			Peningkatan hasil olahan limbah bernilai ekonomi kerjasama dengan ekonomi kreatif
			Lingkungan Berbasis Partisipatif: Kisaran bebas banjir, Pembangunan TPA Sampah, Membentuk kader lingkungan
			Peningkatan Sumberdaya Manusia masyarakat sadar lingkungan;
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang partispatif;
			Peningkatan upaya perlindungan sumber air dan konservasi Sumber daya alam;
			Pengendalian terhadap usaha/investasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam;
Misi 11: Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kehidupan harmoni	Meningkatnya penerapan nilai	Penguatan dan kampanye nilai nasionalisme, agama,	Perumusan pengarusutamaan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di

intern dan antar masyarakat dan umat beragama	agama, demokratisasi dan kegotongroyongan di masyarakat	dan demokrasi di semua tingkatan masyarakat	setiap tingkatan masyarakat
			Menyisipkan semangat nasionalisme kebangsaan di setiap kegiatan SKPD
			Penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama sebagai mitra dan media propaganda positif di tingkat desa
			Asahan Religius: Rumah mengaji di setiap kecamatan, Sertifikasi gratis rumah ibadah, Pembentukan Kampung Tahfizh.
			Penguatan peran organisasi keagamaan
			Penguatan kordinasi antar organisasi keagamaan
			Penguatan lembaga Iman dan Taqwa
			Peningkatan kegiatan keagamaan yang berbasis lingkungan/dusun
			Peningkatan peran guru mengaji, bilal mayit, penggali kubur dalam kegiatan keagamaan dan social
			Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan
			Peningkatan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat.
Misi 12: Meningkatkan Perlindungan Dan Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan Yang Berbasis Pada Kompetensi Sumberdaya Manusia.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Penguatan dan peningkatan ekonomi berbasis keluarga	Pemberian bantuan bagi masyarakat dan Rumah Tangga miskin dan rentan serta terdampak krisis (contoh pandemi)
			Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan life skill dan economic skill
			Pengembangan program usaha bersama

			berbasis keluarga
			Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Penguatan kesiapsiagaan terhadap korban sosial dan bencana
			Pemberdayaan masyarakat sebagai stimulus kesejahteraan keluarga
		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan
			Pelindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan
			Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak
			Pemenuhan Kabupaten Layak Anak
			Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perembuan dan anak
		Penguatan Program Keluarga Berencana	Penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga sehat sampai dengan desa
			Fasilitasi pendampingan tenaga penyuluh di kegiatan masyarakat
			Faslitasi alat kesehatan keluarga (KB)
			Penyediaan layanan konseling keluarga

Sumber: Hasil Analisa, 2021

6.2 ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN ASAHAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Asahan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
• Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	• Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan SDM dan Infrastruktur Publik Menuju Asahan Sejahtera Yang Religius Dan Berkarakter	• Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah	• Kesinambungan Pembangunan Asahan Sejahtera, Religius, dan Berkarakter.	• Pemantapan Pembangunan Berkelanjutan	• Pembangunan Daya Saing Daerah yang Sejahtera, Religius, dan Berkarakter.
• Pemulihan	• Transformasi	• percepatan	• percepatan	• Peningkatan	• Peningkatan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi • Reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan • Reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan	Birokrasi dan Pelayanan Digital • Mengembangkan pola pembangunan yang dekat dengan masyarakat • Pengembangan SDM optimal • Pemulihan Ekonomi pasca Covid • Peningkatan Infrastruktur daerah baik untuk layanan publik maupun untuk	pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat, industri, dan pariwisata • pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan • pengembangan industri berbasis masyarakat, pertanian, dan perikanan • Peningkatan profesionalisme	pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat, industri, dan pariwisata • Penguatan kualitas pelayanan public • Penguatan pemberdayaan masyarakat di sektor perekonomian daerah • Penguatan daya saing SDM berbasis	pembangunan infrastruktur yang menjangkau secara merata di seluruh kawasan • Penyediaan fasilitas pelayanan public yang mudah, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah • Peningkatan daya saing SDM	pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang menjangkau secara merata di seluruh kawasan • Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan public • Penyiapan keberlanjutan daya saing SDM masyarakat menuju kesejahteraan yang religious

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial • Reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam	mendukung perekonomian daerah • Restrukturisasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah khususnya membentuk Jabatan Fungsional. • Menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dari sisi potensi maupun regulasi	aparatur negara melalui *reward dan punishment.*	pengembangan karakter dan religiusitas masyarakat	masyarakat menuju kesejahteraan yang religious dan berkarakter.	dan berkarakter.

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Program pembangunan daerah juga menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Melalui program pembangunan daerah inilah dapat dilihat seperti apa nantinya visi dan misi daerah akan dijabarkan dalam program beserta pendanaannya secara berkelanjutan di tiap tahunnya.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Misi 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel																	
	Tujuan 1.1: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	**Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi**		**B=61**		**B=64**		**B=68**		**BB=71**		**BB=74**		**BB=78**		**BB=78**		**Inspektorat**
	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	**Nilai LPPD**	**Tinggi**	**Tinggi=3,0**		**Tinggi=3,05**		**Tinggi=3,10**		**Tinggi=3,15**		**Tinggi=3,20**		**Tinggi=3,25**		**Tinggi=3,25**		**Bag. Pemerintahan Setdakab**
	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya, akuntabilitas, dan profesionalitas	**Nilai SAKIP**	**B**	**B=60**		**BB=70**		**BB=73**		**BB=75**		**BB=78**		**BB=80**		**BB=80**		**Bag. Organisasi Setdakab**

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	penyelenggaraan pemerintahan di daerah																	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai SAKIP	B	B	18.516.448.950	B	18.586.574.748	B	18.679.807.121	BB	18.774.471.320	BB	18.870.624.617	BB	18.968.326.574	BB	112.396.253.332	Bag. Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian dan pembangunan	100 %	100 %	2.933.662.950	100 %	2.944.773.366	100 %	2.959.644.684	100 %	2.974.542.854	100 %	2.989.776.950	100%	3.005.256.409	100%	17.807.557.216	Bag. Perekonomian, Bag. Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Asahan
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan kinerja DPRD	95,65 %	100 %	11.524.668.557	100 %	11.397.548.428	100 %	11.465.426.095	100 %	11.467.426.095	100 %	11.467.426.095	100%	11.597.426.095	100%	58.505.166.306	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100 %	100 %	56.484.704.374	100 %	56.698.624.167	100 %	56.983.030.918	100 %	57.271.805.473	100 %	57.565.122.543	100%	57.863.163.824	100%	342.866.451.302	Bag. Organisasi, Bag. Protokol dan Bagian Perlengkapan dan Rumah

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
																		Tangga Setdakab Asahan
	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	**Cakupan penyelenggaraan urusan dan pembinaan kewilayahan yang ditangani**	100 %	100 %	7.841.119.997	100 %	9.237.256.723	100 %	10.215.973.633	100 %	11.171.153.767	100 %	11.934.161.350	100%	13.389.593.667	100%	66.472.053.371	Kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	100 %	100 %	755,977,403	100 %	606,394,321	100 %	603,348,967	100 %	633,451,425	100 %	653,414,286	100%	827,928,203	100%	4,080,514,605	Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kelompok Masyarakat yang dibina dengan baik di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	6,654,699,402	100 %	6,438,652,654	100 %	6,577,127,497	100 %	6,672,232,996	100 %	6,748,937,411	100%	6,852,247,074	100%	39,943,897,034	Kecamatan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	10,000,000	100 %	53,387,636	100 %	50,758,204	100 %	52,050,970	100 %	67,301,770	100%	69,097,196	100%	302,595,776	Kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100 %	100 %	411,666,681	100 %	424,901,478	100 %	442,534,104	100 %	456,362,392	100 %	460,663,174	100%	452,248,849	100%	2,648,376,678	Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	100 %	235,412,848	100 %	477,887,774	100 %	469,841,578	100 %	529,857,642	100 %	521,778,384	100%	554,808,800	100%	2,789,587,026	Kecamatan
	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya, akuntabilitas, dan profesionalit	**Level Maturitas SPIP**	**Level 3**	**Level 3=3,0**		**Level 3=3,1**		**Level 3=3,10**		**Level 3=3,15**		**Level 3=3,20**		**Level 3=3,25**		**Level 3=3,25**		**Inspektorat**

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	as penyelenggaraan pemerintahan di daerah																	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	0	75 %	3.671.228.625	80%	3.366.687.000	85%	3.628.327.750	90%	3.681.994.000	95%	3.683.854.000	100%	3.789.727.950	100%	26.535.819.325	Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki maturitas SPIP minimal level 3 dengan penjaminan kualitas		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		100%		Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)		90 %	338.426.250	90%	120.700.000	93%	121.301.500	95%	121.500.000	96%	122.107.500	100%	122.719.556	100%	946.754.806	Inspektorat

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase penilaian mandiri reformasi birokrasi Perangkat Daerah minimal B		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		100%		Inspektorat
	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	**Indeks Profesionalitas ASN**		**62**		**65**		**68**		**70**		**72**		**75**		**75**		**BKD**
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian	38,41 %	90,72%	2.853.149.567	92,53%	3.001.944.795	94,39 %	2.976.954.519	96,27 %	2.992.136.987	98,20%	3.007.396.886	100%	3.023.035.350	100%	17.854.618.105	BKD
		Persentase Kesesuaian Kompetensi Jabatan	75%	80 %		85%		90%		95%		100 %		100%		100%		Persentase Kesesuaian Kompetensi Jabatan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Tingkat Pelanggaran ASN yang ditindaklanjuti	91,67 %	91,67%		90,91%		90,00 %		88,89 %		87,50%		85,71%		85,71 %		
	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	**Cakupan standar kompetensi pegawai**	**64,80%**	**68,21 %**		**71,80%**		**73,95%**		**76,17%**		**78,46%**		**80,81 %**		**80,81 %**		BKD
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	4,75 %	5,11 %	3.274.609.525	5,17 %	3.412.500.000	5,70 %	3.429.562.500	5,77 %	3.447.053.268	6,17 %	3.464.633.240	6,61%	3.482.649.333	6,61%	20.511.007.867	BKD
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	**Cakupan pelayanan Smart City**		**44,44 %**		**55,56%**		**66,67%**		**77,78%**		**88,89%**		**100%**		**100%**		Dinas Kominfo
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Indeks Kategori PPID	60	60	5.557.649.876	70	4.154.447.558	80	2.827.258.887	85	3.410.742.625	90	2.775.483.452	100	3.038.926.849	100	21.764.509.246	Dinas Kominfo

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PUBLIK																	
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	**Indeks SPBE**	**1,93**	**1,95**		**1,97**		**1,99**		**2,01**		**2,03**		**2,05**		**2,05**		**Dinas Kominfo**
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	96.43 %	96.43%	3.098.683.081	96.43%	5.045.812.836	96.43 %	5.638.611.321	96.43 %	4.643.269.814	96.43%	5.041.651.524	100%	4.221.922.793	100%	27.689.951.368	Dinas Kominfo
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	**Tingkat keamanan informasi persandian daerah**	**0**	**-**		**22,7 %**		**36,3 %**		**45,4 %**		**54,5 %**		**68,1%**		**68,1 %**		**Dinas Kominfo**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	0	0	-	35,7 %	618.420.208	53,3 %	326.149.904	71,4 %	348.291.027	89,2 %	372.671.399	100 %	398.758.397	100 %	2.064.290.935	Dinas Kominfo

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	**Tingkat tertib admnistrasi kependudukan**	**56,69**	**61,50**		**66,25**		**71,00**		**75,80**		**80,55**		**84,90**		**84,90**		**Dinas DukCapil**
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk	71,41	71,45	595.950.375	71,50	607.328.500	71,55	632.328.500	71,60	635.328.500	71,65	655.328.500	71,70	655.328.500	71,70	3.781.592.875	Dinas DukCapil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Layanan Penerbitan Pencatatan Sipil	73,45	73,50	205.876.250	73,55	191.000.000	73,60	191.000.000	73,65	191.000.000	73,70	191.000.000	73,75	191.000.000	73,75	1.160.876.250	Dinas DukCapil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	0	3,23	125.000.000	6,45	315.000.000	9,68	320.000.000	12,90	320.000.000	16,13	320.000.000	19,35	320.000.000	19,35	1.720.000.000	Dinas DukCapil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan ketersediaan Profil Kependudukan tingkat kecamatan	0	20 %	35.000.000	40%	80.000.000	60%	80.000.000	80%	80.000.000	100 %	80.000.000	100%	80.000.000	100%	435.000.000	Dinas DukCapil

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	**Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku**	**61,54%**	**61,54 %**		**69,23%**		**76,92%**		**84,62%**		**92,31%**		**100 %**		**100%**	**-**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah	5,5%	5,5 %	144.618.830	16,5 %	335.000.000	37,4 %	435.340.576	58,3 %	439.932.726	79,1 %	444.588.348	100%	449.813.981	100%	2.249.294.461	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase autentisitas arsip statis yang ditetapkan	100 %	100 %	143.351.325	100 %	170.000.000	100 %	195.000.000	100 %	197.000.000	100 %	200.500.000	100%	202.000.000	100%	1.077.851.325	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	**Cakupan penyelesaian masalah pertanahan**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				**Dinas PKP**

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus Pertanahan yang di Mediasi		100 %	80.000.000	100 %	200.000.000	100 %	214.000.000	100 %	214.000.000	100 %	100.000.000	100%	107.000.000	100 %	915.000.000	Dinas PKP
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian ganti kerugian tanah		100 %	40.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100%	50.000.000	100 %	490.000.000	Dinas PKP
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan Tanah Aset Pemda yang Berserti fikat		17 %	580.000.000	33%	214.000.000	50%	228.980.000	67%	228.980.000	83%	231.746.130	100%	247.968.360	100 %	1.731.674.490	Dinas PKP
	Misi 2: Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah.																	

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Tujuan 2.1: Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	**Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer**																
	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	**Peningkatan Produktivitas potensi unggulan daerah sektor pertanian**	**-**	**1,63**		**1,65**		**1,67**		**1,69**		**1,71**		**1,73**		**1,73**		**Dinas Pertanian**
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	30%	100 %	1.318.591.954	100 %	1.197.499.563	100 %	1.446.374.541	100 %	1.517.048.268	100 %	1.591.368.031	100%	1.669.523.997	100%	8.740.406.356	Dinas Pertanian
		Persentase pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) unggul	18%	45 %		63%		63%		72%		72%		72%		72%		Dinas Pertanian

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		(%)																
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik	62%	66 %	15.748.922.668	71%	15.112.242.003	76%	14.536.638.380	81%	14.041.506.571	85%	14.465.624.279	85%	14.129.550,373	85%	88.034.484,276	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian	100 %	100 %	354.947.625	100 %	709.203.945	100 %	360.208.221	100 %	819.432.797	100 %	877.103.093	100%	938.460.309	100%	4.459.355.992	Dinas Pertanian
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan perkebunan yang mendapat nilai baik (%)	70%	70 %	-	80%	40.000.000	80%	45.000.000	85%	100.000.000	85%	55.000.000	85%	60.000.000	85%	300.000.000	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	50%	60 %	870.190.100	64%	1.009.750.000	69%	1.151.742.820	74%	1.141.434.084	79%	1.100.231.838	84%	1.413.144.750	84%	6.686.493.573	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	Persentase Pertumbuhan Produks	1%	1%	3.380.043.000	1%	1.737.544.187	1%	1.734.250.000	1%	1.976.292.500	1%	1.769.108.425	1%	2.027.228.509	1%	12.624.446.621	Dinas Peternakan dan Keswan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PERTANIAN	i Peternakan																
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, Embung, RPH, dll)	64%	68%	368.989.000	73%	622.678.890	78%	752.500.000	84%	713.074.871	90%	681.438.606	96%	624.440.305	96%	3.763.121.673	Dinas Peternakan dan Keswan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana peternakan	-	-		76%	40.000.000	81%	40.400.000	87%	40.804.000	93%	43.660.280	100%	46.716.499	100%	211.580.779	Dinas Peternakan dan Keswan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha peternakan	0	0	-	50%	80.000.000	54%	80.800.000	57%	81.608.000	61%	82.424.050	66%	83.248.320	66%	408.080.400	Dinas Peternakan dan Keswan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	0	0		5%	145.000.000	5%	146.450.000	6%	147.914.500	6%	149.393.645	7%	150.887.581	7%	739.645.726	Dinas Peternakan dan Keswan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN	Cakupan Pencegahan dan	74%	78%	978.757.925	82%	1.098.230.199	86%	1.191.700.625	90%	1.203.617.631	94%	1.215.653.807	99%	1.227.810.345	99%	6.915.77	Dinas Peternakan dan Keswan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VERTERINER	Penanggulangan Penyakit Ternak															0534	
	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	**Ketersediaan Pangan Utama**	**57.584 ton**	**76.693,20 ton**		**79.014,88 ton**		**79.805,03 ton**		**80.603,08 ton**		**81.409,11 ton**		**82.223,20 ton**		**82.223,20 ton**		**Dinas Ketahanan Pangan**
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	35,71%	35,71%	1.001.470.000	50%	980.000.000	64,29%	630.000.000	78,57%	552.085.131	92,86%	617.991.153	100%	514.730.534	100%	4.146.276.818	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Skore PPH Konsumsi	89,20	89,1	974.326.155	89,15	985.930.175	89,25	1.097.760.663	89,3	1.109.743.873	89,4	1.089.747.825	89,5	1.128.803.138	89,5	6.386.313.828	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan penanganan desa rawan	0	95,45%	262.000.250	90,91%	135.000.200	86,36%	175.000.000	81,82%	150.000.000	77,27%	180.000.000	72,73%	140.000.000	100	1.042.000.450	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		pangan																
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0	9,09 %	265.976.590	18,18%	263.050.000	18,18 %	208.046.983	18,18 %	222.810.272	18,18%	155.000.000	18,18%	164.910.454	100	1.279.794.299	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap (%)	3,51 %	3,54 %	4.942.272.939	3,57 %	4.925.783.850	3,60 %	4.625.731.189	3,63 %	4.650.000.000	3,66 %	4.670.000.000	3,69%	4.702.716.763	3,69%	28.516.504.742	Dinas Perikanan
		Cakupan bina kelompok nelayan	20%	20 %		20%		20%		20%		20%		20%		20%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya (%)	2,15 %	2,25 %	4.669.401.463	2,35 %	5.069.986.155	2,45 %	4.677.000.000	2,55 %	5.199.849.797	2,65 %	4.405.507.653	2,75%	4.805.000.000	2,75%	28.826.745.068	Dinas Perikanan
		Presentase pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil	20%	20 %		20%		20%		20%		20%		20%		20%		

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Presentase tanda daftar pembudi daya ikan kecil	20%	20 %		20%		20%		20%		20%		20%		20%		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya yang diawasi (%)	0	20 %	55.444.125	20%	45.000.000	20%	90.000.000	20%	90.000.000	20%	90.000.000	20%	90.000.000	20%	460.444.125	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang standar	0	20 %	540.928.997	20%	125.658.345	20%	153.000.000	20%	161.000.000	20%	159.000.000	20%	177.000.000	20%	1.316.587.342	Dinas Perikanan
	Tujuan 2.2: Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	**Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder (Jasa, Perdagangan,**																

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Industri)																
	Sasaran 2.2.1: Meningkatnya daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah	**Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung potensi unggulan daerah**		**3,93**		**4,16**		**4,35**		**4,52**		**4,69**		**4,77**		**4,77**		**Dinas Koperasi dan Perdagangan**
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi yang dilayani	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		100%		Dinas Koperasi dan Perdagangan
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi	0	100 %	59.999.950	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	45.000.000	100 %	50.000.000	100%	50.000.000	100%	304.999.950	Dinas Koperasi dan Perdagangan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam yang sehat	0	26,73%	50.000.000	27,86%	30.000.000	28,96%	30.000.000	30,03%	30.000.000	31,07%	30.000.000	32,07%	35.000.000	32,07%	205.000.000	Dinas Koperasi dan Perdagangan
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	14,42%	14,25%	169.999.935	16,43%	300.000.000	18,56%	300.000.000	20,64%	300.000.000	22,68%	300.000.000	24,66%	320.000.000	24,66%	1.689.999.935	Dinas Koperasi dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	64,90%	65,17%		65,44%		65,70%		65,96%		66,22%		66,47%		66,47%		Dinas Koperasi dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	0,589%	1,133%	194.999.975	1,161%	124.500.000	1,182%	125.000.000	1,197%	125.000.000	1,207%	135.000.000	1,213%	145.000.000	1,213%	849.499.975	Dinas Koperasi dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	0	0,023%	100.000.000	0,043%	400.000.000	0,063%	400.000.000	0,080%	400.000.000	0,095%	400.000.000	0,109%	400.000.000	0,109%	2.100.000.000	Dinas Koperasi dan Perdagangan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Sasaran 2.2.1: Meningkatnya daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah	**Pertumbuhan Sector Perdagangan dalam PDRB**		**1,90**		**2,1**		**2,3**		**2,5**		**2,7**		**2,9**		**2,9**		**Dinas Koperasi dan Perdagangan**
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik	32,26	32,26	1.252.567.168	32,26	1.479.548.354	32,26	1.479.814.590	32,26	1.481.226.573	32,26	1.585.262.380	32,26	1.588.413.715	32,26	8.866.832.783	Dinas Koperasi dan Perdagangan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	27,81 %	27,81%	59.985.750	27,81%	55.000.000	27,81 %	55.000.000	27,81 %	60.000.000	27,81%	70.000.000	27,81%	80.000.000	27,81 %	379.985.750	Dinas Koperasi dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk Ekspor Unggulan	100 %	100 %	307.496.525	100 %	225.000.000	100 %	275.000.000	100 %	275.000.000	100 %	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.682.496.525	Dinas Koperasi dan Perdagangan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	Persentase Pelaku Usaha yang	100 %	100 %	179.999.788	100 %	170.000.000	100 %	190.000.000	100 %	195.000.000	100 %	210.000.000	100%	210.000.000	100%	1.154.999.788	Dinas Koperasi dan Perdagangan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	KONSUMEN	memenuhi Uji Metrologi Legal																
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Fasilitasi Pemasaran Produk Lokal	100 %	100 %	649.910.000	100 %	400.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100%	350.000.000	100%	2.299.910.000	Dinas Koperasi dan Perdagangan
	Sasaran 2.2.1: Meningkatnya daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah	**Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB**		**4,08**		**4,11**		**4,14**		**4,18**		**5,07**		**5,10**		**5,10**		**Dinas Koperasi dan Perdagangan**
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri baru	0,0103	0,0127 %	3.233.493.679	0,0150%	3.021.398.531	0,0172%	1.100.000.000	0,0192%	800.000.000	0,0212%	800.000.000	0,0230 %	800.000.000	0,0230%	9.754.892.210	Dinas Koperasi dan Perdagangan
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase perizinan usaha industri	0	100 %	99.978.000	0%	0	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100%	50.000.000	100%	299.978.000	Dinas Koperasi dan Perdagangan
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	0	21 %	74.947.000	21%	100.000.000	21%	50.000.000	21%	50.000.000	21%	50.000.000	21%	50.000.000	21%	374.947.000	Dinas Koperasi dan Perdagangan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Sasaran 2.2.1: Meningkatnya daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**		**30 %**		**35%**		**40%**		**45%**		**50%**		**55%**		**55%**		**Dinas Ketenagakerjaan**
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan perencanaan ketenagakerjaan	0	0	-	-	-	-	-	100 %	155.000.000	-	-	-	-	100%	155.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	0,80 %	0,80 %	250.000.050	0,81 %	250.000.000	0,82 %	1.394.127.033	0,83 %	1.337.774.643	0,84 %	1.424.337.143	0,85%	1.431.227.768	0,85%	6.087.466.638	Dinas Ketenagakerjaan
	PROGRAM PENEMPATAN KERJA	Persentase layanan penempatan tenaga kerja	0,22 %	0,22 %	289.909.714	0,23 %	753.243.525	0,26 %	996.243.525	0,27 %	996.243.525	0,30 %	996.243.525	0,33%	996.243.525	0,33%	5.028.127.339	Dinas Ketenagakerjaan
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana	50%	50 %	400.771.625	50%	304.036.339	50%	775.096.188	50%	787.595.188	50%	801.346.188	50%	816.471.188	50%	3.995.317.716	Dinas Ketenagakerjaan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		hubungan industrial																
	Sasaran 2.2.2: Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah	**Potensi daya Tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (kelompok sadar wisata) yang direalisasikan**		**5 Pokdarwis**		**6 Pokdarwis**		**7 Pokdarwis**		**8 Pokdarwis**		**9 Pokdarwis**		**10 Pokdarwis**		**10 Pokdarwis**		**Dispora**
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata yang ditetapkan	-	4,76 %	411.632.000	14,28%	728.084.375	28,57 %	735.368.330	47,62 %	1.060.000.000	71,43%	875.490.597	100%	905.000.000	100%	4.715.575.302	Dispora
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	16,67	16,67%	0	33,33%	0	50%	95.000.000	66,67 %	95.000.000	83,33%	95.000.000	100%	85.000.000	100%	370.000.000	Dispora

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain/Pihak Ketiga.																
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekraf yang aktif	-	16,67%	0	33,33%	0	50%	70.000.000	66,67%	255.000.000	83,33%	260.000.000	100%	239.975.595	100%	824.975.595	Dispora
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	10 %	0	20%	249.907.500	40%	340.000.000	60%	430.000.000	80%	345.000.000	100%	395.000.000	100%	2.140.000.000	Dispora
	Sasaran 2.2.2: Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan	**Cakupan event budaya skala kabupaten**	**33,33 %**	**33,33 %**		**66,67 %**		**66,67 %**		**66,67 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Pendidikan**

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	pengembangan wisata daerah																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan kelompok budaya yang dibina	100 %	100 %	74.969.591	100 %	6.100.000.000	100 %	5.850.000.000	100 %	6.100.000.000	100 %	5.850.000.000	100 %	5.850.000.000	100%	29.824.969.591	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	36,84 %	39,47%	325.099.517	42,11%	100.000.000	45,61 %	100.000.000	48,25 %	100.000.000	50,00%	100.000.000	52,63%	100.000.000	52,63 %	825.099.517	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan	100 %	100 %	-	100 %	150.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.550.000.000	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	70,83 %	0 %	-	75,00%	350.000.000	75,00 %	400.000.000	79,17 %	400.000.000	83,33%	400.000.000	87,50%	400.000.000	87,50 %	1.950.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		dilestarikan																
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkat kunjungan museum	11,97 %	0%	-	24,68 %	425.000.000	24,90 %	925.000.000	25,60 %	925.000.000	25,95%	425.000.000	26,50%	425.000.000	26,50 %	3.125.000.000	Dinas Pendidikan
	Misi 3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi																	
	Tujuan 3.1: Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	**Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**		**0,6491**		**0,6527**		**0,6563**		**0,6599**		**0,6635**		**0,6671**		**0,6671**		**Dinas PMD**
	Sasaran 3.1.1: Meningkatnya kemandirian masyarakat	**Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM**		**1,69%**		**1,69 %**		**2,26 %**		**2,82 %**		**3,39 %**		**3,95%**		**3,95 %**		**Dinas PMD**

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat tertib penyelenggaraan penataan desa	0%	0%	119.999.000	21,43%	50.000.125	42,86%	450.000.000	64,29%	150.000.000	85,71%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	1.069.999.125	Dinas PMD
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	0	4,35%	-	17,39%	50.000.000	34,78%	180.000.000	52,17%	150.000.000	78,26%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	880.000.000	Dinas PMD
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	56,50%	75,14%	3.928.925.850	80,23%	5.525.878.732	84,75%	4.850.000.000	89,83%	5.300.000.000	94,92%	4.800.000.000	100%	5.630.000.000	100%	30.034.804.582	Dinas PMD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	60,42%	63,44%	8.484.142.708	69,49%	7.163.339.266	77,04%	7.315.436.789	81,57%	7.268.829.293	90,27%	7.249.352.318	92,08%	6.684.009.746	92,08%	44.165.110.120	Dinas PMD

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Misi 4: Menciptakan Iklim Yang Kondusif Dan Kemudahan Investisi Bagi Pengembangan Usaha Dalam Menciptakan Lapangan Kerja																	
	Tujuan 4.1: Meningkatkan daya saing investasi daerah	**Pertumbuhan nilai investasi daerah**	**- 13 %**	**0,3 %**		**0,6 %**		**1 %**		**1,5%**		**2%**		**2,5**		**2,5%**		**Dinas PM PPTSP**
	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya investasi daerah	**Realisasi Investasi PMA (Juta US $)**		**201,4**		**202,6**		**204,7**		**207,7**		**211,9**		**217,2**		**217,2**		**Dinas PM PPTSP**
	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya investasi daerah	**Realisasi Investasi PMDN (Triliyun**		**10,7**		**10,8**		**10,9**		**11,1**		**11,3**		**11,6**		**11,6**		**Dinas PM PPTSP**

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
		Rupiah)		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang diberikan insentif / kemudahan penanaman modal	0	0 %	22.534.250	100 %	88.548.438	100,00%	139.433.921	100,00%	190.328.259	100,00%	91.231.540	100%	92.143.854	100%	624.220.262	Dinas PM PPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi penanaman modal daerah	0	0	0	20%	69.682.000	40%	70.378.820	60%	71.082.607	80%	71.793.432	100%	72.511.365	100%	355.448.224	Dinas PM PPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	100 %	100 %	383.420.225	100 %	472.486.451	100 %	460.117.400	100 %	464.718.573	100 %	408.014.495	100%	503.794.638	100%	2.692.551.782	Dinas PM PPTSP

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	4%	4%	455.101.250	4,5%	172.873.000	5%	174.601.730	5,5%	176.347.747	6%	178.111.223	6,5%	179.892.334	6,5%	1.336.927.284	Dinas PM PPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 %	100 %	86.561.550	100 %	110.071.550	100 %	111.172.265	100 %	112.283.987	100 %	85.000.000	100%	121.172.265	100%	626.261.617	Dinas PM PPTSP
	Misi 5: Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat																	

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Tujuan 5.1: Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	**0**	**79,32**		**79,42**		**79,52**		**79,62**		**79,72**		**79,82**		**79,82**		
	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	**Opini BPK**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**BPKAD**
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat tertib penyusunan anggaran daerah	100 %	100,00 %	279.425.387.610	100,00%	280.036.466.712	100,00%	280.778.036.823	100,00%	281.491.963.990	100 %	282.175.642.422	100,00 %	282.826.257.094	100,00%	1.686.733.754.653	BPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat tertib administrasi barang milik daerah	100 %	100,00 %	1.175.090.445	100,00%	1.257.346.776	100,00%	1.345.361.050	100,00%	1.439.536.324	100,00%	1.540.303.866	100,00 %	1.648.125.137	100,00%	8.405.763.599	BPKAD
	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	**Pertumbuhan Pendapatan Daerah**		**5%**		**5%**		**5%**		**5%**		**5%**		**5%**		**5%**		**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pajak daerah dan retribusi daerah	58,11 %	80 %	1.462.366.725	80%	1.212.633.300	85%	1.359.000.000	90%	1.381.005.000	95%	1.404.071.550	100%	1.428.299.000	100%	8.247.375.575	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat tertib penyusunan anggaran daerah	100 %	100,00 %	39.999 725	100,00%	43.303.475	100,00%	45.000.000	100,00%	48.000.000	100 %	51.000.000	100,00 %	54.000.000	100,00%	281.303.200	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**
	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	**Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang telah masuk dalam RKPD**	**25%**	**25 %**		**30,00%**		**35,00%**		**40,00%**		**45%**		**50,00 %**		**50,00 %**		**BAPPEDA**
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	100 %	100,00 %	1.726.686.76	100,00%	1.726.483.055	100,00%	1.137.667.498	100,00%	1.137.667.498	100,00%	1.200.557.502	100,00 %	1.356.435.666	100%	7.188.522.192	BAPPEDA

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah	100 %	100 %	2.149.251.075	100 %	1.764.193.600	100 %	1.960.193.960	100 %	1.907.065.456	100 %	1.938.112.677	100%	1.936.881.004	100%	11.655.697.773	BAPPEDA
	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	**Indeks Inovasi Daerah**	**48**	**48**		**51**		**55**		**60**		**65**		**70**		**70**		**BAPPEDA**
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang telah diimplementasikan	0	50 %	565.597.250	60%	1.190.821.153	65%	1.131.169.078	70%	1.237.245.000	75%	1.137.245.000	80%	937.245.000	80%	6.199.322.482	BAPPEDA
	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	**Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan**	**-**	**51,6%**	65.255.000	**58,3%**	290.000.000	**66,6%**	310.300.000	**83,3%**	332.021.000	**100%**	355.262.470	**100%**	380.130.843	**100%**	1.732.969.313	Dinas Kominfo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan Statistik Sektoral di	Tidak ada	ada	65.255.000	ada	290.000.000	ada	310.300.000	ada	332.021.000	ada	355.262.470	ada	380.130.843	ada	1.732.969.313	Dinas Kominfo

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		lingkup Daerah																
	Misi 6: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Menumbuhkan Partispasi Masyarakat Dalam Memelihara Kesehatan																	
	Tujuan 6.1: Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	**Indeks Kesehatan**	**0**	**77,88**		**77,98**		**78,08**		**78,18**		**78,28**		**78,38**		**78,38**		
	Sasaran 6.1.1: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan mayarakat	**Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup**		**125**		**116**		**108**		**100**		**91**		**83**		**83**		**Dinas Kesehatan**

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Sasaran 6.1.1: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan mayarakat	**Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**Dinas Kesehatan**
	Sasaran 6.1.1: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan mayarakat	**Angka Stunting**		**28 %**		**27%**		**26%**		**24%**		**22%**		**20%**		**20%**		**Dinas Kesehatan**
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang memenuhi Sarana, Prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	33%	43 %	48.661.319.264	53%	93.298.491.214	63%	98.740.678.804	73%	104.393.516.833	83%	110.419.827.184	100%	116.793.626.592	100%	572.307.459.891	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas terakreditasi	73%	73 %		83%		90%		97%		100 %		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dan RS yang terinteg	0	0		10%		27%		41%		56%		73%		73%		Dinas Kesehatan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		rasi pelayanan kegawatdaruratannya dengan NCC / PSC 119																
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar	20,69 %	33,33%	381.425.832	46%	1.399.500.000	56%	2.189.475.000	66%	2.298.948.750	76%	2.413.896.188	83%	2.534.590.997	83%	11.217.836.766	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase cakupan pelaksanaan PIS-PK dengan intervensi keluarga oleh Puskesmas	20%	30 %	777.090.600	50%	1.381.485.911	70%	1.478.189.925	90%	1.581.663.220	100 %	1.692.379.645	100%	1.810.846.220	100%	8.721.655.520	Dinas Kesehatan
		Persentase Kecamatan yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyara	0	8%		12%		16%		16%		16%		16%		16%		Dinas Kesehatan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		kat Hidup Sehat sebesar 50%																
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan sesuai ketentuan	100 %	100 %	219.942.000	100 %	282.533.765	100 %	332.311.129	100 %	238.976.508	100 %	255.064.863	100%	272.125.023	100%	1.600.953.288	Dinas Kesehatan
		Persentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		100%		Dinas Kesehatan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		bersertifikat P-IRT																
	Sasaran 6.1.1: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan mayarakat	**Akreditasi Layanan Rumah Sakit**	**Tingkat Perdana**	**Tingkat Perdana**		**Tingkat Perdana**		**Tingkat Madya**		**Tingkat Madya**		**Tingkat Madya**		**Tingkat Utama**		**Tingkat Utama**		**RSUD HAMS**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Rumah Sakit	100 %	100 %	64.917.576.173	100 %	67.375.210.038	100 %	63.088.288.193	100 %	65.086.635.205	100 %	64.690.461.826	100%	65.799.987.235	100%	390.958.158.671	RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARKAT	Tingkat Pelayanan Rujukan tingkat daerah	100 %	100 %	3.219.583.700	100 %	1.020.000.000	100 %	5.650.000.000	100 %	4.000.000.000	100 %	4.750.000.000	100%	4.000.000.000	100%	22.639.583.700	RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran
		Cakupan layanan kesehatan berbasis sistem informasi	0	0		50%		100 %		100 %		100 %		100%		100%		RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Misi 7: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi																	
	Tujuan 7.1: Meningkatkan pendidikan yang unggul dan berkualitas serta peran generasi muda	**Indeks Pendidikan**	**0**	**79,50**		**79,60**		**79,70**		**79,80**		**79,90**		**80,00**		**80,00**		
	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas dan Manajemen Pendidikan dan peran generasi muda dalam pembangunan	**APK PAUD**	**69,85**	**69,90**		**70,00**		**70,02**		**70,07**		**70,12**		**70,15**		**70,15**		**Dinas Pendidikan**

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas dan Manajemen Pendidikan dan peran generasi muda dalam pembangunan	APM SD	99,57	99,67		99,68		99,69		99,70		99,71		99,72		99,72		Dinas Pendidikan
	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas dan Manajemen Pendidikan dan peran generasi muda dalam pembangunan	APM SMP	75,18	82,82		82,89		82,95		82,98		83,26		83,40		83,40		Dinas Pendidikan
	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas dan Manajemen Pendidikan dan peran generasi muda dalam pembangunan	Persentase SMP yang memiliki ruang baca digital	35%	36,50 %		41%		45,50%		51%		55,50%		60%		60%		Dinas Pendidikan
	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas dan Manajemen Pendidikan dan peran generasi	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	9,21	9,23		9,25		9,27		9,29		9,32		9,35		9,35		Dinas Pendidikan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	muda dalam pembangunan																	
	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas dan Manajemen Pendidikan dan peran generasi muda dalam pembangunan	**Pendidikan Dasar Terakreditasi minimal B**		**76,92**		**76,98**		**77,16**		**77,56**		**77,80**		**78,25**		**78,25**		
	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas dan Manajemen Pendidikan dan peran generasi muda dalam pembangunan	**Rata-rata Nilai Assesment Siswa**		**83,72**		**83,95**		**84,35**		**84,55**		**84,84**		**85,12**		**85,12**		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	99,66	99,67	132.346.481.778	99,68	121.093.765.727	99,69	118.801.848.041	99,70	123.340.756.788	99,71	128.702.848.500	99,72	130.328.539.529	99,72	754.614.240.365	Dinas Pendidikan
		APM SMP	82,78	82,82		82,89		82,95		82,98		83,26		83,40		83,40		Dinas Pendidikan
		APK PAUD	69,85	69,90		70,00		70,02		70,07		70,12		70,15		75,32		Dinas Pendidikan
		Cakupan pelayanan pendidi	98,20	98,22		98,50		98,60		98,65		98,70		98,90		98,90		Dinas Pendidikan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		kan Nonformal/kesetaraan																
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase penerapan muatan lokal di sekolah	72,00	75,00	-	77,00	40.000.000	79,00	40.000.000	81,00	40.000.000	83,00	40.000.000	85,00	40.000.000	85,00	200.000.000	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap murid	768,39	768,40	1.211.748.971	768,41	70.000.000	768,45	70.000.000	768,50	70.000.000	768,51	70.000.000	768,52	70.000.000	768,52	1.561.746.971	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100	100	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan pengembangan dan perlindungan literasi bahasa/ sastra Daerah (lokal)	78,13	78,25	-	78,40	50.000.000	78,73	50.000.000	78,95	50.000.000	79,60	50.000.000	79,90	50.000.000	79,90	250.000.000	Dinas Pendidikan
	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas dan Manajemen Pendidikan dan peran generasi muda dalam pembangunan	**Persentase masyarakat yang melakukan kunjungan ke perpustakaan**	**1,76 %**	**3,5 %**		**4%**		**4,5%**		**5%**		**5,5%**		**6%**		**6%**		**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpusatakaan yang terkelola dengan baik	40%	45 %	1.229.685.530	50%	1.144.476.683	55%	952.000.000	60%	962.300.000	65%	973.000.000	70%	980.000.000	70%	6.241.462.213	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Budaya Eetnis Nusantara yang dilestarikan	0	28,5 %	49.185.500	42,8 %	50.000.000	57,1 %	55.010.863	71,4 %	56.099.088	85,7 %	57.632.521	100%	60.720.969	100%	328.648.941	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas dan Manajemen Pendidikan dan peran generasi muda dalam pembangunan	**Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai**		**50 %**		**60%**		**65%**		**70%**		**75%**		**80%**		**80%**		**Disporapar**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berprestasi	-	13,67%	1.427.599.090	13,83%	865.882.116	14,44%	1.600.000.000	15,11%	1.330.000.000	15,22%	1.330.000.000	15,48%	1.635.000.000	15,48%	8.188.481.206	Disporapar
		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif.	27,5	34,78%		39,13%		46,38%		60,87%		79,11%		100%		100%		Disporapar
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Tingkat Prestasi event olahraga	-	50 %	8.515.750.000	60%	8.449.225.440	65%	6.936.493.114	70%	6.705.000.000	75%	6.910.000.000	80%	6.795.000.000	80%	44.701.468.554	Disporapar
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	65%	65 %	395.000.000	67%	360.000.000	69%	320.000.000	71%	430.000.000	73%	590.000.000	75%	390.000.000	75%	3.845.000.000	Disporapar

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Misi 8: Mendorong Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat																	
	Tujuan 8.1: Meningkatkan kodusivitas daerah	**Angka Kriminalitas**		**18,8**		**18.79**		**18,76**		**18,74**		**18,73**		**18,71**		**18,71**		**Satpol PP**
	Sasaran 8.1.1: Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di masyarakat	**Cakupan Penyelesaian Penanganan Gangguan Trantibum Daerah**	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**		**Satpol PP**
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan, Ketentraman, ketertiban dan Kenyamanan yang ditangani	100 %	100 %	798.102.340	100 %	449.000.000	100 %	449.000.000	100 %	449.000.003	100 %	449.000.005	100%	449.000.007	100%	3.492.102.362	Satpol PP

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota yang tertangani	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		100%		
		Rasio PPNS terhadap kasus yang ditangani	0,16	0,06		0,037		0,04		0,04		0,04		0,05		0,05		
	Sasaran 8.1.1: Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di masyarakat	**Indeks Risiko Bencana**	**167**	**166,99**		**166,98**		**166,97**		**166,96**		**166,95**		**166,94**		**166,94**		**BPBD**
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat Penanganan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	81.738.000	100 %	118.000.000	100 %	118.000.000	100 %	118.000.000	100 %	118.000.000	100%	118.000.000	100%	671.738.000	BPBD

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase desa tangguh bencana	16,13 %	16,13%		20,38%		25,38 %		30,38 %		35,38%		45,38%		45,38 %		BPBD
		Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		100%		BPBD
		Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana	0	2,83 %		2,83 %		2,83 %		2,83 %		2,83 %		2,83%		14,15 %		BPBD
	Sasaran 8.1.1: Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di masyarakat	**Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100%**		**100%**		**Satpol PP**
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT	Cakupan layanan pemadam kebakaran	100 %	100 %	972.776.075	100 %	1.586.339.565	100 %	1.586.339.565	100 %	1.586.339.565	100 %	1.586.339.565	100%	1.586.339.565	100%	8.904.473.900	Satpol PP

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	AN NON KEBAKARAN																	
		Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran dalam kondisi baik		85 %		88%		91%		93%		96%		98%		98%		Satpol PP
		Cakupan investigasi kejadian kebakaran		0		10%		20%		40%		60%		80%		80%		Satpol PP
		Persentse relawan pemadam kebakaran di tingkat desa		0		20%		39%		59%		78%		100%		100%		Satpol PP
		Persentase sarana dan prasarana pencarian dan		0		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		100%		Satpol PP

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		pertolongan kondisi membahayakan yang dalam kondisi baik																
	Misi 9: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berorientasi mendukung Produktivitas dan Pengembangan Kawasan Strategis																	
	Tujuan 9.1: Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	**Indeks Infrastruktur Wilayah**	**0**	**68,16**		**68,30**		**68,50**		**68,70**		**69,00**		**69,20**		**69,20**		**PUPR**
	Sasaran 9.1.1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	**Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik**	**28,44%**	**30 %**		**33%**		**36,5 %**		**40,5 %**		**45%**		**50%**		**50%**		**PUPR**

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Program Penyelenggara Jalan	Cakupan infrastruktur jalan di kabupaten	100 %	100 %	75.317.384.095	100 %	77.099.199.119	100 %	84.900.000.000	100 %	85.800.000.000	100 %	86.000.000.000	100%	86.700.000.000	100%	495.726.583.214	PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	0%	-	2%	99.999.247	4%	200.000.000	6%	200.000.000	8%	200.000.000	10%	200.000.000	10%	899.999.247	PUPR
	Sasaran 9.1.1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**	**77,47%**	**79 %**		**80%**		**81 %**		**82 %**		**83%**		**84%**		**84%**		**PUPR**
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik	77,47 %	79 %	8.122.337.357	80%	4.742.997.563	81%	4.828.200.000	82%	4.830.000.000	83%	4.890.000.000	84%	5.000.000.000	84%	32.413534.920	PUPR
	Sasaran 9.1.1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	**Tingkat pemanfaatan informasi tata**		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		100%		PUPR

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	yang baik	**ruang dalam pembangunan**																
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat pengendalian tata ruang daerah	0	16,67%	649.993.150	16,67	629.999.500	16,67	2.400.000.000	16,67	2.500.000.000	16,67	2.500.000.000	16,67	2.250.000.000	100%	10.929.992.650	PUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Rekomendasi IMB/Persetujuan bangunan gedung (PBG) sesuai SOP	0	16,67%	12.389.999.109	16,67%	30.309.494.620	16,67%	21.935.160.817	16,67%	21.861.369.186	16,67%	21.946.321.252	16,67%	22.045.662.990	100%	130.488.007.974	PUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan	0	50	2.089.997.010	0%	-	4%	750.000.000	8%	750.000.000	16%	750.000.000	20%	750.000.000	20%	5.089.997.010	PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHA	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam	0	0%	-	0%	-	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	3.600.000.000	PUPR

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	N REGIONAL	kondisi Baik																
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pelayanan SPALD yang aman	94,81%	0%	-	94,90%	970.050.456	94,96%	994.550.456	95,02%	528.453.988	95,07%	537.445.767	95,13%	540.000.000	95,13%	3.570.500.667	PUPR
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terlaksananya proses inventarisasi dan verifikasi Tanah Objek reforma agraria		0	0	20%	100.000.000	40%	100.000.000	60%	100.000.000	80%	70.000.000	100%	100.000.000	100%	470.000.000	PUPR
	Sasaran 9.1.1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	**Persentase drainase kota dengan kondisi baik**	**85,12%**	**90%**		**92%**		**94%**		**96%**		**98%**		**100%**		**100%**		PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kota dengan kondisi baik	0	90%	11.707.283.900	92%	6.657.390.531	94%	6.912.911.546	96%	6.925.000.000	98%	6.950.000.000	100%	6.470.000.000	100%	45.622.585.977	PUPR
	Sasaran 9.1.1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	**Tingkat pemanfaatan informasi tata ruang**		**40,20%**		**40,58%**		**40,96%**		**41,33%**		**41,71%**		**42,09%**		**42,09%**		PUPR

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		dalam pembangunan																
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Mendapatkan Akses Air melalui SPAM	38,86 %	0%	-	40,58%	5.250.000.000	40,96 %	4.143.750.000	41,33 %	4.175.000.000	41,71%	4.175.000.000	42,09%	4.135.000.000	42,09 %	21.878.750.000	PUPR
	Sasaran 9.1.1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	**Persentase Rumah Layak Huni**		**93,19 %**		**93,33%**		**93,46%**		**93,59%**		**93,72%**		**93,83 %**		**93,83 %**		**Dinas PKP**
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	0	248.750.000	100 %	1.870.250.000	100 %	1.972.467.500	100 %	1.871.840.255	100 %	1.885.043.000	100%	1.922.746.010	100%	9.771.096.735	Dinas PKP
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU perumahan yang telah diserahkan ke	0	0	0	80%	3.250.000.000	80%	3.477.500.000	80%	3.648.931.118	80%	3.631.431.138	80%	3.885.631.296	80%	17.893.493.532	Dinas PKP

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pemda dalam kondisi baik																
	Sasaran 9.1.1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	**Persentase kawasan kumuh**		**-**		**1,52 %**		**3,03 %**		**4,55 %**		**6,07 %**		**7,59%**		**7,59 %**		Dinas PKP
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tertangani di kawasan kumuh	0	12,60%	925.061.000	31,68%	22.046.228.181	50,76%	21.898.515.040	69,85%	21.906.005.040	88,93%	22.491.515.040	100%	22.157.382.017	100%	111.424.706.319	Dinas PKP
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan perbaikan rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	0	0,81	640.000.000	1,81	2.100.000.000	2,80	2.100.000.000	3,79	2.100.000.000	4,79	2.100.000.000	5,78	2.100.000.000	5,78	11.140.000.000	Dinas PKP

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Sasaran 9.1.1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	**Cakupan aksesibilitas antar wilayah**	**35%**	**35,50 %**		**36%**		**36,50%**		**37%**		**37,50%**		**38%**		**38%**		**Dinas Perhubungan**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0,003897 %	0,00455 0%	2.834.711.294	0,00520 %	3.034.282.900	0,00584%	2.840.000.000	0,00649%	3.070.000.000	0,00714 %	3.150.000.000	0,00779%	3.130.000.000	0,00779%	18.058.994.194	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase tahapan pengelolaan pelayaran	0	15 %	559.620.237	50%	365.518.239	75%	545.095.140	100 %	346.027.198	100 %	312.760.434	100%	310.326.894	100%	2.439.348.145	Dinas Perhubungan
	Misi 10: Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas, Berkelanjutan Dan Bernilai Ekonomis																	
	Tujuan 10.1: Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**0**	**62,66**		**63,28**		**63,90**		**64,52**		**65,14**		**65,76**		**65,76**		
	Sasaran 10.1.1: Meningkatnya kualitas air,	**Indeks Air**	**0**	**52,60**		**52,70**		**52,80**		**52,90**		**53,00**		**53,10**				**Dinas Lingkungan Hidup**

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup																	
	Sasaran 10.1.1: Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup	Indeks Udara	0	87,23		87,33		87,43		87,53		87,63		87,73		87,73		Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran 10.1.1: Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lahan	0	34,49		36,97		39,45		41,93		44,41		46,89		46,89		Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran 10.1.1: Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup	Persentase RTH		39,74 %		40%		40%		40%		40%		40%		40%		Dinas Lingkungan Hidup

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi hasil kajian yang ditindaklanjuti	0	100 %	-	100 %	150.000.000	100 %	123.000.000	100 %	424.000.000	100 %	320.000.000	100%	-	100%	1.570.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	10%	10 %	3.266.538.854	10%	2.018.814.570	10%	1.699.734.562	10%	1.712.511.990	10%	1.802.772.700	10%	1.828.601.955	10%	12.328.974.631	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	0	30 %	-	30%	1.298.118.600	30%	2.175.070.000	30%	2.095.924.900	30%	2.110.345.500	30%	2.162.750.500	30%	9.842.209.500	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	Persentase pengelolaan B3 yang diawasi	45%	45 %	-	45%	155.786.800	48%	161.540.300	51%	163.500.000	54%	164.300.000	57%	164.750.000	57%	809.787.100	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	BERACUN (LIMBAH B3)																	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	35%	35 %	26.224.900	50%	80.257.800	60%	82.963.430	70%	86.316.500	80%	87.651.280	90%	89.151.250	90%	452.565.160	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase SDM Bidang lingkungan yang kompeten	57%	57 %	120.111.000	61%	198.621.450	66%	206.116.505	71%	213.002.000	76%	214.851.050	80%	217.301.400	80%	1.170.003.605	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun	0	1 Event	57.876.535	1 Event	48.300.700	1 Event	50.750.300	1 Event	51.650.500	1 Event	52.150.750	1 Event	52.870.000	6 Event	313.598.785	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan	100 %	100 %	35.511.900	100 %	31.350.930	100 %	32.991.628	100 %	35.160.950	100 %	36.771.100	100%	38.891.500	100%	210.678.008	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	40%	40 %	5.741.173.737	52%	652.768.426	64%	914.922.550	76%	834.542.639	88%	978.763.209	100%	1.024.542.000	100%	35.810.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Tingkat pengawasan pengelolaan sampah oleh pihak swasta	0	0		0		30%		32%		34%		36%		36%		Dinas Lingkungan Hidup

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Misi 11: Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong.																	
	Tujuan 11.1: Meningkatkan kehidupan harmoni intern dan antar masyarakat dan umat beragama	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan**	**0**	**60,84**		**62,20**		**62,80**		**68,10**		**66,40**		**67,48**		**67,48**		**Badan Kesbangpol**
	Sasaran 11.1.1: Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	**Cakupan ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**	**0**	**33 %**		**42%**		**49%**		**55%**		**60%**		**65%**		**65%**		**Badan Kesbangpol**

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	33,55 %	100 %	2.006.765.550	100 %	243.875.915	100 %	245.095.296	100 %	246.320.771	100 %	247.552.376	100%	248.790.136	100%	3.238.400	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang difasilitasi	100 %	100 %	1.450.685.000	100 %	8.290.922.446	100 %	8.332.694.026	100 %	8.375.173.522	100 %	8.418.701.779	100 %	8.463.221.295	100 %	43.341.296.059	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Ormas	47,35 %	100 %	632.768.145	100 %	58.452.080	100 %	58.744.320	100 %	59.038.041	100 %	69.333.232	100 %	59.629.898	100 %	927.959.698	Badan Kesbangpol
	Sasaran 11.1.1: Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan	**Jumlah Konflik SARA bernuansa agama**	**0%**	**0%**		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**				Badan Kesbangpol

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	wawasan kebangsaan																	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	26,05 %	100 %	3.171.354.350	100 %	218.157.025	100 %	219.257.860	100 %	220.354.149	100 %	221.455.920	100 %	222.563.199	100 %	4.273.152.504	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial terselesaikan	54,96 %	100 %	1.936.454.250	100 %	815.016.520	100 %	819.090.598	100 %	823.186.050	100 %	827.301.981	100 %	831.438.490	100 %	6.052.486.890	Badan Kesbangpol

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Misi 12: Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumberdaya manusia.																	
	Tujuan 12.1:Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	**Persentase Keluarga Sejahtera**		**63,36 %**		**63,56%**		**63,76%**		**63,96%**		**64,16%**		**64,36 %**		**64,36 %**		
	Sasaran 12.1.1: Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	**Persentase PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya**		**0,4 %**		**0,4%**		**0,4%**		**0,4%**		**0,4%**		**0,4%**		**0,4%**		**Dinas Sosial**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fasilitasi KAT dan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan	36,23 %	100 %	985.294.725	100 %	819.782.136	100 %	819.782.136	100 %	839.782.136	100 %	839.782.136	100%	839.782.136	100%	5.144.205.405	Dinas Sosial

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Sosial																
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	100 %	0	100 %	36.064.350	100 %	36.064.350	100 %	36.064.350	100 %	36.064.350	100%	36.064.350	100%	180.321.750	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan rehabilitasi sosial	23,47 %	100 %	12.678.517.371	100 %	3.885.965.293	100 %	3.885.965.293	100 %	3.885.965.293	100 %	3.895.965.293	100%	3.895.965.293	100%	32.128.343.836	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	54,98 %	57,98%	296.374.550	60,98%	11.446.775.356	63,98 %	11.446.775.356	66,98 %	11.446.775.356	69,98%	11.446.795.512	72,98%	11.560.492.418	72,98 %	57.643.990.547	Dinas Sosial

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %	854.735.460	100 %	726.998.789	100 %	726.998.789	100 %	726.998.789	100 %	741.998.789	100%	741.998.789	100%	4.519.729.405	Dinas Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	58%	65 %	167.356.293	72%	342.993.781	79%	342.993.781	86%	342.993.781	93%	347.993.781	100%	347.993.781	100%	1.892.325.198	Dinas Sosial
	Sasaran 12.1.1: Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	**Partisipasi angkatan kerja perempuan**	**44,72%**	**44,72 %**		**44,75%**		**44,75%**		**44.80%**		**44,80%**		**44.85 %**		**44,85 %**		**Dinas P2KBP3A**
	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga PUG yang dibentuk	0%	42 %	100.000.000	60%	100.000.000	70%	100.000.000	80%	100.000.000	90%	137.000.000	100%	137.000.000	100%	634.000.000	Dinas P2KBP3A
		Persentase Partisipasi Peremp	40%	40 %	0	41,30%		42%		42,67 %		43,67		44,33%		44,33 %		Dinas P2KBP3A

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		uan pada Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi																
		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibina	0%	42 %	-	60%		70%		80%		90%		100%		100%		Dinas P2KBP3A
	Sasaran 12.1.1: Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	**Persentase kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak**	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		100%		Dinas P2KBP3A

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		anak terselesaikan																
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus perlindungan perempuan yang ditangani	100 %	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	155.000.000	100%	155.000.000	100%	910.000.000	Dinas P2KBP3A
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	60%	60 %	150.000.000	65%	150.000.000	70%	150.000.000	75%	150.000.000	80%	150.000.000	85%	150.000.000	85%	900.000.000	Dinas P2KBP3A
		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas keluarga yang	43%	43 %		57%		57%		71%		86%		100%		100%	289.227.350	Dinas P2KBP3A

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		dibina																
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Tidak ada data	Ada data	165.000.000	Ada data	150.000.000	Ada data	150.000.000	Ada data	150.000.000	Ada data	152.000.000	Ada data	152.000.000	Ada data	919.000.000	Dinas P2KBP3A
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Lembaga PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibentuk	50%	75 %	300.000.000	80%	300.000.000	85%	320.000.000	90%	320.000.000	95%	330.000.000	100%	381.110.879	100%	1.951.110.879	Dinas P2KBP3A
		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	45%	45 %		65%		855 %		85%		100 %		100%		100%		Dinas P2KBP3A

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		kualitas hidup anak yang dibina																
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus perlindungan kekerasan terhadap anak yang ditangani	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	50.000.000	100 %	128.124.029	100 %	128.124.029	100%	130.000.000	100%	436.248.058	Dinas P2KBP3A
	Sasaran 12.1.1: Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**1,11**	**1,11**		**1,11**		**1,10**		**1,10**		**1.05**		**1.05**		**1,05**		Dinas P2KBP3A
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat partisipasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk(%)	70%	70 %	800.000.000	80%	800.000.000	85%	805.000.000	90%	805.000.000	100 %	815.000.000	100%	830.000.000	100%	4.855.000.000	Dinas P2KBP3A
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rata-rata Jumlah anak per	3.0	2.95	12.276.686.00	2.90	12.206.686.000	2.85	12.206.686.000	2.80	12.206.686.000	2.75	12.206.700.000	2.70	12.216.700.000	2.70	73.320.844.000	Dinas P2KBP3A

Kode	MISI/ TUJUN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja (Impact, Outcome)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		keluarga			0													
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase PPKS kecamatan	75%	75 %	757.000.000	80%	750.000.000	85%	750.000.000	90%	750.000.000	95%	755.338.944	100%	755.338.944	100%	4.517.677.889	Dinas P2KBP3A

6.4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka percepatan capaian visi dan misi Pemerintah Kabupetan Asahan menetapkan 10 (sepuluh) program prioritas yang akan dilaksanakan, pada dasarnya program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi serta memberikan dampak luas bagi masyarakat. Program prioritas dimaksud sebagai berikut :

1. Digitalisasi Birokrasi

   Merupakan upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel dan peningkatan pelayanan masyarakat dengan mudah, cepat, efisien, murah dan transparan. Seperti Menciptakan Kartu Tanda Penduduk Tangguh, Melaksanakan Pelayanan *Delivery System* Adminduk, Melaksanakan transparansi birokrasi.

2. Sumber Daya Manusia Tangguh

   Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang unggul dan serta menghubungkan terhadap perusahaan atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti yaitu Membangun balai latihan kerja, Melaksanakan pelatihan dan pemberdayaan wirausaha muda.

3. Ekonomi Mandiri

   Merupakan merupakan membentuk perekonomian rakyat dengan mendorong kehidupan masyarakat secara gotong royong berdasarkan kegiatan ekonomi yang tidak menganut prinsip ketergantungan, tetapi berdasarkan swadaya. Seperti Membangun Mall Usaha Mikro Kecil Mandiri, Membentuk kampung mandiri, Memberikan insentif wirausaha tangguh, Memberikan subsidi sarana produksi pertanian untuk petani dan nelayan.

4. Asahan Sehat

   Merupakan menciptakan kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah

daerah. Seperti Membangun Rumah Sakit Modern Berstandar Nasional, Memberikan bantuan berobat gratis bagi masyarakat miskin, Meningkatkan insentif kader kesehatan.

5. Asahan Cerdas

   Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan memanfaatkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui budaya literasi serta Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai sumber inspirasi untuk meningkatkan kebersaman, kerukunan, tolong menolong, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti memberikan beasiswa pendidikan pelajar/mahasiswa miskin dan berprestasi, Meningkatkan kesejahteraan Guru yang bukan Pegawai Negeri Sipil, Memfasilitasi Pendirian SMA/SMK negeri di setiap kecamatan.

6. Infrastruktur Kuat

   Mengalokasikan 60 (enam puluh) % anggaran belanja pada akhir periode RPJMD yaitu pada Tahun 2026 yang terdapat pada belanja langsung APBD untuk pembangunan infrastruktur.

7. Asahan Religius

   Membentuk jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa, ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar. Seperti pembentukan rumah mengaji disetiap kecamatan, melaksanakan sertifikasi gratis rumah ibadah.

8. Lingkungan Berbasis Partisipatif

   Merupakan gerakan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan yang melibatkan masyarakat umum dan berlangsung terus menerus untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Seperti melaksanakan Kisaran bebas banjir, Membangun Tempat Pembuangan Akhir sampah berstandar nasional, Membentuk Kader Lingkungan, Mengembangkan Ekowisata Mangrove.

9. Asahan Go Wisata

   Merupakan meningkatkan potensi pariwisata dari segala aspek dan menjadikan suatu kesatuan paket-paket wisata unggulan lewat pembuatan *travel pattern* (Patron perjalanan wisata). Seperti Membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah, Menciptakan *Asahan One Stop Adventure Tourism*, Wisata Religi dan Wisata Kuliner.

10. Asahan Perang Covid – 19

    Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, Pemerintah Kabupaten Asahan perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar sesuai dengan arahan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

10 (sepuluh) program tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya akan dibutuhkan kerja sama lintas perangkat daerah sehingga dibutuhkan kesamaan pemahaman terkait tujuan dari program prioritas yang diharapkan. Target Program Prioritas Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.4Target Program Prioritas Tahun 2021-2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
DIGITALISASI BIROKRASI								
1	Kartu Tanda Penduduk Tangguh	239.253 buah	39.977 buah	39.872 buah	39.528 buah	39.928 buah	39.871 buah	40.077 buah
2	Pelayanan Delivery System Adminduk	6 Unit	2 unit	2 unit	2 unit	-	-	-
3	Transparansi Birokrasi	1 website	1 website	-	-	-	-	-
	SDM TANGGUH							
1	Pembangunan Balai Latihan Kerja	1 Unit	1 keg (DED)	1 Unit (penyediaan lahan)	1 Unit (pembangunan)	1 Unit (selesai pembangunan)	-	-
2	Pelatihan dan Pemberdayaan Wirausaha	1.740 pelaku usaha	290 pelaku usaha	290 pelaku usaha	290 pelaku usaha	290 pelaku usaha	290 pelaku usaha	290 pelaku usaha
EKONOMI MANDIRI								
1	Membentuk Mall Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1 aplikasi	-	-	1 aplikasi	-	-	-
2	Kampung Mandiri	5 Wilayah	-	1 wilayah	1 wilayah	1 wilayah	1 wilayah	1 wilayah
3	Bantuan Modal Wirausaha Tangguh	600 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha
4	Bantuan Sarana Produksi Pertanian							

NO	PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Petani	314 kelompok	14 kelompok	60 kelompok	60 kelompok	60 kelompok	60 kelompok	60 kelompok
	- Nelayan	378 kelompok	63 kelompok	63 kelompok	63 kelompok	63 kelompok	63 kelompok	63 kelompok
ASAHAN SEHAT								
1	Membangun Rumah Sakit Modern Berstandar Nasional	1 Unit	1 keg (FS)	1 keg (DED)	1 Unit (Pembangunan)	1 Unit (selesai pembangunan)	-	-
2	Berobat gratis bagi masyarakat miskin	16.807 jiwa	11.647 jiwa	12.614 jiwa	12.627 jiwa	13.890 jiwa	15.279 jiwa	16.807 jiwa
3	Peningkatan insentif kader kesehatan	Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
ASAHAN CERDAS								
1	Beasiswa pendidikan pelajar/mahasiswa miskin dan berprestasi	500 org	-	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org
2	Peningkatan kesejahteraan Guru non Pegawai Negeri Sipil/Honor	3.502 org	1.400 org	3.502 org	3.502 org	3.502 org	3.502 org	3.502 org
3	Memfasilitasi Pendirian SMA/SMK negeri di setiap kecamatan	3 lahan	1 lahan	-	1 lahan	-	1 lahan	-
INFRASTRUKTUR KUAT								
1	60 (enam puluh) % anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur	60%	35%	40%	45%	50%	55%	60%

NO	PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
ASAHAN RELIGIUS								
1	Rumah mengaji disetiap kecamatan	25 Kec	-	10 Kec	10 Kec	5 Kec	-	-
2	Sertifikasi gratis rumah ibadah	150 persil	-	30 persil	30 persil	30 persil	30 persil	30 persil
LINGKUNGAN BERBASIS PARTISIPATIF								
1	Kisaran bebas banjir	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
	- Pembangunan Drainase	4.800 meter	800 meter	800 meter	800 meter	800 meter	800 meter	800 meter
	- Normalisasi	18.000 meter	3.000 meter	3.000 meter	3.000 meter	3.000 meter	3.000 meter	3.000 meter
	- Pemeliharaan	114.892	19.340 meter	19.472 meter	18.820 meter	19.200 meter	19.500 meter	18.560 meter
2	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir sampah berstandar nasional	1 unit	-	1 unit	-	-	-	-
3	Pembentukan Kader Lingkungan	204 kelompok	-	40 kelompok	40 kelompok	40 kelompok	40 kelompok	44 kelompok
4	Pengembangan Ekowisata Mangrove	13 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	4 Paket
ASAHAN GO WISATA								
1	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah	1 Perda	-	1 Perda	-	-	-	-

NO	PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Asahan One Stop Adventure Tourism	15 Paket		5 Paket	4 Paket	3 Paket	2 Paket	1 Paket
3	Wisata Religi	4 lokasi	-	2 lokasi	2 lokasi	-	-	-
4	Wisata Kuliner	2 lokasi	-	-	1 lokasi	1 lokasi	-	-
ASAHAN PERANG COVID-19								
1	Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun	204 desa/ Kel	204 desa/ Kel	204 desa/Kel	204 desa/ Kel	204 desa/ Kel	204 desa/ Kel	204 desa/Kel
2	Memastikan ketersediaan APD, Masker dan Handsanitizer							
	- APD	135.960 set	-	27.192 set	27.192 set	27.192 set	27.192 set	27.192 set
	- Masker	54.920 kotak	6.260 kotak	9.732 kotak	9.732 kotak	9.732 kotak	9.732 kotak	9.732 kotak
	- Handsanitizer	33.540 buah	360 buah	6.636 buah	6.636 buah	6.636 buah	6.636 buah	6.636 buah
3	Pengamanan Jaringan Sosial	12.575 org	-	12.575 org	12.575 org	12.575 org	12.575 org	12.575 org





BAB 7
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Asahan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7. 1 Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Asahan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PENDIDIKAN																
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	99,66	99,67	132.346.481.778	99,68	121.093.765.727	99,69	118.801.848.041	99,70	123.340.756.788	99,71	128.702.848.500	99,72	130.328.539.529	99,72	754.614.240.365
	APM SMP	82,78	82,82		82,89		82,95		82,98		83,26		83,40		83,40	
	APK PAUD	69,85	69,90		70,00		70,02		70,07		70,12		70,15		75,32	
	Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	98,20	98,22		98,50		98,60		98,65		98,70		98,90		98,90	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase penerapan muatan lokal di sekolah	72,00	75,00	-	77,00	40.000.000	79,00	40.000.000	81,00	40.000.000	83,00	40.000.000	85,00	40.000.000	85,00	200.000.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap murid	768,39	768,40	1.211.748.971	768,41	70.000.000	768,45	70.000.000	768,50	70.000.000	768,51	70.000.000	768,52	70.000.000	768,52	1.561.746.971
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN	Persentase izin pendidikan	100	100	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PENDIDIKAN	dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat															
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan pengembangan dan perlindungan literasi bahasa/sastra Daerah (lokal)	78,13	78,25	-	78,40	50.000.000	78,73	50.000.000	78,95	50.000.000	79,60	50.000.000	79,90	50.000.000	79,90	250.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	343.720.398.335	100%	349.409.005.037	100%	352.806.087.930	100%	349.659.281.963	100%	349.927.708.075	100%	350.022.486.485	100%	2.095.544.967.828
KESEHATAN																
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pelayanan Rujukan tingkat daerah	100%	100%	3.219.583.700	100%	1.020.000.000	100%	5.650.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.750.000.000	100%	4.000.000.000	100%	22.639.583.700
	Cakupan layanan kesehatan berbasis sistem informasi	0	0		50%		100%		100%		100%		100%		100%	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Persentase Puskesmas yang memenuhi Sarana, Prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	33%	43%	48.661.319.264	53%	93.298.491.214	63%	98.740.678.804	73%	104.393.516.833	83%	110.419.827.184	100%	116.793.626.592	100%	572.307.459.891

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
	Persentase Puskesmas terakreditasi	73%	73%		83%		90%		97%		100%		100%		100%	
	Persentase Puskesmas dan RS yang terintegrasi pelayanan kegawatdaruratannya dengan NCC / PSC 119	0	0		10%		27%		41%		56%		73%		73%	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar	20,69%	33,33%	381.425.832	46%	1.399.500.000	56%	2.189.475.000	66%	2.298.948.750	76%	2.413.896.188	83%	2.534.590.997	83%	11.217.836.766
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase cakupan pelaksanaan PIS-PK dengan intervensi keluarga oleh Puskesmas	20%	30%	777.090.600	50%	1.381.485.911	70%	1.478.189.925	90%	1.581.663.220	100%	1.692.379.645	100%	1.810.846.220	100%	8.721.655.520
	Persentase Kecamatan yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebesar 50%	0	8%		12%		16%		16%		16%		16%		16%	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan sesuai ketentuan	100%	100%	219.942.000	100%	282.533.765	100%	332.311.129	100%	238.976.508	100%	255.064.863	100%	272.125.023	100%	1.600.953.288
	Persentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang bersertifikat P-IRT	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Layanan Rumah Sakit	100%	100%	64.917.576.173	100%	67.375.210.038	100%	63.088.288.193	100%	65.086.635.205	100%	64.690.461.826	100%	65.799.987.235	100%	390.958.158.671

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	69.369.952.186	100%	74.223.600.763	100%	79.416.892.337	100%	84.973.596.297	100%	90.919.145.610	100%	97.280.753.252	100%	496.183.940.444
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
PROGRAM PENYELENGGARA JALAN	Cakupan infrastruktur jalan di kabupaten	100%	100%	75.317.384.095	100%	77.099.199.119	100%	84.900.000.000	100%	85.800.000.000	100%	86.000.000.000	100%	86.700.000.000	100%	495.726.583.214
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	0%	-	2%	99.999.247	4%	200.000.000	6%	200.000.000	8%	200.000.000	10%	200.000.000	10%	899.999.247
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik	77,47%	79%	8.122.337.357	80%	4.742.997.563	81%	4.828.200.000	82%	4.830.000.000	83%	4.890.000.000	84%	5.000.000.000	84%	32.413534.920
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat pengendalian tata ruang daerah	0	16,67%	649.993.150	16,67	629.999.500	16,67	2.400.000.000	16,67	2.500.000.000	16,67	2.500.000.000	16,67	2.250.000.000	100%	10.929.992.650
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Rekomendasi IMB/Persetujuan bangunan gedung (PBG) sesuai SOP	0	16,67%	12.389.999.109	16,67%	30.309.494.620	16,67%	21.935.160.817	16,67%	21.861.369.186	16,67%	21.946.321.252	16,67%	22.045.662.990	100%	130.488.007.974
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang	0	50	2.089.997.010	0%	-	4%	750.000.000	8%	750.000.000	16%	750.000.000	20%	750.000.000	20%	5.089.997.010

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	ditetapkan															
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kota dengan kondisi baik	0	90%	11.707.283.900	92%	6.657.390.531	94%	6.912.911.546	96%	6.925.000.000	98%	6.950.000.000	100%	6.470.000.000	100%	45.622.585.977
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi Baik	0	0%	-	0%	-	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	3.600.000.000
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terlaksananya proses inventarisasi dan verifikasi Tanah Objek reforma agraria		0	0	20%	100.000.000	40%	100.000.000	60%	100.000.000	80%	70.000.000	100%	100.000.000	100%	470.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Mendapatkan Akses Air melalui SPAM	38,86%	0%	-	40,58%	5.250.000.000	40,96%	4.143.750.000	41,33%	4.175.000.000	41,71%	4.175.000.000	42,09%	4.135.000.000	42,09%	21.878.750.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pelayanan SPALD yang aman	94,81%	0%	-	94,90%	970.050.456	94,96%	994.550.456	95,02%	528.453.988	95,07%	537.445.767	95,13%	540.000.000	95,13%	3.570.500.667
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib administrasi layanan pemerintahan	100%	100%	25.396.393.444	100%	14.706.343.705	100%	13.115.041.273	100%	13.324.744.162	100%	13.672.000.000	100%	14.268.000.000	100%	94.482.522.585

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	0	248.750.000	100%	1.870.250.000	100%	1.972.467.500	100%	1.871.840.255	100%	1.885.043.000	100%	1.922.746.010	100%	9.771.096.735
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU perumahan yang telah diserahkan ke Pemda dalam kondisi baik	0	0	0	80%	3.250.000.000	80%	3.477.500.000	80%	3.648.931.118	80%	3.631.431.138	80%	3.885.631.296	80%	17.893.493.532
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tertangani di kawasan kumuh	0	12,60%	925.061.000	31,68%	22.046.228.181	50,76%	21.898.515.040	69,85%	21.906.005.040	88,93%	22.491.515.040	100%	22.157.382.017	100%	111.424.706.319
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan perbaikan rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	0	0,81	640.000.000	1,81	2.100.000.000	2,80	2.100.000.000	3,79	2.100.000.000	4,79	2.100.000.000	5,78	2.100.000.000	5,78	11.140.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	Persentase tertib administrasi layanan pemerintahan	100%	100%	6.329.062.444	100%	7.317.612.291	100%	7.293.468.591	100%	7..504.884.832	100%	7.257.600.210	100%	7.442.405.664	100%	**43.145.034.032**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
A																
KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan, Ketentraman, ketertiban dan Kenyamanan yang ditangani	100%	100%	798.102.340	100%	449.000.000	100%	449.000.000	100%	449.000.003	100%	449.000.005	100%	449.000.007	100%	3.492.102.362
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Rasio PPNS terhadap kasus yang ditangani	0,16	0,06		0,037		0,04		0,04		0,04		0,05		0,05	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat Penanganan Penanggulangan Bencana	100%	100%	81.738.000	100%	118.000.000	100%	118.000.000	100%	118.000.000	100%	118.000.000	100%	118.000.000	100%	671.738.000
	Persentase desa tangguh bencana	16,13%	16,13%		20,38%		25,38%		30,38%		35,38%		45,38%		45,38%	
	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana	0	2,83%		2,83%		2,83%		2,83%		2,83%		2,83%		14,15%	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	13.198.103.578	100%	13.248.087.652	100%	13.314.541.566	100%	13.382.016.051	100%	13.450.551.932	100%	13.520.191.662	100%	80.113.492.441
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan layanan pemadam kebakaran	100%	100%	972.776.075	100%	1.586.339.565	100%	1.586.339.565	100%	1.586.339.565	100%	1.586.339.565	100%	1.586.339.565	100%	8.904.473.900
	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran dalam kondisi baik		85%		88%		91%		93%		96%		98%		98%	
	Cakupan investigasi kejadian kebakaran		0		10%		20%		40%		60%		80%		80%	
	Persentse relawan pemadam kebakaran di tingkat desa		0		20%		39%		59%		78%		100%		100%	
	Persentase sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan kondisi membahayakan yang dalam kondisi baik		0		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
SOSIAL																

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fasilitasi KAT dan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	36,23%	100%	985.294.725	100%	819.782.136	100%	819.782.136	100%	839.782.136	100%	839.782.136	100%	839.782.136	100%	5.144.205.405
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	100%	0	100%	36.064.350	100%	36.064.350	100%	36.064.350	100%	36.064.350	100%	36.064.350	100%	180.321.750
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan rehabilitasi sosial	23,47%	100%	12.678.517.371	100%	3.885.965.293	100%	3.885.965.293	100%	3.885.965.293	100%	3.895.965.293	100%	3.895.965.293	100%	32.128.343.836
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	54,98%	57,98%	296.374.550	60,98%	11.446.775.356	63,98%	11.446.775.356	66,98%	11.446.775.356	69,98%	11.446.795.512	72,98%	11.560.492.418	72,98%	57.643.990.547
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan 10ector selama masa tanggap darurat	100%	100%	854.735.460	100%	726.998.789	100%	726.998.789	100%	726.998.789	100%	741.998.789	100%	741.998.789	100%	4.519.729.405
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	58%	65%	167.356.293	72%	342.993.781	79%	342.993.781	86%	342.993.781	93%	347.993.781	100%	347.993.781	100%	1.892.325.198
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Tertib Administrasi	100%	100%	6.565.150.009	100%	4.370.453.476	100%	4.478.947.167	100%	4.569.107.061	100%	4.650.977.649	100%	4.650.977.650	100%	29.285.613.013

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Pemerintahan															
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KETENAGAKERJAAN																
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan perencanaan ketenagakerjaan	0	0	-	-	-	-	-	100%	155.000.000	-	-	-	-	100%	155.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	0,80%	0,80%	250.000.050	0,81%	250.000.000	0,82%	1.394.127.033	0,83%	1.337.774.643	0,84%	1.424.337.143	0,85%	1.431.227.768	0,85%	6.087.466.638
PROGRAM PENEMPATAN KERJA	Persentase layanan penempatan tenaga kerja	0,22%	0,22%	289.909.714	0,23%	753.243.525	0,26%	996.243.525	0,27%	996.243.525	0,30%	996.243.525	0,33%	996.243.525	0,33%	5.028.127.339
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	50%	50%	400.771.625	50%	304.036.339	50%	775.096.188	50%	787.595.188	50%	801.346.188	50%	816.471.188	50%	3.995.317.716

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	3.320.771.059	100%	3.270.240.193	100%	3.372.070.493	100%	3.600.134.625	100%	3.694.650.679	100%	3.713.105.094	100%	20.970.972.143
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga PUG yang dibentuk	0%	42%	100.000.000	60%	100.000.000	70%	100.000.000	80%	100.000.000	90%	137.000.000	100%	137.000.000	100%	634.000.000
	Persentase PartIsipasi Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	40%	40%	0	41,30%		42%		42,67%		43,67		44,33%		44,33%	
	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibina	0%	42%	-	60%		70%		80%		90%		100%		100%	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus perlindungan perempuan yang ditangani	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	155.000.000	100%	155.000.000	100%	910.000.000

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	60%	60%	150.000.000	65%	150.000.000	70%	150.000.000	75%	150.000.000	80%	150.000.000	85%	150.000.000	85%	900.000.000
	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas keluarga yang dibina	43%	43%		57%		57%		71%		86%		100%		100%	289.227.350
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER ANAK	Ketersediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Tidak ada data	Ada data	165.000.000	Ada data	150.000.000	Ada data	150.000.000	Ada data	150.000.000	Ada data	152.000.000	Ada data	152.000.000	Ada data	919.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Lembaga PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibentuk	50%	75%	300.000.000	80%	300.000.000	85%	320.000.000	90%	320.000.000	95%	330.000.000	100%	381.110.879	100%	1.951.110.879
	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	45%	45%		65%		855%		85%		100%		100%		100%	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus perlindungan kekerasan	100%	100%	-	100%	-	100%	50.000.000	100%	128.124.029	100%	128.124.029	100%	130.000.000	100%	436.248.058

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	terhadap anak yang ditangani															
PANGAN																
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	35,71%	35,71%	1.001.470.000	50%	980.000.000	64,29%	630.000.000	78,57%	552.085.131	92,86%	617.991.153	100%	514.730.534	100%	4.146.276.818
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Skore PPH Konsumsi	89,20	89,1	974.326.155	89,15	985.930.175	89,25	1.097.760.663	89,3	1.109.743.873	89,4	1.089.747.825	89,5	1.128.803.138	89,5	6.386.313.828
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan penanganan desa rawan pangan	0	95,45%	262.000.250	90,91%	135.000.200	86,36%	175.000.000	81,82%	150.000.000	77,27%	180.000.000	72,73%	140.000.000	100	1.042.000.450
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0	9,09%	265.976.590	18,18%	263.050.000	18,18%	208.046.983	18,18%	222.810.272	18,18%	155.000.000	18,18%	164.910.454	100	1.279.794.299
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	3.486.417.356	100%	3.648.896.122	100%	3.932.230.125	100%	4.039.020.972	100%	4.062.029.480	100%	4.187.931.544	100%	23.356.525.599
PERTANAHAN																
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus Pertanahan yang di Mediasi		100%	80.000.000	100%	200.000.000	100%	214.000.000	100%	214.000.000	100%	100.000.000	100%	107.000.000	100 %	915.000.000

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian ganti kerugian tanah		100%	40.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100 %	490.000.000
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat		17%	580.000.000	33%	214.000.000	50%	228.980.000	67%	228.980.000	83%	231.746.130	100%	247.968.360	100 %	1.731.674.490
LINGKUNGAN HIDUP																
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi hasil kajian yang ditindaklanjuti	0	100%	-	100%	150.000.000	100%	123.000.000	100%	424.000.000	100%	320.000.000	100%	-	100%	1.570.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	10%	10%	3.266.538.854	10%	2.018.814.570	10%	1.699.734.562	10%	1.712.511.990	10%	1.802.772.700	10%	1.828.601.955	10%	12.328.974.631
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	0	30%	-	30%	1.298.118.600	30%	2.175.070.000	30%	2.095.924.900	30%	2.110.345.500	30%	2.162.750.500	30%	9.842.209.500
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan B3 yang diawasi	45%	45%	-	45%	155.786.800	48%	161.540.300	51%	163.500.000	54%	164.300.000	57%	164.750.000	57%	809.787.100

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	35%	35%	26.224.900	50%	80.257.800	60%	82.963.430	70%	86.316.500	80%	87.651.280	90%	89.151.250	90%	452.565.160
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase SDM Bidang lingkungan yang kompeten	57%	57%	120.111.000	61%	198.621.450	66%	206.116.505	71%	213.002.000	76%	214.851.050	80%	217.301.400	80%	1.170.003.605
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun	0	1 Event	57.876.535	1 Event	48.300.700	1 Event	50.750.300	1 Event	51.650.500	1 Event	52.150.750	1 Event	52.870.000	6 Event	313.598.785
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan	100%	100%	35.511.900	100%	31.350.930	100%	32.991.628	100%	35.160.950	100%	36.771.100	100%	38.891.500	100%	210.678.008
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	40%	40%	5.741.173.737	52%	652.768.426	64%	914.922.550	76%	834.542.639	88%	978.763.209	100%	1.024.542.000	100%	35.810.500.000
	Tingkat pengawasan pengelolaan sampah oleh	0	0		0		30%		32%		34%		36%		36%	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	pihak swasta															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	7.631.143.977	100%	13.000.075.807	100%	12.075.932.677	100%	11.995.123.942	100%	11.934.325.976	100%	12.214.724.253	100%	167.887.257.261
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk	71,41	71,45	595.950.375	71,50	607.328.500	71,55	632.328.500	71,60	635.328.500	71,65	655.328.500	71,70	655.328.500	71,70	3.781.592.875
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Layanan Penerbitan Pencatatan Sipil	73,45	73,50	205.876.250	73,55	191.000.000	73,60	191.000.000	73,65	191.000.000	73,70	191.000.000	73,75	191.000.000	73,75	1.160.876.250
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	0	3,23	125.000.000	6,45	315.000.000	9,68	320.000.000	12,90	320.000.000	16,13	320.000.000	19,35	320.000.000	19,35	1.720.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan ketersediaan Profil Kependudukan tingkat kecamatan	0	20%	35.000.000	40%	80.000.000	60%	80.000.000	80%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	435.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	8.449.580.021	100%	8.253.721.179	100%	8.271.108.655	100%	8.316.223.889	100%	8.345.095.991	100%	8.394.755.234	100%	50.020.484.969

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
A																
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat tertib penyelenggaraan penataan desa	0%	0%	119.999.000	21,43%	50.000.125	42,86%	450.000.000	64,29%	150.000.000	85,71%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	1.069.999.125
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	0	4,35%	-	17,39%	50.000.000	34,78%	180.000.000	52,17%	150.000.000	78,26%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	880.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	56,50%	75,14%	3.928.925.850	80,23%	5.525.878.732	84,75%	4.850.000.000	89,83%	5.300.000.000	94,92%	4.800.000.000	100%	5.630.000.000	100%	30.034.804.582
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	60,42%	63,44%	8.484.142.708	69,49%	7.163.339.266	77,04%	7.315.436.789	81,57%	7.268.829.293	90,27%	7.249.352.318	92,08%	6.684.009.746	92,08%	44.165.110.120
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	3.465.659.917	100%	3.270.099.994	100%	3.344.436.694	100%	3.352.836.694	100%	3.805.392.795	100%	3.725.152.579	100%	20.963.578.875
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat partisipasi lintas 18ector dalam	70%	70%	800.000.000	80%	800.000.000	85%	805.000.000	90%	805.000.000	100%	815.000.000	100%	830.000.000	100%	4.855.000.000

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	pengendalian penduduk(%)															
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rata-rata Jumlah anak per keluarga	3.0	2.95	12.276.686.000	2.90	12.206.686.000	2.85	12.206.686.000	2.80	12.206.686.000	2.75	12.206.700.000	2.70	12.216.700.000	2.70	73.320.844.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase PPKS kecamatan	75%	75%	757.000.000	80%	750.000.000	85%	750.000.000	90%	750.000.000	95%	755.338.944	100%	755.338.944	100%	4.517.677.889
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	6.059.091.292	100%	7.182.575.421	100%	10.857.732.963	100%	10.439.206.259	100%	8.676.876.885	100%	9.367.664.574	100%	52.558.147.394
PERHUBUNGAN																
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0,003897%	0,004550%	2.834.711.294	0,00520%	3.034.282.900	0,00584%	2.840.000.000	0,00649%	3.070.000.000	0,00714%	3.150.000.000	0,00779%	3.130.000.000	0,00779%	18.058.994.194
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase tahapan pengelolaan pelayaran	0	15%	559.620.237	50%	365.518.239	75%	545.095.140	100%	346.027.198	100%	312.760.434	100%	310.326.894	100%	2.439.348.145
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	6.568.049.943	100%	6.600.310.028	100%	6.665.177.723	100%	6.685.177.723	100%	6.690.177.723	100%	6.765.177.723	100%	39.974.070.863
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kategori PPID	60	60	5.557.649.876	70	4.154.447.558	80	2.827.258.887	85	3.410.742.625	90	2.775.483.452	100	3.038.926.849	100	21.764.509.246
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	96.43%	96.43%	3.098.683.081	96.43%	5.045.812.836	96.43%	5.638.611.321	96.43%	4.643.269.814	96.43%	5.041.651.524	100%	4.221.922.793	100%	27.689.951.368
	Indeks SPBE	1,93	1,95	3.045.924.956	1,97	3.697.000.000	1,99	3.629.015.000	2,01	3.877.271.050	2,03	4.142.905.024	2,05	4.427.133.375	2,05	22.819.249.405
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	3.573.090.220	100%	2.232.560.166	100%	3.300.825.721	100%	3.731.677.148	100%	3.984.777.292	100%	4.554.980.067	100%	21.377.910.614
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi yang dilayani	cc	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	0	100%	59.999.950	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	304.999.950
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	0	26,73%	50.000.000	27,86%	30.000.000	28,96%	30.000.000	30,03%	30.000.000	31,07%	30.000.000	32,07%	35.000.000	32,07%	205.000.000
PROGRAM	Persentase SDM	14,42%	14,25%	169.999.935	16,43%	300.000.000	18,56%	300.000.000	20,64%	300.000.000	22,68%	300.000.000	24,66%	320.000.000	24,66%	1.689.999.935

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Koperasi terlatih															
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	64,90%	65,17%		65,44%		65,70%		65,96%		66,22%		66,47%		66,47%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	0,589%	1,133%	194.999.975	1,161%	124.500.000	1,182%	125.000.000	1,197%	125.000.000	1,207%	135.000.000	1,213%	145.000.000	1,213%	849.499.975
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	0	0,023%	100.000.000	0,043%	400.000.000	0,063%	400.000.000	0,080%	400.000.000	0,095%	400.000.000	0,109%	400.000.000	0,109%	2.100.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	6.053.289.187	100%	5.878.581.214	100%	5.953.524.964	100%	5.993.524.964	100%	5.871.631.214	100%	5.821.281.214	100%	35.571.932.757
PENANAMAN MODAL																
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang diberikan insentif / kemudahan penanaman modal	0	0 %	22.534.250	100%	88.548.438	100,00 %	139.433.921	100,00 %	190.328.259	100,00 %	91.231.540	100%	92.143.854	100%	624.220.262
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi penanaman modal daerah	0	0	0	20%	69.682.000	40%	70.378.820	60%	71.082.607	80%	71.793.432	100%	72.511.365	100%	355.448.224
PROGRAM PELAYANAN	Persentase pelayanan perizinan dan	100%	100%	383.420.225	100%	472.486.451	100%	460.117.400	100%	464.718.573	100%	408.014.495	100%	503.794.638	100%	2.692.551.782

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PENANAMAN MODAL	non perizinan secara terpadu satu pintu															
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	4%	4%	455.101.250	4,5%	172.873.000	5%	174.601.730	5,5%	176.347.747	6%	178.111.223	6,5%	179.892.334	6,5%	1.336.927.284
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100%	100%	86.561.550	100%	110.071.550	100%	111.172.265	100%	112.283.987	100%	85.000.000	100%	121.172.265	100%	626.261.617
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	4.949.415.254	100%	5.005.704.427	100%	4.993.353.943	100%	4.964.445.120	100%	5.175.678.058	100%	5.071.429.956	100%	30.160.026.761
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berprestasi	-	13,67%	1.427.599.090	13,83%	865.882.116	14,44%	1.600.000.000	15,11%	1.330.000.000	15,22%	1.330.000.000	15,48%	1.635.000.000	15,48%	8.188.481.206
	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif.	27,5	34,78%		39,13%		46,38%		60,87%		79,11%		100%		100%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Tingkat Prestasi event olahraga	-	50%	8.515.750.000	60%	8.449.225.440	65%	6.936.493.114	70%	6.705.000.000	75%	6.910.000.000	80%	6.795.000.000	80%	44.701.468.554
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	65%	65%	395.000.000	67%	360.000.000	69%	320.000.000	71%	430.000.000	73%	590.000.000	75%	390.000.000	75%	3.845.000.000

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
KEPRAMUKAAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	3.253.039.484	100%	3.402.953.611	100%	4.029.698.360	100%	3.893.149.380	100%	12.695.374.485	100%	12.719.776.360	100%	39.993.991.680
STATISTIK																
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	Tidak ada	ada	65.255.000	ada	290.000.000	ada	310.300.000	ada	332.021.000	ada	355.262.470	ada	380.130.843	ada	1.732.969.313
PERSANDIAN																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	0	0	-	35,7 %	618.420.208	53,3 %	326.149.904	71,4 %	348.291.027	89,2 %	372.671.399	100 %	398.758.397	100 %	2.064.290.935
KEBUDAYAAN																
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan kelompok budaya yang dibina	100%	100 %	74.969.591	100%	6.100.000.000	100%	5.850.000.000	100 %	6.100.000.000	100 %	5.850.000.000	100 %	5.850.000.000	100%	29.824.969.591
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	36,84 %	39,47%	325.099.517	42,11%	100.000.000	45,61%	100.000.000	48,25%	100.000.000	50,00%	100.000.000	52,63%	100.000.000	52,63%	825.099.517
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah di	100%	100%	-	100%	150.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.550.000.000

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan															
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	70,83%	0 %	-	75,00%	350.000.000	75,00%	400.000.000	79,17%	400.000.000	83,33%	400.000.000	87,50%	400.000.000	87,50%	1.950.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkat kunjungan museum	11,97%	0%	-	24,68 %	425.000.000	24,90%	925.000.000	25,60%	925.000.000	25,95%	425.000.000	26,50%	425.000.000	26,50%	3.125.000.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS				-		1.600.000.000		2.400.000.000		3.200.000.000		800.000.000		1.600.000.000		9.600.000.000
PERPUSTAKAAN																
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpusatakaan yang terkelola dengan baik	40%	45%	1.229.685.530	50%	1.144.476.683	55%	952.000.000	60%	962.300.000	65%	973.000.000	70%	980.000.000	70%	6.241.462.213
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Budaya Eetnis Nusantara yang dilestarikan	0	28,5%	49.185.500	42,8%	50.000.000	57,1%	55.010.863	71,4%	56.099.088	85,7%	57.632.521	100%	60.720.969	100%	328.648.941
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib administrasi layanan pemerintahan	100%	100%	3.514.956.335	100%	3.401.566.704	100%	3.448.279.362	100%	3.455.279.362	100%	3.461.279.362	100%	3.471.279.362	100%	20.752.640.487
KEARSIPAN																

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah	5,5%	5,5%	144.618.830	16,5%	335.000.000	37,4%	455.340.576	58,3%	460.932.726	79,1%	465.588.348	100%	470.813.981	100%	2.332.294.461
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase autentisitas arsip statis yang ditetapkan	100%	100%	143.351.325	100%	170.000.000	100%	216.000.000	100%	218.000.000	100%	221.500.000	100%	223.000.000	100%	1.191.851.325
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
KELAUTAN DAN PERIKANAN																
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap(%)	3,51%	3,54%	4.942.272.939	3,57%	4.925.783.850	3,60%	4.625.731.189	3,63%	4.650.000.000	3,66%	4.670.000.000	3,69%	4.702.716.763	3,69%	28.516.504.742
	Cakupan bina kelompok nelayan	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		20%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya (%)	2,15%	2,25%	4.669.401.463	2,35%	5.069.986.155	2,45%	4.677.000.000	2,55%	5.199.849.797	2,65%	4.405.507.653	2,75%	4.805.000.000	2,75%	28.826.745.068
	Presentase pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		20%	
	Presentase tanda daftar pembudi daya ikan kecil	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		20%	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan	0	20%	55.444.125	20%	45.000.000	20%	90.000.000	20%	90.000.000	20%	90.000.000	20%	90.000.000	20%	460.444.125

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	budidaya yang diawasi (%)															
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang standar	0	20%	540.928.997	20%	125.658.345	20%	153.000.000	20%	161.000.000	20%	159.000.000	20%	177.000.000	20%	1.316.587.342
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	4.247.417.714	100%	4.343.782.862	100%	5.037.264.893	100%	4.556.048.956	100%	5.407.456.284	100%	5.033.521.369	100%	28.625.492.079
PARIWISATA																
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata yang ditetapkan	-	4,76%	411.632.000	14,28%	728.084.375	28,57%	735.368.330	47,62%	1.060.000.000	71,43%	875.490.597	100%	905.000.000	100%	4.715.575.302
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain/Pihak Ketiga.	16,67	16,67%	0	33,33%	0	50%	95.000.000	66,67%	95.000.000	83,33%	95.000.000	100%	85.000.000	100%	370.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN	Persentase pelaku ekraf yang aktif	-	16,67%	0	33,33%	0	50%	70.000.000	66,67%	255.000.000	83,33%	260.000.000	100%	239.975.595	100%	824.975.595

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL																
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	10%	0	20%	249.907.500	40%	340.000.000	60%	430.000.000	80%	345.000.000	100%	395.000.000	100%	2.140.000.000
PERTANIAN																
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	30%	100%	1.318.591.954	100%	1.197.499.563	100%	1.446.374.541	100%	1.517.048.268	100%	1.591.368.031	100%	1.669.523.997	100%	8.740.406.356
	Persentase pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) unggul (%)	18%	45%		63%		63%		72%		72%		72%		72%	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik	62%	66%	15.748.922.668	71%	15.112.242.003	76%	14.536.638.380	81%	14.041.506.571	85%	14.465.624.279	85%	14.129.550,373	85%	88.034.484,276
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian	100%	100%	354.947.625	100%	709.203.945	100%	360.208.221	100%	819.432.797	100%	877.103.093	100%	938.460.309	100%	4.459.355.992
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan perkebunan yang mendapat nilai baik (%)	70%	70%	-	80%	40.000.000	80%	45.000.000	85%	100.000.000	85%	55.000.000	85%	60.000.000	85%	300.000.000
PROGRAM	Cakupan bina	50%	60%	870.190.10	64%	1.009.750.0	69%	1.151.742.8	74%	1.141.434.0	79%	1.100.231.8	84%	1.413.144.75	84%	6.686.493.5

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PENYULUHAN PERTANIAN	kelompok tani			0		00		20		84		38		0		73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib administrasi layanan pemerintahan	100%	100%	15.011.724.154	100%	15.361.811.867	100%	15.658.234.644	100%	16.149.043.470	100%	15.852.082.839	100%	15.906.461.038	100%	93.939.358.013
PERETNAKAN																
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan Produksi peternakan	1%	1%	3.380.043.000	1%	1.737.544.187	1%	1.734.250.000	1%	1.976.292.500	1%	1.769.108.425	1%	2.027.228.509	1%	12.624.446.621
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, Embung, RPH, dll)	64%	68%	368.989.000	73%	622.678.890	78%	752.500.000	84%	713.074.871	90%	681.438.606	96%	624.440.305	96%	3.763.121.673
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana peternakan	-	-		76%	40.000.000	81%	40.400.000	87%	40.804.000	93%	43.660.280	100%	46.716.499	100%	211.580.779
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha peternakan	0	0	-	50%	80.000.000	54%	80.800.000	57%	81.608.000	61%	82.424.050	66%	83.248.320	66%	408.080.400
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	0	0		5%	145.000.000	5%	146.450.000	6%	147.914.500	6%	149.393.645	7%	150.887.581	7%	739.645.726
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VERTERINER	Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	74%	78%	978.757.925	82%	1.098.230.199	86%	1.191.700.625	90%	1.203.617.631	94%	1.215.653.807	99%	1.227.810.345	99%	6.915.770534

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	4.787.195.607	100%	5.827.567.563	100%	5.652.829.222	100%	5.484.263.119	100%	5.755.305.750	100%	5.586.858.809	100%	33.094.020.072
PERDAGANGAN																
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik	32,26	32,26	1.252.567.168	32,26	1.479.548.354	32,26	1.479.814.590	32,26	1.481.226.573	32,26	1.585.262.380	32,26	1.588.413.715	32,26	8.866.832.783
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	27,81%	27,81%	59.985.750	27,81%	55.000.000	27,81%	55.000.000	27,81%	60.000.000	27,81%	70.000.000	27,81%	80.000.000	27,81%	379.985.750
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk Ekspor Unggulan	100%	100%	307.496.525	100%	225.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.682.496.525
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	100%	100%	179.999.788	100%	170.000.000	100%	190.000.000	100%	195.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	1.154.999.788
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Fasilitasi Pemasaran Produk Lokal	100%	100%	649.910.000	100%	400.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	2.299.910.000
PERINDUSTRIAN																
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Pertumbuhan industri baru	0,0103	0,0127 %	3.233.493.679	0,0150 %	3.021.398.531	0,0172 %	1.100.000.000	0,0192 %	800.000.000	0,0212 %	800.000.000	0,0230%	800.000.000	0,0230%	9.754.892.210

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
INDUSTRI																
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase perizinan usaha industri	0	100%	99.978.000	0%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	299.978.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	0	21%	74.947.000	21%	100.000.000	21%	50.000.000	21%	50.000.000	21%	50.000.000	21%	50.000.000	21%	374.947.000
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
SEKRETARIAT DAERAH																
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai SAKIP	B	B	18.516.448.950	B	18.586.574.748	B	18.679.807.121	BB	18.774.471.320	BB	18.870.624.617	BB	18.968.326.574	BB	112.396.253.332
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian dan pembangunan	100%	100%	2.933.662.950	100%	2.944.773.366	100%	2.959.644.684	100%	2.974.542.854	100%	2.989.776.950	100%	3.005.256.409	100%	17.807.557.216
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	56.484.704.374	100%	56.698.624.167	100%	56.983.030.918	100%	57.271.805.473	100%	57.565.122.543	100%	57.863.163.824	100%	342.866.451.302

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
SEKRETARIAT DPRD																
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN KINERJA DPRD	95,65%	100%	11.524.668.557	100%	11.397.548.428	100%	11.465.426.095	100%	11.467.426.095	100%	11.467.426.095	100%	11.597.426.095	100%	58.505.166.306
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	32.021.956.321	100%	32.307.079.910	100%	32.461.233.638	100%	32.684.674.904	100%	32.913.662.430	100%	33.014.338.067	100%	195.402.945.272
PROGRAM LAYANAN DAN KEUANGAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase Layanan terhadap administrasi keuangan	100%	100%	549.999.950	100%	558.999.948	100%	558.999.948	100%	558.999.948	100%	558.999.948	100%	560.999.948	100%	3.246.999.740
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
PERENCANAAN																
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	100%	100,00%	1.726.686.76	100,00%	1.726.483.055	100,00%	1.137.667.498	100,00%	1.137.667.498	100,00%	1.200.557.502	100,00%	1.356.435.666	100%	7.188.522.192
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah	100%	100%	2.149.251.075	100%	1.764.193.600	100%	1.960.193.960	100%	1.907.065.456	100%	1.938.112.677	100%	1.936.881.004	100%	11.655.697.773

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	5.915.053.328	100%	5.714.313.253	100%	6.218.927.095	100%	6.218.927.095	100%	6.278.770.166	100%	6.378.770.166	100%	36.724.761.105
KEUANGAN																
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat tertib penyusunan anggaran daerah	100%	100,00%	279.425.387.610	100,00%	280.036.466.712	100,00%	280.778.036.823	100,00%	281.491.963.990	100%	282.175.642.422	100,00%	282.826.257.094	100,00%	1.686.733.754.653
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat tertib administrasi barang milik daerah	100%	100,00%	1.175.090.445	100,00%	1.257.346.776	100,00%	1.345.361.050	100,00%	1.439.536.324	100,00%	1.540.303.866	100,00%	1.648.125.137	100,00%	8.405.763.599
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib administrasi layanan pemerintahan	100%	100%	8.545.378.384	100%	8.269.470.676	100%	9.573.397.924	100%	10.243.535.778	100%	10.960.583.283	100%	11.727.824.113	100%	59.109.585.402
PENDAPATAN																
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pajak daerah dan retribusi daerah	58,11%	80%	1.462.366.725	80%	1.212.633.300	85%	1.359.000.000	90%	1.381.005.000	95%	1.404.071.550	100%	1.428.299.000	100%	8.247.375.575
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat tertib penyusunan anggaran daerah	100%	100,00%	39.999725	100,00%	43.303.475	100,00%	45.000.000	100,00%	48.000.000	100%	51.000.000	100,00%	54.000.000	100,00%	281.303.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	Persentase tertib administrasi layanan pemerintahan	100%	100%	13.776.092.862	100%	14.080.385.367	100%	14.009.250.879	100%	14.062.356.057	100%	14.115.628.382	100%	14.169.017.652	100%	84.212.731.200

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
A																
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian	38,41%	90,72%	2.853.149.567	92,53%	3.001.944.795	94,39%	2.976.954.519	96,27%	2.992.136.987	98,20%	3.007.396.886	100%	3.023.035.350	100%	17.854.618.105
	Persentase Kesesuaian Kompetensi Jabatan	75%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		100%	
	Tingkat Pelanggaran ASN yang ditindaklanjuti	91,67%	91,67%		90,91%		90,00%		88,89%		87,50%		85,71%		85,71%	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	4,75%	5,11%	3.274.609.525	5,17%	3.412.500.000	5,70%	3.429.562.500	5,77%	3.447.053.268	6,17%	3.464.633.240	6,61%	3.482.649.333	6,61%	20.511.007.867
PROGRAM PENUNJUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi layanan Pemerintahan	95,17%	100%	9.124.432.973	100%	8.895.510.620	100%	8.980.234.874	100%	9.025.537.525	100%	9.071.900.128	100%	9.118.723.692	100%	54.215.339.815
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang telah diimplementasikan	0	50%	565.597.250	60%	1.190.821.153	65%	1.131.169.078	70%	1.237.245.000	75%	1.137.245.000	80%	937.245.000	80%	6.199.322.482
UNSUR PENGAWASAN																

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	0	75%	3.671.228.625	80%	3.366.687.000	85%	3.628.327.750	90%	3.681.994.000	95%	3.683.854.000	100%	3.789.727.950	100%	26.535.819.325
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki maturitas SPIP minimal level 3 dengan penjaminan kualitas		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)		90%	338.426.250	90%	120.700.000	93%	121.301.500	95%	121.500.000	96%	122.107.500	100%	122.719.556	100%	946.754.806
	Persentase penilaian mandiri reformasi birokrasi Perangkat Daerah minimal B		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	9.599.011.956	100%	10.172.818.796	100%	9.979.097.692	100%	9.994.806.409	100%	10.063.006.789	100%	10.028.326.850	100%	59.837.068.495
UNSUR KEWILAYAHAN																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	100%	100%	755,977,403	100%	606,394,321	100%	603,348,967	100%	633,451,425	100%	653,414,286	100%	827,928,203	100%	4,080,514,605

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PUBLIK																
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kelompok Masyarakat yang dibina dengan baik di Tingkat Kecamatan	100%	100%	6,654,699,402	100%	6,438,652,654	100%	6,577,127,497	100%	6,672,232,996	100%	6,748,937,411	100%	6,852,247,074	100%	39,943,897,034
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100%	100%	10,000,000	100%	53,387,636	100%	50,758,204	100%	52,050,970	100%	67,301,770	100%	69,097,196	100%	302,595,776
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	100%	411,666,681	100%	424,901,478	100%	442,534,104	100%	456,362,392	100%	460,663,174	100%	452,248,849	100%	2,648,376,678
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan tertib administrasi pemerintahan desa	100%	100%	235,412,848	100%	477,887,774	100%	469,841,578	100%	529,857,642	100%	521,778,384	100%	554,808,800	100%	2,789,587,026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	56,015,086,575	100%	57,230,703,436	100%	57,747,317,647	100%	58,331,216,234	100%	58,971,031,432	100%	59,927,889,602	100%	348,223,244,926
FUNGSI PENUNJANG URUSAN																

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PEMERINTAHAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100 %	711.878.174.090	100 %	848.291.328.943	100 %	898.030.844.069	100 %	944.944.174.453	100 %	992.615.741.594	100 %	1.053.857.877.414	100 %	5.338.112.285.482
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	33,55%	100%	2.006.765.550	100%	243.875.915	100%	245.095.296	100%	246.320.771	100%	247.552.376	100%	248.790.136	100%	3.238.400
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang difasilitasi	100 %	100 %	1.450.685.000	100 %	8.290.922.446	100 %	8.332.694.026	100 %	8.375.173.522	100 %	8.418.701.779	100 %	8.463.221.295	100 %	43.341.296.059
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Ormas	47,35 %	100 %	632.768.145	100 %	58.452.080	100 %	58.744.320	100 %	59.038.041	100 %	69.333.232	100 %	59.629.898	100 %	927.959.698
PROGRAM	Persentase	26,05 %	100 %	3.171.354.	100 %	218.157.02	100 %	219.257.86	100 %	220.354.14	100 %	221.455.92	100 %	222.563.199	100 %	4.273.152.5

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan			350		5		0		9		0				04
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial terselesaikan	54,96 %	100 %	1.936.454.250	100 %	815.016.520	100 %	819.090.598	100 %	823.186.050	100 %	827.301.981	100 %	831.438.490	100 %	6.052.486.890
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	4.205.904.316	100%	3.838.300.106	100%	3.857.491.607	100%	3.876.779.065	100%	3.896.162.959	100%	3.915.643.775	100%	23.590.281.828





BAB 8
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kerangka Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Asahan disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 8. 1 Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asahan

No	Indikator Kinerja Utama	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
	Indikator Makro:						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi*)	1,70	2,46	3,21	3,96	4,71	5,32
2	Laju Inflasi*)	2,25	2,13	2,07	2,05	2,08	2,17
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,05	71,57	72,08	72,60	73,12	73,63
4	Gini Rasio	0,257	0,254	0,251	0,248	0,245	0,242
5	Persentase tingkat Kemiskinan	8,57	8,11	7,65	7,20	6,76	6,32
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,77	6,35	5,94	5,54	5,14	4,74
	Indikator Kinerja Utama						
1	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi	B=61	B=64	B=68	BB=71	BB=74	BB=78
2	Indeks Profesionalitas ASN	62	65	68	70	72	75
3	Pertumbuhan Ekonomi sector Primer	3,80	4,16	4,52	4,88	5,23	5,59
4	Pertumbuhan ekonomi Sektor Sekunder dan Tersier (Jasa, perdangangan, industry)	2,23	3,11	3,99	4,12	4,87	5,72
5	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,6491	0,6527	0,6563	0,6599	0,6635	0,6671
6	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	0.3 %	0.6 %	1%	1.5 %	2 %	2.5 %
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,32	79,42	79,52	79,62	79,72	79,82
8	Indeks Kesehatan	77,88	77,98	78,08	78,18	78,28	78,38
9	Indeks Pendidikan	79,50	79,60	79,70	79,80	79,90	80,00
10	Angka kriminalitas	18,8	18,79	18,76	18,74	18,73	18,71
11	Indeks infrastruktur wilayah	68,16	68,30	68,50	68,70	69,00	69,20
12	Tingkat konektivitas antar wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	62,66	63,28	63,90	64,52	65,14	65,76
14	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan	60,84%	62,20%	62,80%	68,10%	66,40%	67,48%
15	Persentase Keluarga Sejahtera	61,98%	62,18%	62,38%	62,58%	62,78	62,98

Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Daerah	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Pertumbuhan PDRB	1,50	2,34	2,63	2,91	3,20	3,49
1.2	PDRB Perkapita	53.444.156,56	56.500.463,40	59.556.770,24	62.613.077,09	65.669.383,93	68.725.690,77
	Kesejahteraan Sosial						
1.	Angka Melek Huruf	98,64	98,67	98,72	98,75	98,80	98,83
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
	Pelayanan Urusan Wajib						
	Terkait Pelayanan Dasar						
1	**PENDIDIKAN**						
1.1	APM SD	99,67	99,68	99,69	99,70	99,71	99,72
1.2	APM SMP	82,82	82,89	82,95	82,98	83,26	83,40
1.3	APK PAUD	69,90	70,00	70,02	70,07	70,12	70,15
1.4	Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	98,22	98,50	98,60	98,65	98,70	98,90
1.5	Persentase penerapan muatan lokal di sekolah	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
1.6	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap murid	768,40	768,41	768,45	768,50	768,51	768,52
1.7	Persentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100	100	100	100	100	100
1.8	Cakupan pengembangan dan perlindungan literasi bahasa/sastra Daerah (lokal)	78,25	78,40	78,73	78,95	79,60	79,90
2	**KESEHATAN**						
2.1	Persentase Puskesmas yang memenuhi Sarana, Prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	33	43	53	63	73	83
2.2	Persentase Puskesmas terakreditasi	73	73	83	90	97	100

No	Indikator Kinerja Daerah	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
2.3	Persentase Puskesmas dan RS yang terintegrasi pelayanan kegawatdaruratannya dengan NCC / PSC 119	0	0	10	27	41	56
2.4	Persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar	20,69	33,33	46	56	66	76
2.5	Persentase cakupan pelaksanaan PIS-PK dengan intervensi keluarga oleh Puskesmas	20	30	50	70	90	100
2.6	Persentase Kecamatan yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebesar 50%	0	8	12	16	16	16
2.7	Persentase Rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	Persentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang bersertifikat P-IRT	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.9	Cakupan Layanan Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Tingkat Pelayanan Rujukan tingkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11	Cakupan layanan kesehatan berbasis sistem informasi	0	50%	100%	100%	100%	100%
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
3.1	Cakupan infrastruktur jalan di kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik	79%	80%	81%	82%	83%	84%
3.3	Tingkat pengendalian tata ruang daerah	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
3.4	Persentase drainase kota dengan kondisi baik	90%	92%	94%	96%	98%	100%
3.5	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi Baik	0%	100%	100%	100%	100%	100%
3.6	Cakupan Rekomendasi IMB/Persetujuan bangunan gedung (PBG) sesuai SOP	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
3.7	Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	2%	4%	6%	8%	10%
3.8	Persentase Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan	50	0%	4%	8%	16%	20%
3.9	terlaksananya proses inventarisasi dan verifikasi Tanah Objek reforma agraria	100%	0%	0%	0%	0%	0%
3.10	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air	0%	40,58%	40,96%	41,33%	41,71%	42,09%

No	Indikator Kinerja Daerah	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
	melalui SPAM						
3.11	Cakupan pelayanan SPALD yang aman	0%	94,90%	94,96%	95,02%	95,07	95,13
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
4.1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Persentase PSU perumahan yang telah diserahkan ke Pemda dalam kondisi baik	0	80%	80%	80%	80%	80%
4.3	Cakupan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tertangani di kawasan kumuh	12,60%	31,68%	50,76%	69,85%	88,93%	100%
4.4	Cakupan Perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	0,81%	1,81%	2,80%	3,79%	4,79%	5,78%
5	**KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
5.1	Persentase Gangguan, Ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Rasio PPNS terhadap kasus yang ditangani	0,06	0,037	0,04	0,04	0,04	0,05
5.4	Tingkat penanganan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Persentase desa tangguh bencana	16,13%	20,38%	25,38%	30,38%	35,38%	45,38%
5.6	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.7	Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%
5.8	Cakupan layanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.9	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran dalam kondisi baik	85%	88%	91%	93%	96%	98%
5.10	Cakupan investigasi kejadian kebakaran	0	10%	20%	40%	60%	80%
5.11	Persentase relawan pemadam kebakaran di tingkat desa	0	20%	39%	59%	78%	100%
5.12	Persentase sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan kondisi membahayakan yang dalam kondisi baik	0	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Daerah	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
6	**SOSIAL**						
6.1	Persentase Fasilitasi KAT dan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Cakupan rehabilitasi sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	57,98%	60,98%	63,98%	66,98%	69,98%	72,98%
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.6	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	65%	72%	79%	86%	93%	100%
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	**KETENAGAKERJAAN**						
1.1	Cakupan perencanaan ketenagakerjaan	0	0	0	100%	0	0
1.2	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	0,80%	0,81%	0,82%	0,83%	0,84%	0,85%
1.3	Persentase layanan penempatan tenaga kerja	0,22%	0,23%	0,26%	0,27%	0,30%	0,33%
1.4	Persentase Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
2.1	Persentase Lembaga PUG yang dibentuk	42%	60%	70%	80%	90%	100%
2.2	Persentase Partisipasi Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	40%	41,30%	42%	42,67%	43,67%	44,33%
2.3	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibina	42%	60%	70%	80%	90%	100%
2.4	Persentase kasus perlindungan perempuan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Presentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	68%	68%	70%	75%	80%	85%
2.6	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	43%	57%	57%	71%	86%	100%

No	Indikator Kinerja Daerah	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
	kualitas keluarga yang dibina						
2.7	Ketersediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Ada data	Ada data	Ada data	Ada data	Ada data	Ada data
2.8	Persentase Lembaga PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibentuk	75%	80%	85%	90%	95%	100%
2.9	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	45%	65%	85%	85%	100%	100%
2.10	Persentase kasus perlindungan kekerasan terhadap anak yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**PANGAN**						
3.1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	35,71%	50%	64,29%	78,57%	92,86%	100%
3.2	Nilai Skore PPH Konsumsi	89,1	89,15	89,25	89,3	89,4	89,5
3.3	Cakupan penanganan desa rawan pangan	95,45%	90,91%	86,36%	81,82%	77,27%	72,73%
3.4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	9,09%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%
4	**PERTANAHAN**						
4.1	Persentase Kasus Pertanahan yang di Mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2	Persentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.3	Persentase Luas Lahan Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat	17%	33%	50%	67%	83%	100%
5	**LINGKUNGAN HIDUP**						
5.1	Persentase rekomendasi hasil kajian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
5.3	Persentase Ruang Terbuka Hijau	30%	30%	30%	30%	30%	30%
5.4	Persentase pengelolaan B3 yang diawasi	45%	45%	48%	51%	54%	57%
5.5	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	35%	50%	60%	70%	80%	90%
5.6	Persentase SDM Bidang lingkungan yang kompeten	57%	61%	66%	71%	76%	80%
5.7	Cakupan event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
5.8	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator Kinerja Daerah	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan						
5.9	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	40%	52%	64%	76%	88%	100%
5.10	Tingkat pengawasan pengelolaan sampah oleh pihak swasta	0	0	30%	32%	34%	36%
6	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**						
6.1	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk	71,45	71,50	71,55	71,60	71,65	71,70
6.2	Persentase Layanan Penerbitan Pencatatan Sipil	73,50	73,55	73,60	73,65	73,70	73,75
6.3	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	3,23%	6,45%	9,68%	12,90%	16,13%	19,35%
6.4	Cakupan ketersediaan Profil Kependudukan tingkat kecamatan	20%	40%	60%	80%	100%	100%
7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
7.1	Tingkat tertib penyelenggaraan penataan desa	0%	21,43%	42,86%	64,29%	85,71%	100%
7.2	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	4,35%	17,39%	34,78%	52,17%	78,26%	100%
7.3	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	75,14%	80,23%	84,75%	89,83%	94,92%	100%
7.4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	63,44%	69,49%	77,04%	81,57%	90%	92,08%
8	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
8.1	Tingkat partisipasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk (%)	70%	80%	85%	90%	100%	100%
8.2	Rata-rata Jumlah anak per keluarga	2.95	2.90	2.85	2.80	2.75	2.70
8.3	Persentase PPKS kecamatan	75%	80%	85%	90%	95%	100%
9	**PERHUBUNGAN**						
9.1	Persentase layanan angkutan darat	0,004550%	0,00520%	0,00584%	0,00649%	0,00714%	0,00779%
9.2	Persentase tahapan pengelolaan pelayaran	15%	50%	75%	100%	100%	100%
10	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
10.1	Indeks Kategori PPID	60	70	80	85	90	100
10.2	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	96.43%	96.43%	96.43%	96.43%	96.43%	100%
10.3	Indeks SPBE	1,95	1,97	1,99	2,01	2,03	2,05

No	Indikator Kinerja Daerah	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
10.4	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	0	32,1 %	35,7 %	44,6 %	48,2 %	55,3 %
11	**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**						
11.1	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.2	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	0	100%	100%	100%	100%	100%
11.3	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	26,73%	27,86%	28,96%	30,03%	31,07%	32,07%
11.4	Persentase SDM Koperasi terlatih	14,25%	16,43%	18,56%	20,64%	22,68%	24,66%
11.5	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	65,17%	65,44%	65,70%	65,96%	66,22%	66,47%
11.6	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	1,133%	1,161%	1,182%	1,197%	1,207%	1,213%
11.7	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	0,023%	0,043%	0,063%	0,080%	0,095%	0,109%
12	**PENANAMAN MODAL**						
12.1	Persentase investor yang diberikan insentif / kemudahan penanaman modal	0	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12.2	Cakupan promosi penanaman modal daerah	0	20%	40%	60%	80%	100%
12.3	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.4	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	4%	4,5%	5%	5,5%	6%	6,5%
12.5	Persentase pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
13.1	Persentase Pemuda yang berprestasi	13,67%	13,83%	14,44%	15,11%	15,22%	15,48%
13.2	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif.	34,78%	39,13%	46,38%	60,87%	79,11%	100%
13.3	Tingkat Prestasi event olahraga	50%	60%	65%	70%	75%	80%
13.4	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	65%	67%	69%	71%	73%	75%
14	**STATISTIK**						
14.1	Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	Indikator Kinerja Daerah	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
15	**PERSANDIAN**						
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	0	35,7 %	53,5 %	71,4 %	89,2 %	100 %
16	**KEBUDAYAAN**						
16.1	Cakupan kelompok budaya yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.2	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	39,47 %	42,11%	45,61%	48,25%	50%	52,63%
16.3	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan	0%	100%	100%	100%	100%	100%
16.4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0 %	75%	75%	79,17%	83,33%	87,50%
16.5	Tingkat kunjungan museum	0%	24,68%	24,90%	25,60%	25,95%	26,50%
17	**PERPUSTAKAAN**						
17.1	Persentase perpusatakaan yang terkelola dengan baik	45%	50%	55%	60%	65%	70%
17.2	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilestarikan	28,5%	42,8%	57,1%	71,4%	85,7%	100%
18	**KEARSIPAN**						
18.1	Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah	5,5%	16,5%	37,4%	58,3%	79,1%	100%
18.2	Persentase autentisitas arsip statis yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
1	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1.1	Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap (%)	3,54	3,57	3,6	3,63	3,66	3,69
1.2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	20%	20%	20%	20%	20%	20%
1.3	Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya (%)	2,25%	2,35%	2,45%	2,55%	2,65%	2,75%
1.4	Presentase pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil	20%	20%	20%	20%	20%	20%
1.5	Presentase tanda daftar pembudi daya ikan kecil	20%	20%	20%	20%	20%	20%
1.6	Cakupan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya yang diawasi (%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%
1.7	Persentase usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang standar	20%	20%	20%	20%	20%	20%

No	Indikator Kinerja Daerah	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
2	**PARIWISATA**						
2.1	Persentase Daya Tarik Wisata yang ditetapkan	4,76%	14,28%	28,57%	47,62%	71,43%	100%
2.2	Persentase Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain/Pihak Ketiga.	16,67%	33,33%	50%	66,67%	83,33%	100%
2.3	Persentase pelaku ekraf yang aktif	16,67%	33,33%	50%	66,67%	83,33%	100%
2.4	Persentase SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	10%	20%	40%	60%	80%	100%
3	**PERTANIAN**						
3.1	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Persentase pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) unggul (%)	45%	63%	63%	72%	72%	72%
3.3	Persentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik	66%	71%	76%	81%	85%	85%
3.4	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.5	Persentase Perusahaan perkebunan yang mendapat nilai baik	70%	80%	80%	85%	85%	85%
3.6	Cakupan bina kelompok tani	60%	64%	69%	74%	79%	84%
4	**PETERNAKAN**						
4.1	Persentase Pertumbuhan Produksi Peternakan	1%	1%	1%	1%	1%	1%
4.2	Persentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, Embung, RPH, dll)	68%	73%	78%	84%	90%	96%
4.3	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	78%	82%	86%	90%	94%	99%
4.4	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana peternakan	0	76%	81%	87%	93%	100%
4.5	Persentase perizinan usaha peternakan	0	50%	54%	57%	61%	66%
4.6	Cakupan bina kelompok tani	0	5%	5%	6%	6%	7%
5	**PERDAGANGAN**						
5.1	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26

No	Indikator Kinerja Daerah	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
5.2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	27,81%	27,81%	27,81%	27,81%	27,81%	27,81%
5.3	Persentase Produk Ekspor Unggulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Cakupan Fasilitasi Pemasaran Produk Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	**PERINDUSTRIAN**						
6.1	Pertumbuhan industri baru	0,0127%	0,0150%	0,0172%	0,0192%	0,0212%	0,0230%
6.2	Persentase perizinan usaha industri	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	21%	21%	21%	21%	21%	21%
D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
1	**SEKRETARIAT DAERAH**						
1.1	Persentase koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**SEKRETARIAT DPRD**						
1.1	Persentase Dukungan Pelaksanaan Kinerja DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
E	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
1	**PERENCANAAN**						
1.1	Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**KEUANGAN**						
2.1	Tingkat tertib penyusunan anggaran daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Tingkat tertib administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**PENDAPATAN**						
3.1	Tingkat ketercapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80%	80%	85%	90%	95%	100%
3.2	Tingkat tertib penyusunan anggaran daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Daerah	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
4	**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						
4.1	Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian	90,72%	92,53%	94,39%	96,27%	98,20%	100%
4.2	Persentase Kesesuaian Kompetensi Jabatan	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4.3	Tingkat Pelanggaran ASN yang ditindaklanjuti	91,67%	90,91%	90,00%	88,89%	87,50%	85,71%
4.4	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	5,11%	5,17%	5,70%	5,77%	6,17%	6,61%
5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
5.1	Persentase hasil penelitian yang telah diimplementasikan	50%	60%	65%	70%	75%	80%
6	**UNSUR PENGAWASAN**						
6.1	Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	75%	80%	85%	90%	95%	100%
6.2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki maturitas SPIP minimal level 3 dengan penjaminan kualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	90%	93%	95%	96%	100%	100%
6.4	Persentase Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Minimal B	100%	100%	100%	100%	100%	100%
F	**UNSUR KEWILAYAHAN**						
1.	Persentase penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan Kelompok Masyarakat yang dibina dengan baik di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Tingkat Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	0%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Cakupan tertib administrasi pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
G	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
1.	Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator Kinerja Daerah	TARGET CAPAIAN SEPTIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
H	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Pembinaan Ormas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase konflik sosial terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
	Kemampuan ekonomi						
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	574.188,24	605.734,53	637.282,83	668.830,83	700.377,42	731.924,72
1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	496.868,51	530.181,27	563.494,02	596.806,78	630.119,54	663.432,30
	Fasilitasi Wilayah dan Infrastruktur						
1	Perhubungan						
1.1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0,01543	0,01543	0,01651	0,01651	0,01651	0,01651
1.2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal per tahun	816.957	825.127	833.378	841.712	850.129	858.630
2	Penataan Ruang						
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	75%	76%	77%	78%	79%	80%
2.2	Luas Wilayah Produktif (Ha)	251.077,70	251.077,70	251.077,70	251.077,70	251.077,70	251.077,70


KU RIZAL NURDIN


TNI AL

BAB 9
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013-2033 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Nomor, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

9.1. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Asahan. Dalam pelaksanaannya, ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 ini menjadi pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran;
2. RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 ini menjadi pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan.
3. RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 ini menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap OPD.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten sahan Tahun 2021-2026 kepada masyarakat Kabupaten Asahan.

9.2. KAIDAH TRANSISI

RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2026-2031 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dan mengacu pada RPJPD Kabupaten Asahan dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

BUPATI ASAHAN,

H. SURYA, B. Sc.



BAPPEDA KABUPATEN ASAHAN
www.bappeda.asahankab.go.id | 2021